Xpos

Bundel Vol. III

Edisi 27-39/Tahun I

Photo: Xpos

Teror & Kolusi ABRI

Harga
Rp. 10.000

Xpos

DI TIMTIM, PELURU MASIH MURAH

Diterbitkan oleh:
Komunitas Informasi Terbuka
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: **http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp**
PO.Box 22202 London SE5 8WU, United Kingdom

Ganti ongkos cetak Rp. 1000,- Terbit seminggu sekali

Akbar Tanjung, "Presiden Bayangan"

Diam-diam, Akbar Tanjung berperan besar dibalik langkah politik Habibie. Bagaimana peluangnya merebut Ketua Umum Golkar?

Si Kancil. Gelar itu cukup pas menggambarkan sosok Akbar Tanjung, 53 tahun, yang kini menjabat Menteri Sekretaris Negara. Tokoh satu ini dikenal sebagai politisi cerdik (sebagian orang bahkan menyebutnya licik) yang bisa menempatkan diri dalam kancah politik nasional. "Dia (Akbar Tanjung) termasuk tipe politisi opurtunis sejati," kata seorang pengamat politik. Lalu, ia membandingkan Akbar dengan Adam Malik — politisi yang berhasil menapaki karir politiknya hingga menjadi Wakil Presiden.

Perbandingan itu ada benarnya. Paling tidak, kedua politisi itu sama-sama berasal dari Sumatera Utara. Adam lahir di Siantar, sedangkan Akbar kelahiran Sibolga. Letak kedua kota itu berdekatan, dan relatif memiliki kultur politik yang sama. Sepak terjang Akbar di kancah perpolitikan juga tak kalah gesit dari Adam Malik.

Photo: Antara

Akbar mulai terjun ke politik saat menjadi mahasiswa Fakultas Teknik UI, akhir 1960-an. Saat itu, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), hingga menjadi ketua umum. Selepas itu, Akbar masuk Golkar. Di partai beringin ini, pelan tapi pasti, karir politiknya mulai bersinar. Dimulai sebagai anggota FKP DPR sampai menjadi Wakil Sekjen. Kelicinan Akbar tampak dari sikap politiknya yang selalu "menempel" di balik punggung orang kuat organisasi itu. Di masa kepemimpinan Sudharmono, misalnya, ia termasuk kelompok "lingkaran dalam". Begitu pula saat Golkar di pimpin Wahono dan Harmoko.

Bahkan, berkat kepiawaiannya bermain politik praktis, di SU MPR 1993 Akbar dipercaya sebagai floor leader Golkar, yang bertugas memimpin lobby-lobby untuk memuluskan jalannya persidangan. Salah satu "prestasi"nya kala itu adalah meredam interupsi Sabam Sirait — politisi senior PDI.

Potensi Akbar itu rupanya diamati Soeharto. Maka, pada Kabinet Pembangunan V nama Akbar tercantum sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Lalu, di kabinet selanjutnya ia diberi posisi Menteri Perumahan Rakyat (Menpera). Di Kabinet Pembangunan VII, yang hanya berusia dua bulan, Akbar juga diberi jabatan Menpera.

Demikian kuatnya pengaruh Akbar, sampai-sampai sekarang ia mendapat julukan baru: Presiden Dua Setengah.

Tapi, dasar kancil. Begitu melihat tanda-tanda kejatuhan Soeharto sudah dekat, Akbar segera berbelok arah. Ditengah maraknya demonstrasi mahasiswa yang menuntut Soeharto turun tahta, ia melakukan manuver politik tingkat tinggi. Caranya: membujuk sejumlah menteri agar menyatakan pengunduran diri. Manuver itu ternyata sukses, 14 menteri membuat pernyataan sikap pengunduran diri kepada Soeharto (menariknya, yang muncul ke permukaan pemimpin "kelompok pembelot" itu adalah Menko Ekuin Ginanjar Kartasasmita). Sehari kemudian, Soeharto pun turun tahta, digantikan Habibie.

Rupanya, diam-diam, selama ini Akbar sudah menjalin aliansi politik dengan Habibie. Karena itu, tak heran, ketika "Kabinet Reformasi Pembangunan" diumumkan, nama Akbar tercantum sebagai Mensesneg. Dengan menduduki pos penting itu, Akbar punya akses kuat mewarnai kebijakan dan langkah politik Presiden Habibie. "Habibie itu *kan* sebenarnya 'buta politik', karena itu gampang dibodohin Akbar dan konco-konconya," kata pengamat tadi.

Besarnya pengaruh Akbar itu pernah pula diungkapkan Emil Salim. Ceritanya, saat pertemuan dengan "Kelompok Enam" di Bina Graha beberapa waktu lalu, yang lebih banyak mengarahkan pembicaraan

Berita Pekan Ini

Adu Kuat Merebut Golkar ... 3
Penculikan Itu Sesuai Prosedur ... 4
Bob Hasan Kena Batunya ... 7
Damai, Pakpahan dan Ummat ... 9
Demo Buruh, Bedil Tentara ... 10
"Presiden Salah Tak Boleh Dituruti" ... 12

Golkar

Beringin tua itu sudah tumbang. Tapi masih saja ada orang yang mencoba menegakkannya. Bahkan dengan kasak-kusuk, bersaingan mencapai kursi tertinggi untuk mencoba menguasai Golkar. Ibarat memperebutkan pepesan kosong, bisa diduga orang-orang itu nantinya akan kecewa.

Kenapa usaha menegakkan Golkar itu akan sia-sia? Bukankah Golkar masih punya jaringan paling rapi dibanding partai-partai lain - apalagi partai baru yang muncul belakangan. Bukankah Golkar, masih punya segunung uang? Kalau saja, Ketua Dewan Pembina Golkar, Soeharto menggunakan uangnya untuk membeli suara nanti, orang memperkirakan perolehan Golkar masih akan lumayan. Bisa-bisa malah masih akan menang, kalau politik uang yang berbicara.

Tetapi, pesimisme tentang masa depan Golkar memang tak bisa ditutupi. Bekas Sekjennya sendiri, Sarwono, memperkirakan, kalaupun Golkar diperbaiki, perolehan suaranya tak akan lebih dari 20 persen. Kalau tak direformasi, dan tokohnya hanya sibuk bersaingan, bisa diduga Golkar akan makin ambles.

Kegagalan Golkar selama 32 tahun terakhir ini, sebetulnya sangat sederhana. Politiknya yang mengabaikan rakyat, dan memperlakukan rakyat hanya sebagai obyek pembangunan, memang membuat rakyat tak simpati. Belum lagi, cara-cara menangnya yang selalu curang, menyebabkan orang tak simpati. Hanya rekayasa yang membuat Golkar menang dalam pemilu-pemilu lalu. Golkar gagal merebut kepercayaan publik. Hilangnya kepercayaan rakyat itulah sesungguhnya, akar krisis yang mengantar Golkar ke ambang kehancuran.

Agaknya, rakayasa untuk merebut kembali kepercayaan, akan lebih sulit dilakukan. Sebab reformasi terlanjur membawa perubahan sikap masyarakat: untuk tidak menerima begitu saja keinginan penguasa. Seperti partai-partai komunis di Eropa Timur di penghujung dekade 80-an dulu, Golkar akan kehilangan dukungan drastis setelah Revolusi Mei. Hanya orang-orang tua yang ingin nostalgia sajalah pencoblos gambar Beringin nanti.

■ LUGAS

bukannya Habibie, tapi Akbar Tanjung. Demikian kuatnya pengaruh Akbar, sampai-sampai sekarang ia mendapat julukan baru: Presiden Dua Setengah. Maksudya, secara *de facto*, presiden pertama Indonesia sekarang ini masih Soeharto, sedangkan presiden keduanya Habibie. Sedangkan Akbar, karena akses pengaruhnya baru 50 persen, disebut presiden dua setengah.

Berkat "sentuhan" Akbar pula, Habibie tampil sebagai politisi yang populis. Itulah sebabnya, kini Habibie sering melakukan dengar pendapat langsung dengan rakyat kecil di pasar-pasar. Akbar pulalah sutradara dibalik langkah-langkah Habibie yang mencoba merangkul kekuatan politik oposisi. Antara lain, kunjungan Habibie ke rumah Ketua Umum NU, Abdurahman Wahid. Atau soal undangan yang dilayangkan ke Megawati Soekarnoputri, tapi kemudian ditolak.

Toh, Akbar belum puas. Kini, ia berambisi pula merebut kursi Ketua Umum Golkar. Untuk itu, Akbar melakukan manuver dengan memakai tangan Habibie. Misalnya, rencana pertemuan pimpinan tiga jalur di Mabes ABRI, Cilangkap, digagas oleh Akbar. Pilihan tempat itu merupakan manuver politik yang cerdik. Sebab, dengan begitu, Akbar berusaha "melibatkan" ABRI dalam upaya memuluskan upayanya merebut pucuk pimpinan Golkar. Sayang, manuver itu langsung dijegal Ketua Dewan Pembina Golkar: Soeharto.

Namun, ganjalan itu tak membuat Akbar patah semangat. Sebaliknya, ia terus menggalang dukungan kesana-kemari. Salah satu basis dukungan Akbar adalah para alumni HMI, yang kini menguasai ICMI. Disini kompanyon utama Akbar adalah Adi Sasono, Sekum ICMI yang juga Menteri Koperasi. Akbar juga membangun aliansi dengan "kelompok Ginanjar" dan kelompok purnawirawan ABRI yang masih loyal kepada Feisal Tanjung — mantan Panglima ABRI yang kini menjabat Menko Polkam.

Semua manuver politik itu dilakukan Akbar untuk memuluskan jalannya menjadi Ketua Umum Golkar. Dari sini, ambisi Akbar selanjutnya adalah mengisi kursi Wakil Presiden yang kini kosong. Bahkan, kabarnya, kalau situasi politik memungkinkan, Akbar ingin menjadi "orang kuat" di republik ini.

Tapi, bisa dipastikan, manuver-manuver Akbar tak akan mulus begitu saja. Para pesaing utamanya siap mengganjal manuver Akbar, seperti yang terjadi dalam perebutan Ketua Umum Golkar. Pesaing potensial lainnya, tentu saja, ABRI di bawah kepemimpinan Jenderal Wiranto. Bukan rahasia lagi, diam-diam Wiranto punya ambisi besar menjadi orang nomor satu di pemerintahan. ■

Politik Nepotisme Habibie

Presiden (transisi) BJ Habibie mulai unjuk gigi. Awal pekan lalu, ia mengumumkan recalling 41 anggota MPR. Diantara yang direcall tercatat nama sejumlah tokoh yang pernah malang melintang di pentas politik nasional. Antara lain, R. Hartono, Yogie S. Memet, Bob Hasan, dan Fuad Bawazier. Alasan resminya adalah "dalam rangka pergantian antar-waktu".

Sedangkan, isu tak resmi menyebutkan *recalling* itu berkaitan dengan pembersihan kaum Soehartois dari MPR. Memang tak semua yang di-*recall* adalah orang-orangnya Soeharto. Tapi, paling tidak, nama-nama yang disebut di atas bisa menjadi ganjalan bagi Habibie memuluskan jalannya SI MPR, yang rencananya akan digelar akhir tahun ini.

Dugaan pembersihan itu makin jelas terlihat dari daftar nama anggota baru MPR. Hampir separuh diantaranya berasal dari ICMI "mesin politik" Habibie. Antara lain tercatat nama Sayidiman Soerjohadiprodjo, Parni Hadi, dan Dewi Fortuna Anwar. Juga tercantum nama sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai pendukung setia Habibie, seperti Sintong Panjaitan (penasehat militer Habibie), Hariman Siregar (aktivis Malari), dan Fachry Ali.

Memang ada sejumlah nama yang selama ini dikenal "berseberangan" dengan kelompok Habibie. Misalnya, Marzuki Darusman (Wakil Ketua Komnas HAM) dan Tatto Prajamanggala (sesepuh Angkatan Muda Siliwangi). Tapi, susunan nama anggota baru MPR itu jelas tak memuaskan kalangan reformis. "Pergantian itu semata-mata untuk mengamankan kepentingan Habibie dan kelompoknya," kata seorang aktivis mahasiswa. Memang, tak satupun tokoh-tokoh penggerak reformasi ditawari Habibie masuk ke MPR.

Rupanya Bung Rudy belum sepenuh hati menjalankan reformasi politik. Malah gaya politik yang dilakukannya masih sebangun dengan gaya "profesor" politiknya: Soeharto. Penuh praktek nepotisme, korupsi, dan kolusi alias NKK. ■

Adu Kuat Merebut Golkar

Siapakah yang akan tampil di pucuk beringin: Akbar Tanjung atau Edy Sudrajad? Bagaimana prospek Golkar dalam pemilu mendatang?

Rakyat lapar boleh lapar, politik jalan terus. Itulah, agaknya, pikiran yang memenuhi otak para elit politik nasional. Buktinya, mereka terus asyik bersaing memperebutkan kursi kekuasaan. Yang kini memenuhi halaman depan surat kabar adalah perebutan Ketua Umum Golkar.

Agenda itu sebenarnya merupakan salah satu bagian Musyawarah Nasional Luar Biasa (MNLB) Golkar, yang rencananya akan digelar 9-12 Juli nanti. Tapi, sejak dua pekan lalu, kasak-kusuk politik sudah dimulai. Satu per satu faksi-faksi politik yang berambisi merebut pucuk pimpinan beringin pun muncul ke permukaan.

Photo: Istimewa

Sedikitnya, sampai saat ini, ada dua faksi politik yang saling bersaing. Masing-masing mendukung Akbar Tanjung dan Edi Sudrajad. Kedua faksi itu juga sudah melakukan manuver-manuver politik untuk menggolkan jagonya.

Pertarungan internal itu mulai mencuat saat Rakernas Golkar, awal Juni lalu. Saat itu, sejumlah pimpinan DPD Golkar secara terang-terangan menuntut Harmoko mundur dari kursi ketua umum. Sebagai penggantinya, 21 DPD mencalonkan Edi Sudrajad. Pertarungan itu berlanjut saat pembentukan panitia MNLB. Ketika itu "faksi Edi" yang didukung, antara lain, Bambang Trihatmodjo (Bendahara) dan Ary Mardjono (Sekjen), berhasil mengatasi "faksi Akbar" yang didukung Harmoko, Abdul Gafur dan Agung Laksono. Mereka berhasil menguasai kepanitiaan MNLB dengan memasukkan Waskito Reksosoedirjo sebagai Ketua Panitia, dan Ary Mardjono menjadi ketua panitia pengarah.

Namun, dengan cepat kubu Akbar melakukan serangan balik. Mereka, misalnya, mengedarkan isu bahwa Edi didukung para Soehartois. Tuduhan itu, bisa jadi, benar. Tapi, jangan lupa, Akbar dan konco-konconya juga pendukung setia Soeharto dimasa kejayaannya. Kubu Akbar, yang didukung Habibie, juga menjalian aliansi dengan kubu Ginanjar Kartasasmita. Agaknya, mereka ingin mengulangi sukses saat mendongkel Soeharto dari tahtanya (*lihat Akbar Tanjung, Presiden Bayangan*).

Pada 21 Juni lalu, misalnya, Akbar (selaku Sekretaris Dewan Pembina Golkar) dan Habibie (selaku Ketua Presidium Harian Dewan Pembina) mengundang rapat koordinasi tiga jalur ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar). Beberapa hari kemudian, giliran Ginanjar mengadakan rapat yang dihadiri 12 menteri "kabinet reformasi pembangunan" di rumahnya. Kedua rapat itu membahas manuver-manuver untuk menghempang jalan Edi.

Kubu pendukung Akbar juga merencanakan rapat koordinasi di Mabes ABRI, Cilangkap. Undangan rapat yang dilayangkan Habibie itu tak hanya mendatangkan pimpinan DPD, tapi juga pembina dari jalur A (Pangdam) dan jalur B (Gubernur). Di tingkat pusat, semua pengurus DPP ditambah Panglima ABRI dan stafnya. Mabes ABRI sengaja dipilih sebagai lokasi rakor, agar mengesankan ABRI mendukung kubu Akbar.

Tapi, manuver itu keburu dijegal di tengah jalan oleh Soeharto sendiri. Menurut Try Sutrisno, yang menyuarakan aspirasi Soeharto, rencana rapat koordinasi itu menyalahi prosedur karena tanpa pemberitahuan kepada Ketua Dewan Pembina. "Rakor itu jelas menyalahi prosedur. Karena itu, saya minta Pak Habibie untuk membatalkannya," tegas Try Sutrisno.

Try sendiri juga berambisi menjadi Ketua Umum Golkar. Kabarnya, ia sudah mendapat dukungan penuh Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) — organisasi yang sekarang diketuainya. Bahkan, Soeharto tampaknya lebih mendukung Try daripada Edi. Hubungan Edi dengan Soeharto, sejak lama memang kurang akur. "Ketika jadi menteri dulu, saya ini termasuk orang yang tidak disukai Soeharto," tegas Edi, sembari membantah pencalonannya di Golkar didukung para Soehartois.

Mantan Menhankam ini yakin menang dalam perebutan pucuk pimpinan Golkar. Sejumlah pendukung juga sudah merapatkan barisan di belakangnya. Antara lain: sejumlah purnawirawan ABRI dan organisasi masyarakat *onderbouw* Golkar, seperti Soksi dan Kosgoro.

Jadi, bisa dibilang, peta kekuatan antar kubu yang bersaing masih berimbang. Karena itu, bisa dipastikan pertarung di arena MNLB nanti akan berlangsung seru. Siapa pemenangnya, belum bisa dipastikan. Malah, belakangan isu yang beredar menyebutkan munculnya "kandidat kompromi", yaitu Muladi — yang kini menjabat Menteri Kehakiman.

Kabarnya, usulan calon kompromi itu disponsori ABRI, dengan syarat jabatan tersebut hanya sampai Sidang Istimewa MPR, akhir tahun ini. Akhir-akhir ini, ABRI tampaknya berupaya "menjaga jarak" dengan faksi-faksi politik yang saling bersaing. Tapi, disisi lain, juga mengakomodasi kepentingan faksi-faksi politik tersebut. "Saat ini, ABRI sedang memainkan politik dua kaki," kata seorang pengamat politik.

Terhadap Golkar sendiri, sebenarnya ABRI tak terlalu tertarik lagi. Karena citranya sebagai kekuatan politik rejim Soeharto, Golkar jelas tak efektif lagi dijadikan "kendaraan politik" di masa mendatang. Sarwono Kusumaatmadja, mantan Sekjen Golkar, dalam sebuah wawancara pernah menyatakan pesimis terhadap masa depan Golkar. Ia memperkirakan Golkar hanya mampu meraih 20 persen suara dalam pemilu nanti.

Kalau begitu, faksi-faksi politik yang bersaing di Golkar jangan-jangan hanya memperbutkan "pepesan kosong". ■

Penculikan Itu Sesuai Prosedur

Oleh: Wagianto Ariawan

Rahardjo Waluyo Jati, saat menceritakan kisah penculikannya di YLBHI, ditanya oleh salah seorang hadirin, "Mengapa Anda baru mengungkapkannya sekarang? Apakah karena Soeharto sudah mundur lalu Anda jadi berani?"

Jati yang seniman realis itu menjawab berputar, "Kalau kita bicara tentang Soeharto itu, Bung, kita tidak bicara *person* Soehartonya semata, melainkan Soeharto sebagai satu manifestasi rejim yang telah berkuasa selama tiga puluh tahun lebih,"

Jati benar. Apa yang dikemukakannya adalah bahwa manifestasi rejim Soeharto itu mengkristal dalam satu sistem berkuasa. Penculikan hanyalah fenomena, hanyalah akibat, hanyalah konsekuensi logis dari sistem yang merestuinya sebagai metode untuk meng-*gocoh* lawan politik.

Kita barangkali selama ini cuma melihat dari sudut pandang moral, bahwa penculikan itu jahat, bahwa penculikan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Tetapi kita jarang melihat penculikan (politik) itu sebagai produk dari suatu sistem kekuasaan. Sehingga apabila paradigma terakhir yang kita pakai, maka kita akan berkesimpulan "penculikan tidak akan hilang selama sistem kekuasaan yang merestuinya masih langgeng, ia hanya mengalami penghalusan metode".

Penculikan itu jelas sudah sesuai prosedur, yaitu bahwa korban tidak boleh sampai tahu wajah interogator dan di mana korban disekap. Korban hanya bisa menyimpulkan bahwa penculikan itu sangat profesional dan kira-kira penculik itu adalah personil ABRI. Hanya saja, kesesuaian prosedur belum tentu menjamin *output* selalu mulus. Pius Lustrilanang, meski langsung cabut ke Belanda, harus diacungi jempol karena dialah yang pertama kali berani bilang bahwa ia diculik. Maka prosedur yang ada menjadi kacau balau. Prosedur itu mengasumsikan bahwa sistem kekuasaan secara umum masih mampu membelenggu kebebasan berbicara.

Kacaunya prosedur penculikan aktivis tersebut mengindikasikan sistem kekuasaan yang mulai goyah. Namun bila upaya serangan balik terhadap penculikan hanya berhenti pada oknum penculik, atau bahkan siapa yang memerintah penculik, saya yakin problem penculikan tidak akan terpecahkan. Justru suatu saat sistem kekuasaan yang saat ini goyah akan mampu mengkonsolidasi diri. Dan penculikan sebagai metode yang direstui, akan "diperbaiki" prosedurnya.

Kalau kita mendamba penculikan politik ini hilang dari muka bumi pertiwi, maka sistem kekuasaan yang ada sekarang harus ditebas sampai ke akar-akarnya. Singkatnya, 40 serdadu dan perwira yang terlibat dalam penculikan bukanlah sekedar oknum, melainkan adalah representasi sistem kekuasaan yang berwatak militeristik. Oleh sebab itu, akar watak militeristik itu yang harus dicabut dari sistem kekuasaan yang notabene hidup dalam ruang politik. Angkatan bersenjata di manapun seharusnya menghindari (atau diusir dari) ruang politik, justru karena ia bersenjata. Konflik politik tidak akan bermuara pada demokrasi yang menjunjung *fair competition*, bila senjata kemudian dipakai sebagai kekuatan politik. Bukan berarti seorang Pangab tidak boleh jadi presiden, tetapi legitimasi kekuasaannya akan tidak bermakna demokratis bila ia ditopang oleh dominasi militer dalam kehidupan sosial politik.

Mengapa dominasi militer harus disodok keluar dari ruang politik? Pertama, ada aksioma politik bahwa semakin demokratis suatu lembaga kekuasaan berarti semakin nihilnya cara-cara represif dipakai untuk mengaplikasikan keputusan penguasa. Penguasa demokratis dalam sistem yang demokratis menggunakan prosedur yang demokratis pula untuk menghasilkan keputusan, sehingga keputusan politik yang dihasilkan merupakan kompromi maksimal yang *fair*. Kedua, sejatinya militer itu adalah alat negara yang berfungsi menjaga keamanan masyarakat bukan hanya di tingkat retorika tetapi juga pada dataran realita. Bila militer memasuki ruang politik, maka ia tak lagi bebas dari konflik kepentingan untuk memperebutkan kekuasaan politik dan kesejahteraan ekonomi.

Dalam isu penculikan yang menguat arus baliknya kini, agenda pembongkaran kasus orang hilang selayaknya didorong maju terus untuk mem-*belejeti* watak militeristik dari sistem kekuasaan yang dibangun oleh Rejim Soeharto (bukan Soeharto sebagai oknum!)

■ Wagianto Arianto, pekerja sosial

Kronik

WARTAWAN TEWAS

Sitto Halomoan Sipahutar, 27, wartawan Antara di Kaltim, tewas diseruduk mobil saat memperbaiki Vespanya di pinggir jalan, 13 Juni 1998.

Kecelakaan itu diduga rekayasa yang didalangi seorang calon Gubernur Kaltim. Sitto sedang menyelidiki perselingkuhan calon gubernur itu dengan sekretarisnya. Mobil yang menabrak Sitto, dikabarkan milik Barito Pacific, kelompok usaha yang mensponsori calon gubernur itu.

UU ANTI DEMO

ABRI mengajukan rancangan UU yang mengatur demonstrasi. Dalam draft itu, demonstrasi yang melibatkan lebih dari 100 orang harus minta izin polisi tiga hari sebelumnya.

Dikhawatirkan, aturan tentang izin itu hanya akan jadi alat untuk menghambat hak rakyat berdemonstrasi. Ini, agaknya tidak sesuai dengan semangat reformasi.

MATI DI IRIAN

Kekerasan terjadi lagi di bumi Irian, 2 Juli lalu. Seorang mahasiswa dikabarkan tewas akibat terjangan peluru tentara. Kematian mahasiswa ini, diperkirakan akan memicu gejolak demo baru di propinsi paling Timur Indonesia itu. Kapan ABRI belajar dari kesalahannya?

DAPATKAN
BUNDEL XPOS VOL. II
(No. 14 - No. 26/I/1998)

HARGA Rp. 15.000

PERSEDIAAN TERBATAS

Kredit Untuk Si Miskin

Adi Sasono sediakan dana KLBI Rp 15,1 trilyun untuk pelaku ekonomi kecil dan menengah. Hati-hati, jangan hanya untuk teman sendiri.

Siapa tak pusing kepala menghadapi krisis kali ini? Sudah berbagai macam cara dilakukan untuk "menghidupkan" kembali perekonomian tetapi tetap tanpa hasil. Perbankan yang sekarat, menyebabkan bunga pinjaman melonjak setinggi langit. Para pengusaha jadi enggan meminjam. Apalagi, kebanyakan industri di sini banyak bergantung pada bahan baku impor yang harganya kini amat mahal. Bukan untung yang bisa didapat dari kondisi yang begini, justru bisa buntung.

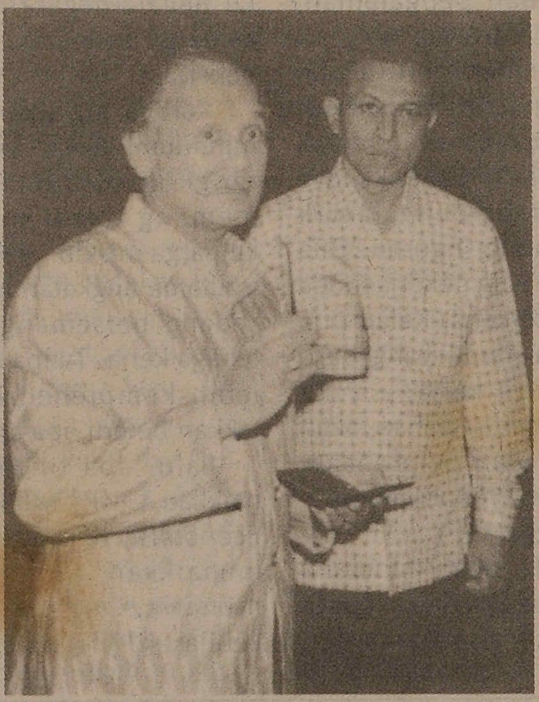

Tak bisa tidak, mesti ada terobosan kebijakan untuk menggerakkan perekonomian. Itu sebabnya, Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Adi Sasono, mencanangkan skema kredit untuk pengembangan koperasi serta pengusaha kecil dan menengah sebesar Rp.15,1 trilyun dengan bunga yang rendah — 14 hingga 16% per tahun. Uang sebesar itu merupakan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Pengusaha kecil dan menengah memang lebih didahulukan, dengan pertimbangan usaha mereka yang banyak bergerak di bidang pertanian tak terlalu bergantung pada bahan impor. Selain itu, mereka diharapkan bisa membantu mengatasi masalah kesulitan pangan.

Sepertinya, begitu mudah rencana itu dilakukan. Namun, tentu saja tak demikian halnya. Persoalannya, dengan memberikan bunga kredit yang rendah, itu artinya pemerintah harus mensubsidi bunga tersebut dan mencatatnya sebagai pengeluaran dalam APBN pada tahun berjalan ini. Dengan menetapkan bunga hanya belasan persen sedangkan bunga komersial saat ini sekitar 50%, bayangkan betapa besar yang harus disubsidi.

Jelas ini merupakan pemborosan. Padahal, semua orang tahu pemerintah sedang kesulitan dana, bahkan sekedar untuk membayar gaji pegawai negeri sekalipun. Dikhawatirkan, Perum Peruri yang dikabarkan kini bekerja tiga *shift* sehari, akan terus melakukan pencetakan uang. Yang akibatnya, perkiraan inflasi sebesar 80% pada akhir tahun ini akan menjadi lebih tinggi lagi. Bila demikian, rakyat kecil juga yang akhirnya menjadi makin susah.

Lalu, apakah kebijakan ini lagi sebuah kesalahan? Tak pelak lagi, Adi Sasono menjadi sasaran kritik pedas dari kalangan ekonom. Namun, mantan aktifis LSM ini rupanya bersikukuh dengan kebijakannya. Menurutnya, ia bukan tidak tahu dengan konsekuensi dari kebijakan yang ditempuhnya. Meskipun itu merupakan pemborosan, tapi tujuannya untuk membangkitkan perekonomian rakyat. Baginya, kebijakan itu masih lebih baik daripada memberikan dana lebih dari 120 trilyun pada bank-bank bermasalah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dalam pandangan Adi, pemborosan akan terus terjadi dalam situasi seperti sekarang. Tapi, bila disuruh memilih, ia lebih cenderung memilih pemborosan uang negara untuk kepentingan rakyat daripada untuk kepentingan konglomerat-konglomerat pemilik bank yang menjadi penyebab awal terjadinya krisis ekonomi — karena utang-utangnya yang luar biasa besar dan tidak dipergunakan secara bijaksana.

Adi mengalokasikan Rp400 milyar bagi petani penggarap dalam bentuk kredit usaha tani (KUT) untuk meningkatkan penghasilan mereka. Penerima kredit ini bisa memanfaatkan sekurang-kurangnya 25% dari luas areal tanah. Dalam perkiraannya, bila terdapat 11,4 juta hektar lahan pertanian, maka dalam dua musim tanam ini diharapkan bisa ditanami areal seluas 2,68 juta hektar. Jika pemilikan rata-rata areal tanah seluas tiga hektar, program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kerja pada lebih dari 7 juta petani penggarap, termasuk keluarganya.

Adi berandai-andai, seandainya program ini sukses, 37 juta pekerja pertanian beserta keluarganya akan terselamatkan. Selain bisa menghemat biaya mengimpor pangan. "Pendapatan mereka juga akan meningkat, sehingga daya beli meningkat, yang pada gilirannya akan merangsang produksi massal dan memutar ekonomi nasional tatkala sektor modern terlelap akibat ketergantungan pada impor," ungkap Adi seperti dikutip *Kompas*.

Masalahnya lagi-lagi, tentu tak semudah itu. Yang dikhawatirkan banyak pihak, tanpa transparansi, skema KLBI ini akan jatuh ke pengusaha kecil di lingkaran kekuasaan. "Jangan-jangan yang dapat kre-dit orang-orang dekat Adi sendiri," kata aktivis LSM.

Kendati petani bisa berproduksi, tidak mudah memasarkan produknya. Selama ini, jalur distribusi yang tak lancar merupakan persoalan nyata yang menyulitkan tidak saja petani, tapi juga konsumen. Petani tidak mendapatkan harga yang layak dari penjualan produknya, demikian juga konsumen yang membeli dengan harga yang mahal. Selama ini, diketahui biaya distribusi di Indonesia mencapai 17-20%, padahal di negara-negara lain hanya 7 hingga 11%. Distributorlah yang mengambil keuntungan terbesar.

Sekiranya tidak ada perubahan dalam jalur distribusi ini, akan sia-sia saja penyaluran kredit pada petani. Sebab, distributor yang kembali akan mengambil keuntungan — bahkan bisa melakukan penimbunan.

Mengenai hal ini, Adi berpendapat, jaringan warung dan kelompok-kelompok swadaya masyarakatlah yang akan diberdayakan untuk melakukan peran distribusi. Tinggal sistemnya yang harus lebih terfokus dan jaringannya harus lebih terintegrasi.

Soalnya kini, jalur distribusi yang ada selama ini, ternyata merupakan jalur yang didukung oleh perusahaan-perusahaan penanaman modal asing (PMA). Bila mereka digusur, tentu akan muncul masalah baru. Karena itulah, muncul pemikiran untuk menciptakan jalur distribusi baru tanpa menggusur mereka yang sudah lama ada. Dengan begitu, para pengecer bisa berhubungan langsung dengan petani, warung serba ada ataupun pusat distribusi (*distribution center*) bentukan pemerintah.

Nah, mungkinkah jalur distribusi baru ini takkan menjadi pemonopoli dan sumber masalah baru — yang dikuasai orang-orang dekat penguasa baru? Tanpa ada peraturan perundangan baru, tampaknya niat Adi Sasono belum bisa jadi terobosan baru. Apalagi kalau prakteknya hanya akan menguntungkan teman-teman dekat sendiri. ■

UMR Naik, Pengangguran Naik

PKenaikan UMR terlalu kecil dibanding inflasi. Bisa-bisa malah banyak pekerja yang akan terkena PHK.

Tak ada kegembiraan yang tergambar di wajah para pekerja, awal Juli ini. Padahal, pemerintah melalui Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan Depnaker Mohammad Syaufi Syamsuddin baru saja mengumumkan kenaikan upah minimum regional (UMR) sebesar 15%.

Bagi para buruh, kenaikan itu memang tidak berarti apa-apa. Sebab, sampai periode Januari-Juni tahun ini saja, inflasi sudah melonjak tiga kali lipat kenaikan UMR, sebesar 46,55%. Seorang ketua FSPSI di Jawa Tengah, mengatakan kenaikan UMR akan menjadi berarti bila ditambah penyesuaian dengan laju inflasi. Seorang pekerja dengan ketus mengusulkan kenaikan sebesar 100%.

Beberapa pekerja malah ada yang menyambut sinis kebijakan baru itu. Dalam pandangan mereka, kenaikan gaji ataupun upah selalu saja memicu kenaikan barang-barang. Jadi, kendati inflasi sudah sangat tinggi, akan makin parah lagi dengan berita kenaikan UMR ini. "Jangankan ada kenaikan UMR, dalam kondisi biasa-biasa saja, sering kali harga barang sudah gila-gilaan," ungkap seorang buruh pabrik tekstil seperti dikutip *Kompas*.

Dengan kenyataan seperti ini, kiranya patut dipertanyakan tujuan pemerintah menaikkan UMR. Sebab, jangan-jangan kenaikan ini justru menambah lagi beban pekerja akibat akan kembali melonjaknya harga-harga barang melebihi UMR baru. Dirjen Binawas sendiri mengakui, keputusan itu merupakan pilihan yang sulit dan dilematis. Pasalnya, di satu sisi banyak perusahaan yang mengalami kesulitan sebagai dampak langsung krisis ekonomi. Sementara pada sisi lain, daya beli pekerja terus merosot tajam karena naiknya berbagai harga barang-barang.

Kalau pemerintah bertujuan ingin mendorong daya beli pekerja dengan kebijakan itu, agaknya niatan ini pun patut dipersoalkan. Sebuah penelitan internasional yang dilakukan oleh sekelompok negara maju yang tergabung dalam *Organizaton for Economic Co-operation and Development* (OECD), menemukan kenyataan menarik: kenaikan upah minimum bisa menyebabkan meningkatnya angka pengangguran.

Dalam studi yang baru dirilis dua minggu lalu itu — berdasarkan data yang dikumpulkan sejak tahun 1975 hingga 1996 dari Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Spanyol dan Belanda — ditemukan bahwa kenaikan 10% dari upah minimum mengurangi 2 sampai 4% pekerja usia muda, baik di negara yang upah minimumnya tinggi maupun rendah.

Para pekerja berusia di bawah 25 tahun yang umumnya hanya memiliki sedikit kepandaian dan pengalaman, adalah yang paling pertama terkena dampak. Bila manajemen perusahaan disuruh menaikkan upah minimum dengan budget yang pas-pasan, tentulah mereka akan lebih rela memberikannya pada pekerja senior berpengalaman ketimbang pekerja muda ingusan. Bila terjadi upaya efisiensi, para pekerja muda akan paling pertama terkena. Kalau pun tidak, angkatan kerja muda yang baru memasuki pasar tenaga kerja — yang jumlahnya senantiasa bertambah —, akan sangat sulit terserap oleh perusahaan-perusahaan. Inilah penyebab meningkatnya angka pengangguran.

Temuan lain OECD, upah minimum ternyata tidak berarti apa-apa dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan ketidakadilan. Padahal, selama ini, banyak ekonom meyakini upah minimum bisa mengatasi kesenjangan pendapatan atas dasar usia dan perbedaan kelamin. Upah minimum hanya akan efektif mengurangi kemiskinan, bila terdapat sejumlah besar keluarga miskin yang memiliki pekerja dengan upah yang rendah. Dengan begitu, kenaikan upah minimum akan bermanfaat bagi keluarganya.

Sayang, kenyataannya tidak demikian. Di Amerika Serikat saja, di keluarga-keluarga yang memiliki penghasilan kurang dari separuh penghasilan rata-rata keluarga, hanya 33% orang dewasanya yang bekerja dengan pendapatan rendah. Di Belanda 13%, dan di cuma Inggris 5%. Di negara-negara miskin, di keluarga-keluarga miskinnya, hampir tak ada yang bekerja.

Karena itu, jika hanya dengan upah minimum, jangan bermimpi bisa mengurangi kemiskinan. Upah minimum memang dapat menolong beberapa keluarga miskin. Namun, juga menyakiti, terutama angkatan kerja usia muda yang sedang bersemangat memasuki pasar tenaga kerja. Tanpa ada pendekatan yang lebih komprehensif, sepertinya UMR takkan berarti apa-apa.

Lalu, apa tujuan pemerintah menaikkan UMR? Mungkin benar kata *The Economist*, dalam kacamata politik upaya menaikkan upah minimum memang menarik, namun dalam kacamata kebijakan, "nanti dulu..." ■

Miskin Seperti 1976

Angka penduduk miskin bisa mencapai 100 juta jiwa. Pembangunan 20 tahun, hasilnya kembali ke titik nol.

Sekian lama dianggap sebagai stempel kesuksesan pembangunan Orde Baru, Biro Pusat Statistik (BPS) kini mulai berani "terbuka". Hal yang cukup menggembirakan. Sayangnya, kegembiraan itu tak dapat dirayakan. Pasalnya, data-data yang dirilis BPS di era "keterbukaan" ini, justru menyedihkan: sampai akhir Juni tahun 1998, jumlah penduduk miskin Indonesia telah mencapai 79,4 juta orang. Setara dengan 39,1% dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 202 juta jiwa.

Dikemukakan pula bahwa jumlah penduduk miskin saat ini hampir sama dengan penduduk miskin pada tahun 1976. Sebuah kemunduran hebat — lebih dari dua dekade. Malah, diperkirakan pada akhir tahun ini, angka tadi masih akan melonjak hingga 95,8 juta orang.

Tingginya angka kemiskinan ini, tak pelak lagi merupakan akibat dari krisis ekonomi dan politik yang telah berlangsung hampir sepanjang tahun ini. Bila dihitung sejak tahun 1996, secara absolut penduduk miskin saat ini telah bertambah 56,9 juta orang. Melonjak 3,5 kali lipat dari angka 22,5 juta orang — 11,3% dari jumlah penduduk saat itu — di tahun 1996. Jelas peningkatan kemiskinan ini imbas dari krisis.

Menurut Kepala BPS Sugito, kalau pada tahun 1996, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 3,7% dibandingkan tahun 1993, maka kini penduduk miskin meningkat 19,1% dari angka pada tahun 1996.

Perkiraan ini diperoleh melalui angka-angka indikator makro yang tersedia di BPS. Untuk menentukan penduduk miskin

ini didasakan pada batas garis kemiskinan dengan perhitungan pendapatan per kapita per bulan Rp52.470 untuk penduduk perkotaan dan Rp41.588 untuk penduduk pedesaan.

Dengan menggunakan standar garis kemiskinan seperti itu, diketahui pula bahwa penduduk miskin di perkotaan pada pertengahan tahun ini sudah mencapai 22,6 juta orang. Atau, 28,8% dari jumlah penduduk perkotaan. Sementara penduduk miskin di pedesaan lebih gawat lagi: mencapai 56,8 juta orang atau 45,6% dari penduduk pedesaan.

Sebetulnya, apa yang diungkapkan oleh BPS ini sudah bukan hal baru terutama bagi para ekonom kritis. Sudah banyak perkiraan maupun angka tak resmi yang beredar di antara mereka. Data BPS menjadi menarik, justru karena inilah untuk pertama kalinya data "yang tak menyenangkan" mengenai kondisi Indonesia dikemukakan oleh sebuah lembaga resmi pemerintah.

Beberapa waktu lalu, kepada media ini, ekonom Faisal Basri mengatakan bila harga pangan naik 25%, maka jumlah penduduk miskin akan naik dua kali lipat lebih (kenyataannya, hingga kini, kenaikan harga bahan pangan seperti susu dan minyak goreng sudah lebih dari itu). Seandainya harga pangan naik 50%, jumlah orang miskin naik dua setengah kali lipat, yaitu dari 22,5 juta menjadi 78,1 juta jiwa. Sedangkan bila harga pangan naik dua kali lipat atau sebesar 100%, jumlah orang miskin membengkak menjadi 118,5 juta jiwa atau 60,6% dari jumlah penduduk Indonesia.

Menurut Faisal, gambaran tersebut bukan sekedar pengandaian, tapi sudah menjadi kenyataan. Malah menurutnya, "gambaran kasar kemiskinan dewasa ini sudah lebih buruk dibandingkan ketika rezim Soeharto mulai berkuasa."

Kalau menggunakan pendekatan pendapatan per kapita, dengan kurs rupiah sebesar Rp9.000 per dolar AS saja, diperkirakan pendapatan perkapita cuma akan sebesar 228 dolar AS. "Lebih rendah dari Bangladesh," ujar Faisal. Apalagi dengan kurs sekarang yang berkisar antara Rp14.000 hingga Rp15.000 per dolar AS. Itupun dengan perhitungan yang menggunakan model GDP (*Gross Domestic Product*), yang ikut menghitung penghasilan orang asing yang bekerja di Indonesia. Bila menggunakan model GNP (*Gross National Product*), seperti yang diterapkan di Amerika Serikat, angka yang diperoleh bisa lebih kecil lagi.

Perhitungan tentang angka kemiskinan yang menyeramkan ini, memang tak mengenakkan untuk didengar. Namun, ini masih lebih baik daripada "di-*ninabobo*-kan" dengan angka-angka palsu. Bersiaplah untuk masa lebih sulit. ■

Bob Hasan Kena Batunya

Ia diperiksa Kejaksaan dan dicekal. Bob diduga mengkorup dana Apkindo Rp 500 milyar. Ia kunci mengorek harta Soeharto.

Nasib memang sering tak terduga. Ketika Soeharto jaya, Bob Hasan adalah salah seorang kepercayaan presiden. Ia malang melintang di dunia bisnis, dengan kekuasaan hampir tanpa batas. Ia ditakuti pengusaha lain. Walaupun kebijakan bisnisnya merugikan, orang tak berani menolak. Kini, setelah Soeharto jatuh, Bob tampak harus ikut menanggung dosa politik dari rezim patronnya. Bisa jadi, Bob akan diseret ke pengadilan lebih dulu dari tuannya.

Pemeriksaan terhadap Bob, teman main golf Soeharto itu, dimulai di Kejaksaan, Jum'at, 3 Juli lalu. Bob diminta keterangan karena diduga menyelewengkan dana sebesar Rp 500 milyar yang dikutip selama ia menjadi Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo). "Dia dipanggil sehubungan dengan kasus dana Apkindo," kata Antonius Suyata , Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus). Bob, raja hutan yang menguasai jutaan hektar HPH itu, dipe-riksa oleh tim jaksa, yang diketuai Kepala Pusat Operasi Intelejen (Kapus Opsin) Kejagung, Sudibyo Saleh selama tiga jam.

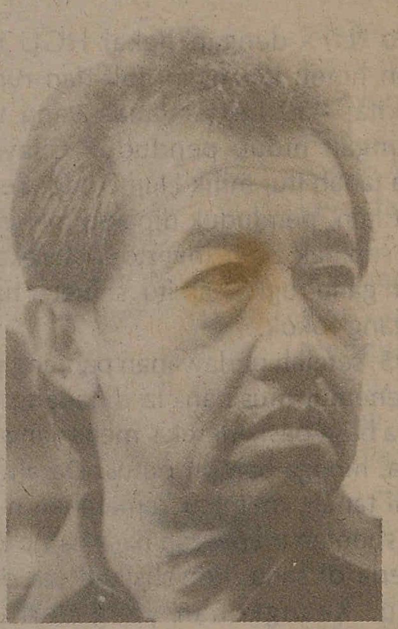

Tudingan korupsi itu muncul karena kegiatan Bob "memalaki" pengusaha kayu lapis sebesar 5-10 dollar untuk tiap meter kubik ekspor kayu lapis. Dana itu, katanya untuk biaya promosi dan dana reboisasi. Tetapi, pemanfaatannya tak pernah transparan dan tak ada pertanggungjawaban. Apalagi ekspor kayu lapis dari Indonesia sudah memiliki pasar yang tetap di Jepang, sehingga hampir tak dibutuhkan biaya promosi. Selama 10 tahun, Bob memungut uang preman dari para pengusuaha kayu lapis itu, tanpa pertanggungjawaban. Kini, setelah patronnya ambruk, orang yang dirugikan bisa leluasa menuntut Bob Hasan.

Kejaksaan, rupanya tak main-main dalam menggugat Bob. Meski belum dikeluarkan status tersangka, pengusaha yang juga bos Majalah *Gatra* ini, telah dilarang bepergian ke luar negeri. Dirjen Imigrasi, Pranowo, telah menerima permintaan untuk mencekal Bob, yang juga bekas Menteri Kehutanan dalam Kabinet Pembangunan VII itu, bersama puluhan bankir lain. Agaknya, keleluasaan Bob yang biasa ia dapat dari kedekatannya dengan Soeharto, memang sudah hilang - seiring dengan ambruknya Orde Soeharto, 21 Mei lalu.

Ada dugaan cukup kuat, pemeriksaan terhadap Bob akan berkembang ke arah lain, yakni menyangkut peranannya dalam menjalankan usaha Soeharto. Meskipun, Jaksa Agung yang baru, Andi Ghalib, tak sekeras pejabat yang digantinya — Soejono Atmonegoro — gerilnya dari tim kejaksaan untuk memeriksa harta Soeharto tetap berjalan. Bob Hasan bisa menjadi pintu masuk yang efisien untuk mengetahui sepak terjang bisnis bekas presiden RI itu. "Selama ini kan yang menjalankan bisnis Soeharto memang Bob. Jadi, dia mestinya tahu rahasia bisnis Cendana," tutur seorang pengusaha.

Kabarnya lima yayasan presiden — antara lain Yayasan Supersemar, Dakab, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Harapan Kita — sedang diperiksa tim ahli keuangan dari Kejaksaan Agung. Auditing itu direncanakan selesai dalam empat bulan, hingga waktu itu bisa dipastikan apakah yayasan pimpinan Soeharto mempraktekan NKK atau tidak. Saat yang sama, Jum'at ini, Presiden Transisional Habibie, mencabut semua kepres dan inpres tentang sumber pendanaan yayasan. Artinya, fasilitas khusus seperti yang dimilik Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila untuk memotong gaji pegawai negeri, mulai sekarang ditiadakan.

Pemeriksaan terhadap Bob Hasan, akan memudahkan Kejaksaan Agung mengetahui penggunaan dana yayasan-yayasan presiden; sebab selama ini dia memang operator mesin uang presiden. Yayasan-yayasan Soeharto itu antara lain mengusahai 80% saham PT Nusamba yang bergerak di berbagai bidang bisnis. Perusahaan itu juga membeli saham PT Astra International, PT Freeport dan masih banyak lagi.

Jadi, setelah Bob, kapan patronnya diperiksa? ■

Haji Dodo

Oleh: Siti Anisa

Nama Haji Dodo mungkin tak lagi tertera dalam ingatan kita. Media massa memang pernah ramai menulis namanya awal 1993. Tetapi itu terjadi bukan karena dia tokoh atau orang penting. Dia hanya seorang korban. Dan, tragisnya, seorang korban yang lama-lama dilupakan. Haji Dodo, kini hanyalah seorang kakek tua yang terlentang di kamarnya yang muram - dengan luka bacok yang hampir memutus pergelangan tangan kirinya. Lima tahun setengah, ia menahan nyeri. Sendirian. Luka itu tak kunjung sembuh.

Haji Dodo adalah korban kolusi penguasa dan pemilik modal. Persekongkolan kekuasaan yang sombong, tanpa kompromi menggusur petani dari tanah mereka. Bertempat di Desa Cijayanti, Bogor, Haji Dodo dan ratusan keluarga petani lain, menderita karena kesewenang-wenangan itu. Kisah serupa, agaknya juga dialami oleh jutaan rakyat kecil yang menderita di masa Orde Soeharto.

PT Light Instrumenindo (LI) - dengan bekal HGU yang diberikan BPN - mendirikan hotel, lapangan golf dan rumah-rumah mewah, di atas sekitar 450 hektar tanah yang telah berpuluh tahun jadi gantungan hidup penduduk Cijayanti. Delapan ribu meter diantara tanah itu, milik Haji Dodo. Seperti juga penggusuran di tempat lain, penduduk dipaksa menerima ganti rugi yang ditetapkan sepihak oleh investor. Mereka tak berdaya menawar, walaupun ganti rugi tanah itu, semeter hanya cukup untuk membeli sebatang rokok.

Suatu pagi, 7 Januari 1993, setelah perlawanan panjang yang melelahkan, Haji Dodo, menemui musibah. Ia dihadang oleh centeng-centeng PT LI. Tanpa basa-basi, mereka menerjang Haji Dodo. Membabat tangannya, hingga hampir putus. Darah Haji Dodo mengucur membasahi tanah, memicu kemarahan massa di Cijayanti. Ratusan orang, spontan menyerbu base camp PT LI dan membakar peralatan kerja di sana. Perselisihan tak dapat diselesaikan. Jalan buntu. Keangkuhan yang berkuasa berhadapan dengan amarah massa.

Insiden itu, berbuntut dengan represi terhadap aktivis mahasiswa yang berbulan-bulan sebelumnya setia mendampingi petani. Salah seorang aktivis mahasiswa yang teguh pendiriannya - Dedi Ekadibrata — diseret ke pengadilan, dan dituduh mengipasi petani supaya membakar base camp PT LI. Ia divonis 18 bulan oleh pengadilan yang sama sekali tak adil. Sengketa tanah Cijayanti, tak hanya merenggut korban fisik di kalangan petani; tetapi juga mengerangkeng jiwa-jiwa merdeka dari anak-anak muda yang satu-satunya impian mereka hanyalah membantu masyarakat tertindas keluar dari belenggu. Niat baik telah diganjar dengan sel penjara. Orde Baru menutup pintu untuk suara lain, yang sebetulnya amat dibutuhkan untuk mengoreksi kelemahannya.

Krisis-krisis kecil semacam itulah, yang sesungguhnya setiap hari terjadi dan menggerogoti fondasi rezim Orde Soeharto. Rezim yang selama 32 tahun dianggap begitu kokoh, tetapi sebetulnya rapuh dari dalam. Ia mengandung berbagai penyakit tak tersembuhkan, karena enggan diobati, enggan dikritik. Hingga kejatuhannya yang dramatis lewat Revolusi Mei lalu, rezim Soeharto adalah rezim kepala batu yang gengsi mendengar suara rakyatnya sendiri.

Kini angin reformasi berhembus kencang. Menembus bukit-bukit sejuk di Cijayanti. Membangunkan semangat petani yang pernah putus asa, karena didera kekalahan. Kini mereka bangkit lagi menuntut hak. Bukan hanya berdemonstrasi ke BPN, sekitar 150 kepala keluarga juga membentuk koperasi tani. Mereka ingin tanah mereka dikembalikan kepada koperasi itu. Secara bersama-sama mereka akan mengelola tanah pertanian itu, kembali menjadi gantungan hidup. Janji kredit usaha tani yang rendah bunganya, juga masuk ke telinga mereka dan dinanti dengan harap.

Apakah harapan Haji Dodo dan kawan-kawannya itu bakal terwujud? Agaknya, masih sulit ditebak. Tetapi, setidaknya kali ini, harapan jauh lebih besar dibanding lima setengah tahun lalu.

PT LI - seperti juga pengembang rumah mewah dan lapangan golf lainnya - kini menghadapi masalah serius. Diterpa gelombang badai moneter, mereka kelimpungan membayar utang. Iklan yang buruk tentang cara-cara mereka mengambil alih tanah, ikut menyurutkan langkah pembeli. Rumah-rumah mewah itu kosong melompong. Hotel yang megah, bertengger di atas bukit, bak rumah hantu yang jarang dihuni. Dan, lapangan golfnya sepi pengunjung. Karena para pegolf tak enak hati bersukaria di atas tangis petani Cijayanti.

Tak ada alasan PT LI untuk berkeras hati mengabaikan tuntutan petani. Toh, banyak tanah yang mereka ambil-alih dulu, sampai sekarang dibiarkan terlantar. BPN mestinya lebih tanggap dan akomodatif terhadap keinginan petani untuk kembali memiliki tanah mereka. Bukankah, krisis pangan dan kelaparan diperkirakan bakal terjadi? Dan, petani Cijayanti telah merasakan itu. Mereka terpaksa mengkonsumsi singkong dua kali sehari. Beda jauh dengan lima setengah tahun lalu - ketika mereka masih bisa bertani dan mengkonsumsi nasi.

Dari beranda rumah Haji Dodo, hotel mewah milik PT LI itu bisa dilihat jelas. Seperti sosok hantu yang menakutkan. Tapi juga membangkitkan iba. Kenapa kita bisa membiarkan kebodohan begitu telanjang terjadi? Pembangunan semu, yang akhirnya gagal, sementara korban telah berjatuhan karenanya. Kenapa dibiarkan?

Haji Dodo tidak mengeluh. Ia menahan sendirian nyeri luka di pergelangan tangannya. Lima tahun setengah, betobat jalan. Tak jarang harus menahan panas dingin badan karena infeksi. Ia berharap, suatu hari akan sembuh. Tetapi, otot-otot tuanya tak mampu lagi merekat luka yang terlalu dalam. Berbeda dengan lima setengah tahun lalu, sekarang ia rela pergelangan tangannya itu diamputasi. Tak ada jalan lain. Daya tahan, memang ada batasnya.

Janganlah pengorbanan Haji Dodo dilupakan.

■ Siti Anisa, jurnalis

Seruan Kopham !

Haji Dodo akan dirawat kembali di Rumah Sakit PMI Bogor, mulai Senin 13 Juli. Rencananya, tangan kiri H Dodo akan diamputasi Rabu 15 Juli 1998. Kami meminta dukungan Anda sekalian, agar proses itu berjalan selamat. Bagi yang ingin membantu meringankan biaya perawatan ini, bisa mengirim ke rekening Kopham:

BNI 46 Cab. Bogor
No rek : 061 - 000 - 180753911

Komite Pembela Hak Asasi Manusia (Kopham)

Damai, Pakpahan dan Ummat

Muchtar akhirnya damai dengan majalah Ummat. Ia minta maaf kalau ucapannya merugikan ummat Islam..

Jumat pekan lalu, Muchtar Pakpahan, Ketua SBSI meneken kesepakatan dengan majalah *Ummat*. Didampingi pengacaranya, Mochamad Assegaf, pertemuan Muchtar dan Ummat itu mengakhiri silang sengketa tentang ucapan Muchtar yang dianggap mendeskreditkan ICMI.

Muchtar Pakpahan, tokoh buruh Internasional yang kondang seantero jagat, memang sempat jadi target serangan sebagian aktivis Islam. Ternyata, bebas dari penjara Orde Baru, bukan berarti bebas dari ketakutan dan tuduhan baru baginya.

Muchtar Pakpahan, yang baru bebas dari penjara Cipinang, Jakarta Timur, sebulan lebih yang lalu itu dituduh sebagai orang yang benci ICMI dan ummat Islam di Indonesia. Berbagai selebaran beredar, mengungkit-ungkit tuduhan lama sebagai anak dari seorang PKI, menuduhnya anti Islam, bahkan ada spanduk ancaman membunuh Pakpahan. Teror telepon terhadap isteri dan anaknya juga terjadi, seperti yang pernah ia dan sekeluarga rasakan saat Soeharto berkuasa dulu.

Dilepaskan pemerintah Habibie — yang sedang mendapat tekanan dunia internasional — dari penjara, bukan membuat Pakpahan diam. Ia tetap kritis, antara lain ia minta *Internasional Monetary Fund* (IMF) menunda kucuran dana, sampai jelas dana itu akan disalurkan kemana dan siapa yang bertanggung jawab. Bahkan Pakpahan menyerukan mogok nasional sampai Habibie melakukan reformasi total. Muchtar menuntut percepatan Sidang Istimewa MPR, dilepaskannya seluruh tahanan dan narapidana politik tanpa kecuali dan gerakan lainnya yang dirasakan membahayakan posisi pemerintah transisoanal Habibie.

Serangan pada Muchtar datang bertubi-tubi dua hari setelah Muchtar bertemu dengan Kepala Badan Intelejen ABRI (BIA), Mayor Jendral Zacky Makarim. Apalagi kabarnya, Muchtar pendukung berat bekas wakil Presiden Try Sutrisno. Tentu saja melihat ada peluang untuk diserang, berbagai kelompok kepentingan mengeroyok Pakpahan.

Keroyokan itu bertambah seru dan memperoleh peluang, karena Muchtar *slip of tounge*, soal fundamentalisme Islam saat konprensi pers di Jenewa, 8 Juni lalu, dan soal ICMI saat wawancara dengan Majalah *Ummat*. Lucunya pengeroyok ICMI juga datang dari Idrus Markam, orangnya Tutut dan Basofi Sudirman, yang memakai 'jaket' Badan Koordinasi Remaja Masjid Indonesia (BKRMI).

Kelompok penyerang Pakpahan lainnya datang dari kelompok Komite Indonesia Solidaritas Dunia Islam (KISDI) dibawah Achmad Sumargono dan Abdul Qadir Djaelani. Kedua orang ini, kabarnya dikenal sebagai pelaksana lapangan untuk mewujudkan keinginan politik sang mantu bekas Presiden Soeharto, Letnan Jendral Prabowo. Gogon demikian nama lain Sumargono dan Jae nama lain AQ Djaelani, disebut-sebut telah menggunakan mahasiswa Perguruan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) di Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai massa penekan untuk demonstrasi.

Photo: Xpos

Yang paling seru, serangan terhadap Muchtar, datang dari kelompok Habibie. Di tingkat massa atau buruh, kesempatan bagi Eggy Sudjana Ketua Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), yang baru dibentuk setelah Habibie berkuasa untuk "menyerang" Muchtar yang populer di kalangan buruh. Apalagi saat konprensi ILO di Jenewa, Menteri Tenaga Kerja asal ICMI, Fahmi Idris, tak mendapat tempat terhormat di dunia Internasional dibandingkan Muchtar Pakpahan. Lalu suara-suara Muchtar yang miring terhadap Habibie, dimanfaatkan media massa milik Habibie. Harian *Republika* dan Majalah *Ummat* gencar mengungkit keselip lidahnya tokoh buruh SBSI itu. Sehingga, suara Amien Rais yang dikenal moderat dan Sri Bintang Pamungkas, yang bebas bersama Pak-pahan dari penjara orde baru, di-*plot* yang miring oleh kedua media pendukung Habibie itu.

Muchtar pun sadar ia akan diserang banyak pihak. Tapi, ia menyangkal telah berbicara kepada wartawan Ummat soal ICMI dibelakang segala kerusuhan 14 Mei dan pemerkosaan terhadap warga keturunan Cina. ''Apa yang saya katakan di Jenewa soal reformasi total. Tepatnya, reformasi total itu akan gagal, bila di Indonesia, terjadi: militeristik, anarki dan fundamentalis Islam,Itu, kan, sebuah analisis,"katanya membela diri.

Untuk itulah Muchar merencanakan akan menggugat Majalah *Ummat*, yang menurutnya, telah menyebar fitnah, memuat apa yang tidak diucapkan. Pekan lalu, Pakpahan juga telah minta pendapat kepada Gus Dur. Ternyata pemimpin organisasi tradisional Islam terbesar di Indonesia inilah yang menyarankan Muchtar unhtuk menggugat Majalah *Ummat*. "Sebab yang menyerang anda, juga musuh saya,"ujar Ketua umum PB Nahdlatul Ulama itu. Memang Gus Dur, sudah tahu para penyerang Muchtar hanya meng-gunakan Islam dan Ummat Islam untuk memperoleh kekuasaan, minimal order dari penguasa yang bertahan untuk tetap berkuasa. Gugatan itu, agaknya tak jadi terlaksana. Dan, Muchtar memilih damai. Mendinginkan suasana.

Muchtar Pakpakah heran dikeroyok banyak orang. "Yang jelas sekarang saya dikeroyok. Saya berusaha mendinginkan. Saya tidak pernah mencampuri dan menyinggung-nyinggung urusan agama. Apalagi tuduhan saya membenci Islam itu tidak mendasar. Nama saya Muchtar karena saya lahir dan besar di lingkungan orang Jawa yang Islam. Soal ICMI, saya merasa belum pernah disakiti. Malah SBSI, pernah ditolong oleh ICMI pada Agustus 1993, ketika SBSI diserang habis aparat keamanan, sehabis konggres yang dibatalkan itu. Saya tidak tahu apakah mereka marah, kalau saya mengatakan bahwa Habibie menggunakan agama menjadi kuda tunggangan politik. Tapi itu, *kan*, sebuah analisis dari saya," katanya.

Meski begitu, Muchtar tak enggan minta maaf, bila ucapannya dirasa merugikan ummat Islam. Begitulah, kesepakatan agaknya telah tercapai dengan majalah Ummat. ■

Demo Buruh, Bedil Tentara

Buruh demonstrasi menuntut kesejahteraan, tentara menembak. Satu dikabarkan mati dan 23 orang lebih terkapar.

Sedikitnya 23 orang buruh pabrik PT Gunung Garuda (GG) Bekasi terkena luka tembakan peluru akibat bentrok dengan aparat keamanan ketika melakukan demonstrasi di komplek pabriknya Selasa, 31 Juni. Bahkan menurut berita *Liputan 6 SCTV* hari Selasa sore menyebutkan seorang buruh diketahui meninggal di tempat. Namun ketika dikonfirmasikan ke RS Bakti Husada maupun LBH Jakarta, mereka menyatakan belum menemukan data tersebut.

Peristiwa berdarah ini terjadi pada hari kedua unjuk rasa yang dilakukan sekitar 3000 buruh PT GG yang berlokasi di desa Sukadanau kecamatan Cibitung Bekasi itu. Sejak hari Senin, mereka berdemonstrasi menuntut perbaikan kesejahteraan yang disesuaikan dengan kondisi saaat ini dan minta pembentukan unit kerja SPSI di pabriknya. Para buruh pabrik baja ini juga minta kejelasan status karyawan dan kejelasan mengenai tata cara PHK yang selama ini dijalankan secara sepihak oleh perusahaan.

Tanda-tanda akan munculnya represi terhadap buruh oleh aparat militer sebenarnya sudah tampak sejak Selasa pagi itu. Waktu itu, beberapa pleton tentara sudah berjaga-jaga secara ketat lokasi dan sebagian sudah "dimasukkan" ke dalam pabrik. Sementara pintu masuk utama pabrik juga dijaga ketat oleh petugas.

Pada hari kedua itu sebenarnya sudah mulai ada negosiasi antara perwakilan buruh dengan pimpinan perusahaan. Kedua belah pihak sedang berunding mengenai tuntutan para buruh di sebuah ruangan pabrik itu. Namun tiba-tiba ada keributan antara seorang buruh dengan buruh yang lain. Mungkin karena merasa "terpanggil", tentara yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati kedua buruh itu dan "mengamankan" perselisihan itu.

Massa semakin banyak berkumpul di lokasi tersebut dan mengira penganiayaan dilakukan oleh tentara terhadap buruh. Ribuan massa yang berada di luar pagar berdesak-desakan masuk mendekati lokasi. Semakin banyaknya kerumunan massa membuat dua pleton tentara yang berada di lokasi menjadi panik dan kalap.

Tidak hanya itu, tentara terus mengejar buruh hingga ke gang-gang kampung sekitar pabrik. Beberapa orang yang tidak bisa lari ada yang terjatuh ke got dan ada pula yang jatuh terinjak-injak. Hingga saat ini ada 20 buruh yang masih dirawat secara intensif di RS Bakti Husada Cikarang, sementara yang lain diperbolehkan pulang. Dalam perhitungan LBH Jakarta, jumlah buruh yang luka-luka lebih dari 23 orang. Sebab banyak di antara buruh yang luka-luka tetap lari dari kejaran tentara dan tidak mau dirawat di rumah sakit. Sedangkan dari pihak aparat keamanan ada 3 orang yang luka-luka dan dirawat di RS Kesdam Bekasi.

"Kami protes atas tindakan tentara yang intervensi dalam masalah perburuhan. Para buruh dan pimpinan perusahaan waktu itu sedang negosiasi, tapi mengapa tentara berada di lokasi?" protes Apong Herlina, Direktur LBH Jakarta.

Photo: istimewa

Hingga Rabu lalu suasana sekitar pabrik masih terlihat mencekam. Empat buah panser dan pasukan tentara bersenjata lengkap berjaga-jaga di sekitar lokasi. Setiap orang yang mau masuk lokasi pabrik, baik itu karyawan maupun orang luar mendapat pemeriksaan ekstra ketat. Sedangkan diperoleh informasi, negosiasi antara wakil buruh dan pemimpin perusahaan telah berhasil menandatangani 12 point kesepakatan. Ke 12 point itu mengabulkan semua tuntutan buruh dan beberapa tambahan komitmen dua belah pihak.

Sedangkan sebagian dari 104 orang yang ditangkap dan ditahan di Polsek Cibitung sejak hari Rabu lalu sudah diperbolehkan pulang. Sedangkan dua orang pekerja yang dituduh sebagai otak demonstrasi tersebut masih ditahan dan diperiksa secara intensif. Anehnya, tak ada pasal satupun dari KUHP atau aturan hukum lain yang dituduhkan terhadap dua pekerja yang sudah tiga hari lebih ditahan itu. "Kami masih menyelidiki dan belum bisa mengambil kesimpulan pasal apa yang harus diterapkan kepada pekerja yang terlibat aksi itu," kata Kapolres Cibitung, Letkol Adji Rustam Ramdja.

Aktivis buruh mengingatkan Pangab bahwa Panglima ABRI pernah mengeluarkan SK No. 15 A yang melarang campur tangan militer dalam penanganan sengketa perburuhan. ■

Kongres Solidaritas Perempuan:

Perkosaan, Alat Teror Paling Keji

Perempuan jadi korban politik kebencian etnis. Perlu tim independen untuk investigasi perkosaan.

Tanpa banyak publikasi, sebuah hajatan penting berlangsung di Kaliurang, Yogya, akhir Juni lalu. Sebanyak 54 aktivis perempuan, berkumpul membahas keadaan perempuan di tanah air. Mereka antara lain Taty Krisnawati, Yeni Rosa Damayanti, Nursyahbani Katjasungkana, Gedong Oka, Emmy Hafild dan Toeti Heraty. Pertemuan, yang dimaksudkan sebagai Kongres II Solidaritas Perempuan (SP) itu, memang terasa lebih urgen, mengingat represi terhadap perempuan yang meningkat akhir-akhir ini. Terutama, dalam bentuk perkosaan.

Deklarasi Kaliurang, hasil Kongres SP yang diteken 28 Juni itu — antara lain menyoroti perkosaan yang dipandang sebagai suatu bentuk kekerasan negara terhadap perempuan. "Yang paling mengerikan adalah perkosaan-perkosaan sistematik sebagai intimidasi politik," demikian bunyi Deklarasi itu. Perkosaan disebug sebagai "alat teror yang paling keji dan efektif untuk menghancurkan perempuan dan masyarakat."

Efektifnya perkosaan sebagai alat teror itu, disebabkan oleh sasaran serangan yang langsung ditujukan kepada tubuh dan fungsi rahim perempuan. Pilihan sasaran itu merupakan proyeksi dari hasrat untuk menghancurkan kelompok yang dibenci. Dengan demikian, perkosaan dalam kasus-kasus politik, tidak bisa dipandang sekedar perkara kriminal, tetapi mengandung motif politik untuk menghancurkan kelompok saingannya.

Perkosaan yang menimpa lebih dari

180 perempuan etnis Cina, di Jakarta pertengahan Mei lalu, tampaknya merupakan cermin dari sikap politik rasialis yang dikembangkan sebagian politisi tertentu. Ada dugaan kuat, misalnya dari Komnas HAM dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK) bahwa perkosaan itu dilakukan oleh kelompok terorganisir. "Dipeliharanya kebencian terhadap ras tertentu oleh negara, dan indikasi adanya keterlibatan kelompok terorganisir adalah pertanyaan yang harus dijawab pemerintah."

SP juga mencatat perkosaan sebagai teror politik terjadi di daerah operasi militer seperti: Aceh, Irian Jaya dan Timor Timur. Menurut SP kekerasan aparat negara terhadap perempuan di daerah-daerah itu timbul karena peranan militer yang berlebihan di bidang non pertahanan. SP menuntut dwi fungsi ABRI diakhiri, agar kehidupan politik kembali normal.

Taty Krisnawaty, salah seorang pendiri SP, mengatakan, "perkosaan menghancurkan harga diri dan kemanusiaan perempuan yang jadi korban serta keluarganya." Itulah sebabnya, banyak korban perkosaan — termasuk dari peristiwa Mei 1998 — tak mau mengungkapkan tragedi yang dialaminya. Apalagi melaporkan kejahatan itu kepada aparat kepolisian. Hal semacam ini tampaknya tidak dimengerti oleh aparat kepolisian atau juga Menteri Urusan Peranan Wanita, Tuti Alawiyah, sehingga mereka lebih menekankan "minta bukti" daripada membantu korban mengatasi trauma.

Para aktivis SP menuntut dibentuknya tim independen untuk menginvestigasi dan merehabilitasi korban-korban perkosaan; juga meminta pertanggung-jawaban kekerasan terhadap perempuan di daerah: Aceh, Timor Timur dan irian Jaya.

Menurut Yeni Rosa Damayanti, aktivis perempuan yang baru saja kembali dari pengasingan di Belanda, kekerasan terhadap perempuan sebagai teror politik, telah terjadi sejak Orde Baru mulai berkuasa. Ia menyebutkan kasus-kasus perkosaan terhadap anggota Gerwani.

Solidaritas Perempuan didirikan 1990, mula-mula dalam bentuk yayasan; dan terutama dikenal karena kegiatannya membela buruh perempuan migran. Dalam Kongres II ini, SP membentuk dewan pengurus baru, yang beranggotakan: Yeni Rosa Damayanti, Taty Krisnawaty, Darmiyanti Mochtar, Titi Soentoro, AP Moerniati, Rusdi Tagoroa dan Siti. N Laila.

Dalam masa transisi ini, perempuan harus terlibat aktif menentukan agenda politik perubahan. Untuk mencegah terjadinya "demokrasi semu yang mengulangi sejarah penindasan perempuan Indonesia." Selamat bekerja. ■

Di Timtim, Peluru Masih Murah

Di Timtim masih banyak warga sipil bersimbah darah diterjang peluru. Kedatangan Masyarakat Eropa memicu korban lagi.

Intimidasi, teror bahkan tembak-menembak masih terus saja berlangsung di Timor Timur. Dalam laporan tertanggal 15 Juni 1998 itu, Pastor R F de Jesus Gomes dan Uskup Mgr. Bassilio do Nascimento mengatakan bahwa pada tanggal 10 Mei 1998, hari Minggu, di Kampung Makadai Atas, Desa Bucoli Kota Baucau terjadi penyergapan oleh prajurit-prajurit ABRI terhadap warga sipil di rumahnya masing-masing.

Warga sipil itu adalah Graciano da Silva penduduk Desa Triloka, Manuel Sarmento, Carlos da Silva (25) dan Carlos da Costa (36) ketiganya penduduk Desa Bucoli. Karena terkejut, keempat warga desa itu itu melarikan diri dari rumahnya dan segera disambut dengan tembakan-tembakan senjata api. Seorang di dari keempat warga itu meninggal dan kini terkubur di dalam lingkungan kompleks Komandan Sektor A.

Peristiwa lain juga terjadi pada tanggal 22 bulan Mei, hari Jumat pagi. Waktu itu Team Saka di bawah pimpinan sersan Joanico (anggota Kopassus) mendatangi rumah janda hansip di Seical, Kampung Baru dan melepaskan tembakan senjata. Dua pemuda tak bersenjata keluar dari rumah tersebut dan langsung disambut dengan tembakan-tembakan mematikan. Cosme da Silva Ximenes, warga desa Buibau, Kecamatan Kota Baucau, tewas seketika sedangkan seorang yang lain, Francisco, warga desa Letemumu Kelikai terluka berat. Zelia Correia pemilik rumah bersama anaknya Luis Correia, setelah dipukul dan diancam dengan senjata, diangkut ke Kantor Komandan Sektor A untuk diinterrogasi.

Peristiwa memilukan juga menimpa almarhum Hermenegildo Das Dores Soares alias Herman(21) yang tewas diberondong peluru oleh tentara di tengah perjalanan. Hari itu, Selasa (16/6), Herman bersama sepupunya Olandino Soares (20) sedang melakukan perjalanan pulang dari Manatuto ke rumahnya di Dili.

Di tengah perjalanan, ia mencoba berhenti untuk membebani mobilnya yang terlalu ringan dengan potongan kayu yang ada di pinggir jalan. Kebetulan wilayah itu dekat dengan Pos BTT 315/ Garuda. Ketika mengambil kayu itu, datang dua anggota ABRI dan langsung mengokang senjata.

Herman pun akhirnya kembali ke kendaraannya. Tiba-tiba senapan tentara itu berbunyi berkali-kali dan pelurunya muntah mengenai beberapa bagian tubuh Herman. Begitu juga ban-ban mobil pecah terkena tembakan. Tidak lama kemudian masyarakat sekitar berdatangan. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak untuk melarikan korban ke Rumah Sakit karena ban mobil kempes. Baru setelah ada sebuah mikrolet lewat secara serentak warga mencegatnya dan menaikkan korban untuk dibawa ke RSUD Manatuto. Ternyata RSUD Manatuto tidak berani merawat Herman karena luka-lukanya cukup parah. Akhirnya korban dibawa ke Dili. Tetapi nyawa Herman tak bisa ditolong, ia tewas dalam perjalanan dengan luka tembakan di paha kiri, lengan kanan dan punggung tembus ke perut.

Jenasah disemayamkan di kediaman Uskup Belo. Pada saat jenasah diusung dari kediaman Belo ke rumah sakit untuk diotopsi, massa terpaksa mengaraknya karena mobil-mobil medis tidak bersedia mengantar. Sesampainya di rumah sakit, ribuan massa telah menyambutnya dengan kemarahan. Beberapa peralatan rumah sakit dirusak. Sambil mengusung jenasah massa meneriakkan yel-yel "ABRI Pembunuh", "Herman Korban Pembunuhan ABRI", dsb.

Penembakan Herman tersebutlah yang memicu terjadinya aksi massa besar-besaran menduduki dan merusakkan beberapa bagian markas Kodim dan Polres Manatuto. Ribuan massa tersebut bersepakat untuk minta agar ABRI ditarik dari wilayah Timtim. Aksi serupa juga berlanjut pada pagi harinya. Bahkan aksi demonstrasi juga meletus di berbagai wilayah di luar kota Dili misalnya di Laclo, Cribas, Condar Laclubar dan Soibada. Di kota Dili, jenasah diarak massa dengan diiringi spanduk-spanduk kecaman terhadap ABRI dan pemerintah Indonesia.

Pada tanggal 27 Juni, seorang lagi pemuda tewas ditembak. Ia adalah Manuel Marques Soares warga desa Obrato Manatuto Kota. Senin, 29 Juni perjuangan menuntut referendum bagi Timtim memakan korban. Dua orang pendukungnya, Orlando Martindho Da Costa dan Orlando Joao Ximenes —yang demonstrasi menyambut delegasi Dubes Uni Eropa, tewas ditembak oleh tentara . di Bacau. Selain dua tewas, enam orang lainnya mengalami luka-luka serius.

Begitulah, jika tentara Indonesia tetap menganggap nyawa lebih murah di-banding harga peluru. Korban masih terus berjatuhan. ■

Deliar Noer, Ketua Partai Ummat Islam:

"Presiden Salah, Tak Boleh Dituruti"

Di tengah kritik dan suara sumbang soal partai berdasarkan agama, Profesor Doktor Deliar Noer, membuktikan dirinya sebagai pejuang demokrasi sejati. Deliar yang disingkirkan dan tidak pernah mau berkolaborasi dengan pemerintah Suharto, Jum'at pekan lalu setelah Sholat mendeklarasikan berdirinya Partai Ummat Islam (PUI) di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Kenapa partai berdasarkan Islam didirikan? Di bawah ini cuplikan wawancara *Xpos* dengan kolumnis dan pakar ilmu politik itu

Kapan pengurus PUI ini dibentuk?

Dua bulan lagi kami akan mengadakan konggres se-Indonesia. Nah, disitu akan lebih terbina persamaan pendapat, cara berjuang, bagaimana untuk daerah bagaimana untuk pusat, dan lain sebagainya.

Komposisi pengurusnya?

Pada muktamar itu diharapkan dapat tersusun, ya, dua bulan lagi, lah. Saya ini,kan, hanya mengantarkan.

Lalu, siapa yang akan menjadi calon presidennya?

Itu bergantung pada muktamar nanti.

Amien Rais bagaimana?

Ya, itu bergantung ia mau bergabung atau tidak.

Siapa kira-kira tokohnya?

Tidak kita tentukan sekarang, lebih baik saya menyerahkannya pada muktamar.

Photo: Xpos

Kalau partai ini tidak dipegang generasi muda, akan pendek usianya?

Ini generasi muda semua, pada umumnya usia muda, dan duduk di dalam kepengurusan yang mendampingi saya.

Apakah bisa bekerja dengan orang non muslim?

Dahulu sejarahnya partai Islam itu kerjasama dengan siapa saja, kecuali dengan PKI. Kebiasaan itu perlu dilanjutkan. Juga misalnya, Partai Syarikat Islam Indonesia pada tahun 1950-an punya anggota orang kristen, karena bersama-sama berjuang di dalam rangka perbaikan buruh. Jadi tidak ada persoalan dengan orang yang tidak beragama Islam.

Jadi partai terbuka, dong?

Ya, terbuka dalam arti kerjasama, itu sudah jelas.

Kerjasama dengan Golkar maksudnya?

Golkar ini dia mau apa sekarang, kita belum tahu. Apa betul dia mau reformasi? Yang jelas dia ingin kuasa terus. Nah, uangnya dari mana itu dahulu, itu persoalan yang perlu diperhatikan kalau kita bicara tentang Golkar. Apa dia sungguh mau reformasi tadi dan menjalankan kedaulatan rakyat, atau dia berusaha di mulut begitu, tetapi di dalam hati, ya, seperti kecurangannya yang dilakukannya selama ini.

Bagaimana komentar Anda dengan pernyataan Pangab untuk tidak menjadikan agama sebagai alat politik?

Itu, kan, pendapat perseorangan. Kalau disadari agama itu turut membantu segala macam ketertiban, kenapa harus dihalangi orang yang membawa agama dibidang politik? Larangan seperti itu anti demokrasi.

Tapi ABRI, kan, memang tidak mau?

Bukan ABRI tidak mau, tetapi komandannya yang tidak suka. ABRI-nya kan belum ambil keputusan dan keputusan ABRI harusnya sama dengan keputusan pemerintah. Pemerintah, kan, belum ambil keputusan. ABRI itu bukan lembaga yang lepas dari pemerintah.

Langkah yang paling kongkrit dari partai ini apa?

Perbaikan dalam bidang politik, sembako harus ditingkatkan pengadaannya dan masyarakat mampu menjangkaunya. Tetapi, tidak bisa seperti yang dikatakan banyak orang selama ini, selesaikan ekonomi dulu baru politik. Tidak bisa, sebab yang kerja di pemerintah itu, kan, banyak orang bukan satu orang. Kabinetnya saja puluhan orang. Nah, itu, kan, bekerja harusnya serentak, dan didalam rangka koordinasi yang baik. Nampaknya di dalam kabinet ini belum punya kordinasi yang baik.

Habibie, kan, juga menentang pendirian partai berdasarkan agama?

Semenjak kapan seorang presiden itu harus berlaku omongannya, kalau salah tidak boleh dituruti. Kalau raja dalam kerajaan Majapahit, iya. Tapi kita ini, kan, mendirikan Republik Indonesia

Apa Anda yakin PUI ini bisa ikut pemilu?

Kenapa tidak, apa kita ini bukan rakyat?

Maksudnya, kan, ada kreteria-kreterianya?

Kreteria itu, kan, belum ada, jadi kita berpijak pada kebebasan.

Lalu sudah ada cabang dimana saja PUI ini?

Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, yang belum itu Maluku. Tapi kita tunggu.

Dalam periode asas tunggal seperti ini, partai ini, kan, tidak menyebut Pancasila sebagai asasnya?

Asas partai ini Islam. Azas tunggal, coba saudara perhatikan, selama ada dari tahun 1985 saat azas tunggal berlaku, negeri ini jadi hancur. Sebenarnya kalau dibebaskan akan ada saling koreksi. Kalau asas tunggal siapa yang menentukan, akhirnya presiden juga, yang lain tunduk.

Partai ini menolak asas tunggal, artinya biarkan setiap partai mempunyai asasnya sendiri?

Ya, dan itu, partai yang punya asas masing-masing memenangkan revolusi, itukan sudah hebat. Partai yang asas tunggal mencelakakan rakyat ini. Sebenarnya bukan salah Pancasilanya, tapi orangnya, karena orangnya mempersempit wawasan itu. Pancasila itu, kan, tidak ada yang bertentangan dengan Islam.

Mungkin semangatnya Pancasila?

Bukan semangat saja, lebih dari Pancasila. Etik dan moral dalam Pancasila itu apa sumbernya, kan, tidak jelas. Kalau dalam Islam jelas. Dan yang dalam Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila, jadi lebih positif kita memakai Islam.

Dawam Rahardjo pada suatu seminar di Depag, mengatakan tidak perlu pakai dasar Islam, mau bikin partai aja, kok, pakai agama-agama segala?

Buktinya yang lalu kita berhasil, partai Islam banyak sumbangannya bagi Indonesia ini, memenangkan revolusi. Nah, dia menafikan sejarah. Kalau dia berpendapat begitu, ya, silakan saja. ■

UANG POLISI DICURI ABRI

X pos

Diterbitkan oleh:
Komunitas Informasi Terbuka
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: **http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp**
PO.Box 22202 London SE5 8WU, United Kingdom

Ganti ongkos cetak Rp. 1000,- Terbit seminggu sekali

Di Balik Pencopotan Dirut PT PLN

Habibie dipermalukan karena proyek Jerman dihentikan PLN Tanri Abeng lebih memikirkan usaha Bakrie ketimbang efisinsi BUMN. Djiteng jadi korban kepentingan kekuasaan dan pemilik modal.

Isu pergantian Dirut PT PLN Djiteng Marsudi, menjadi kenyataan. Darwin S, salah satu direktur Kantor Menneg PBUMN pimpinan Tanri Abeng mengungkapkan hal itu Kamis lalu (9/7). "Rencana pergantian ini sudah final," katanya di depan para wartawan. Bila Dewan Komisaris PLN telah selesai menyusun jajaran direksi dan dilaporkan pada Tanri Abeng, SK-nya akan segera dikeluarkan. Pengganti Djiteng adalah Ir. Tunggono, yang saat ini menjabat sebagai Pimpinan PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang.

Pergantian itu, menurut Darwin, dilakukan "agar terjalin kekompakan di jajaran direksi dalam menghadapi tantangan PLN di masa mendatang." Pada kesempatan yang lain, ia tambahkan, hal itu sudah dipikirkan secara matang "demi menyelamatkan PLN dari persoalan keuangan yang sangat berat."

Memang seperti dikemukakan oleh Djiteng sendiri, apabila hingga akhir tahun ini, nilai kurs rata-rata Rp10.000 per dolar AS, maka PLN diperkirakan akan menderita kerugian sebesar Rp11 trilyun. Malah, perkiraan di tahun 2002 nanti, PLN akan merugi Rp. 48 trilyun. Oleh Darwin dikatakan, untuk melakukan pembenahan tersebut, diperlukan "seseorang yang mampu memahami betul kondisi PLN dan *committed*."

Kendati telah mencoba memberikan alasan "rasional", pergantian Djiteng tetap saja terasa janggal. Sebab, oleh masyarakat luas, Djiteng justru dikenal sebagai orang yang punya komitmen untuk membongkar kolusi di BUMN itu. Pergantiannya malah menimbulkan tanda tanya besar. Ukuran "komitmen" seperti apa yang digunakan sebagai standar bagi Dirut baru PLN?

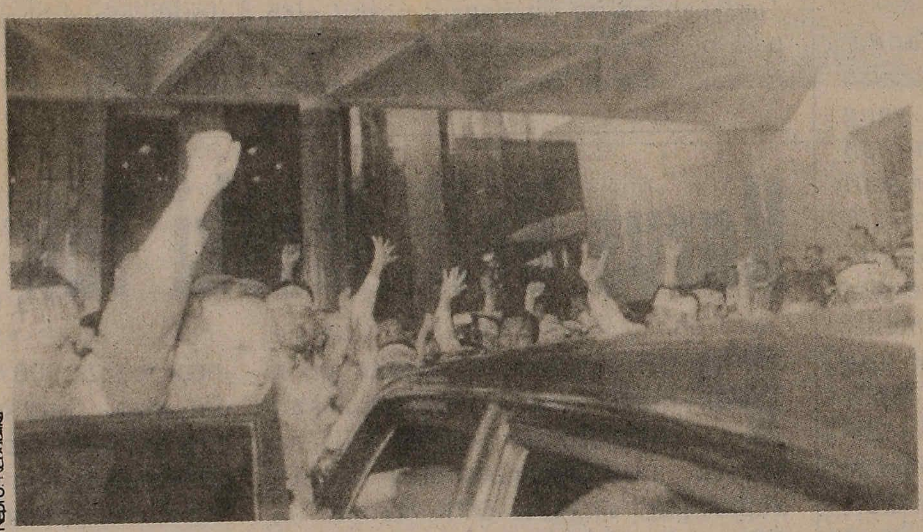

Repro Republika

■ **Djiteng Diantara Pendukungnya:** Demo menentang pencopotan

Sebetulnya, sudah sejak awal Juli lalu isu pergantian Djiteng telah merebak. Kabar itu telah membuat ratusan karyawan PLN yang simpati terhadap Djiteng marah. Mereka melakukan unjuk rasa tanggal 2 Juli lalu di lobi kantor pusat PLN, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rencana pergantian itu, mereka tentang dengan keras. Selain itu, mereka juga menuntut agar PLN dibersihkan dari praktek KKN dan menuntut dihapuskannya Menneg PBUMN pimpinan Tanri Abeng. Ancamannya, bila Djiteng dicopot, listrik akan dipadamkan.

Karena reaksi itulah, isu pencopotan Djiteng sempat mereda. Tak lama kemudian, Djiteng malah dipromosikan sebagai Ketua Tim Restrukturisasi PLN yang permanen. Namun, hal ini dirasakan sebagai upaya untuk mengelabui reaksi orang-orang yang mendukung kepemimpinan Djiteng — seolah-olah ia mendapatkan wewenang yang lebih besar. Kenyataannya, tak pernah jelas apa wewenang Tim Restrukturisasi PLN, apakah sekedar berfungsi konsultatif atau berwenang melakukan pembenahan struktur.

Tampaknya, karena ketidakjelasan wewenang ini, mustahil Djiteng mempunyai hak melakukan "restrukturisasi". Sebagai sebuah perusahaan besar yang memiliki Dewan Komisaris sendiri, tentunya kepemimpinan baru PLN tak mau diintervensi oleh "orang luar". Sementara bila hanya berfungsi konsultatif, itu artinya Djiteng sudah tak punya kuasa alias tergusur.

Mengapa Djiteng diganti, inilah soal yang penting. Ketidakwajaran dalam proses pergantiannya, tentu saja menimbulkan tanda tanya besar. "Dosa-dosa" Djiteng, tampaknya karena ia berusaha membongkar praktek KKN di tubuh PLN. Sejak Soeharto masih berkuasa, Djiteng sudah bicara lantang tentang adanya di

Berita Pekan Ini

Bung Rudy Menggalang Dana ... 3
Subsidi Tak Dibayar, Pertamina... ... 5
Menuju Independensi BI ... 6
Bintang Kejora di Irian ... 9
Golkar Pasti Terpuruk ... 10
"Ancaman Militer Tak Zaman Lagi" ... 12

Korban

Ada yang mengerikan sedang terjadi di masyarakat kita. Bukan soal rupiah yang makin anjlog atau pertarungan tokoh-tokoh di Golkar dan munculnya partai-partai. Tetapi tentang bagaimana sikap penguasa mengenai Tragedi 14 Mei.

Banyak laporan tentang pembunuhan, pemerkosaan yang terjadi pada hari itu. Tragedi itu membuat sebagian warga keturunan Cina memilih mengungsi ke luar negeri. Orang tak merasa aman tinggal di Jakarta. Bisnis pestol berkembang.

Tragedi itu, terutama tentang pemerkosaan yang kabarnya dilakukan oleh kelompok terorganisir, hingga kini belum terungkap tuntas. Dan, yang lebih tragis, ada pihak-pihak — terutama dari rezim — yang menyalahkan korban karena tak mau bersaksi terang-terangan untuk menuntaskan soal ini.

Menteri Negara Urusan Wanita, Kepolisian, semua mengingkari masalah ini, dengan alasan belum ada yang melapor secara resmi. Seolah-olah korban yang telah dihina, dan diingkari kemanusiaannya itu, yang masih diminta bertanggung-jawab untuk mengungkapkan soal ini secara gamblang. Orang-orang dengan mental begini, tampak tak memahami apa artinya menjadi korban. Lebih-lebih korban perkosaan.

Indikasi tampaknya sudah lebih dari cukup. Tragedi itu memang terjadi. Tinggal aparat keamanan dan para penguasa membuka mata hati mereka. Untuk mendengar dan bersimpati kepada para korban. Bukan menyalah-nyalahkan atau malah meminta mereka bertanggung-jawab atas pengungkapan kasus ini.

Bila para penguasa tak menuntaskan kasus ini, atau malah menutup-nutupi seolah tak ada masalah, atau malah mengerahkan orang lain untuk membantah isu ini; kami khawatir bangsa ini sedang menuju zaman kegelapan. Zaman di mana nilai-nilai kemanusiaan diingkari, dan orang sibuk bermunafik mematut diri. Semoga hal itu tak terjadi.

■ LUGAS

BUMN itu.

Awal Juni lalu, ia mengungkapkan, seluruh kontrak jual beli listrik swasta sebanyak 26 proyek tidak ada yang menguntungkan PLN. Malah membuat PLN harus menanggung rugi besar. "Dalam setiap penandatanganan jual beli listrik swasta, biasanya direksi tinggal tanda tangan. Karena proses perundingannya 'di atas', kami tinggal dipanggil untuk hadir menandantangani perjanjian itu. Proyek listrik swasta ini seperti bagi-bagi kapling saja," ungkapnya pada pers.

Menurut Djiteng, sebetulnya PLN tidak lagi memerlukan pembangkit baru. Sebab, daya terpasang PLN yang sudah mencapai 14.000 MegaWatt (MW), sudah dapat memenuhi kebutuhan energi yang rata-rata sekitar 10.500 MW. Gara-gara adanya tambahan 26 proyek listrik swasta yang terlanjur ditandatangani, maka telah terjadi kelebihan pasok tenaga listrik. Akibatnya, PLN mesti menanggung rugi membeli listrik swasta tersebut. Itu pun dengan harga yang lebih mahal.

Karena itulah Djiteng nekad berusaha memutuskan pembelian listrik swasta yang terlanjur ditandatangani. Hal itu dimulainya dengan menghentikan pembelian dari PT Cikarang Listrindo milik Sudwikatmono pada 15 Juni lalu. Tindakannya itu ditanggapi positif oleh para pengamat ekonomi. Mereka malah menakut-nakuti pemilik proyek listrik swasta akan dikenai Undang-undang Anti-penyuapan yang dikeluarkan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), bila membawa kasus ini ke pengadilan.

Namun, di sinilah Djiteng menjadi "berdosa" di mata pemerintah. Tindakan Djiteng dianggap akan mengancam proyek listrik swasta lain yang didukung orang-orang penting dalam pemerintahan. Sebab, seperti proyek PLTU Paiton II, ternyata penandatanganannya disatukan dengan proyek-proyek lain Presiden Habibie dengan Kanselir Jerman. Tentunya, proyek semacam ini tak dapat dihentikan Djiteng. Ini bisa mempermalukan Habibie di mata investor Jerman.

Lalu, ada pula proyek PLTU Tanjung Jati A yang dikuasai konsorsium Bakrie Power Holding dan Maharani Paramita milik Ny. Siti Hediati Prabowo yang pelaksanaannya ditinjau kembali. Dan karena Meneg BUMN Tanri Abeng, tadinya dikenal sebagai manajer dari Bakrie Group, ia pun diduga akan mempertahankan kepentingan kelompok bisnisnya itu.

Djiteng memang takkan punya cukup kuasa untuk melawan berbagai kepentingan itu. Dan kenyataan ini, hanya menambah bukti bahwa pemerintahan sekarang masih belum dapat dipercaya untuk melakukan reformasi di bidang ekonomi. Krisis ini, rasanya semakin panjang saja. ■

Harus Beli, Meski Tak Butuh

PLN sudah lama menanggung derita. Hal ini pertama kali dikeluhkan oleh Djiteng Marsudi, awal Desember tahun lalu. Di depan para anggota DPR, ketika itu, Djiteng membeberkan segala kejanggalan tender di perusahaannya. Tender-tender itu dilakukan secara tidak transparan. PLN mesti memenangkan peserta tender yang mengandung unsur KKN, meskipun dengan harga yang lebih mahal ketimbang yang ditawarkan kontraktor-kontraktor asing. Akibatnya, PLN harus menanggung kerugian besar.

Selama ini, PLN biasa menjual listriknya sebesar 5 sen dolar AS per KWH. Tapi, lantaran adanya "kewajiban", PLN mesti membeli listrik swasta dengan harga termurah 5,74 sen dolar AS per KWH, PLN harus merugi.

Akhir tahun ini, dengan asumsi kurs Rp10.000 per dolar AS, PLN akan menderita kerugian sebesar Rp11 trilyun.

Kerugian PLN tak cuma sampai di situ. Kapasitas listrik PLN sendiri sebenarnya sudah berlebih. Hingga tahun 2002 akan mencapai 21.000 MW untuk wilayah Jawa dan Bali. Sementara kapasitas yang terpakai baru sebesar 19.000 WM. Bila ditambah beban kewajiban pembelian listrik swasta, tentu akan semakin banyak kelebihan kapasitasnya (*oversupply*). Dan PLN terus mengeluarkan biaya pemeliharaan pembangkit yang mubazir.

Menurut Djiteng, kewajiban pembayaran valuta asing PLN dari April 1998 hingga Maret 1999 besarnya mencapai 1,460 milyar dolar AS — dengan asumsi kurs rupiah Rp.6000 per dolar AS seperti dalam APBN. Dari jumlah itu, pembelian listrik swasta yang totalnya bernilai 400 juta dolar AS, termasuk pembayaran terbesar — selain pembelian gas senilai 590 juta dolar AS.

Kendati pemerintah telah menangguhkan 16 proyek — dari 26 proyek listrik swasta — namun, PLN masih tetap merugi. Pasalnya, kesepuluh proyek itu mempunyai harga jual antara 5,75 sen dolar AS sampai 8,5 sen dolar AS. Bagaimana kalau 16 proyek tadi kembali diteruskan? ■

X pos, No. 28/I, 11 - 17 Juli 1998

Bung Rudy Menggalang Dana Politik

Setelah menguasai perpolitikan nasional, para pendukung Habibie berupaya menguasai "lumbung uang" negara. Untuk menjalankan politik uang?

Bisa dipastikan, orang paling pusing saat ini adalah Menteri Keuangan Bambang Soebianto. Yang harus dihadapi "bendahara negara" ini tak hanya hantaman krismon yang datang bertubi-tubi, tapi juga rongrongan dari para koleganya sendiri di pemerintahan. Repotnya, yang merongrong itu tak gampang ditolak karena sedang berkuasa di pentas politik nasional. Mereka itu, tak lain, grup politik pendukung Presiden (transisi) BJ Habibie.

Dua pekan lalu, misalnya, Sintong Panjaitan-penasehat militer Habibie yang kini menjabat Sekretaris Pengendalian Logistik dan Pembangunan (Sesdalogbang) — mendatangi Departemen Keuangan. Maksudnya, minta agar Menteri Keuangan menyediakan dana ratusan miliar rupiah untuk mengimpor ribuan mobil truk dari Korea Selatan. Alasannya, truk-truk itu akan digunakan sebagai armada distribusi sembako ke daerah-daerah-terutama yang diperkirakan akan mengalami rawan pangan.

Semula Menteri Bambang Subianto menolak, karena alasan yang dikemukakan tidak cukup kuat. Sebab, kalau hanya untuk mengangkut sembako, bukankah truk-truk yang ada di dalam negeri sudah cukup? Lagipula, kalau perlu tambahan armada, *kan* bisa dipesan dari industri mobil nasional saja?

Bgelakangan, baru ketahuan alasan sebenarnya. Rupanya, impor truk itu merupakan bagian strategi imbal-beli penjualan pesawat produksi IPTN. Jadi, kalau pemerintah Indonesia bersedia mengimpor truk, maka sebaliknya Korea Selatan akan membeli sejumlah pesawat dan helikopter buatan IPTN. Dengan begitu, sama saja pemerintah mensubsidi IPTN.

Seperti diketahui, IPTN adalah pabrik kebanggaan Habibie. Pabrik pesawat terbang itu didirikan Habibie duapuluh tahun lalu, atas restu mantan Presiden Soeharto. Tapi, sepanjang berdirinya, IPTN tak pernah untung. Setiap tahun, malah merugi dan memboroskan uang negara triliunan rupiah.

Rupanya, meski telah melepaskan jabatannya sebagai Direktur Utama IPTN, Habibie tak melupakannya begitu saja. Agaknya, ia tak rela IPTN gulung tikar karena kekurangan modal. Maka, diam-diam dan berbagai cara, Habibie mencarikan dana segar untuk IPTN. Selain soal pembelian truk-truk dari Korea Selatan, kabarnya Habibie secara terang-terangan minta IPTN dijatahi dari dana bantuan IMF. Bisa jadi, hal itu merupakan salah satu faktor mengapa pengucuran bantuan IMF tersendat-sendat.

Selain itu, Habibie dan para pendukungnya kini sedang mempersiapkan langkah-langkah sistematis untuk menggali lahan dana dari kas negara. Yang paling spektakuler, dalam waktu dekat ini akan dibentuk semacam Dewan Pendanaan Nasional (DPN), lewat mekanisme Keputusan Presiden (Keppres). Kabarnya, tokoh yang diangkat sebagai Ketua DPN adalah Adi Sasono — Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, yang juga Sekretaris Umum ICMI.

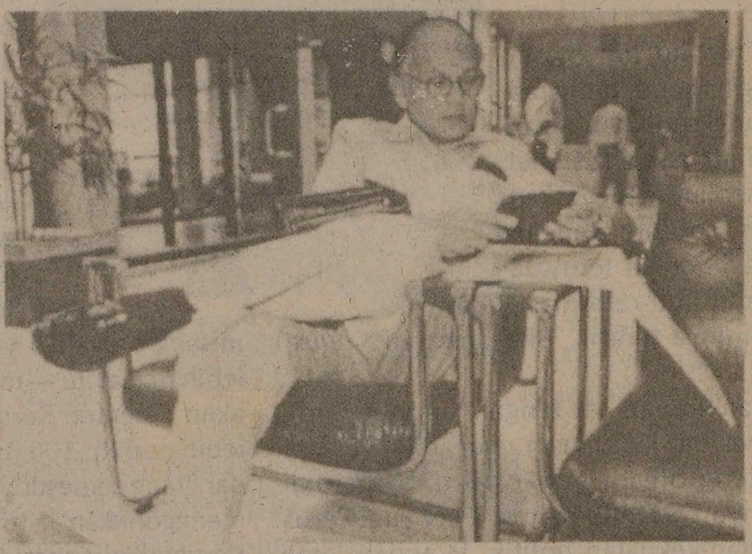

Photo: Istimewa

■ **Habibie:** Menghitung dana politik

Penunjukan Adi itu memang berkaitan dengan rencana besarnya memberikan kredit sebesar Rp. 15,1 trilyun kepada koperasi serta pengusaha kecil dan menengah (lihat *Xpos*, No. 27). Kredit yang dialokasikan dari KLBI (kredit likuiditas Bank Indonesia) itu akan disalurkan dengan bunga rendah: 14 sampai 16 persen per tahun.

Rencana itu, bila berjalan lancar, memang mulia. Selain membantu rakyat kecil, diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian nasional. Tapi, ditengah krisis ekonomi sekarang ini, darimana duit sebanyak itu bisa disediakan pemerintah? Kalaupun ada, tidakkah itu akan menambah berat beban keuangan negara?

Adi sendiri sudah menduga rencananya itu akan mendapat tantangan dari Departemen Keuangan. Karena itulah, ia menggagas pembentukan DPN, untuk mendukung ambisnya tadi. Kabarnya, penggodokan DPN dilakukan secara intensif oleh sebuah tim ahli ekonomi CIDES (lembaga *think-tank* ICMI). Salah satu anggota inti tim itu adalah Cacuk Sudaryanto, mantan Direktur Utama Telkom.

Menariknya, kata sumber *Xpos* di Departemen Koperasi, fungsi DPN nanti tak hanya menyangkut soal penyaluran kredit. Tapi, mengurusi pula soal penyelesaian utang-utang perusahaan swasta nasional-yang selama ini ditangani Tim Radius Prawiro. "Pokoknya, DPN akan jadi lembaga yang *powerfull* dalam menentukan kebijakan ekonomi negara," ungkap sumber tadi.

Memang, meski telah menguasai pentas politik nasional, Habibie dan para pendukungnya belum sepenuhnya menguasai "lumbung uang" negara. Pos-pos kementerian ekonomi dan keuangan, justru dipegang para ekonom profesional dibawah koordinasi Ginanjar Kartasasmita. "Padahal, mereka (kelompok Habibie) memerlukan dana besar untuk membiayai gerakan politiknya," kata seorang analis politik.

Omongan itu ada benarnya. Sebab, kaum Soehartois yang menjadi lawan politik utama Habibie sekarang ini, dikabarkan akan memainkan politik uang (*money politics*) untuk tampil kembali ke pentas nasional. Untuk melawannya, tak ada pilihan bagi Habibie selain menjalankan pula *money politics*. Dan, untuk itu Bung Rudy membutuhkan uang yang tak sedikit. ■

SOLIDARITAS
UNTUK KORBAN 14 MEI

**Semoga Diberi Ketabahan
Mengatasi Tragedi Itu.
Kebobrokan Pasti Akan Terkuak.
Cepat atau Lambat.**

SOLIDARITAS INDONESIA

Djiteng, Bukan Basa Basi

Oleh: Siti Anisa

Repro: Merdeka

Pekan ini Djiteng Marsudi dicopot dari jabatannya sebagai Dirut PLN. Keputusan Presiden Transisional Habibie itu bisa dipandang terlalu lama, bila diingat keberanian Djiteng membela kepentingan PLN dari gerogotan gurita keserakahan. Banyak orang "menghitung", karena kegigihan Djiteng menentang kroni-kroni Cendana, mestinya ia sudah di-*lengser*kan jauh-jauh hari.

Tetapi, keputusan Habibiet itu, *toh*, masih mengagetkan. Sebab orang terlanjur berharap akan makna reformasi yang sedikit banyak digantungkan pada pemerintahan transisional ini. Pencopotan Djiteng, seolah menegaskan kesamaan karakter rezim Habibie dengan rezim yang digantikannya. Mereka ternyata mudah kembali ke perilaku anti-reformasi, ketika kepentingan ekonominya terusik. Bila urusannya *fulus*, reformasi tinggal basa-basi.

Djiteng memang ibarat mutiara di tengah lumpur Orde Soeharto. Ketika pejabat-pejabat lain masih ngeri menghadapi anak-anak Soeharto, Djiteng bicara blak-blakan. Ia pernah mengeluarkan kekesalannya di DPR: bahwa PLN rugi terus karena diintervensi kekuatan-kekuatan politik. Ia sudah lama mengisyaratkan penolakan terhadap bisnis keluarga Soeharto yang mengacak-acak PLN. Keluarga itu ramai-ramai masuk bisnis listrik swasta, dan memaksa PLN membeli setrum lebih mahal dari harga jualnya kepada pelanggan. Padahal, kapasitas produksi PLN sendiri sudah lebih dari kebutuhan.

Dari bisnis dengan PT Cikarang Listrindo (CL) — milik Sudwikatmono — PLN harus merugi Rp 22 milyar sebulan. Itu sebabnya, Djiteng nekad menghentikan kontrak pembelian listrik dari PT CL. Dari semua bisnisnya dengan listrik swasta, PLN rugi hampir Rp. 1 trilyun per bulan. Tak heran, bila Djiteng memilih menyelamatkan PLN dan puluhan ribu karyawannya, ketimbang ikut terus aturan main kolutif. Meskipun untuk itu, Djiteng bisa digugat ke pengadilan.

Kini, di alam yang katanya reformasi dan Soeharto telah tumbang, semangat Djiteng mengefisienkan PLN, ternyata masih harus berhadapan dengan gurita kekuasaan dan keserakahan yang sama. Bukan hanya gerilya sisa-sisa Soehartois yang mesti dia hadapi, tetapi juga kepentingan baru dari Habibie dan Tanri Abeng. Habibie, konon kesal pada Djiteng yang berencana menghentikan kontrak dengan 26 produsen listrik swasta. Sebab, ada diantara investor listrik swasta itu yang masuk ke Indonesia, lewat jalur Habibie. Terutama dari Jerman. Rupanya, Habibie terpaksa main kayu. Ia memotong Djiteng, yang dianggap mempermalukan presiden di muka lobby-lobby Jermannya.

Tanri Abeng, Menteri Negara Urusan BUMN itu, lebih mengecewakan lagi. Dia yang pernah diharap akan membawa angin segar, profesionalisme untuk menyehatkan BUMN, ternyata tak beranjak dari kepentingan usahanya sendiri. Ketika listrik swasta yang dipotong Djiteng itu termasuk milik Aburizal Bakrie — bekas bos Tanri —, manajer Rp 1 milyar ini kehilangan profesionalismenya. Djiteng terjepit di tengah kekuatan politik dan nafsu serakah.

Praktek-praktek kolusi, yang banyak dikritik dalam gerakan reformasi, ternyata memang tak mudah dihapus. Mereka yang punya kuasa, cenderung menggunakan posisinya untuk keun-tungan sendiri. Tanpa transparansi, dan kontrol masyarakat yang kuat, kolusi menemukan tempatnya yang subur. Rezim yang belum seumur jagung ini, telah menunjukkan bibit-bibit nepotis, dan kolusi. Bila tak dipangkas sejak dini, bibit-bibit itu akan berkembang biak. Menggurita, menyedot semua energi terbaik rakyat, seperti terjadi di masa Orde Soeharto.

Seorang ekonom menuturkan nepotisme, kolusi jauh lebih buruk dampaknya ketimbang korupsi. Kalau seorang birokrat, atau pegawai swasta mencuri uang kas, misalnya saja Rp 100 juta, maka negara atau perusahaan dirugikan sebesar itu. Tetapi, bila kolusi, nepotisme — misalnya di PLN yang dipaksa membeli setrum dengan harga lebih mahal itu — merugikan PLN Rp 100 juta, dampak ikutannya akan berentet. Kerugian yang diderita seluruh sistem ekonomi, lebih dari Rp 100 juta. Konsumen listrik membayar lebih mahal dari yang semestinya. Produksi segala macam barang, yang pasti menggunakan listrik, akan menang-gung ongkos lebih mahal. Kerugian ekonomi karena usaha kongkalikong itu merembet ke sektor produksi lainnya. Seperti kanker yang menjalar ke seluruh tubuh bangsa.

Dampak kerusakan sistemik itu, tampaknya belum disadari betul oleh aparat rezim Habibie. Terbukti, mereka masih dengan mudah melakukan praktek-praktek NKK; sementara di mulut mereka mengaku pendukung reformasi dan meneriakkan anti NKK. Kabar kurang sedap juga datang dari Kalimantan. Di pulau penghasil batu-bara itu, Tareq Habibie masuk ke pertambangan batubara. Tak ubahnya seperti anak-anak Soeharto di masa kekuasaan ayahnya dulu, kini anak Habibie seperti tak ingin kehilangan waktu sedetikpun dalam merambah berbagai macam usaha. Rezim Habibie memperlakukan reformasi sekedar basa basi.

Dalam carut marut situasi itulah, fenomena Djiteng menjadi makin penting. Dalam dirinya, orang merasakan ada kepemimpinan yang membela nasib orang banyak. Keberanian Djiteng menentang keserakahan para pemilik uang itu, dengan risiko kehilangan jabatan, adalah sikap keteladanan yang mengharukan. Tak heran, bila karyawan PLN berdemonstrasi menentang pencopotan dirinya. Bahkan ada diantara para pegawai itu yang mengancam akan mematikan listrik PLN, bila Djiteng jadi dipecat. Kalangan DPR pun memberi dukungan, agar Djiteng tak takut digugat para pemilik modal yang kontraknya dibatalkan.

Kepemimpinan seperti yang ditunjukkan Djiteng, memang wajar bila menarik simpati dan dukungan masyarakat. Ia telah membangkitkan harapan, bahwa di tengah kebobrokan ini, masih ada pemimpin yang peduli akan kepentingan orang banyak. Bukan basa-basi reformasi.

Siti Anisa, jurnalis

Subsidi Tak Dibayar, Pertamina Rugi

Pemerintah ngemplang subsidi Rp 10 Trilyun. Pertamina terancam bangkrut. BBM bisa hilang dari peredaran.

Tak ada lagi cerita menyenangkan soal perekonomian kita. Berita-berita terbaru selalu tentang persoalan baru. Yang termasuk paling *gres* adalah masalah Pertamina. Seperti dikutip oleh berbagai media massa, Dirutnya Drs. Soegianto mengatakan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari pemerintah pada Pertamina ternyata sudah tiga bulan belum dibayar. Malah, Pertamina masih harus menanggung sisa subsidi anggaran tahun sebelumnya yang juga belum dibayar oleh pemerintah.

Jumlah beban itu ternyata cukup besar. Hampir mencapai Rp.10 trilyun — tepatnya Rp. 9,4 trilyun. Padahal, angka itu didapatkan dengan menggunakan asumsi APBN 1998/1999 yang menetapkan subsidi dengan kurs Rp. 6.000 per dolar AS dan harga minyak dunia 14,5 dolar AS per barrel. Menurut Soegianto, dengan asumsi yang demikian, setiap kenaikan kurs Rp. 1.000, subsidi akan membengkak sebesar Rp. 5 trilyun per tahun.

Hal ini dapat mengakibatkan arus tunai (*cash flow*) Pertamina terancam tersumbat. Sebab, Pertamina harus membeli minyak mentah dengan kurs yang berlaku di pasar dunia, sementara penjualannya masih menggunakan kurs Rp. 6.000 per dolar.

Jika sampai *cash flow*-nya terganggu, akibatnya sungguh tak mengenakkan. Pertamina tak dapat mengimpor minyak mentah, yang akan berdampak naiknya harga BBM. Bila BBM naik, bayangkan sendiri apa yang akan terjadi. Bisa-bisa kembali terjadi kerusuhan.

Itu sebabnya, melalui Menteri Keuangan Bambang Subianto, pemerintah buru-buru mengeluarkan pernyataan akan segera membayar tagihan dari Pertamina itu. Selain itu, sejak tanggal 1 Juli lalu, Bank Indonesia bersedia menjamin sepenuhnya *letter of credit* (LC) yang dikeluarkan Pertamina. Supaya memudahkannya mendatangkan minyak mentah yang masih harus diimpor (Sebelumnya, Pertamina mesti menerima pembatalan kontrak pembelian 900 ribu barrel minyak mentah dari Broken Hill Pty Ltd dan Mobil Corp yang menolak L/C Pertamina).

Mengapa subsidi tersebut sempat tak dibayar pemerintah, itu pertanyaan yang sempat muncul ke permukaan. Ada berbagai pendapat mengenai hal itu. Ada yang mengatakan uang tersebut dialihkan untuk membiayai program-program orang-orang dekat Habibie dalam usaha menarik hati rakyat. Seperti misalnya, yang dilakukan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Adi Sasono dengan KLBI untuk pengusaha kecil dan menengah sebesar Rp. 15 trilyun. Lebih dari itu, pemerintahan Habibie disinyalir melakukan praktek perkoncoan dalam menyalurkan uang negara.

Photo: Xpos

■ **Antri BBM:** Subsidi pemerintah tak kunjung turun

Namun, ada pula pendapat yang mengatakan, pemerintah memang sudah mulai kehabisan uang untuk membayarkan subsidi. Belakangan ini, pemerintah lebih mementingkan melakukan pembayaran yang sifatnya mendesak seperti gaji pegawai negeri dan ABRI, serta kebutuhan impor yang terpenting. Itu pun dengan dugaan telah dicetak uang secara berlebihan oleh Perum Peruri.

Pandangan lain lagi justru mempertanyakan, mengapa keuangan Pertamina bisa terganggu. Ini dikemukakan oleh anggota komisi V DPR Priyo Budisantoso. Menurut Priyo, tidak seharusnya perusahaan sebesar Pertamina mengalami gangguan *cash flow*. Mengingat, BUMN ini memiliki banyak sekali anak perusahaan.

Bila diamati perjalanan kinerjanya selama ini, kesalahan memang juga terdapat di dalam tubuh Pertamina sendiri. Selama puluhan tahun, manajemennya tidak dilakukan dengan cara yang sehat. Sudah bukan rahasia lagi, mantan Dirut Pertamina Ibnu Sutowo menjadi sangat kaya setelah mengeruk kekayaan Pertamina di jaman *oil boom*.

Kultur manajemen yang tidak sehat ini berlanjut terus. Diketahui bahwa untuk menentukan partner dalam kegiatan ekspor-impor, selalu diwarnai dengan unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Misalnya untuk pengadaan minyak mentah impor oleh Perta Oil Ltd dan Permindo Trading Oil Co. Ltd. yang sudah berlangsung belasan tahun lamanya. Sebanyak 70% saham Perta dimiliki oleh Tommy Soeharto serta beberapa yayasan. Sedangkan 65% saham Permindo dikuasai Bambang Trihatmodjo, Sudwikatmono dan Nirwan Bakrie.

Pihak penghubung yang bekerja sama dengan Pertamina, biasanya justru hanya menjadi parasit yang menambah beban. Semestinya Pertamina bisa langsung membeli langsung minyak mentah ke produsennya, tapi karena harus melalui pihak ketiga, maka Pertamina mesti mengeluarkan *fee* untuk mereka.

Proyek-proyek lainnya pun tak lepas dari berbagai penyimpangan. Misalnya, pembangunan kilang minyak Exor (Export Oriented Refinery) I Balongan, di Indramayu. Seperti diberitakan berbagai media massa, meskipun pembangunannya konon sudah dikaji oleh Pertamina, namun ternyata sering mengalami kerusakan. Diduga keras, telah terjadi praktek *mark up* (melipat gandakan biaya) dalam pembangunannya.

Kilang minyak ini, diketahui mulai dibangun pada tahun 1990-an dan telah menghabiskan biaya sekitar 2,4 milyar dolar AS. Angka yang dianggap terlalu besar. Sebab, berdasarkan penelitian dan perhitungan berbagai kontraktor dari luar negeri, biaya pembangunannya hanya sekitar 1,9 milyar dolar AS. Jadi, biaya yang di-*mark up* mencapai 400 hingga 500 juta dolar AS. Wajar bila muncul kecurigaan, telah terjadi praktek yang sama dalam proyek-proyek yang lain.

Masa keemasan, di tahun 70-an dan awal 80-an itu kini tinggal kenangan. Pertamina tak lagi bisa diharapkan menjadi tambang devisa negara. Malah, di tengah perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk, Pertamina justru menjadi beban negara. Mungkin, sampai semua kasus korupsi yang melanda Pertamina sejak masa Ibnu Sutowo memimpin dibuka kembali, barulah Pertamina terbebas dari kutukan. ■

■ EKONOMI

RUU Bank Indonesia:

Menuju Independensi BI

Pengangkatan Dewan Gubernur BI harus disetujui DPR. Masa jabatannya enam tahun, lebih lama dibanding presiden.

Di tengah hujan kritik terhadap BI, yang dinilai gagal mengatur kebijakan moneter dan perbankan, sebuah Rancangan Undang-Undang tentang bank sentral, diam-diam disiapkan. Adalah para pakar hukum di BI yang bekerja keras menyusun RUU itu. Draft RUU itu sudah selesai, dan rencananya segera dikirim ke DPR bulan ini. Diharapkan DPR akan membahas RUU itu September depan.

"Mudah-mudahan RUU itu bisa disahkan menjadi UU tahun ini juga," kata sumber *Xpos* di BI. Ia berharap dengan UU baru nanti, BI akan lebih independen dan tak mudah diintervensi eksekutif — seperti yang selama ini sering terjadi.

Salah satu butir penting dari RUU itu adalah perubahan pimpinan di BI. Bila selama ini, BI dipimpin oleh gubernur yang diangkat presiden; di masa depan BI dipimpin oleh suatu Dewan Gubernur. Dewan Gubernur itu, terdiri dari satu orang Gubernur dan paling banyak tujuh orang Deputi Gubernur. Dewan Gubernur itu tak semata-mata orang yang diangkat presiden, tetapi juga harus disetujui DPR. Dengan demikian, diharapkan Dewan Gubernur punya legitimasi kuat, tak hanya *manut* pada keinginan presiden.

Selain itu, masa kerja Dewan Gubernur diusulkan enam tahun. Lebih lama satu tahun dibanding masa jabatan presiden. Seorang anggota Dewan Gubernur bisa dipilih maksimum untuk dua periode. Sebetulnya, dalam proses penyusunan RUU itu, seorang konsultan yang disewa BI, Helmut Schlesinger, mengusulkan agar masa jabatan itu sebaiknya delapan tahun saja, dan tak bisa dipilih kembali. Tetapi, tim hukum BI agaknya lebih cocok dengan enam tahun, dan maksimum dua periode.

"Masa jabatan Gubernur BI yang lebih lama dari presiden itu, dimaksudkan agar dapat memberi keleluasaan dan kontinuitas Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakannya," tulis RUU itu. Tugas pokok Bank Indonesia adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk memelihara stabilitas nilai rupiah. Tugas itu dianggap paling penting, lebih-lebih di tengah terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar saat ini. Akhir pekan lalu, satu dollar dihargai sekitar Rp. 15.000,-, enam kali lebih tinggi dibanding Juli tahun lalu.

Untuk kesuksesan tugasnya itu, BI membutuhkan independensi. Bebas dari campur tangan eksekutif. RUU ini merumuskan, independensi BI dalam tiga dimensi, yakni : independen secara institusional, fungsi-fungsi dan personalia. Yang menarik, dalam soal menegakkan independensi itu, menurut Schlesinger, BI sebaiknya tidak melakukan fungsi pengawasan, pemeriksaan dan penyehatan bank. Fungsi itu, katanya, harus dilakukan oleh lembaga lain yang dibentuk pemerintah. Ia memberi contoh di Jerman, Swiss dan Inggris, fungsi pengawasan dan pemeriksaan itu tidak dilakukan oleh bank sentral. Dalam kasus Indonesia, agaknya fungsi itu bisa dilakukan oleh BPPN.

Photo: Xpos

■ Bank Indonesia: Ingin lebih independen

Istilah Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), bila RUU ini disetujui, tampaknya juga akan lenyap dari kosa kata BI. KLBI akan diganti menjadi kredit, dengan alasan: kredit itu bukan hanya untuk risiko likuiditas, tetapi juga untuk risiko solvabilitas. Menurut Schlesinger, kredit langsung tanpa kolateral dapat menghambat tugas utama bank sentral. "Bank-bank tidak boleh melihat bank sentral sebagai *Big Mother* (tampat mengadu pada saat sulit)," ujar Schlesinger dalam komentarnya tentang RUU itu.

Sebetulnya, selama ini fungsi BI mengasuh bank-bank swasta memang terasa membebani. Lebih dari Rp 100 trilyun dikucurkan untuk menyelamatkan bank-bank dari ancaman kebangkrutan. Kebijakan itu, tak jarang disalahgunakan oleh pemilik bank, sehingga mereka tak hati-hati mengelola banknya. Toh, kalau bangkrut ada yang menolong. Dengan UU baru nanti, kemanjaan bank pada BI diharapkan bisa diakhiri. Masih banyak sektor masyarakat lain yang perlu ditolong. Bukan hanya pemilik bank. ■

Saham Soeharto di Freeport

Diam-diam Soeharto mendapat setoran rutin dari Freeport, lewat perusahaan Bob Hasan. Tapi, rakyat Irian kok malah kelaparan.

Perusahaan raksasa Amerika PT Freeport McMoRan Copper & Gold, (FMCG) tentu tidak akan mati-matian bertahan di bumi Irian jika usahanya di sana tidak mendapatkan keuntungan. Bayangkan saja, pada periode 95-97 saja, total produksi emasnya mencapai 5,667 juta ounces, perak 10,079 juta ounces dan tembaga 4,627 miliar pounds. Dalam laporan resmi mereka, dikatakan bahwa selama 10 tahun sejak operasi tahun 1972, mereka mampu meraup keuntungan sebesar US$ 17,813 miliar. Atau selama ini mereka mampu mengantongi keuntungan sebesar US$ 26,455. Bahkan disebut-sebut penghasilan dari Indonesia merupakan andalan FMCG,karena penyumbang pendapatan terbesar bagi *holding company.*

Semula JJ Dozzy seorang warga negara Belanda pada tahun 1963 yang menemukan Ertsberg berkandungan biji tembaga berjuta-juta ton tahun. Kontan temuan tersebut mendapat perhatian dunia internasional. PT Freeport McMoRan Copper & Gold perusahaan pertambangan yang berbasis di New Orleans AS pun menganggap penemuan itu sebuah jendela masa depan. Sehingga mereka terus-terusan mendekati pemerintah Indonesia dengan berbagai cara untuik bisa ikut memainkan. Lobby-lobby mereka bangun baik kepada pejabat sipil maupun pejabat militer.

Usaha kerasnya mendapatkan hasil tiga bulan setelah Soeharto menjadi pengganti presiden Soekarno Juni 1966. FMCG datang kepada Soeharto dan langsung menawarkan kontrak. Operasi penambangan secara penuh baru berlangsung mulai tahun 1972 yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia (PT FI) anak perusahaan FMCG yang membagi sahamnya dengan pemerintah Indonesia

sebesar 10%.

Pada tahap pertama, 1972-1986 mereka mengaku hanya menambang bijih tembaga dengan jumlah produksinya 9000 ton/tahun. Dihitung, peneri-maan negara dari pajak dan royalti selama 14 tahun hanya US$ 5,388. Sejak 1976, deviden yang diperoleh negara US$ 19,614 juta. Atau total penerimaan negara US$ 5,407 miliar. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan yang diboyong ke New Orleans US$ 8,642 miliar.

Setelah 1986, Freeport mengaku mulai mengeksplorasi kandungan bijih emas dan perak di wilayah adat masyarakat Amungme itu. Diperoleh informasi, selama 10 tahun 1987-1997 produksi rata-rata PT FI untuk produk tembaga 6,7 miliar pound, emas 7,5 juta ounce dan perak 13 juta ounce.

Tahun 1991 perpanjangan kontrak kerja ditandatangani. Struktur kepemilikan modal diubah. FMCG melepas lagi 10% sahammnya menjadi hanya 80%, dan kesempatan pertama diberikan kepada pemerintah Indonesia namun Konon waktu itu Menku JB Sumarlin tidak berniat memiliknya sehingga dibeli IIC. Muncul isu lain, bahwa 10% saham tersebut merupakan saham kosong milik Ginanjar Kartasasmita atas nama Aburizal Bakrie melalui PT Indocoper Investama Corporation (IIC).

Namun, belum lama Bakrie bisa menikmati kemilaunya emas bumi Irian, ia dipaksa melepas sebagian sahamnya ke Bob Hasan — sang operator bisnis Soeharto, melalui PT Nusamba Minerals Industries. Bakrie melepas sahamnya di FI (melalui IIC) ke Bob Hasan sebesar 4,6% yaitu seharga US$ 254 juta. Oleh media luar negeri, pengalihan saham ke Bob Hasan tersebut dinilai sebagai usaha balas jasa kepada Soeharto. Sebab, dana yang untuk membeli saham tersebut diperoleh Bob Hasan dari pinjaman luar negeri dengan jaminan dari FMCG, yang tak lain merupakan *holding company*-nya PT FI. Dengan kata lain, saham itu merupakan hadiah terakhir PT Freeport Indonesia kepada Soeharto melalui si Bob.

Ternyata, selain mendapat keuntungan dari saham pemberian di FI melalui Bob Hasan, Soeharto juga secara rutin mendapat 2% dari pendapatan FMCG. Dalam laporan resmi FMCG tahun 1997, Soeharto menerima upeti sebesar US$ 9,7 juta atau Rp. 136 miliar/tahun. Upeti ini konon sebagai hadiah atas terjaminnya operasi penambangan di bumi Cendrawasih itu.

Tragisnya, di tengah berkilaunya tanah Irian, ribuan rakyatnya terancam kelaparan, ratusan lainnya telah meninggal dunia. ■

Abang Becak yang Terusir

Pengemudi Becak: "Pemerintah jangan hanya Melindungi orang kaya saja, kami orang miskin juga harus diperhatikan. Apakah kami ini bukan rakyat?"

Becak...becak *coba bawa saya*,"begitulah lagu yang mengingatkan masa kecil kita. Tapi, sejak sepuluh tahun lalu, becak hilang dari jalanan ibukota. Pemda DKI Jakarta melarangnya, dengan alasan merugikan citra Jakarta sebagai kota metropolitan dan ibukota negara.

Namun, akibat gejolak krisis moneter yang melanda bumi Indonesia, begitu banyak orang di kehilangan pekerjaan, baik karena diputus hubungan pekerjaannya (PHK) maupun karena perusahaannya tutup, atau tak ada lagi pekerjaan maupun matinya dunia usaha. Akhirnya, dua minggu lalu, terlontar ucapan Gubernur DKI Jaya, Sutiyoso, yang membolehkan becak beroperasi lagi di Jakarta. Alasannya, untuk membantu rakyat kecil yang terimbas krisis ekonomi yang belum tahu kapan akan berakhir.

Tapi, entah mengapa, seminggu kemudian Sutiyoso meralat ucapannya dan melarang becak kembali beroperasi di kota metropolitan ini. Tentu saja para tukang becak yang sudah terlanjur datang ke Jakarta, tak bisa menerimanya. Lalu merebaklah protes. Selasa lalu mereka datang beramai-ramai dengan becak ke DPRD DKI Jaya.

Salah satu yang ikut berdemonstrasi adalah Witantyo, 39 tahun, asal Pemalang, Jawa Tengah. Ia menjadi tukang becak sejak 1972, di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ayah 5 anak ini, ketika becak belum dila-rang beroperasi mengaku bisa menghidupi keluarganya dari menarik becak. Saat itu ia bisa dapat Rp. 400 perhari dan setoran pada tauke becak Rp 60. Ketika becak dilarang, ia beralih pekerjaan menjadi kuli bangunan. Namun, setelah nafkah tak lagi mencukupi ia pulang kampung. Lalu kembali mencari nafkah mengayuh becak di Pekalongan.

Beberapa hari lalu, Wito—begitu ia biasa dipanggil— mendapat informasi becak diperbolehkan lagi beroperasi di Jakarta. Bersama 14 tukang becak lainnya, ia boyongan dengan becaknya naik truk ke Jakarta. Tapi, itulah, baru seminggu beroperasi sudah dilarang Gubernur lagi. "Sedih, hidup kami ini sudah susah, apalagi sejak mulai krisis. Hidup di kampung lebih susah lagi. Tolong pemerintah jangan bikin susah kami lagi untuk mencari rejeki yang halal dengan tenaga kami sendiri mengayuh becak," katanya.

Tapi bukankah becak bisa bikin macet jalanan Jakarta? "*Ah, nggak* ada becak juga sudah macet, itu hanya alasan saja," kata Wito. Sekarang Gubernur melarang becak beroperasi lagi? "Itu artinya Pak Gubernur mulutnya kesana kemari. Makanya saya berunjuk rasa ke sini minta ketegasan. Kalau mau dipulangkan boleh saja, tapi bayarlah ongkos yang sudah kami keluarkan," katanya.

Wito minta harga yang sesuai dengan jerih payahnya mendatangkan becak ke Jakarta. "Ya, Rp. 200.000, cukup," ujarnya. Ia heran dengan sikap pemerintah. "Bagaimanapun saya ini rakyat, pemerintah jangan hanya melihat mentri, pejabat atau orang-orang kaya saja, kami juga harus diperhatikan, dan kami ini adalah bagian terbesar dari bangsa ini. Kami tidak berani melawan pemerintah, tapi kami butuh kepastian untuk dapat mencari nafkah bagi kehidupan keluarga kami," ujarnya sambil berharap becak bisa dioperasikan lagi. "Kami *nggak* minta bisa beroperasi di jalan protokol *kok*," katanya.

Selama seminggui beroperasi Wito mengaku mendapat Rp. 5 ribu sampai Rp. 20 ribu. "Kami akan bertahan *nggak* mungkin pulang kalau *nggak* di-*sangu*. Walaupun memang mencari kerja sulit. Mau jadi kuli bangunan di masa begini juga *nggak* ada lowongan. Tapi kalau saya *nggak* pulang, bagaimana keluarga saya di kampung,mereka akan kelaparan. Itu yang masih menjadi beban pikiran saya. Katanya pemerintah mau memberantas kemiskinan, tapi makin banyak orang yang miskin. Lalu ketika mau usaha mencari nafkah sendiri malah dihalangi," katanya.

Sedangkan Carmo, 47 tahun, ayah delapan anak, menjadi tukang becak sejak 1980. Seperti halnya Wito, Carmo yang mendengar becak boleh beroperasi kembali di Jakarta dan bersama 10 orang kawannya mengangkut becak dengan truk ke Jakarta dan tiba Jum'at dua pekan lalu. Becak yang dimiliki Carmo adalah milik sendiri, yang kalau di daerah bisa laku Rp 400.000 sampai Rp. 500.000 perbuahnya.

Menurut Carmo, orang seperti dirinya juga berhak untuk hidup di negeri ini. "Jangan seenaknya mengusir kami tanpa alasan. Negeri ini bukan hanya milik pejabat atau orang gedean saja. Saya ini orang kecil, hanya mau *nuntut* becak dibolehkan operasi lagi. Saya tidak mau *nuntut* macem-macem. Saya tidak mau *nuntut* presiden diturunkan, gubernur yang korupsi dipecat atau lainnya," katanya. ■

Prof. Awaloedin Djamin, Mantan Kapolri:

"ABRI Mencuri Uang Kami 1,3 Juta Mark"

Mantan Kapolri (1978-1982) Awaloedin Djamin mengusulkan agar kepolisian dipisahkan dari ABRI. Dengan demikian polisi bisa berkembang dan tidak jadi korban angkatan yang lain. Berikut wawancara dengan Awaloedin yang dikutip dari *Jakarta Post* (5/7):

Repro: The Jakarta Post

Mengapa polisi harus dipisah dari ABRI? Apakah itu memungkinkan untuk saat ini?

Di manapun kepolisian di dunia ini adalah bagian dari sejarah negera, sistem politik, dan sistem pemerintahan. Polisi kita didirikan tanggal 21 Agustus 1945 oleh IP M. Jasin, Komandan Polisi Khusus Jawa Timur. Pada dasarnya, polisi juga turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 1 Juli 1946, diperingati tiap tahun sebagai Hari Bhayangkara, secara resmi dinyatakan sebagai hari lahir kepolisian nasional Indonesia.

Tahun 1946 sampai 1961, kepolisian kita langsung bertanggungjawab kepada kepala negara. Tapi semuanya berubah sejak keluar UU Kepolisian No.13/1961 yang menyebutkan bahwa kepolisian adalah bagian dari ABRI. Tahun 1967, polisi mulai kehilangan otonomi untuk menentukan anggaran operasionalnya sendiri dan semua rencana dirancang oleh Mabes ABRI. Sejak itu sampai sekarang, polisi selalu dipojokkan.

Untuk melaksanakan tugasnya, polisi butuh berdiri terpisah dari lembaga lain, jadi semacam Kantor Prosekutor Negara. Jika tidak, mereka amat rentan diintervensi oleh kepentingan kekuasaan. Untuk memenuhi tugas sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, polisi harus fleksibel di garis depan. Nilai yang essensi justru kemanusiaan, bukannya "membunuh atau dibunuh" seperti militer.

Perbedaan ini, antara polisi dan ABRI, membuat kepolisian sulit dikembangkan. Biaya operasional kepolisian, perencanaan, penggajian, dan anggaran kesejahteraan disusun sebagaimana ketiga angkatan yang lain. Pada prakteknya, anggaran, dipotong di sana-sini. Kepolisian harus menunaikan tugasnya setiap hari, tidak hanya di saat perang seperti militer.

Untuk mengajukan anggaran saja, kepolisian harus mendapat persetujuan menhankam dan sejauhmana pelaksanaannya musti melapor ke Pangab. Betapa rumitnya...

Bayangkan, anggaran kepolisian disusun oleh ABRI berdasarkan perbandingan jumlah polisi dengan jumlah penduduk, 1:1.200, jadi satu polisi untuk 1200 warga. Ini gila!!! Rasio menurut standard PBB adalah 1:400. Susahnya, polisi mendapat bagian kue yang paling kecil, tapi dengan setumpuk tugas yang menggunung.

Anda bilang kalau Polisi dipojokkan sejak digabung dalam ABRI, bisa dijelaskan?

Saya dapat memberi *segebung* bukti ke Anda mengenai hal ini. Ada dua hal yang jadi sebab, yaitu sentralisasi anggaran kepolisian di ABRI dan mulainya kerjasama militer dalam *Defense Nation Groups* (DNG).

ABRI mendapat bantuan gratis untuk DNG. Jadi Indonesia mendapatkan, misalnya Nomad (senjata pesawat), gratis. Tapi karena polisi sebagai bagian ABRI tidak membutuh-kannya, jadi tidak mendapatkan apa-apa.

Dalam penyusunan anggaran, misalnya. Ketika saya masih menjabat sebagai Kapolri, anggaran untuk kepolisian hanya Rp. 4,5 milyar untuk seluruh negeri. Padahal kami punya ribuan polsek yang harus disuport, ratusan kantor, asrama, dan sekolah.

Saya berjuang untuk mendapat lebih. Saya bicara ke Pangab waktu itu M. Jusuf, "Kepolisian macam apa yang dimiliki negeri ini?" dan dia menaikkan anggaran kepolisian jadi Rp. 19 milyar tahun depannya.

Tahun 1981 kami mendapat kapal patroli kapasitas 400 ton, sudah disetujui presiden. Tapi ketika PT PAL sudah merampungkan pembuatan kapal itu, tiba-tiba yang dapat kapal adalah Angkatan Laut, bukan kami!

Ketika ini saya tanyakan, mereka menjawab bahwa semua itu tergantung pada putusan Mabes ABRI. Bahkan ketika AL membeli 39 kapal perang dari Jerman, mereka tidak mengembalikan kapal patroli kami.

Di bidang pendidikan, polisi juga diperlakukan berbeda. Saya mencari sendiri beasiswa belajar ke luar negeri untuk perwira-perwira saya, dari Jerman atau Inggris. Ketika saya dapat bantuan pendidikan, semua harus melewati Mabes ABRI dulu baru ke Kepolisian.

Suatu kali saya dapat dua juta Marks Jerman untuk polisi, tapi tebak berapa yang akhirnya saya dapatkan? Saya tanya Jendral Benny Moerdani yang waktu itu Kepala Intelijen ABRI kemana uangnya pergi, "Apa yang Anda lakukan dengan uang saya (kepolisian)?" Dengan enteng Benny menjawab kalau anggaran itu dipotong, "Begini Pak...Anda hanya mendapatkan 700.000 marks". Bayangkan, mereka mencuri uang kami 1,3 juta marks.

Contoh lain ketika polisi mendapat rekomendasi untuk mengikuti *training* dari GSG-9 (Pasukan Khusus Anti-teroris Jerman). Tapi sekali lagi proposal itu harus melewati Mabes ABRI. Saya adalah salah satu orang yang mendapat rekomendasi untuk mengikuti kursus itu. Tapi coba lihat siapa yang berangkat? ABRI menyabot kursus untuk polisi, dengan memberangkatkan Prabowo Subianto. Wajar bila banyak yang takut dengan Prabowo, sebab dia adalah Master Anti-teroris.

Ada pendapat, Polisi jadi kambing hitam akibat kesalahan angkatan lain dalam menangani kasus-kasus yang ramai akhir-akhir ini, pendapat Anda?

Saya tidak ingin menggunakan istilah itu (kambing hitam,*red*). Saya pikir itu adalah efek-samping, hasil dari ketergantungan polisi pada Mabes ABRI. Hal ini tidak akan terjadi bila polisi berdiri independen sebagai bagian dari sistem pengadilan kriminal dan menegakkan aturan sosial. Tugas polisi adalah melakukan penyidikan dan menegakkan hukum.

Tapi lihat apa yang terjadi. Militer melakukan intervensi terhadap peran kepolisian. Mereka bertindak seolah mereka itu perwira kepolisian. Ini jelas satu kesalahan dan harus segera dibongkar.

Kasus Trisakti adalah satu contoh apa yang terjadi antara polisi dan ABRI. Ketika komando lebih kuat ketimbang hukum...lihat apa yang terjadi! Saya tak ingin bicara lebih panjang...hal itu sungguh terlalu menyedihkan.

Yah, saya tetap mengharapkan yang terbaik. Saya sudah menyampaikan pendapat saya ke Wiranto. Sekarang semua tergantung pada dia. ■

Bintang Kejora di Irian

Irian bergolak. Masyarakatnya menuntut kemerdekaan, tentara datang dan menembak.

Pasukan ABRI menyerbu aksi mimbar bebas mahasiswa di Universitas Cenderawasih, Abepura Jayapura tanggal 3 Juli 1998, 1 meninggal dan dua mahasiswa luka berat. Aksi itu menuntut kemerdekaan bagi Papua Barat. Sehari sebelumnya di Jayapura terjadi demontrasi menuntut hal yang sama. Namun mereka gagal mengibarkan bendera OPM di halaman DPR lantaran diblokir pasukan ABRI. Dalam peristiwa ini kurang lebih lima puluh orang ditangkap.

Sementara ancaman Pangab Jenderal TNI Wiranto untuk melibas demonstran anti integrasi di Irian benar-benar terjadi di kota Biak pada hari Senin (6/7)sekitar pukul 5.30 WIT. Pasukan gabungan termasuk dari Batalyon Yonif 733 Patimura Ambon dan pasukan militer yang muncul dari dua kapal perang yang datang malam hari dan berlabuh di dermaga Biak melakukan penyerangan membabi-buta menuju lokasi kegiatan penaikan bendera. Tujuh orang penduduk sipil tewas tertembak di halaman rumahnya. Beberapa orang yang dianggap pentolan dalam aksi massa itu digiring menuju kantor DPRD Biak Numfor. Bahkan Yopi Karma salah seorang pemimpin massa ditembak kedua kaki dan diboyong ke kantor polisi.

Dalam peristiwa ini sedikitnya 26 orang dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak karena luka tembakan. Sementara ada saksi mata mengatakan bahwa lebih banyak korban diangkut truk dan dimasukkan ke RS Angkatan Laut Biak Sorido. Di kedua tempat perawatan itu dijaga ketat pasukan ABRI.Hingga saat ini suasana di kota Biak mencekam dan jalan-jalan utama telah diblokir oleh satuan keamanan. Masyarakat mulai kekurangan bahan makanan.

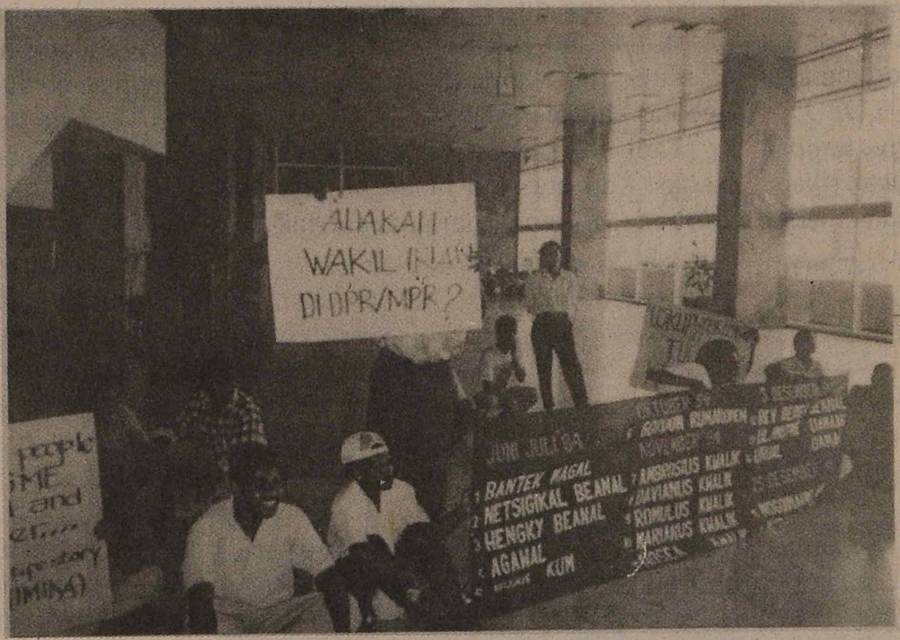

■ **Aksi Mahasiswa Irian di DPR:** Separatis atau soal keadilan?

Tuntutan pemisahan diri dari Indonesia muncul juga di Wamena. Massa mengibarkan bendera 'Bintang Kejora' dan menuntut kemerdekaan bagi masyarakat Papua Barat. Sementara bendera Papua barat berukuran 1x60 Cm, selasa 7 Juli 1998 sekitar pukul 05.50 WIT dikibarkan di halaman gedung DPRD Wamena-Jaya Wijaya, bendera tersebut bertuliskan *"we ask for our right to get independence, in our land West Papua"*.

Namun sekitar jam 6.40 WIT, bendera dipaksa diturunkan oleh aparat keamanan. Massa yang berkumpul di DPRD akhirnya diajak dialog oleh Dandim 1702 Jayawijaya Kol. Inf. Drs. M Nur Godan, Kapolres Letkol Pol. Drs. Ipong Supomo. Ketika mereka berdialog, muncul 400 orang dan bergabung dengan masa yang berada di dalam gedung dan berteriak minta bendera dikibarkan lagi.

Bendera OPM itu pun diizinkan dikibarkan pada pukul 11.10 WIT sampai dengan 18.00 WIT. Dan massa bubar dengan tenang seperti kesepakatan. Sementara itu, sejak meletus kerusuhan di Universitas Cenderawasih Abepura-Jayapura, setiap malam pasukan ABRI terus melakukan operasi penangkapan dan penggeledahan terhadap orang-orang yang dicurigai ikut dalam demonstrasi-demonstrasi menuntut kemerdekaan. Pemburuan itu tidak hanya dilakukan di jalanan, tapi sudah masuk dari rumah ke rumah. .Hal itu terjadi di Jayapura, Sorong, Biak, Wamena, dan beberapa tempat yang lain. Diberitakan, puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jayapura mendatangi tim anti kekerasan yang dibentuk Foker LSM dan 8 Partisipan untuk meminta perlindungan. Hingga saat ini diperoleh informasi sedikitnya 200 orang ditangkap dan ditahan.

Isu separatis di Irian Jaya memang sudah lama tenggelam dan tak seheboh isu kemerdekaan bagi rakyat Timtim. Mencurigai dan mencari kesalahan masyarakat Irian tentu tidaklah tindakan bijaksana. Karena sesungguhnya bangkitnya semangat merdeka karena perlakuan tidak baik yang dilakukan oleh Jakarta. Misalnya intervensi militer yang sangat mengganggu aktifitas kehidupan, perusakan lingkungan dan ekspolitasi alam, dsb. Nah. ■

Kalangan LSM di Biak, Kamis lalu berhasil mengidentifikasi para korban luka di RSUD Biak. Jumlah yang bisa didata hanya 15 korban, sebagai berikut:

1) Baldus Baransano (56)
Tertembak di pantat sekitar 20 meter dari halaman rumah korban
2) Elia Ansek (54)
Tertembak dibagian perut sehingga ususnya terurai keluar (terakhir dilaporkan tewas)
3) Ruland Mayer (19)
Ditembak di kaki
4) Steven Mambobo (21)
Ditembak di kepala
5) Andi Marisan (29) laki-laki
Ditembak di perut
6) Felix Msen (19)
Ditembak di betis
7) Ruben Uruboi (23)
Ditembak di kepala
8) Kores Ap (17)
Dipukul besi di kepala
9) Ely Orisu (19)
Ditembak di perut
10) Yosias Rumbarar (20)
Ditembak di paha
11) Bernard Mansawan (25)
Dipukul dengan besi di kepala
12) Septer Ukago (23)
Ditembak di paha
13) Naftali Ronsumbre (20)
Ditembak di kepala
14) Costan Karma (30)
Dipukul dengan popor senjata dikepala
15) Otto Kawer (35)
Ditembak di kepala
16) Yopy Karma (40)
Tertembak di kedua kaki (ditahan di kantor polisi)

■ POLITIK

Golkar Pasti Terpuruk

Golkar diperkirakan maksimal akan dapat 15% suara. Tidakkah, sebaiknya orsospol peninggalan Orde Baru itu dibubarkan saja?

Seperti diramalkan banyak orang, pertarungan antar kubu di Munas Luas Biasa (Munaslub) Golkar berlangsung seru. Sampai hari kedua, Jum'at siang, 10 Juli lalu, kekuatan antar kubu Akbar Tanjung dan Edi Sudrajat relatif masih seimbang. Sampai acara pemandangan umum DPD-DPD berakhir, tercatat 12 DPD mendukung Akbar sebagai Ketua Umum Golkar periode mendatang. Sedangkan Edi didukung 9 DPD.

Sedangkan, DPD-DPD lainnya sampai berita ini ditulis belum menentukan sikap. Hanya DPD Yogyakarta yang sudah mengisyaratkan akan bersikap netral alias tak mendukung kedua calon di atas. "Kami akan abstain saja. Kalau tidak memilih *kan* tidak apa-apa," tegas Ketua DPD Yogya, Sri Sultan Hamengkubowono X.

Serunya pertarungan antar kubu tersebut memperlihatkan para anggota orsospol peninggalan rejim Soeharto itu masih bersemangat mengerek bendera Golkar. Setidaknya, sebagian anggotanya masih optimis Golkar dapat berkiprah di era reformasi sekarang ini. "Kalau benar-benar direformasi, saya yakin Golkar masih bisa diterima rakyat," kata Siswono Judohusodo, salah seorang pemimpin Golkar, dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Tak jelas apa dan bagaimana reformasi yang dimaksud Siswono. Yang jelas, siapapun yang memimpin Golkar nanti, bisa dipastikan sudah menyiapkan strategi untuk mengembalikan hegemoni Golkar di pentas politik nasional. Misalnya, seperti ditulis Riswanda Imawan dalam salah satu artikelnya di Majalah *D&R*, "Dengan menciptakan citra Golkar yang reformis, dengan cara merombak format organisasi dan mendepak tokoh bermasalah." Itu kalau RUU Pemilu yang baru ditolak DPR.

Kemungkinan lain, kalau UU Pemilu baru yang menerapkan sistem distrik diberlakukan, maka Golkar akan melakukan manuver politik. Caranya, dengan menyebarkan kader-kadernya menyusup ke partai-partai baru, dan bersikap dengan visi seolah-olah kaum reformis. Tujuannya adalah untuk menguasai distrik-distrik dalam pemilu. "Realistis saja. Dibanding kekuatan kaum reformis, kekuatan Soehartois masih memiliki keunggulan ekonomis maupun organisatoris," kata Riswanda.

Keunggulan itu akan membuka peluang Golkar tampil lagi menguasai perpolitikan nasional. Caranya, dengan memainkan politik uang (*money politics*) alias membeli suara para pemilih. Terutama pemilih yang sedang dibelit kesulitan ekonomi. Dengan begitu, kata Riswanda, bangkitnya kemunculan kaum Soehartois bukan sebatas khayalan semata.

Tapi, itu semua masih teori di atas kertas. Kenyataan di lapangan bisa jauh berbeda, karena suara rakyat tak bisa diduga sama sekali. Apalagi, selama ini rakyat kecil sudah muak dengan Golkar, yang diidentikan dengan penguasa Orde Baru yang kerap menindas rakyat. Jadi, bisa saja politik uang yang dijalankan Golkar tak jalan sama sekali. Artinya, siapa yang bisa menjamin rakyat yang sudah menerima "uang suap" akan menusuk gambar beringin di bilik suara?

Photo: Xpos

■ **Demo Dukung Soeharto:** Golkar = Soeharto

Selain itu, pemulihan citra Golkar bukanlah soal gampang. Itu tak cukup perombakan organisasi atau manipulasi informasi ala *public relations*. Mochtar Pabottingi, ahli politik dari LIPI, bahkan mengatakan Golkar sama sekali tak bisa lagi dibenahi. "Golkar itu sudah kotor, bagaimana mau dibenahi? Lebih aman membubarkan diri saja," katanya.

Karena itu, banyak kalangan pesimis Golkar bisa berbuat banyak dalam pemilu nanti. Sarwono Kusumaatmadja, mantan Sekjen Golkar, misalnya, meramalkan perolehan suara Golkar dalam pemilu mendatang tak sampai 20%. Perkiraan itu bisa jadi benar. Sebab, pilar-pilar pendukung utama Golkar sudah dilucuti. Pegawai negeri, misalnya, tidak lagi diikat asas monoloyalitas terhadap Golkar. Mereka bebas menyalurkan aspirasinya ke partai politik lain. Begitu pula ABRI, sudah menyatakan mengambil jarak terhadap Golkar.

Dengan begitu, siapapun yang terpilih menjadi ketua umum Golkar terpaksa bekerja keras membangun citra partai beringin itu, agar tak terpuruk dalam pemilu. Pilihan lain: bubarkan saja, lalu bentuk partai politik baru yang bisa menampung aspirasi politik rakyat. ■

Perkosaan, Lamban Ditangani

Komnas HAM desak pemerintah akui adanya kekerasan seksual. Tutti Alawiyah mengaku lamban karena sensitivitas persoalan. Mengusutnya?

Pemerintah tak berhasil mengemban amanah UUD'45. Sebab jelas disebut bahwa negara wajib melindungi warga-negara. ABRI yang berkompetensi terhadap keamanan masyarakat ternyata tak bisa mencegah berlangsungnya penjarahan, pembakaran, dan bahkan pemerkosaan massal terhadap keturunan Tionghoa yang notabene adalah warga-negara Indonesia juga. Bukan hanya tidak bisa mencegah apalagi melindungi, pemerintah juga tidak sigap untuk mengusut siapa pelaku kerusuhan.

Sikap tidak sigap itu disesalkan Komnas HAM dalam pernyataannya yang dibacakan Saparinah Sadli (9/7). "Penting sekali kita menemukan pelakunya itu, tetapi yang lebih penting sekarang ini adalah menciptakan iklim sebaik-baiknya bagi suasana pemulihan ketenangan dan martabat para korban. Ini adalah tindakan yang tidak bisa disamakan dengan tindakan lainnya. Tanggungjawab Komnas ini adalah mendudukkan perkaranya, dan tanggungjawab pemerintah untuk mengusut pelakunya itu," tambah Marzuki Darusman.

Komnas juga merasa prihatin atas menguatnya sikap skeptis (tidak peduli) yang selama ini ditunjukkan pemerintah. Sikap itu menular dan mempengaruhi sebagian masyarakat yang meragukan kebenaran peristiwa tersebut, karena tidak mudahnya diperoleh bukti-bukti. "Kesangsian bahwa kekerasan seksual serentak itu telah terjadi, sungguh menunjukkan sikap tidak sensitif terhadap beban psikis para

korban dan keluarga mereka, serta hanya melipatgandakan derita mereka bahwa seolah-olah ini merupakan musibah yang harus ditanggung sendiri," tekan Saparinah Sadli.

Kuat dugaan, skeptisme pemerintah itu berangkat dari ketidakseriusan untuk menyelesaikan masalah pemerkosaan. Tetapi anggapan ini ditolak Danpuspom ABRI, Mayjen TNI Syamsu D. "Siapa yang bilang kurang serius? Menhankam/Pangab sudah perintahkan polisi untuk tangani itu. Tanya sama Kapolda Metropolitan," katanya. "Komnas HAM itu 'kan baru mendengar laporan dari orang, bukan orang yang bersangkutan. Polri sudah mengadakan pengusutan, makanya, tolonglah korban yang bersangkutan lapor sama polisi, jangan keluarganya," ucap Syamsu. Sementara itu, Menteri Peranan Wanita Ny. Tutti Alawiyah mengaku lambannya penanganan itu karena sensitifnya kasus ini sehingga sulit untuk mengusut pelakunya.

Pernyataan Komnas juga dinilai terburu-buru menyimpulkan perkosaan diorganisasi. Sehari usai Komnas melansir pernyataannya, sekelompok perempuan yang menamakan diri Komite Pembela Martabat Wanita Indonesia (Kopmawi) langsung menyatroni. Juru bicara Kopmawi mendesak Komnas HAM untuk tidak membuat berita yang mempermalukan Bangsa Indonesia sendiri, melainkan menyodorkan bukti-bukti adanya pemerkosaan massal itu.

Miriam Budiharjo, Wakil Ketua Komnas HAM, tampak mengelus dada tanpa mengucap apa-apa. Memang, bagaimana mungkin mengumumkan kepada publik mengenai bukti-bukti pemerkosaan perempuan? Tetapi dari data Posko Relawan yang didapatkan langsung dari para korban, ada indikasi peristiwa itu terorganisir.

Adanya kerusuhan yang berbuntut pemerkosaan, selalu didahului aksi sekelompok orang yang bukan warga sekitar lokasi kerusuhan. Aksi-aksi itu sengaja diarahkan ke pertokoan dan perumahan warga keturunan Tionghoa. Sesudah toko-toko mereka dijarah dan dibakar, perempuan-perempuannya diperkosa. Seorang ibu yang ditemui Tim Relawan bahkan mengalami stres berat setelah menyaksikan dua adik kandungnya diperkosa, lalu dilemparkan ke kobaran api hingga tewas (*Xpos* No.24).

Sulitnya mengusut perkosaan massal, bagi pemerintah tidak selayaknya berhenti mengungkap kasus ini. Jalan keluarnya, pemerintah lewat Polri tidak harus menelusurnya dari korban yang menderita trauma tetapi dari pelaku-pelaku kriminal penjarahan yang justru banyak dilepas oleh aparat setelah menyerahkan barang jarahan. ■

Megawati + Gus Dur:

Koalisi Nasionalis & Islam

Mega meluaskan dukungan ke massa Islam tradisionalis. Potensinya besar untuk jadi presiden. Konsepnya apa?

Megawati Sukarnoputri mulai menggeliat dan merentangkan jangkauannya menyusun kekuatan. Pekan lalu ia berkoalisi dengan Abdurachman Wahid, kawan lamanya. Diharapkan koalisi ini dapat menambah bobot kekuatan Megawati untuk berkiprah lagi di dunia politik.

Memang, bagaimanapun Megawati tidak bisa berjuang sendiri bersama kelompoknya, yang mengandalkan nasionalistis dan kekuatan kharismatik Bung Karno, bapaknya. Walaupun tak dapat dipungkiri 'pengagum berat' Bung Karno cukup banyak dan militan, tapi untuk masa mendatang andalan kekuatan seperti itu tak lagi layak dipertahankan. Karena Bung Karno adalah sebuah 'masa lalu' yang juga tidak bersih dan tidak cukup berhasil membawa bangsa Indonesia pada kemajuan.

Kini, Mega yang biasanya mengandalkan dukungan nasionalis tradisional, mau bergabung dengan kekuatan yang sepadan, Islam tradisional. Yang kebetulan saat ini dipimpin oleh Abdurachman Wahid alias Gus Dur. Menurut salah seorang presidium Komite Pemantauan Kejahatan Politik Soeharto (KP-TAPOS), Fauzi Isman, kekuatan Megawati Sukarnoputri hanya mampu berkoalisi dengan Islam tradisional. "Ia tidak bisa merebut simpati dari kekuatan Islam modernis. Saya pikir dukungannya terbatas pada pengikut Gus Dur — yang juga tentunya tidak semua pengikut Gus Dur sepakat. dan Mega tak akan banyak dan mampu meraih perhatian ummat Islam yang lain. Apalagi kemampuan Mega selama ini hanya berlindung dibalik kharismatik bapaknya, Bung Karno. Mega bukan pemimpin yang punya konsep," ujar Fauzi.

Pendapat Fauzi ini juga diamini pengamat politik dari LIPI, Syamsuddin Haris. "Kita belum dengar visi dan pandangannya mengenai masa depan bangsa. Belum ada konsep yang ditelurkannya," katanya. Sikap Mega yang lebih banyak diam, juga dinilai Syamsuddin tidak cocok dengan masa depan bangsa. "Kalau mau jadi presiden, Mega harus kemukakan agenda politiknya, *dong*," ujarnya lagi.

Diamnya Mega saat menjelang penumbangan Soeharto oleh mahasiswa juga dinilai sebuah kelemahan anak Bung Karno itu. Banyak orang menganggap Mega tak mampu mengantisipasi peluang. Padahal semula banyak orang juga mahasiswa berharap Mega mampu memimpin dan mendobrak kepemim-pinan Soeharto yang sudah keluar 'rel' dari politik untuk memajukan bangsa. "Kami tak bisa dukung kalau Mega hanya mau tampil sendiri, kami akan dukung kalau ada kekuatan bersama dalam Komite Rakyat Indonesia, yang memperbaiki kehidupan bangsa ini dari puing-puing kebobrokan akibat pemerintahan totaliter Soeharto, yang kini masih berlanjut di bawah Habibie," kata seorang kawan dari Forum Kota (Forkot).

Mereka juga menyayangkan pernyataan Mega yang mengimbau agar tidak menghujat Soeharto, yang telah membuat rusak negeri ini. "Seharusnya Mega berpendapat netral dan sesuai hukum, misalnya bawa saja Soeharto ke pengadilan. Kalau maksudnya untuk mendapat simpati rakyat tak pantas dilakukan oleh Megawati, yang ditindas oleh Soeharto dan ABRI. Apakah itu usaha Mega mendapat peluang dari militer, kami tidak tahu, Mega patut menjelaskannya pada rakyat," ujar seorang mahasiswa lainnya.

Makanya, Mega mendapat cibiran mahasiswa, saat berpidato di Kampus Universitas Trisakti setelah kerusuhan 12 Mei lalu. Simpati Megawati pada kelompok pro-demokrasi yang juga ikut memperjuangkan aspirasi-nya, juga kurang dan hambar. Bahkan, banyak kelompok pro-demokrasi, menya-dari, bahwa memang segitulah kemam-puan putri istana, tak mampu merasakan denyut-denyut aspirasi rakyat.

Walaupun mahasiswa, kelompok prodemokrasi, Islam modernis maupun pengamat politik sinis terhadap perjuangan Megawati. Rakyat kecil, banyak juga yang bersimpati dan berharap Megawati menjadi Presiden Indonesia dimasa mendatang. Saat *Xpos* bertanya pada seorang tukang koran dan tukang rokok di muka stasiun kereta api Gambir, tentang kondisi politik sekarang. Mereka berharap Mega jadi presiden menggantikan BJ Habibie. "Dari pada Try Sutrisno, yang saat Suharto berkuasa hanya manut dan kini coba berkoar-koar galak, kami pilih Megawati jadi presiden menggantikan BJ Habibie yang lucu itu," kata penjual koran sambil tertawa.

Tampaknya ada dua tokoh yang banyak mendapat simpati untuk menjadi pemimpin Megawati atau Amien Rais. Peluangnya *fifty-fifty*. Kenapa tidak bergabung saja?. ■

Jannes Hutahean, Aktifis Buruh:

"Ancaman Militer Tak Zamannya Lagi"

Semangatnya memperjuangkan buruh di Indonesia patut diberi pujian. Tak heran, pada November lalu bersama 2 orang dari lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan buruh di Sumatera Utara, dan seorang wakil dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), berkeliling Amerika Serikat. Mereka diundang ke beberapa kota di AS, untuk bertemu dengan senator, anggota, konggres, pemerintah Clinton, NGO buruh di AS dan masyarakat negeri Paman Sam yang concern terhadap hak asasi manusia.

Pekan lalu *Xpos* bertemu dengan Jannes Hutahean, pada acara Seminar Nasional "Reformasi Hukum Perburuhan" yang diadakan AFL-CIO di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan. Lelaki yang lahir di Belawan, Medan 34 tahun yang lalu, kini aktif sebagai Sekretaris Yayasan Pondok Rakyat Kreatif. LSM itu bergerak memperjuangkan hak-hak buruh anak dan perempuan. Sebelumnya, Jannes pernah aktif di Kelompok Studi Pendampingan Pembangunan Masyarakat di Siborong-borong, Sumatera Utara pada tahun 1987-1990. Lalu ia aktif di Yayasan Teknologi dari tahun 1990-1992. Jannes juga pernah mendekam di penjara Tanjung Gusta Medan, bersama-sama Muchtar Pakpahan dan Amosi Telambauna selama 6 bulan. Ia dituduh sebagai penggerak dan penghasut pada saat adanya unjuk rasa buruh yang berakhir dengan kerusuhan di Medan, 13 April 1994. Di bawah ini kutipan wawancara *Xpos* dengan Jannes di kamarnya di Hotel Gran Melia, Jakarta.

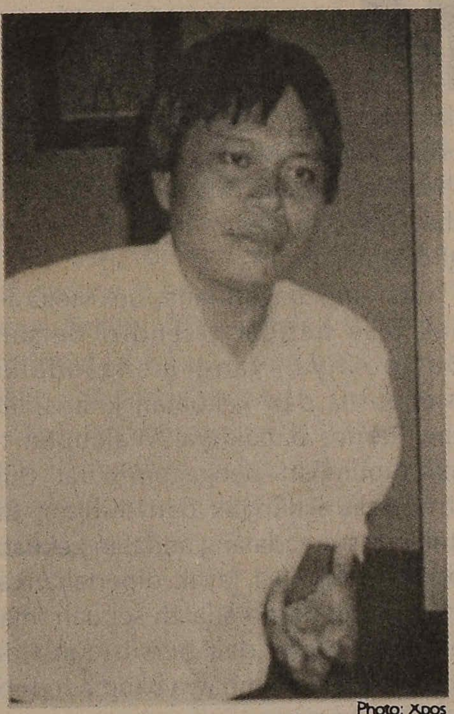

Photo: Xpos

Kenapa fokus perjuangan Anda untuk buruh anak dan buruh perempuan?

Kami merasakan perlu keadilan untuk buruh anak dan buruh perempuan. Kami beruasah memampukan dan memberdayakan mereka agar tidak diekspolitasi oleh pengusaha, atau majikan.

Kenapa buruh anak kini semakin subur?

Ya, memang ini sangat memprihatinkan,. Hal ini terjadi, karena banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ayah dan ibunya, lalu itu menyuburkan tumbuhnya buruh anak.

Sebenarnya bolehkah anak-anak itu bekerja?

Menurut aturan pemerintah, sih, tidak boleh, konvensi organisasi buruh dunia (ILO) juga menentang. Karena anak-anak bisa diperlakukan seenaknya, mereka dibayar murah dan jam kerjanya, tak terbatas.

Apa yang diperjuangkan Pondok Rakyat Kreatif?

Kami memperjuangkan hak-hak anak-anak yang menjadi buruh. Kalaupun anak-anak itu bekerja sebagai buruh, mereka harus diperlakukan sebagai anak-anak. Kalaupun anak-anak itu bekerja, hanya boleh 4 jam sehari, setelah itu diberi kesempatan untuk bermain, sebagaimana anak-anak lainnya. Untuk itulah kami menyurati berbagai lembaga sosial dan bekerja dengan lembaga lain yang memperjuangkan anak-anak, untuk menyelamatkan anak-anak itu dari eksploitasi orang dewasa, pengusaha dan penguasa. Kami memberikan perhatian kepada anak-anak dibawah umur yang bekerja menjadi nelayan, di pabrik, dan di perkebunan.

Berapa banyak buruh anak di Sumatera Utara?

Buruh anak di Sumatera Utara sebanyak 3.200 orang, terbanyak di sektor makanan, garmen, elektronik dan karet.

Dua pekan lalu, terjadi kerusuhan di kampung nelayan Gabion, dekat Medan. Para nelayan marah pada pengusaha pukat harimau, dan aparat keamanan malah melindungi, para pengusaha pukat harimau itu. Lalu Panglima Daerah Militer yang baru Rizal Nurdin, menuduh aktifis LSM dibalik kerusuhan Gabion itu, bagaimana pendapat Anda?

Menurut saya, Pangdam perlu membuktikan omongannya, agar dapat menjadi pegangan. Selama ini mereka tak pernah punya bukti hanya tuduhan kosong. Pada zaman reformasi seperti ini perlu transparansi. Intimidasi, ancaman atau penyebaran ketakutan yang dilakukan militer pada zaman Soeharto berkuasa, kini sudah tak zamannya lagi. Dulu saya masuk penjara dengan tuduhan seperti itu, mereka tak punya bukti, lalu semuanya direkayasa sehingga kami harus mendekam dalam penjara.

Sebenarnya apa sih yang Anda tuntut untuk perbaikan buruh di Indonesia?

Perubahan yang lebih adil dan lebih sejahtera untuk buruh.

Menurut Anda pada zaman reformasi sekarang, apa yang harus diperbaiki?

Pada zaman reformasi ini, dengan adanya multi serikat buruh, perlu ada serikat yang benar-benar basis perjuangananya dari buruh. Saya pikir tantangan buruh kini semakin berat. Misalnya, soal upah yang tidak sebanding dengan beban pekerjaan, lalu konsistensi perjuangan mereka agar tidak tercabik-cabik oleh kepentingan pengusaha dan penguasa yang suka melakukan rekayasa. Melawan perlakuan semena-mena dari majikan, mengubah peraturan atau perundang-undangan yang tidak cocok dengan kebebasan berunding dan kebebasan memperoleh hidup sehat layak. Untuk itu sekarang, perlu dibekukan penggunaan UU Ketenagakerjaan No.25/1997, yang merugikan buruh. Pemerintah yang ada sekarang harus menyusun kembali UU yang merugikan hak-hak buruh. Apalagi, apalagi pemerintah sudah meratifikasi konvensi ILO 1987 tentang kebebasan berpendapat dan berkumpul, yang selama Suharto berkuasa semuanya dibungkam.

Soal partai buruh?

Kami melihat partai buruh, pada dasarnya, perlu. Tapi Partai buruh harus memperjuangkan buruh. Sebab kalau tidak, suatu saat partai buruh di parlemen akan ditinggalkan. Partai buruh harus dibedakan dengan pergerakan buruh. Pergerakan buruh atau labour movement, adalah perjuangan buruh agar serikat buruh dan juga partai buruh memperjuangkan hak-hak buruh, Nah partai buruh, juga harus disesuaikan dengan pergerakan buruh. Sehingga ada perimbangan antara buruh itu sendiri dengan penguasa, serta komponen-komponennya. Perimbangan itu penting, mengingat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama orde baru, dimana negara memaksa rakyat untuk tunduk. Dan kami kaum buruh akan terus melawan pemerintah yang seperti itu. ■

Xpos

XANANA : OTONOMI ITU LAGU LAMA

Diterbitkan oleh:
Komunitas Informasi Terbuka
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: **http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp**
PO.Box 22202 London SE5 8WU, United Kingdom
Ganti ongkos cetak Rp. 1000,- Terbit seminggu sekali

Beranikah ABRI Adili Prabowo?

Sejumlah perwira Kopassus terlibat penculikan aktivis. Letjen Prabowo siap bertanggungjawab. Instruksi "mengamankan" para aktivis, agaknya datang dari Soeharto.

Ibarat bintang, sinar Letjen Prabowo Subianto kini sedang pudar-pudarnya. Setelah dicopot dari jabatan Panglima Kostrad, medio Mei lalu, jenderal yang sempat mendapat banyak julukan ini (antara lain: *the rising star* atau *the golden boy*) terancam pula dicopot pangkatnya alias dipecat dari dinas militer. "Dosanya terlalu berat. Dia (Prabowo) tidak bisa diselamatkan lagi," kata sumber *Xpos* di Markas Besar ABRI. Dosa yang dimaksud berkaitan dengan kasus penculikan sejumlah aktivis pro-demokrasi.

Tanda-tanda bakal terdepaknya Prabowo sudah terlihat sejak akhir Juni lalu. Saat itu, Menhankam/Panglima ABRI, Jenderal Wiranto, mengumumkan adanya indikasi keterlibatan anggota ABRI dalam aksi penculikan para aktivis. Menurut Wiranto, sampai saat itu tak kurang 40 orang telah diperiksa (dengan status saksi dan tersangka) Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI. Sebagian diantaranya adalah anggota ABRI.

Dua pekan kemudian, Ketua TPF ABRI, Mayjen Syamsu Djalal, memperjelas ucapan atasannya. Ia mengumumkan bahwa sedikitnya tujuh anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) sudah diperiksa sebagai tersangka penculikan. Siapa mereka itu? "Kalau saya menyebut nama-nama, nanti saya sudah memvonis. Tunggulah, kami pasti akan mengungkap kasus ini," ujar Syamsu, yang juga menjabat Komandan Puspom ABRI.

Repro: Tauk

■ **Prabowo:** Ada misi ungkap gerakan radikal

Tapi, kabarnya lima diantara anggota Kopassus itu berpangkat perwira: seorang kapten, seorang mayor, dua kolonel, dan seorang jenderal. Salah satu diantaranya adalah Kolonel Chairawan, Komandan Grup 4 Kopassus. Seperti diketahui, Grup 4 — yang lebih dikenal dengan sebutan Grup Sandi Yudha — merupakan salah satu batalyon utama Kopassus. Grup ini berkualifikasi intelijen tempur, yang dalam masa damai, bertugas melemahkan gerakan oposisi (lihat Korban *Ambisi Politik Prabowo*).

Lajimnya anggota militer, tentunya, Chairawan dan anak buahnya tak bertindak sendiri. Melainkan atas instruksi atasannya. Kebetulan, saat aksi-aksi penculikan aktivis marak (April 1997 sampai Maret 1998) Komandan Jenderal Kopassus dijabat Prabowo. Soal instruksi itu diakui pula oleh Jenderal Wiranto. "Memang ada perintah dari pimpinan Kopassus untuk secepatnya mengungkap gerakan-gerakan yang dinilai radikal pada waktu itu. Dalam pelaksanaannya, ternyata ada langkah-langkah di luar batas kepatutan, yang kita anggap merupakan suatu tindakan yang tidak tepat," ungkap Wiranto.

Kalau begitu, apakah aksi penculikan itu merupakan tanggungjawab Prabowo? Wiranto, juga Syamsu, tak mau berkomentar. "Nanti kita usut, dia (tersangka yang sudah ditahan) menerima perintah dari siapa," kata Sjamsu. Prabowo, yang sekarang menjabat Komandan Sesko ABRI, sendiri sampai saat ini belum diperiksa. Memang, ia pernah dipanggil Wiranto ke Mabes ABRI untuk ditanyai soal keterlibatan para anggota Kopassus tadi dalam aksi penculikan aktivis. Sayang, apa kesimpulan hasil pertemuan kedua jenderal yang saling berseteru itu tak jelas benar.

Meskipun nanti dinyatakan terlibat

Berita Pekan Ini

Korban Ambisi Politik Prabowo ... 3
IMF Bukan Dokter Sakti ... 5
Latief Curi Uang TKI ... 6
Tapos Perlu Direformasi ... 9
Mencari Dalang Pemerkosa ... 10
"Rakyat Papua Akan Merdeka" ... 12

Timor Leste

Setengah pulau di belahan timur itu, telah lama jadi kerikil dalam diplomasi Indonesia. Kerikil kecil yang lama-lama menjadi besar, dan menyakitkan, karena kebodohan kita sendiri.

Kebanyakan orang Indonesia tak mendapat informasi yang memadai tentang Timor Leste. Propaganda pemerintah bertahun-tahun, membentuk alam bawah sadar banyak orang Indonesia: untuk menganggap setengah pulau kecil itu memang bagian dari kita. Dengan informasi terbatas, orang-orang mengembangkan nasionalisme sempit, dalam menanggapi tuntutan rakyat Timor Leste yang ingin menentukan nasib sendiri. Suatu anggapan yang keliru.

Insiden Dili 1992, membuka kesadaran banyak orang Indonesia, bahwa ada yang keliru dalam perilaku pemerintah Jakarta di sana. Sejak itu, aktivis Indonesia yang menyuarakan nasib Timor Leste makin banyak. Organisasi-organisasi bermunculan, menyuarakan simpati untuk mereka. Tuntutan untuk referendum, kini, tak hanya monopoli kaum pergerakan Timor Leste, tetapi juga banyak aktivis pro-demokrasi di Indonesia. Aktivis pro-demokrasi yang sejati, menanggung malu yang besar, tiap kali dihadapkan pada perilaku tentara Indonesia di Timor Leste.

Yang mengejutkan, simpati untuk referendum itu, kini juga muncul dari Amien Rais. Tokoh reformasi dalam penumbangan Soeharto itu, biasanya dikenal cukup konservatif dalam masalah Timor Leste - seperti halnya dengan Megawati. Mereka, agaknya khawatir, bila ide referendum dibiarkan, maka gerakan separatis bisa merembet ke daerah lain: Aceh dan Irian Jaya.

Tetapi, untunglah, makin banyak orang yang menyadari: soal Timor Leste memang beda dengan daerah lain. Status politik daerah itu belum pernah diputuskan secara demokratis dan jujur. Karenanya, referendum merupakan satu-satunya cara untuk menentukan nasib daerah itu. Sebab politik integrasi yang dipaksakan dengan senjata lebih dari 20 tahun, toh terbukti gagal. Mengakui hak rakyat Timor Leste untuk menentukan nasib sendiri, adalah manifestasi jujur dari setiap orang Indonesia yang menjunjung cita-cita prokla-masinya.

Seyogyanya, tidak ada yang merasa malu, bila kita harus mengakui kesalahan di masa lalu. Indonesia tak akan kehilangan apa-apa, bila Timor Leste merdeka. Hak kemerdekaan itu, dijamin oleh preambul konstitusi kita.

■ LUGAS

dalam aksi penculikan, Prabowo tak akan diseret ke Mahkamah Militer. "Paling-paling hanya dibebastugaskan dari dinas militer," kata sumber *Xpos* tadi. Mekanismenya, lewat forum Dewan Kehormatan Militer (DKM). Preseden seperti itu memang pernah dilakukan saat menangani Peristiwa Santa Cruz, Dili, tahun 1991. Saat itu perwira tinggi yang menjadi korban adalah Mayjen Sintong Panjaitan (saat itu menjabat Panglima Kodam Uda-yana) dan Brigjen Rudolph Warouw (Panglima Komando Operasi di Timor-Timor).

Tapi, tindakan itu pun bukan tanpa risiko. Sudah jadi rahasia umum, Prabowo yang membina karir militernya di Kopassus dan Kostrad, mampu tampil sebagai salah seorang perwira paling "berpengaruh" di ABRI. Ia berhasil menggalang jaringan dengan sejumlah perwira tinggi ABRI, terutama teman-teman seangkatannya di Akabri (Angkatan 1974). "Orang-orang Prabowo" itu, antara lain: Mayjen Sjafrie Sjamsuddin, Mayjen Kivlan Zein, Mayjen Muchdi Pr., Mayjen Adam Damiri (kini Pangdam Udayana), dan Mayjen Ismed Yuzairi (Pangdam Bukit Barisan). Di Kopassus sendiri, Prabowo dikenal sebagai komandan yang royal terhadap anak buah. Maklum, dana yang dikumpulkan lewat Yayasan Korps Baret Merah (Kobame) dan cukong-cukongnya lumayan besar.

Di masa kejayaannya, Prabowo berperan besar dalam setiap mutasi jabatan di ABRI. Tak heran, sebelum digusur dari Kostrad Mei lalu, "Kelompok Prabowo" menguasai hampir semua pos penting di Jakarta dan sekitarnya. Untuk memenuhi ambisi politiknya, putera "bengawan ekonomi" Prof. Soemitro Djojohadikusumo itu, masuk ke kalangan aktivis mahasiswa dan massa Islam. Salah satu pendukung fanatik Prabowo tak lain kelompok yang tergabung dalam Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI). Bersama sejumlah jenderal yang lebih senior — Feisal Tanjung dan R. Hartono —membentuk lembaga *think-tank* CPDS. Akademisi yang bergabung, antara lain: Amir Santoso, Din Sjamsuddin, dan Fadli Zon.

Itu semua bisa dilakukan berkat kedekatan Prabowo dengan mantan Pre-siden Soeharto — yang tak lain mertuanya sendiri. Sebagai menantu, Prabowo merupakan salah satu "orang kepercayaan" Soeharto — terutama dalam urusan keamanan dan militer. Karena itu, ketika menjelang Pemilu 1997 lalu Soeharto gusar karena maraknya oposisi terhadapnya, ia memanggil sang menantu. Kabarnya, saat itu Soeharto memerintahkan Prabowo "menertibkan" gerakan-gerakan oposisi yang lagi marak.

Soeharto khawatir Sidang Umum MPR 1998, yang akan kembali mengukuhkan dirinya sebagai presiden ketujuh kalinya, terganggu aksi-aksi unjuk rasa. "Tujuan penculikan itu untuk mengamankan pemilihan Soeharto," ungkap Pius Lustrilanang, korban penculikan yang pertama kali memberi kesaksian terbuka (testimony). Kesimpulan itu diperoleh Pius dari pertanyaan-pertanyaan penculik selama proses interogasi berlangsung. Hal serupa juga diungkapkan korban-korban penculikan lainnya.

Prabowo, yang memang punya ambisi besar mewarisi tahta sang mertua, kemudian "menerjemahkan" perintah Soeharto itu dengan menginstruksikan penculikan para aktivis. Kepada wartawan yang menemuinya di Markas Sekolah Staf Komando ABRI Bandung, Jum'at (17/7) lalu, Prabowo mengaku memberi instruksi kepada anak buahnya untuk mengungkap sejumlah gerakan radikal. "Kalau memang benar ada anggota Kopassus yang terlibat (dalam aksi penculikan), saya siap bertanggungjawab," tegas Prabowo.

The golden boy ini, agaknya, sudah tak berdaya menghadapi gempuran Wiranto. Rupanya, "konsolidasi" yang dilakukan Wiranto berjalan lancar. Apalagi, Presiden (transisional) BJ Habibie juga lebih memilih mendukung Wiranto daripada Prabowo dan kelompoknya. Sebaliknya, paling tidak untuk sementara ini, Wiranto secara terbuka berkali-kali menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Habibie. Berkat dukungan Wiranto pula, Akbar Tanjung — salah satu 'orang kepercayaan" Habibie — bisa tampil sebagai pemenang dalam perebutan Ketua Umum Golkar, beberapa waktu lalu.

Akibat konsolidasi yang dilakukan Wiranto, satu per satu eksponen "kubu Prabowo" disingkirkan. Setelah Muchdi dicopot dari jabatan Danjen Kopassus, belakangan Sjafrie dan Kivlan dicopot dari posisinya. Sjafrie dimutasi dari posisi Pangdam Jaya menjadi Asisten Teritorial Kasum ABRI, sedangkan Kivlan yang sebelumnya menduduki posisi Kepala Staf Kostrad ditarik menjadi Pati Mabes AD. Kabarnya, tak lama lagi giliran Adam Damiri dan Ismet Yuzairi akan masuk kotak.

Tapi, tunggu dulu, benarkah "kubu Prabowo" sudah benar-benar habis? "Dalam politik, segala kemungkinan bisa saja terjadi," kata seorang pengamat politik. Maksudnya, meski tampaknya sudah tersingkir, bisa saja Prabowo dan pasukannya tampil kembali ke pentas nasional. Caranya, bisa jadi, lewat aksi kekerasan alias kudeta militer. "Orang yang terdesak, bisa saja panik, lalu bertindak brutal," kata pengamat tadi. Untuk mencegah kemungkinan itu, tak ada jalan lain: Prabowo mesti diajukan ke pengadilan.

Agar preseden pelanggaran hak-hak asasi manusia, seperti penculikan itu, tak terulang lagi di masa mendatang. ■

Korban Ambisi Politik Prabowo

Akibat kasus penculikan aktivis, citra Kopassus tercoreng. Padahal, sejarah pasukan elit ini dipenuhi prestasi militer.

Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Pepatah lama itu pas betul menggambarkan kondisi Korps Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan Darat, pekan-pekan ini. "Sudah jelas, sebagai mantan Komandan Kopassus, saya sedih, merasa terpukul," kata Letjen Agum Gumelar, yang kini menjabat Gubernur Lemhanas.

Agum pantas merasa terpukul, sebab selama ini nama Kopassus cukup "harum" di mata masyarakat. Pasukan elit AD itu selalu diidentikkan dengan prestasi militer. Yang paling sering disebut-sebut adalah keberhasilan menumpas gerakan DI/TII, G 30 S/PKI, dan operasi militer di Timor Timur.

Cikal-bakal pasukan khusus itu berdiri 1952, berkat gagasan Kolonel E. Kawilarang — yang saat itu menjabat Panglima Kodam Siliwangi. Sebagai komandan pertama pasukan itu diangkat Mayor Idjon Djanbi alias Rokus Bernadus Visser — bekas perwira pasukan khusus KNIL yang membelot ke pihak republik.

Setahun kemudian, KSAD Kolonel AH Nasution menjadikan pasukan itu sebagai bagian Markas Besar AD, dengan nama Korps Komando Angkatan Darat (KKAD). Dalam perjalanannya, pasukan khusus itu berkali-kali berganti nama: RPKAD, Puspassus AD, Koppassanda, dan akhirnya Kopassus.

Kesatuan pasukan ini berkali-kali pula mengalami pengembangan. Tapi, yang paling mencolok adalah saat dipimpin Mayjen Prabowo Subianto. Pertengahan tahun lalu, Prabowo memekarkan Kopassus menjadi 5 grup, dari semula hanya 3 grup. Anggota pasukan juga ditambah menjadi hampir dua kali lipat. Komandannya yang semula hanya berpangkat bintang satu, ditingkatkan menjadi bintang dua.

Pemekaran itu, menurut Prabowo, berkaitan dengan AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan) yang akan dihadapi negara di masa mendatang. Itu terutama untuk mengantisipasi perang dalam skala kecil, seperti terorisme dan penculikan.

Untuk itulah dibentuk Grup 5, yang terdiri dari anggota pasukan terbaik di Kopassus. Pasukan berkualifikasi anti-teroris itu lebih dikenal dengan sebutan Detasemen 81 (merujuk keberhasilan pasukan itu menangani pembajakan pesawat di Don Muang, Thailand, tahun 1981).

Photo: Istimewa

■ **Tentara:** Menyalahgunakan pasukan elit

Operasi pasukan ini bersifat sangat rahasia, sehingga tak banyak orang yang tahu, bahkan para pimpinan ABRI sekalipun. Kabarnya, operasi mereka mengikuti pola kerja GSG 9 (pasukan elit polisi Jerman). Prabowo sendiri adalah alumnus pendidikan anti-teroris GSG 9. Peralatan yang dimiliki pasukan ini sangat canggih, sesuai standar satuan elit tentara di dunia.

Sedangkan untuk pasukan komando tempur, anggota Kopassus disebar di Grup 1 (Serang), Grup 2 (Kartosuro), dan Grup 3 (Batujajar). Selain urusan tempur, Grup 3 juga berfungsi sebagai tempat pelatihan pasukan khusus. Standar latihan Kopassus dikenal ketat. Setiap anggota Kopassus dituntut memiliki keahlian khusus, seperti menjadi penerjun payung handal (*combat free fall*), penyelam, penembak jitu (*snipper*), pendakian serbu, perang elektronika, dan perang psikologi. Para tamtama dan bintara diharuskan menguasai sedikitnya dua bahasa daerah. Sedangkan bagi para perwira harus menguasai bahasa asing.

Anggota Kopassus diseleksi secara ketat oleh tim gabungan dari Kesehatan AD, Dinas Psikologi AD, dan Dinas Jasmani dan Kesemaptaan AD. Proses seleksi itu berjalan terus-menerus sampai selesainya latihan. Seorang perwira siswa yang melakukan kesalahan di hari terakhir latihan, bisa dipastikan langsung dipecat. Karenanya, loyalitas terhadap perintah atasan sangat penting di Kopassus.

Para anggota terbaik dari ketiga grup tadi akan direkrut menjadi pasukan di Grup 4, yang disebut Grup Sandi Yudha. Grup ini bermarkas di Cijantung, Jakarta, dan berkualifikasi Intelijen Tempur. Tugas utamanya adalah menghancurkan lawan di garis belakang pertahanan lawan (penyusupan).

Dalam masa damai seperti sekarang ini, anggota grup ini mendapat tugas intelijen teritorial. Misalnya, mengetahui karakteristik demografi suatu daerah, pendukung dana yang bisa dimanfaatkan, tokoh-tokoh masyarakat, para preman, dan sebagainya.

Pola perilaku dan penampilan anggota Grup Sandi Yudha sama sekali tak mirip intel tentara biasa. Mereka sangat profesional dalam penyamarannya. Biasanya, mereka aktif berkecimpung di tengah masyarakat, misalnya di RT/RW atau klub-klub hobi (misalnya, perkum-pulan terjun payung atau Jeep Club). Di Timor Timur, Aceh, dan Irian (tiga wilayah "hot-spot" yang sering digunakan sebagai ajang latihan) mereka menyusup sampai ke kampung-kampung, lalu membentuk basis perlawanan dari masyarakat lokal sendiri terhadap gerakan-gerakan yang sering disebut GPK.

Para perwira di grup ini, umumnya, pernah mendapat pendidikan militer di luar negeri. Terutama pendidikan perang kota dari Green Beret US Army. Anggota grup ini pula yang ditugasi melakukan penculikan terhadap para aktivis prodemokrasi. Tapi, entah karena tak profesional atau merasa terlalu berkuasa, mereka melakukan keteledoran besar. Akibatnya, aksi mereka dengan mudah terbongkar.

Saat ini, sedikitnya tujuh anggota Grup 4 — termasuk komandannya, Kolonel Chairawan — berstatus sebagai tersangka dalam kasus penculikan para aktivis. Bahkan, kabarnya urusan ini bakal menyeret Prabowo ke kursi pesakitan. Itulah akibatnya kalau ambisi kekuasaan tidak terkontrol.

(Bahan-bahan disadur dari Internet)

Gontha Masih Preman

Faisal Basri diintimidasi Peter Gontha, karena mengkritik PT Chandra Asri. Saatnya kejahatan Gontha dan kawan-kawan diusut.

Peter Gontha memang tak tahu diri. Jelas, gangnya yang dipentoli Bambang Trihatmodjo, sudah kalah, dia masih suka main ancam. Kali ini korban ulah premanisme Gontha adalah Faisal Basri, ekonom dari Universitas Indonesia. Dalam sebuah seminar tentang industri kimia pekan lalu, Gontha yang tampil bersama Faisal meminta ekonom kritis itu untuk menarik ucapannya bahwa PT Candra Asri (CA), megapabrik kimia milik Gontha, Bambang, Prayoga Pangestu dan kawan-kawan, melakukan *mark-up*.

"Kalau Faisal tak menarik tuduhannya saya akan membawanya ke pengadilan," ujar Gontha. Kabarnya, dia akan menuntut Feisal 5 juta dolar.

Faisal sendiri menolak mencabut ucapannya, baginya CA memang melakukan *mark-up*. "Kalau CA tak melakukan *mark-up* mengapa mereka menurunkan nilai investasinya?" ujar Faisal. Ia perkirakan *mark-up* Chandra Asri itu mencapai 200 persen dari nilai sebenarnya.

Faisal pun keberatan dengan cara-cara Gontha yang mengitimidasinya di seminar itu. Bagi Faisal, CA memang curang dan kalau *toh* Gontha ingin mengajukannya ke pengadilan, tentu ada caracaranya."Minimal dengan melayangkan somasi kepada saya," ujar Faisal.

Tingkah sewenang-wenang dari kawan dekat Bambang Trihatmodjo ini memang terlihat sejak lama. Kalau Gontha bersikap seperti itu ketika Soeharto masih berkuasa, kita maklum saja. Soalnya, tahu sendiri di jaman Soeharto, Gontha bersama-sama Bambang dan angota gangnya yang lain seperti Rossano Barack, Henry Pribadi dan Prayogo Pangestu, melahap semua sektor bisnis dengan berbagai kemudahan yang diperoleh dari Soeharto.

Dalam empatbelas tahun terakhir Gontha, Bambang dan kelompoknya berhasil mengembangkan usaha berkat fasilitas-fasilitas itu. Sebut saja misalnya PT Bimantara Citra, usahanya meluas dari jualan mobil, televisi, telekomunikasi, listrik hingga pengusahaan hutan. Gontha sendiri merupakan salah satu operator penting yang dimiliki Bambang untuk pengembangan usaha Bimantara.

Candhra Asri merupakan salah satu bisnis raksasa gang Bimantara yang kontroversial. Pabrik petrokimia terbesar di Indonesia itu sering dikritik karena sangat diproteksi pemerintah dan dikucuri dana pinjaman lunak dari konsursium bank. Saham CA dimiliki Bambang Trihatmodjo, salah satu raja hutan, Prajogo Pangestu, Henry Pribadi. Chandra Asri mulai berdiri pada 1991, belakangan diresmikan Soeharto tahun 1995. Di luar gang Bambang, saham CA juga dimiliki perusahaan asing yakni, Siemene International Ltd. dan Stallion Company Ltd., keduanya dari Hong Kong. Semula proyek ini akan menyerap US$ 2,25 miliar, tapi karena terganjal tim pengendali pinjaman luar negeri, investasi diturunkan menjadi US$ 1,6 miliar. Penurunan nilai investasi inilah yang menurut dugaan Faisal telah terjadi usaha *mark-up*, karena walaupun nilai investasinya diturunkan, target produksinya tidak berubah.

Repro Merdeka

CA memproduksi ethylene, prophylene dan butadiene masing-masing dengan kapasitas 495 ribu ton, 245 ribu ton dan 24 ribu ton per tahun. Jumlah itu sudah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pabrik petrokimia semihilir di dalam negeri, bahkan masih berlebih untuk diekspor.

CA bukan satu-satunya pabrik petrokimia milik gang Bambang yang dulu diproteksi dan diberi fasilitas Soeharto. Proteksi yang kuat juga diberikan kepada pabrik petrokimia milik Bambang dan kelompoknya, PT Tri Polyta Indonesia (TPI), yakni berupa keringanan 20 persen bea masuk dan 20 persen bea masuk tambahan. Karena proteksi itulah CA jadi besar. Perusahaan ini mampu mengontrol seluruh bahan baku hingga ke industri yang paling hilir, misalnya kantong plastik.

Kecurangan CA bahkan pernah diakui sendiri oleh Gontha yakni ketika Menteri Keuangan Mar'ie Muhamad menutup Bank Andromeda, bank milik gang Bambang awal November tahun lalu. Gontha, dalam konperensi pers yang disiarkan secara langsung oleh *RCTI*, stasiun televisi milik gangnya juga, mengakui Bank Andomeda melakukan kecurangan dengan memberi kredit melampaui legal lending limit, atau batas maksimum pemberian kredit kepada Chandra Asri. Cara-cara CA memperoleh dana dari Andromeda sebenarnya merupakan tindak pidana. Andromeda mengeruk dana dari masyarakat namun hanya disalurkan kepada CA.

Soal ancaman seperti yang dilancarkan kepada Faisal, bukan sekali ini Gontha membuat masalah dengan pengamat ekonomi. Ekonom terkemuka lainnya, Kwik Kian Gie adalah salah satu korban premanisme Gontha. Karena mengkritik usaha yang terkait dengan Bimantara, Kwik diteror Gontha hingga harus "bersembunyi" selama berbulan-bulan.

Ketika gagasan *Currency Board System* (CBS) darinya diterima Soeharto, Gontha yang kemudian mendatangkan Steve Hanke, ahli CBS dari Amerika Serikat, mulai "menteror" para ekonom dengan pernyataan-pernyataan yang bernada intimidatif dalam acara-acara *talk show* di televisinya. Ia bahkan pernah menuduh para ekonom yang tak setuju CBS sebagai kelompok orang yang kerjanya selalu merongrong kebijakan ekonomi pemerintah.

Walaupun pelindung mereka, Soeharto sudah jatuh, Gontha ini nampaknya tak peduli betul. Ia masih saja melakukan praktek premanisme yang dijaman Soeharto mungkin orang tak punya kans untuk melawannya. Ada baiknya memang jika ada kelompok masyarakat, mungkin Faisal atau kelompok ekonom lainnya, menggugat kecurangan-kecurangan Gontha dan kawan-kawannya ke pengadilan. Atau minta Jaksa Agung untuk mengusutnya. ■

MARI BERHENTI MAIN GOLF

Mengingat Lapangan-lapangan golf, seperti Cijayanti, Cimacan, Rancamaya, dibangun di atas penderitaan rakyat. Tanah rakyat diserobot tanpa proses hukum, mari kita tunjukkan solidaritas untuk mereka yang dikalahkan itu; dengan berhenti main golf di lapangan bermasalah itu.

SOLIDARITAS TANI INDONESIA

IMF Bukan Dokter Sakti

IMF terbukti tak bisa membantu atasi krisis ekonomi. Misalnya hanya supaya negara pasien bisa bayar utang, bukan supaya sehat.

Hati-hati IMF! Lebih dari setengah tahun lamanya, para dokter dari *International Monetary Fund* menangani pasien-pasien dari negara Asia. Namun, tanda-tanda menuju kesembuhan belum juga terlihat. Bila hal ini berlanjut terus, IMF bisa masuk dalam daftar kambing hitam.

Coba lihat mata uang di negara-negara Asia itu, tak ada yang bergerak membaik. Rupiah malah sempat lama terpaku di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per dolar AS. Sementara itu menurut *The Economist*, 20.000 perusahaan telah sekarat di Korea Selatan, produksi mobil turun drastis hingga 77% dalam lima bulan pertama di Thailand. Sedangkan di Indonesia, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, sudah nyaris separuh keseluruhan populasi.

Untuk kasus Indonesia, penyebab makin memburuknya perekonomian, memang karena ada faktor politik yang juga masih buruk. Namun, untuk Korea Selatan dan Thailand, sudah terjadi pergantian pimpinan nasional secara demokratis. Negara-negara itu telah melakukan apa yang dipesankan oleh IMF. Misalnya, membuat UU kepailitan, privatisasi aset negara, liberalisasi penanaman modal asing dan melakukan kebijakan moneter yang ketat. Dan ternyata hasilnya tidak begitu menggembirakan. Apa yang salah?

Sebetulnya, sudah banyak kritik yang dilancarkan pada IMF oleh berbagai kalangan. IMF dengan terapinya "yang itu-itu saja", bukannya menolong sebuah negara keluar dari krisis, tapi — seperti kata Juergen Stark, Sekretaris Negara untuk Keuangan, Jerman — malah "menyebabkan krisis berikutnya."

Agaknya, memang tidak seharusnya berharap terlalu banyak pada IMF. Sebab, orang-orang dari lembaga itu sendiri, tidak begitu pasti dengan terapi yang mereka lakukan. Menanggapi dampak buruk yang terjadi di negara-negara pasiennya, Michel Camdessus berkata, "kadang-kadang sebuah obat menyebabkan lebih banyak rasa sakit." Sementara Wakil Direktur Pelaksana, Stanley Fischer juga mengatakan tidak tahu sampai kapan krisis Asia akan berlangsung, "yang kami tahu, itu akan segera berakhir bila negara-negara tadi menjalankan program ekonominya dan masyarakat internasional memberikan bantuan finansial."

Kiranya sudah cukup jelas, bahwa IMF bukanlah jaminan kepastian untuk memperbaiki dan mengangkat kembali perekonomian. Kalimat yang tepat barangkali seperti diucapkan oleh Ramon Navaratnam dari *Asian Strategy and Leadership Institute*, "IMF tidak tertarik untuk memperbaiki ekonomi suatu negara, tapi untuk memastikan negara itu dapat membayar utang." Boleh jadi demikian. Makanya, wajar bila muncul tudingan bahwa IMF membawa kepentingan dari negara-negara kapitalis besar. Oleh kubu sosialis, IMF dianggap sebagai alat "penghisap" baru.

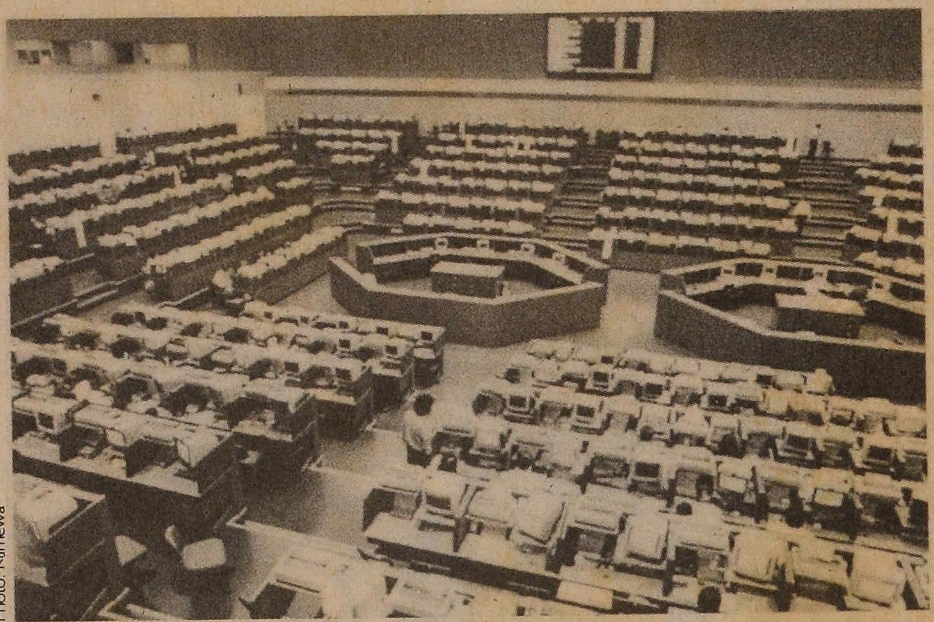

Photo: Istimewa

■ **Bursa Tetap Lesu:** Dana IMF tidak berpengaruh

Lepas dari embel-embel ideologi, kenyataannya, terapi yang ditawarkan IMF tidak pernah sampai pada usulan untuk membuat suatu negara memiliki perekonomian yang tangguh. Kebijakan menaikkan suku bunga bank dilakukan di hampir semua negara yang jadi pasien. Tanpa pandang bulu dan tanpa memberi perlakuan khusus bagi sektor-sektor yang unggul. Si pasien hanya diberi obat yang menyakitkan, tapi tidak diberi saran untuk mengencangkan otot-ototnya atau vitamin untuk memulihkan staminanya.

Tak pernah misalnya, IMF menganjurkan Indonesia berkonsentrasi pada produk-produk pertanian yang bisa menghasilkan devisa bagi negara dan membantu meringankan beban utang, Juga secara khusus tak ada pemberian akses pasar pada produk-produk berorientasi ekspor seperti itu. Barangkali, ini sudah di luar wewenang IMF. Tapi, barangkali juga, karena negara-negara maju yang posisinya kuat dalam IMF tidak menginginkan produk dalam negeri mereka dikalahkan oleh produk Indonesia dalam persaingan global. Padahal, tak mungkin Indonesia bangkit dari krisis jika hanya mengandalkan utang dari IMF.

Lantas, haruskah IMF dimusuhi? Agaknya tidak bisa sesederhana itu. Sebab, selain Indonesia amat perlu uang, — oleh para investor asing — IMF masih dianggap sebagai stempel yang menandai sudah layak atau belumnya modal asing masuk ke suatu negara. Bila IMF sudah mencairkan dana-nya, ada kemungkinan modal lain akan mengikuti. Namun, bila IMF tak melakukan itu, tak ada kemungkinan modal lain yang lebih dibutuhkan akan masuk. Memusuhi lembaga ini juga berarti semakin menjauhkan diri dari akses pasar negara-negara maju — yang di era pasar bebas ini, amat penting untuk meraup devisa.

Karena itu, dana IMF tetap harus dimanfaatkan. Tentu saja terapinya bukan lagi harga mati. Dan seperti sudah sering didiskusikan oleh para pakar, pengelolaan uang itu perlu dipadukan dengan strategi pengembangan ekonomi yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki Indonesia, yaitu pertanian dan maritim.

Selama ini, kedua sektor ini diabaikan pemerintahan Soeharto karena terpukau dengan daya tarik industri manufaktur canggih berteknologi tinggi. Padahal, sektor ini tidak tergantung pada bahan baku impor dan amat penting menopang dari ancaman bahaya kelaparan, bila industri manufaktur mengalami kehancuran.

Menurut pengamat ekonomi Aan Effendi, di Eropa Barat, AS, Kanada dan Jepang serta negara-negara industri lainnya, sektor pertaniannya justru tetap dilindungi dari persaingan yang dapat melumpuhkan. Strategi ini dilakukan bukan lantaran krisis saja, tapi "karena perekonomian modern yang sektor sekunder dan tersiernya berkembang pesat, bila tidak didukung oleh sektor primer akan menjadi pecundang dalam persaingan global."

Soalnya, untuk melakukan hal ini, dibutuhkan figur pemimpin yang punya visi dan bebas KKN. Habibie? Wah, berat. ■

Otonomi Bukanlah Nyanyian Baru

Oleh: Xanana Gusmao

Atas nama rakyat Timor Leste, saya mengungkapkan rasa kagum yang mendalam atas ketekunan dan keberanian angkatan muda Indonesia yang telah berhasil mengkristalisir aspirasi-aspirasi paling dalam dari saudara-saudara kami rakyat Indonesia. Sehingga, melalui suatu gerakan yang luar biasa damai, berhasil merobohkan suatu sistem represif yang berumur 3 dekade. Dengan demikian, membuka lembaran baru dalam sejarah Indonesia dan sejarah kawasan ini. Saya ingin mengucapkan selamat kepada angkatan muda Indonesia, pejuang kebebasan, serta menyampaikan rasa hormat kami kepada para Martir Reformasi di Indonesia!

Sebagaimana halnya ratusan juta rakyat Indonesia, rakyat Timor Leste, sangat mengharapkan agar proses reformasi yang sedang bergulir di Indonesia saat ini bisa benar-benar membuahkan suatu demokratisasi sejati; di mana keadilan berdiri di atas kekuasaan represi, kebebasan bisa melenyapkan suasana tegang akibat ketakutan serta udara yang tercemar intimidasi dan teror, dan hukum mendapatkan tempat yang terhormat dalam kesadaran manusia, dan dalam hubungan antar-komunitas dan antar-bangsa.

Perdamaian bukanlah semata-mata keadaan tanpa perang. Perdamaian sejati bermula dari individu, yaitu Perdamaian Jiwa. Tiada seorangpun insan manusia bisa hidup dalam perdamaian, bila dia selalu merasa diteror, merasa terancam, atau bila hak-haknya dilanggar. Proses reformasi di Indonesia pun akan berurusan dengan aspek ini, yaitu mengembalikan rasa kedamaian orang, dan memungkinkan agar warga Indonesia merasa bebas, karena mempunyai akses ke kebenaran dan ketidakbenaran sesuatu; serta merasa bebas karena terlindungi oleh keadilan yang sebenarnya.

Hak dan Keadilan, Kebebasan dan Perdamaian. Tidak akan pernah ada hak, bila kebohongan digunakan di tempat di mana seharusnya ada keadilan. Tidak akan pernah ada perdamaian bila penindasan merajalela di tempat di mana seharusnya ada kebebasan, dan tidak akan pernah ada kebebasan bila hak diremehkan.

Dalam konteks reformasi di Indonesia, pola pikiran ini penting. Karena berkat terang dari tujuan-tujuan sejati proses reformasi itulah maka banyak kasus ketidakadilan telah dimunculkan lagi ke permukaan; untuk menuntut perhatian yang layak. Maka bila ingin dibahas suatu penyelesaian masalah Timor Leste, haruslah dengan alam pikiran yang baru: alam pikiran reformasi. Haruslah dengan sikap yang baru, yaitu sikap reformasi. Hanya pikiran yang dibimbing oleh tujuan reformasi Indonesia yang mampu mewujudkan kejernihan persepsi atas fakta-fakta; dan hanya sikap-sikap yang sesuai dengan semangat reformasi di Indonesia yang bisa mengarahkan seseorang untuk mengambil suatu keseriusan politik, untuk membuktikan perbedaan vital antara arogansi kemarin dan kejujuran, atau, sekurang-kurangnya, suatu kesediaan yang lebih rasional hari ini.

Dewasa ini rakyat Timor Leste semakin yakin bahwa saat yang sudah lama ditunggu-tunggu itu sudah semakin mendekat dengan langkah-langkah yang panjang. Dan rakyat Timor Leste percaya bahwa haknya untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk kemerdekaan nasionalnya akan dikembalikan kepadanya oleh regim baru yang demokratis di Indonesia. Karena, sebagaimana halnya dengan ke-200 juta rakyat Indonesia, rakyat Timor Leste, yakin bahwa proses reformasi yang sedang bergulir di Indonesia, secara ireversibel, akan melahirkan demokrasi sejati di Indonesia.

Rakyat Timor Leste sangat meyakini bahwa tidak akan ada seorang pun demokrat sejati di Indonesia yang bisa menerima penyangkalan hak azasi suatu bangsa untuk secara bebas menentukan nasibnya sendiri. Kami percaya bahwa tidak akan ada seorang pun demokrat sejati di Indonesia yang bersedia memalingkan mata dari ilegalitas pendudukan militer atas Timor Leste dan dari ketidakadilan serta kejahatan-kejahatan lain. Tidak seorangpun demokrat sejati di Indonesia yang membela kebohongan, manipulasi represif dan arogansi politik sebagai prinsip-prinsip dari suatu sistem baru yang diinginkan bagi Indonesia.

Dalam semangat reformasi dimana Jakarta sedang mempertimbangkan suatu desentralisasi kekuasaan kepada propinsi-propinsi, pemerintah Indonesia menawarkan suatu otonomi yang lebih luas bagi Timor Leste dengan maksud bahwa hal tersebut merupakan satu-satunya penyelesaian bagi wilayah tersebut. Memang ada orang yang beranggapan bahwa langkah tersebut merupakan satu konsesi yang sangat penting dari pihak Indonesia; dan memang orang-orang tersebut mempunyai hak untuk beranggapan demikian.

Saya hanya ingin mengingatkan bahwa sejak tahun 1984 mereka telah menggembar-gemborkan keuntungan-keuntungan yang bisa diraih Timor Leste berkat suatu otonomi: di mana bahasa Portugis tetap dipakai, agama Katolik diistimewakan dan tradisi serta budava Timor Leste dihormati. Jadi, otonomi bukanlah nyanyian baru bagi telinga saya.

1984... Sudah 14 tahun berlalu, di mana hampir 20 batalyon telah dikirim oleh Benny Moerdani untuk memusnahkan apa yang dinamakannya "50 pelarian" FALINTIL (*Forcas Armadas de Libertacao Nacional de Timor Leste*, ed.). Dalam kondisi-kondisi yang sulit 14 tahun yang lalu itu, di mana infleksibilitas Soeharto berjalan selaras dengan suasana global "perang dingin", infleksibilitas yang sangat didukung oleh keacuhan internasional mengenai masalah Timor Leste, kami telah mengatakan, tanpa ragu-ragu, bahwa perjuangan kami adalah untuk membela hukum internasional itu sendiri, untuk membela alasan keberadaan PBB itu sendiri. Untuk membela prinsip-prinsip Gerakan Nonblok itu sendiri, yang ikut didirikan oleh Indonesia.

Empat belas tahun yang lalu banyak orang dan banyak pemerintahan Barat menggolongkan kasus Timor Leste sebagai "*lost case*" dan bahwa ide akan suatu kemerdekaan merupakan

suatu utopia (khayalan) belaka. Dalam keadaan demikian pun kami tetap menolak dengan tegas segala usaha untuk mengalienasi perjuangan kami, karena yang menjadi taruhan adalah kemerdekaan kami; yang juga merupakan sebab yang membuat rakyak kami menderita dan mati.

Sekarang, Ali Alatas menyuarakan keinginan pemerintah reformis mengenai masalah Timor Leste dengan menawarkan suatu otonomi sebagai penyelesaian yang paling realistis. Dan sang Menteri Indonesia ini mengemukakan, dengan suatu kecerdikan yang licik, argumen-argumen yang telah diwariskan dengan loyalitas kepadanya 10 tahun yang lalu oleh para pendahulunya, Mochtar Kusumaatmadja dan Adam Malik, yaitu:

1. Bahwa kamilah yang tidak mau menerima referendum
2. Bahwa kami hanya merupakan suatu minoritas tak berarti sehingga referendum tidaklah pantas
3. Bahwa referendum bisa mencetuskan suatu perang saudara

> **Nasionalisme bukanlah barang dagangan yang dapat dijual untuk memperoleh "sembako". Nasionalisme adalah kesadaran akan kebebasan itu sendiri.**

Bila Ali Alatas sedang mempersiapkan diri untuk menerima demokratisasi di Indonesia, maka dia tidak punya hak untuk berpikir atas nama rakyat Timor Leste.

Menjadi realistis adalah menerima perubahan-perubahan zaman. Menjadi realistis adalah menyesuaikan pola berpikir dengan suasana masa sekarang, dengan visi yang konstruktif ke masa depan.

Tetapi berbicara secara realistis, saya coba mempelajari, melihat dan memahami apa yang menurut anggapan orang-orang yang setuju dengan otonomi (luas atau tidak luas) bisa diperoleh dengan status tersebut. Landasan perkembangan dari setiap individu, masyarakat atau negara adalah ekonomi. Landasan ini sangatlah vital sebagaiaman dirasakan kini di Indonesia, di mana krisis yang berkepanjangan praktis menghentikan perputaran roda ekonomi Indonesia. Sedemikia vitalnya sehingga di Indonesia mulai dirasakan masalah-masalah sosial-ekonomi yang berat di mana populasi yang miskin meningkat menjadi 80 juta orang dengan 20 juta orang penganguran. Sedemikian vitalnya sehingga Indonesia sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari luar.

Berbicara secara realistis, saya bertanya pada diri sendiri apakah orang-orang yang berharap akan mendapatkan keuntungan maksimal dari status ekonomi sudah berpikir benar-benar mengenai krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia, sudah berpikir benar-benar bahwa, secara nyata, 800 ribu penduduk Timor Leste hanyalah merupakan suatu jumlah yang tidak berarti di tengah-tengah 200 juta rakyat Indonesia yang sangat membutuhkan suatu pemulihan ekonomi.

Saudara kami rakyat Indonesia tidak menyadari bahwa belanja militer selama 23 tahun di Timor Leste mempunyai peranan yang penting jua dalam krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia. Beberapa sumber mengatakan bahwa pengeluaran di Timor Leste mencapai US$ 1 juta per bulan... Dan semua orang tahu bahwa, lebih dari segalanya, perang di Timor Leste telah menjadi suatu bisnis militer, suatu sumber keuntungan yang mudah bagi beberapa jenderal Indonesia.

Dialog: Dari Manipulasi ke Keseriusan.

Apa yang ingin saya tekankan adalah resolusi Dewan Keamanan PBB No. 384 tanggal 22 Desember 1975 dan No. 389 tanggal 22 April 1976 yang menentukan agar Indonesia segera menarik tanpa syarat seluruh pasukannya dari wilayah Timor Leste serta menghormati hak rakyat Timor Leste akan penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan nasional.

Sejak tahun 1983 Indonesia selalu menolak untuk menganggap orang Timor Leste sebagai pihak yang berkepentingan dalam masalah (Timor Leste) ini. (Padahal) kami lah yang mati tertembus peluru tentara Indonesia, adalah kami yang diperkosa, ditahan, disiksa, dianiaya dan dibunuh, tapi nasib kami sendiri, hidup kami sendiri tidak boleh menjadi masalah kami! Sejak tahun 1983, pertemuan antara Portugal dan Indonesia mulai diadakan di bawah naungan PBB tanpa ada kemajuan sedikit pun karena rezim diktator jenderal Soeharto telah menetapkan suatu parameter bagi dialog tersebut, yaitu bahwa dialog tersebut merupakan jalan untuk penerimaan integrasi sebagai "kehendak rakyat Timor Leste", karena Soeharto sudah memutuskan demikian. Sama dengan sekian banyak kebohongan politik regim tersebut sehubungan dengan rakyat Indonesia.

Dalam semangat reformasi kami berharap bahwa pemerintah Indonesia sudah mempunyai sikap politik yang berbeda dalam menanggapi dialog tersebut. Dialog jangan terus dijadikan instrumen untuk memaksakan kehendak sendiri bagi orang lain, dialog jangan lagi dijadikan manipulasi politik.

Dialog harus jujur dan serius, berlangsung atas dasar penghormatan atas pendapat-pendapat lain. Dialog harus diarahkan kepada kemungkinan adanya kompromi-kompromi yang memuaskan semua pihak yang terlibat di dalam proses dialog tersebut.

Dalam pernyataan-pernyataan yang terakhir, Ali Alatas ingin menunjukkan seolah-olah konsesi suatu otonomi yang lebih luas bisa menjadi "penyelesaian yang diterima secara intenasional" itu. Dalam alur pikiran seperti ini saya beranggapan juga bahwa Ali Alatas telah meninggalkan nada arogan "integrasi adalah pokok yang tidak diperdebatkan" untuk mengambil suatu nada yang lebih arogan lagi yaitu bahwa dengan memberikan suatu otonomi kepada Timor Leste maka integrasi adalah topik yang tidak akan diperdebatkan lagi".

Yang dipertaruhkan dalam masalah Timor Leste adalah status politiknya. Status politik yang rezim kolonialis Soeharto selalu menolak untuk dibicarakan dalam semua pertemuan AIETD (*All Inclusive Intra Timorese Dialogue*). Status politik beranggapan dasar adanya suatu landasan legitimasi yuridis. Otonomi tidak memiliki landasan legitimasi yudiris apa pun karena tidak menghilangkan pokok persoalannya yaitu bahwa Timor Leste telah dianeksasi secara militer oleh Indonesia. Rakyat Timor Leste belum pernah diberi kesempatan untuk menyatakan secara bebas pendapat atau keinginan mengenai masa depan politisnya.

Kami bersedia berdialog atas landasan bahwa substansi masalahnya adalah masalah "pontual" yang akan merumuskan arah perundingan-perundingan. Dan substansi ini lah yang merupakan inti permasalahan yang sebenarnya, harus dipandang berdasarkan hukum internasional, prinsip-prinsip universal dan resolusi-resolusi PBB. Kami ingin berdialog dalam kedudukan yang sama, dengan hak dan kewajiban yang sama kami mengalami kekuatiran-kekuatiran dan pihak Indonesia, tetapi iebih dan pada orang lain, kami lebih memahami aspirasi-aspirasi rakyat Maubere. Dalam rangka ini dialog akan bertujuan untuk mencari keseimbangan antara kekuatiran-kekuatiran tersebut dengan aspirasi-aspirasi syah dari rakyat kami.

Kami bersedia mempertimbangkan kepentingan-kepentingan Indonesia, sekarang maupun di masa depan; karena kami sepenuhnya sadar bahwa kami juga adalah bagian dari Asia Tengara, bahwa kami adalah tetangga dari suatu negara yang besar, yaitu Indonesia. Dan juga, karena kami benci akan perang dan konflik antarbangsa dan negara.

Dengan mengambil sikap ketersediaan Politik ini maka tidak satu pun dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Timor Leste akan keluar sebagai pemenang atau pihak yang kalah. Kami juga

benar-benar mempertimbangkan kemungkinan peran baru bagi ABRI dalam proses penyelesaian masalah ini. Kami sepenuhnya percaya bahwa hasil-hasil dari suatu dialog yang serius pasti akan menyumbang pada pembentukan hubungan-hubungan baru antara agen-agen dari suatu proses penyelesaian damai.

Kami siap untuk mengubur masa lalu. Mengubur sejarah 23 tahun peperangan ini dan beranggapan bahwa apa yang terjadi di Timor Leste itu adalah suatu kesalahan sejarah. Kami siap untuk melakukan kompromi-kompromi politk untuk membina hubungan yang lebih baik dengan saudara kami rakyat Indonesia mulai sekarang ini dan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara demokratis Indonesia.

Sebagai permulaan, kami mengharapkan agar pertemuan-pertemuan AIETD lebih diintensifkan lagi. Agar rakyat Timor Leste, pada akhirnya, diberi kesempatan untuk pertukaran pendapat yang nyata. Saya katakan "akhirnya" karena bila sebelumnya ada persyaratan yang dipaksakan oleh rezim Soeharto untuk tidak membicarakan "status" politik wilayah ini, maka sekarang kami percaya bahwa di masa depan "status" politik wilayah tersebut harus menjadi pusat perdebatan AIETD.

Nasionalisme tidak dapat dimatikan dengan kekuatan senjata dan represi. Dan nasionalisme akan bertahan sepanjang waktu serta terus dipupuk oleh darah yang mengalir selama perang pembebasan. Nasionalisme bukanlah barang dagangan yang dapat dijual untuk memperoleh "sembako". Nasionalisme adalah kesadaran akan kebebasan itu sendiri.

Kami tetap berpihak pada dialog sebagai sarana untuk mencari suatu penyelesaian, dan kami siap untuk berkropromi: menjamin suatu penyelesaian yang adil serta suatu perdamaian sejati dan abadi di Timor Leste sambil menghormati kepentingan-kepentingan Indonesia.

Tidak akan tercapai suatu penyelesaian yang sejati bila tidak melalui referendum. Dan kami tidak pernah menjadi lebih realistis dari pada sekarang ini! Perjuangan kami telah berlangsung selama 23 tahun yang sulit!

■ **Xanana Gusmao, Presiden CNRT. Kini mendekam di penjara Cipinang. 17 Juli 1998, Xanana mendapat kunjungan utusan Sekjen PBB dan Uskup Belo di penjara. Hal ini menunjukkan betapa sentralnya posisi Xanana dalam penyelesaian masalah Timor LEste. Naskah ini disadur dari pidatonya untuk seminar Solidamor, 14 Juli lalu.**

Latief Curi Uang TKI

Bekas Menaker diduga mencuri uang hasil keringat pekerja di luar negeri. Kapan kasusnya dibawa ke pengadilan.

Cerita tentang ulah korupnya mantan Menaker Abdul Latief, sudah lama terdengar. Namun, tak banyak yang bisa mengungkapnya secara terbuka. Baru-baru ini, ulah mantan menteri yang diduga mengeruk untung dari pengiriman TKI itu mulai terkuak. Gara-garanya, Apjati, organisasi yang bekerja di bidang pengiriman tenaga kerja Indonesia, mengadukan kepada Jaksa Agung soal raibnya dana untuk perlindungan TKI selama Abdul Latief menjadi menteri. Apjati menuntut agar dana tersebut dikembalikan dan benar-benar digunakan untuk melindungi TKI di luar negeri.

Menurut Abdullah Puteh, Ketua Umum Apjati, pengumpulan dan penggunaan dana yang dilakukan Latief melalui YPSDMI (Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia) jumlahnya tidak tanggung-tanggung, mencapai 11 juta dolar AS. Dan Puteh meyakini, telah terjadi korupsi pungutan asuransi oleh Latief sebesar 45 sampai 80 dolar AS untuk setiap TKI. Hal ini didasarkan pada perhitungan kasar selama delapan bulan yayasan itu beroperasi. Yaitu, sejak bulan April hingga Desember 1997.

Kendati telah meraup dana sedemikian besar, YPSDMI ternyata tidak melaksanakan perlindungan seperti yang dijanjikan. Setiap kali muncul kasus yang menimpa TKI, pihak PJTKI selaku pengirim TKI-lah yang harus menyelesaikannya sendiri. Sulitnya untuk menuntut YPSDMI ketika itu, lantaran Latief masih berkuasa. Meskipun usaha berbentuk yayasan itu merupakan sesuatu yang ilegal tanpa ada dasar hukum.

Lewat tim pengacaranya, diketahui bahwa dana tersebut tadinya disimpan di tiga rekening Bank Exim. Rekening itu, masing-masing atas nama pribadi Abdul Latief, mantan Dirjen Bina Penta Depnaker J. Iskandarsyah dan bendahara YPSDMI. Konon, dana tersebut dipindahkan ke konsorsium asuransi. Namun, belakangan diketahui, dana tersebut telah berada di Pasaraya Life, bagian dari kelompok usaha Abdul Latief.

Apakah tuntutan Apjati akan berhasil, memang masih terlalu dini untuk diperkirakan. Meskipun demikian, Jaksa Agung H Andi Muhammad Ghalib SH, telah berjanji akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut akan dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen Hadi Broto dan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Antonius Suyata SH. Yang pertama kali akan dilakukan adalah memeriksa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yayasan yang didirikan Latief pada tahun 1996 itu.

Masih banyak sebetulnya, tugas Kejaksaan Agung untuk memeriksa mantan menteri yang flamboyan itu. Banyak dugaan bahwa Latief juga punya sejumlah besar "dosa" berkaitan dengan penggunaan dana Jamsostek. Seorang mantan menteri yang menjabat semasa dengan Latief, mengungkapkan bahwa Latief bahkan memiliki pesawat terbang pribadi dari hasil "keringat pekerja". Ketika Latief hendak pindah dari kantor Depnaker ke Departemen Pariwisata, ia menghabiskan 4 milyar rupiah hanya untuk mendekorasi ruang kerja barunya.

Selama menangani Jamsostek, memang banyak kejanggalan yang terjadi. Misalnya, di tahun 1996, Latief mengaku tingkat pengembalian investasi yang dilakukan Jamsostek hanya 11,6%. Hal yang sungguh aneh. Mengingat suku bunga deposito — sebagai salah satu instrumen investasi — pada tahun itu mencapai angka rata-rata 15%. Jadi, semestinya tingkat pengembalian investasi Jamsostek pun tak boleh kurang dari 15%.

Berdasarkan perhitungan Econit Advisory Group, bila sebagian besar investasi Jamsostek ditanamkan dalam deposito berjangka 15% dan SBI dengan bunga 12,9%, semestinya diperoleh bunga Rp 519 milyar. Dan bila obligasi turut dihitung dengan asumsi pengembalian 16% ketika itu, semestinya Jamsostek memperoleh Rp 581,2 milyar. Bukan Rp 503,9 milyar seperti yang dilaporkan Latief.

Ada pula dugaan kuat bahwa Latief menggunakan dana Jamsostek untuk membangun dua hotel di Padang senilai Rp 80 milyar. Ia juga membeli tanah dari dana itu atas nama A Latief Corporation di Jakarta Selatan. Belum lagi, pembangunan Menara Jamsostek yang kebocorannya mencapai Rp 100 milyar. Dan untuk meredam isu penyalahgunaan dana Jamsostek, ada yang mengatakan Latief sempat menyuap enam pemimpin redaksi media massa di Jakarta. Nah, cukup berat memang tugas yang mesti diemban Kejaksaan Agung. ■

Tapos pun Perlu Direformasi

Ratusan petani Tapos ambil kembali tanah mereka. Dua mahasiswa digebuki centeng Soeharto. Bekas Presiden itu akan digugat karena serobot tanah.

Pagi itu panas cukup menyengat perbukitan Tapos. Sekitar 300 petani, yang tinggal di Desa Cibedug, Bogor, mencangkuli tanah kosong — tanah mereka yang sejak 1975 diserobot peternakan Tapos. Mereka bertanam singkong dan jagung, bersiap menghadapi kekurangan beras yang mulai menjangkiti pedesaan Jawa Barat.

Seolah tak ada yang aneh dalam kegiatan itu, sampai rombongan centeng Tapos yang dipimpin Made Soewecha, memukuli dua aktivis pers kampus yang sedang meliput di sana sampai semaput.

Adalah Ade dan Idil yang jadi korban kekerasan centeng Cendana itu. Ade, mahasiswa Universitas Pakuan yang juga aktivis pers kampus, tak menyangka dapat serangan mendadak itu. Ketika sedang mengumpulkan bahan untuk medianya, ia disergap 30 orang kaki tangan Soeharto — pemilik peternakan Tapos itu. Tanpa basa-basi, mereka menghardik, "Kalian mahasiswa, menghasut petani untuk menjarah tanah Tapos." Sebelum Ade sempat menjawab, bogem mentah melayang ke tubuhnya. Ade pun terpaksa dilarikan ke dokter. Malamnya, Ade diintimidasi. Dua orang misterius yang menunggui rumahnya hingga dini hari.

Sebetulnya, kalau dirunut sejarah peternakan Tapos, penduduk yang sekarang menggarap tanah itu bukanlah penyerobot. Tahun 1975, ketika peternakan Tapos yang dikelola PT Rejo Sari Bumi, milik keluarga Soeharto, baru dimulai, tanah-tanah di Cibedug itu sudah 32 tahun dikuasai penduduk setempat. Sekitar 500 keluarga petani itu berkebun pisang, tanaman semusim dan banyak lagi. Namun tanah seluas 750 hektar itu, direbut begitu saja oleh Soeharto, dan dipakai untuk pembibitan sapi serta domba. Penduduk dipaksa menerima penggusuran itu, tanpa ganti rugi sama sekali. "Siapa yang berani menolak kalau penggusurannya membawa-bawa nama Soeharto,"kata seorang pen-duduk.

Kini, ketika Soeharto tak lagi berkuasa — setelah ditumbangkan oleh Revolusi Mei yang dipelopori mahasiswa —keberanian penduduk Tapos pun ikut bangkit. Mereka mempertanyakan hak atas tanah yang dulu dirampas begitu saja. Apalagi, dari 750 hektar tanah Tapos itu, sesungguhnya hanya 400 hektar yang dipakai betul untuk pembibitan sapi dan domba. Sisanya, 350 hektar, dibiarkan terlantar. Penduduk yang kesulitan pangan, tak bisa disalahkan bila mereka menggarap tanah terlantar itu. "Pemerintah sendiri menganjurkan supaya tanah-tanah terlantar dimanfaatkan," kata Jauhari, Ketua Solidaritas Tani Indonesia (STI), yang mendampingi petani Cibedug.

Soalnya memang bukan salah-benar. Tetapi, kaki tangan Soeharto ternyata masih cukup kuat terutama di Tapos — proyek kebanggaan Soeharto yang selalu dipamerkan kepada tamu-tamunya itu. Masih jelas dalam ingatan masyarakat, tiap kali Soeharto menerima tamu luar negeri yang cukup dekat hubungan personalnya, ia akan membawa tamu itu ke Tapos. Begitu pula, bila ia ingin berbicara tentang masalah negara yang sangat serius dan di luar protokoler, Soeharto sering menggunakan Tapos. Konglomerat berkali-kali diceramahi Soeharto di peternakannya itu. Tak heran, bila bekas presiden yang mengaku orang desa itu, mempertahankan Tapos dengan sekuat tenaga.

Yang tak diperhitungkan Soeharto, agaknya, adalah semangat reformasi telah terlanjur merembes ke segala lapisan masyarakat. Juga ke masyarakat petani di Cibedug. Mereka tak gentar dengan ancaman model Orde Soeharto. Meskipun, aksi pematokan tanah Rabu, 15 Juli itu diwarnai insiden, petani tak menghentikan niat mereka. Dua hari berturut-turut, setelah itu, petani kembali mematoki tanah dan bercocok tanam. Seorang KK mematok tanah satu hektar.

Bersama-sama LBH Ampera dan STI, penduduk Tapos juga menempuh berbagai jalur untuk mendapatkan kembali tanah mereka. Kamis, 16 Juli, misalnya, mereka mendatangi Kantor Komnas HAM. Bukan sekedar mengadukan nasib, tetapi menegaskan sikap bahwa tanah mereka yang pernah dirampok keluarga Soeharto mesti dikembalikan. "Reformasi buat kami baru punya arti kalau tanah kami dikembalikan," kata warga Tapos.

Baharuddin Lopa, Sekjen Komnas HAM, yang menemui delegasi petani dan aktivis STI itu, mengatakan, Pemda Bogor mestinya bisa mengeluarkan keputusan sementara agar petani bisa menggarap tanah mereka. "Soeharto kan warga negara biasa. Maka Pemerintah Daerah bisa mengambil tindakan hukum," katanya. Sementara status hukum yang pasti belum bisa diperoleh, warga setempat bisa mengerjakan kebun. Hal itu, cocok dengan anjuran pemerintah, untuk menghindari bahaya kelaparan yang mengancam mayoritas penduduk kita.

Photo: Istimewa

■ **Berkebun di Tapos:** Mengambil hak yang lama diserobot Soeharto.

Kalau jalan kompromi ini tak berhasil, penduduk Tapos akan menggugat Soeharto ke pengadilan. Agar tanah itu secara hukum dikembalikan kepada petani. "Kami merencanakan untuk menggugat Soeharto," kata Teddy Wibisana, Ketua Solidaritas Indonesia. Belum jelas, kapan gugatan itu akan dimasukkan ke pengadilan. Tetapi, tampaknya tekad untuk memperkarakan bekas Presiden Soeharto itu, sangat kuat di kalangan petani tergusur dan aktivis yang mendampingi mereka. Lopa menyarankan supaya petani menyiapkan data-data tanah mereka, bila memang ingin menggugat ke pengadilan.

Nah, tunggu apa lagi. Mestinya memang ada yang mulai memperkarakan Soeharto di pengadilan. ■

Mencari Dalang Pemerkosa

Koalisi Perempuan Indonesia minta pertanggungjawaban ABRI, atas perkosaan dalam kerusuhan Mei lalu. ABRI dianggap lalai.

Sekitar seratus aktifis perempuan dari Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi demonstrasi ke kantor Dephankam. Mereka menyatakan protes terhadap ABRI yang membiarkan peristiwa penjarahan dan perkosaan itu terjadi. "ABRI sering menggebug demonstrasi. Kenapa perkosaan justru direstui?" tulis satu poster.

Bahkan dalam pernyataannya, mereka menunjukkan identifikasi yang dilakukan masyarakat bahwa teror, intimidasi, penyiksaan, penculikan, perkosaan bahkan pembunuhan itu dilakukan oleh aparat militer sendiri. "Kami menilai bahwa ABRI tidak berhasil menjalankan fungsinya sebagai penjaga keamanan. Apakah ABRI masih pantas diberi tanggungjawab keamanan masyarakat?," ujar Julia Suryakusuma, jurubicara koalisi perempuan ini.

Sebagai penjaga keamanan, sudah sepantasnya ABRI dimintai pertanggungjawabannya. Sebaliknya tidak sepantasnya jajaran ABRI ikut-ikutan mengubur kasus itu sebagai peristiwa yang lalu. Seperti yang dilakukan sejumlah pejabat penting negara yang ingin berusaha mengubur fakta peristiwa tragis pelecehan seksual secara massal 13-15 Mei lalu itu.

Karena, sepandai-pandainya upaya menutupi fakta, kebenaran tidak mungkin lagi bisa dipendam. Perlakuan biadab yang dilakukan sekelompok masyarakat itu menumbuhkan solidaritas warga negara yang semakin menguat. Pernyataan Menterl Peranan Wanita yang minta bukti dan kesaksian, atau pejabat polisi yang minta pengaduan tak justru menurunkan kredibilitas dirinya. Karena akhirnya Presiden Habibie meminta maaf, dan mengutuk peristiwa biadab itu.

"Atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, mengutuk berbagai aksi kekerasan pada peristiwa kerusuhan di beberapa tempat secara bersamaan, termasuk kekerasan terhadap perempuan," tulis Habibie dalam secarik kertas seusai menerima tokoh perempuan dari Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Rabu yang lalu (15/7).

Tentu permintaan maaf dan penyesalan pemerintah tidak akan bisa memulihkan kondisi psikologis 132 orang yang sekarang masih *shock* dan trauma karena diperkosa atau membangkitkan kembali 20 orang korban perkosaan yang sekarang sudah meninggal. Begitu pula pembentukan Tim Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan yang akan dilakukan Habibie pun tidak akan mudah menemukan para pelakunya jika tidak dilandasi kejujuran dan keberanian yang besar.

Sebab, seperti fakta yang disodorkan oleh Tim Relawan Untuk Kemanusiaan dan yáng juga dipaparkan oleh Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, bahwa para perusuh dan pemerkosa merupakan sindikat terlatih, terorganisir dan dikendalikan kelompok tertentu.

Fakta-fakta itu misalnya saja seperti penuturan seorang saksi yang menyaksikan peristiwa tragis yang menimpa Ny. L dan anak gadisnya L tanggal 13 Mei. "Massa datang dari tiga arah. Ada 4 pemuda naik motor yang memberi abaaba, "bakar, serbu", dan sekelompok pemuda tanggung berpakaian lusuh memulai perusakan. Korban turun dari lantai atas setelah rukonya dirusak dan dijarah. Di antara pemuda berpakaian lusuh itu ada yang berteriak "Cina bangsat perusak bangsa kami", sambil menggerayangi ibu dan anak gadisnya.

Di antara 4 pemuda yang naik motor ada yang berteriak "Pisahkan cewekceweknya dan bawa ke sekolahan". "Korban bisa lolos karena ditolong oleh warga setempat", tulis laporan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan.

Ada "pengkondisian massa", ada komando, sasarannya hanya satu, warga Tionghoa. Sebelum peristiwa, para organiser biasanya menyebarkan isu ke massa sasaran untuk anti Cina dan mereka mengiming-imingi kemudahan. "Sebelum terjadi kerusuhan, kami didatangi seorang laki-laki berbadan kekar. Laki-laki itu juga mendatangi pemukiman miskin tak jauh dari Pantai Indah Kapuk. Mulanya ia hanya berkenalan dengan para pemuda setempat sembari ngobrol. Kemudian ia mentraktir makan, minum dan rokok. Akhirnya mereka akrab. Laki-laki itu kemudian bilang, "Kalau *lu* mau, sebentar lagi *lu* dapat barang-barang mewah, bisa *ngentotin* (menyetubuhi) amoy-amoy yang selama ini *lu kagak* bisa jamah!".

Itu pengakuan saksi mata. Sementara Tim Relawan sendiri sempat terperangah dengan pengakuan seorang yang datang tiba-tiba, ketika Tim Relawan mengadakan pertemuan di Jakarrta Pusat bulan Juni lalu. Orang tak dikenal ini mengaku sebagai komandan yang menggerakkan kerusuhan. Orang itu mengaku telah merekrut sekitar 60 orang untuk melakukan aksinya. Dengan jumawa ia mengatakan, "Saya bisa perkosa perempuan-perempuan ini (sambil menunjuk pada 3 gadis Tionghoa). Membunuh Anda itu perkara mudah..!", katanya waktu itu.

Tim Relawan Untuk Kemanusiaan pernah mengungkapkan bahwa kelompok perusuh ini sempat dilatih secara khusus di pinggiran Jakarta selama dua minggu. Artinya, memang kerusuhan sudah dipersiapkan jauh hari. ■

Pohon Beringin Keguguran

Tokoh-tokoh Golkar mundur dari kepengurusan. Anak anak Cendana direcall dari MPR. Apa yang tersisa di Golkar?

Seperti pohon tua Golongan Karya (Golkar), ternyata rapuh. Ia hanya bisa berdiri karena ditopang kekuasaan militer dan birokrasi.

Dengan tumbangnya S0eharto, seharusnya Golkar juga terce-rabut dari akar perpolitikkan Indonesia. Karena selama ini Golkar adalah mesin politiknya Soeharto untuk melegitimasi kekuasaannya seolah-olah konstitusional. Lalu orang-orang yang berada di dalamnya menikmati hasil kekuasaan lewat Golkar itu, di atas penderitaan rakyat.

Tapi nyatanya, kini Golkar tetap ada, karena memang pemerintah yang berkuasa sekarang adalah orang-orang Golkar — yang notabene dulu turut mengkhianati rakyat. Dan orang-orang itu tidak bisa melepaskan diri dari ranting-ranting pohon beringin yang sudah membelitnya. Sebab kalau pemerintah Habibie dan antek-anteknya lepas dari Golkar otomatis ia akan disikat habis sampai ke akar-akarnya oleh rakyat.

Sekarang Golkar menjadi permainan Habibie dan konco-konconya, agar rakyat beralih dari menggoyang kekuasaan Habibie, dan gugatan rakyat terhadap Soeharto; kepada ribut-ribut soal Golkar dan ABRI. Memang, ABRI telah turut berdosa kepada rakyat, membesarkan Golkar dengan cara intimidasi, teror dan kekerasan agar kekuasaan Soeharto langgeng.

Rapuhnya Golkar mulai tampak sebelum musyawarah nasional luar biasa. Terutama saat saling berebut pucuk pimpinan antara kubu pensiunan ABRI

dengan Habibie. Dari kubu ABRI pensiunan sengaja dimunculkan Try Sutrisno dan sigaek Jendral Eddy Sudrajat. Sedangkan dari kubu Habibie muncul calon tunggal Akbar Tandjung, ada juga yang menyebut-nyebut kuda hitam Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Akhirnya Akbar unggul dari Eddy, setelah beberapa DPD membelot atas perintah Pangab, Jendral Wiranto, yang kini berbalik mendukung Habibie. Kemungkinan terbesar Wiranto punya deal dengan kelompok Habibie atau ia juga punya 'udang dibalik batu'.

Tapi Akbar yang tidak siap untuk memimpin Golkar, akhirnya menyusun pengurusnya 'gemuk' sekali, sampai 138 orang. "Saya juga heran kenapa Bang Akbar menyusun pengurus Golkar begitu gemuk. Saya pikir tidak efisien, atau karena terlalu banyak makan budi," kata Priyo Budi Utomo, seorang pengurus Golkar yang 'vokal' dan potensial.

Memang dalam tubuh Golkar terdapat beberapa nama yang sebenarnya tak pantas untuk partai penguasa seperti itu. Atau mungkin pantas, karena kualitas orang-orang Golkar seperti itulah. Misalnya ada nama Amran Nasution, Redaktur Pelaksana Majalah *Gatra*, bekas preman Medan dan juga sangat akrab dengan Letnan jendral Prabowo Subianto yang diduga dalang penculikan aktivis.

Beberapa orang lainnya yang dikenal sebagai kubu Eddy Sudrajat, yang dimasukkan Akbar dalam kepengurusan barunya. Tapi belakangan mereka mundur satu demi satu, mungkin karena malu hati, atau juga sudah memprediksi Golkar akan dibenci rakyat sampai tuntas. Mula-mula, Indra Bambang Utoyo — kawan dekatnya Bambang Trihatmojo, anak lelaki Suharto, lalu menyusul Mayor Jendral (purn) Yudhono, Didiet Haryadi, Wati Amir, Krissantono, Setiawan Djodi, Salim Said dan kamis pekan lalu Tjahjo Kumolo. Semuanya memang kebanyakan adalah pendukung faksi militer, tepatnya Try Sutrisno dan Eddy Sudrajat.

Yang lucu justru Salim Said, pengamat militer yang sangat dekat dengan tentara, ikut mundur. Padahal menurut Leo Tomasoa, bekas ketua Dewan kesenian Jakarta itu, "Sampai menangis minta agar bisa duduk dalam DPP Golkar." Rupanya, Salim Said tersinggung, ditempatkan sebagai Ketua Departemen Hukum dan Lingkungan Hidup.

Nah, yang agak mending, Golkar akan me-*recall* anak-anak Soeharto dari MPR. Tutut, Bambang dan Tommy, se-bentar lagi akan terpaksa berkemas dari Senayan. Lucu juga mendengar Abdul Gafur bicara tentang nepotisme, ketika mengumumkan rencana *recall* anak-anak Cendana itu. Ada-ada saja. ■

Solidaritas untuk Djiteng

Karena solidaritas anak buahnya, Dirut PLN bisa bertahan. Calon penggantinya pun enggan. Tapi, sampai kapan Djiteng bertahan?

Polemik pencopotan Dirut PT PLN Djiteng Marsudi masih berlanjut. Rencananya, pergantian secara resmi sudah harus dilakukan tanggal 13 Juli lalu. Namun, karena adanya perkembangan pro-kontra terhadap rencana itu, pemerintah tampaknya belum berani mengambil tindakan tegas.

Menneg Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng, tampaknya juga masih melihat-lihat situasi. Pasalnya, banyak anggota DPR dan orang-orang kritis yang mulai mencecarnya. Itu sebabnya, raker antara Tanri dan Komisi V DPR yang dijadwalkan akan berisi penjelasan pergantian Djiteng hari Rabu (15/7) lalu urung dilangsungkan.

Menyadari dirinya dalam posisi sulit, dengan cerdik Tanri mengganti jadwal raker dengan mengundang makan malam kelompok kerja fraksi-fraksi DPR itu. Meskipun demikian, dalam acara makan malam itu, Tanri tetap akan melakukan pembicaraan "pendahuluan" menyinggung soal pergantian Djiteng. Langkah Tanri ini memang merupakan tindakan jitu. Ia tampaknya menggunakan kelihaiannya melakukan lobi layaknya yang dilakukan para manajer profesional.

Dengan mengemas pertemuannya dalam acara makan malam, secara psikologis Tanri tidak akan berada dalam posisi yang frontal dengan para anggota DPR yang kritis. Dengan cara itu, kesan lobi menjadi tidak mengemuka. Sebab, Tanri mengundang semua fraksi di DPR yaitu, FKP, FPP, FPDI dan FABRI. Malah seorang anggota fraksi menyebut undangan makan malam tersebut sudah sesuai prosedur. "Sesuai dengan tata tertib yang ada."

Skenario pergantian Djiteng, kelihatannya memang sudah harga mati bagi pemerintah. Sehingga, Djiteng harus terdepak meskipun sebagian besar karyawannya masih menginginkannya menjabat sebagai dirut. Seperti dipaparkan oleh media ini, Djiteng dinilai sebagai ancaman bagi orang-orang penting dalam pemerintahan. Sebab, Djiteng bermaksud memutuskan kewajiban PLN membeli listrik swasta — yang memiliki keterkaitan dengan orang-orang penting itu. Seperti Ny. Siti Hediati Prabowo dan Bakrie Power Holding di proyek PLTU Tanjung Jati A, serta Habibie dalam proyek PLTU Paiton II.

Salah seorang yang menentang pencopotan Djiteng adalah Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto. Tokoh yang berjasa menyehatkan PT Timah ini mati-matian mempertahankan Djiteng. Menurut Kuntoro, wewenang pergantian direksi PLN adalah wewenangnya sebagai Mentamben. Ia menganggap Tanri Abeng tidak memahami undang-undang bila melangkahi wewenangnya. Sebab, berdasarkan UU No.15/1985, jelas bahwa pelistrikan negara berada di bawah Deptamben, dan karenanya pergantian direksi hanya bisa dilakukan oleh Mentamben.

Secara hukum, landasan pergantian Djiteng memang tidak cukup kuat. Hal itu hanya didasarkan pada PP No.50/1998 dan Inpres No.15/1998 yang dikeluarkan dengan alasan "memotong rantai birokrasi." Padahal, pijakan peraturan tersebut tingkatannya masih di bawah UU No.15/1985 yang dijadikan acuan oleh Mentamben. Karena itulah, Ir Tunggono yang diproyeksikan mengganti Djiteng, sedikit bimbang untuk menerima jabatan dirut. Walaupun akhirnya menyatakan bersedia, ia sempat mensyaratkan pembenahan tumpang tindihnya dasar hukum antara UU No.15/1985 dan PP No.50/1998. "Ketentuan hukumnya harus jelas," ujar Tunggono.

Dikonfirmasikan mengenai dasar pijakan hukum itu, Tanri Abeng mengelak. "Penunjukan dalam bentuk PP itu masalah pemerintah. Yang mendesain adalah Menko Wasbang/PAN Hartarto," ujarnya di depan para wartawan.

Hartarto seperti halnya Tanri, juga masuk dalam kategori pihak yang "ngotot" terhadap pencopotan Djiteng. Segala cara tampaknya akan dilakukan untuk itu, kendati tidak melibatkan Kuntoro yang menentang rencana pergantian itu. Untuk menunjukkan bahwa ia tidak sendirian Hartarto mengatakan, rencana pergantian Djiteng telah dipelajari benar-benar, dan akan melibatkan unsur-unsur dari 4 departemen yang berbeda-beda. Yaitu, "tim yang beranggotakan Menneg Pendayagunaan BUMN, Menteri Keuangan, Menperindag dan Menko Wasbang/PAN."

Bagaimanapun, solidaritas karyawan PLN yang mengancam akan mematikan listrik bila Djiteng diganti, tampaknya membuat Tanri keder. Apalagi posisi Djiteng juga didukung kalangan DPR. Angin reformasi membuat tindak sewenang-wenang atasan, memang kurang populer.

Baiklah kita tunggu saja, nasib Djiteng pekan-pekan depan ini. Mungkin, tidak akan berakhir manis untuk Djiteng. Tetapi mereka sudah melawan. ■

Yacob Rumbiak, Aktivis Irian:

"Rakyat Papua akan Merdeka"

Yacob Rumbiak tak menyangka akan menjadi tahanan pemerintah militer Orde Baru Soeharto. Padahal ia adalah dosen pada mata kuliah geofisika, Universitas Cendrawasih, Jayapura, Irian Jaya. Lelaki yang lahir 40 tahun lalu di Sorong adalah salah satu putra terbaik rakyat Irian. Lulus SMA ia melanjutkan ke jurusan geografi IKIP Bandung. Tak puas hanya meraih gelar S1, lalu melanjutkan kuliah di bidang meteorologi dan klimatologi di ITB, masih di Bandung, Jawa Barat, dan lulus meraih gelar master pada tahun 1987. ''Setelah itu saya ke Irian dan tak lama kemudian masuk penjara,"kata Yacob yang juga penasehat kemiliteran gerilyawan dan hubungan luar negeri Papua Merdeka.

Yacon mengaku ia hanyalah seorang pengamat masalah Irian. Tapi pemerintah Indonesia yang militeristik, menuduh Yacob sebagai biang kerusuhan di Irian Jaya dan menjadi gembong Organisasi Papua Merdeka (OPM). Yacob divonis hukuman 17 tahun penjara di PN Jayapura, turun menjadi 6 tahun ditingkat banding dan kembali menjadi 17 tahun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Kini mendekam di Penjara Cipinang, Jakarta Timur, sebelumnya Yacob ditahan di penjara di Jayapura, LP Kalisosok Surabaya, LP Dewasa Tanggerang.

''Saat saya ditahan di Jayapura saja ada 35 ribu orang ditahan dan 242 orang yang diadili dan masih ditahan sampai kini. Saya harap mereka segera dilepaskan semuanya. Toh, Suharto sudah turun,"imbau Yacob.

Bisa cerita sedikit kisah Anda hingga sampai di penjara?

Pada 7 Desember 1989 saya mau ditangkap oleh militer Indonesia, lalu saya lari minta perlindungan ke Papua New Gunea (PNG), dan mendapat perlindungan sejak 14 sampai 28 Desember 1989. Lalu saya kembali ke Indonesia karena ada garansi melalui Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Jendral L.B. Moerdani dan Try Sutrisno. Saat saya datang ke Jayapura, saya dijemput Sjafrie Sjamsoeddin yang saat itu asintel di Kodam Jayapura. Tapi nyatanya saya bukan dikembalikan ke rakyat, malah langsung dibawa dan ditahan di markas militer di Waeena dekat Abepura, Jaya pura. Disana saya diinterogasi oleh Sjafrie dan Warrow, ditekan dan dipaksa dengan ancaman mau distroom. Tapi tidak jadi, karena saat itu ada tekanan dari mahasiswa dan dunia Internasional. Sampai sekarang saya belum kembali ke rakyat saya di Papua sana.

Kenapa Anda ditangkap?

Saya dituduh biangnya perusuh di Irian Jaya. Padahal apa yang saya lakukan justru terbuka dan mendapat sudah izin dari pihak militer waktu itu. Misalnya, pada 9 April 1989 saya melakukan rapat terbuka yang diizinkan oleh pihak ABRI, agar rakyat bisa merayakan kemerdekaan Papua Barat. Itu, artinya kalau diizinkan oleh pejabat pemerintah sipil maupun militer, sudah produk hukum. Tapi nyatanya itu hanya jebakan untuk menangkap saya dan sejumlah orang lainnya.

Apa yang Anda lakukan saat itu?

Saya hanya mengimbau pemerintah jangan sampai tindakan militerisme atau kekerasan terhadap pengunjuk rasa atau kepada rakyat yang merayakan HUT kemerdekaan Papua, sebab sudah ada izin itu.

Soal kemerdekaan, bagaimana menurut Anda?

Sebenarnya kemerdekaan bagi rakyat Papua adalah kewajiban bagi pemerintah penjajah Belanda dan penjajah Indonesia untuk memerdekakan bangsa kami atau membiarkan kami untuk menentukan kemerdekaan sendiri. Yang terjadi sekarang adalah penjajahan. Tidak ada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya, ini neo kolonialisme.

Apa yang sebenarnya terjadi di Irian?

Pelanggaran hak asasi manusia karena, adanya intervensi militer pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua yang dimulai pada 19 Desember 1961, saat itu menjadi komandan operasinya Suharto. Lalu adanya Pepera 1969 hasil rekayasa rezim Suharto

Rekayasa bagaimana?

Ya, karena Suharto merekayasa wakil-wakil dengan cara sistem perwakilan politik bukan seperti yang ditetapkan oleh PBB dalam New York Agreement 15 Agustus 1962, yang isinya *act to free choice one man one vote,* kebebasan memilih satu orang satu suara, bukan perwakilan.

Lalu apa lagi?

Saya melihat pemerintah Indonesia tidak manusiawi perlakuannya terhadap rakyat Papua. Tapi ternyata juga bukan hanya pada rakyat Papua, juga pada rakyat Indonesia. Militer di Irian menangani rakyat selalu dengan kekerasan.

Soal ekonomi?

Saya lihat ada kapitalisme disana oleh rezim Suharto, wilayah yang kaya hanya untuk segelintir orang pemerintah saja, yang miskin semakin menderita.

Soal Freeport?

Freeport itu sumber daya alam yang menghasilkan seharusnya untuk kemakmuran rakyat, tetapi ternyata tidak. Freeport hadir sebagai sumber pemicu pelanggaran hak asasi manusia, karena yang dilakukan freeport adalah membayar pemerintah Indonesia dan militer untuk merampas tanah rakyat, kalau rakyat tidak mau ; diintimidasi, diusir dari tanahnya bahkan banyak yang dibunuh. Sebenarnya freeport bisa bermanfaat bagi rakyat Papua bila memang hasilnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi ternyata ia menjadi bencana, apalagi karena bekerja sama dengan pemerintah rezim Suharto yang totaliter dan korup yang mengedepankan kekuatan militer untuk menindas rakyat.

Ada pendapat, kalau merdeka rakyat Irian malah tidak bisa melakukan pembangunan?

Kemerdekaan itu kepunyaan Allah, pandangan seperti itu menghujat Allah, tentu manusia diciptakan Allah untuk mengatur kehidupannya dengan cinta kasih antar bangsa. Pandangan seperti diatas adalah pandangan atheis. Karena Tuhan sudah mengatur tiap bangsa akan mendapat kemerdekaannya. Lagi pula pembukaan UUD 1945 juga mengatur tentang kemerdekaan adalah hak sebagai bangsa. Artinya pemerintah Indonesia selama ini telah mengingkari konstitusinya sendiri dan juga nilai-nilai universal hak asasi manusia. Kami yakin, bangsa kami akan merdeka. Kami percaya pada suatu saat nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama ada pemerintah Indonesia yang demokratis yang menghargai dan menjunjung tinggi isi pembukaan UUD 1945. Nah, saat adanya pemerintah Indonesia yang demokratis itulah, bangsa kami memperoleh kemerdekaannya kembali .

Bagaimana solusi agar tidak terjadi lagi pergolakan di Irian?

Irian akan berhenti bergolak, bila ABRI ditarik dari Papua Barat, mencabut dan membubarkan hasil Pepera yang memakai sistem perwakilan yang berpengertian politik rekayasa rezim Orba yang dilakukan 14 Juli - 14 Agustus 1969. Lalu, pemerintah demokrasi Indoneia membentuk komisi rakyat Papua dengan berbagai unsur rakyat Papua untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia dan memberikan kesempatan rakyat Papua di bawah pengawasan PBB untuk menentukan nasib sendiri. ■

Xpos

ARIEL TENTANG TEROR NEGARA

Diterbitkan oleh:
Komunitas Informasi Terbuka
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: **http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp**
PO.Box 22202 London SE5 8WU, United Kingdom

Ganti ongkos cetak Rp. 1000,- Terbit seminggu sekali

Habibie Akan Calonkan Diri Lagi

Presiden transisi B.J. Habibie berambisi terus berkuasa, dengan menggunakan Golkar dan ICMI sebagai mesin politiknya. Bagaimana peluang Megawati Soekarnoputri dan Amien Rais?

Nikmatnya kursi kekuasaan, apalagi berada dipuncaknya, tidaklah mudah ditinggalkan begitu saja. Agaknya, pikiran itulah yang kini membayangi benak Baharudin Jusuf Habibie . Tak lama setelah dilantik sebagai presiden transisional, ia pernah menyatakan tidak berambisi terus bertahan di puncak kekuasaan itu. "Tugas utama saya hanya mengantarkan bangsa Indonesia melaksanakan pemilu tahun depan," kata Habibie.

Tapi, dalam sebuah wawancara dengan *The Washington Post*, surat kabar terkemuka Amerika Serikat, beberapa waktu lalu, Habibie berubah pikiran. Secara implisit ia mengungkapkan ambisi untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Ketika ditanya apakah ia akan ikut dalam pemilihan presiden tahun depan, Habibie menjawab diplomatis: "Pertama saya serahkan kepada Tuhan, karena saya harus tetap sehat. Dan kedua, kepada rakyat, apakah mereka masih menginginkan saya memimpin negeri ini atau tidak."

Makin hari, Habibie tampaknya makin percaya diri. Apalagi setelah para pendukungnya berhasil merebut kepemimpinan Golkar, dalam Munas Luar Biasa, awal Juli lalu. Salah satu orang kepercayaannya, Akbar Tanjung, tampil sebagai ketua umum partai beringin itu.

Golkar memang akan dipakai sebagai "mesin politik" utama menggolkan Habibie kembali ke kursi presiden. Asumsinya, Golkar merupakan partai politik paling siap menghadapi pemilu mendatang-yang akan memakai sistem distrik. Untuk menjamin dukungan terhadap Habibie,

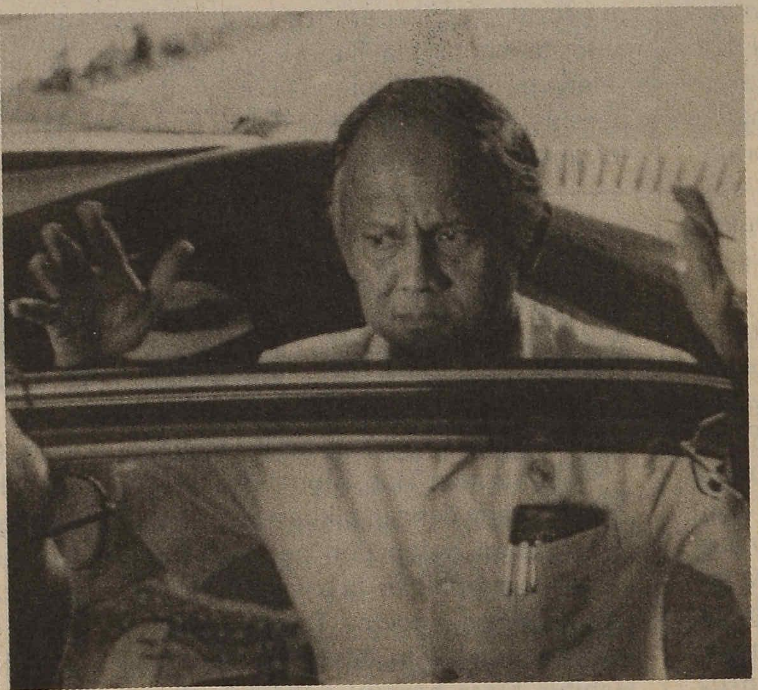

Photo: Istimewa

■ **Habibie:** Ingkari janji sendiri

Fraksi Karya Pembangunan di DPR dan MPR dibersihkan dari "kaum Suhartois"-termasuk keluarga Cendana. Sebagai gantinya, Gedung DPR/MPR di Senayan akan dipenuhi orang-orang Habibie. "Langkah itu merupakan strategi untuk menguasai Sidang Istimewa MPR nanti," kata sumber *Xpos* di markas DPP Golkar.

Penguasaan Sidang Istimewa MPR itu memang penting. Sebab, dalam forum itulah nantinya akan disahkan sejumlah RUU Politik-termasuk UU Pemilu, UU Partai Politik, dan UU Susunan dan Kedudukan DPR/MPR. Tentunya, mayoritas anggota Golkar akan menggolkan undang-undang yang menguntungkan partainya dalam pemilu nanti.

Selain Golkar, "mesin politik" Habibie lainnya adalah ICMI. Dalam sebuah pertemuan pengurus ICMI, pekan lalu, dirumuskan strategi dan taktik untuk mempertahankan kekuasaan yang telah digenggam "kubu Habibie". Caranya, lewat gerilya politik ke kantong-kantong kalangan "islam modernis" yang bersikap radikal, seperti Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan lain-lain. Belakangan, kalangan islam ini merencanakan membentuk partai politik sendiri, yang akan dinamakan Partai Bulan Bintang.

Tak hanya itu. Kabarnya, ambisi Habibie untuk terus berkuasa sudah mendapat restu ABRI. Bahkan, dalam berbagai kesempatan Panglima ABRI, Jenderal Wiranto, menyatakan secara terbuka dukungannya terhadap kepemimpinan Habibie. Sebagai imbalannya, Habibie menyerahkan wewenang penuh kepada Wiranto untuk melakukan "konsolidasi" di tubuh ABRI. Hasilnya, pembersihan "kubu Prabowo" pun berjalan lancar tanpa hambatan (lihat *Xpos* No.29). Imbalan lain: Wiranto dijanjikan kursi Wakil Presiden, bila Habibie tetap duduk di tampuk kekuasaan.

Namun, bisa dipastikan, ambisi Habibie melanggengkan kekuasaannya akan mendapat tantangan berat dari

Berita Pekan Ini

Partai-partai Baru Tanpa Program ... 3
Bank Dunia juga Koruptor ... 5
Pengadilan Kopassus Dimulai ... 9
Rencana Mega Dijegal ...10
DPRD I Akan Dihapus ...11
Wawancara Pius ... 12

Harapan

Pemilu tinggal sepuluh bulan lagi. Dan, Harmoko yang bekas Ketua Umum Golkar, mulai bisa sesumbar. Bahwa Partai Beringin masih akan memangkan mayoritas suara. Alasannya, Golkar lebih siap dalam infrastuktur. Kaki-tangan partainya sampai ke desa-desa. Sedangkan partai lain, masih baru, belum punya prasarana atau pengurus; bahkan cabang-cabangnya belum terbentuk.

Sesumbar Harmoko itu, sekilas ada benarnya. Benar, bahwa Golkar punya cabang-cabang yang lebih siap. Punya uang lebih banyak dibanding partai lain. Tetapi, apakah itu semua bisa jadi jaminan bahwa rakyat akan mencoblos Golkar bila pemilunya sungguh-sungguh demokratis? Ini yang meragukan.

Sulit dibantah bahwa reputasi Golkar selama Orde Soeharto tidaklah baik. Praktek-praktek nepotisme, kolusi, korupsi yang merajalela, adalah jasa Golkar. Dan, kebangkrutan ekonomi, yang berujung pada krisis politik, belakangan ini, tak bisa dilepaskan dari tanggung-jawab Golkar. Pendeknya, Golkar punya cap buruk di mata masyarakat. Ini menjadi faktor paling penting yang akan memalingkan wajah pemilih dari Golkar. Bila ketidak-percayaan begitu meluas, infrastruktur dan uang, tak akan bisa lagi berbicara. Golkar pasti ditinggalkan orang.

Sebaliknya dengan partai-partai baru. Mereka memang miskin, tak punya kelengkapan yang memadai. Tetapi, pada partai-partai itu - terutama Partai Mega dan Partai Amien Rais - orang melihat adanya harapan. Harapan akan keluar dari krisis. Harapan akan masa depan lebih baik, yang nyata-nyata tak bisa diberikan Golkar. Itulah sebabnya, harapan orang menjadi faktor penting, yang akan menuntun orang untuk memilih partai dalam pemilu.

Seperti ditunjukkan negeri-negeri bekas komunis, setelah Tembok Berlin runtuh. Partai Komunis yang punya jaringan dan uang, tak berdaya menghadapi partai baru yang serba miskin dan kekurangan. Saat seperti itu, harapan lebih penting ketimbang cabang partai dan uang.

■ **LUGAS**

kalangan oposisi. Saingan terberat Habibie adalah Megawati Sukarnoputri. Ketua Umum PDI Perjuangan, yang punya massa pendukung puluhan juta orang, itu diam-diam juga sudah menggalang koalisi dengan sejumlah kekuatan politik. Pendukung utama Megawati, tak lain, Abdurahman Wahid, Ketua Umum Nahdatul Ulama (NU). Gus Dur secara terbuka berkali-kali menyatakan dukungannya kepada Megawati.

Aspirasi politik umat NU sendiri secara resmi akan disalurkan lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diresmikan 23 Juli lalu. Di atas kertas kekuatan massa partai yang dipimpin Matori Abdul Djalil (mantan Sekjen PPP) ini terhitung dahsyat, sebab anggota NU saja tercatat 30 juta lebih. Jadi, bisa dibayangkan besarnya kekuatan koalisi kedua partai massa tersebut.

Menariknya, koalisi itu bakal didukung pula oleh sejumlah jenderal purnawirawan yang tergabung dalam Barisan Nasional. Seperti diketahui, para jenderal purnawirawan itu kalah dalam pertarungan merebut kepemimpinan Golkar. Jago mereka, Edi Sudrajat, keok ditaji kubu Akbar Tanjung.

Selain Edi, tokoh utama kelompok jenderal pensiunan itu adalah Try Sutrisno-mantan wakil presiden yang juga seteru politik Habibie. Tokoh jenderal pensiun lainnya yang ikut dalam barisan ini, antara lain: Kemal Idris, Kharis Suhud, Bambang Triantoro, Arie Sudewo, dan Ali Sadikin.

Kandidat presiden lainnya adalah Amien Rais, salah seorang reformator utama yang menjatuhkan Soeharto. Meski menjabat Ketua Dewan Pakar ICMI, jabatan yang baru saja didudukinya kembali, tak berarti Amien setuju denga garis politik ICMI yang mendukung Habibie dalam perebutan kursi "orang nomor satu" di republik ini.

Alih-alih mendukung Habibie, Amien malah berencana membuat partai sendiri: Partai Amanah Bangsa. Para pendukung partai ini terutama adalah eksponen Majelis Amanat Rakyat (MARA)-koalisi aktivis pro-demokrasi yang dibentuk untuk mendukung gerakan reformasi. Selain itu, tentu saja, Amien akan didukung 20 juta lebih massa Muhammadiyah.

Partai Amanah Bangsa juga akan menggarap suara pemilih muda, sebagai salah satu sumber utama dukungannya. Program partai itu, antara lain, menggolkan Amien Rais sebagai Presiden RI pasca pemilu. Sebagai wakil presiden, kandidatnya adalah Emil Salim.

Nah, melihat peta politik di atas, ditambah puluhan partai politik gurem lainnya, bisa dipastikan pemilu mendatang akan berlangsung seru. Siapa pemenangnya, sepenuhnya tergantung suara rakyat. Sebab, seperti bunyi sebuah diktum politik: suara rakyat adalah suara Tuhan.■

Habibie dan Orang Cina

Sulit membayangkan B.J Habibie, Presiden Transisional itu, sebagai orang dengan pikiran rasis. Sebab pengalaman hidup dan pendidikannya sangat kosmopolitan. Ia belajar di Jerman, sampai bergelar doktor. Tinggal di negeri itu bertahun-tahun, tentunya membuat Habibie biasa bergaul dengan berbagai ras.

Tetapi, pernyataan Habibie di Washington Post, 18 Juli lalu, sungguh mengagetkan. Wawancara itu, seperti membenarkan dugaan orang, bahwa Habibie sendiri menyimpan keengganan menerima orang Cina. Meskipun, ia pernah mengutuk perkosaan dan penjarahan yang ditujukan kepada warga keturunan Cina Mei lalu, tetapi itu terjadi setelah desakan bertubi-tubi di masyarakat. Dan, pernyataan yang terlambat itu, tak diikuti dengan langkah-langkah nyata mengatasi korban perkosaan. Organisasi penggerak kerusuhan itu, belum juga diusut.

Menanggapi pertanyaan Washington Post, tentang orang-orang Cina yang lari setelah kerusuhan, Habibie menunjukkan sikap ganda. Ia tak begitu berharap orang Cina balik ke Indonesia, sebab posisi mereka di dunia bisnis bisa digantikan oleh orang lain.

"Jika mayarakat Cina tidak mau kembali, karena mereka tak percaya negeri mereka sendiri, saya tak bisa memaksa. Tak seorang pun bisa memaksa mereka," kata Habibie. "Tetapi, apakah Anda pikir kami akan mati?" tanya Habibie sambil tertawa. "Posisi mereka akan diisi oleh orang lain," katanya.

Jelas, Habibie memang kurang peduli terhadap korban kerusuhan dan pemerkosaan massal Mei lalu. Ia hanya melihat perginya orang-orang Cina sebagai peluang, untuk kelompoknya sendiri mengisi pasar. Hal ini mulai tampak dengan monopoli sembako yang dilakukan oleh kroni-kroni Habibie. Sayang, Habibie yang diharapkan jadi negarawan, malah balik ke kepentingan sempit kelompoknya sendiri.■

Partai Baru, Mana Programnya?

Partai-partai politik bermunculan, tapi tanpa program yang jelas. Siapa yang paling siap menghadapi pemilu mendatang?

Bagai jamur di musim hujan, partai politik terus bermunculan. Yang terbaru adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), diresmikan Kamis, pekan lalu. Partainya umat Nahdatul Ulama (NU) itu dipimpin Matori Abdul Djalil, mantan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan.

Meski hampir semua pengurusnya berasal dari NU, keanggotaan PKB bersifat terbuka untuk semua kalangan. "Partai ini berwawasan kebangsaan dan demokrasi," tegas Matori. Dengan asas itu, Matori optimis partainya akan mampu meraih sedikitnya 30 persen suara pemilih dalam pemilu mendatang.

Optimisme Matori itu, agaknya, didasarkan pada basis massa NU yang kini sudah mencapai 30 juta orang lebih. Tapi apakah itu cukup? Sejauh ini belum jelas benar apa saja program PKB menghadapi pemilu mendatang. Padahal, banyak soal teknis administratif yang harus disiapkan, untuk bisa meraih sebanyak mungkin suara pemilih. Atau seperti kata seorang pengamat politik, "Partai tak cukup bermodalkan massa banyak, tapi juga teknik kampanye yang prima."

Sebagai contoh, agar bisa ikut dalam pemilu, sebuah partai politik minimal harus memiliki cabang di separoh lebih propinsi dan kabupaten. Artinya, menjelang pemilu, yang rencananya digelar Mei tahun depan, setiap partai yang akan menjadi kontestan pemilu harus punya 14 kantor cabang tingkat propinsi, dan 151 di tingkat kabupaten.

Persyaratan itu digariskan dalam RUU Pemilu yang akan disahkan dalam Sidang Istimewa MPR, akhir tahun ini. RUU Pemilu, yang digodok Tim Depdagri itu, juga menyebutkan bahwa sistem pemilu yang dipakai adalah sistem distrik. Jadi, seluruh wilayah Indonesia akan dibagi menjadi 420 distrik pemilihan, dengan perincian 201 di Jawa dan 210 di luar Jawa.

Dengan sistem ini, setiap partai harus menampilkan calon legislatif yang populer di distrik pemilihan. Sebab yang dipilih adalah tokoh, bukan tanda gambar partai. Selain itu, apalagi di tengah krisis ekonomi sekarang ini, massa akan memprioritaskan calon yang mengemukakan program kongkrit untuk kesejahteraan rakyat. Artinya, peluang politik uang (money politics) makin terbuka lebar untuk berperan.

Photo: Istimewa

■ **Partai Orang NU:** Menambah ramai bursa pemilu.

Singkatnya, sistem distrik akan lebih menguntungkan partai-partai politik yang sudah ada, terutama Golkar.

Memang, bila sistem distrik diberlakukan, yang paling siap adalah Golkar. Partai pemerintah yang selalu memenangkan mayoritas suara dalam setiap pemilu Orde Baru itu, sudah punya cabang di setiap kabupaten. Bahkan, akar-akarnya sudah merembet sampai ke kecamatan dan desa.

Selain itu, dana Golkar juga terbilang lebih dari cukup: mencapai ratusan miliar rupiah. Sumber dana partai beringin ini terutama berasal dari Yayasan Dakab, salah satu yayasan yang dipimpin mantan Presiden Soeharto. Lagipula, kebanyakan para pengurus Golkar sekarang ini notabene pejabat pemerintah, yang bisa saja mengalihkan penggunaan dana dan fasilitas negara untuk kepentingan partainya.

Karena itu, ada kecurigaan penetapan sistem distrik dalam pemilu merupakan bagian skenario memenangkan partai beringin dalam pemilu mendatang. "Sistem distrik jelas akan menguntungkan Golkar," kata Amien Rais, yang akan memimpin Partai Amanah Bangsa (PAB). Partai yang akan diresmikan pendiriannya tak lama lagi itu memang belum menggariskan platform dan program kongkrit. Tapi, yang terang, PAB akan mencalonkan Amien sebagai presiden pasca-pemilu, dan kemungkinan Emil Salim sebagai wakilnya. Kombinasi ini mengingatkan duet Soekarno-Hatta. Satu solidarity maker dari Jawa, satunya administratur dari Sumatra.

Yang lumayan siap justru PDI Perju-angan pimpinan Megawati Sukarnoputri. Diam-diam partai ini terus melakukan konsolidasi. Disamping itu, mereka juga terus berusaha menarik simpati masyarakat lewat program-program kongkrit yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Caranya, dengan mendirikan Posko-posko Reformasi, terutama di kawasan-kawasan masyarakat kurang mampu. Salah satu kegiatan posko reformasi itu adalah membagi-bagikan sembako, atau menjualnya dengan harga murah.

Lalu, bagaimana dengan partai-partai gurem yang banyak bermunculan? Mereka, agaknya, tak cukup siap menghadapi pemilu dengan sistem distrik itu. "Paling-paling nantinya mereka terpaksa berkoalisi dengan partai-partai besar yang ada," kata pengamat politik tadi.

Bila itu yang terjadi, jelas bisa menjadi ganjalan bagi Golkar yang masih berambisi meraih suara mayoritas. Lagipula, meski secara teoritis Golkar merupakan kontestan pemilu yang paling siap, bukan tak mungkin yang terjadi di lapangan nanti malah sebaliknya. Sebab, waktu yang kurang setahun ini tidaklah cukup untuk mengubah citra Golkar sebagai partainya Orde Baru yang banyak menyusahkan rakyat kecil. Karena itu, Sarwono Kusumaatmadja, mantan Sekjen Golkar, memperkirakan Golkar hanya akan mampu meraih maksimal 25 persen suara pemilih.

Nah, untuk menghambat Golkar, para pengurus partai politik baru harus segera membuat platform dan program yang jelas. Tentunya, agar rakyat tertarik dan memilih calon dari partai Anda. ■

■ OPINI

Petani Bukan Penjarah

Oleh: Siti Anisa

Belakangan ini, ada simplifikasi yang menyesatkan dari kalangan aparat menghadapi aksi petani. Sikap itu, antara lain diwakili Kapolri Roesmanhadi. Ia menuding petani yang menanami kembali tanah mereka, sebagai penjarah. Para petani itu dianggap mengganggu ketertiban dan melawan hukum. Karenanya, kata Kapolri, mereka akan ditindak tegas. Kalau perlu ditembak dengan peluru tajam. Memberi cap penjarah, kepada petani yang sebetulnya hanya menegakkan hak mereka, bukan hanya tidak bijaksana. Tetapi juga keliru.

Mari kita tinjau masalah ini lebih dalam. Petani-petani yang kini dituding "menjarah" itu, sebetulnya sudah lama berjuang agar mereka dibolehkan menggarap tanah mereka. Tanah itu pun, pada awalnya, memang milik para petani, yang direbut paksa oleh kekuatan modal dan penguasa di masa rezim Soeharto. Penyerobotan tanah petani itu, tak lain dari bentuk penjarahan, yang pada masanya direstui oleh aparat keamanan. Polisi, yang sekarang dikomandoi oleh Roesmanhadi, ikut berjasa dalam perampasan tanah petani di masa lalu.

Di Tapos misalnya. Tanah yang sejak tahun 1942 digarap penduduk Cibedug, tiba-tiba diminta oleh Soeharto. Ketika itu, tahun 1975, Soeharto masih kuat-kuatnya menjabat presiden. Tak seorang pun berani membantah, saat ia mengambil 750 hektar tanah produktif milik petani. Dengan tenang, Soeharto mendirikan pusat pembibitan sapi dan kambing, yang bibitnya didatangkan dari Australia dengan kapal berpendingin. Polisi dan aparat keamanan lain, mengiyakan saja penyerobotan tanah itu, meskipun petani menggerutu dalam hati. Tindakan anti hukum dari bekas presiden itu, bertahun-tahun ditutup-tutupi. Tapi tak terlupakan buat masyarakat yang jadi korban.

Keresahan yang disimpan petani lebih dari 20 tahun, ditindih oleh ketakutan, kini meledak setelah Soeharto tumbang. Harapan akan perbaikan di masa reformasi bertiup sampai gunung-gunung itu. Dan tiba-tiba, ratusan keluarga di Cibedug itu punya keberanian untuk mempertanyakan hak mereka. Cara paling mudah, dan memang perlu, adalah langsung menanami tanah itu dengan tanaman pangan. Bukan hanya soal hak yang bicara. Tetapi, mereka juga butuh makan.

Mengganggu ketertiban, tak bisa dituduhkan ke wajah petani. Sebab, selama puluhan tahun, merekalah yang diganggu ketertibannya. Pengalaman petani Cimacan, yang digusur proyek lapangan golf milik PT Bandung Asri Mulya (BAM), sangat gamblang menggambarkan hal ini. Tahun 1989 itu, petani Rarahan- Cimacan masih tentram, menikmati hasil sayur mayur dari tanah seluas 33 hektar. Tanpa kompromi, ketenangan itu dirusak oleh buldoser milik PT BAM. Sayur mayur yang hampir panen, diratakan dengan tanah. Petani menelan pil pahit. Keringat yang dikucurkan selama tiga bulan, lenyap bersama kesombongan deru buldoser.

Kemanakah para penguasa -pengayom ketertiban — ketika petani Cimacan yang mempertahankan tanahnya itu diuber-uber? Mereka berkolusi dengan PT BAM. Tak sedikit petani yang disiksa di kantor polisi karena kegigihan mereka mempertahankan tanah. Seorang penduduk Cimacan bercerita, lehernya sempat digantung dengan ikat pinggang, sambil dipaksa berdiri di atas kursi, setelah ia memimpin demonstrasi petani. Suasana waktu itu begitu mencekam, sehingga ketertiban yang dikesankan ada itu, lahirnya dari pemaksaan senjata.

Mereka yang mendirikan ketertiban dengan kekerasan, sesungguhnya tak punya hak untuk menilai ketertiban. Lebih-lebih, mereka tak layak menuding petani sebagai pengganggu ketertiban. Sebab para petani itu tak lain dari korban.

Dan, Indonesia yang kini menatap masa depan, di bawah bendera reformasi, semestinya mulai serius memikirkan bagaimana membangun ketertiban yang sesungguhnya. Ketertiban yang dibangun atas dasar kesamaan hukum, penghargaan atas hak-hak rakyat. Bukan ketertiban yang ditegakkan dengan ancaman, teror.

Kasus-kasus tanah itu bisa menjadi salah satu ukuran : Apakah kita akan belajar mulai menghargai hak masyarakat, terlebih yang kecil dan dipinggirkan, atau terus menerus berperilaku yang mengutamakan kekuasaan. Petani-petani di Cimacan, Rancamaya, Tapos, Cijayanti dan tempat-tempat lain, menunggu dengan harap penyelesaian kasus mereka. Mereka sama sekali tak berharap akan dituduh sebagai penjarah.

Selasa pekan ini, pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN), kabarnya akan meninjau serius masalah tanah, sekurangnya di Cimacan dan Malasari. Utusan petani kedua desa itu diundang, buat mencari penyelesaian konflik tanah mereka yang berlarut-larut. Inisiatif BPN itu, meskipun sangat terlambat, bolehlah disambut baik. Sekurangnya mereka mau membuka diri, untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tanah ini. Ganti rugi yang tak wajar di Cimacan, HGU perkebunan yang sudah habis di Malasari, adalah sekelumit data yang mestinya menguntungkan posisi petani.

Sayangnya, di lapangan, terutama aparat keamanan masih bekerja dengan pola pikir dan perilaku lama. Di Cimacan, misalnya, tanaman petani kembali dicabuti centeng-centeng PT BAM. Petani juga dipukuli, sama seperti tahun 1989. Bila kecenderungan ini tak dihentikan, bisa dipahami kalau orang menyamakan rezim transisi Habibie ini, sama saja dengan rezim sebelumnya. Bila rezim ini ingin dikenang sebagai rezim yang mengantar bangsa ini ke reformasi, mereka mestinya peka dengan tuntutan-tuntutan rakyat - seperti dalam kasus tanah itu, dan secara serius mengatasinya.

Ancaman, dan cap penjarah, seperti yang dilakukan Kapolri terhadap petani, agaknya tak menyumbangkan sesuatu untuk penyelesaian kasus ini. Karena nyatanya, petani memang bukan penjarah. Hak mereka yang telah lama dijarah.■

Bank Dunia Juga Korup

Laporan Bank Dunia sering tak akurat dan menutupi praktek korupsi keluarga Soeharto. Ternyata, lembaga ini juga tak bersih dari koruptor.

Awal bulan ini, 600 juta dolar AS bantuan untuk Indonesia telah diputuskan segera dicairkan. Pemberian bantuan di masa hiruk-pikuk Piala Dunia itu, tak terlalu banyak mendapat perhatian pers. Yang diketahui, dalam konferensi pers di Washington DC, jumlah uang tersebut adalah bagian dari komitmen bantuan Bank Dunia senilai 4,5 milyar dolar AS dalam kerangka IMF. Jika pemerintah Indonesia konsisten menaati persyaratan yang disepakati, 400 juta dolar AS lagi kembali akan dicairkan tahun ini.

Bank Dunia, boleh dibilang cukup cepat pulih kepercayaannya mencairkan pinjaman bagi Indonesia. Kendati stabilitas politik di dalam negeri, oleh para pengamat asing dianggap masih belum pulih benar. Apa yang menyebabkan Bank Dunia bersikap sangat baik hati?

Konon, Bank Dunia sedang berusaha "cuci dosa". Krisis yang melanda Indonesia selama setahun belakangan ini dianggap kesalahan Bank Dunia, yang selama tiga dekade telah meminjamkan lebih dari 25 milyar dolar AS ke Indonesia. Banyak program Bank Dunia, dinilai menyuburkan korupsi. Fundamen ekonomi Indonesia sebenar-nya tak pernah benar-benar kuat. Akibatnya, ketika dihantam badai krisis, tak ada dasar bangunan ekonomi yang menopang kejatuhan Indonesia. Barulah disadari bahwa yang ada hanyalah tumpukan utang.

Dennis de Tray, perwakilan Bank Dunia di Jakarta, sangat menyesali kenyataan ini. "Percayalah, saya telah menghabiskan malam demi malam memikirkan apa yang seharusnya kami lakukan untuk menghindari jutaan orang mengalami penderitaan," ujarnya seperti dikutip *The Wall Street Journal (WSJ)*. "Saya, mungkin, akan terus memikirkannya sampai akhir hidup saya..."

Banyak hal yang selama ini dilakukan Bank Dunia, patut disesali. Sejak tahun 1990-an, program-program bantuan Bank Dunia lebih banyak menguntungkan keluarga Soeharto, ketimbang negara - meskipun di pertengahan tahun 1970-an hingga 1980-an, bantuan Bank Dunia diakui telah membawa Indonesia melaju dengan infrastruktur listrik dan telekomunikasi.

Tahun 1992 misalnya, Bank Dunia menawarkan 307 juta dolar AS sebagai modal segar untuk menjamin sistem perbankan yang lebih sehat dan ketat. Namun, tak ada perbaikan berarti yang dilakukan. Daftar kredit macet terus bertambah. Anak-anak Soeharto serta konco-konconya masuk dalam daftar itu. Parahnya lagi, menurut sumber WSJ, setiap program bantuan yang bernilai lebih dari 100.000 dolar AS, selalu saja akan diincar oleh perusahaan yang ada hubungan dengan keluarga Soeharto.

Photo: Istimewa

■ **Palsu:** Bank Dunia tutup mata soal penggusuran

"Dosa" lainnya, adalah laporan tahunan kondisi perekonomian Indonesia. Laporan tersebut ternyata direkayasa dengan bunga-bunga kesuksesan. Seperti diungkap oleh Mari Pangestu yang pernah jadi konsultan Bank Dunia, "saya menulis laporan, yang ketika hasil publikasinya dikembalikan ke saya, amat sulit mengenalinya lagi." Untuk menunjukkan angka kemiskinan misalnya, Bank Dunia mau berkompromi dengan pemerintah Indonesia. Sehingga, angka kemiskinan yang masih sebesar 60 juta orang dilaporkan hanya 30 juta.

Celakanya, laporan itu menjadi acuan utama para investor menanamkan modalnya di Indonesia. Para analis pasar modal asing pun menggunakan penilaian Bank Dunia itu untuk menasehati kliennya. Sehingga, milyaran dolar AS bisa "terjebak" masuk ke Indonesia.

Pinjaman Bank Dunia yang masuk ke Indonesia, malah menjadi kecil artinya dibandingkan dengan modal asing yang masuk langsung ke sektor swasta. Ini tentu saja membuat pemerintahan Soeharto menjadi besar kepala dan makin serakah. Setiap kritik dari para ekonom kritis yang melihat kerapuhan fundamen ekonomi Indonesia, dijawab dengan laporan dari Bank Dunia.

Mengapa Bank Dunia mau *"kong-kalikong"* dengan pemerintah Indonesia? Ada beberapa asumsi. Menurut Bruce Nussbaum, salah satu editor *Business Week*, hal itu tak terlepas dari sisa-sisa pengaruh perang dingin. Di masa itu, untuk mencegah blok timur memperluas pengaruhnya ke negara-negara lain, AS harus mau "berkorban" membantu negara yang satu blok dengannya. Pinjaman lunak dari Bank Dunia senantiasa diberikan pada Indonesia dan negara-negara lain yang sekubu. Apakah Indonesia menggunakannya secara bijaksana atau tidak, tak terlalu menjadi soal benar saat itu. Utang baru terus saja diberikan, sehingga angka pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu meningkat tiap tahunnya.

Barulah ketika, perang dingin usai, perlahan-lahan ketahuan negara mana yang benar-benar mengelola ekonominya dengan baik. Negara seperti Jepang, dengan cerdik memanfaatkan proteksi bekas musuhnya itu untuk memperkuat struktur ekonominya. Tapi, tidak dengan Indonesia.

Dengan lenyapnya Uni Sovyet, tak ada lagi keharusan bagi AS untuk terus menopang Indonesia. Kekuatan pasar menjadi sangat menentukan - terbukti dengan krisis ekonomi Indonesia yang dimulai lewat serangan terhadap rupiah dari pasar uang.

Asumsi lain: sebenarnya telah terjadi praktek korupsi di Bank Dunia. Senator Mitch McConnell asal Partai Republik mensinyalir hal ini. Ia menuduh telah terjadi korupsi sistematis di Bank Dunia. Sinyalemen ini tidak main-main, sebab segera diikuti dengan pemeriksaan formal terhadap para mantan pejabat Bank Dunia. Sementara dua pegawai asal Jepang kini sedang diperiksa dengan tuduhan penggelapan.

Kalau nanti ternyata korupsi itu menyangkut juga bantuan Bank Dunia pada Indonesia, tentu akan makin ramai ceritanya. Bisa jadi salah satu aib terbesar abad ini. Tunggu sajalah. ■

Di Balik Aksi Diam Ginanjar

Meskipun membantu mempercepat pencairan dana Bank Dunia, Ginandjar diberitakan akan dicopot. Ia tak setuju program pemborosan Adi Sasono

Tak banyak yang mempublikasikan kegiatannya sekarang. Padahal, Ginandjar Kartasasmita, masih memegang posisi penting dalam kabinet pemerintahan BJ Habibie, sebagai Menteri Koordinator Keuangan dan Industri (Menko Ekuin). Terakhir diketahui, Ginandjar menulis surat pada presiden Bank Dunia James Wolfensohn tanggal 24 Juni lalu, meminta agar lembaga tersebut terus memberi bantuannya pada Indonesia.

Ginandjar tidak menyinggung-nyinggung tentang persoalan politik dalam suratnya itu. Ia hanya katakan, "bahwa tanpa bantuan keuangan dari lembaga keuangan internasional dan donor bilateral, kami tahu mustahil untuk menutupi pengeluaran publik untuk kegiatan penyelamatan sosial." Seminggu kemudian, Bank Dunia menyetujui pencairan bantuan 600 juta dolar AS dalam kerangka IMF. Itu saja.

Bagaimana sikap politiknya sekarang, tidak ada yang bisa memastikan. Ketika Golkar diramaikan dengan berita munas - yang oleh banyak pengamat dinilai sebagai ajang konsolidasi Habibie —, Ginandjar juga tidak terdengar suaranya. Tak jelas benar, apakah ia sebenarnya "orang dalam" yang sudah dipinggirkan, atau ia sendiri sebetulnya sudah apatis.

Ketika baru diangkat sebagai menteri dalam jajaran pemerintahan Habibie, Ginandjar sempat mengatakan bahwa kabinet ini bersifat sementara. Namun, hingga kini, ia tak pernah lagi mengulangi pernyataannya itu.

Dalam persoalan ekonomi pun, suara Ginandjar tak terdengar lagi. Justru kiprah orang-orang dekat Habibie yang lebih sering terdengar. Seperti Adi Sasono, Rahardi Ramelan dan BJ Habibie sendiri. Malah, Habibie yang dianggap "kartu mati" oleh para investor asing, sudah menyatakan keinginannya untuk melakukan pendekatan sendiri pada presiden Bill Clinton di Washington, untuk membicarakan masalah krisis ekonomi di Indonesia.

Apakah ia mendukung langkah-langkah kelompok Habibie, ini juga tak jelas. Kelihatannya, dengan adanya surat yang dikirimkan Ginandjar pada presiden Bank Dunia, seolah-olah ia mendukung langkah pemerintahan Habibie. Namun, bila melihat isi surat itu, tak juga bisa langsung disimpulkan demikian. Sebab, yang diminta Ginandjar pada Wolfenson adalah agar Bank Dunia membantu "pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan bahan makanan untuk orang miskin serta lapangan pekerjaan." Jadi, bukan dalam rangka meminta Bank Dunia mempercayai kemampuan Habibie menyelesaikan persoalan ekonomi. Bila ditanyakan pada kelompok-kelompok prodemokrasi yang tak menyenangi Habibie, mereka juga pasti setuju bila Indonesia amat membutuhkan bantuan yang bersifat kemanusiaan.

Mengapa Ginandjar tak mau banyak berkiprah, memang terasa aneh. Sebab, ia *toh* termasuk tokoh penting yang dianggap berperan dalam *lengser*-nya Soeharto. Setidaknya, itu menurut investigasi beberapa wartawan asing. Kabarnya, bersama Akbar Tanjung, tanggal 20 Mei malam lalu, Ginandjar memimpin 14 menteri yang menyatakan mundur dari kabinet Soeharto. Tindakan yang membuat Soehato ketika itu, merasa ia sudah tak mendapat dukungan lagi dan memicunya mengambil keputusan untuk mundur dari kursi kepresidenan.

Ada yang mengait-ngaitkan diamnya Ginandjar dengan kekhawatirannya, kalau praktek KKN-nya ikut terbongkar. Ada pula yang menganggap, Ginandjar bersikap demikian karena ia merasa selama Habibie masih berkuasa, tak ada yang bisa dilakukan dengan perekonomian Indonesia. Artinya, harus ada pergantian kekuasaan terlebih dahulu.

Pendapat terakhir menyatakan, telah terjadi pertikaian Habibie dengan Ginandjar. Kabarnya, Habibie menuduh Ginandjar berusaha menghentikan pencairan bantuan dari lembaga dan negara donor, selama Habibie masih berkuasa. Selain itu, juga terjadi pertentangan keras antara Ginandjar dan Adi Sasono. Keinginan Adi memperoleh dana untuk menghidupkan koperasi dan pengusaha kecil, ditentang Ginandjar dengan alasan program itu hanya akan memacu inflasi. Di samping, dinilainya sebagai upaya untuk memperkokoh kekuasaan pemerintahan Habibie.

Karena itulah, sekarang muncul isu bahwa Ginandjar akan dicopot dari jabatannya oleh Habibie atau mundur seperti rencananya dulu. Apakah Ginandjar masih akan tetap diam? ■

Skandal Tetirahan Soeharto

Ia membangun rumah mewah seharga Rp 26,6 milyar. Biaya itu akan diganti pemerintah, padahal rakyat sedang susah beli makan.

Mantan Presiden Soeharto benar-benar *lengser keprabon*. Ia mundur dari *prabuan*-nya dan menuju *tetirahan* layaknya raja-raja jaman dulu. Itulah yang terkesan dari rencana Soeharto untuk pindah dari kediamannya di Jalan Cendana Jakarta Pusat rumah peristirahatannya di Jati Ayu, kawasan Taman Mini Indonesia Indah.

Rumah peristirahatan yang mengambil gaya arsitektur kuno Jawa dan Bali itu sungguh sangat mewah. Suasananya asri dan tenang, dengan seluruh halamannya dihampari rumput berkualitas tinggi. Temboknya yang dibangun kokoh semakin menguatkan kesan keagungan sang penghuni rumah itu.

Tapi, Soeharto bukanlah raja. Ia adalah mantan diktator yang berkuasa lebih dari 30 tahun di sebuah negara republik - bukan sebuah kerajaan. Lagi pula, *lengser*-nya Soeharto bukan disebabkan karena keinginannya sendiri untuk mengundurkan diri. Melainkan karena tuntutan reformasi, terutama dari mahasiswa, yang tak lagi menghendakinya berkuasa. Karena itu proses perpindahannya menuju rumah peristirahatannya justru mendapat reaksi negatif dari masyarakat.

Betapa tidak, menurut taksiran pemerintah, harga rumah itu teramat mahalnya — mencapai Rp26,6 milyar rupiah. Di tengah-tengah situasi masyarakat yang harus dengan susah payah membeli bahan pangan, nilai demikian tinggi tentunya bisa menimbulkan rasa sakit hati.

Adalah Mensesneg Akbar Tanjung yang sebetulnya memicu terkuaknya persoalan ini. Niatnya untuk memberi penghargaan pada Soeharto "atas jasa-jasanya mengabdi kepada negara selama 32 tahun" malah menjadi masalah yang kontroversial. Hal ini, sebenarnya, ia dasarkan pada ketentuan UU No.7 Tahun 1978 tentang pemberian hak keuangan dan administratif bagi presiden dan wapres, maupun mantan presiden dan mantan wapres. Fasilitas itu menurut Tanjung, antara lain, pemberian rumah yang tepat dan layak lengkap dengan fasilitasnya yang memadai.

Ternyata, Soeharto sudah lebih dulu

membangun rumah peristirahatannya. Karena itu, Akbar Tanjung berniat memberikan uang pengganti bagi pembangunan rumah itu. Di sinilah soalnya, setelah dihitung-hitung oleh tim bentukan Setneg, bangunan yang bernama Puri Jati Ayu dengan luas mencapai 3.000 meter persegi itu, biaya konstruksinya saja mencapai Rp15 miliar. Ditambah dengan pembuatan pagar, AC dan lain-lain, Rp1 milyar. Sedangkan total lahannya, ditaksir bernilai lebih dari 10 milyar. Jadi, keseluruhannya mencapai Rp26,6 milyar.

Karena rumahnya sudah jadi, maka uang sebanyak itu pun harus diberikan pada Soeharto. Inilah yang kemudian mengundang protes masyarakat. Menanggapi kritikan terhadap rencana pemberian rumah itu, Akbar Tanjung mengacu pada pemberian pada mantan Wapres Umar Wirahadikusumah. Menurutnya, kepada Umar justru diberi nilai taksiran yang lebih besar, Rp35 milyar. "Ini juga menjadi salah satu referensi," ujar Akbar meredakan kritik.

Namun, penjelasan itu tetap saja menimbulkan ketidakpuasan. Sebab, kendati nilai rumah Umar Wirahadikusumah lebih tinggi, tidak berarti Soeharto harus mendapatkan Rp26,6 milyar itu. Dalam situasi krisis begini, logikanya adalah, lebih baik tidak memberikan apa-apa pada kedua mantan presiden dan wapres itu, daripada melakukan pemborosan.

Selain itu, berbeda dengan Umar, Soeharto masih berada dalam sorotan masyarakat. Terutama, karena banyaknya tuduhan yang dilancarkan padanya sehubungan dengan penggunaan harta hasil Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dikhawatirkan, rumah peristirahatan Jati Ayu itu juga dibangun dengan menggunakan uang hasil KKN. Jika itu dapat dibuktikan, Soeharto bukan saja tak layak mendapatkan uang penggantian. Rumah itu justru mesti disita untuk negara.

Soeharto tampaknya menyadari keadaan ini. Makanya, ia mengusulkan agar pemberian uang ganti rumah itu ditunda sampai pada waktu yang tepat. Ketika "masyarakat merasa pemberian tersebut dianggap wajar," ujar Soeharto. Ia juga berjanji, akan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan rakyat, bila telah menerimanya. Soal apakah masyarakat akan merasa pemberian tersebut sebagai sesuatu yang wajar, itu perkara lain.

Peristiwa ini, setidaknya memberi gambaran tentang kualitas pemerintahan sekarang: tak tahu mana hal prioritas yang harus lebih dulu dilaksanakan. Di saat rakyat sangat membutuhkan bahan pangan, pemerintah justru melakukan pemborosan. Dan akibat tak langsungnya, Soeharto harus menunda ketenangannya beristirahat.■

Teror Negara Sulut Kerusuhan

Oleh: Ariel Heryanto

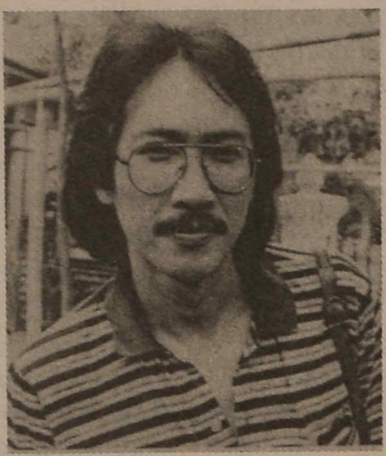

Kerusuhan Mei lalu di Jakarta dan beberapa kota lain lebih tepat dideskripsi sebagai teror rasial oleh negara daripada kerusuhan rasial yang didorong oleh kemarahan massa. Kegagalan untuk membedakan fenomena tersebut mengindikasikan suatu penyakit liputan media. Hal ini merajalela terlebih dalam liputan media asing, yang mengabaikan simpati terhadap korban dan masa depan Indonesia. Tak hanya makin meruncingkan kebencian rasial, liputan media itu secara tak langsung justru menyelamatkan penjahat yang sesungguhnya.

Teror negara adalah serangkaian kampanye yang disponsori negara untuk menciptakan ketakutan yang dalam dan meluas di masyarakat, di mana paling tidak ada tiga unsur. Pertama, ketakutan yang muncul karena kekejian aparat negara atau kaki-tangannya. Kedua, kekerasan terhadap individu atau kelompok minoritas oleh mereka yang menganggap dirinya mewakili kelompok mayoritas. Ketiga, kekerasan ditunjukkan sebagai tontonan publik, sehingga pejagalan korban tampak begitu mencekam. Tujuan teror negara adalah untuk mengembangkan ketakutan yang lebih besar bahwa kejadian yang sama dapat saja berulang setiap saat.

Kini kita jadi sulit melacak siapa sejatinya yang bertanggung-jawab terhadap kerusuhan Mei. Padahal, laporan dari tim investigasi independen dan kesaksian terbuka dari korban penculikan sebetulnya cukup menunjukkan karakter teror negara seperti disebut di atas.

Banyak saksi melihat pemicu kerusuhan berciri badan kekar, rambut cepak dan memakai sepatu lars. Beberapa korban pemerkosaan menyatakan bahwa ada seragam militer di mobil saat kerusuhan terjadi. Sedangkan testimoni (kesaksian terbuka) korban penculikan lebih jelas lagi menunjukkan kesimpulan yang sulit dibantah bahwa militer ada di balik penculikan.

Siapapun yang mengenal Indonesia sadar betul bahwa tidak ada kelompok sosial di luar kekuatan negara yang mampu untuk menggelar kerusuhan secara dahsyat dan efektif seperti terjadi di Jakarta dan Surakarta beberapa waktu lalu.

Tak ada kelompok ras atau etnik di Indonesia yang, betapapun kencangnya melakukan agitasi, dapat mengobarkan kekerasan sistematik dengan 1.198 orang tewas (27 di antaranya ditembak), 150 wanita diperkosa, 40 supermarket dan 4.000 toko dibakar, dan ribuan motor, mobil, dan rumah dilalap api di 27 area ibukota hanya dalam tempo 50 jam. Semua itu terjadi tanpa ada perlawanan dari petugas keamanan. Kekerasan jelas terlalu sempurna untuk menghilangkan kesangsian tentang potensi jatuhnya korban. Untuk memperoleh perspektif yang lebih baik, barangkali point berikut bisa membantu. Pertama, tidak ada kelompok sipil yang punya pengalaman untuk terlibat dalam kekerasan, sementara ABRI begitu terlatih di Irian Jaya, Aceh, dan Timor-Timur.

Kedua, kekerasan pada Peristiwa Mei bukannya yang pertama kali terjadi di Jawa. Ada serangkaian kejadian yang mengikuti satu pola. Sasarannya adalah etnis Cina. Tak ada yang terjadi secara lokal spontan, penuh kemarahan dan amat massif yang dilakukan oleh kelompok etnis lain.

Tahun 1983, ribuan gali atau residivis di Jawa dibunuh secara sistematik di depan keluarganya dan mayatnya dibuang di tempat-tempat umum (sekolah, toko, atau biaoskop).

Kualitas teror negara kelihatan canggih di berbagai peristiwa. Penduduk setempat sadar apa yang sesungguhnya terjadi. Tetapi, apa yang muncul di media domestik dan khususnya media asing mengkhianati fenomena ini. Seluruh laporan berita, investigasi pers, wawancara dan kolom opini hanya memfokuskan pada isu rasial. Sejarah imigran Cina, hubungannya dengan penduduk lokal, dan kendali mereka yang tidak proporsional terhadap ekonomi sudah berulang-kali didiskusikan.

Liputan media dominan memberitakan bahwa yang melakukan kerusuhan adalah etnis pribumi, lantaran kesenjangan ekonomi dan kebencian pada etnis Cina.

Pernyataan ini kadang muncul dengan kutukan, kadang dengan pembelaan. Pemberitaan usang melukiskan etnis Cina

sebagai korban yang tak bersalah. Ujung-ujungnya ditarik ke problema bahwa keturunan Cina yang jumlahnya hanya 3% dari penduduk tapi mengendalikan 70% ekonomi nasional.

Menyalahkan massa bukan hanya tidak adil, tetapi juga membantu teror negara yang melindungi para pemicu kerusuhan. Wartawan bebas mengembangkan imajinasi, sebab tersangka tak punya akses untuk membalas si penyangka, khususnya media asing. Mereka yang membela kaum pribumi akan kalah dengan sendirinya.Tindakan membela pribumi dengan merasionalkan aksi penjarahan, pembakaran atau pemerkosaan berarti menerima tuduhan bahwa kaum pribumilah yang melakukan tindak kriminal.

Di sisi lain, perdebatan tersebut juga mengaburkan pokok sebabnya. Dengan meletakkan kerusuhan dalam kerangka persoalan rasial, justru akan memperdalam tendensi rasial di masyarakat dan menciptakan imajinasi masyarakat ke bermacam prasangka. Penekanan ini memprovokasi kebencian rasial. Inilah yang membebaskan aparat negara dari gugata yang kritis dan kejaran hukum. Tidak ada geng pemerkosa yang hebat bisa terus melanjutkan kerjanya sampai dua bulan pasca Mei tanpa tertangkap.

Dikusutkan dalam suatu kerangka rasial, beberapa komentator membuat perbandingan situasi Indonesia dengan Malaysia tahun 1969 atau kerusuhan di Los Angeles tahun 1992. Upaya perbandingan memang bisa digunakan, tapi untuk menjadi alasan dalam kasus ini, akan tampak perdaan yang mencolok. Konflik di Malaysia dan Los Angeles melibatkan segmen-segmen dalam masyarakat sipil, masing-masing mengidentifikasikan dalam cap etnik. Hal itu yang membedakan mereka dengan kasus Indonesia.

Di Indonesia, agen provokator kerusuhan tidak punya identitas etnik. Mereka tidak muncul sebagai etnis tertentu dalam masyarakat. Mereka menyerang lebih dari satu etnik, walaupun keturunan Cina menjadi target utama. Kekerasan semacam ini lebih tepat disebut rasialisasi daripada rasis. Mereka mengadopsi warna-warna rasial, tapi motif sebenarnya bukanlah murni rasial. Pribumi pun tak lepas dari kekerasan ini. Beberapa pribumi mengambil resiko ketika menyelamatkan individu-individu keturunan Cina yang tidak dikenalnya saat kerusuhan. Kutukan publik dan kampanye bantuan untuk korban juga dilontarkan aktivis-aktivis pribumi. Lalu sebagaimana berulangkali disiarkan ke publik, pernyataan negara muncul terlambat dengan segala keterangannya mengenai adanya geng pemerkosa.

Semua yang dikemukakan di atas tidak berarti menyangkal adanya problem rasial di Indonesia, khususnya problem antara minoritas Cina dengan yang menyebut dirinya mayoritas pribumi. Apa yang saya argumentasikan adalah bahwa problem-problem rasial tersebut bukanlah penyebab kerusuhan-kerusuhan yang terjadi selama ini, termasuk yang disebut kerusuhan-kerusuhan anti-cina yang terjadi beberapa dekade lalu. Rasisme harus dipisahkan secara jelas dengan rasialisasi yang efektif, dengan teror kelelakian, militer dan negara, yang selama ini banyak diabaikan oleh para analis.

Sebagaimana di negara-negara lain, rasisme di Indonesia marak dalam pembicaraan di rumah, lelucon, gosip atau perselisihan pribadi. Sentimen ras meresap dalam penjelasan meletusnya terorisme pertengahan Mei lalu. Bagaimanapun, kerusuhan itu tidak disebabkan karena pembakaran, pemerkosaan, atau pemerkosaan oleh massa. Sederhana, karena massa tidak punya kapasitas untuk itu. Rasisme sipil telah dipengaruhi dan diperdalam oleh teror negara patriarkhi dan rasialisasi liputan media.

■ Ariel Heryanto aktif di media feminis, Jurnal Perempuan. Artikel ini diterjemahkan dari *The Jakarta Post* 15 Juli 1998

NALAR POLRI TUMPUL

Barisan Nasional yang dimotori Letjen (Purn.) Kemal Idris, menyesalkan sikap Polri yang melarang Megawati merayakan "peristiwa 27 juli." Dalam tiga butir pernyataannya, Barisan Nasional menyebutkan, sikap Polri mencerminkan ketumpulan penalarannya. Polri dikatakan, secara sistematis sedang dijauhkan dari tugas-tugas pokoknya untuk menjadi ujung tombak represi militer. "Rekayasa pengadilan palsu terhadap tertuduh anggota Polri sebagai penembak mahasiswa Trisakti belum menciptakan cukup kesadaran bahwa Polri dimaksudkan oleh militer sebagai kambing hitam militerisme," tulis pernyataan itu.

PARTAI BARU LAGI

Partai Bulan Bintang akan segera deklarasikan pendiriannya. Pembentukan partai ini ditukangi oleh Ahmad Soemargono, Yusril Ihza Mahendra dan Abdul Qadir Djaelani. Oleh para pendirinya, partai ini diharapkan akan menjadi saluran aspirasi politik mereka yang selama ini berada di bawah naungan KISDI dan Dewah Dakwah.

DOA PEREMPUAN

Sejumlah rohaniwan perempuan dari berbagai agama dan kepercayaan, Kamis (23/7) lalu mengadakan doa bersama di Aula Nyi Ageng Serang, di Kuningan, Jakarta Pusat. Mereka berdoa bagi para arwah korban perkosaan tanggal 14-15 Mei lalu. Acara ini dihadiri juga oleh para tokoh perempuan antara lain Debra Yatim, Zoemrotin, Ratih Sanggarwati, Julia Suryakusuma dan Yeni Rosa Damayanti. Penutupannya berupa pementasan monolog "Marsinah Menggugat" oleh Ratna Sarumpaet.

KAPAN AGUS BEBAS?

Sejumlah tahanan dan narapidana politik kembali mendapatkan amnesti dan abolisi. Mereka antara lain adalah Ahmad Taufik dan Eko Maryadi dari Aliansi Jurnalis Independen, Asep Ilyas dan Mimih Chairuman yang tersangkut kasus kerusuhan Tasikmalaya, serta Aberson Marle Sihaloho dari PDI Perjuangan. Dari sejumlah nama itu, Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Aberson, selama ini sudah menikmati udara bebas. Satu nama lagi yang dikaitkan dengan kerusuhan Tasikmalaya, Agustiana dari Aliansi Demokrasi Rakyat, tidak masuk dalam daftar amnesti dan abolisi itu. ■

Seruan Kopham !

Haji Dodo, petani Cijayanti dirawat di Rumah Sakit PMI Bogor sejak Senin 20 Juli. Tangan kiri H Dodo yang dibacok oleh Satpam PT LI pada tahun 1993, akan diamputasi Rabu 27 Juli 1998. Kami meminta dukungan Anda sekalian, agar proses itu berjalan selamat. Bagi yang ingin membantu meringankan biaya perawatan ini, bisa mengirim ke rekening:

Atas nama Herly Moenara
BNI 46 Cab. Bogor
No rek : 061 - 000 - 180753911

(maaf kepada segenap simpatisan yang terlanjur mengirim tetapi gagal karena kesalahan nama pemilik rekening)

Komite Pembela Hak Asasi Manusia (Kopham)

Cukupkah Dengan DKM?

Sebelas perwira Kopassus diseret ke pengadilan pekan ini. Tangan Jenderal Subagyo dipinjam untuk menghukum Prabowo. Soeharto tetap tak tersentuh.

Drama penculikan aktivis, pekan ini akan memasuki "babak terbalik". Para penculik — mereka yang pernah begitu berkuasa dan sewenang wenang — kini mulai diperiksa dan 11 diantaranya segera diseret ke pengadilan. Para jenderal-jenderal perancang penculikan itu, akan dihadapkan pada Dewan Kehormatan Militer (DKM). Sementara itu, di jajaran korban, disamping 12 korban penculikan yang hingga kini nasibnya tetap gelap, mereka yang bebas dari penculikan, penyiksaan dan intimidasi, mulai menikmati hari-hari bebas . Pius pulang dari Belanda. Andi Arief berkumpul lagi dengan keluarganya.

"Akhir Juli, 10 tersangka akan diajukan ke Pengadilan Militer," kata Mayjen Sjamsu Djalal, Komandan Puspom ABRI, yang juga Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Mabes ABRI untuk kasus orang hilang. TPF telah menyita beberapa barang bukti antara lain : dua mobil dan penutup mata yang digunakan dalam penculikan. TPF juga telah memeriksa bekas sel, tempat aktivis disekap, yang ternyata berada di Markas Komando Kopassus Cijantung.

Mereka yang diseret ke pengadilan militer itu, berpangkat paling tinggi Kolonel. Agaknya, Kolonel Chairawan, Komandan Grup IV Kopassus, adalah perwira tertinggi yang akan dipenjara karena penculikan ini. Ia sudah diperiksa TPF ABRI, dan juga dicopot dari kedudukannya sebagai Komandan Grup. Chairawan sendiri tak banyak berkomentar. Kepada sebuah media, ia mengatakan, "barangkali ini memang nasib menjadi seorang Kopassus." Maksudnya, ia hanya melaksanakan perintah, dan diam tanpa hak menjawab.

Bagaimana dengan Prabowo, Komandan Jenderal Kopassus yang mengotaki penculikan itu? Berbeda dengan perwira kolonel ke bawah, yang mulai dicopoti dan terpaksa bermalam di Markas PM, Prabowo masih bisa leluasa ke sana kemari. Pekan lalu, misalnya, ia masih sempat menghadiri ulang tahun sahabatnya. Posisinya sebagai Komandan Sesko ABRI di Bandung juga belum tersentuh. Tampaknya, Prabowo, menantu bekas Presiden Soeharto ini, tak akan diseret ke pengadilan. Meskipun tuntutan untuk itu, sangat nyaring terdengar di masyarakat. Poster Prabowo, dengan tulisan "Wanted" (Dicari-red) di bawahnya, diarak di Bandara Cengkareng, ketika Aldera menyambut kepulangan Pius, Minggu pekan lalu.

Prabowo, dan juga seorang jenderal lain, yang diduga terlibat penculikan, hanya akan diadili oleh sebuah Dewan Kehormatan Militer (DKM). Dewan itu akan dipimpin KSAD Jenderal Subagyo. Seluruhnya beranggotakan tujuh jenderal, termasuk Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Agum Gumelar, Lejen Fachrur Razi. "DKM harus dipimpin seorang yang setingkat lebih tinggi pangkatnya," kata Fachrur. Maka, dengan DKM yang diketuai Subagyo (bintang empat), Prabowo (bintang tiga) dapat dipastikan akan berhadapan dengan dewan kehormatan ini.

Sayangnya, DKM bukanlah lembaga yudikatif yang bisa memberi sanksi setimpal untuk tindakan pidana seperti penculikan. Berdasarkan pengalaman, ketika DKM dibentuk karena Insiden Santa Cruz, perwira yang diadili hanya dikenai sanksi administratif. Atau maksimal penghentian karir. Sintong Panjaitan, yang ketika itu diperiksa DKM pimpinan Feisal Tanjung, akhirnya memang dibebas tugaskan dari militer. Tapi, ia kemudian malah ditampung Habibie, dan sekarang menjabat Sesdalopbang. Bila DKM Feisal itu jadi preseden, dapat diduga Prabowo dan Syafrie hanya akan dimatikan karir militer mereka. Tetapi, tidak kena sanksi pidana.

"DKM tidak akan tuntas menyelesaikan kasus orang hilang, karena mereka tidak bekerja terbuka" kata Munir, Koordinator Kontras. Ia berpendapat, perencana penculikan itu mestinya diadili terbuka, seperti para pelaku lainnya.

Feisal Tanjung, yang kini menjabat Menko Polkam, menyatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui tentang penculikan yang dilakukan Kopassus; apalagi memberi perintah. "Kopassus itu kan pasukan khusus. Jadi bisa saja ada hal-hal yang tidak diketahui Pangab," katanya. Ia membantah analisa yang mengatakan bahwa dirinya, yang ketika itu menjabat Pangab, ikut mengetahui dan memerintahkan operasi penculikan aktivis.

Yang menarik dari DKM ini adalah posisi ketua, yang diduduki Subagyo. Jenderal ini dikenal dekat dengan Prabowo, dan juga seorang ajudan bekas Presiden Soeharto yang amat setia. Tampaknya, Wiranto, sengaja meminjam tangan Subagyo untuk menjatuhkan hukuman kepada Prabowo - saingan beratnya di tentara. Bila ini terjadi, maka makin porak-porandalah kubu Prabowo.

Nah, yang tetap tak tersentuh di akhir drama ini, agaknya adalah bekas Presiden Soeharto. Dapat diduga, perintah penculikan itu datang dari Soeharto sendiri; mengingat keteguhan tekadnya untuk terpilih kembali dalam SU MPR Maret lalu. Kedekatan Prabowo dengan mertuanya itu, pada saatnya memang menjadi jalur khusus yang menyebabkan hirarki di ABRI kacau. Misi khusus yang diemban Prabowo dari Soeharto, bisa jadi memang tak diketahui pejabat militer lain. Soalnya, kenapa Soeharto tak diperiksa?■

Photo: istimewa

■ **Dimana:** Belasan aktivis belum pulang. Keluarga desak agar mereka dikembalikan.

Syarwan-Feisal Jegal Mega

Syarwan Hamid dan Feisal Tanjung tak setuju Megawati peringati Peristiwa 27 Juli. Mengapa kedua jenderal itu masih berkuasa?

Acara Megawati, lagi-lagi memperoleh ganjalan. Kapolri, Letjen Roesmanhadi tak memberi izin peringatan Peristiwa 27 Juli di Istora Senayan. Padahal Kapolda Metro Jaya, Mayjen (Pol) Noegroho Djajoesman, sudah memberi izin ketika bertemu Sekretaris Jendral PDI, Alex Litaay.

Perubahan sikap polisi ini aneh. Sumber *Xpos* mengatakan, polisi ditekan oleh Menko Polkam, Jendral (Purn) Feisal Tanjung.

Menanggapi larangan itu, Megawati mengatakan menurut aturan, acara-acara yang diselenggarakan partai politik tak perlu izin, namun hanya sekedar pemberitahuan. Ia tak akan surut langkah.

Mendagri, Letjen (Purn) Syarwan Hamid juga tak menyetujui peringatan ini. Alasannya, bisa menimbulkan gejolak di masyarakat.

Syarwan jelas tak setuju. Soalnya, bersama-sama Jendral (Purn) Feisal Tanjung dan tentu saja Jendral (Purn) Soeharto, terlibat dalam Peristiwa 27 Juli. Bahkan ketiga jendral itu adalah arsitek peristiwa yang menelan korban jiwa dan harta benda itu.

Keterlibatan Syarwan dan Fesial terutama ketika para preman bayaran dan tentara yang menyamar sebagai pendukung PDI Soerjadi menyerbu Kantor DPP PDI, di Jl Diponegoro, Jakarta.

Kendati sudah dua tahun lalu, namun orang masih ingat puluhan pendukung Megawati hilang tanpa bekas, puluhan lainnya luka-luka dan seratus lebih diadili. Dampak penyerbuan itu menyebabkan kerusuhan di sekitar Salemba hingga dua orang tewas tertembak petugas dan sejumlah orang lainnya tewas terjatuh dari gedung dan terbakar.

Peristiwa 27 Juli memang puncak dari keinginan Soeharto menggusur Megawati dari PDI. Operator penggusuran Megawati waktu itu adalah Letjen Syarwan Hamid, Kasosspol ABRI kala itu. Syarwan memang bertindak cepat.

Ia memerintahkan semua jajaran ABRI, dari Kodam hingga Kodim untuk menekan semua pengurus PDI untuk mendukung kongres luar biasa untuk mengganti Megawati.

Memang, tak semua pengurus daerah dan cabang mau ditekan ABRI. Banyak Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang menyatakan kesetiaannya kepada Megawati. Namun karena tekanan yang dilakukan ABRI makin kuat, para pengurus daerah dan cabang goyah dan menyerah.

Di Jakarta, Syarwan Hamid bergerilya mendekati kalangan oportunis di kepengurusan DPP Megawati. Bertemulah ia dengan Soerjadi, Fatimah Achmad dan Ismunandar yang setuju bekerjasam dengan ABRI menggulingkan Megawati. Ismunandar adalah kader PDI binaan Kodam Jaya dan Fatimah Achmad adalah aktivis PDI yang sejak lama dekat dengan ABRI.

Soerjadi sendiri adalah pentolan PDI yang dihidupi oleh Kelompok Kodel, konglomerat pribumi yang sangat pro Soeharto kala itu. Jadi, gampang saja Syarwan untuk membujuk ketiga orang itu.

Kebetulan Fatimah dan Ismunandar menduduki ketua DPP. Tak susah pula bagi kedua orang itu untuk merekrut pengurus lain yang sama oportunisnya denga n mereka di jajaran DPP. Maka terkumpulah 15 pengurus DPP yang pro Syarwan.

Syarwan tak berhenti sampai di situ, Alex Litaay, Sekretaris Jendral DPP PDI, yang pernah diculik orang-orang Jendral Hartono yang kala itu KSAD, dibujuknya untuk ikut menggulingkan Megawati bersama Soeryadi. Tapi ditolak Alex.

Kongres luar biasa itu akhirnya berlangsung, Syarwan, mendampingi Pangab Feisal Tanjung datang ke Asrama Haji, Medan, tempat kongres PDI Soerjadi berlangsung, Juni 1996. Tanpa banyak *cingcong*, Soerjadi terpilih dalam kongres yang didanai seluruhnya oleh pemerintah Soeharto.

Entah bagaimana, Syarwan belakangan muncul sebagai salah satu tokoh reformasi yang ikut menggulingkan Soeharto. Sebagai Wakil Ketua MPR/DPR ia dikabarkan paling aktif mendesak Ketua DPR/MPR, Harmoko dan ketua-ketua lainnya membuat pernyataan agar Soeharto mundur. Karena itulah, Habibie menunjuknya jadi Menteri Dalam Negeri. Tak hanya Syarwan, Feisal pun ditunjuk Habibie jadi Menko Polkam. Di posnya yang baru Syarwan tak lagi bersikap seperti ketika ia mendesak Harmoko agar membuat pernyataan melawan Soeharto.

Bersama-sama Feisal, ia menentang pembebasan Budiman Sudjatmiko dan kawan-kawan yang dulu ia fitnah terlibat dalam kerusuhan 27 Juli 1996.

Soal peringatan Peristiwa 27 Juli, Roy Janis, Ketua DPD PDI DKI Jakarta mengatakan kalau *toh* polisi tetap melarang acara itu, akan banyak kelompok masyarakat yang akan melakukannya. Di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X mengijinkan alus-alun Kraton dipakai untuk peringatan peristiwa berdarah itu. Ratusan ribu orang akan berkumpul di sana. Kabarnya Sultan sendiri yang akan memimpin acara itu. Nah, apakah Syarwan, Feisal dan Kapolri berani melarang Sultan? ■

Dialog Nasional: Satukan Kekuatan Demokratik

Ratna Sarumpaet siapkan Dialog Nasional, bentuk kekuatan tandingan melawan Habibie. Ajukan platform dan perangkat UU untuk Indonesia masa depan.

Peringatan kemerdekaan kini tak lagi jamannya dirayakan dengan lomba makan kerupuk, tapi justru dengan upaya untuk menjadi benar-benar merdeka. Memang mahal harganya untuk meraih kebebasan yang selama ini banyak ditekan di bawah Rejim Soeharto. Ratna Sarumpaet dengan SIAGA, masih lekat di ingatan saat SU MPR Maret lalu, ditangkapi karena menyelenggarakan Kongres Indonesia.

Kemerdekaan dan kebebasan yang diperjuangkan lewat Kongres Indonesia akan kembali dikibarkan dengan momentum 17 Agustusan. Namanya memang jadi lain, dulu Kongres Indonesia nantinya Dialog Nasional. "Kalau Kongres itu pengertiannya sangat formal, ada ketetapan dan semacamnya. Kalau Dialog itu lebih lentur dan longgar," ujar Tri Agus yang jadi moderator pertemuan pertama penyiapan dialog itu.

Rencananya, Dialog Nasional ini akan diselenggarakan tanggal 15 sampai 17 Agustus 1998. Penyelenggaraan selama tiga hari itu dibagi dua, pertama acara dialog itu sendiri dan yang kedua adalah Pesta Rakyat pas tanggal 17 Agustus 1998, kemungkinan bakal digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM) atau Tugu Proklamasi.

Terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut, berbagai organisasi pro demokrasi seperti PBHI, Forum Kebangsaan, Masyarakat Profesional untuk Demokrasi (MPD), Komite Pendukung Mega (KPM), Teater Satu Merah Panggung, Front Nasional, dll. Hadir juga individu-individu dari LIPI, IPKOS, PMKRI, dan Forum Kota. Legitimasi Dialog Nasional ini memang menjadi penentu bobot acara. Oleh sebab itu, jaringan yang dibangun untuk acara ini tidak hanya berkutat di ibukota tetapi juga menjangkau seluruh daerah Indonesia. Gus Dur dan Amien Rais secara lisan juga telah mendukung terselenggaranya acara ini. "Doakan saya sehat supaya bisa hadir," kata Gus Dur kepada panitia Dialog.

Menurut Ratna Sarumpaet yang menjadi koordinator penyelenggara, dialog ini akan mempertemukan berbagai unsur kekuatan pro demokrasi yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. "Bukannya mau melebur jadi satu, tetapi paling tidak ada suatu platform bersama gerakan pro demokrasi. Di antara sekian banyak agenda yang dikerjakan kawan-kawan, tentu ada satu agenda yang mempertemukan ," ujar Ratna yang dibebaskan sehari sebelum Soeharto turun tahta.

Pembahasan tentang agenda agaknya berlangsung alot. Nur Hikmah dari Komite Pendukung Mega (KPM) mengusulkan agar sebelum agenda apapun nantinya dibahas dalam Dialog Nasional, perlu adanya refleksi dan analisis terhadap situasi politik nasional. Sementara Yeni Rosa Damayanti mengusulkan agar Dialog Nasional menghasilkan suatu Counter Power (Kekuatan Tandingan) terhadap pemerintahan Habibie.

Selain itu, akan dibahas juga berbagai usulan tentang platform bersama untuk reformasi, dan penyiapan UU untuk Indonesia yang lebih demokratis di masa depan. UU yang mendapat banyak perhatian antara lain UU Pemilu, Partai Politik dan Kedudukan DPR/MPR. Banyak versi RUU itu yang beredar, tetapi tampaknya belum ada satu suara dari kaum pro reformasi, tentang berbagai soal itu.

Memang setelah lengsernya Soeharto, gerakan pro demokrasi seolah mengalami disorientasi karena kehilangan musuh bersama (Soeharto). Dan ketika angin reformasi tiba-tiba bertiup, partai-partai dan organisasi-organisasi banyak berdiri dengan agenda masing-masing. Kekuatan sipil pro demokrasi jadi seperti terpecah kecil-kecil. "Padahal Habibie sendiri saat ini konsolidasi, ABRI juga konsolidasi. Saatnya sekarang kekuatan sipil pro demokrasi menyatukan barisan dalam satu aliansi wahana," seru Budi, seorang profesional yang turut menyusun materi Dialog. Ya, memang sudah saatnya.■

Langkah Tuju Desentralisasi

DPRD I dihapus tahun 2001. Otonomi ditekankan pada Daerah Tingkat II. Bupati seyogyanya dipilih DPRD, bukan penunjukkan pusat.

Rupanya bukan hanya Timor Timur yang perlu berpikir otonomi. Seluruh daerah tingkat II, menurut rencana pemerintahan transisional Habibie, akan menikmati otonomi. Sekurang-kurangnya, kewenangan tiap daerah dalam memilih kepala daerah akan ditingkatkan. DPRD juga dipisahkan dari Pemerintah Daerah, agar bisa menjadi kekuatan kontrol terhadap pemerintahan daerah.

Otonomi akan diberikan kepada pemerintah tingkat dua," kata M Ryaas Rasyid, pakar ilmu pemerintahan yang juga arsitek pembaruan perangkat UU dalam tim Habibie. Dengan pilihan itu, propinsi tidak lagi menjadi sasaran otonomi. Bahkan, ditegaskan Rasyid, pemerintah tingkat I memang semata-mata kepanjangan tangan pusat.

Pemerintah pusat, nantinya hanya menjadi perencana, pengendali dan evaluator. Pemerintah Tingkat I menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah-daerah. Sementara Pemda Tingkat II akan mengurusi seluruh aspek pemerintahan kecuali hankam, pengadilan dan militer

"Propinsi tidak lagi memiliki otonomi, tapi sebagai agen pemerintah pusat," kata Rasyid. Sejalan dengan itu, DPRD tingkat I akan dibubarkan, karena memang tidak dibutuhkan lagi. Rencananya, pembubaran DPRD Tingkat I itu akan dilakukan tahun 2001.

Apa saja hak otonomi dari Pemda Tingkat II itu? Menurut Rasyid otonomi tidak didasarkan pada banyaknya urusan, melainkan besarnya kewenangan yang dimiliki. Kewenangan yang diperbesar itu antara lain, dalam hal: memilih kepala daerah, pemisahan status DPRD dari pemda. Kepala daerah, yang selama ini sangat bergantung pada putusan pemerintah pusat, untuk selanjutnya akan ditentukan DPRD setempat.

"Kepala daerah itu jabatan politis," kata Risyad. Karena itu, persyaratan untuk menjadi kepala daerah, seyogyanya tidak mengarah kepada birokratisasi politik.

Pemberian otonomi kepada Daerah Tingkat II itu, bisa dipandang sebagai langkah awal desentralisasi. Di bidang keuangan, misalnya, pemerintah pusat akan memberikan subsidi pembangunan daerah dalam bentuk block grant, bukan dengan daftar isian proyek yang sentralistis. Arus balik dari subsidi dana pusat itu dianggap sebagai pelanggaran.

Untuk menarik minat masyarakat bekerja di daerah tingkat II, kata Menteri Pengawasan Pembangunan Hartarto, pemerintah akan memberikan insentif. "Insentif itu bisa dalam bentuk apapun," katanya. Maksudnya bisa berbentuk insentif fiskal dan non fiskal. Pemda Tingkat II akan dilengkapi dengan infrastruktur yang mendukung investasi. Ia memberi contoh, Amerika Serikat, saat ini juga memberikan insentif kepada Nevada dan Alaska.

Hartarto memberi gambaran lebih jelas tentang otonomi yang digagas pemerintahan transisional Habibie itu. Menurut dia, pemerintah pusat, nantinya hanya menjadi perencana, pengendali dan evaluator. Pemerintah Tingkat I menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah-daerah. Sementara Pemda Tingkat II akan mengurusi seluruh aspek pemerintahan, kecuali hankam, pengadilan dan militer.

Ide tentang otonomi dalam bidang ekonomi, antara lain pernah diusulkan agar sebagian perolehan devisa dari ekspor komoditas daerah, langsung dikembalikan ke pemerintah daerah. Tidak semuanya disedot ke pusat, seperti yang selama ini terjadi. Pembagian devisa itu, sebetulnya pernah diatur di masa pemerintahan Soekarno; yakni 30 persen hasil ekspor, langsung dikembalikan ke daerah. Tetapi, di masa rezim Soeharto, hasil ekspor kehutanan dan pertambangan, seluruhnya menumpuk di Jakarta, sehingga menimbulkan kecemburuan penduduk daerah.

"Kecemburuan karena pembagian hasil pembangunan yang tidak adil itu, sesungguhnya merupakan akar dari ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat," tutur seorang pengamat politik. Itu sebabnya, akhir-akhir ini banyak keresahan timbul di daerah, yang seolah-olah mewujud dalam gerakan separatisme.

Otonomi, yang bisa disebut sebagai langkah desentralisasi itu, dipandang sebagai cara efektif untuk mengakomodasi aspirasi daerah. Dengan begitu, keresahan yang berbuntut separatisme bisa dicegah. Kirim kesejahteraan untuk merangkul rakyat di daerah, bukan senjata.

Begitulah.■

Pius Lustrilanang, Sekjen ALDERA

"Soeharto Instruksikan Penculikan"

Photo: Repro Merdeka

Susai memberikan kesaksiannya tentang penculikan dirinya di Komnas HAM, 27 April 1998, Pius Lustrilanang langsung terbang ke luar negeri. "Waktu itu saya merasa tidak ada tempat di Indonesia yang aman buat saya," katanya. Minggu, 19 Juli lalu, Pius kembali ke tanah air. Kepada Xpos, ia bercerita tentang kegiatannya selama di luar negeri dan agenda kegiatannya di masa depan. Berikut petikannya:

Apa aktifitas anda di luar negeri?

Saya melakukan kampanye di media massa juga mencari kontak-kontak agar bisa bertemu dengan parlemen dan pejabat kementrian luar negeri Belanda. Lalu, menghadiri undangan Kongres AS untuk bersaksi di sana, bertemu dengan asisten menteri luar negeri AS, juga dengan orang dari national scurity council dan beberapa lembaga lain. Semua itu, untuk membantu usaha pengungkapan kasus penculikan. Beberapa waktu setelah kesaksian saya, program pelatihan militer untuk Indonesia dihentikan. Menurut aktivis di Amerika, hal itu baru pertama kali terjadi dimana anggota parlemen dari Partai Republik maupun Partai Demokrat bersatu menekan pemerintahnya untuk mencabut program latihan militer di Indonesia itu. Selain ke Belanda dan Amerika, saya juga ke Jepang bertemu dengan beberapa anggota parlemen, pejabat kementerian luar negeri, partai sosialis, dan para akademisi.

Saya menyadari pelepasan para korban penculikan selain karena tekanan masyarakat di Indonesia juga karena tekanan internasional.

Ada bukti Soeharto terlibat dalam penculikan ?

Ya kita lacak lah dari kelakuan Soeharto selama 32 tahun. Dia tampil dengan membantai satu juta lebih rakyat Indonesia. Kemudian dia pernah membuat pernyataan bahwa 'siapa yang akan mengubah UUD 45 atau yang menggeser dia kalau perlu diculik'. Ia pernah memerintahkan penembakan misterius, juga berbagai tindak kekerasan terhadap aksi-aksi damai. Nah, kalau dia sudah melakukannya di masa lalu, tentu ia akan melakukannya sekarang.

Jadi sekedar dugaan?

Kita menduga kan berdasarkan indikator. Bagaimana mungkin instansi khusus dalam militer mau bertindak konyol dengan resiko politik yang tinggi, kehilangan karir? Jika mereka tidak merasa aman dari lindungan politik, maka sulit diterima akal bahwa mereka mau melakukannya. Saya yakin instruksi penculikan itu datang dari Soeharto, sehingga mereka bebas bertindak apapun, bahkan seolah tidak bisa disentuh. Faktanya, seminggu lebih media memblow-up kasus ini, tapi faktanya penculikan terus berlangsung. Mabes ABRI menyangkal, sampai saya dikeluarkan juga tidak ada tindakan-tindakan yang konkrit. Begitu juga ketika Andi Arif diserahkan para penculik ke Mabes Polri. Kapolri mengatakan merekalah yang menangkap Andi Arif. Kalau seorang jenderal mau pasang badan, berarti kan ada otoritas yang lebih tinggi yang dilindungi?

Apa yang akan anda lakukan sekembalinya di Indonesia?

Terus memberikan fakta-fakta penculikan yang saya punya. Misalnya seperti peristiwa tanggal 16 Maret jam 23.30 WIB, Sony dan Rian (Yani Afri) sudah keluar dari sel itu. Menurut Soni, Dedy Hamdun, Noval dan Ismail, ditangkap tidak lama setelah Soni. Waktu mereka berjalan, mobil mereka dipepet dan ketiganya diambil beserta mobilnya. Kata Soni, ketiganya dilepas 3,5 bulan kemudian. Juga dalam sel penyekapan itu ada satu nama lagi yang disebut Soni yang tidak pernah disebut-sebut selama ini: Lucas da Costa. Dosen asal Timtim ini diculik dari Surabaya. Ia bisa dijadikan saksi tentang kawan-kawan yang lebih lama berada di sana.

Soal pembentukan Dewan Kehormatan Militer?

Belajar dari pengalaman Timtim, keputusan DKM sangat tidak transparan, hukumannya pun hanya hukuman kedinasan, digeser misalnya. Sementara penculikan ini kan tindakan pidana, ya harus ke pengadilan dan dilakukan secara transparan. Kasus ini tidak selesai kalau hanya memmbentuk DKM. Soeharto sendiri harus diperiksa dan harus diadili. Kalaupun dia tidak memberikan instruksi, dia sudah melakukan keteledoran membiarkan begitu lama kasus ini tidak diungkap. Sebagai Pangti, seharusnya dia bisa menghentikan penculikan-penculikan itu. Karena untuk kepentingan politik, ia tak melakukan apapun.

Kalau dulu musuh bersama adalah Soeharto, sekarang apa?

Sisa-sisa rejim Soeharto yang masih ada di mana-mana. Sebagian telah menyatakan pro reformasi, walaupun mereka tetap menginginkan karakter sistemnya tidak berubah, tetap mempertahankan pengingkaran-pengingkaran terhadap hak-hak politik warga negara. Mereka akan membatasi dan mengontrol masyarakat dalam menentukan policy negara.

Bagaimana dengan sistem yang telah diciptakan Soeharto?

Sikap ALDERA (Aliansi Demokrasi Rakyat) tetap menginginkan Soeharto dulu yang harus turun baru merombak sistemnya. Perubahan sistem ini kita bahasakan sebagai reformasi politik. Setelah Soeharto turun tetap kita harus melakukan reformasi politik. Reformasi itu anti kekerasan yang berarti perubahan lewat parlemen, sehingga penting memperkuat partai-partai dan terjaminnya pemilu bersih. Diakui, memang muncul sinisme dengan maraknya partai-partai. Munculnya partai-partai itu kan cerminan dari keinginan untuk partisipasi dalam politik.

Apakah itu justru akan melemahkan gerakan pro demokrasi?

Tidak, karena mereka akan disatukan dan terseleksi secara alamiah oleh sistem pemilu yang adil baik itu distrik maupun proposional. Yang tidak kuat akan mundur dan menyatu dengan partai yang lebih besar, dan akhirnya hanya akan ada tiga atau dua partai besar. Tapi biarkan itu terseleksi secara alamiah, jangan ada pembatasan dari sekarang. Biarlah rakyat yang menentukan lewat Pemilu.

KAMP PENYIKSAAN DI ACEH

Xpos

Diterbitkan oleh:
Komunitas Informasi Terbuka
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: **http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp**
PO.Box 22202 London SE5 8WU, United Kingdom

Ganti ongkos cetak Rp. 1000,- | Terbit seminggu sekali

Bahaya Politik Uang Segera Tiba

Pemilu mendatang dikhawatirkan diwarnai praktek-praktek politik uang (money politics). Mampukah Golkar mengalahkan partai-partai pro demokrasi yang didukung massa?

Uang dan kekuasaan, kata orang, bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya saling berkait erat. Dengan kekuatan uang, orang bisa membeli kekuasaan. Sebaliknya, kekua-saan bisa mendatangkan uang banyak, tanpa perlu bekerja keras.

Bisa jadi, itu sebabnya Ketua Umum Golkar, Akbar Tanjung, kini sedang berupaya keras "merebut" dana yang tersimpan di kas Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab) dari genggaman Soeharto —mantan presiden yang terguling akibat gelombang Revolusi Mei lalu. Asal tahu saja, dana yang masih meng-endap di kas Yayasan Dakab itu terbilang besar: Rp800 milyar lebih. "Uang itu merupakan hak Golkar," tegas Akbar. Di kas Golkar sendiri, masih tersimpan dana sebesar Rp17,5 milyar.

Dalam AD/ART Yayasan Dakab memang disebutkankan bahwa pendirian yayasan itu dimaksudkan untuk membantu perjuangan Golkar. Dan, memang selama ini, salah satu sumber dana Golkar yang utama, ya Yayasan Dakab.

Photo: Istimewa

■ **Aksi Memprotes Golkar:** Memainkan politik uang

Tapi, meski telah didekati secara "kultural", Soeharto ngotot tak mau melepas dana tersebut. Secara yuridis, ia memang punya argumen kuat. Sebab, Soeharto —bersama sejumlah orang kepercayaannya— yang mendirikan dan mengelola Yayasan Dakab, sejak 1985. Saat itu, Soeharto masih duduk sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar. Kini, setelah turun tahta, ia dicopot pula dari jabatan tersebut. Lalu bagaimana? "Ya, kita masih terus berusaha menyelesaikannya dengan Pak Harto," lanjut Akbar.

Golkar tentu saja berkepen-tingan dengan dana ratusan miliar rupiah itu. Di era reformasi seka-rang ini citra partai beringin benar-benar terpuruk. Sebagai "mesin politik" Orde Baru, Golkar harus menanggung dosa-dosa rejim Soeharto yang menyebabkan rakyat jatuh ke lembah krisis eko-nomi yang berkepanjangan.

Mengubah citra jelek itu bukanlah perkara gampang, sebab rakyat sudah terlanjur mengiden-tikkan Golkar sebagai partai pemerintah. Infrastruktur Golkar memang siap menghadapi pemilu mendatang, tapi banyak kalangan meragukan Golkar bisa meraih banyak suara dalam pemilu men-datang. Alasannya, ya soal citra itu tadi.

Karena itu, satu-satunya cara untuk memenangkan Golkar adalah memainkan politik uang alias *money politics*. Caranya bisa bermacam-macam: mulai dari yang halus (seperti mendanai pendirian organisasi-organisasi pendukung) sampai yang paling kasar (misal-nya, membeli suara pemilih saat Hari H pemilu).

Peluang mempraktekkan politik uang terbuka luas ditengah kondisi masyarakat yang terbelit krisis ekonomi. Bagi rakyat miskin yang untuk makan sehari-hari saja susah, program politik yang yang paling kongkrit adalah bagaimana bisa meme-nuhi kebutuhan dasar. Sedangkan, soal demokratisasi sistem politik, misalnya, bukanlah prioritas mereka. "Pengalaman pemilu di Thailand membuktikan hal seperti sangat mungkin bisa terjadi," kata Leopold Sudaryono, anggota presidium

Berita Pekan Ini

Politik Uang Dibekuk ...4
Korupsi Raksasa di Pertamina ...5
Bangkrutnya Mimpi Habibie ...6
Yogya Rusuh Karena Intel ...8
Partai Baru Amien ...11
Wawancara KIPP ...12

Keledai

Hanya keledai yang terperosok dua kali ke lubang yang sama. Tetapi, manusia ternyata juga mudah jatuh pada kesalahan yang sama. Bahkan berulang-ulang. Pemerintahan Transisional Habibie, yang baru dua bulan memimpin negeri ini, misalnya, telah mengulangi kesalahan rezim Soeharto.

Kekeliruan fatal itu, adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (Perpu) No2/1998, yang diteken 24 Juli lalu. Peraturan yang membatasi kebebasan berpendapat itu, ditentang oleh banyak kalangan pro-demokrasi, antara lain karena dinilai tidak cocok dengan semangat reformasi.

Bodohnya lagi, alasan yang dikemukakan para pendukung Habibie itu, persis sama dengan alasan Soeharto dulu. Bahwa kebebasan mesti diatur, supaya tidak mengganggu ketertiban. Wiranto malah lebih jauh menafsirkan, demonstrasi dan kerusuhan itu tidak jauh bedanya. Dasar pemikiran ini adalah rasa curiga terhadap rakyat. Kesamaan-kesamaan itu, membuat orang makin yakin, bahwa rezim Habibie ini tak beda dengan rezim yang digantikanya.

Rezim Habibie tampaknya juga mewarisi sikap sok tahu dari "profesornya." Merasa paling tahu, apa yang paling baik untuk rakyat, tanpa peduli apa sesungguhnya keinginan rakyat itu sendiri. Merasa tahu bagaimana membatasi kebebasan rakyat, tanpa pernah menghargai bahwa rakyat punya kepekaan untuk mengukur batas kebebasannya sendiri. Merasa tahu hukum yang terbaik untuk rakyat, tanpa pernah dengan rendah hati dan fair mematuhi hukum yang diciptakannya sendiri. Bahkan, memproduksi hukum, untuk memperkuat posisinya sendiri. Seperti dalam Perpu No 02/1998 itu.

Soeharto tumbang karena tak pernah mendengar kemauan rakyat yang memberinya kekuasaan. Apakah Habibie juga akan mengulangi kesalahan Soeharto, dan jatuh karena desakan masyarakat yang tak puas? Bila itu terjadi, maka sebetulnya lebih bodoh dari keledai.

■ LUGAS

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia.

Lagipula, dengan diberlakukannya sistem distrik dalam pemilu mendatang makin membuka peluang merajalelanya politik uang. Sebab, dengan dipecahnya wilayah pemilihan menjadi 420 distrik, jelas pengawasan pemilu menjadi lebih rumit. Disinilah, para operator politik Golkar akan bermain.

Untuk mendanai politik uang itu tentu saja diperlukan *fulus* yang tak sedikit. Jadi, tak heran bila Akbar Tanjung terkesan *ngotot* merebut Rp800 milyar lebih yang *ngendon* di kas Yayasan Dakab tadi. Selain itu, orang-orang Golkar kini sedang mempersiapkan langkah-langkah sistematis untuk menggalang dana politik dari lumbung-lumbung uang negara.

Misalnya, dalam waktu dekat ini akan dibentuk semacam Dewan Pendanaan Negara (DPN), lewat mekanisme keputusan presiden. Kabarnya, yang akan ditunjuk memimpin DPN adalah Adi Sasono, Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah —yang kini duduk dalam kepengurusan DPP Golkar. DPN, yang digagas para pengikut Presiden transisional BJ Habibie, direncanakan jadi lembaga yang *powerfull* dalam menentukan kebijakan ekonomi negara, menyaingi Departemen Keuangan dan Bappenas (lihat *Xpos* No.28). "Dana yang ditargetkan dikumpulkan lewat DPN mencapai triliunan rupiah," kata sumber *Xpos*.

Ancaman politik uang telah mulai tampak dengan penguasaan logistik oleh salah satu kekuatan politik. Adi Sasono dan jaringan mesjid yang dekat dengan ICMI, misalnya, mulai menggegam pasok minyak goreng dan menjual dengan harga subsidi. Di Tangerang, pekan lalu, Adi Sasono membuka jalur distribusi itu. Bukan tak mungkin, penguasaan logistik itu akan menjadi senjata politik dalam pemilu mendatang.

Toh, meski Habibie dan Golkar berhasil menggalang dana politik yang besar sekalipun, tak berarti politik uang yang akan mereka jalankan bisa berjalan mulus begitu saja. Tantangan utama datang dari partai-partai pro-demokrasi yang mendapat dukungan massa — sumber kekuasaan lainnya. PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri, misalnya, jelas memiliki basis massa yang luas. Bila koalisi PDI Perjuangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) —yang digagas para tokoh Nahdatul Ulama— berjalan lancar, bisa dipastikan mereka bisa meraih mayoritas suara pemilih.

Nah, kalau begitu, pemilu 1999 nanti bakal menjadi ajang pertarungan antara kekuatan sisa-sisa rejim Orde Baru yang menjalankan politik uang dengan gerakan pro-demokrasi/reformasi yang didukung basis massa. Siapa yang keluar sebagai pemenang? Terserah kepada rakyat. ■

Mesin Uang Rejim Soeharto

Untuk melanggengkan kekuasaannya, Soeharto mempraktekkan politik uang dengan piawai. Dimana saja uang triliunan rupiah itu ditumpuk?

Politik uang bukanlah hal baru dalam kamus politik rejim Orde Baru. Tokoh yang paling piawai mempraktekkannya adalah Soeharto sendiri. Caranya, dengan menumpuk uang di sejumlah yayasan yang berkedok kegiatan sosial. George Junus Adijondro, misalnya, memperkirakan uang yang ditumpuk di yayasan-yayasan itu mencapai jumlah yang spektakuler: sekitar Rp100 triliun.

Yang paling sering dipakai untuk kepentingan politik adalah dana yang berasal dari kas Yayasan Dakab. Yayasan ini didirikan Soeharto, bersama sejumlah orang kepercayaannya, tahun 1985, dengan tujuan membantu perjuangan keluarga besar Golkar. Penggalangan dana dilakukan dengan berbagai cara, biasanya dengan kedok kegiatan sosial—misalnya, bea-siswa untuk pelajar tak mampu atau pembangunan panti sosial. Pihak yang "ditodong" umumnya para konglomerat keturunan Cina.

Hasilnya, sampai Soeharto *lengser keprabon*, kas Yayasan Dakab masih berisi Rp800 milyar lebih. Bahkan, menurut seorang pengamat ekonomi, jumlah uang yang *ngendon* di kas yayasan jauh lebih besar. Sebagian dana Yayasan Dakab memang digunakan sebagai dana operasional Golkar, terutama masa-masa menjelang pemilu. Dana ratusan miliar itu digunakan untuk kampanye Golkar, juga membeli suara pemilih.

Dengan uang yang ditumpuk di yayasan-yayasan itulah, Soeharto bisa mengatur pentas politik nasional. Ia dengan gampang bisa "membeli" loyalitas para opurtunis politik. Pokoknya, Soeharto bisa mempraktekkan politik uang nyaris sempurna, hingga mampu bertahan 32 tahun di puncak kekuasaan.

Rupanya, cara-cara politik uang itu masih ingin ditiru rejim Habibie. Ini bisa dimaklumi, sebab bukankah Habibie sendiri pernah mengakui Soeharto sebagai maha profesornya? ■

Xpos, No. 31/I, 1 - 7 Agustus 1998

Perlu Pengawasan Pemilu

Proses Pemilu perlu diawasi sejak RUU sampai pelaksanaan. Wakil dari ABRI diangkat atau dipilih? Rakyat berhak terlibat mengawasi.

Pemerintah transisi Habibie menjanjikan akan menyelenggarakan Pemilu pada Mei 1999. Ada beberapa perbedaan dengan pemilu sebelumnya. Acara yang lazim disebut "pesta demokrasi" ini bakal menggunakan UU Pemilu yang baru. Nantinya Pemilu ini pun akan diikuti banyak partai. Kini sudah berjumlah 43 yang terdaftar di Departemen Dalam Negeri. Kekhawatiran yang muncul adalah bilamana terjadi kecurangan sejak hal-hal yang substansial seperti penyusunan UU Pemilu dan jumlah ABRI yang diangkat, sampai dalam hal-hal tehnis seperti kampanye, pencoblosan, hingga penghitungan suara. Juga bilamana terjadi politik jual beli suara, bahkan kekerasan untuk memenangkan partai tertentu atau menyabot kepentingan massa partai lainnya.

Munculnya RUU Pemilu yang dibahas oleh tim Prof Dr. Ryaas Rasyid beberapa pihak menilainya sangat tertutup. Menurut Syarwan Hamid, tidak tepat bila penyusunan RUU itu tertutup, yang terjadi adalah bahwa pemerintah berlomba dengan waktu untuk mengejar target yang dicanangkan untuk mengadakan pemilu tahun depan. Memang banyak poin dalam RUU yang diajukan mengundang perdebatan yang tajam di kalangan masyarakat.

Satu isu yang ramai diperdebatkan misalnya adalah pengangkatan personil ABRI untuk mengisi kursi parlemen. Sri Bintang Pamungkas misalnya, mengusulkan ABRI keluar saja dari parlemen. Kredibilitas ABRI sudah jatuh di mata masyarakat. Kehadiran ABRI, baik tentara AD maupun kepolisian justru tidak membuat masyarakat aman. Terbukti dari kasus penembakan mahasiswa Trisakti sampai terlibatnya personil Kopasus dalam penculikan aktivis, ABRI tidak sigap untuk mengusutnya hingga tuntas karena bisa menggoyang *status quo* yang dinikmati ABRI selama ini.

Sementara itu menurut Mulyana W Kusumah, jika ABRI tidak menggunakan hak pilih, tidak harus otomatis ada yang diangkat sebagai anggota parlemen. "Sehingga tidak perlu lagi ada perwakilan yang diangkat," ujar Mulyana. Ia menyebut mekanisme pengangkatan merupakan sesuatu yang bersifat istimewa. Pola demikian, menurutnya, jelas tidak mencerminkan demokrasi. "Mestinya anggota ABRI juga diberikan hak pilih sebagaimana warga negara lain," tambahnya.

Tetapi usulan para tokoh pro-demokrasi di atas ditolak mentah-mentah oleh Syarwan Hamid. Mendagri yang lagi digugat atas pecahnya PDI itu mengungkapkan, cara penentuan utusan dari ABRI dengan cara pengangkatan bukan melalui pemilihan itu untuk menghindari terjadinya perpecahan di tubuh angkatan bersenjata. "Bagaimana jadinya kalau di tubuh ABRI untuk menentukan wakilnya di DPR melalui pemilihan itu bisa menimbulkan perpecahan. Diangkatnya utusan ABRI itu agar tidak terjadi perpecahan di tubuh institusi ABRI," tegasnya.

Photo: istimewa

■ **Kampanye Pemilu:** Penuh kecurangan

Bagi pemikir ABRI seperti Letjen Purn Sayidiman Soerjohadiprojo, ketakutan ABRI untuk menempuh jalur pemilihan justru merendahkan diri ABRI sendiri karena menganggap bahwa ABRI tidak akan mungkin bersatu bila ada pemilihan, bahkan di intern tubuhnya sendiri. Pemilu di banyak negara, posisi angkatan bersenjata sama dengan rakyat yang lain, punya hak pilih dan dipilih.

Agar tidak terjadi kekacauan dalam pemilu, pemberdayaan masyarakat kemudian menjadi signifikan untuk mandiri dan tidak tergantung pada ABRI. Kecurangan memang bukan tidak mungkin. Seperti diungkapkan Mulyana W Kusumah, kemungkinan akan terjadi tiga kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Yakni politik uang (*money politics*), korupsi politik dan kekerasan kolektif.

Menguatkan pendapat Mulyana, Leopold Sudaryono, anggota Presidium KIPP menyatakan, "Sebagian besar partai-partai baru yang tak punya bukti berjuang untuk demokrasi akan kesulitan merebut basis massa. Mengingat sempitnya jangka waktu pemilu, hingga cara yang paling mungkin adalah dengan membeli suara. Tentunya, partai-partai reinkarnasi Golkar yang punya dana dan infrastruktur yang kuat". Sebagai presidium KIPP, Leopold mengajak masyarakat untuk terlibat aktif di KIPP.

KIPP atau Komite Independen Pemantau Pemilu selama ini agak tenggelam dan membutuhkan dukungan masyarakat luas. Mengingat kualitas pemilu yang perlu ditingkatkan. KIPP merencanakan untuk menggesitkan kembali kegiatannya. Pengawasan pemilu jadi penting. Sebab, dalam sistem pemilu terbaik sekalipun, potensi kecurangan dalam pelaksanaan masih mungkin terjadi, apalagi bila sistem yang disusun dalam UU Pemilu yang baru nanti ternyata buruk.

Bangkitnya demokrasi di negara-negara tetangga seperti di Thailand dan Filipina juga turut didorong oleh lembaga-lembaga pengawas pemilu independen. Di negeri Gajah, di mana militer juga aktif berpolitik dan jual beli suara sudah menjadi budaya yang biasa, peran *Pollwatch* (KIPPnya Thailand) berhasil meminimalkan ekses-ekses negatif tersebut hingga pemilu di Thailand bisa dipercaya oleh warganya sendiri dan publik internasional.

Di Filipina, NAMFREL (*National Citizen Movement for The Free Election*) bertarung dengan COMELEC, lembaga penghitung suara Pemilu untuk memenangkan Marcos. Seperti terjadi kemudian, meski Marcos sempat terpilih akhirnya ia terjungkal juga oleh tekanan *People's Power* yang menggunakan data dari NAMFREL sebagai basis kemenangan gerakan pro-demokrasi pimpinan Cory Aquino. ■

■ OPINI

Politik Uang Dibekuk

Oleh: Siti Anisa

Margajaya hanyalah desa kecil di pinggiran Bogor. Sebagian penduduknya bertani. Tetapi, banyak juga yang bekerja di sektor informal, pedagang kecil, sopir. Ada pula buruh-buruh pabrik yang bermigrasi harian ke kota. Disamping, tentu saja, mayoritas anak-anak mudanya terpaksa menganggur.

Hampir tak ada yang istimewa dari desa itu. Sampai, ketika pertengahan Juli lalu, sekelompok pemuda menjebol tradisi pemilihan kepala desa. Mereka berhasil mengalahkan politik uang dan kemapanan. Dengan modal harapan, niat baik, dan kesungguhan, mereka membuktikan: politik uang bukan hal yang mustahil untuk ditaklukkan. Kegigihan anak-anak muda itu, agaknya patut direnungkan para politikus; terutama mereka yang sangat khawatir dengan politik uang yang diduga akan dilakukan Golkar di Pemilu mendatang.

Adalah Deni Kuswanda, pemuda 21 tahun, lulusan SMA, yang berhasil merebut kepercayaan warga Desa Margajaya untuk duduk menjadi Kepala Desa sejak 18 Juli lalu. Deni meraih dukungan 1100 suara lebih, jauh meninggalkan dua saingan terdekatnya yang hanya 500-an. Padahal berbeda dengan saingannya yang mengandalkan politik uang, yang lazim dalam pemilihan kepala desa, Deni memilih kampanye dengan menawarkan harapan. Apa yang ia akan lakukan untuk desanya, bila nanti terpilih menjadi kepala desa. Dan ternyata, warga percaya.

ilustrasi: Xpos

Tentu saja, Deni tak memetik keberhasilan itu dengan berpangku tangan. Beberapa bulan sebelum pemilihan, sekelompok pemuda pendukungnya telah merancang strategi. Mereka bukan kelompok politik. Cuma kelompok pelestari lapangan bola — kebanggaan warga Margajaya yang beberapa kali diancam gusur oleh pengembang perumahan. Menjelang pemilihan kepala desa, anak-anak muda itu memutuskan untuk membentuk Komite Independen Pemantau Pemilihan Kepala Desa. Ancang-ancang yang baik untuk mencegah kecurangan.

Komite Independen itu tak direstui kecamatan. Tetapi, mereka terus bekerja menyiapkan diri untuk pemantauan. Tak peduli ada izin atau tidak. Bukan sekali dua, anak-anak muda dalam komite itu diancam aparat. "Pemilihan kepala desa disini rumit," kata pejabat kecamatan yang kesal. Kepolisian pun gerah. Ketika Komite ini memperkenalkan gagasan agar calon kepala desa berkampanye terbuka di lapangan terbuka, intel polisi mengintimidasi dua aktivis komite. Mereka dipanggil ke Polres, dipaksa membatalkan acara kampanye itu.

Kampanye urung. Namun semangat anak-anak muda itu mereformasi desa mereka tak surut. Masa kampanye adalah masa paling krusial. Mereka paham betul, masa itulah calon-calon biasanya membeli suara, dengan hadiah-hadiah untuk penduduk. Ada calon yang datang ke rumah-rumah penduduk dengan membawa beras tiga kilogram, dan uang Rp3000,- untuk tiap pemegang suara. Ada calon yang karena dekat dengan GNOTA, memberi baju seragam untuk anak-anak. Hanya Deni, pemuda tak bermodal itu, yang tak bisa memberi hadiah apa-apa untuk calon pemilihnya. Komite Independen tak tinggal diam menghadapi "pembelian suara" itu.

Tiap kali makelar-makelar yang mendatangi rumah-rumah penduduk untuk menyogok, aktivis Komite, mengawasi. Segera setelah makelar itu pergi, giliran Komite Independen masuk ke rumah yang sama. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, pemegang suara, mereka dengan sabar menerangkan. "Kalau calon kepala desa bagi-bagi hadiah uangnya dari mana? Mereka pasti akan korupsi kalau terpilih jadi kepala desa. Bayar utangnya dari korupsi. Jadi lebih baik memilih calon yang jujur." Kampanye itu ternyata manjur. Mayoritas penduduk memilih calon yang justru tidak membagi-bagi hadiah.

Operasi Fajar, seperti yang terjadi di pemilu Thailand atau juga Indonesia, dihentikan secara efektif oleh Komite Independen Margajaya itu. Pembelian suara yang sangat mencolok pada hari terakhir, mereka lawan sebagai tindak kriminal.

Pengalaman itu sungguh berharga, terlebih di desa yang menderita kemiskinan akut. Selama ini, iming-iming hadiah menjadi semacam keharusan, bagi calon kepala desa yang mencalonkan diri. Kemiskinan menyebabkan orang dengan mudah menjual suara mereka. Suara rakyat, bukan lagi suara Tuhan. Sebab, banyak suara itu ternyata telah dibeli calon kepala desa.

Akibatnya, banyak calon kepala desa terbelit utang; dan terpaksa korupsi untuk bisa membayar kembali biaya kampanye. Tak heran, banyak kepala desa memilih berkolusi dengan pemodal, menggusuri tanah rakyat, sekedar mencari komisi; daripada susah-payah membela kepentingan warganya. Proses pemilihan yang buruk, mudah berlanjut dengan kepemimpinan yang buruk. Itu sebabnya, politik uang mesti dihentikan.

Pengalaman itu juga berharga, bagi politikus yang menghadapi pemilihan umum Mei tahun depan. Sudah jadi rahasia umum, Golkar yang sebetulnya tak lagi didukung, punya dana ratusan milyar rupiah. Jauh lebih kaya dibanding partai-partai lain. Belum lagi, kalau Soeharto berdamai dengan Golkar, sehingga trilyunan dana yayasan yang dikelolanya bisa dipakai untuk kampanye. Ada kekhawatiran luas, bahwa Golkar akan membeli suara, dan memperpanjang *status quo*. Bila itu terjadi, reformasi tinggal kata kosong yang menyedihkan.

Tetapi, harapan akan masa depan yang lebih baik, dengan pemimpin yang peduli pada nasib rakyat, ternyata bisa mengubah sikap warga dalam memilih. Harapan itulah yang mesti ditumbuhkan.

Di samping tentu saja, kerja keras organisasi. Komite Independen di Margajaya itu, selepas masa kampanye, memfokuskan diri pada pengawasan hari pencoblosan. Sejak pukul 05.30 mereka telah berkumpul di tempat pencoblosan. Memotong kuku-kuku panitia yang terlalu panjang dan biasa dipakai curang. Menangkap enam warga yang membawa kartu suara palsu —*fotocopy*. Kebenaran memang tak bisa datang tanpa usaha. Juga dalam pemilihan umum. ■

Mega-Korupsi di Balongan

Keluarga Soeharto terlibat mega-korupsi di Proyek Balongan di Indramayu, Jawa Barat. Negara dirugikan Rp. 11 trilyun lebih.

Seperti terkena kutukan, Pertamina tak pernah lepas dari korupsi. Skandal mantan Dirut Ibnu Sutowo dan mantan Asisten Umumnya, Ahmad Thaher, yang menguras puluhan juta dolar AS dari Pertamina, ternyata belum merupakan klimaks cerita. Belakangan ini, kembali mengemuka skandal *mark up* (pembengkakan biaya) dalam proyek pembangunan kilang minyak Exor (*Export Oriented Refinery*) I Balongan, di Indramayu.

Sejak dibangun pada awal tahun 1990-an, kilang minyak ini telah menghabiskan biaya 2,4 milyar dolar AS. Angka yang dianggap sangat berlebihan. Sebab, menurut perhitungan perusahaan konstruksi asal Inggris Foster Wheeler yang pertama kali memberikan penawaran, biayanya hanya sebesar 1,95 milyar dolar AS. Sedangkan dalam perhitungan awal Pertamina, angka pembiayaan yang wajar hanya sekitar 1,55 milyar hingga 1,7 milyar dolar AS — sumber lain malah menyebutkan angka 1,35 milyar dolar AS. Sehingga, diperkirakan biaya yang di-*mark up* mencapai lebih kurang 800 juta dolar AS, atau sekitar 12 trilyun rupiah dalam kurs sekarang.

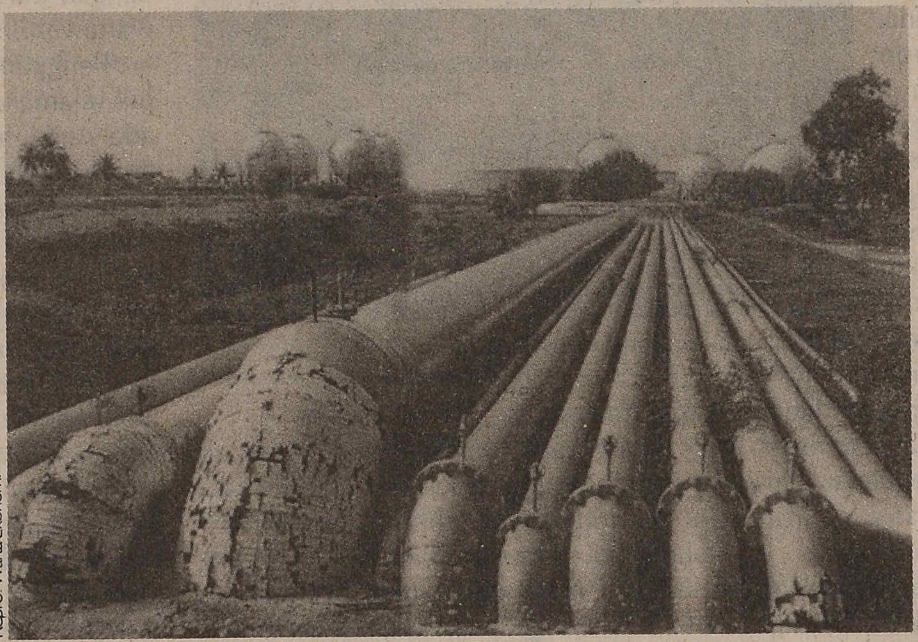

Repro Warta Ekonomi

■ **Proyek Balongan:** Hasil KKN keluarga Soeharto

Jumlah ini memang luar biasa *gede*. Skandal Achmad Thaher tahun 1979 yang dianggap paling heboh saja, "cuma" bernilai 78,8 juta dolar AS. Pantaslah kalau ini disebut sebagai "mega korupsi".

Yang terlibat dalam skandal ini, tak lain adalah orang-orang dekat mantan Presiden Soeharto. Aktor utamanya adalah Erry P. Oudang, keponakan (alm.) Tien Soeharto. Kedekatan hubungan kekeluargaan itu, dimanfaatkan Erry dengan sebaik-baiknya. Ia menggalang dukungan dari anggota keluarga Cendana yang lain. Termasuk dari sepupunya, Sigit Harjojudanto. Hasilnya, Radius Prawiro yang pada tahun 1989 merupakan Menko Ekuin menunjuknya sebagai kontraktor utama Exor I.

Dasar bukan pekerja profesional, Erry tidak mementingkan perusahaan konstruksi mana yang memberikan angka penawaran terbaik untuk diajaknya bekerja sama. Kendati ia juga memegang posisi sebagai *Indonesian Sales Representative* Foster Wheeler, ia tidak membawa kepentingan perusahaan Inggris itu — kendati angka penawarannya terbilang cukup baik. Perusahaan itu, kemudian, cuma mendapatkan proyek *engineering* Exor I, yang nilainya cuma 2% dari keseluruhan proyek. Padahal, Foster Wheeler merupakan inisiator proyek yang punya akses pada pemerintah Inggris sebagai pihak yang akan memberi pinjaman modal.

Yang justru banyak mendapat peran adalah Mitsui Co.Ltd dari Jepang, yang tadinya cuma diajak ber-*partner* oleh Foster Wheeler. Mitsui kemudian mengajak perusahaan asal Jepang lainnya, yaitu Japan Gasoline Corporation — yang belakangan menggaet orang dekat Soeharto, Bob Hasan. Konsorsium inilah yang memenangkan tender proyek Exor I. Meskipun harga yang ditawarkan lebih tinggi dari Foster Wheeler, sebesar 2,1 milyar dolar AS. Mengapa perusahaan Inggris itu terpinggirkan? Ini terjadi karena Erry bermain mata dengan pihak Mitsui.

Kolusi keluarga Cendana dengan pihak Jepang ini, makin lama membuat Pertamina makin dihisap. Hal ini juga tak lepas dari peran Dirut Pertamina ketika itu Faisal Abda'oe yang membiarkan praktek penggerogotan terus terjadi. Konon, ia memperoleh mobil balap Ferrari untuk perannya itu. Proyek-proyek pengadaan, misalnya untuk penyediaan tanker, diserahkan lagi pada Erry. Erry kemudian membagi-bagi "jatah" pengadaannya dengan mengajak Yapto, Yayasan Angkatan Darat, Yayasan Dana Pensiun Pertamina serta Sigit Harjojudanto.

Akibat kolusi ini pun, Pertamina harus kehilangan kesempatan memperoleh pemberian dana dari pemerintah Inggris sebesar 70 juta dolar AS. Pada awalnya, proyek ini memang merupakan tawaran dari PM Inggris Margareth Thatcher kepada mantan Presiden Soeharto pada tahun 1985. Sehingga, selain pinjaman komersial sebesar 130 juta dolar AS, Inggris bersedia menalangi dana 70 juta dolar AS untuk proyek itu.

Namun, dana murah dari Inggris itu tak jadi diambil sama sekali akibat interupsi Mitsui. Akhirnya, dana yang digunakan malah seratus persen pinjaman komersial yang dibiayai konsorsium Java Petroleum Investment Co., yang terdiri dari Mitsui Co. Ltd, Sumitomo, Toyo Menka, C. Itoh, Nisso Iwai dan Marubeni.

Dengan tersingkirnya pihak Inggris, maka Pertamina juga kehilangan kesempatan mendapatkan peralatan bermutu baik yang sedianya akan didatangkan dari Italia. Pihak Jepang, menggantinya dengan peralatan buatan Korsel yang kualitasnya lebih rendah. Diduga, peralatan yang dibeli dengan harga mahal ini, merupakan mesin-mesin bekas. Hal yang mengakibatkan terjadinya gangguan teknis berulang kali. Sehingga, sedikitnya ratusan milyar rupiah kembali harus dikeluarkan untuk mereparasinya. Malah, sebulan setelah diresmikan pada 31 Maret 1995, kilang itu rusak selama 3 bulan. Kerugiannya? 20 juta dolar AS per hari.

Lengkaplah penderitaan negara dari skandal di Pertamina ini. Diperkirakan, masih ada sejumlah besar proyek yang mengalami penghisapan yang sama. Konon, ada sebuah pengeboran sumur yang *mark up*-nya sampai lima kali lipat harga yang sebenarnya.

Menurut pengamat Laksamana Sukardi, jika proyek-proyek pertambangan seperti di Pertamina dijalankan dengan manajemen yang sehat, sebenarnya Indonesia tak perlu menghamba pada IMF untuk mengatasi krisis. Menurutnya, seperti dikutip *Kompas*, pengeluaran di bidang pengeboran dan produksi Pertamina, paling sedikit 800 juta dolar AS sehari. Kalau dalam sebulan, pengeluarannya sudah 24 milyar dolar AS untuk 30 hari pengeboran. "*Bayangin aja*, jika ada dana 24 milyar dolar AS sebulan yang digelapkan, setahun berapa? Dua ratus delapan puluh delapan milyar dolar AS," ujarnya. Tak bisa tidak, KKN memang harus diberantas habis. ■

■ EKONOMI

PT DSTP Sumber Korupsi?

PT DSTP diduga jadi ladang korupsi. Habibie, Soeharto, Sudharmono dan sejumlah menteri diduga terlibat.

Kalau tak ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), PT Dua Satu Tiga Puluh, perusahaan penghimpun dana pesawat N-2130, pekan lalu, PT ini mungkin akan dilupakan orang. Padahal, perusahaan ini merupakan salah satu sumber korupsi Soeharto dan Habibie.

Ide pendirian PT ini datang dari Soeharto, awal tahun 1996. Waktu itu ia masih presiden dan Habibie, Menteri Ristek dan Direktur PT IPTN. Untuk memproduksi N-2130, pesawat *turboprop* bermesin ganda dan berpenumpang 130, IPTN tak punya dana. Pesawat N-2130 ini konon membutuhkan biaya US$2 miliar, dari riset, rancang bangun hingga pesawat tersebut memperoleh sertifikat laik terbang.

Karena PT IPTN tak punya uang dan dana ini tak mungkin dibebankan pada APBN, Soeharto meminta kepada 20 konglomerat termasuk, Prajogo Pangestu, Henry Pribadi, Eka Tjipta Widjaya, Sudwikatmono dan pengusaha minyak, Arifin Panigoro untuk ikut mendanai. Dari mereka ini terkumpul dana sekitar US$400 juta.

Selain para konglomerat, sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) juga dipaksa menyetorkan uang ke PT ini. Di bulan Mai, enam BUMN di bawah Departemen Kehutanan membeli saham DSTP sebanyak Rp30 miliar. Dana ini diambil dari dana reboisasi, sebagian dari Rp400 miliar dana reboisasi yang dipakai untuk memproduksi N-250. Di bulan Juni, 21 BUMN di bawah Departemen Perdagangan dan Industri membeli saham DSTP sebanyak Rp70 miliar, meskipun sejumlah besar BUMN di lingkungan departemen ini dinyatakan tak sehat oleh Menteri Keuangan, Mar'ie Muhamad.

Nah, di bulan Juni 1996, Soeharto punya ide untuk mengumpulkan dana sama seperti ketika ia mengumpulkan duit untuk menerbitkan Harian *Republika*, harian milik ICMI. Cara *Republika* kala itu, menjual saham kepada masyarakat dan masing-masing pemegang saham hanya boleh memiliki lebih dari selembar saham. Cara itu dulu berhasil dipakai *Republika* dan mendatangkan banyak uang.

Dari 1.174.398 lembar saham yang ada 400 ribu saham dijual masing-masing dengan harga Rp5 ribu dan tak boleh lebih dari satu lembar, sedang 744.398 lainnya boleh dimiliki lebih dari satu lembar. Cara penjualan saham yang ditawarkan secara terus-menerus (*evergreen offering*) ini akan dijalankan terus hingga 2006.

Para birokrat, dari gubernur hingga lurah, ramai-ramai menjual saham itu kepada masyarakat. Memang tak berat, hanya Rp5 ribu saja per lembar. Namun dari cara ini, dana yang terkumpul mencapai triliunan rupiah.

Photo: Istimewa

■ **IPTN:** Diambang bangkrut

DSTP yang direkturnya, Saadilah Mursyid, Menteri Sekretaris Kabinet kala itu, dikritik banyak pihak. Kalangan DPR menganggap pernyataan Soeharto yang meminta masyarakat membeli saham DSTP hanya sekedar imbauan. Namun begitu, di Jawa Tengah, Kantor P&K setempat telah memotong gaji guru-guru di wilayah itu untuk membeli saham DSTP. Kalangan praktisi hukum menganggap cara-cara DSTP mencari dana dari masyarakat dengan menjual saham, melanggar undang-undang tentang bursa saham. Menteri Keuangan kala itu, Mar'ie Muhammad menulis surat kepada Habibie memprotes metode penjualan saham yang melanggar undang-undang bursa saham itu. Protes Mar'ie waktu itu tak ditanggapi dan DSTP pun jalan terus tanpa dikenai tindakan hukum apapun, kendati telah melanggar undang-undang.

Kini, setelah RUPS banyak kalangan meminta agar DSTP dibubarkan dan dana yang masih ada dipakai untuk pengadaan pangan. Soal dana yang ada pun kini banyak dipertanyakan. Arifin Panigoro misalnya, setelah RUPS mengatakan ia dulu menyerahkan US$1 juta ketika kurs masih Rp2 ribu sedolarnya. "Sekarang direksi menghitungnya dalam rupiah dengan kurs waktu itu," ujarnya kepada wartawan.

Penggunaan uang yang sudah terkumpul selama ini memang tak jelas. Memang ada dugaan terjadi korupsi mengingat dana yang terkumpul sudah banyak namun belum digunakan. RUPS, Kamis, minggu lalu memutuskan akan menyewa akuntan publik asing yakni, *Delloite Touche* untuk memeriksa keuangan DSTP. RUPS juga memutuskan untuk mengadakan RUPS Luar Biasa untuk menjajaki kemungkinan pembubaran atau mencari alternatif lain.

Bubar, boleh saja. Namun, penyelewengan dananya harus diusut mengingat banyak pejabat yang terlibat dalam PT ini seperti Presiden Habibie, Menteri Ristek Rahardi Ramelan dan Menteri Perhubungan Giri Suseno. PT ini juga melibatkan mantan Presiden Soeharto dan dua

Ditunggu, Kereta Bawah Tanah

Jalur kereta bawah tanah (subway) Blok M-Kota dibangun tahun depan. Investasinya Rp 4,2 trilyun. Proyek ini lancar, setelah Tutut ikut tumbang.

Warga Jakarta boleh berharap terhindar kemacetan. Itu kalau, proyek pembangunan jalur kereta bawah tanah jadi dimulai awal tahun depan. Dengan panjang rel sekitar 14,5 kilometer yang menghubungkan Blok M- Kota, kereta bawah tanah itu bisa mengangkut 50.000 penumpang tiap jam. Dan untuk melintasi kota Jakarta, dari Selatan ke Utara, yang selama ini perlu waktu hampir tiga jam; nantinya hanya butuh 25 menit.

Kenapa proyek sepenting itu baru dikerjakan tahun depan? Sebetulnya, rencana membikin *subway* itu sudah cukup lama dipikirkan. April dan Juni 1997, proyek itu pernah akan dimulai. Tetapi tertunda-tunda karena bersaingan dengan rencana Tutut membangun *triple decker* (jalan layang susun tiga) untuk jalur yang sama, Blok M-Kota. Walaupun jalan susun tiga itu hanya menguntungkan segelintir orang bermobil, tetapi diprioritaskan; karena Tutut yang punya proyeknya. Sudah bukan berita lagi, kalau dikatakan, pada masa Soeharto dulu, anak-anaknya menyetir kebijakan untuk keuntungan bisnis mereka sendiri.

Kini, setelah Soeharto tumbang tertiup reformasi, proyek-proyek Tutut pun bergu-

guran. Apalagi krisis moneter juga membuat rencana jalan susun tiga itu tak mungkin dikerjakan. Pemda DKI tak akan nekad membebaskan tanah untuk proyek mercusuar Tutut. Bisa-bisa Sutiyoso, yang baru saja tersandung soal becak, akan dituntut warganya kalau terus mendukung proyek *triple decker*. Nah, di tengah kemacetan proyek Tutut itu, kereta bawah tanah punya peluang untuk diwujudkan.

Sutiyoso menegaskan dengan dimulainya proyek kereta bawah tanah nanti, maka proyek jalan susun tiga dibatalkan. "Jalan susun tiga tidak sepenuhnya bisa mengatasi kemacetan. Hanya orang yang punya mobil yang diuntungkan," katanya. *Subway* itu, nantinya akan melewati jalur Blok A, Blok M, Senyan, Blora, Benhil, Setiabudi, Bunderan HI, Monas, Harmoni, Sawah Besar hingga Kota dan Kali Besar.

"Saya berharap awal tahun depan pembangunan subway sudah bisa diwujudkan," kata Sutiyoso, Gubernur DKI. Ia akan mengajukan proposal pembangunan sarana angkutan bawah tanah itu, kepada Menteri Perhubungan dan berharap tidak akan ditolak. Proyek itu, keseluruhannya akan dirampungkan dalam empat tahun.

Menurut dia, Pemda DKI tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk proyek angkutan massal itu. Dananya berasal dari investor swasta Jepang, dengan bunga amat rendah, yakni 0,75 persen dan masa pengembalian 40 tahun. Proyek ini, menurut studi kelayakan Pemda DKI dan *Indonesian Japanese European Group* (IJEG) akan menelan investasi Rp4,2 trilyun. Sutiyoso berpendapat, pinjaman dengan bunga rendah itu sangat menguntungkan Pemda DKI. "Bahkan bunganya bisa dibayar pemerintah pusat," katanya.

Kepastian DKI membangun kereta bawah tanah itu, dicapai, setelah Sutiyoso berkunjung ke Filipina dan Jepang belum lama ini. Rancangan proyek yang semula berteknologi canggih dan padat modal, dimodifikasi sehinga lebih padat karya, seperti yang dilakukan di Filipina. Pihak Jepang-Itochu dan Almec Corporation, setuju dengan perubahan itu. Proyek ini diperkirakan membuka lapangan kerja untuk 60.000 orang. Sutiyoso berharap proyek itu bisa sedikit membantu mengatasi kelangkaan lapangan kerja, terutama di masa krisis saat ini. Perubahan teknik pengerjaan, yang lebih mengandalkan tenaga manusia untuk menggali terowongan itu, diperkirakan menghemat biaya 40 persen.

Masyarakat pun menanti angkutan massal, yang menghindarkan mereka dari kemacetan sehari-hari. Sebab, ketegangan karena macet itu, menyedot banyak energi dan waktu. Ternyata, dibutuhkan reformasi juga untuk menggolkan proyek ini, dan menggagalkan proyek elitis Tutut. ■

Habibie Jauhkan Investor

Presiden transisi Habibie menyatakan tidak mengharapkan para pengusaha Cina kembali ke Indonesia. Taiwan menyerukan memboikot Indonesia.

Kepercayaan diri BJ Habibie makin besar akhir-akhir ini. Tadinya, ia sempat menyatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden setelah setelah pemilu dilakukan. Namun, seiring dengan konsolidasi yang dilakukannya melalui Golkar, ia mendadak merasa yakin bisa kembali "memimpin" Indonesia.

Entah mendapat ilham dari mana, ia tiba-tiba seperti merasa mampu menangani krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia. Buktinya, dalam sebuah wawancara dengan harian *The Washington Post* ia menunjukkan niatannya mengunjungi Presiden Bill Clinton di Amerika Serikat. Secara politik, niatan itu dapat diartikan sebagai kepercayaan diri Habibie, yang menganggap dirinya bisa mendapat restu Clinton untuk memulihkan perekonomian. Dengan begitu, ia berharap dapat terus menjadi presiden.

> ADANYA PERNYATAAN HABIBIE YANG TIDAK SIMPATIK ITU JELAS MEMPERBURUK KEADAAN. ETNIS CINA ASAL INDONESIA YANG KINI BERADA DI LUAR NEGERI MAKIN ENGGAN UNTUK KEMBALI KE INDONESIA.

Namun, Habibie melakukan *blunder* dalam wawancara itu. Ketika diminta tanggapannya mengenai orang-orang Cina yang hengkang dari Indonesia setelah kerusuhan Mei, Habibie menunjukkan sikap yang tidak simpatik. Ia terkesan tidak begitu berharap orang-orang Cina balik ke Indonesia. Sebab, posisi mereka bisa digantikan oleh anggota masyarakat lain.

"Jika masyarakat Cina tidak mau kembali, karena mereka tak percaya negeri mereka sendiri, saya tak bisa memaksa. Tak seorang pun bisa memaksa mereka," ujar Habibie. "Tapi, apakah Anda pikir kami akan mati?" katanya sambil tertawa. "Posisi mereka akan diisi oleh orang lain."

Gilanya, pernyataan senada kembali diulangi ketika ditanya oleh majalah *Business Week* edisi 3 Agustus ini. Katanya, "Akan sangat, sangat menyedihkan jika perekonomian 211 juta orang Indonesia mesti menggantungkan diri pada satu kelompok etnis tertentu."

Ada anggapan bahwa pernyataan Habibie itu didasari kepentingannya untuk memberikan kesempatan pada konco-konconya dalam dunia bisnis. Namun yang terjadi, kepercayaan dunia bisnis jadi makin memudar terhadapnya. Padahal, seperti diberitakan media massa, akibat kerusuhan Mei, sedikitnya 100.000 orang Cina telah meninggalkan Indonesia.

Kepergian orang-orang Cina itu, telah menambah parah perekonomian Indonesia. Diperkirakan oleh *Business Week*, seratus milyar dolar AS telah terbang sejak kerusuhan Mei terjadi dan 60 milyar dolar AS di antaranya telah parkir di Singapura. Ribuan tenaga profesional telah pindah ke Singapura, Malaysia, Thailand, Selandia baru dan Amerika Serikat. Sementara akibat perusakan 3.000 toko milik orang Cina di pulau Jawa saja, telah mengakibatkan melonjak tingginya harga-harga kebutuhan sehari-hari.

Adanya pernyataan Habibie yang tidak simpatik itu jelas memperburuk keadaan. Etnis Cina asal Indonesia yang kini berada di luar negeri makin enggan untuk kembali ke Indonesia. Tidak hanya itu, etnis Cina di negara-negara tetangga pun merasa tak aman untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan, di Taiwan ada seruan untuk memboikot perdagangan dengan Indonesia. Sementara di Hongkong, ribuan massa yang didukung partai-partai terkemuka, berdemonstrasi di depan Konjen Indonesia menuntut pemerintahan Habibie bersikap serius menindaklanjuti pemeriksaan terhadap para penjarah dan pemerkosa.

Kini, agaknya Habibie harus menerima kenyataan bahwa ia tidak dipercaya oleh pasar. Para pengamat kritis dari dalam dan luar negeri masih menganggapnya sebagai bagian dari persoalan. Sehingga, ia harus diganti dulu, baru akan ada pemulihan ekonomi di Indonesia.

Para konglomerat di Indonesia memilih bersikap *wait and see* selama Habibie masih menjadi presiden. Mereka mensyaratkan jaminan keamanan bagi pengusaha keturunan Cina. Menurut Mochtar Riady, bos Grup Lippo, selain jaminan keamanan, yang mereka tunggu-tunggu adalah ketegasan dari pihak ABRI dan pemerintah terhadap para penjarah dan pemerkosa.

Itulah yang mesti secara serius dilakukan oleh pemerintah Habibie. Semata-mata bukan untuk mengembalikan kepercayaan saja, tapi karena tindakan penjarahan dan perkosaan itu memang biadab. ■

■ POLITIK

Rusuh Yogya Provokasi Intel

Sebelas perwira Kopassus diseret ke pengadilan pekan ini. Tangan Jenderal Subagyo dipinjam untuk menghukum Prabowo. Soeharto tetap tak tersentuh.

Berbeda dengan perayaan 27 Juli di Jakarta, acara yang sama di Yogya yang diselenggarakan sehari sebelumnya (26/7) berbuntut rusuh. Tercatat, dua belas warga PDI menderita luka. Peristiwa terjadi di tiga tempat kejadian, Jl. KHA Ahmad Dahlan, Jalan Karang Kajen, dan Jalan Wahid Hasyim. Di Jl. KHA Ahmad Dahlan dimana kekerasan berawal, satu orang ditusuk di bagian antara dada dan lengan, satunya lagi dipukul di bagian belakang kepala dengan kayu hingga berdarah.

Korban yang tidak mau disebut namanya, saat ditemui *Xpos* menceritakan, mereka waktu itu (jam 14.00) baru saja pulang dari acara peringatan 27 Juli yang berlangsung dengan damai. Ketika melewati Jl. KHA Ahmad Dahlan (1 km dari alun-alun), tiba-tiba rombongan mereka diserang dari belakang dengan pukulan kayu. Dia sempat terjatuh, temannya yang berupaya mengejar dihadang dengan tusukan hingga tersungkur. Penyerang yang berperawakan tegap melarikan diri ke arah Kampung Kauman yang ada di sisi selatan Jl. KHA Ahmad Dahlan. Korban luka tusuk dibawa ke RS Muhammadiyah, sementara lainnya mengajak rombongan PDI yang lewat untuk mengejar. Tapi setelah sampai di depan Kauman, pintu gerbang kampung telah digembok.

Kampung Kauman Yogya dikenal sebagai daerah basis PPP. Namun bila siang, kampung padat yang jalanannya sempit dan berliku-liku ini relatif sepi karena penduduk laki-lakinya bekerja. Seorang warga yang ditanyai tidak tahu menahu adanya orang yang berlari ke wilayah tersebut meskipun dia ada di rumah saat hari kejadian.

Pada saat yang hampir bersamaan, ricuh juga terjadi di Karangkajen. Konvoi massa PDI, entah bagaimana awalnya, ada yang cekcok mulut dengan seorang tak dikenal yang melecehkan PDI. Adu mulut dilanjutkan adu pukul, sampai muncul orang ketiga bersenjata tajam menyerang warga PDI yang tengah berkelahi hingga perkelahian terhenti dan penyerang kabur. Mendengar adanya serangan ke massa PDI, Satgas PDI segera menuju ke tempat kejadian. Tapi kericuhan sudah selesai saat mereka tiba. Justru ketika balik ke Kantor DPC-PDI di Jl. Veteran, mereka menjumpai dua sepeda motor yang dibakar di depan gedung. Kantor DPC sendiri hangus disambar api tapi tidak sampai habis terbakar. Teriakan-teriakan kemarahan mengarah ke PPP yang disangka mengacaukan acara. Sekelompok massa PDI yang terbakar langsung melempar api ke Kantor DPC PPP yang ada di seberang jalan. Tak ayal, markas PPP pun habis dimakan api berikut perabot meja, almari, dan berkas-berkasnya.

Photo: Istimewa

■ **Peringatan 27 Juli:** Aman di Jakarta, rusuh di Yogya

Tak cukup di Jalan Veteran, massa PDI yang marah kemudian seperti digiring menuju Posko Satgas PPP di Jalan Janturan. Saksi mata melihat bahwa provokator massa yang lantang berteriak mengobarkan amarah massa sama orangnya dengan intel-intel polisi yang sering mengawasi demonstrasi mahasiswa di Boulevard Kampus UGM. Sementara itu, Satgas PPP di Janturan sudah mendapat informasi bahwa markas mereka akan diserang massa PDI. Mereka bersiap dengan senjata tajam seperti pedang dan arit. Situasi memanas, kedua pihak baku lempar batu.

Tidak lama, kira-kira sepuluh menit, serombongan aparat kepolisian pun berdatangan untuk melerai. Tembakan peringatan diarahkan ke udara sampai enam kali. Massa kedua belah pihak pun berlarian kabur, meninggalkan arena yang memakan sebuah mobil sedan Mazda AB 218 ZN dengan kaca remuk pecah dan *body* penyok-penyok.

Ketua panitia peringatan, Cindelaras Yulianto dan Ketua DPC PPP Syukri Fadholi, mensinyalir bahwa ada usaha untuk memecah belah PPP dan PDI Yogya. Dasarnya adanya kesamaan waktu dan metode untuk menyulut kemarahan massa. Sedangkan yang me-nyerang awak PDI sama sekali tidak dikenali sebagai warga PPP tetapi memanfaatkan simbol-simbol yang menjurus ke PPP seperti Kauman dan teriakan Allahuakbar. "Mere-ka ini harus diusut tuntas. Kami juga meminta agar pi-hak keamanan melakukan pengusutan secara profesional dan proporsional. Jangan hanya menyalahkan kegiatan kami yang melibatkan banyak orang," tegas Cindelaras.

Sementara itu Syukri Fadholi menga-takan, "Selama ini hubungan kami dengan PDI tidak ada masalah, Dan munculnya aksi bakar-bakaran tersebut saya kira tidak dilakukan oleh massa PPP maupun pihak tertentu yang menginginkan acara PDI tersebut diwarnai kerusuhan".

PDI dan PPP di Yogya memang dikenal akrab. Saat peringatan, pasukan Banser NU juga turut membantu menjaga keamanan. Pada waktu pemilu tahun 1997, warga PPP dan PDI bersatu dalam kampanye Mega Bintang. Sedang dalam pemilu sebelumnya tahun 1992, warga PPP dan PDI juga bersatu menggelar kampanye golongan putih (Golput) dan melakukan aksi diam serta penurunan bendera hijau maupun merah ketika ada larangan kampanye di jalan raya. ■

Mari Dukung

DIALOG NASIONAL UNTUK DEMOKRASI

Dialog Nasional
15-16 Agustus 1998
di Manggala Wanabakti

Pesta Rakyat
17 Agustus 1998
di Tugu Proklamasi

Sekretariat:
Jl. Kampung Melayu Kecil V No. 24, Bukit Duri Tanjakan, Jakarta 12840.
Tel/Fax: (021) 829.1657

Kebiadaban Kopassus di Aceh

Operasi yang digelar Kopassus di Aceh sejak 1989 menghasilkan penculikan, pembantaian dan perkosaan. Apa peran Letjen Prabowo?

Hari-hari belakangan, di Aceh, terutama di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Timur digemparkan pengakuan-pengakuan korban kebengisan Kopassus. Ini karena kedatangan Tim Pencari Fakta (TPF) DPR RI yang dipimpin Letjen (Purn) Hari Sabarno dan kegiatan Tim Relawan Forum Peduli Hak Asasi Manusia (FP-HAM), forum yang dibentuk sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) Aceh. Baik TPF DPR maupun FP-HAM, sama-sama menyusur desa-desa yang paling parah terkena operasi militer Kopassus.

Pengakuan yang diterima baik TPF-DPR maupun FP-HAM amat mengejutkan. Laporan-laporan yang mengalir, sebagian besar dari para perempuan Aceh menunjukkan, pembantaian, penghilangan orang dan perkosaan telah terjadi secara massal sejak tahun 1989, ketika operasi militer besar-besaran terhadap Gerakan Aceh Merdeka dilancarkan.

"Saya ditangkap di rumah bersama suami saya. Mereka memperkosa saya secara bergiliran. Saya juga disiksa sebelum dilepas tiga hari kemudian," ujar seorang perempuan bernama CS (42) kepada TPF-DPR. CS, penduduk Ujong Leubat, Bandar Baru, Kabupaten Pidie diperkosa tiga orang Kopassus di pos militer Jim Jim tahun 1992. "Setelah diperkosa, saya pingsan. Paginya, saya ditendang dan didorong ke sungai, disuruh mandi," ungkap CS.

Bersama suaminya, Mohamad Yunus, CS ditangkap satuan Kopassus. Mereka ditahan dan disekap di kamar terpisah. Setelah diperkosa, CS sempat disiksa sebelum dilepaskan tiga hari kemudian. Sejak itu, ia tak pernah melihat lagi suaminya lagi. Belakangan terdengar kabar Yunus sudah dieksekusi di depan umum di Desa Cibrek, Kembang Tanjong.

Seorang perempuan Aceh lainya, Ramlah, warga Simpang Jurong, Geumpang, menuturkan kepada TPF DPR-RI, tahun 1992 ia ditangkap satuan Kopassus. Mereka mencari suami dan anak-anaknya yang dituduh sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka. Karena suami dan anak-anaknya tak ditemukan, perempuan tua itu disiksa, ditelanjangi, digigitkan orang utan, dan dipatahkan tangannya. Setelah tentara menemukan suaminya Ramlah memang dibebaskan. Sayangnya, suami dan empat anaknya, laki-laki dan perempuan, dieksekusi dan dikubur dalam satu lubang di Geumpang.

Nasib buruk lainnya menimpa Khatijah dari Cot Baroh, Glumpang Tiga. Perempuan setengah baya itu menuturkan, ia diambil sejumlah anggota Kopassus setelah pulang mengunjungi anaknya di Malaysia pada Februari 1998. Ia dipukuli, ditelanjangi, dan siksaan lainnya selama 15 hari. April 1998, ia ditangkap lagi dengan tuduhan menyimpan senjata. Rumahnya digeledah, tapi senjata tak ditemukan. Khatijah pun ditangkap dan disiksa dan baru dibebaskan Juni 1998.

Nyak Ubit dan Aminah Ali, keduanya warga Kecamatan Mutiara, melaporkan suami mereka hilang hingga sekarang setelah diangkut satuan Kopassus Maret 1998. "Suami saya diambil hanya gara-gara di desa dia memegang dana IDT," kata Nyak Ubit dengan wajah duka. Hari Subarno pun takjub. Namun ia tak begitu saja percaya begitu saja, terutama soal keterlibatan Kopassus. Hari pun selalu menanyakan bagaimana mereka bisa mengenali para pelakunya dari Kopassus. Namun para pelapor mengatakan dengan mudah mengenali pelakunya, karena umumnya mereka sudah saling kenal.

Sepak terjang Kopassus di Aceh, memang sudah di luar batas kemanusiaan. Seorang wanita berjilbab warga Pidie, dengan nada terbata-bata mengisahkan dirinya ditelanjangi bersama wanita lain, oleh satuan Kopassus yang menangkap mereka. Wanita lainnya yang ikut ditangkap menuturkan kepada TPF DPR-RI alat vitalnya disetrum.

Hingga kini, jumlah kasus orang hilang, korban kekerasan, dan temuan mayat yang dilaporkan mencapai 1.679 kasus. Sundari, warga Desa Rambong, Mutiara, Pidie dengan nada sedih menuturkan suaminya hilang.. "Kalau suami saya masih hidup, tolong kembalikan. Kalau sudah mati, tunjukkan kuburnya," ujar Sudarni. ■

MEREKA DIEKSEKUSI DI DEPAN UMUM

Satuan Kopassus Paksa Penduduk Tonton Eksekusi. Kopassus juga larang penduduk menguburkan korban secara Islam.

Untung Soeharto jatuh. Kalau tidak kekejian yang dilakukan Kopassus di Aceh tak bakal terungkap. Mumpung masih ada ruang kebebasan sekarang ini, ratuasan orang Aceh memberikan banyak kesaksian.

Sejumlah penduduk Desa Lung Sa, Simpang Ulim, Aceh Timur melaporkan kepada Tim Relawan Forum Peduli Hak Asasi Manusia (FP-HAM), pekan lalu, bahwa mereka dipaksa satuan Kopassus tak berseragam menyaksikan eksekusi dua warga desa itu.

Dua warga desa itu, Sarjani Ibrahim (35), penduduk Lueng Sa dan Tegu Imum Budiman (50) penduduk Lueng Dua dieksekusi pada, 17 Ramadhan 1991, saat umat Islam menjalankan ibadah puasa. Hari masih pagi, satuan Kopasus menangkap kedua korban dan memborgolnya. Dengan mata tertutup kain hitam, korban diseret ke gawang lapangan bola desa itu. Para jagal lainnya memaksa penduduk menyaksikan eksekusi itu. Tengku Ibrahim, ayah Sarjani, yang juga pemain bola yang dikenal di Aceh, dipaksa ikut menyaksikan pembantaian itu. Setelah ratusan orang berkumpul, dua korban yang sebelumnya disiksa dan diikat pada tiang gawang, ditembak tepat di bagian kepala darah dan otak mereka berhamburan. Sarjani tewas seketika, meninggalkan Mardiana istrinya yang sedang hamil tiga bulan, setelah mereka kawin enam bulan lalu. Sebuah peluru lainnya menembus kepala Tengku Imum Budiman. Untuk melepaskan dua korban itu dari tiang gawab, tangan keduanya dipenggal hingga putus.

Penduduk diminta untuk menguburkan dua mayat itu. Namun ketika hendak dimandikan dan dikuburkan sengan cara Islam satuan khusus itu menghardik "Tanam saja bangkai itu. Untuk apa dimandiin," ujar salah seorang anggota satuan itu.

Laporan tindak-tindak kekerasan lainnya terus diterima para relawan yang menyusuri desa-desa di Aceh Utara. Selasa pekan lalu di Mesjid Pase, Panton Labu, Aceh Utara, FP-HAM juga menerima laporan kekejaman Kopassus dan satuan ABRI lainnya. Kesaksian itu dituturkan Ismail (49). Penduduk setempat melaporkan, pada 2 Agustus 1990, satuan militer mengeksekusi 17 orang dan mayatnya dibuang begitu saja di Seureuke. Mayat-mayat yang disaksikan Ismail itu sebagian telanjang dengan tubuh hancur. Ismail juga menyaksikan tentara mengeksekusi 20 korban lainnya di tempat yang sama. Salah seorang korban adalah Ilyas, kawan arkrab Ismail, yang kebetulan terbuka matanya. "Ilyas meminta tolong kepada saya untuk menyampaikan pesan pada ayahnya," ujar Ismail. Memang, hingga kini, Ilyas memang tak pernah kembali.

Kesaksian-kesaksian ini membuat tokoh-tokoh Aceh geram. Tak kurang, Ketua DPRD Tk I Aceh Mayjen (Purn) HT Djohan. Orang asli Aceh, mantan Danrem 011/Lilawangsa ini meminta agar Presiden dan Panglima ABRI untuk menarik satuan-satuan Kopassus yang kini berada di Aceh. Wakil Ketua DPRD Aceh, Yusri Hajerat, mengatakan pemerintah pusat hendaknya menghapus operasi militer yang digelar di Aceh mulai tahun 1989, terutama di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Timur. ■

Hasil TPF Cacat Hukum

Nasib 14 korban penculikan semakin tidak jelas. Para tersangka akan segera diajukan ke Pengadilan. Berkas perkaranya dinilai cacat hukum.

Ny Tuti kembali menangis di kantor KONTRAS, Jl Diponegoro sepulangnya dari dialog dengan Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto, Kamis (30/7). Selain kabar anaknya yang semakin tidak jelas, ia merasa terpingpong oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan warga negara.

Ia mengaku, selama mencari anaknya Yani Afri alias Rian ia sudah mendatangi sejumlah instansi militer misalnya Kodim Jakarta Utara, Kepolisian, Ka Puspom dan bahkan Menhankam Pangab. Dari upayanya mencari, ia pun hanya memperoleh kesimpulan: kondisi Rian semakin tidak jelas.

Ia sempat sedikit terhibur ketika beberapa korban penculikan yang sudah kembali menceritakan pernah bertemu dengan Rian di dalam sel penyekapan. Namun Rian dikeluarkan lebih dulu dibanding mereka, walaupun sampai saat ini pihak keluarga tidak mengetahui keberadaannya. Tetapi cercahan harapan Ny. Tuty menjadi pudar ketika Puspom mengatakan bahwa semua korban sudah tidak ada lagi di tempat penyekapan. Bahkan tempat pe-nyekapannya pun —menurut isu-isu yang beredar— sudah diratakan dengan tanah.

Repro: Sinar Pagi

■ **Hilang:** Nasib 14 korban penculikan belum jelas

Dan Kamis lalu, Jenderal Wiranto kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui keberadaan 14 orang korban penculikan. Artinya, institusi tertinggi di ABRI yang mempunyai aparat intelijen canggih sampai tidak mengetahui keberadaan para korban, "Maka hanya ada dua kesimpulan. Yaitu pertama memang mereka sudah meninggal atau para penculik membuangnya di tempat yang tidak memungkinkan mereka bisa kembali," kata Munir, Koordinator Komite Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS).

Hasil pertemuan Kontras dengan Wiranto disebut-sebut oleh Munir tidak menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Bahkan cenderung semakin memprihatinkan. Pihak-pihak yang patut diduga terlibat dalam kasus penculikan hingga kini tidak juga diperiksa. Misalnya mantan Presiden Soeharto, mantan Pangab Jenderal Feisal Tanjung, mantan Danjen Kopassus, Letjen Prabowo dan Mayjen Muchdi, mantan Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsudin, mantan direktur Mabes Polri Mayjen Nurfaizi dan beberapa penanggung jawab institusi seperti BIA dan Mabes Polri.

Ketidakjelasan nasib beberapa korban penculikan dinilai oleh Kontras sebagai kerangka untuk menghindari pertanggungjawaban hukum akibat tindak penculikan dan tindakan lain yang mengikutinya. POM ABRI yang mempunyai informasi dari hasil penyidikan terhadap 11 tersangka sampai saat ini tidak juga mengumumkannya kepada masyarakat. Bahkan mereka buru-buru akan menyidangkan kasus tersebut di saat 14 orang korban penculikan lainnya belum kembali.

Maksudnya, materi dakwaan belum lengkap jika tidak memeriksa 14 korban lain. Sebab semua saksi menyatakan pernah satu sel dengan para korban yang lain. Itu artinya, mereka diculik dan disekap oleh kelompok yang sama, sehingga informasi dari korban atau mengenai keberadaan mereka amat terkait dengan pasal tuduhan yang akan dikenakan terhadap tersangka.

"Kalau di antara korban penculikan itu ada yang meninggal, itu artinya pasalnya tidak hanya menculik atau menyekap korban. Tapi melakukan pembunuhan berencana, yang konsekwensi hukumnya lebih tinggi" tegas Munir.

Ketergesa-gesaan pelimpahan berkas perkara ke Oditur Militer memunculkan kecurigaan baru perihal keseriusan ABRI menangani kasus ini. POM ABRI menggiring penyidikan ke 11 tersangka yang merupakan anggota Kopassus itu hanya terbatas pada kasus penculikan terhadap diri Aan Rusdiyanto, Mugiyanto dan Nezar Patria yang diduga terlibat kasus meledaknya bom di rumah susun Klender.

Padahal, seperti penuturan saksi-saksi lain, penyekapan terhadap Aan, Mugiyanto dan Nezar, juga di tempat yang sama dengan korban-korban penculikan yang lain. Dan ke 11 tersangka itu pula sudah seharusnya mengetahui keberadaan para korban penculikan yang saat ini belum kembali. Dari mereka sebenarnya bisa diperoleh informasi mengenai korban yang belum pulang.

Jika benar, POM hanya akan membatasi penyidikan ke 11 tersangka pada penculikan terhadap tiga korban itu, maka jangan berharap banyak bahwa kasus penculikan akan terungkap seperti tuntutan masyarakat. Dan Indonesia akan kembali menjadi bulan-bulanan kecaman luar negeri karena kasus ini akan masuk dalam agenda pembicaraan sidang PBB di Jenewa, awal Agustus nanti. ■

Diskriminasi Pelepasan Tapol

Pelepasan Tapol/Napol terkesan sangat diskriminatif. Mereka dijadikan barang dagangan oleh Pemerintahan Habibie.

Tiga tapol Partai Rakyat Demokratik (PRD) yaitu Wilson, Ken Budha Kusumandaru (keduanya di penjara LP Cipinang), Coen Husein Pontoh dan Mohamad Soleh (LP Kalisosok Surabaya) akhirnya menyerah dan mau keluar dari penjara setelah *ngotot* tetap akan berada di tahanan sebelum pemerintah Habibie melepaskan semua Tapol/Napol. Ketiga aktifis itu awal pekan ini telah bebas bersama 46 tapol yang lain.

Pembebasan tapol/napol yang sudah memasuki gelombang ke empat. Tapi tindakan pemerintah dinilai banyak pihak tidak mencerminkan kesungguhan hati dari pemerintah Habibie dalam melaksanakan reformasi total. Sebab, masih ada sekitar 200 orang tapol/napol yang masih belum dibebaskan.

"Pemerintah Habibie masih menempatkan musuh-musuh politik rejim Soeharto sebagai musuh politiknya juga," tulis pernyataan yang ditandatangani Ketua PRD Budiman Sujatmiko dan sekretaris

Petrus Haryanto.

Oleh karena itu PRD selain membuat pernyataan, Kamis lalu (30/7) melakukan demonstrasi di Departemen Kehakiman, bersama sejumlah aktifis dari OPM dan Timor Timur, menuntut pembebasan Tapol/Napol tanpa diskriminasi.

Sementara itu protes perihal diskriminasi tapol juga dilakukan oleh enam belas tahanan politik di LP Cipinang. Dalam pernyataannya mereka menilai pemerintah menempatkan masalah Tapol/Napol sekadar barang dagangan politik untuk kepentingan diplomasi Internasional.

Pemerintahan Habibie dinilai tidak serius dalam melakukan rekonsiliasi nasional. Karena, jika rejim Habibie berniat baik, maka para korban politik rejim Soeharto seharusnya dijadikan salah satu bagian dari upaya rekonsiliasi itu.

"Hanya dengan demikianlah, proses reformasi berjalan di jalur yang tepat. Tidak ada redormasi sejati tanpa rekonsiliasi nasional. Dan tidak ada rekonsiliasi nasional tanpa pembebasan seluruh tapol/napol" tulis pernyataan yang antara lain ditanda tangani oleh aktifis PRD, OPM, Timor Leste, dan tapol korban peristiwa 1965.

Sejak awal memang sudah tampak ketidakseriusan pemerintahan Habibie membebaskan Tapol Napol. Persyaratan-persyaratan yang diciptakan sebagai acuan pembebasan diperketat dan cenderung meligitimasi perlakuan tidak adil yang dilakukan rejim Soeharto. Baik itu terhadap tapol peristiwa 1965, OPM, Timor Timur, Aceh Merdeka, Lampung, PRD dan sejumlah tapol yang lain. Pemerintah, melalui Menteri Kehakiman, Muladi memutuskan tapol/napol yang bisa bebas adalah mereka yang tak tersangkut G30S PKI, pemberontakan bersenjata dan tidak terlibat tindak pidana kriminal.

Tetapi kriteria itu menjadi semakin tidak jelas ketika sejumlah aktivis PRD yang tidak masuk dalam kategori itu masih tetap dibiarkan mendekam di penjara. Dan kriteria tersebut terkesan kaku dengan tidak mempertimbangkan masalah kemanusiaan.

Orang setua Abdul Latief (73), Asep Suryaman (73), Bungkus (71), dan Natanael Marsuddi (71).yang dituduh oleh rejim Soeharto terlibat peristiwa G30S, tidak diberi hak menghirup kebebasan yang (maaf) hanya beberapa waktu saja. Dihitung dari segi politik pun sebenarnya pembebasan mereka tetap akan menguntungkan pemerintah dibanding dengan kemungkinan kerugian yang akan dialami karena aktifitas politik mereka setelah bebas.

Watak rejim memang tidak berubah. Artinya, rejim Soeharto hanya ganti kulit. ■

Partai untuk Reformasi

Amien Rais bikin partai bersama para tokoh MARA.** Platform-**nya lebih dekat dengan sosial demokrat. Sebuah percobaan penting seorang tokoh Islam.

Penantian agar euforia politik itu mereda, sampai batasnya juga. Amien Rais, tokoh reformasi yang ikut menumbangkan Soeharto, akhirnya memutuskan untuk membentuk partai politik. Bukan dengan tokoh-tokoh KISDI atau Dewan Dakwah yang lama membujuk Amien, tetapi dengan sejumlah intelektual dan reformator yang bergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MARA). Nama partainya pun, bila tak ada perubahan, masih membawa kata-kata amanat, Partai Amanat Bangsa (PAB).

Kepastian pembentukan PAB itu, dikemukakan Amien di Galeri Cemara, Senin 27/7. Ia didampingi oleh tokoh-tokoh MARA, antara lain Goenawan Mohamad, Albert Hasibuan dan Mochtar Pabottingi. "Partai itu akan diluncurkan pertengahan Agustus, sekitar tanggal 17," kata Amien, yang tak lama setelah konperensi pers itu langsung bertolak ke Jepang. Amien akan berada di negeri Sakura itu beberapa hari, menghadiri undangan JANNI, organisasi masyarakat Jepang yang peduli tentang masalah Indonesia.

> "INTI *PLATFORM*-NYA ITU AKAN LEBIH DEKAT DENGAN SOSIAL DEMOKRAT," KATA SEORANG ANGGOTA BADAN PEKERJA MARA.

Bagaimana wujud PAB memang menarik untuk dicermati. Dengan latar belakang dukungan Islam, Muhammadiyah, Amien tampaknya akan membuka komunitas politik baru yang lebih plural. Hal itu bukan hanya tampak dari keikutsertaan Albert Hasibuan yang pemeluk Kristen, atau Christianto Wibisono yang keturunan Cina; tetapi lebih penting lagi, identitas politik baru itu akan tercermin dalam *platform* dan program kerja partai yang sedang dipersiapkan. "Inti *platform*-nya itu akan lebih dekat dengan sosial demokrat," kata seorang anggota Badan Pekerja MARA.

Menurut Amien, ide sosial demokrat —yang intinya pada perjuangan untuk demokrasi dan keadilan sosial— cocok dengan nilai-nilai Islam. "Di Muhammadiyah ide sosial demokrasi itu diterima. Tidak ada masalah sama sekali," kata Amien dalam satu kesempatan. *Platform* lengkap tentang partai baru ini dan program-programnya, akan disusun dalam satu rapat kerja 5-6 Agustus mendatang. Akan berpartisipasi dalam rapat kerja itu, selain Amien Rais dan Emil Salim, antara lain: Arif Ariman, Faisal Basri, Anggito Abimanyu, Affan Gafar, Mochtar Pabottingi, Ismid Hadad, dan Goenawan Mohamad. Tokoh muda Pius Lustrilanang, yang juga Sekjen Aldera, dikabarkan juga akan berpartisipasi dalam pembentukan PAB.

Partai ini, tampaknya juga akan memulai tradisi baru dalam pencalonan presiden. Sejak awal, Amien yang dipromosikan menjadi Ketua PAB, menunjukkan kesiapannya untuk dicalonkan dalam pemilihan presiden. Seorang anggota Badan Pekerja MARA, mengatakan, calon presiden dan wakilnya dari PAB akan berupa paket: Amien Rais dan Emil Salim. "Ini untuk membiasakan agar partai-partai tak hanya berlomba menjadi anggota parlemen," kata Amien Rais.

Usaha Amien Rais merangkul berbagai kalangan itu, disambut baik oleh berbagai pihak. Sebab meskipun sebelumnya sudah ada 11 partai berbendera Islam yang mengaku terbuka, tampaknya baru PAB yang dengan jelas sejak berdirinya mengajak kalangan non-muslim duduk di kepengurusan. Usaha ini juga penting dipandang dari segi perkembangan Islam, dan membuka satu pertanyaan: Mung-kinkah ada Partai Islam Demokrat, seperti halnya Kristen Demokrat di negara-negara Eropa. "Hal ini belum pernah dicoba oleh tokoh Islam di dalam negeri," kata satu pengamat.

Meskipun tampak mempunyai harapan besar, PAB bukannya tak punya hambatan. Mangunwijaya pernah melontarkan kritik dalam pertemuan MARA, bahwa partai yang dibikin ini, kemungkinan akan jadi partai elitis yang kalah dalam pemilihan umum. Hal ini sangat mungkin terjadi, apabila para perintis PAB tidak sedari dini meletakkan sifat kedekatan dengan massa dalam pengembangan partainya. "Walaupun penuh dengan intelektual, partai ini kurang bisa menyentuh emosi pemilih seperti yang dengan baik dinikmati oleh Megawati," ujar pengamat lain.

Jadi, selamat datang. Politik bukan sekedar latihan intelektuil. ■

Leopold Sudaryono, Anggota Presidium KIPP Indonesia:

"Tak Ingin Dimanipulasi, Awasi Pemilu"

Partai-partai politik terus bermunculan. Penggalangan kekuatan dilakukan di mana-mana, agar dapat bertarung dalam pemilu multipartai tahun 1999. Kendati, tak ada jaminan sistem pemilunya akan lebih baik, sepertinya pemilu tahun depan akan tetap terselenggara. Dalam konteks inilah, pengawasan pemilu jadi penting. Sebab, dalam sistem pemilu terbaik sekalipun, potensi kecurangan dalam pelaksanaan masih mungkin terjadi. Apalagi bila sistemnya buruk. Pekerjaan inilah yang dilakukan organisasi independen pemantau pemilu seperti NAMFREL (*National Citizen Movement for the Free Election*) di Filipina dan *Pollwatch* di Thailand. Di Indonesia, juga terdapat KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu). Setelah punya pengalaman buruk direpresi aparat keamanan dalam pemilu 1997 lalu, kini KIPP mulai bersiap-siap untuk pemilu tahun depan. Berikut petikan wawancara *Xpos* dengan Leopold Sudaryono, anggota presidium KIPP:

Apa potensi kecurangan itu pemilu 1997?

Soal jual-beli suara atau *vote-buying*. Kami melihat, sebagian besar partai-partai baru yang tak punya bukti berjuang untuk demokrasi akan kesulitan merebut basis massa. Mengingat, sempitnya jangka waktu pemilu. Hingga cara yang paling mungkin adalah dengan membeli suara. Tentunya, partai reinkarnasi Golkar yang punya dana dan infrastruktur yang kuat.

Memangnya rakyat mau dibeli suaranya?

Jual-beli suara sangat mungkin terjadi di tingkat desa. Apalagi dengan situasi krisis ekonomi. Proses yang sama ditemukan oleh pemantau pemilu independen di Thailand, *Pollwatch*. Mereka menemukan kenyataan, praktek seperti itu, oleh masyarakatnya dianggap sebagai hal yang wajar. Sehingga, mereka perlu melakukan kampanye besar-besaran untuk menyadarkan rakyat, bahwa suara adalah hak yang tidak dapat diperjualbelikan. KIPP juga akan menghadapi persoalan yang sama.

Photo: Istimewa

Kecurangan lainnya?

Kami melihat, ada persoalan dalam proses pembuatan produk UU untuk pemilu nanti. Sesuai agenda pemerintah, UU Pemilu, Susunan dan Kedudukan MPR/DPR serta Partai Politik akan dikeluarkan bulan Agustus ini. Namun, sampai sekarang, proses sosialisasinya tidak terbuka dan tidak melibatkan tokoh-tokoh cendekiawan, LSM serta kelompok masyarakat lainnya. Fotokopi RUU-nya pun tidak disebarluaskan. Ini proses yang sama ketika Paket 5 UU Politik pada tahun 1985 diproses. Jadi mengandung potensi penekanan dan intervensi pemerintah yang sama. Sebab, proses pembuatannya sama-sama tertutup.

Tapi kan ada yang membuat seminarnya?

Itu hanya sebatas pokok-pokok pikiran. Jika pemerintah Habibie menginginkan pemilu 1999 sebagai sesuatu yang secara substantif baru, prosesnya harus memungkinkan masyarakat untuk ikut merumuskannya. Kini, pemerintah Habibie malah membuat pernyataan agar masyarakat jangan dulu berpikir politik.

Apa maksudnya pemerintah menyatakan itu?

Untuk memudahkan proses konsolidasi kekuatan politik rezim ini.

Bagaimana sebaiknya masyarakat bersikap?

Jika masyarakat tidak menghendaki proses sejarah politik Orde Baru terulang, ini saatnya menginterupsi. Libatkan diri sejak dini untuk mengawasi tahap-tahap dan materi pembentukan instrumen-instrumen politik baru pemerintah Habibie. Kalau tak mau itu jadi alat untuk mempertahankan status quo.

Anda setuju pemilu dipercepat?

Ada dilemanya. Kita menginginkan pemilu dipercepat supaya proses kebangkitan kembali rezim Soeharto bisa dicegah secepat mungkin, dan sebelum Habibie melakukan konsolidasi —*toh* dua-duanya sama saja. Namun, apakah jika pemilu dipercepat, pada Oktober tahun ini misalnya, partai-partai yang baru bertumbuh akan siap? Saya kira mereka masih membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun basis massa. Masalah lain, bila pemilu dipercepat persiapan UU Pemilunya makin tidak matang.

Tapi kalau pemilunya lama...

Kita sesegera mungkin butuh pemerintah baru yang mendapat legitimasi rakyat untuk mengatasi krisis ekonomi. Kepercayaan pasar dan investasi sangat tergantung dari legitimasi moral dan politik rakyat terhadap pemerintah yang baru. Habibie jelas-jelas tidak dapat kepercayaan. Meskipun telah melakukan sejumlah pembenahan politik formal, secara substansial tidak ada perbedaan. Kita butuh pemerintahan baru yang bebas dari dosa-dosa politik rezim lama. Yang terdiri dari orang-orang yang terbukti memperjuangkan demokrasi dan hak-hak dasar masyarakat. Bukan para pembalap di tikungan.

Dalam situasi demikian, tentu sulit mengharapkan sistem yang baik bila pemilu jadi dilaksanakan tahun depan...

Dari proses pembuatan UU-nya saja sudah tidak ada jaminan. Apalagi, dalam tahap pelaksanaannya nanti.

Kalau pemilunya tetap berlangsung, bagaimana sebaiknya masyarakat?

Lihat dulu hasil formulasi UU-nya. Jika hasilnya cuma akan menguntungkan kekuasaan, maka pemilu itu bukan milik rakyat. Terserah rakyat. Mau boikot atau apa... Jika ada perbaikan-perbaikan, masyarakat pantas untuk memberikan kepercayaan.

Bila sistemnya kurang baik, KIPP akan tetap mengawasi pelaksanaannya?

Kendati sebagian masyarakat menolak pemilu, kendati cuma satu orang yang ikut pemilu, pelaksanaan haknya tetap harus dilindungi. KIPP juga akan memantau hak orang yang tak memberikan suaranya, supaya tidak dimanipulasi untuk kepentingan penguasa. Bagi seluruh masyarakat, apapun pilihan politiknya: memilih atau tidak memilih, kalau tidak ingin pilihannya dimanipulasi, pilihan terbaik adalah ikut mengawasi pemilu. Jadi, mari sama-sama mengawasi pemilu. ■

Xpos

HENTIKAN BAYAR UTANG

Diterbitkan oleh:
Komunitas Informasi Terbuka
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: **http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp**
PO.Box 22202 London SE5 8WU, United Kingdom

Ganti ongkos cetak Rp. 1000,- Terbit seminggu sekali

Partai-Partai Cegah Kembalinya Golkar

Semangat Asal Bukan Golkar (ABG) jadi pengikat berbagai partai. Kelebihan Golkar dalam soal dana dan infrastruktur tak penting lagi, malah digerogoti dari dalam.

Partai yang tumbuh bak jamur di musim hujan, hingga awal Agustus ini mencapai hampir 50 partai, ternyata punya kesamaan sikap politik. Mereka umumnya, punya motif untuk mencegah Golkar kembali ke panggung politik. Partai-partai itu memandang Golkar sebagai kepanjangan tangan Orde Soeharto, yang mesti dikalahkan beramai-ramai. Kalau perlu dikeroyok.

Koalisi sebelas partai kecil dengan membentuk Forum Partai, misalnya, terjadi pekan lalu. Dimotori oleh Sri Bintang Pamungkas (Ketua Partai Uni Demokrasi Indonesia), Ridwan Saidi (Ketua Masyumi Baru), dan Deliar Noer (Ketua Partai Umat Indonesia), Forum Partai itu menegaskan sikap, "yang penting mengalahkan Golkar." Untuk menyukseskan kerja besar itu, Forum Partai membuka diri terhadap bergabungnya partai-partai lain.

Semangat anti-Golkar, tampaknya juga muncul di kalangan aktivis mahasiswa. "Kita mesti memilih partai dalam pemilu mendatang, jangan Golput, supaya Golkar jangan sampai menang. Kita kampanye asal bukan Golkar," kata Teddy Wibisana, Ketua Solidaritas Indonesia, organisasi politik yang berbasis mahasiswa, petani dan pemuda urban. Solidaritas Indonesia, dalam rapat kerja pekan lalu, memutuskan untuk mendukung partai yang akan dibentuk Amien Rais dan MARA, yakni Partai Amanat Nasional

Partai Amanat Nasional (PAN), akan diumumkan pendiriannya 17 Agustus mendatang. Persiapan ke arah wujud partai itu, telah berminggu-minggu dilakukan, antara lain dengan rapat kerja, di Bogor, 5-6 Agustus lalu. Dalam rapat kerja yang dihadiri Amien Rais, tokoh-tokoh MARA, Muhammadiyah, Aldera dan intelektual dari Yogya dan Jakarta itu, berhasil disusun *platform* partai. PAN yang mencita-citakan tegaknya kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial itu, mendasarkan perjuangannya pada nilai-nilai: moral agama, kemanusiaan, kebebasan dan kemajemukan.

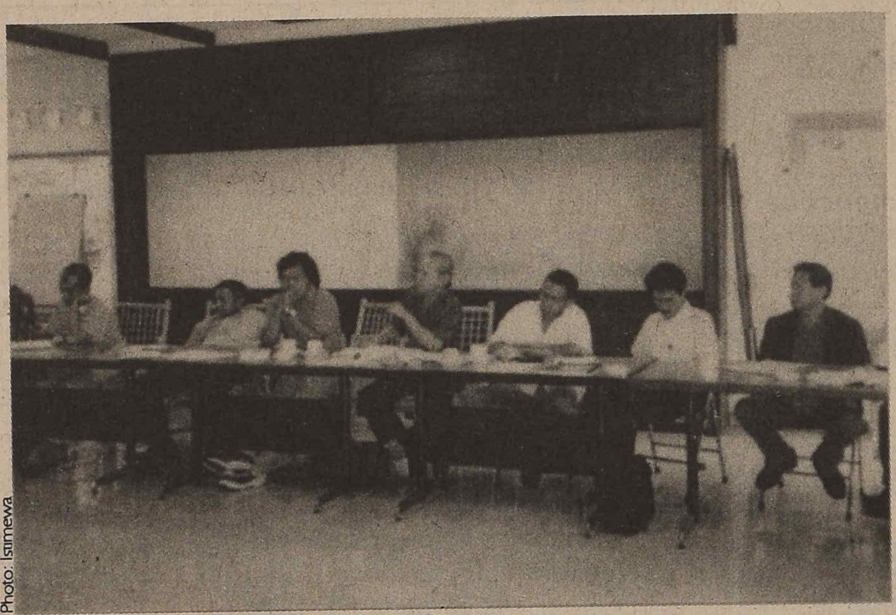

Photo: Istimewa

■ **Rapat Kerja PAN:** Mencita-citakan kedaulatan rakyat dan demokrasi

Yang menarik, dalam platform PAN itu, dibuat penegasan posisi politik untuk mencegah kembalinya Orde Baru dan pendukung-pendukungnya. PAN berpendirian krisis yang dialami Bangsa Indonesia berakar pada politik rezim Orde Baru yang melecehkan kedaulatan rakyat. "Karenanya partai ini menentang setiap usaha yang mencoba mengembalikan kekuasaan Orde Baru dan para pendukungnya ke panggung politik. Tatanan Orde Baru mesti diganti sama sekali," demikian *platform* PAN. Artinya, PAN akan menentang kembalinya Golkar —eksponen Orde Baru yang mencoba memanipulasi reformasi untuk mempertahankan kekuasaannya— ke panggung pemilu.

"Kita harus bekerja keras untuk mencegah kemenangan Golkar," kata Amien Rais, Ketua Partai Amanat Nasional, ketika membuka raker itu. Ia mengatakan PAN siap bekerjasama dengan semua komponen pro demokrasi, untuk menahan laju Golkar. Sebab, bila Golkar kembali berkuasa, maka reformasi yang dipelopori mahasiswa, akan menemui jalan buntu.

Politik mencegah kemenangan Golkar, meski tidak diucapkan, tampaknya juga menjiwai semangat PDI pimpinan Megawati yang berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) —partai milik warga NU. Dalam berbagai percakapan, aktivis PDI Megawati, menekankan pentingnya kerjasama kalangan pro-demokrasi untuk mengalahkan Golkar.

Berita Pekan Ini

Jenderal Tua Jatuhkan Habibie ...4
Konsolidasi Ditengah Reformasi ...6
Solidaritas Korban Perkosaan ...7
Dana Parkir Punya Siapa? ...10
Mana Hukuman Bagi Bankir ...11
"Ingin Tumbangkan Rejim Militer" ...12

Bukit Tengkorak

Pol Pot ternyata bukan hanya ada di Kamboja. Aceh pun punya. Bukan dalam bentuk individu, tapi lembaga yang bernama ABRI.

Akhir-akhir ini, kita memang mencatat banyak ironi tentang tentara yang sering mengklaim diri sebagai tentara rakyat. Belum kering kritik, bahkan hujatan akibat kasus penculikan aktivis; pembunuhan massal dan penyiksaan di Aceh meruyak ke permukaan, membuat citra ABRI kian terpuruk. Masih layakkah ABRI mengaku sebagai saptamargais?

Sesungguhnya, tragedi ABRI itu bukan karena mereka pada dasarnya orang jahat. Tetapi sistem kekuasaan berlebih, tanpa kontrol lah, yang membuat ABRI lepas kendali, terjerumus dalam kebijakan yang sombong : seolah bisa berbuat apa saja, tanpa kemungkinan dikenai sanksi. Kekuatan senjata menjadi alat pembungkam mulut rakyat. Selama lebih tiga dekade, rumus itu berjalan. Sampai Revolusi Mei yang dimotori mahasiswa membongkar tatanan kebohongan Orde Baru.

Kini, ABRI memang mencoba menampilkan imej lain. Setidaknya dalam retorika Pangab Jenderal Wiranto, yang menegaskan berkali-kali bahwa ABRI sedang berbenah memperbaiki diri.

Percayakah kita? Tipis memang. Sebab soal-soal ABRI, penyelewengan kekuasaan, bukanlah semata soal individu. Kalau ABRI ingin diperbaiki, ia mesti tunduk pada hukum, kelaziman tatanan masyarakat demokratis dan yang menghormati martabat. Bagaimana rakyat akan percaya ABRI berubah, kalau tetap minta jatah kursi di DPR 50? Atau 10% dari total kursi DPR. Bagaimana kita percaya ada perubahan di ABRI, kalau rebutan kursi gubernur seperti di Jawa Timur masih berlangsung?

Tanpa kerendahan hati, kesediaan untuk berubah secara institusional, kita cemas akan terulang tragedi seperti Bukit Tengkorak di Aceh. Ribuan orang hilang, disiksa dan mati, dikubur tanpa seorang pun kerabat tahu. ABRI akan makin terperosok dalam tindak kebiadaban, bila tak segera menyadari bahwa zaman telah berubah.

■ **LUGAS**

Emil Salim, Koordinator Gema Madani, berpendirian sama. Ia mengimbau semua kekuatan pro-demokrasi — terutama kelompok Mega, Gus Dur, dan Amien Rais— perlu merapatkan barisan untuk mencegah Golkar kembali berkuasa. Emil sendiri, tampaknya akan mendukung PAN yang *platform*-nya bersifat terbuka. Meskipun, mungkin, Emil Salim tak duduk dalam kepengurusan PAN, ia menyumbangkan gagasan sangat penting dalam pembentukan partai itu. Sebuah sumber di PAN menyebutkan, kemungkinan besar, Amien Rais dan Emil Salim akan diajukan sebagai paket calon presiden dan wakil presiden.

Penggembosan Golkar bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Munas Luar Biasa Golkar, yang mengangkat Akbar Tanjung ke pucuk pimpinan partai beringin itu, membuat kubu Edi Sudrajat kecewa. Banyak pendukung Edi, dari kalangan pensiunan jenderal membentuk Barisan Nasional, yang memilih sikap politik berdiri di belakang Megawati. Dalam kubu Barisan Nasional, antara lain ada Kemal Idris, Bambang Triantoro, Harsudiono Hartas, Eri Sudewo, Ali Sadikin, dan masih banyak lagi. "Orang tua meskipun ompong masih bisa menggigit juga. Walaupun hanya geli," kata Bambang Triantoro

Tantangan dari dalam yang lebih serius, agaknya datang dari Tim Sembilan - yang dimotori Siswono Yudohusodo dan Sarwono. Mereka akan menarik sebagian gerbong Kosgoro, MKGR dan SOKSI, untuk membentuk partai sendiri dalam waktu dekat. "Targetnya menggembosi Golkar dan mengambil infrastruktur yang ada," kata satu sumber yang dekat dengan Tim Sembilan.

Nah, bila begitu petanya, maka Golkar yang sering membanggakan kelebihan dana dan jaringannya, bukan tak mungkin akan kempes dalam pemilu nanti. Apalagi citra Golkar sebagai partai yang membawa kebangkrutan Bangsa Indonesia, tak bisa dilupakan pemilih. Golkar identik dengan krisis ekonomi, perpecahan bangsa. Sulit dibayangkan akan ada orang yang masih mau mencolok partai bikinan Soeharto itu. Dalam situasi itu, tampaknya orang akan memilih partai yang membawa harapan perbaikan bangsa. Bukan Golkar. ■

Partai Amanat Nasional, dengan Gagasan ke Depan

Partai Amanat Nasional, menyelesaikan *platform*-nya dalam rapat kerja 5-6 Agustus lalu. Beberapa pokok gagasan diringkaskan sebagai berikut:

POLITIK:

* PAN memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial
* Cita-cita partai ini berakar pada moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan
* PAN menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif
* Selama tidak memerintah, PAN berfungsi sebagai partai oposisi
* PAN membatasi masa jabatan presiden, paling banyak dua kali lima tahun
* Untuk mencegah disintegrasi dan eksploitasi pusat terhadap daerah, PAN terbuka terhadap gagasan bentuk negara serikat.
* PAN mendukung gagasan reformasi konstitusi
* Mencegah kembalinya kekuasaan Orde Baru dan pendukungnya. Tatanan Orde Baru mesti diganti sama sekali.
* ABRI tidak boleh mencampuri, apalagi mendominasi, urusan politik, ekonomi dan sosial.
* Polisi dipisah dari ABRI
* Kebebasan berpendapat dan berorganisasi di jamin
* Hak masyarakat atas informasi harus dihormati

PERGAULAN DUNIA:

* Menghormati hak semua bangsa menentukan nasib sendiri dan hubungan internasional berdasarkan kesetaraan
* Mendukung penyelesaian masalah Timor Timur melalui referendum di bawah pengawasan PBB

EKONOMI:

* Strategi pembangunan ekonomi Orde Baru mesti ditinggalkan
* Prioritas pembangunan: mengangkat penduduk dari lembah kemiskinan, memerangi pengangguran dan memperluas lapangan kerja
* Kebijakan afirmasi dibutuhkan untuk mem-bantu masyarakat lemah
* Perimbangan keuangan pusat-daerah
* Pemerintahan yang bersih dan efektif
* Anti Monopoli
* Partisipasi aktif dalam penyehatan ekonomi dunia
* Reformasi agraria, agar seluruh warga negara memiliki akses terhadap tanah
* Serikat buruh bebas memperjuangkan kepentingan buruh.

PEREMPUAN:

* Persamaan hak perempuan di segala lapangan kehidupan
* Perlu keadilan jender, peningkatan keterwakilan perempuan

LINGKUNGAN HIDUP:

* Lingkungan hidup mesti dilindungi dari keserakahan manusia ■

Dialog Nasional dan Pesta Rakyat:

Berpihak ke Rakyat Bawah

Dialog Nasional untuk Demokrasi akan ditutup dengan Pesta Rakyat. Idenya, menciptakan ruang kreasi untuk masyarakat bawah.

Bapak-bapak RT di kampung-kampung Jakarta kini tak perlu pusing lagi memikirkan dana untuk merayakan 17 Agustusan di wilayahnya. Tinggal pasang poster "Pesta Rakyat, Gratis!!!" dan memboyong warganya datang ke Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pas tanggal 17 Agustus 1998. Di sana akan ada festival pengamen jalanan yang bakal mengadu kreasi ciptaan lagu-lagu alternatif dan pro-demokrasi. Bagi anak-anak ada lomba menggambar dengan kertas yang disediakan panitia, sedangkan untuk remaja diselenggarakan lomba pidato atau orasi tentang reformasi.

Acara Pesta Rakyat ini ternyata adalah gawe dari Panitia Dialog Nasional. Penyelenggaraannya berangkaian dengan Dialog Nasional untuk Demokrasi yang digelar di Gedung Manggala Wana Bhakti, tanggal 15-16 Agustus 1998. Pada saat pelaksanaan nanti, panitia juga bekerja sama dengan Yayasan Pembela Tanah Air (Yapeta) yang beranggota para veteran pejuang kemerdekaan.

Menurut Paskah Irianto, koordinator acara Pesta Rakyat, saat ia datang ke pertemuan para veteran pejuang itu, Pesta Rakyat langsung mendapat sambutan hangat. Jadi nanti acaranya dibuka dengan upacara untuk mengenang para pahlawan, setelah itu pesta rakyat dibuka sampai sorenya ditutup dengan upacara bendera oleh para veteran. "Kita sama-sama orang-orang di luar sistem yang disingkirkan, ini saatnya rakyat yang selama ini ditindas melakukan sesuatu," cerita Paskah.

Idenya, memang Pesta Rakyat ini diperuntukkan bagi masyarakat luas, khususnya lapisan bawah. "Soalnya, selama ini masyarakat bawah hanya dicekoki omongan pejabat dan ahli-ahli pemerintah yang tidak memecahkan masalah. Biar masyarakat sekarang yang pidato, khususnya para remaja sebagai pemilik masa depan. Anak-anak yang tidak diberi kesempatan, diminta untuk menggambarkan apa yang ingin mereka ekspresikan," tutur Digul dari sekretariat panitia. Sepakat dengan apa yang diungkapkan Digul, Tri Agus sebagai aktivis yang biasa melanglang buana membenarkan, "Acara-acara pro-demokrasi di berbagai negara lazimnya juga dimeriahkan dengan lomba-lomba kreatif untuk masyarakat".

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar bisa menghubungi beberapa organisasi yang telah ditunjuk, seperti: -

- Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Jl. Cikini Raya 58 s-t Lantai 4 Jakarta Pusat, telp. 322084 (Pukul 10.00-15.00)
- Masyarakat Profesional untuk Demokrasi (MPD) Jl. Pengadegan Selatan IV/9 Kalibata Jakarta Selatan, telp. 7974181 (Pukul 18.00-21.00)
- Solidamor Jl. Pramuka Jaya Sari 9A Jakarta Pusat, telp. 4224079 (Pukul 10.00-21.00)
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jl. PAM Baru Raya 16 Jakarta Selatan, telp. 9183810, 5727018 (Pukul 10.00-21.00)
- Chia Jl. Tanah Merdeka 27 Jakarta Utara, telp. 4409668 (Pukul 10.00-21.00)

Sementara itu persiapan untuk Dialog Nasional sendiri juga kencang diorganisasi. Undangan ke berbagai organisasi sudah dikirim. Menurut Digul, sekretariat telah mengirim ke limaratusan organisasi di seluruh negeri, meliputi partai-partai, LSM, organisasi pemuda dan kesatuan aksi. Bagi organisasi pro-demokrasi yang belum mendapat undangan bisa menghubungi sekretariat di Jl. Kampung Melayu Kecil V/24 Bukit Duri Tanjakan, Jakarta Pusat, atau telp. (021)8291657.

Hampir seluruh partai diundang kecuali Golkar dan Partai Bulan Bintang. Terjadi perdebatan menarik ketika membahas Partai Bulan Bintang, tapi akhirnya forum memutuskan partai tersebut tidak diundang karena watak pemimpinnya termasuk Yusril Ihsa Mahendra, yang dinilai panitia oportunis dan anti-demokrasi.

Sedang untuk penyiapan materi, panitia membagi empat persoalan dasar: politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Nyaris setiap malam menjelang pelaksanaan ada diskusi mengenai materi dengan dukungan narasumber dari berbagai disiplin, akademisi maupun praktisi. Tercatat di antaranya seperti Faisal Basri dan Sri Mulyani dari FE UI. Fokus dari penyusunan materi itu pada akhirnya bermuara pada kepentingan masyarakat lapisan bawah. Sebab, menurut Ratna Sarumpaet, koordinator umum, "Rakyat bawahlah yang menjadi korban pertama dan paling banyak dari krisis ini, maka prioritas segala pemecahan persoalan harus ditujukan ke kalangan ini." ■

Seluruh Staf Pengelola Xpos
dan
Komunitas Informasi Terbuka

Mengucapkan

Selamat Kepada
ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
diusia ke-IV
pada 7 Agustus 1998

TETAP SEJALAN DAN SEHATI DALAM
MEMPERJUANGKAN KEBEBASAN PERS

Pasukan Jenderal Tua Jatuhkan Habibie

Kelompok jenderal tua pendekar Orde Baru itu akhirnya mempelopori berdirinya Barisan Nasional. Tujuannya tak lain untuk gembosi Golkar dan beroposisi menjatuhkan pemerintahan Habibie.

Embrionya berawal dari Munaslub Golkar Juli 1998. Dan barisannya semakin membengkak setelah kekalahan kelompok militer dalam memperebutkan kursi ketua umum Golkar itu. Setelah kasak-kusuk kesana kemari dengan menuduh lawan politiknya menang karena bermain uang dengan jual beli suara, mereka juga mendekati partai NU (PKB) serta PDI-nya Megawati. Orang menduga, mereka sedang memanas-manasi pengurus Golkar yang telah menyingkirkannya.

Tetapi Kamis pekan ini, mereka bersama-sama sekitar 45 anggotanya, yang tidak hanya dari tentara itu mendeklarasikan berdirinya kelompok Barisan Nasional. Dan menyatakan gerakan mereka independen dan murni gerakan moral dan tidak mengikatkan diri dengan Parpol manapun. Itu bisa diartikan, bahwa mereka telah menyatakan lepas dari Golkar dan akan menghimpun sebanyak-banyaknya pendukung untuk melawan kekuasaan yang ada.

Dalam acara deklarasi 6 Agustus itu, mereka mengeluarkan pernyataan politik yang cukup memerahkan kuping Habibie. Pada lembar pernyataannya, misalnya, mereka terang-terangan mengeluarkan seruankepada rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjadi oposisi dan menjatuhkan pemerintahan Habibie. Karena menurut mereka, pemerintahan Habibie sekarang dibentuk secara inkonstitusional sehingga harus meletakkan jabatannya pada sidang istimewa November mendatang.

"Seluruh anggota barisan nasional terutama angkatan 45 tidak mengakui Habibie sebagai presiden", kata Kemal Idris, Ketua Barisan Nasional. Dan mereka pun mengusulkan untuk membentuk presidium pengganti Habibie yang bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu, mengatasi masalah krisis ekonomi, politik dan hukum.

Barisan para pensiunan tentara yang dipelopori Kemal Idris itu memang kebanyakan tokoh-tokoh tentara angkatan 45, sebagian kecil diantaranya jenderal yang belum lama pensiun seperti Edy Sudrajat, Try Sutrisno, Harsudiono Hartas, dll. Dan sebagian yang lain tokoh-tokoh sipil dari Golkar. Secara integritas dan loyalitas terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto tak diragukan, kecuali mungkin hanya para jenderal dari kelompok Petisi 50.

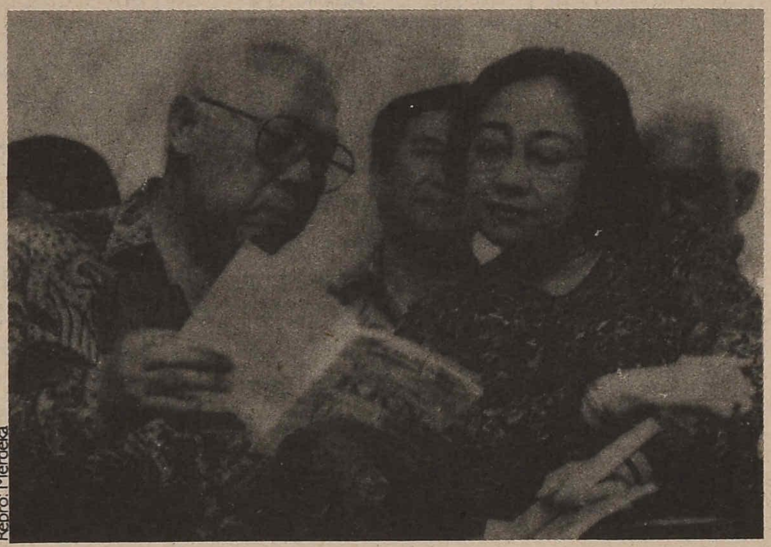

Repro: Merdeka

■ **Kemal Idris & Megawati:** Berkoalisi menjegal Golkar

Beberapa jenderal tua yang tergabung dalam Barisan Nasional ini adalah kawan-kawan dekat Jenderal Soeharto ketika bersama-sama menjatuhkan presiden Soekarno. Mereka pula yang ikut melibas dan memenjarakan orang PKI. Sehingga jika ada pengadilan terhadap kasus 1965 maka mereka seperti Kemal Idris, Wahono dan Kharis Suhud dan lain-lain itu akan ikut duduk sebagai terdakwanya.

Sementara Edy Sudrajat, Try Sutrisno, Harsudiono Hartas merupakan jenderal-jenderalnya rejim Soeharto. Bahkan Edy pernah menjadi Menhankam, Try mantan Pangab dan mantan Wapres, Hartas mantan Kasospol ABRI. Tak bisa disalahkan jika lawan politiknya akhirnya mengangkat isu Edy dan Try dalam munaslub Golkar yang lalu sebagai simbol *come back*-nya kekuasaan Soeharto. Dan kenyataannya Try memang sudah menunjukkan gelagat ingin membela kepentingan Soeharto itu. Sehingga, dalam permainan selanjutnya, kelompok ini tidak banyak mendapat dukungan.

Harsudiono Hartas sendiri, memang pernah digolongkan sebagai jenderal dari barisan tentara merah putih. Ia dianggap jenderal kritis walaupun sampai akhir jabatannya di ABRI tidak pernah menunjukkan pembelaannya secara jelas kepada rakyat.

Sedangkan orang-orang sipil yang ikut menandatangani deklarasi pendirian Barisan Nasional ini adalah tokoh sipil dari Golkar dan pendukung Edy Sudrajat misalnya Sarwono Kusumaatmadja, Hayono Isman, Indra Bambang Oetoyo dll. Sehingga orang menduduhnya sebagai barisan orang yang tidak *gentlemen* mengakui kekalahan di Munaslub Golkar yang lalu.

Sah saja orang menduga, bahwa barisan ini hanyalah bagian dari gerakan penggembosan lawan politik pemerintahan sekarang. Dan orang sah pula menuduhnya sebagai barisan sakit hati setelah kalah dalam memperebutkan kursi Ketua Umum Golkar. Karena, selama Orde Baru berdiri, sikap oposisinya tidak pernah kedengaran kecuali misalnya kelompok Petisi 50 yang kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Dan secara terang-terangan pula Kemal Idris dan Indra Bambang Oetoyo menyebutnya sebagai upaya menggerogoti dan menggembosi Golkar.

"Golkar memang harus digerogoti dan digembosi. Golkar sudah kehilangan kredibilitasnya karena rakyat tidak mempercayainya lagi", kata Indra Bambang Oetoyo.

Tapi bagaimanapun juga, kelompok ini cukup berguna. Minimal ya seperti tadi, sebagai penggembos Golkar. Sehingga dalam pemilu mendatang Golkar tidak lagi menjadi partai mayoritas tunggal dan terus-terusan dijadikan kendaraan politik rejim berkuasa. Tapi apakah mereka punya akar sehingga mampu gembos? Itu yang menjadi masalah. Karena basis massa mereka tidak jelas. Sementara Akbar Tanjung masih bisa memainkan uang kekayaan Golkar yang ditumpuk semasa Soeharto.

Jadi, ikut bergabungnya Barisan Nasional dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) atau PDI Megawati diduga justru akan menjadi batu sandungan di kemudian hari. Sebab disebut sebagai kelompok reformis, tentu sulit diterima karena kebanyakan dari mereka para jenderal dan sipil yang merupakan bagian dari rejim yang lalu. Sementara disebut kelompok yang anti kemapanan, rasanya kurang pas karena selama ini cukup menikmati kekuasaan bersama Soeharto, —tentu selain kelompok petisi 50. Karena mereka pas untuk disebut barisan sakit hati, kecuali bisa membuktikan bahwa mereka bisa menjatuhkan Habibie dan anti dwi fungsi ABRI seperti cita-cita deklarasinya. ■

Jaring Merah Membawa Petaka

Operasi militer di Aceh menewaskan sekitar dua ribu orang. Ada yang disiksa, dieksekusi di depan massa, serta diculik tak ketahuan rimbanya.

Tim Pencari Fakta (TPF) DPR pimpinan Hari Sabarno, Wakil Ketua DPR/MPR, membawa "oleh-oleh" menyeramkan dari bumi Serambi Mekah. Di tangan mereka tersimpan daftar sekitar dua ribu nama warga Aceh yang menjadi korban kebengisan aparat militer, lengkap dengan kisah-kisah menyedihkan.

Dari berbagai desa di Kecamatan Kuta Makmur dan Kreung Mane, Aceh Utara, saja tercatat 21 orang hilang yang sampai sekarang tak ketahuan rimbanya. Sedangkan dari Kecamatan Alue Nirek/Peurelak, Aceh Timur, ada 13 warga yang telah dinyatakan tewas akibat ditembak tentara. Umumnya para pria berumur 20 sampai 40 tahun dituduh sebagai anggota dan simpatisan kelompok yang dinamakan pemerintah GPK Aceh.

Yang tercatat paling banyak adalah korban yang berasal dari Kabupaten Pidie: hampir 70 orang (lihat tabel). Hampir semuanya merupakan korban operasi militer dengan nama sandi "Jaring Merah". Operasi itu dimulai sejak 1989 hingga tahun lalu. Bahkan, sebuah bukit di Kec. Jambo Aye, dekat kota Lhoksemauwe, dikenal sebagai Bukit Tengkorak, karena banyaknya tengkorak manusia ditemukan di sana. Tak jauh dari situ, di kawasan perkebunan, kabarnya ditemukan "kuburan massal" yang berisi sekitar seratus mayat. Satuan tentara yang paling banyak memakan korban, tak lain, Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Data-data korban itu dikumpulkan kalangan LSM di Aceh, lewat berbagai sumber. Antara lain: pengaduan masyarakat, laporan media-massa, dan investigasi langsung ke lapangan. "Umumnya mayat yang berhasil ditemukan, terdapat bekas penganiayaan dan luka tembak," ungkap seorang aktivis LSM. Berikut daftar nama korban yang berhasil dikumpulkan di Kabupaten Pidie. ■

NAMA	ASAL	WAKTU HILANG /MATI
Aiyub Umar, M. Nasruddin, Hasballah Usman, M. Yunus Mahmud, Abdurrahman	Dayah Teumana, Kec. Tripa	1990
Usman Yakop, Usman Yatim	Dayah Tutong	1990
Samsuddin Adam	Kruet Tempeun, Kec. Gempang Tiga	1990
Syahbuddin Hasan	Pasi Lhok, Kec. Keumang Tanjong	1990
Ilyas Ahmad	P. Lancang, Kec. Keumang Tanjong	1990
M. Bahagia	Dayah Teumana, Kec. Tripa	1990
Drs. Asnawi	Kulan, Kec. Batee	1991
Yacoub, Keuchik Amri, Keuchik Hasyem, Yusuf Rahman	Crue, Kec. Batee	1991
Yusuf Umar	Mee, Kec. Batee	1991
Tgk. Usman, Tgk. Abdullah, Keuchik Ismail, M. Usman, Ahmad Daud	Selatan, Kec. Batee	1991
M. Daud Saleh, Abdurrahman Daud, H. Nyak Ahmad Bintang	Alue Lada, Kec. Batee	1991
Sayuti, Marwan, Keuchik Yusuf, Marzuki, Abubakar Umar, Usman	Neuheun, Kec. Batee	1991
Keuchik Syafei, Adnan/Uboe	Tuha, Kec. Batee	1991
Ishak Ali, Ilyas Aji	Tampui, P. Tunong, Kec. Tripa	1991
A. Gani Abubakar	Baroh Yaman, Kec. Mutiara	1991
M. Daud	Neuhen, Kec. Batee	1991
Badrul Kamal	Cumbok Newa, Kec. Kuta Bakti	1996
Yusuf Hasan	Meunasah Didoh, Kec. Mutiara	1997
M. Yakob Piah, M. Husen Yakob	Masjid Pante Raja, Kec. Tripa	1997
Abdullah Yunus	Pasi Lhok, Kec. Kec. Keumang Tanjong	1998
Abdul Wahab Ibr	Desa Didoh, Kec. Mutiara	1998
Abdul Wahab Ali	Rambong Mns, Kec. Mutiara	1998
Kaoy Ahmad, Jamaluddin, Aiyub Ali, Jafar	Paloh Tinggi, Kec. Mutiara	1998
Razali Daud, Abd Rahman Abubakar	Lhok Igeueh, Kec. Tiro	1998
Raden Cut Ben	Desa Ukee	1998
Hamzah Saleh, Tgk. Ahmad Abdullah	Dayah Kumba, Kec. Mutiara	1998
Usman Ahmad, Abdul Majid, Syarifuddin Asih	Dayah Tanoh, Kec. Mutiara	1998
Syarwan TA	Desa Sentosa, Kec. Mutiara	1998
Zulfikar fathul Ali	Blang Malu, Kec. Mutiara	1998
Azhar Ahmad Cut	Baro Jaman, Kec. Mutiara	1998
M. Yunus Ahmad	Nibong, Ujong Rimba, Kec. Mutiara	1998
Abdullah Majid	Keumangan Masjid, Kec. Mutiara	1998
M. Abas Saleh	Sarah Payang, Bandar Baro	1998
Khatijah, Cut Raja	Cot Baro, Kec. Glumpang Minyeuk	1998
Bahagia Yusuf	Meugit, Ujong Rimba, Kec. Mutiara	1998
M. Gede Husen	Blang Malo, Kec. Tangse	1998
Ibrahim bin Yusuf	Msj. Jeurat Manyang, Kec. Mutiara	1998

Konsolidasi Ditengah Reformasi

Ditengah semangat reformasi, AJI merayakan ulangtahun keempat. Selain konsolidasi, program kerja apa saja yang diprioritaskan?

Setiap perjuangan pasti menghasilkan buah. Itulah yang dirasakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di era reformasi sekarang ini. Setelah empat tahun bagaikan "organisasi terlarang" di mata pemerintah, kini para aktifis AJI boleh sedikit bernafas lega. Paling tidak, penyelenggaraan peringatan ulang tahun AJI keempat, 7 Agustus lalu, di Gedung *Jakarta Design Center*, tak lagi dibayangi kecemasan.

Sebelumnya, setiap kali menggelar acara, para aktivis AJI selalu teringat "mimpi buruk" yang terjadi tiga tahun lalu. Saat itu, 16 Maret 1995, AJI sedang menyelenggarakan Halal bi Halal di Hotel Wisata dan digrebek aparat keamanan. Tiga aktivis AJI — Ahmad Taufik, Eko Maryadi, dan Danang Kukuh Wardoyo— ditangkap, lalu diadili. Mereka dituduh melecehkan wibawa Menteri Penerangan Harmoko lewat tulisan di majalah *Independen* —media alternatif terbitan AJI. Meski bukti-bukti dan kesaksian di persidangan tak cukup kuat mendukung tuduhan itu, majelis hakim PN Jakarta Pusat menghukum Taufik, Eko, dan Danang.

Dua tahun kemudian, nasib serupa juga menimpa Andy Sahputra, pencetak majalah *Suara Independen* yang diterbitkan Masyarakat Indonesia untuk Peminat Pers Alternatif (MIPPA). Andy dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara, kemudian dibebaskan menyusul kejatuhan Soeharto.

Tak hanya itu represi yang diterima para aktivis AJI. Tak lama setelah Deklarasi Sirnagalih (yang mengumumkan pendirian AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memecat 13 wartawan yang ikut menandatangani deklarasi itu. Sejumlah wartawan lain malah mengalami nasib lebih mengenaskan: di PHK dari perusahaan pers tempatnya bekerja. Santoso (saat itu menjabat Sekjen AJI), misalnya, dipecat Pemimpin Redaksi Majalah *Forum*, Karni Ilyas. Sedangan dua wartawan *Kompas*, Satrio Arismunandar dan Dhea Prakasa Yudha, dipaksa mengundurkan diri.

Berbagai kegiatan AJI juga kerap dihalang-halangi aparat pemerintah. Pokoknya, dimata pemerintah dan para pengurus PWI, AJI itu bagaikan organisasi terlarang yang berpotensi mengganggu rejim Soeharto.

Toh, berbagai intimidasi dan represi itu tak melunturkan semangat anak-anak AJI. "Buktinya kami tetap eksis sampai sekarang," kata Ketua AJI, Lukas Luwarso. Dan, seiring hembusan angin reformasi, eksistensi AJI makin berkibar. Sampai sekarang, tak kurang ada 20 permintaan pembentukan cabang di berbagai kota. Semua permohonan itu sedang diseleksi dengan teliti. "Kami tak mau gegabah membuka cabang dimana-mana. Buat apa besar, kalau organisasinya tidak solid," kata Lukas.

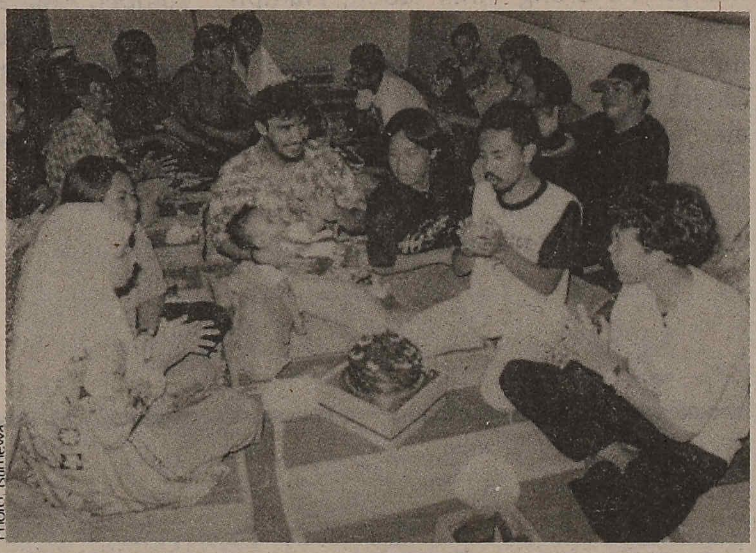

Photo: Istimewa

■ **Saat Ulang Tahun di Penjara:** Dirgahayu AJI ke-IV

Agaknya, di masa-masa ini AJI lebih memprioritaskan penataan organisasi daripada jor-joran meresmikan cabang. Sampai saat ini, yang baru disahkan adalah AJI Cabang Yogyakarta. Dalam waktu dekat, yang segera menyusul adalah: Jakarta, Medan, Ujungpandang, dan Surabaya.

Dalam rangka penataan organisasi tadi, salah satu program utama AJI adalah memasyarakat konsep serikat pekerja pers. Di jagad wartawan Indonesia, konsep ini memang belum banyak diperhatikan. Jurnalis negeri ini umumnya masih terbuai dengan anggapan umum bahwa wartawan adalah profesional, yang berbeda statusnya dengan buruh atau pekerja (kasar). Bisa jadi, karena itulah sebuah perusahaan pers besar, misalnya, sampai saat ini belum memiliki serikat pekerja atau dewan karyawan.

AJI sendiri, sejak awal pendiriannya, tak berniat sekedar menjadi organisasi profesi, tapi sekaligus organisasi serikat pekerja (*trade union*). Karena itu, program dan kegiatan AJI tak sebatas mengurusi soal-soal yang berkaitan dengan etika profesi jurnalis dan teknis jurnalistik, tapi juga menyangkut kesejahteraan dan posisi tawar para pekerja pers terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Dengan begitu, para pemodal yang menguasai perusahaan pers tak bisa lagi sewenang-sewenang memperlakukan karyawannya.

Sebuah tujuan yang mulia, tapi harus diperjuangkan dengan kerja keras. Selamat ulang tahun AJI. ■

Kembalikan Kepada Rakyat

Dana Yayasan Dakab, senilai Rp. 800 milyar lebih, jadi rebutan Soeharto dan Golkar. Padahal, itu uang rakyat yang harus dikembalikan kepada rakyat.

Lakon rebutan uang Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab) masih terus berlanjut. Pendekatan "kultural" yang dilakukan Akbar Tanjung, Ketua Umum Golkar, agaknya tak cukup berhasil. Soeharto, mantan presiden yang ketua yayasan, ogah menyerahkan uang senilai Rp800 milyar lebih yang masih tersimpan di kas yayasan. Secara diam-diam, Soeharto malah ingin mengalihkan dana itu lewat DPD-DPD Tingkat I Golkar, bukan pengurus Golkar pusat.

Tapi, manuver itu keburu ketahuan, setelah pengurus DPD Golkar Sumatera Utara melaporkannya kepada Akbar. Langsung saja Akbar bereaksi keras, melarang semua DPD Golkar menerima uang Yayasan Dakab itu. "Uang itu hak Golkar. Mengapa tidak langsung saja diserahkan kepada kami," kata Akbar geram.

Toh, politisi yang kini menjabat Menteri Sekretaris Negara itu tak bisa berbuat banyak. Soalnya, secara legal yuridis Golkar tak mempunyai hak mengklaim uang itu. Memang, pendirian Yayasan Dakab dulu adalah untuk membantu perjuangan Golkar. Tapi," Jangan diartikan dana itu milik Golkar," kata Siswono Yudhohusodo, Sekretaris Ya-

yasan Dakab. Secara implisit, dalam wawancaranya dengan *Kompas*, Siswono mengakui cara-cara penggalangan dana lebih bernuansa melestarikan kekuasaan rejim Soeharto. Misalnya, lewat penekanan politik alias penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, Siswono menyarankan penyelesaian masalah ini lewat jalur hukum.

Negara, dalam hal ini Kejaksaan Agung, memeriksa kas Yayasan Dakab, lalu menentukan status uang tersebut. Rupanya, usul itu ditanggapi serius oleh Kejaksaan Agung. Beberapa hari lalu, mereka memanggil Siswono untuk dimintai keterangan soal Yayasan Dakab. Tapi, sikap Kejaksaan Agung masih mengambang. "Sampai saat ini, kami belum menemukan indikasi korupsi atau tindak pidana lainnya," kata Wakil Jaksa Agung, Ismudjoko.

Golkar sendiri tak mau kalah. Karena langkah persuasifnya tak ditanggapi Soeharto, para pengurus Golkar berniat mengajukan tuntutan ke pengadilan. Mestinya, "Pak Harto tak harus malu untuk menyerahkan (dana Yayasan Dakab)," kata Agung Laksono, Ketua DPP Golkar. Malah, Agung menuduh keengganan Soeharto menyerahkan uang ratusan miliar itu merupakan indikasi Soeharto punya agenda politik sendiri.

Tuduhan itu bisa jadi benar. Tapi, ambisi Golkar merebut dana Yayasan Dakab juga bagian dari agenda politik untuk melestarikan kekuasaan yang digenggamnya. Seperti diketahui, sejak kejatuhan Soeharto, citra Golkar ikut terpuruk. Pasalnya, sebagai "mesin politik" Orde Baru, Golkar harus ikut menanggung dosa-dosa rejim Soeharto yang menyebabkan rakyat jatuh ke lembah krisis ekonomi yang berkepanjangan. Untuk mengubah citra buruk itu, satu-satunya taktik yang harus ditempuh adalah memainkan politik uang. Maka, dalam pemilu mendatang, Golkar membutuhkan fulus yang tak sedikit.

Soalnya kemudian, siapakah yang paling berhak atas dana Yayasan Dakab itu? Kalau merujuk keterangan Siswono tadi, maka sejatinya rakyatlah yang paling berhak. "Secara moral politik, negara berhak mengambil-alih uang itu," kata seorang pengamat politik. Dan, dengan uang Rp800 milyar lebih itu banyak hal bisa dilakukan pemerintah. Misalnya, untuk mendanai pemilu atau membeli sembako untuk kebutuhan rakyat kecil.

Ketua Partai Umat Islam, Deliar Noer, punya usul menarik: membagikan dana ratusan milyar itu kepada partai-partai politik. Dengan begitu, partai-partai politik yang memang kualified bisa lebih siap menghadapi pemilu tahun depan. Hasilnya, pemilu pun akan jadi lebih bermutu. ■

Solidaritas Korban Perkosaan

Presiden transisi Habibie bakal hadapi problem serius karena ucapannya yang tidak simpatik terhadap korban. Tekanan internasional mengepung.

Kutukan terhadap peristiwa perkosaan yang dialami etnis Cina di Indonesia pertengahan Mei lalu, kini semakin keras terdengar. Tidak saja diserukan oleh masyarakat sipil, tapi juga pemerintah di beberapa negara. Mereka, tampaknya, kurang puas dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam menangani masalah ini. Apalagi, Presiden BJ Habibie, beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak simpatiknya terhadap etnis Cina, dalam media-media asing (baca *Xpos* nomor lalu).

Dalam *The Jakarta Post* 5 Agustus lalu, Habibie malah memperingatkan masyarakat untuk tidak terpancing dengan isu-isu "yang didapatkan dari internet dan dari sumber yang tidak jelas." Ia mengatakan itu dengan merujuk pada surat-surat yang ia terima, yang menyebutkan sekitar 200 wanita Cina telah diperkosa setelah sebelumnya ditelanjangi. Habibie sepertinya tidak peduli dengan reaksi keras masyarakat internasional, yang akan sangat berpengaruh terhadap dukungan luar negeri terhadap penanganan krisis di Indonesia.

> "PERKOSAAN YANG DILAKUKAN DALAM KERUSUHAN MEI BERDARAH DI INDONESIA ADALAH YANG PALING SERIUS DAN MERUPAKAN PERBUATAN PALING TERKUTUK DARI TERORISME POLITIK DALAM ABAD INI."

Dari Cina diberitakan, Menteri Luar Negeri Tang Jiaxuan Tang, setidaknya, sudah tiga kali menyerukan pada pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi terhadap peristiwa itu. Sementara para aktifis pro-demokrasi di negeri tirai bambu itu langsung menuding pemerintah Indonesia yang seharusnya bertanggung jawab terhadap peristiwa perkosaan itu, dan mendesak agar segera menghukum pelaku-pelakunya.

Dalam pernyataan yang ditandatangani oleh 44 aktifis itu, disebutkan, "Perkosaan yang dilakukan dalam kerusuhan Mei berdarah di Indonesia adalah yang paling serius dan merupakan perbuatan paling terkutuk dari terorisme politik dalam abad ini." Menanggapi sikap pemerintah Habibie, mereka katakan, "Kita tidak dapat membiarkan pemerintah Indonesia hanya berdiam diri dan pura-pura tidak tahu atas kejadian ini."

Tidak cuma di Asia, solidaritas yang sama juga ditunjukkan oleh etnis Cina di benua lain. Di Amerika Serikat, tanggal 1 Agustus lalu, kurang lebih 1200 orang menyelenggarakan mimbar bebas di San Fransisco, atas prakarsa *Indonesian Chinese American Network* (ICANET).

Salah seorang pembicara dalam acara itu, Medea Benjamin dari Global Exchange mengatakan, selama ini etnis Cina di Indonesia sering dijadikan kambing hitam atas berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan konco-konconya. Habibie, menurutnya, tak lain merupakan perpanjangan dari Soeharto.

Hal senada juga dikemukakan oleh Edward Liu, seorang pengacara. Ia mengutuk pernyataan Habibie seperti dikutip dalam media asing yang menggambarkan etnis Cina sebagai biang persoalan, bukannya sebagai korban dari kerusuhan. Orang Cina-Indonesia, semestinya, "mempunyai hak untuk dilindungi oleh pemerintahnya dan tentaranya, tanpa harus membayar serta tidak lagi harus menjadi korban prasangka rasis oleh presidennya."

Dalam kesempatan itu, Edward mengungkapkan penghargaannya terhadap orang-orang pribumi yang telah mempertaruhkan nyawanya menolong para korban, khususnya pada Romo Sandyawan dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan. "Mereka adalah saudara dan saudari saya." Lebih lanjut ia katakan, "Orang-orang Cina-Indonesia yang pernah menjadi konco Soeharto dan sekarang berkolaborasi dengan Habibie dalam sistem korup yang sama, perkoncoan dan nepotisme..., mereka bukanlah saudara dan saudari saya."

Dari acara itu, diketahui bahwa penggalangan solidaritas dan seruan keras terhadap pemerintahan Habibie, sedang berlangsung di seluruh dunia. Mulai dari Asia Tenggara, Amerika, Australia, hingga ke Eropa. Kegiatannya, mulai dari demonstrasi hingga upacara-upacara penyalaan lilin — direncanakan tanggal 15 Agustus di Union Square, San Fransisco.

Jika aksi ini terus berlangsung, dampaknya pasti akan memperburuk perekonomian Indonesia. Barangkali, kalau Indonesia diisolasi dari perdagangan dunia, baru pemerintah Habibie mau mengkoreksi sejumlah pernyataannya yang tidak simpatik. ■

■ OPINI

Kebohongan Habibie

Oleh: Rachland Nashidik

Photo: Istimewa

Rudy Habibie berkali-kali meminta kita berhenti menggugat keabsahan kekuasaan yang dioperkan kepadanya oleh Soeharto. Setiap orang boleh memiliki keinginan —jadi kenapa ia tidak? Soalnya, ketika ia, sebagai presiden yang dipersoalkan, memutuskan untuk mewujudkan keinginannya itu jadi kenyataan politik, ia mesti memberi rakyatnya alasan yang tepat.

Dan Rudy menjemput alasan itu dari kenyataan kemelut ekonomi indonesia. Suatu penanganan yang segera sungguh dibutuhkan oleh negeri ini, agar rakyatnya tidak lebih sengsara. Ia lalu mengkombinasikan kenyataan itu dengan kepentingan politiknya, dan mengambil untung dari sebuah alasan yang kedengaran populis yang diturunkannya dari situ. Tantu kalau dilacak dari *track record*-nya selama jadi menteri di kabinet-kabinet Soeharto, bukanlah populisme benar yang menuntun ia pada alasan itu.

Yang benar, Rudy sesungguhnya tidak punya banyak pilihan. Ia, misalnya, pernah beralasan bahwa kekuasaan operan itu ia dapatkan karena "rekayasa Tuhan" —sebuah alasan yang sulit dicerna tanpa memancing rasa jenaka atau sebuah kernyitan di kening. Sulit, begitu orang bilang, untuk membenarkan kekuasaan operan di tangan Rudy sebagai "konstitusional". Tapi, sebenarnya, jauh lebih sulit untuk menggunakan alasan yang sama, untuk menghadang gugatan mahasiswa yang berlanjut dari "Revolusi Mei" yang menghendaki ia mundur mengikuti jejak Soeharto —sang diktator yang dia sebut "profesor". Soeharto dipaksa mundur bukan oleh tafsir konstitusi, tapi oleh gempuran politik yang berani oleh massa mahasiswa. Jadi, apa pasalnya pada Rudy gempuran itu mendadak jadi "inkonstitusional"? Sementara, hal yang sama, pada Soeharto justru dirayakan? Bukankah operan kekuasaan dari Soeharto pada Habibie ini semisal orang mengganti baju kotor dengan baju kotor yang lain?

Pada aras tertentu, Orde Baru adalah sebuah rejim otoriter-konstitusionalistik. Ditangan Soeharto, tafsir konstitusi dan seluruh undang-undang yang diturunkan atau dipertahankan dari tafsir itu, sengaja dibuat demi melancarkan kekuasaaan yang otoriter —bukan untuk mengontrol atau mengubahnya. Padahal mengontrol kekuasaan, itulah tujuan dari paham konstitusionalisme yang benar. Maka dalam perangkap tadi, setiap ihtiar untuk memaksimalkan kebebasan demokratis untuk mengontrol kekuasaan, niscaya akan dicap "inkonstitusional". Langgam otoriterisme itukah yang mau dipraktekkan Rudy?

Sekarang, mari kita periksa "alasan populis" itu. Benar: Rakyat akan semakin sengsara kalau kemelut ekonomi ini tidak cepat-cepat diurus. Atas dasar kebenaran itu, Rudy mendesak agar gerakan mahasiswa yang tak kunjung surut menyoal keabsahan politiknya segera distop. Agar, katanya, kemelut ekonomi bisa segera diurus dan rakyat tidak terlalu lama sengsara —cara pintar untuk meminta agar pemerintahan Rudy diberi jalan, tidak diusik.

Perhatikan bagaimana Rudy menyusun alasannya. Problem bahwa ia tidak memiliki keabsahan politik yang cukup untuk berkuasa, mau ia kalahkan dengan problem lain, yang sebenarnya adalah kepanjangan dari yang pertama, bahwa kebangkrutan ekonomi bertambah parah. Tapi, sementara sepenuhnya benar bahwa masalahnya ekonomi mesti cepat diurus, masih saja Rudy berutang satu penjelasan: Siapa sebenarnya yang harus menerima konsekuensi politik dari problem itu? Ditanyakan dengan cara lain: siapakah sebenarnya yang menghalangi penanganan segera atas masalah ekonomi Indonesia yang praktis bangkrut ini?

Tentang itulah Rudy berbohong —dan ini diteruskan oleh elite pendukungnya di dalam dan di luar kabinet, melalui proyek-proyek politik *public relation*, melalui jaringan pers, menggunakan simbol-simbol Islam, lalu diteriakkan oleh massa pembelanya yang berdemonstrasi dengan berapi-api: suatu "*conglomerations of lies*".

Dengan kekuasaan yang dimiliki Presiden, Rudy memang bisa berbuat banyak. Mulai dari mengancam, sampai membujuk. Ia misalnya, memerintahkan kepada Menko Polkam Feisal Tanjung —Pangab semasa Soeharto yang memusuhi gerakan pro-demokrasi— untuk menyatakan bahwa gerakan reformasi sudah inkonstitusional dan karena itu akan "dihadapi ABRI dengan tegas". Ia juga, setelah gagal mengundang Megawati, berhasil mengundang dan bergambar dengan Uskup Belo, pemimpin religius rakyat Timor Timur yang dicintai, dan menjanjikan akan memberikan "otonomi khusus" bagi —dan penarikan sebagian pasukan ABRI dari wilayah yang dipersengketakan itu.

Kebohongan Rudy terletak pada apa yang tidak ia katakan dengan terus terang. Dengan memanfaatkan kemelut ekonomi sebagai perisai, ia menginginkan gerakan mahasiswa dihentikan dan orang berhenti mempermasalahkan keabsahan kekuasaan operan di tangannya. Dengan demikian, ia sebenarnya mau bilang, adalah gerakan mahasiswa dan protes-protes massa itulah yang menghalang-halangi penangan masalah ekonomi. Maka dalam cara berpikir Rudy, demi penanganan kemelut ekonomi itu, kebebasan demokratis yang sedang kita nikmati, hak-hak politik yang usianya baru beberapa minggu kita rebut dari penguasaan Soeharto, harus kembali diserahkan —kali ini, dengan kekuasaan yang *de facto* dipimpinnya. Sebuah kekuasaan tanpa legitimasi memang selalu menganggap demokrasi sebagai belukar yang gatal.

Tapi, benarkah demi penanganan masalah ekonomi itu, kebebasan demokratis harus dikorbankan? Tunggu dulu. Tidakkah pikiran salah begini mengingatkan kita pada asumsi yang membentuk tatanan politik rejim Soeharto lebih dari tiga dasawarsa? Tatanan politik yang dibentuk sepenuhnya untuk menyingkirkan politik massa —dengan asumsi bahwa keadaan itu tak terelakkan demi pembangunan ekonomi— telah memberikan kepada Soeharto suatu kekuasaan yang terpusat dan akhirnya menjadi personal. Tapi kesejahteraan ekonomi apakah yang telah diberikan kepada kita oleh kekuasaan yang demikian itu? Sekarang, semuanya menjadi jelas: "pembangunan" yang dibanggakan Soeharto, ternyata tak lebih sebuah upaya sia-sia untuk membangun rumah kartu! Tak ada fundamen ekonomi yang tegak jika disemen oleh korupsi, kolusi dan nepotisme —penyakit-penyakit yang berbiak leluasa di tengah ketiadaan kontrol terhadap penguasa.

Pelajaran dari pengalaman itu: Dibutuhkan kontrol politik agar masalah ekonomi diurus dengan benar, mengutamakan kesejahteraan lebih banyak orang. Karena itulah, kebebasan demokratis diperlukan, agar kontrol bisa dijalankan. Tanpa kontrol dan koreksi, sebuah kekuasaan bisa menjadi apa saja

dan melakukan apa saja. Maka adalah dusta untuk mengatakan masalah ekonomi hanya bisa diurus apabila kakuasaan demokratis ditiadakan. Hari-hari ini, kebebasan demokratis justru adalah sesuatu yang paling kita butuhkan untuk menjaga agar jalannya kekuasaan, dan caranya kekuasaan itu dijalankan, selalu, tunduk pada daulat rakyat. Teru-tama, agar sebuah kekuasaan, naik sepe-nuhnya atas kehendak rakyat.

Tentu saja jelas, hari-hari ini, penanganan kemelut ekonomi adalah agenda yang mesti di prioritaskan untuk mencegah rakyat semakin terpuruk dalam kesengsaraan. Tapi juga jelas, tidak atas dasar itu, Rudy boleh bersikeras untuk berkuasa tanpa legitimasi. Kepercayaan rakyat terhadap penguasa adalah kunci untuk menangani kemelut ekonomi.

Sesungguhnya, bukan gerakan mahasiswa, protes massa, yang jadi penghalang dan membuat kemelut ekonomi ini bertambah parah. Kepada Rudy mesti diingatkan, bahwa ia baru bicara tentang kesengsaraan rakyat hanya setelah ia dioperi kekuasaan oleh Soeharto. Tapi, penghayatannya atas kesengsaraan rakyat, yang diakibatkan oleh kemelut ekonomi paska anjloknya nilai tukar Rupiah, sejak mula menjadi moral gerakan "reformasi total" yang dimotori mahasiswa. Lantaran kepentingan bisnis Soeharto dan konco-konconya jadi soal yang menggagalkan penanganan ekonomi, maka ia menjadi fokus dari perlawanan mahasiswa. Tapi, sebalnya, soal tidak usai ketika Soeharto minggir. Sebab baru saja agenda penanganan ekonomi mendapatkan harapan kesempatan, Rudy sudah datang merintangi jalan.

Di bawah Rudy , nilai tukar rupiah per satu dolar Amerika makin terpuruk. Ini saja mestinya sudah cukup sebagai alasan bagi Rudy untuk meletak-kan kekuasaan, agar terbuka peluang bagi figur-figur dukungan rakyat untuk beru-saha mengatasi keadaan yang diakibat-kannya.

Jika keadaan memburuk, desakan rakyat agar Rudy turun dari kursi kekuasaan adalah sebuah keniscayaan. Tapi, untuk memudahkan soal, baiklah kita katakan, bahwa jika Rudy Habibie konsisten dengan konsern yang dinyatakannya pada kemelut ekonomi, maka konsekuansinya ia, pada tempat pertama, mesti mengundurkan diri agar penanganannya tidak dihalangai lebih lama. Dengan memaksa berkuasa tanpa legitimasi, ia justru membuat dirinya menjadi persolan baru yang menghalangi penanganan yang segera atas kemelut ekonomi.

■ Bekerja untuk Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

Faisal Basri:

Hentikan Bayar Utang

Ekonom INDEF, Faisal Basri menyerukan pada pemerintah agar menghentikan untuk sementara waktu pembayaran hutang dan bunganya ke negara-negara pemberi pinjaman. "Kita tidak perlu gengsi karena kita memang tidak mampu. Devisa kita sudah sangat tipis dan akan segera habis kalau digunakan untuk bayar hutang. Para pejabat World Bank yang saya temui sebetulnya tidak masalah, mereka melihat kita sudah lebih miskin daripada Bangladesh," ujar staf pengajar FE UI ini. Berikut adalah uraian Faisal pada diskusi yang diselenggarakan Masyarakat Profesional untuk Demokrasi (MPD) dalam rangka penyusunan materi ekonomi Dialog Nasional untuk Demokrasi.

"Satu ciri dari basis perekonomian yang lemah, seperti negara kita, adalah besar pasak daripada tiang. Pengeluaran untuk konsumsi lebih besar dari pendapatan yang diterima. Konsekuensinya negara tersebut membutuhkan injeksi dana dari luar, baik berupa pinjaman (*loan*) maupun bantuan (grant).

Pada negara-negara miskin yang ingin tumbuh perekonomiannya, hal itu wajar dan bisa dipahami. Injeksi dana dari luar bisa mendorong investasi dan meningkatkan daya beli. Tetapi kemudian kita tidak bisa memanfaatkan dana dari luar tersebut. Produktivitas kita untuk memajukan ekonomi, secara riil lebih kecil dibanding pengeluaran untuk membayar hutang dan bunganya. Dan sayangnya, makin lama pemerintah kita makin beringas berutang.

Keberingasan ini didorong juga oleh insentif-insentif penggunaan utang yang bertentangan dengan mekanisme pasar seperti proteksi dan intervensi pemerintah. Misalnya dana hutang untuk membangun jalan tol dan pembangkit listrik berbagai tenaga yang dilakukan oleh swasta. Mereka mendapat proteksi dan bahkan monopoli lokal. Padahal mereka tidak punya kemampuan untuk mengga-rap proyek-proyek tersebut. Jadi dibutuh-kan biaya untuk belajar, dan itu membuat penggunaan dana hutang tidak efisien. Jadilah ekonomi biaya tinggi. *Toh* pemerintah Soeharto tetap menanggung biaya itu dengan intervensi. Negara dirugikan Rp60,- per KWh oleh listrik swasta milik keluarga istana, padahal berapa Mega KWh yang mereka hasilkan? Dari industri itu saja selanjutnya akan menggerogoti hilir-hilirnya. Akhirnya, konsumen harus menanggung biaya yang sangat tinggi.

Padahal, ini yang tidak disadari oleh pemerintah baik Soeharto maupun Habibie sekarang, perekonomian itu mempunyai daya dukung yang terbatas. Perekonomian kita selalu berada di ambang daya dukung tersebut. Akibatnya, ketika badai muncul perekono-mian kita langsung *collapse*. Survey atas 400 perusahaan dari 2000 perusahaan yang berhutang dolar membuktikan bah-wa 80% dari utang yang digunakan untuk usaha yang tidak langsung menghasilkan valuta asing. Mereka menghasilkan sejumlah barang yang dijual domestik dalam rupiah. Jadi susah ketika terjadi perubahan kurs.

Pemerintah jangan sekali-sekali memberi subsidi kepada pengusaha-pengusaha swasta yang *sontoloyo* ini. Bukan soal etnis, siapapun bisa berpeluang untuk inefisien dalam ekonomi seperti ini. Bakrie yang pribumi itu hutangnya Rp15 trilyun, assetnya cuma Rp5 trilyun. Secara ekonomis jelas dia sudah bangkrut. Dari penelitian Farid dan Marie Elka Pangestu, 60% swasta kita tidak bisa ditolong. Hanya 17% yang berpotensi untuk membayar. Dari 17% itu, hanya 2% yang bisa membayar. Dan dari 2% itu, 0% yang mau membayar segera. Mereka bilang, kalau mau diambil alih ya silakan saja. Inilah moral *Free Rider*, mereka maunya jadi penunggang bebas tanpa bayar.

Sekarang bagaimana jalan keluarnya? Jelas besar pasak daripada tiang harus dikurangi, dan pada akhirnya dihilangkan. Caranya, pertama hilangkan diskriminasi. Kalau dulu Soeharto diskriminasi untuk keluarganya, sekarang Habibie dan Adi Sasono diskriminasi untuk kalangan tertentu. Kedua, tingkatkan daya saing dengan pemanfaatan utang secara jelas dan transparan.

Anggaran rutin kini hanya cukup untuk membayar pinjaman dan bunga. Sedangkan *cost* dibiayai dengan hutang. Harusnya pemerintah berhenti dulu membayar pinjaman dan bunga untuk sementara. Kita tak perlu gengsi karena kita memang tidak mampu. Devisa kita sudah sangat tipis dan akan segera habis kalau digunakan untuk bayar hutang. Para pejabat World Bank yang saya temui sebetulnya tidak masalah, mereka melihat kita sudah lebih miskin daripada Bangladesh. Kecuali Jepang yang memang tidak mau. Jepang sebagai peminjam mau memberi pin-jaman lagi untuk membayar hutang-hutang Indonesia kepada mereka agar *cash flow* mereka lancar. ■

■ EKONOMI

Dana Parkir Punya Siapa?

Uang Indonesia di bank-bank Austria sulit ditarik. Bankirnya emoh rugi, di samping Habibie sendiri pasif mendapatkannya.

Sungguh ironis: ketika berbagai media massa memberitakan tentang Consultative Group on Indonesia (CGI) yang menyetujui pinjaman sebesar 8 milyar dolar AS pada Indonesia, pada saat bersamaan, sebuah koran Austria mengungkap dana parkir milik orang Indonesia dengan jumlah yang sama di sejumlah bank di Wina. *Wirtschaftblatt*, nama koran tersebut, memperkirakan angka yang setara dengan 93 miliar schilling itu, adalah angka tertinggi yang pernah dicatat di sana. Sebuah rekor.

Tingginya jumlah modal yang "diparkir" di Austria, menurut koran itu, mulai tampak setelah adanya gelombang kerusuhan bulan Mei lalu. Para pemilik uang yang tidak yakin adanya jaminan keamanan bagi modalnya, segera melakukan transfer uang ketika itu. Angka 8 milyar dolar AS, diperoleh dari David Hale, seorang ekonom senior dari *Switzerland's Zurich Insurance*.

Berapa persisnya seluruh dana yang diparkir di luar negeri? Pertanyaan semacam itu yang menggelitik setelah tahu bahwa baru untuk satu negara saja, sudah ada demikian besar dana parkir —bagaimana di negara-negara lain? Bagi kepentingan penyelamatan ekonomi negara, seandainya ada dana milik orang Indonesia dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan, tentu akan sangat berarti dalam rangka mengatasi krisis. Apalagi jika diduga kuat dana itu diperoleh dengan cara tidak sehat, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Dorodjatun Kuncorojakti, jauh sebelum terjadinya kerusuhan Mei, tanpa melibatkan pihak asing pun sebetulnya krisis ekonomi di Indonesia bisa diselesaikan. Seandainya dana-dana yang diparkir di luar negeri dikembalikan, dana siaga dari IMF, "tidak kita butuhkan lagi." Pertengahan Januari lalu, Pejabat Ketua Umum Kadin Indonesia Imam Taufik memperkirakan jumlahnya sudah mencapai 80 milyar dolar AS. Sedangkan dugaan Hartojo Wignjowijoto, dana itu mencapai 150 milyar dolar AS.

Christianto Wibisono, Direktur Pusat Data Bisnis Indonesia yang pernah menulis topik ini, mengungkap bahwa sejak lama orang Indonesia gemar menyimpan kekayaannya di luar negeri. Di Singapura misalnya, sejak 1968 sudah dikenal penyimpanan dalam mata uang dolar AS yang juga dikenal sebagai *Asian Currency Unit* (ACU). Ketika rekening itu pertama kali dibuka, aset awalnya sudah bernilai 30 juta dolar AS. Tahun lalu, simpanan nasabah bukan bank sudah mencapai 107 milyar dolar AS.

Tak jelas siapa persisnya pemilik uang sebanyak itu. Namun, Christianto membaginya dalam 3 golongan. Pertama, para birokrat korup. Kedua, kelas menengah negara-negara tetangga yang ingin mengamankan uangnya dari ketidakpastian ekonomi dan politik di negaranya — mulai dari birokrat, kaum profesional sampai ibu rumah tangga. Ketiga, para pengusaha yang menyimpannya untuk keperluan transaksi bisnis atau berspekulasi valas secara profesional.

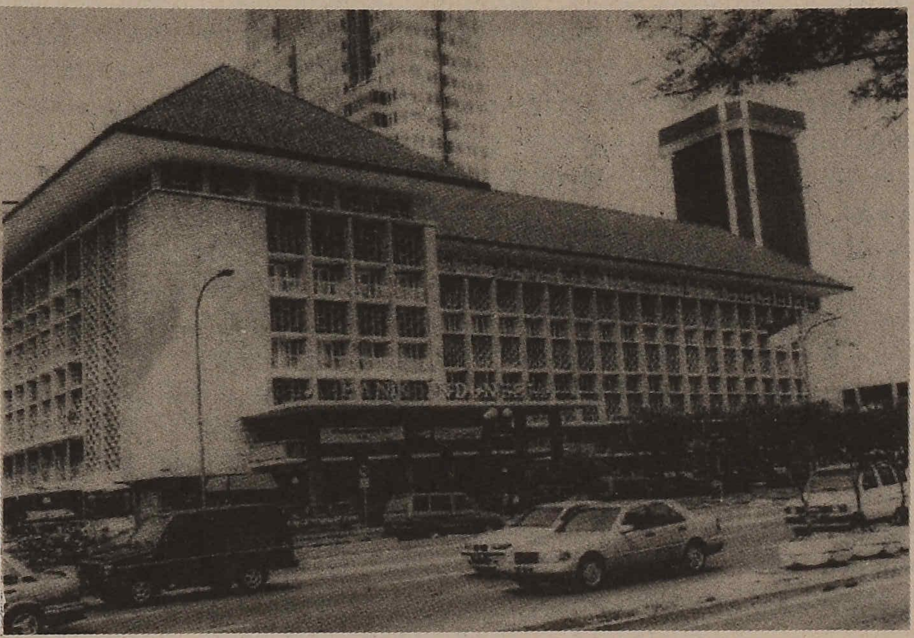

Repro: Warta Ekonomi

■ Bank Indonesia: Banyak bankir, pengusaha & pejabat melarikan uang

Soalnya kini, untuk membawa pulang dana demikian besar, tak semudah membicarakannya. Untuk menginvestigasi siapa persisnya pemilik dana tersebut misalnya, masih ditemukan beberapa kendala. Dalam kasus dana parkir di Austria, para pejabat bank setempat menolak membeberkan nama-nama deposan asal Indonesia yang memiliki rekening di banknya. Padahal, hukum perbankan di negara itu memungkinkannya. Tampaknya, para bankir juga tak rela bila dana sebesar itu ditarik begitu saja dari bank mereka. Sebab, mereka tentu mengharapkan keuntungan dari hasil "memutar" dana itu untuk kepentingan bisnis.

Selain itu, untuk membawanya pulang jika memakai jalur hukum, liku-likunya sangat panjang. Menurut pakar hukum ekonomi T. Mulya Lubis, dana itu bisa dikembalikan bila dinyatakan sebagai hasil korupsi. Untuk itu harus ada gugatan dari Indonesia. Itu pun tergantung apakah pengadilan Austria menghormati pengadilan di Indonesia. Ia mencontohkan, hal serupa yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap harta mantan diktator Ferdinand Marcos.

Sebetulnya, asalkan ada kemauan politik dari pemerintah, siapa saja orang Indonesia yang memiliki dana tersebut dapat saja dilacak. Ketika berkunjung ke Jenewa beberapa waktu lalu, Ketua Umum SBSI Muchtar Pakpahan sempat bertemu para bankir di sana. Mereka memberitahukan, asal ada surat permintaan resmi dari pemerintah Indonesia, mereka bisa memberikan daftar orang Indonesia yang menyimpan uang di sana.

Artinya, dengan menggunakan pendekatan politik, rambu-rambu perbankan yang kaku bisa saja diterobos. Sekalipun peraturan perbankan di negara tertentu sangat melindungi kerahasiaan nasabahnya. Asalkan, ada dugaan kuat bahwa dana yang tersimpan itu adalah hasil korupsi. Nah, seandainya daftar nama sudah didapatkan, tentu akan lebih mudah untuk mengetahui dari mana dana itu mereka dapatkan.

Menurut Laksamana Sukardi, harus ada koordinasi antara Presiden, Menteri Keuangan, Kejaksaan Agung dan Bakin untuk menindaklanjutinya. Namun untuk itu, diperlukan Keputusan Presiden sebagai sebuah landasan bertindak. Jika benar-benar serius, pemerintah juga bisa menyewa sebuah lembaga untuk menyelidiki pelarian modal itu.

Sulitnya, dari dalam negeri, seperti ada keengganan dari pemerintahan Habibie untuk melacak harta-harta hasil KKN. Saat mantan Jaksa Agung Soedjono hendak berinisiatif melakukan pelacakan, tiba-tiba Habibie menggantinya. Sementara Jaksa Agung yang sekarang menjabat, Andi Muhammad Ghalib, lebih bersikap pasif, bukannya berinisiatif. "Dana parkir milyaran dolar AS *kan* itu baru berita di koran. Anda punya data? Serahkan ke kami," ujarnya seperti dikutip *Kompas*. Lalu, mengapa Habibie enggan bertindak? Mungkinkah karena ia takut pada yang empunya uang itu? Tak tahulah. ■

Mana Hukuman Bagi Bankir?

Para ekonom domestik gemas melihat Habibie tak serius hadapi krisis. Mereka minta bankir yang sontoloyo agar dihukum.

Keseriusan pemerintah melakukan reformasi ekonomi memang meragukan. Sudah banyak masukan dari para ekonom kritis dari dalam dan luar negeri untuk melakukan tindakan tegas, namun entah mengapa, penerapannya tak pernah memuaskan. Dalam kasus bank-bank yang tidak sehat misalnya, pemerintah tidak pernah menghukum para bankirnya. Padahal, sudah 140 trilyun dana yang disalurkan untuk menyelamatkan bank-bank tersebut.

Karena itu, para ekonom kritis di dalam negeri sudah sangat gemas terhadap pemerintah. Banyak di antara mereka yang sudah lebih sering bicara "penyelesaian politik" —ketimbang bicara persoalan ekonomi— untuk mengganti pemerintahan Habibie dengan pemerintah baru yang lebih dapat dipercaya. Sjahrir, adalah salah satu ekonom, yang berkali-kali bilang bahwa tidak ada *sense of crisis* dari para pejabat di jajaran kabinet Habibie. "Tidak ada kesadaran yang sesadar-sadarnya," ujar Sjahrir kesal.

Mungkin karena kegelisahan itulah, sebanyak 15 ekonom yang kadangkala berseberangan pendapat, duduk satu meja dan mengeluarkan sebuah deklarasi penyelamatan ekonomi Indonesia. Deklarasi itu ditandatangani oleh: Anwar Nasution, Sjahrir, Marie Pangestu, Rizal Ramli, Sri Mulyani, Faisal Basri, Thee Kian Wie, Didiek J Rachbini, Arief Arryman, Rozy Munir, Umar Juoro, Revrisond Baswir, Anggito Abimanyu, Ari Kuncoro dan Chatib Basri. Kamis 6 Agustus lalu, deklarasi itu dibacakan oleh ekonom asal UGM Anggito Abimanyu di Hotel Atlet Century Park Jakarta.

Salah satu poin penting dari deklarasi itu adalah soal penanganan bank-bank yang sakit. Disebutkan, perlu adanya tindakan tegas melalui proses hukum untuk pemilik, manajemen bank, debitur dan pengawas (BI) harus segera dilaksanakan. Pemerintah juga harus menghentikan pemberian talangan atau *bail out* bagi bank yang sakit.

Lebih lanjut disebutkan, "dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, peranan penyehatan perbankan nasional sangat sentral. Untuk itu, perlu adanya peraturan kepailitan (*exit policy*), termasuk di dalamnya penghargaan dan hukuman, sehingga berfungsi sebagai jalan keluar bagi bank yang mengalami salah urus dan *financial distress*, dan menghilangkan *moral hazard* dalam sistem perbankan."

Sistem perbankan yang sehat memang merupakan prasyarat utama reformasi bidang ekonomi. Sebab, bank memainkan peranan yang penting dalam menyalurkan secara tepat dana masyarakat maupun pinjaman dari luar negeri, untuk kepentingan pembangunan. Jika penyaluran dana itu dilakukan dengan tidak tepat, atau bahkan disalahgunakan, tentunya pembangunan bisa terhambat. Utang bank bisa menumpuk.

Repro: The Jakarta Post

■ **Deklarasi Para Ekonom:** Pemerintah tidak punya *sense of crisis*

Masyarakat yang menyimpan uangnya di bank itu pun dirugikan. Itulah yang terjadi bila dana yang dihimpun bank hanya digunakan untuk memperbesar kelompok usaha bank tersebut. Hal demikian yang memicu terjadinya penumpukan kredit macet, yang akhirnya membuat bank itu sakit —praktek semacam inilah yang menjadi salah satu penyebab utama krisis moneter di Asia. Sebab itu, memang penting untuk menghukum bank-bank yang nakal.

Di Indonesia, tindakan tegas itu yang tak pernah dilakukan. Para bankir terkesan terlalu dimanjakan. Buktinya, dari sekian banyak bank sakit di Indonesia, hanya 16 yang dilikuidasi. Sebagian besar, justru menikmati operasi penyelamatan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui kucuran dana lebih dari seratus trilyun rupiah.

Kekhawatiran pemerintah, bila bank-bank sakit dibiarkan mati, maka akan muncul lagi gelombang *rush* seperti yang terjadi di Bank Central Asia dan Bank Danamon. Namun, alasan itu terasa kurang mengena. Mengingat, dana yang ditarik masyarakat dari bank tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan dana pemerintah yang terus-menerus disuntikkan. Tentu lebih baik, rugi kecil (baca: *rush*) ketimbang rugi besar untuk kepentingan segelintir orang pemilik bank.

Wajar, bila ada yang mencurigai praktek KKN masih terus berlangsung dalam pemerintahan sekarang. Sehingga, memungkinkan para pengutang dapat bebas bepergian ke manapun mereka suka. Padahal, menurut Sjahrir, "Kalau di luar negeri, bankir bisa dipenjarakan selama 30 tahun, jika banknya dilikuidasi." Kalau ini berlarut-larut, "Orang akan menuduh pemerintahan ini memang mentolerir KKN, atau justru bagian dari KKN."

Bank Dunia dan IMF, kabarnya, telah merancang Perpu soal prosedur penyelamatan bank. Tampaknya, mereka juga sudah benar-benar kecewa dengan sikap tidak serius pemerintah Indonesia. Rancangan itu memberikan kuasa pada BPPN untuk menciduk para direktur dan karyawan bank untuk diproses secara hukum. BPPN juga berwenang untuk mereorganisasi, memerger, menjual atau melikuidasi setiap bank yang dirawatnya.

Malah, BPPN juga dimungkinkan untuk melakukan investigasi mengenai penyakit bank yang diawasinya, serta bisa langsung membekukan aset bank yang bermasalah. Dan agar prosesnya tidak tertunda-tunda, laporan dan analisis bank yang sakit itu mesti harus sudah beres dalam waktu 90 hari.

Ada kekhawatiran, kekuasaan BPPN yang demikian besar, memberi peluang terjadinya kolusi dari para pejabatnya. Untuk itu, IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia akan ikut serta dalam proses pengawasannya. Seperti dilaporkan *Kontan*, sejumlah mantan menteri akan diminta untuk duduk di BPPN, seperti Rachmat Saleh dan Arifin Siregar.

Memang tidak ada jaminan bahwa para pejabatnya akan bersikap adil dengan model seperti itu. Yang penting, sebetulnya, adalah transparansi dari laporan mengenai bank sakit yang dibuat oleh BPPN. Supaya memungkinkan masyarakat, ikut mengkontrol secara tak langsung. Dan yang terpenting lagi, harus segera dilaksanakan. ■

■ DIALOG

Dokter Naing Aung, Ketua Front Demokratik Mahasiswa Burma:

"Kami Ingin Menumbangkan Rejim Militer"

Ketua Front Demokratik Mahasiswa Burma (*All Burma Student's Democratic Front*), Dokter Naing Aung, 35 tahun, terlihat bersemangat dalam demonstrasi di depan Manila Hotel, Pilipina. Lulusan Fakultas kedokteran Univesitas Burma ini bersama-sama kawan-kawannya memprotes pertemuan Menteri Luar negeri negara-negara Asia Tenggara, yang masih memberi tempat pada rezim militer Burma —yang telah menindas rakyatnya sendiri. "Kalau negara-negara Asean tidak mampu menekan rezim militer di Burma, berarti negara-negara Asean turut menindas rakyat kami", kata Aung. Para mahasiswa Burma pekan depan akan memperingati Hari pembantaian Rakyata Burma yang terjadi sepuluh tahun yang lalu, 8 Agustus 1988. Dengan kaos bertuliskan *"8888, Don't Forget, Don't Give Up!"* sekretaris keuangan *National Council of the Union of Burma* ini sampai kini hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain di luar negeri, untuk memperjuangkan negerinya agar bebas dari penindasan militer. Di bawah ini adalah petikan wawancara *Xpos* dengan Naing Aung.

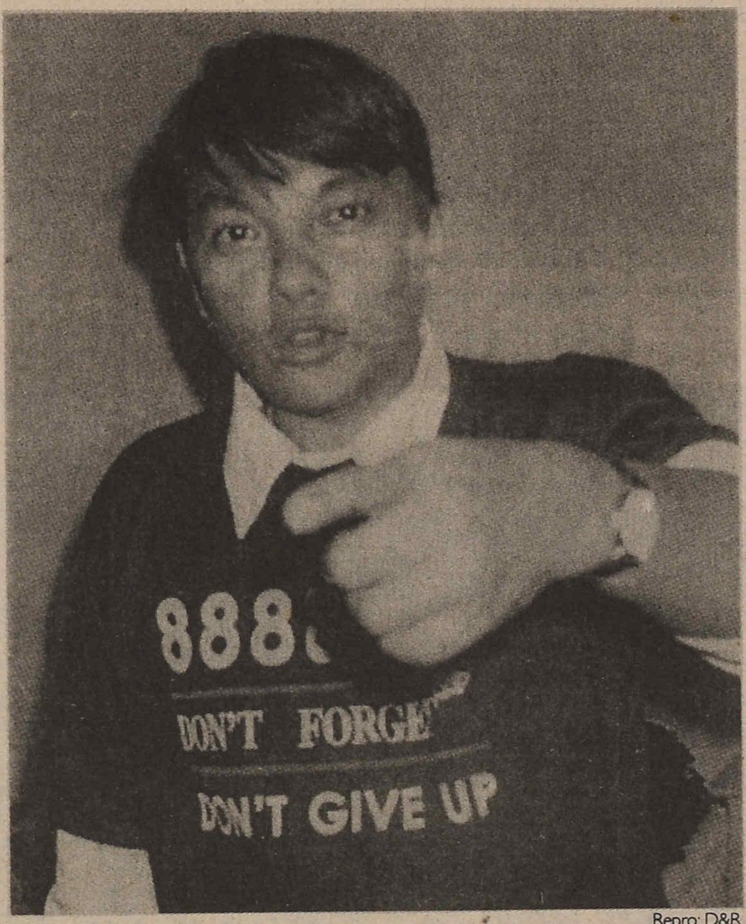

Repro: D&R

Apa yang sebenar terjadi terhadap rakyat Burma sekarang?

Situasi ekonomi di Burma terus memburuk. Selama sepuluh tahun pemerintahan rezim militer di Burma yang korup dan nepotisme semakin membuat susah rakyat. Rakyat sudah lama frustasi, karena tidak ada perubahan apapun. Represi terlalu keras datang dari rezim militer sekarang ini. Suatu saat akan meledak seperti di Indonesia. Ini, situasi yang sangat genting. Rakyat dalam situasi ketakutan. Apabila ada yang ngomong politik ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Kekuasan intelejen militer terlalu kuat. Kami tidak bisa berdemonstrasi di jalan. Apabila rakyat mencoba melakukannya, tentara bisa melakukan apa saja, melakukan apa yang mereka inginkan.

Apa yang dilakukan mahasiswa Burma sekarang untuk melawan rezim militer yang memerintah?

Kami mengkoordinir, menyusun kekuatan di dalam Burma seperti NLD, —Liga Demokrasi Nasional— pimpinan Aung San Suu Kyi, kelompok mahasiswa di dalam Burma dan kelompok politik lainnya dan juga di luar negeri untuk membangun Burma kembali, dan sistem politik yang diinginkan. Kami melakukan gerakan ke arah perubahan, aktifitas di bawah tanah, yang tujuannya mendidik rakyat untuk bergerak ke arah perubahan. Mengajak rakyat untuk mau mengerti cara kami melawan rezim militer. Kami coba mengambil resiko sekecil-kecilnya dan memahami kelemahan pergerakan. Kami juga memberikan informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan media, serta memberikan dukungan untuk perubahan yang demokratik dan memperluas perlawanan rakyat yang saat ini di bawah rezim militer.

Bagaimana dengan media massa di Burma?

Hanya ada sedikit koran, semuanya total disensor oleh rezim militer. Hanya satu stasiun radio yang secara total dikontrol oleh keluarga rezim militer, dua stasiun televisi, satu dimilik tentara dan satunya lagi berada di garis pemerintah, yang semuanya dikontrol oleh rezim militer. Secara fisik kami tidak memiliki kebebasan berekpresi, tidak ada kebebasan menerbitkan, dan segala jenis penerbitan, percetakan dilarang.

Lalu apa yang dilakukan wartawan di Burma?

Jurnalis tidak dizinkan untuk datang *frequently*. Keika kami mengundang para jurnalis untuk datang, tetapi mereka tidak bisa datang. Tidak ada organisasi jurnalis atau organisasi independen jurnalis yang bisa berdiri di Burma. Ketika mereka mencetak, dilarang, mereka mencoba mencetak dan dilarang terus. Kami tidak bisa mengkopi atau memiliki mesin *fotocopy* tanpa lisensi, tanpa izin dari pemerintah. Tidak bisa menulis di komputer atau mesin fax, tidak bisa memiliki akses internet.

Untuk berhubungan dengan media kami lakukan di bawah tanah. Dan para aktifis bawah tanah menyebarkan informasi secara sembunyi. Kami memiliki kontak media seperti di Bangkok dan di India. Kami juga menggunakan media lokal dan inter-nasional. Kami juga menggunakan internet, dan memiliki *web* sendiri, *homepage* sendiri. Kami juga memiliki radio stasiun sendiri di luar Burma, kami mengumpulkan informasi, kami membuat program di Thailand, Korea, India, kami mengirim tape ke dalam dan luar Burma.

Anda membuat pers bawah tanah untuk menumbangkan rezim militer sekarang ini?

Hanya dapat membuat untuk kalangan internal. Kami tidak dapat berbuat banyak di dalam Burma, sebab kami tidak punya mesin press, kami hanya membuat manual, seperti stensil. Yang kami lakukan dengan apa yang kami miliki. Kami merencanakan di Thailand, India, dan kami juga mengirim lewat *canal* bawah tanah. Untuk masuk ke Burma. Tapi itu sangat terbatas sekali.

Anda ingin seperti mahasiswa Indonesia untuk mendorong rezim militer turun?

Ya, kami mendapat inspirasi, dari berbagai gerakan populer semacam *people power* di Phlipina, Gerakan mahasiswa dan buruh di Korea Selatan, dan sekarang juga di Indonesia. Kami ingin berbuat apa yang kami bisa lakukan untuk perubahan. Pada tahun 1988, kami mempunyai kejadian yang hampir sama seperti yang dimiliki Indonesia sekarang. Sebab, itu waktu, masih ada kekuatan sosialis Rusia dan rezim militer mengambil dengan alaasan untuk sistem yang demokratik dan reformasi, ekonomi pasar terbuka. Tetapi yang mereka (rezim militer) lakukan tapi untuk mereka sendiri. ■

Xpos

RATNA: "DONGKEL HABIBIE"

Diterbitkan oleh:
Komunitas Informasi Terbuka
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: **http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp**
PO.Box 22202 London SE5 8WU, United Kingdom

Ganti ongkos cetak Rp. 1000,- Terbit seminggu sekali

Amien Rais Tolak Bintang Mahaputera

Tokoh reformasi itu tak mempan disogok. Ia menolak Bintang Mahaputera yang diberikan B.J Habibie. Dan di tengah gencarnya bujukan PPP, Amien memastikan pendirian partai baru pekan depan.

Bintang Mahaputera mestinya bukan main-main. Penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Indonesia, tiap kali memperingati Hari Kemerdekaan itu, lazimnya dianugerahkan untuk putera-puteri terbaik bangsa. Mereka yang dianggap berjasa untuk republik. Dan, biasanya, para penerima anugerah itu akan berbaris bangga, disemati lencana emas oleh Presiden. Tetapi tahun ini, Bintang Mahaputera bisa jadi kontroversi. Mungkin, inilah untuk pertama kalinya, pemberian anugerah Bintang Mahaputera ditolak oleh penerimanya.

Adalah Amien Rais, tokoh reformasi yang ikut menumbangkan Soeharto, si penolak anugerah itu. *"No way,"* kata Amien, menanggapi Bintang Mahaputera yang akan diberikan kepadanya 15 Agutus. Sikap tegas Amien yang dikemukakan dalam sebuah pertemuan dengan para penggagas Partai Amanat Nasional (PAN) itu, mendapat sambutan hangat rekan-rekannya. Mereka dengan spontan bertepuk tangan mendukung keputusan Amien.

Kenapa hadiah itu ditolak? Agaknya Amien merasa pemberian hadiah itu tak pada tempatnya. Ia melihat bibit-bibit nepotisme mulai berkembang dalam Pemerintahan Transisional Habibie. Selain Amien, yang juga dianugerahi Bintang Mahaputera adalah Ny. Ainun Habibie, istri presiden; dan Sanusi, tokoh Islam yang pernah dipenjara oleh rezim Orde Baru. "Kalau Pak Sanusi pantas dapat anugerah itu. Tapi Ainun Habibie?" tanya Amien heran.

Seorang penggagas PAN menimpali sikap Habibie bernepotis ria itu, sama saja dengan gaya Soeharto ketika memerintah dulu. Tetapi, menurut Amien, "Itu lebih buruk dari Soeharto." Nepotisme Habibie bukan hanya tampak dari pemberian anugerah untuk istrinya itu, tetapi juga pengangkatan teman-teman dekatnya untuk formasi kabinet dan anggota MPR.

Photo: kamera

■ **Mahaputera Nepotisme:** Amien menolak hadiah Habibie.

Yang terbaru, kabarnya, Habibie akan mengangkat teman-teman dekat dan keluarganya untuk jabatan duta besar. Fanny Habibie akan jadi Dubes untuk Jerman, Wardiman untuk Inggris; dan Ruhut Sitompul akan diberi jatah Dubes Singapura.

Hingga kini belum diperoleh konfirmasi, bagaimana sikap Habibie menanggapi penolakan Amien Rais itu.

Satu analisa mengatakan, Habibie sengaja memberikan Bintang Mahaputera itu kepada Amien Rais, untuk merangkul tokoh reformasi itu agar mendukung pemerintahannya. Paling tidak, dari segi kampanye, hadiah itu akan dipandang masyarakat sebagai bukti bahwa Amien Rais memang satu barisan dengan Habibie. Usaha menarik Amien Rais, agar terkesan mendukung pemerintah itu, lebih dulu dilakukan dengan mengembalikan kursi Ketua Dewan Pakar ICMI. Amien sempat dicopot dari Ketua Dewan Pakar ICMI karena kritiknya soal Busang dan suksesi membuat marah Presiden waktu itu Soeharto.

"Dengan menolak hadiah Mahaputera itu, Amien menunjukkan dirinya tidak segaris dengan Habibie," tutur seorang pakar politik UGM. Menurut dia, hal itu akan memperkuat posisi Amien di mata masyarakat. Apalagi, oleh partainya — Partai Amanat Nasional— Amien

Berita Pekan Ini

Pranowo dan Tragedi Aceh	... 3	**Fadjri ditahan di Burma**	... 7
Setelah Prabowo, Siapa?	... 4	**Bisnis Nepotis Akbar Tanjung**	...10
Kongres Palu Harus Dipalu	... 6	**"Air Susu Dibalas Air Tuba"**	...12

Politik

Sudah lama kata itu dihindari oleh orang-orang yang bertalenta baik di tanah air. Kata politik didengar dengan rasa jijik, karena praktek selama Orde Baru memang tidak memberi arti positif. Politik dipandang sebagai cara-cara licik, penuh intrik pat gulipat untuk memenangkan ambisi pribadi. Sudah begitu lama, politik jauh dari perjuangan cita-cita, jauh dari semangat pengabdian, semangat melayani masyarakat.

Tak heran, bila dalam situasi euphoria kebebasan ini, ketika hampir 60 partai didirikan, tapi orang banyak yang mencibiri. Belum lagi, performance partai-partai itu memang tidak meyakinkan. Mayoritas partai-partai baru itu, alamat kantor pun tak punya. Kesan, sekedar ada, deklarasi mengundang pers, setelah itu tak ada tindak lanjut; memang kuat menempel di wajah partai-partai baru.

Padahal, mayoritas cerdik pandai, mengakui, bahwa krisis yang kita alami ini, tak bisa diatasi tanpa pembenahan politik. Siapa yang harus melakukan, bila partai-partai dipandang dengan sebelah mata? Gerakan moral saja, tak akan cukup, saat semua tatanan bangsa ini sebetulnya sedang menuju kehancuran. Gerakan moral, yang landasannya hanya ingin mengoreksi kekeliruan, menjadi tidak cukup — bahkan kehilangan gregetnya —, ketika pemerintah ini sebetulnya sudah keok; tak mampu menangani tantangan sejarah.

Maka, sebetulnya, politik mempunyai panggilan baru yang tinggi urgensinya. Barangsiapa merasa bertanggungjawab atas perbaikan nasib republik ini, semestinya tak ragu-ragu turun gelanggang: memberesi politik yang berantakan. Imej tentang kekotoran politik, mesti kita hadapi dengan tegar; dengan satu pedoman, kita masuki wilayah baru ini untuk perbaikan masyarakat semata.

Dalam konteks itu, seburuk-buruknya partai yang bermunculan, mereka mesti disikapi dengan hangat. Itulah awal kebangkitan kesadaran baru, terutama di kalangan generasi muda, untuk tak jijik dengan politik. Adalah gambaran yang menggembirakan, bila para pemuda, seperti di era 20-an, memenuhi panggilan politik dengan semangat tinggi. Mengabdi pada bangsa. Seperti dulu, Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, sejak usia dini, menceburkan diri pada perjuangan politik: untuk Indonesia merdeka.

Panggilan itu terdengar lagi. Untuk Indonesia yang bermartabat.

■ **LUGAS**

dicalonkan menjadi presiden tahun depan. Garis demarkasi terhadap Habibie, memang mesti ditarik tegas oleh Amien, bila ia ingin mendapat dukungan dalam pencalonan dirinya sebagai presiden. Sebab, bukan rahasia lagi, B.J Habibie tampak jelas berambisi untuk memperpanjang jabatannya. Seperti pernah dikemukakannya kepada sebuah koran asing.

PAN dan PPP

Ihwal Amien Rais dan PAN, akhir-akhir ini memang makin jelas sosoknya. Partai yang akan diumumkan pendiriannya pekan depan itu, sedikit mundur dari rencana 17 Agustus itu, agaknya akan menjadi partai pluralis dengan ide-ide modern. PAN, misalnya mendukung referendum untuk Timor Timur, dan gagasan negara serikat untuk Indonesia. Tokoh dari berbagai latar belakang, seperti AM Fatwa, Dawam Rahardjo dan TH Sumarthana, dikabarkan akan duduk sebagai ketua, mendampingi Amien Rais, yang jadi Ketua Umum. Partai ini, juga menampilkan citra anak muda, dengan kemungkinan tampilnya Faisal Basri, ekonom UI, sebagai Sekjen.

Tetapi, kelahiran PAN bukannya mulus-mulus saja. Rayuan PPP untuk menarik tokoh Muhammadiyah itu ke kubu partai berlambang bintang itu, masih gencar dilakukan. Segera setelah Amien Rais pulang dari Jerman, 11 Agustus lalu, misalnya, tim *lobby* PPP menjemput Amien di Cengkareng. Tim yang antara lain dimotori Mudrick Sangidu, Yusuf Syakir dan Aisyah Amini itu, menodong Amien agar duduk sebagai Ketua Dewan Pakar PPP. "Pak Amien sudah meneken kesediaan itu," tutur seorang tokoh PPP.

Menurut Yusuf Syakir, seorang Ketua Dewan Pakar PPP, mestilah anggota PPP. Dan, anggota PPP tidak boleh merangkap menjadi anggota partai lain. Hal ini, tampaknya akan menjadi problem tersendiri, karena Amien akan memimpin partai baru — PAN, yang didirikannya bersama-sama tokoh MARA. Bila konflik ini terjadi, tampaknya, Amien harus meninggalkan kursinya di Dewan Pakar PPP. Hal itu dilakukannya Jum'at pekan silam.

"Bagaimanapun PPP itu partai Orde Baru, yang sekarang kehilangan pamornya," kata Rizal Panggabean, pakar politik dari Yogya. Dan setelah ditinggalkan NU —yang membentuk Partai Kebangkitan Bangsa— maka pendukung PPP sebetulnya tinggal mereka yang dari Muhammadiyah. Kalau Amien membentuk partai, dapat diduga, konstituen Muhammadiyah itu akan mendukung.

Amien Rais, memang tak menafikan potensi PPP untuk ikut membesarkan partai barunya nanti. Paling kurang, PPP memang telah memiliki jaringan di semua daerah tingkat dua. Jalan, yang mungkin, paling baik adalah meleburkan partai berlambang bintang itu, dengan PAN. Tetapi, hal ini, pagi-pagi sudah ditampik oleh Ismail Hasan Metareum, Ketua Umum PPP. "Bagaimana PPP melebur dengan partai yang belum ada?" katanya.

Meskipun proklamasi PAN di tingkat pusat tertunda, respon daerah tampaknya tetap antusias. Aktivis LSM, mahasiswa, Muhammadiyah dan kelompok-kelompok lain di berbagai kota di Jawa Barat —seperti Bogor, Cianjur, Sukabumi, Garut, Bandung, Cirebon, dan Majalengka— telah bergerak mengantisipasi pendirian PAN. Mereka mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan *platform* PAN yang kini mulai disebarkan. "Banyak aktivis prodemokrasi dan pesantren, menyambut baik *platform* itu," tutur seorang aktivis. Pertemuan-pertemuan itu, agaknya akan bermuara pada pembentukan cabang-cabang.

Jadi, mestinya, Amien tak perlu ragu tentang dukungan cabang. ■

Mari Dukung
DIALOG NASIONAL UNTUK DEMOKRASI

Dialog Nasional
15-16 Agustus 1998
di Hotel Indonesia

Pesta Rakyat
17 Agustus 1998
di Tugu Proklamasi

Sekretariat:
Jl. Kampung Melayu Kecil V No. 24, Bukit Duri Tanjakan, Jakarta 12840.
Tel/Fax: (021) 829.1657

Pramono Penanggungjawab Kasus Aceh

Kebiadaban yang dilakukan anggota ABRI di Aceh tak cukup dihapus dengan kata maaf. Mantan Pangdam Kodam Bukit Barisan, Mayjen HR Pramono, disebut-sebut sebagai yang harus bertanggungjawab.

Pada malam 17 Agustus dua tahun yang lalu, seorang gadis cacat asal desa Daya Teumanah, Kecamatan Treinggadeng lari tertatih-tatih menuju ke rumahnya. Pasalnya, ketika menjaga kios yang berada diujung lorong tak jauh dari rumahnya, ia didatangi sejumlah tentara. Salah seorang diantaranya dikenal bernama Pratu HMS. Dalam keadaan mabuk tentara-tentara itu mengganggu SH.

Namun, nasib baik tak berpihak pada SH. Sebelum sempat ia menutup pintu, HMS sudah berada di depan pintu dan mengancam mau menembak jika tidak dilayani. Akhirnya peristiwa tak bermoral itu pun terjadi. Banyak saksi mata yang melihat peristiwa tersebut, termasuk gadis-gadis tetangga korban. Tetapi tak ada satu pun orang yang berani protes atau mempesoalkan, apalagi SH yang ketakutan. Jika mengadu, menurut wanita yang sekarang mempunyai anak umur 14 bulan itu, kondisinya akan semakin buruk lagi. Dan konon bayi yang betusia 14 bulan itu adalah buah kebiadaban tentara HMS itu.

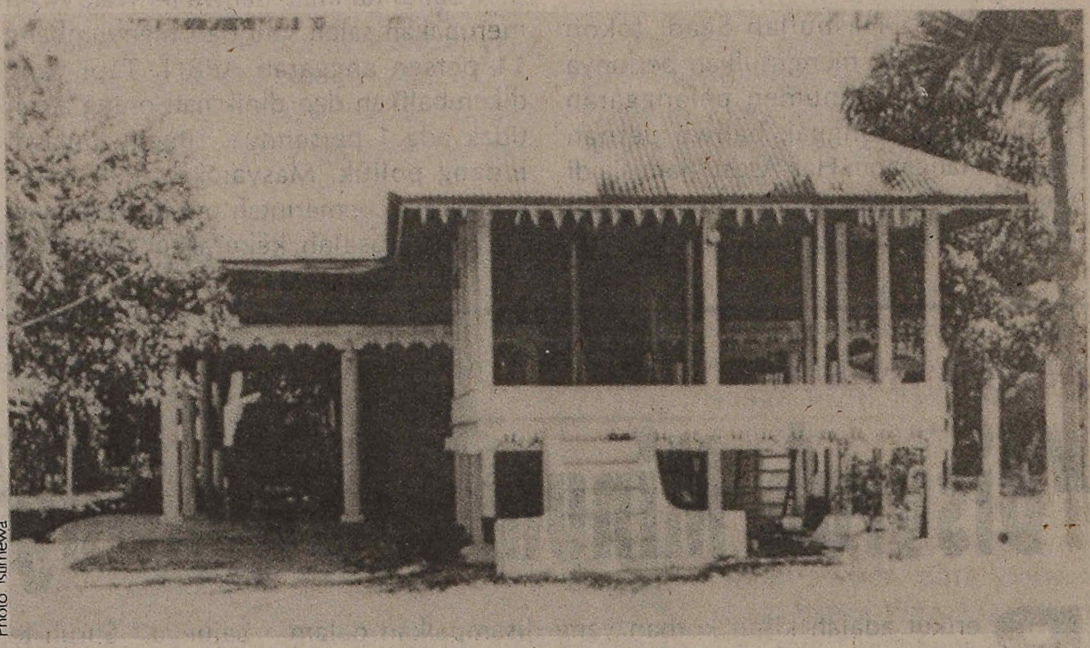

Photo: Istimewa

■ **Kamp Penyiksaan:** Tempat orang Aceh dianiaya.

Cerita itu bukan cuplikan sebuah film atau cerita fiksi, tapi fakta yang sering dialami ratusan, mungkin ribuan, wanita Aceh sejak ABRI menguasai wilayah itu. Belum lagi penyiksaan dan eksekusi biadab oleh ABRI terhadap masyarakat sipil di Aceh. Bahkan tak jarang eksekusi itu dilakukan dihadapan masyarakat umum, termasuk anak-anak di bawah umur.

Seperti kisah yang dituturkan Saudah, 50 tahun, dalam buletin TIPHAM (edisi II Agustus 1998). Warga Desa Meurah Mulia itu mengisahkan tentang anaknya, Abdi, yang dibunuh tentara medio 1990. Pemuda yang sehari-hari kerjanya menangkap ikan itu ditangkap dan dibawa dengan menggunakan truk ke balai desa. Tangannya diikat dan pakaiannya dilepas sambil dipukuli. Tak hanya itu, sepeda motor, Honda GL 100 dan uangnya sebesar Rp 3 juta pun dirampok. Tiga hari kemudian, mayat Abdi dtemukan warga di Simpang Keuramat, Aceh Utara, dalam kondisi memprihatinkan: (maaf) kemaluannya dipotong!

Atau kepedihan yang dialami dua warga Simpang Ulim, Aceh Timur yaitu Sarjani Ibrahim (35), penduduk Lueng Sa dan Tengku Imum Budiman (50), penduduk Lueng Dua. Keduanya ditembak di lapangan Sepak Bola Sinar Agung, Leung Sa disaksikan ratusan penduduk setempat. Pada 17 bulan Ramadhan 1991, sekitar pukul 10.30 WIB, para penculik menangkap kedua korban. Mereka diseret dan matanya ditutup kain hitam ke tengah lapangan sepak Bola setempat. Sedangkan penculik yang lain memaksa masyarakat untuk menyaksikan eksekusi tersebut, termasuk Tengku Ibrahim, ayahnya Sarjani.

Dua korban diikat pada tiang gawang dan ditembak persis dibagian kepala. Keduanya tewas ditempat. Untuk mempermudah melepas borgol, tangan mayat Sarjani dipotong dan para tentara itu melarang mayat Sarjani dimandikan secara Islam.

Peristiwa-peristiwa sadis seperti itu tidak hanya dialami pula ribuan orang Aceh. Banyak keluarga kehilangan kepala rumah tangganya, atau anak laki-lakinya. Beberapa sumber menyebut bahwa saat ini terdapat 39.00 perempuan cerai mati. Sebelumnya 1992, Biro Pusat Statistik setempat membeberkan bahwa dari 3,4 juta penduduk Aceh, 134.302 orang (tiga persen lebih) berstatus janda.

Abdullah Nurdin, warga Rantao Panjang, misalnya, mengaku kehilangan 26 anggota keluarganya. Ia sendiri bisa lolos dari maut, meski sempat disekap, disiksa, diminta minum air kencingnya sendiri, bahkan dimasukkan karung goni untuk dibuang ke sungai. Dan sungai di Aceh, adalah salah satu tempat pembuangan mayat.

Beberapa saksi lain yang hadir di seminar yang diselenggarakan Institut Studi Arus Informasi (ISAI) di Jakarta, Rabu, 12 Agustus lalu, mengatakan kekejaman tentara paling banyak terjadi ketika Pangdam I Bukit Barisan dijabat Mayjen HR Pramono. Konon setiap hari ada saja orang yang diculik, disiksa atau dibunuh. Karenanya, "Pramono harus diadili, sebab tahu banyak tentang peristiwa pembantaian massal tersebut," tegas seorang warga Aceh.

Dimasa kepemimpinan Pramono, di awal 1990-an, tersebutlah tiga anggota Kopassus yang termahsyur sebagai "malaikat maut". Mereka bernama panggilan Bayu, Purba dan NK, sangat dikenal penduduk karena sadis dan bengis. "Oleh masyarakat, mereka dijuluki malaikat pencabut nyawa. Karena bisa berbuat apa saja semaunya. Masyarakat selalu menghindar jika mereka lewat", kata seorang sumber.

Karena perlakuan sengaja dan bahkan mungkin sudah menjadi kebijakan ABRI itu lah, maka tak heran jika permintaan maaf atau pencabutan status Aceh sebagai daerah operasi militer oleh Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto atau penggantian GPK menjadi GPL (gerakan pengacau liar) disambut dingin oleh masyarakat Aceh. "Masalahnya tidak selesai sampai di situ. Sebab masyarakat Aceh menuntut ada tindakan hukum yang semestinya untuk para pelanggar HAM di Aceh. Selain itu juga perlunya rehabilitasi mental masyarakat atas ketertekanan dan trauma-trauma yang diciptakan selama ini. Terutama kepada para janda dan anak yatim yang tidak bermasa depan", kata Abdul Gani Nurdin, Ketua Peduli HAM Aceh.

■ **POLITIK**

Pencabutan status DOM, penggantian GPK menjadi GPL, dikhawatirkan hanya sekedar penggantian istilah jika tidak disertai dengan tindakan tegas bagi pelanggar HAM. "Orang bisa saja diburu atau ditembak mati lantaran dituduh GPL. Upaya adu domba di antara masyarakat Aceh sendiri harus dihentikan", ujar salah seorang perserta.

Sementara Hasbullah Saad, tokoh intelektual Aceh, mengusulkan perlunya pembangunan monumen pelanggaran HAM sebagai tonggak bahwa pernah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh. "Agar jangan sampai *ceurape* yang sama masuk ke rumpun bambu yang sama pula", katanya.

Apalagi menurut Endang Saefullah, anggota Tim Pencari Fakta DPR RI, telah menemukan bukti bahwa tidak ada gerakan yang anti negara RI atau anti Pancasila. Tapi, mereka protes atas tindak ketidakadilan yang dilakukan rejim Soeharto. Seperti data yang disampaikan oleh Saiful Rahmat, bahwa ternyata Aceh merupakan salah satu dari menyumbang 11 persen anggaran APBN. Tapi yang dikembalikan dan dinikmati orang Aceh tidak ada 1 persennya. "Begitu pula di bidang politik. Masyarakat Aceh tidak terwakili di pemerintah pusat," tuturnya.

Jadi, masalah kekerasan tentara di Aceh sampai sekarang masih belum jelas. TPF DPR RI masih belum mau serius membongkar kebiadaban ABRI di Aceh. Buktinya, penemuan kuburan masal tidak langsung dibongkar sehingga memungkinkan terjadinya penghilangan fakta.

Pemerintah Habibie sendiri sampai saat ini belum mengeluarkan pernyataan sedikitpun yang bisa melegakan rakyat Aceh mengenai penindakan tegas terhadap pelanggar HAM di Aceh lebih-lebih upaya rehabilitasi terhadap masyarakat. Agaknya, pemerintah tak sungguh-sungguh mengusut tragedi kemanusiaan di Aceh. ■

Abdullah Nurdin:

"Disuruh Minum Air Kencing"

Berikut adalah kisah korban yang disampaikan dalam diskusi tentang Aceh yang diselenggarakan Institut Studi Arus Informasi (ISAI) di Hotel Acacia, 12 Agustus 1998:

Nama saya Abdullah Nurdin, tamatan Madrasah. Sebelum bicara Pak, maaf bahasa saya kurang *lempang*. Saya ke sini dibilang sama anak saya, Ramadani, disuruh pergi untuk cerita kisah saya ini. Keluarga saya ada mati 26 orang, cuma tujuh orang yang tahu kuburnya. Saya bicara ini dimuka bapak yang saya rasa pada diri saya. Yang sudah menimpa diri saya.

Tahun 1991, yang selamat 1 orang, Tahun 92 yang selamat dua orang, saya dan kakak saya. Waktu itu saya pulang dari Medan, pekerjaan saya jual ayam. Datang tentara, ditangkap saya di kedai tempat saya jualan. Ditanya, "Saudara nama Abdullah?", ya saya jawab. "Kamu disuruh ke posko!". Ada perlu apa? "Ya pokoknya ada perlu, kalau tidak *ya* mana saya panggil kamu". Sudah saya tanya mana ada suratnya? Bukan dikasih jawaban malah dipukul terus saya Pak. Terus saya dikalung (diikat, *red*), lalu dipanggil kereta (mobil, *red*) ditaruh saya di tengah, lalu di bawa saya ke Bukit Palah Kecamatan Perlak.

■ **Para Korban Mengadu ke TPF**

Waktu dibawa saya ditanya, "Bapak mimpi apa semalam?" saya jawab tidak ada. "Jangan pura-pura, bapak*kan* kepala AM" (AM=Aceh Merdeka, *red*). Itu yang *nggak* tahu saya. "Jangan pura-pura!" Terus ditanya, "Di mana bapak simpan senjata?", "Jangan pura-pura bodoh pak!". Langsung Pak saya dipukul, empat orang yang mukul saya, yang tangkap saya namanya si-Subang, Yanto, dibalik-balik namanya. Tujuh kali saya dipukul, pingsan saya. Mereka pulang, saya bangun masih di markas. Sakit kencing saya. Kebetulan di situ ada botol pecah. Saya ambil, saya kencing. Datang orang, dada saya rasa haus, pak tolonglah saya haus beri air. Dia jawab, "O, kupikir kau sudah mati. Itu apa itu?" Itu kencing saya pak. "Ambil air itu untuk minum!" *Nggak* pak, "*Nggak* mau minum?" Disepak saya Pak berulang, terpaksa air kencing saya sendiri saya minum. Sampai habis. Macam mana rasanya Bapak bisa bayangkan.

Sesudah itu tetap saya *nggak* dikasih minum. Dia suruh, "Buka bajunya!" Suruh telanjang saya. Di baju itu ada duit dua juta tujuh ratus lima puluh. Dia periksa tadi. Waktu ramai-ramai *nggak* berani dia ambil. Akhirnya saya dimasukkan goni, lalu diikat pakai kawat. Saya merasa inilah saat terakhir saya, sebab biasanya di sana orang yang masuk di goni itu kalau ditemukan sudah mati, tubuhnya terpotong-potong. Tak heran lagi, bergelimpangan di jalan, ada yang dimasukkan ke sungai. Pak Bayu itu saya ingat namanya. Terkenal dia sebagai malaikat maut. Dibuka lagi orang karung saya, disuruh saya pakai baju saya, uang saya sudah tidak ada lagi. Dia lapor ke komandannya, "Ini kepala AM tidak ada informasi apa-apa".

Saya dengar sesudah itu, waktu saya ditangkap kabar tersiar, Pak Abdullah ditangkap, istri saya mencari-cari, "Pak Koramil kenapa suami saya ditangkap?". Dia jawab, "*Nggak* tahu!". Pergi ke camat, *nggak* tahu. Pergi ke kepala desa, *nggak* tahu. "Pulang *aja* ibu, tunggulah!" Akhirnya Pak, saya ini kayak main latihan lah bagi tentara, setiap jam datang pukul saya. Salah saya apa, saya *nggak* tahu.

Waktu itu abang saya ditangkap dibawa ke pos, orang itu datang ke pos sangat takut sekali, dipukuli pakai *broti* (balok). Tubuh sudah bengkak-bengkak semua. Ditanya ke saya, "Kenal kau?" Ya, saya jawab. *Dilaga* kami Pak, diadu, lemas semua kami Pak. Sesudah tiga hari ditangkap kami, dibawa saya dan dia dikalung (diikat, *red*) satu telentang satu telungkup jadi *nggak* bisa tidur.

Adik saya lainnya tanya ke posko, "Kenapa abang saya?" Dijawabnya, abang kamu itu pernah beli tanah orang Jawa. Itu mengusir orang Jawa, namanya GPK. Beli tanah orang Jawa itu namanya GPK. "Kalau itu persoalan saya cari ke Srui" jawab adik saya. Dibawalah orang yang punya tanah ke posko. Dibentak orang Jawa *tuh*. "*Nggak* boleh jual tanah, kembalikan uangnya!". Uang sudah tak ada. "Mana suratnya?" Suratnya diambil, datang ke dia surat dirobeknya,...*wrekk*. "Sudah kalau Bapak mau pulang, kembalikan itu tanah dan Bapak dari Jawa itu harus tinggal di tanah itu," kata tentara. Jadi seperti diadu kami pak. Jadi sengketa yang bikin tentara. "Pulanglah kau!" Baru saya pulang Pak. Saya dibilang GPK karena beli tanah orang Jawa. ■

Setelah Prabowo, Siapa Lagi?

Kepada DKP, Prabowo mengaku salah menganalisa perintah bawah kendali operasi (BKO). Lalu, siapa yang memberi perintah itu?

Misteri penculikan aktivis pro-demokrasi makin terkuak. Tersangka utama dalang penculikan, Letjen Prabowo Subianto, telah mengaku salah menganalisa perintah bawah kendali operasi (BKO) dari atasannya. Kesalahan itu diakui Prabowo saat diperiksa Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin KSAD, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, Rabu, pekan lalu.

BKO adalah salah satu kategori perintah yang berlaku dijajaran komando ABRI. Komandan kesatuan yang diinstruksikan BKO harus menugaskan sejumlah anak-buahnya membantu kesatuan lain. Tapi, komando terhadap satuan tentara yang di BKO-kan dipegang komando satuan yang menerima bantuan.

Dalam kasus Prabowo, agaknya, ia selaku Komandan Jenderal Kopassus menerima perintah BKO dari atasannya untuk membantu pasukan Kodam Jaya mengamankan situasi ibukota. Tapi, Prabowo kemudian melangkah terlalu jauh: memerintahkan anak-buahnya menculik para aktivis, untuk membungkam suara-suara kritis mereka.

Sampai disini, pengakuan bersalah Prabowo itu mengandung sejumlah pertanyaan yang mengganjal. Misalnya, kalau benar Prabowo menerima perintah BKO, mestinya ia tak berhak kendali konando terhadap anak-buahnya. Yang berwenang memberi komando adalah komandan pasukan yang menerima bantuan BKO, yaitu Panglima Kodam Jaya. Dari sini saja sudah terlihat Prabowo telah melanggar prosedur BKO. "Maklum, saat itu *kan* masa-masa kejayaannya Prabowo. Siapa yang berani menegur, apalagi menindak dia," kata sumber *Xpos* di Mabes ABRI.

Tapi, kalau benar begitu yang terjadi, mestinya tak hanya Prabowo yang harus bertanggungjawab. "Pangdam Jaya waktu (penculikan dimulai) itu harus ikut bertanggungjawab," kata Letjen (Purn) Hasnan Habib. Kebetulan Pangdam Jaya saat aksi penculikan dimulai, medio 1997, tak lain dijabat Mayjen Sjafrie Sjamsudin-karibnya Prabowo.

Selain itu, atasan Prabowo yang memberi perintah BKO juga harus dimintai pertanggungjawaban. Sebab, ia membiarkan saja pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Padahal, mestinya sang atasan sudah mengetahui aksi penculikan yang berlangsung selama hampir setahun itu.

Soalnya kemudian, belum terang benar siapa perwira tinggi yang memberi perintah BKO, dan bagaimana sebenarnya bunyi perintah BKO itu? Kalau dilihat dari hirarki komando ABRI, atasan yang berwenang memerintahkan Prabowo hanya tiga orang: Presiden RI selaku Panglima Tertinggi ABRI, Panglima ABRI, dan Kepala Staf Angkatan Darat.

■ **Prabowo:** Mengaku salah

Kepada pers, Jenderal Subagyo menjelaskan bahwa presiden waktu itu (Soeharto) dan Panglima ABRI saat itu (Jenderal Feisal Tanjung) tidak memberikan perintah BKO. Kalau begitu, kemungkinan si pemberi perintah tinggallah KSAD, yang kala itu dijabat Jenderal R. Hartono. Benarkah begitu? "Nanti kita lihat. Jangan gampang menyalahkan," ujar Subagyo diplomatis.

Untuk mendapatkan keterangan lebih banyak, rencananya DKP akan kembali memeriksa Prabowo dan dua perwira lainnya: Mayjen Muchdi Pr. (mantan Danjen Kopassus yang menggantikan Prabowo) dan Kolonel Chairawan (Komandan Grup IV Kopassus).

Dari hasil pemeriksaan, kemudian DKP memberikan rekomendasi kepada Panglima ABRI, Jenderal Wiranto. Sampai sekarang, Subagyo dan para anggota DKP belum mau menyebut apa rekomendasi yang akan diajukan kepada Panglima ABRI. Tapi, melihat kesalahan yang diakui sendiri oleh Prabowo dan anak buahnya, mestinya sudah lebih dari cukup menyeret mereka ke Mahkamah Militer.

Beranikah ABRI bertindak sejauh itu? Pengalaman yang sudah-sudah, para perwira tinggi hanya diperiksa sebatas DKP saja. Contohnya, kasus Peristiwa Santa Cruz, Dili, beberapa tahun lalu, para perwira tinggi hanya dikenakan sanksi dinon-aktifkan dari jabatannya —setelah diperiksa Dewan Kehormatan Militer (DKM).

Tapi, sejumlah pengamat politik, justru menganalisa kemungkinan Prabowo dan kawan-kawan diseret ke Mahkamah Militer cukup besar. "Langkah itu akan sangat berguna bagi pemulihan citra ABRI yang terpuruk sekarang ini," kata seorang pengamat. Dan, bagi Jenderal Wiranto sendiri inilah momentum untuk menyingkirkan seteru politiknya yang utama. Artinya, dengan satu tindakan dua-tiga keuntungan bisa diraih dengan segera.

Benar tidaknya analisis pengamat politik itu, kita tunggu saja tanggal mainnya. ■

Ditengah rakyat Indonesia memperingati hari kemerdekaan,
tiga anak bangsa
(R. Fajri, Sulaiman Haikal dan Chritian Evert)
bersama 15 aktifis pro-demokrasi dirampas kemerdekaannya
oleh Junta Militer Myanmar.

Ayo kita galang solidaritas untuk membebaskan mereka.
Kirimkan segera surat protes Anda ke:

Kedutaan Besar Myanmar
Jl. H. Agus Salim No. 109, Jakarta 10350
Tel: (021) 314.0440, 327.684 Fax: (021) 327.204

Kongres Palu Harus Dipalu

Pemerintah Habibie masih mendukung PDI Soerjadi. "Itu menyakiti hati rakyat," kata Megawati.

Kemelut di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tampaknya belum akan berakhir. Menjelang pemilu tahun depan, tak terlihat tanda-tanda faksi-faksi yang bertentangan akan bersatu kembali. Malah, yang muncul ke permukaan adalah aura perpecahan yang makin meruncing. Dan, yang paling kerap "mengompori" perpecahan itu tak lain pemerintah transisi Presiden B.J. Habibie sendiri.

Kamis, 13 Agustus lalu, misalnya, Habibie menerima rombongan pimpinan PDI hasil Kongres Medan yang dipimpin ketua umumnya, Soerjadi, yang melaporkan rencana Kongres PDI V yang akan berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah, 25-29 Agustus nanti. "Pak Habibie menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kongres," kata Buttu Hutapea, Sekjen PDI Soerjadi. Bahkan, pertemuan yang berlangsung akrab itu diwarnai adegan cium pipi khas Habibie.

Dalam kasus PDI, pemerintah Habibie memang masih meneruskan kebijakan rejim Soeharto. Maklum, tokoh-tokoh yang dulu ikut mendongkel Megawati kini masih bercokol di pemerintahan, malah memegang posisi-posisi kunci. Diantaranya, Syarwan Hamid (kini menjabat Mendagri) dan Feisal Tanjung (Menko Polkam).

Sikap pemerintah itu tentu saja membuat berang Megawati. "Itu menyakiti hati dan perasaan rakyat," kata Ketua PDI Perjuangan itu. Bagi Mega, kepengurusan PDI pimpinan Soerjadi tidak sah, karena dihasilkan lewat rekayasa. Lagipula, saat ini gugatan Megawati atas keabsahan "Kongres Medan" belum lagi diputuskan pengadilan. "Mestinya pemerintah Habibie menghormati proses hukum itu. Kok, belum-belum sudah mengijinkan PDI Soerjadi berkongres," kata Jacob Nuwawea, salah seorang pendukung Megawati.

Dukungan pemerintah terhadap PDI Soerjadi itu bukannya tanpa motif politis. "Ini merupakan strategi pemerintah Habibie untuk memelihara konflik di tubuh PDI, sehingga melemahkan kekuatan Megawati," tutur seorang pengamat politik. Memang, PDI Perjuangan merupakan potensi terkuat untuk menyaingi Golkar dalam pemilu mendatang. Megawati sendiri merupakan lawan utama Habibie sebagai kandidat presiden pasca pemilu 1999.

Toh, berbagai ganjalan itu tak membuat kekuatan PDI Perjuangan melemah. Malah, makin hari pamor Megawati dan PDI Perjuangan makin berkibar. Dukungan kepada Megawati tak hanya datang dari kalangan pro-demokrasi, tapi juga tokoh-tokoh rejim Soeharto yang disingkirkan Habibie. Diantaranya, sejumlah jenderal pensiunan yang tergabung dalam Barisan Nasional.

Photo: Istimewa

■ **Megawati & Alex Litaay:** Didukung massa rakyat

PDI Perjuangan sendiri sudah menyiapkan berbagai strategi untuk memperluas dukungan rakyat. Misalnya dengan membuka Posko-Posko Reformasi hingga ke pelosok-pelosok kota dan desa. Kegiatan posko ini, antara lain, menjual sembako murah untuk rakyat kecil. "Pokoknya, makin direpresi, Megawati akan semakin populer di mata rakyat," kata pengamat tadi.

Meluasnya dukungan terhadap Megawati membuat sebagian pendukung PDI Soerjadi keder. Bahkan, kabarnya, sebagian cabang PDI Soerjadi juga sudah membelot ke kubu Megawati. Sebagian cabang malah ditinggal begitu saja oleh pengurusnya, karena tak mau terkena stigma PDI Soerjadi-yang dinilai antireformasi.

Karena itu, banyak yang menilai Kongres Palu yang akan digelar PDI Soerjadi tak akan banyak artinya. "Paling-paling hanya jadi ajang berkumpul segelintir politisi," kata Jacob Nuwawea. Ketua Tim Pemantau Kongres Palu itu bahkan mengancam akan mengirimkan rombongan untuk menggagalkan kongres PDI Soerjadi itu. Ancaman serupa juga dikeluarkan para pendukung Megawati dari Indonesia Timur. Bagaimanapun, "Kongres Palu itu harus dipalu," geram Soetarjo Soerjoguritno, Ketua PDI Perjuangan.

Nah, daripada kena tulah rakyat, sebaiknya Soerjadi dan antek-anteknya mengaku kalah saja. Hitung-hitung sebagai mencuci dosa politik yang telah dilakukannya selama ini. ■

Sang Dalang Belum Terungkap

Pengadilan terhadap dua anggota Brimob sudah selesai. Hasilnya seperti dugaan masyarakat sebelumnya: dalangnya tidak terungkap.

Lettu (Pol) Agus Tri Heryanto dan Letda (Pol) Pariyo yang duduk di kursi terdakwa di pengadilan mahkamah militer, Rabu (12/8) lalu terkesan biasa-biasa saja. Mereka tidak menunjukkan kesedihan atau keterkejutannya. Padahal waktu itu mereka mendengarkanputusan Hakim Mahkamah Militer II-08 Jakarta yang menyangkut masa depan mereka. Hakim Mahmil menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara kepada Agus dan 4 bulan kepada Pariyo karena keduanya terbukti tidak mentaati perintah dinas dan melampui kewenangan dinas saat menangani unjuk rasa mahasiswa Trisakti Jakarta dan menewaskan empat mahasiswa, 12 Mei lalu. Mereka berdua tidak puas terhadap putusan itu. Begitu pula para penasehat hukumnya, sehingga mengajukan banding.

Mendengar putusan itu sebagian pengunjuk bersorak, sementara sebagian yang lain menyatakan ketidakpuasannya karena dalang penembakannya sendiri tidak diadili dan masih berkeliaran secara bebas. "Mereka hanya para korban", kata salah seorang mahasiswa Trisakti yang ikut memadati sidang itu.

Memang patut disesalkan rendahnya hukuman bagi sebuah tindakan yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti, jika memang kedua polisi itu yang melakukan penembakan. Tapi sangat disesalkan jika

pelaku sebenarnya tidak terungkap. Sebab, seperti keterangan-keterangan dari Kapolri Jenderal Dibyo Widodo sebelum sidang di mulai bahwa dalam pengamanan demonstrasi, polisi tidak diberi peluru tajam. Semua senjatanya diisi dengan peluru karet. Itu artinya, ada pasukan lain yang datang di luar anggota polisi yang menembak mahasiswa dengan peluru *beneran*. Lalu pasukannya siapa? Bagaimana dengan adanya isu bahwa ada *sniper* yang menembak mereka dari *fly over*? Ini yang tidak dijawab dalam persidangan Mahkamah Militer.

Yang tidak puas terhadap putusan hakim itu tentunya bukan terdakwa atau penasehat hukumnya saja. Tapi masyarakat yang mendambakan keadilan. Masyarakat sudah menduga sebelumnya bahwa sidang Mahmil ini hanya dianggap dagelan yang tidak lucu. Sebab sejak awal, hakim hanya membatasi pada pemeriksaan prosedural tugas-tugas keprajuritan dalam tubuh ABRI.

Adnan Buyung dan kawan-kawan yang berusaha untuk masuk ke pencarian dalang yang sebenarnya, akhirnya hanya mendapatkan teguran dan ancaman dari Hakim. Jadi ya, tidak ter-ungkap. Agus dan Pariyo bisa saja dibilang sebagai korban. Ketika ditahan sebelum perkaranya disidangkan, keluarga mereka ditekan agar tidak protes apapun. Para penekannya minta agar kedua anggota polisi itu mengakui semua tuduhan Oditur Militer, kalau mau menuruti, semua tanggungan keluarga selama mereka di penjara akan dipenuhi termasuk janji penyelamatan pangkat dan posisinya di ABRI.

Nurani mereka berontak dan tetap saja menolak tawaran itu. Bahkan tak tanggung-tanggung mereka minta bantuan hukum kepada Adnan Buyung dan kawan-kawan. Tapi hasilnya tetap sama, mereka tetap dipenjarakan seperti skenario awal: "Menutupi pelaku sebenarnya". Padahal seorang anggota Kopassus tanpa sadar mengakui bahwa penembakan itu adalah instruksi dari Cijantung (markas Kopassus). "Kalau kerusuhan kami tidak ikut-ikut. Tapi kalau penembakan di Tri Sakti, ya", kata sumber itu.

Yang juga belum jelas benar adalah penyidikan soal kerusuhan 13-14 Mei yang melanda Jakarta. Memang polisi sudah menahan 16 tersangka pelaksanaan lapangan kerusuhan. Salah seorang diantaranya adalah Anton Medan.

Toh, itu belum memuaskan rasa keadilan masyarakat. Sebab, dalang alias organisator kerusuhan belum diungkap sama sekali. Siapa mereka? Belum jelas benar. Tapi, melihat besarnya wilayah kerusuhan, diduga kerusuhan itu diorganisir secara rapi, seperti cara-cara komando militer. Nah, apa berani polisi mengungkapnya? ■

Tak Peduli Warga Sendiri

Pemerintah junta militer Myanmar menahan tiga aktifis pro-demokrasi Indonesia. Tapi pemerintah Habibie tak mempedulikan mereka.

Pemerintahan rezim militer dimanapun tidak memberikan kesempatan sedikitpun koridor kebebasan pada rakyatnya. Seperti di Myanmar, rezim militer yang memerintah menangkapi 18 aktifis dari manca negara yang melakukan aksi damai di negara itu. Para aktifis yang dikoordinir oleh *Alternative Asean Network on Burma* (Altsean Burma) yang berkedudukan di Bangkok, mengirimkan misi damai ke Yangoon, ibukota Myanmar (Burma).

Kedelapanbelas orang itu dari Amerika Serikat, Thailand, Malaysia, Pilipina, Australia dan 3 dari Indonesia (R.Fajri dari AJI, serta Christian Evert dan Sulaiman Heikal dari Pijar Indonesia). Mereka semua ditangkap setelah mengikuti peringatan ke-10 tahun tragedi pembantai rakyat sipil oleh rezim militer Burma, 8 Agustus lalu.

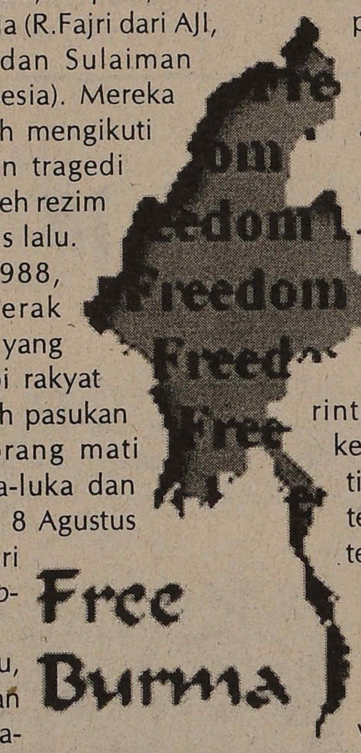

Pada 8 Agustus 1988, rakyat Burma bergerak menuntut rezim militer yang dipimpin Ne Win. Tapi rakyat dibantai secara keji oleh pasukan bersenjata, ratusan orang mati tertembak, ribuan luka-luka dan lainnya hilang. Tanggal 8 Agustus lalu dikenal sebagai Hari Kebangkitan Rakyat (*uprising day*).

Setelah peristiwa itu, rakyat Burma dan gerakan oposisi memasuki masa-masa suram. Rezim militer melakukan tindakan represif terhadap rakyat, dan terang-terangan mereka melakukan tindakan anti demokrasi. Selama sepuluh tahun pemerintahan rezim militer di Burma yang korup dan nepotisme semakin membuat susah rakyat. Represi militer, membuat rakyat dalam situasi ketakutan. Kekuasan intelejen militer terlalu kuat. "Kami tidak bisa berdemonstrasi di jalan. Apabila rakyat mencoba melakukannya, tentara bisa melakukan apa saja," kata Aung San Myint, sekretaris *Federation of Trade Union Burma*.

Cara-cara yang dilakukan pemerintahan militer itu meniru cara-cara yang pernah dilakukan pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto. Ternyata, ketahuan memang militer Myanmar pernah berguru ke Indonesia. Bahkan, anggota pasukan khusus tentara Myanmar dilatih oleh Kopassus Indonesia. Pemerintah Indonesia pula yang menyuplai senjata-senjata buatan Pindad dan senjata-senjata bekas ke Myanmar dengan cara barter dengan bahan pokok.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD'45), telah ditegaskan peran aktif warga negara Indonesia untuk turut menjaga ketertiban dunia dan perdamaian. Wajar bila ada warga negara ikut prihatin bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia dimanapun di belahan bumi. Seperti terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, dikecam bukan oleh warga negara Indonesia saja, tetapi juga masyarakat dunia. Sebagai bangsa yang beradab, tak pantas pemerintah Indonesia kemudian mendiamkan pelanggaran hak asasi manusia terjadi dimanapun, apalagi turut serta melakukannya.

Jangan dengan alasan solidaritas, lalu menutup mata dan telinga bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Hairus Salim, Sekretaris AJI Cabang Yogyakarta juga mempertanyakan cara pemerintah Indonesia dalam memberi keterangan yang menyangkut nasib tiga warga negara Indonesia, yang terkesan simpang siur dan bertele-tele. "Pemerintah Indonesia tidak pernah sungguh-sungguh mencari dan memberikan penjelasan sebenarnya mengenai insiden tersebut. Hal ini memperlihatkan watak pemerintah Indonesia yang juga gemar melakukan pelanggaran hak asasi dan demokrasi," tulis pernyataan AJI Yogyakarta.

AJI, PIJAR Indonesia dan masyarakat telah mendesak dengan cara memprotes kedutaan besar Myanmar di Jakarta, Departemen Luar Negeri dan Kantor PBB di Jakarta, untuk membebaskan warga negara Indonesia dan aktifis lain di Yangoon.

Sebaliknya, pemerintah Presiden BJ Habibie tampaknya tidak serius mengurusi warga negaranya sendiri. Malah Menteri Luar Negeri Ali Alatas, berusaha turut 'mengerti' hukum Myanmar yang meniadakan hak asasi manusia. Memang ada upaya dari Duta besar Indonesia untuk Myanmar,Poerwanto Lenggono, tapi upaya yang dilakukan tidak maksimal. "Kami sudah dua kali membesuk rekan-rekan Anda, tapi kami masih menunggu keputusan pemerintah disana yang tidak bisa kami campuri," katanya. ■

■ POLITIK

Habibie Pidato, DN Digusur

Dialog Nasional ditolak di Gedung Manggala Wanabhakti. Soalnya, Habibie mau pidato 17-an di MPR/DPR, sebelah Manggala.

Akhirnya panitia Dialog Nasional harus mengubur rencana penyelenggaraan di Gedung Manggala Wanabhakti. Ketika koordinator panitia, Ratna Sarumpaet, memesan tempat dengan pihak gedung memang tidak ada masalah. Dana sebesar satu juta sudah disetor untuk uang muka, akhirnya menguap. Bukan Manggala yang membatalkan, tetapi Mabes Polri, dan karenanya Manggala tidak bersedia mengembalikan uang muka itu sesuai peraturan bahwa di luar pihak Manggala, pembatalan oleh penyelenggara atau pihak ketiga mengakibatkan hilangnya uang muka.

Mendesaknya waktu, tinggal lima hari, membuat panitia kalang-kabut mencari tempat. Akhirnya didapat tempat di Bali Room, Hotel Indonesia. Perpindahan ini membengkakkan dana dari 56 juta menjadi 97 juta. Sewa ruang dan properti di Manggala jelas jauh lebih murah dari HI. Panitia sampai saat ini mengaku masih kekurangan dana untuk menutup seluruh anggaran. "Kami berharap ada beberapa pengusaha lagi yang mau membantu," ujar Ratna Sarumpaet.

Tapi mengapa sampai batal di Manggala? Usut punya usut ternyata Mabes Polri yang melarang acara itu diselenggarakan di Manggala. Kapolri, Letjend. (Pol) Roesmanhadi, kepada wartawan saat ditanya mengenai penggusuran tempat Dialog Nasional itu sendiri mengaku belum tahu adanya pela-rangan. Tapi dia mengingatkan memang pada tanggal yang bersamaan akan ada pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR. "Jadi berkali-kali jalan akan ditutup di area tersebut. Tanggal 17 Agustus, kami juga akan menutup jalan-jalan di sekitar Monas karena ada upacara kenegaraan di Istana. Itu sudah biasa dari dulu," tutur Roes-manhadi.

Pemindahan tempat itu *toh*, agaknya tak menurunkan substansi Dialog. Akan hadir untuk memberikan refleksi pada hari pertama: Alex Litaay (membacakan teks dari Megawati), Said Agil Siradj dari NU, Sosiolog Prof. Selo Soemardjan, dan Ulama Penyair Mustofa Bisri. Sedangkan pada hari kedua: YB. Mangunwijaya, Dr. Sri Bintang Pamungkas, Prof. Soebroto, dan Amien Rais. ■

Ratna Sarumpaet:

"Dongkel Habibie!"

Koordinator umum Dialog Nasional dan Pesta Rakyat, Ratna Sarumpaet, menggalang berbagai organisasi pro-demokrasi menjadi *counter power* melawan Habibie. Berikut adalah dialog *Xpos* dengan Ratna mengenai pengorganisasian dialog ini (DN):

Bagaimana prosesnya sampai ada DN?

Awalnya dari pengamatan setelah Soeharto turun, ada semacam kegembiraan yang muncul, ada pintu kebebasan yang terbuka. Lalu banyak kelompok proreformasi muncul, gerakannya begitu gencar dan semarak. Tetapi tidak terfokus. Seperti suara di padang gurun, menyebar ke segala arah, memantul, dan bahkan bisa saling hantam. Nah suara-suara ini bila disatukan dan difokuskan pasti akan memiliki posisi tawar dalam politik yang sangat kuat untuk mendorong maju demokratisasi.

Photo: Istimewa

■ Ratna Sarumpaet

Jangan lupa, pemerintah juga teriak-teriak reformasi. Mereka lebih vokal karena posisi politiknya dan ada banyak media yang mereka kuasai. Sehingga gerakan rakyat yang melawannya menjadi letih. Pelopor reformasi seperti pindah dari tangan rakyat ke tangan penguasa. Saya sendiri tidak percaya pemerintah Habibie bisa menjalankan reformasi. Bagaimana mungkin para birokrat itu mengerti betul reformasi kalau mereka sendiri yang selama ini merusakkan sistemnya. Oleh karena itu reformasi harus datang dari rakyat, pemerintah hanya melaksanakan saja.

Bagaimana Anda mengorganisasi?

Panitia ini terdiri dari berbagai kelompok pro-demokrasi. Jadi bukan saya saja. SIAGA yang menyelenggarakan Kongres Indonesia dulu juga terdiri dari berbagai kelompok. Saya dan kawan-kawan setelah bebas dari tahanan mensolidkan diri. Kemudian secara bertahap kami membangun jaringan. Saya dan kawan-kawan keliling ke berbagai organisasi untuk mengajak bergerak bersama. Lalu rapat-rapat diselenggarakan di sekretariat ini (Kampung Melayu Kecil). Ada tim materi, ada tim acara, sekretariat, pencarian dana, tempat, dan lain-lain.

Apa yang menyatukan?

Kesamaan rasa dan kesadaran untuk mewujudkan demokrasi. Dan ini baru mulai untuk mendongkel Habibie dan sisa rejim yang lama dengan pemerintahan baru yang demokratis.

Ada kendala teknis pengorganisasian?

Perbedaan ritme masing-masing organisasi, *speed* juga beda. Tapi ini latihan bagi kita semua untuk membangun kerja sama.

Kendala birokratis?

Ya ada hambatan dari aparat perijinan. Intinya kami tidak boleh di Manggala Wanabhakti. Pada hari yang bersamaan Habibie lagi pidato di gedung sebelahnya (MPR/DPR) maka panitia harus cari tempat lain.

Soal dana?

Dari perpindahan tempat itu membuat dana jadi membengkak. Semula anggarannya 56 juta, sekarang jadi 97 juta.

Darimana dananya?

Dari para pengusaha dan LSM. Secara substansial mereka sangat mendukung. Memang secara tehnis mereka harus dihubungi, dibujuk, dan dijelaskan.

Boleh tahu siapa?

Mereka tidak mau disebut namanya. Bukan karena takut atau *off the record*. Saya melihatnya sebagai suatu kerendahan hati mereka saja.

Rencana terdekat?

Akan dibicarakan dalam evaluasi panitia. Mungkin ada *sharing* bulanan. Yang jelas persaudaraan antar organisasi dalam panitia ini sudah terbangun. ■

BPIS Dibubarkan, Upaya Hapus Dosa

Pemerintah membubarkan Badan Pengembangan Industri Strategis (BPIS) dan membentuk perusahaan untuk menggantikannya. Upaya Habibie menghilangkan bukti-bukti?

Habibe bertindak cepat membersihkan dirinya dari berbagai macam kotoran yang mungkin akan menghambat karier politiknya. Setelah mundur sebagai direktur utama tiga perusahaan negara yang bermasalah, PT IPTN, PT Pindad dan PT PAL menjelang pencalonannya sebagai wakil presiden Maret lalu, Habibie bertindak lebih jauh lagi. Pekan silam ia membubarkan BPIS, lembaga payung bagi 10 perusahaan negara di bidang industri strategis yang dikelolanya selama puluhan tahun.

BPIS adalah lembaga birokrasi yang mengurusi kegiatan-kegiatan bisnis industri strategis, seperti industri baja, industri kapal laut, kapal terbang dan senjata.BPIS selama puluhan tahun di bawah kendali Habibie dikenal sebagai lembaga yang paling banyak mengeruk uang negara.

Tengok saja PT IPTN, sejak berdirinya, perusahaan pesawat terbang yang dikelola Habibie dan anaknya, Ilham Habibie ini tak pernah menghasilkan devisa, sebaiknya malah mengeruk devisa dan anggaran negara. Data terakhir menunjukkan, PT IPTN telah terjerat hutang hampir Rp3 triliun rupiah. Ambisi Habibie untuk proyek pesawat turboprop N-2130 senilai US$2 miliar pun penuh skandal. Proyek ambisius ini dibangun dengan "merampok" uang para pengusaha, yayasan-yayasan kesejahteraan karyawan sejumlah bank pemerintah dan guru-guru sekolah. Sejumlah uang PT DSTP, yakni sebanyak Rp211,6 miliar menurut sebuah sumber malah ditilep Ketua Tim Perancang N-2130, Ilham Habibie. Ilham memang mengatakan dana ini dipakai untuk tahap persiapan perancangan. Tapi hanya untuk persiapan saja *kok* menghabiskan uang ratusan miliar?

Ini baru satu contoh, betapa ruwetnya penggunaan uang di sebuah BUMN binaan BPIS. Contoh lainnya, masih di PT IPTN, proyek N-250, genarasi sebelum N-2130 saja yang menghabiskan US$ 650 juta saja belum selesai dan sulit terjual. "Sertifikasinya saja belum keluar, siapa yang mau beli?" ujar Arifin Panigoro, seorang pemegang saham PT DSTP.

Sejak lama, Habibie memang bebal dengan kritik. Dulu, kalau terdesak ia mengadu ke Soeharto. Biasanya, Soeharto yang terus berbicara di depan publik soal pentingnya Indonesia menguasai tehnologi ketirgantaraan.

Saking sayang dan bangganya Soeharto terhadap kecerdasaan Habibie, presiden yang berkuasa selam 32 tahun itu mau menyisihkan dana dari berbagai sumber, termasuk memangkas dana reboisasi. PT IPTN yang pendanaannya dari APBN telah dipangkas IMF, kini memang tak bisa berbuat apa-apa lagi. Di samping utangnya banyak, PT IPTN harus mengeluarkan banyak dana segar untuk menggaji 16 ribu karyawannya. IPTN tak mungkin berkembang karena tak laku. Kalau toh laku biasanya dibarter dengan truk, sedan atau beras ketan, hingga tak menghasilkan devisa.

Photo: Istimewa

■ **IPTN:** Tempat mengeruk dan menghamburkan uang negara

Pekerja IPTN memang paling banyak di antara sepuluh BUMNIS yang ada. Pekerja terbanyak kedua ada di PT PAL, yakni mencapai lima ribu orang. Galangan pembuatan kapal kebanggaan Habibie ini juga banyak hutangnya. Menurut data terakhir, utang PT PAL sudah mencapai Rp1,5 triliun.

PT PAL sendiri juga sarat skandal. Pernah, pemerintah mengeluarkan larangan bagi para nelayan agar tak membeli kapal bekas dari luar negeri. Buntutnya, mereka diminta membeli kapal dari PT PAL yang tak terlalu baik mutunya.

BUMNIS di bawah BPIS lainnya yang banyak utangnya adalah PT Pindad. Pabrik senjata yang dulu di bawah Angkatan Darat itu memiliki utang sebesar Rp324 miliar dan merugi hingga Rp21 miliar.

Tak ada BUMNIS di bawah BPIS yang tak memiliki utang. PT Krakatau Steel misalnya masih memiliki utang sebesar hampir Rp400 miliar walaupun sudah mampu untuk hingga Rp250 miliar tahun lalu. Begitu pun PT Inti, perusahaan pembuat alat-alat telekomunikasi punya utang hampir Rp300 miliar, PT Barata, pembuat dinamit utang sebesar Rp250 miliar.

BPIS, karena sifatnya yang birokratis memang tak mampu melihat apakah sejumlah perusahaan yang dikelolanya layak diteruskan atau tidak. Apalagi, pengelola BPIS adalah orang-orang Habibie juga hingga tak bisa kritis terhadap sepuluh BUMNIS yang juga dikelola oleh Habibie.

Pembubaran BPIS memang nampaknya beritikad baik, memotong inefisiensi dan mendorong ke arah profesionalisme. Apalagi pengganti BPIS, yakni PT Pakarya Industri, yang berfungsi sebagai *holding company*, akan dikelola oleh Menteri Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng. "BPIS selama ini adalah lembaga pemerintah yang tak efektif," ujar Syofan Djalil, Asisten Bidang Komunikasi Kepala Bidang Pengelolaan BUMN.

Namun, BPIS sebenarnya tak bisa dibubarkan begitu saja, sebelum Habibie yang mengelola badan itu dan BUMNIS di bawahnya selama puluhan tahun, mempertanggungjawabkan dulu pekerjaannya itu.

Dana pemerintah yang dikeduk sejumlah industri di BUMIS itulah yang merupakan salah satu sebab mudahnya kita disergap krisis. "Dari dulu saya sudah bilang Habibie adalah *big spender*. Gaya Habibie sangat tidak cocok untuk pemimpin bangsa Indonesia yang sedang kesulitan," ujar Panigoro mengomentari betapa Habibie menghambur-hamburkan uang negara selama puluhan tahun. ■

■ EKONOMI

Bisnis Nepotis Akbar Tanjung

Jago debat dan lobby Golkar ini, ternyata juga piawai mengumpulkan dana. Bisnisnya banyak berkongsi dengan keluarga dan konco-konco Soeharto.

Akbar Tanjung berhasil menumbangkan Edi Sudrajat di Munaslub Golkar, itu bukan berita lagi. Tetapi, bagaimana Akbar menggerakkan bisnis untuk mendukung program politiknya, belum banyak diketahui orang.

Padahal, menurut George Aditjondro, dalam sebuat artikelnya: ada dua faktor yang menyebabkan kemenangan Akbar di Munaslub itu. Pertama, politik uang, dan kedua intimidasi dari Wiranto dan kelompok militer termasuk Mayjen Syarwan Hamid. Ada suara-suara, bahwa delegasi daerah yang datang ke Munas itu disuap. Operator penyuapan itu adalah Abdul Gafur.

Darimana Akbar mengumpulkan dana politiknya? Ia ternyata memiliki perusahaan keluarga, PT Marison Nusantara Agencies. Perusahaan itu berkongsi dengan Salim Group, Raja Garuda Mas, Sinar Mas dan Catur Yasa Group. Salim Group adalah konglomerat terbesar di Indonesia, yang didukung oleh Soeharto dan keluarganya. Artinya, bisnis Akbar itu juga terkait dengan Soeharto.

Sedangkan Sinar Mas, konglomerat terbesar kedua yang dikomandani Eka Tjipta Widjaja, punya koneksi dengan Probosutejo, adik tiri Soeharto; dan Bambang Tri. Dan, Catur Yasa, rekan bisnis Akbar lainnya itu, dimiliki oleh Agus Gurlaya Kartasasmita, kerabat Ginanjar Kartasasmita. Dari kait-mengkait itu, tampak bahwa bisnis Akbar Tanjung, tak jauh dari nepotisme.

Diantara proyek Akbar yang sangat dikenal adalah kerjasama Marison Nusantara dengan Sinar Mas, Salim dan Raja Garuda Mas, di PT Indomilik. Perusahaan itu merupakan produsen susu terbesar di tanah air. Akbar Tanjung duduk sebagai Presiden Komisaris PT Indomilk.

Dua usaha Marison lainnya adalah, kerjasama dengan Salim dan Sinar Mas di PT Henkel Indonesia dan PT Zeta Aneka Kimia. Akbar juga duduk sebagai komisaris di perusahaan terakhir itu, yang bergerak di bidang industri kimia, dengan lisensi Henkel KgaA yang bermarkas di Dusseldorf. Tahun 1996, omset perusahaan itu mencapai Rp115 milyar.

Di kampung halamannya, Sumatera Utara, Akbar juga berbisnis. Ia membuka perkebunan kelapa sawit, bekerja sama dengan Salim. Namanya, PT Sawit Melinda Edible Oils.

Dan, bersama Agus Kartasasmita, Marison Nusantara mendirikan PT Giga Intrax. Perusahaan ini, setiap hari, menangani distribusi 200.000 liter premix dari pengilangannya di Jakarta.

Maka, dilihat dari cara Akbar berbisnis, ia tidak berbeda dengan Harmoko, Ketua Golkar yang digantikannya. Harmoko, selama tiga kali menjadi menteri, mempunyai saham di lebih dari tiga puluh perusahaan cetak dan elektronik, kadang-kadang bekerjasama dengan Soeharto dan keluarga besarnya. "Bisnis itulah yang menjadi penopang dana politik Akbar," kata satu pengamat.

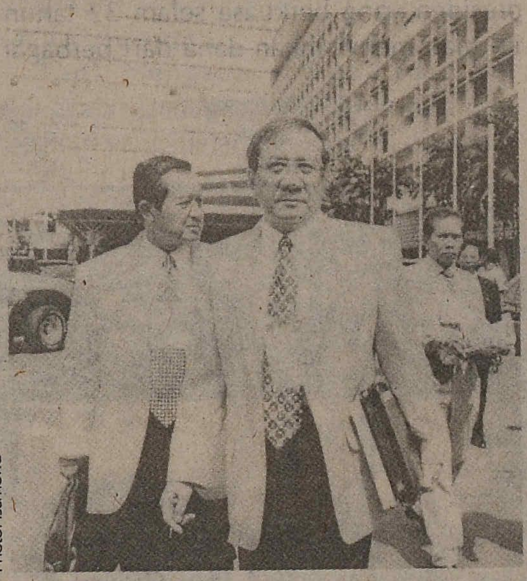

Photo: Istimewa

Selain, tentu saja, dana-dana pemerintah yang bisa diputar, karena posisinya sebagai Mensesneg.

Akbar, 53 tahun, bekas Ketua Himpunan Mahasiswa Islam, dan juga pernah menjadi Ketua KNPI, dikenal jago dalam soal *lobby*. Ini modal yang baik, untuk menggerakkan bisnis nepotis. Apalagi, selama Soeharto berkuasa, Akbar juga sempat menikmati kursi menteri. Antara lain Menteri Pemuda dan Olah raga; disamping Menteri Perumahan Rakyat. Posisi itu, agaknya, memudahkan Akbar bergerak membangun basis dukungan dana.

Kini, kemampuan Akbar diuji dalam soal Dakab. Ada sejumlah Rp800 milyar dana Golkar yang dikuasai Soeharto dalam yayasan itu. Akbar telah meminta agar dana itu diserahkan, tapi Soeharto berkelit: bahwa dana akan disalurkan langsung ke DPD-DPD. Artinya, memotong jalur DPP.

"Kalau tidak lewat DPP, lebih baik tidak usah membantu," kata Akbar, yang tentu saja paham maksud politik uang dari bekas presiden itu. Bisakah Akbar menggaet dana Dakab, seperti ia sukses menggalang dana dari usaha-usaha nepotismenya? Baik ditunggu saja. ■

Menggusur Cina Dengan Koperasi

Koperasi akan jadi konglomerat karena memonopoli distribusi minyak goreng. Hasil gerakan anti Cina Adi Sasono?

Adi Sasono memang lagi naik daun. Sebagai sahabat dekat Habibie, nampaknya semua keinginan yang sudah dipendamnya sejak lama bakal terkabul. Apa gerangan keinginan Adi Sasono itu? Merebut jalur distribusi bahan makanan dari para pedagang Cina.

Ini memang cita-cita Adi sejak lama. Tahun 1980-an, Adi, waktu itu Ketua Lembaga Studi Pembangunan (LSP) berkampanye ke kantong-kantong aktivis mahasiswa di Pulau Jawa agar melakukan gerakan anti Cina dengan menciptakan kerusuhan. Tujuannya: merebut jalur distribusi dan menyerahkannya kepada koperasi. Kampanye Adi waktu itu tak memperoleh tanggapan dari kalangan aktifis. Bahkan sejumlah aktifis melakukan kontra kampanye menentang ide Adi.

Namun, tahun ini, keinginan Adi tak terbendung lagi. Kebetulan, di posisinya sebagai Menteri Koperasi/Pengusaha Kecil Menengah, dan kedekatannya dengan Habibie, Adi leluasa mengambilalih jalur distribusi bahan makanan dari distributor Cina yang menyingkir karena kerusuhan pertengahan Mei. Habibie sendiri yang memberi hak monopoli distribusi itu. Namun, barui terbatas jalur distribusi minyak goreng.

"Kami tengah menyiapkan koperasi untuk menjadi distributor tunggal minyak goreng 1 Januari 1999," ujar Adi dua pekan lalu.

Awal bulan ini, Habibie menunjuk Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) untuk menjadi distributor tunggal minyak goreng selama seminggu. Penunjukkan ini menyusul naiknya harga minyak goreng. Menurut Adi, harga minyak goreng naik karena stok Bulog habis, *crude palm oil* (CPO) diselundupkan ke luar negeri dan jalur distribusi kacau.

Pernyataan Adi ini tak seluruhnya benar karena komoditas ini cukup melimpah. Sepanjang Juli lalu, sekitar 90 ribu ton minyak goreng dibongkar di pela-

buhan Tanjung Priok untuk jatah Jakarta. Minyak sebanyak itu cukup untuk beberapa bulan mengingat kebutuhan penduduk Jakarta hanya 600 ton per hari.

Ada yang menduga, Bulog dan Departemen Koperasi bekerjasama menggoreng harga dan mengacaukan distribusi minyak goreng. Tujuannya, masyarakat akan menuduh para pedagang Cina menimbun komoditas ini. Jadi kalau pemerintah kemudian menunjuk koperasi sebagai distributor tunggal, masyarakat bisa memahami.

Kini masalah yang dihadapi koperasi adalah sarana angkutan. Inkoppas saja di Jakarta hanya memiliki sepuluh tanki yang tentu saja tak bisa melayani ratusan pasar di seluruh Jakarta yang membutuhkan ratusan ton minyak per hari.

Namun, tampaknya koperasi tak akan terlalu kesulitan dengan alat angkut ini. Soalnya, Mabes ABRI sudah siap membantu menyewakan kapal-kapal dan tangki-tangkinya untuk mendistribusikan minyak goreng. Mabes ABRI, menurut Panglima ABRI kepada wartawan akan mengerahkan kekuatan induk-induk koperasi di lingkungan ABRI seperti Induk Koperasi ABRI, Induk Koperasi Angkatan Darat, Induk Koperasi Angkatan Laut, Induk Koperasi Angkatan Udara dan Induk Koperasi Kepolisian untuk membantu proyek prestisius Adi Sasono ini.

"ABRI mendukung program perebutan jalur distribusi ini karena sudah sebal dengan para pedagang Cina, yang belakangan tak mau tunduk lagi pada ABRI," kata sebuah sumber.

Adi Sasono nampaknya akan makin kuat karena didukung ABRI. Beberapa hari lalu Angkatan Laut sudah menawarkan kapal-kapalnya untuk mengangkut minyak goreng koperasi. Ini luar biasa, sama luar biasa dari keuntungan yang akan diraih koperasi dari penguasaan jalur ini.

Kita hitung saja. Penduduk Indonesia membutuhkan tujuh ribu ton minyak goreng seharinya. Taruhlah, per kilogramnya diperoleh keuntungan Rp300,- saja, maka koperasi akan memperoleh keuntungan Rp2,1 miliar per hari, atau Rp63 miliar sebulan.

ABRI dan Ketua Koperasi Distribusi Indonesia (KDI), Dewi Motik, pengusaha pribumi yang dulu dekat dengan pemerintah Soeharto, pun tergiur. Dewi mengatakan dalam waktu tiga minggu KDI, koperasi yang didirikan para pengusaha pribumi khusus untuk ikut menangani jalur distribusi minyak goreng, akan mampu menstabilkan harga.

Kekuatan yang akan menyingkirkan para distributor Cina adalah gabungan antara pemrintah, ABRI, para pengusaha pribumi dan maaf, para wartawan yang ngepos di Departemen koperasi yang juga memperoleh jatah minyak, gratis. ■

Soeharto, Beking Balongan

Ternyata Soeharto yang bikin katabelece untuk Mark Up Proyek Balongan. Hasilnya Rp 11,2 trilyun. Cukup untuk menyeretnya ke pengadilan?

Inilah skandal terbesar yang menimpa Pertamina, jauh melampaui kasus deposito almarhum Achmad Thaher. Kalau deposito eks asisten umum Dirut Pertamina pada dekade 1970-an "hanya" berjumlah US$80 juta, maka proyek di bumi Indramayu ini mencapai US$800 juta, sepuluh kali lipat.

Sebagaimana diberitakan X pos No.31, sejak dibangun pada awal tahun 1990-an, kilang minyak ini telah menghabiskan biaya US$2,4 milyar. Angka yang dianggap sangat berlebihan. Sebab, menurut perhitungan perusahaan konstruksi asal Inggris, Foster Wheeler yang pertama kali memberikan penawaran, biayanya hanya sebesar US$1,95 milyar. Sedangkan dalam perhitungan awal Pertamina, angka pembiayaan yang wajar hanya sekitar US$1,55 milyar hingga US$1,7 milyar. Sehingga, diperkirakan biaya yang di-*mark up* mencapai kurang lebih US$800 juta, atau Rp11,2 trilyun dengan kurs Rp14.000,-/ US$ 1.

Perkembangan kasus itu kini sedang ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Mereka sudah mengirim tim khusus untuk memeriksa kilang minyak Exor I (*Export Oriented Refinery*) di Balongan. Tapi dari data Kejaksaan Negeri Indramayu, mereka (Kejari Indramayu) telah mendapat mandat sejak Juni 1998. "Sebetulnya, Kejari sudah diberi tugas sejak Juni lalu. Kita sudah lama mencium ketidakberesan proyek ini. Cuma, secara psikologis kita susah sebab ada anak babe (Soeharto). Kita tidak berani menyentuh," kata Jaksa Kejari Indramayu kepada *Warta Ekonomi*.

Yang dimaksud jaksa tersebut adalah Sigit Harjojudanto. Dia digaet oleh saudara sepupunya, Erry P. Oudang. Dengan mengajak Sigit, Erry dapat jatah memo dari Soeharto yang kemudian "dibawa" ke sana kemari untuk menakut-nakuti pejabat teras Pertamina. Tanpa sungkan, Erry juga mengajak anak almarhum Ahmad Thaher, Adek Thaher untuk mendekati Tabrani Ismail. Yang dipakai pendekatan kedaerahan, keduanya sama-sama berasal dari Palembang, Sumatra Selatan. Bahkan, seperti kurang sabar, Erry sampai memaksa Tabrani ke Tapos milik Soeharto. Di situ sudah ada T.B. Silalahi dan Dirjen Imigrasi, Pranowo. Mereka mendesak Tabrani untuk segera menanda-tangani Proyek Exor I.

Sebelumnya, Erry sudah menjanjikan proyek kepada Jendral T.B. Silalahi, yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Departemen Pertambangan. Silalahi kemudian merekomendasikan anak angkatnya, Tomy Winata, untuk terlibat dalam proyek ini. Tomy Winata diajak Erry patungan dalam PT Wahana Eka Paksi Perkasa (WEPP). Menurut surat presdir WEPP, Cadex Sardjana, kepada Tomy diberitahukan bahwa Erry akan menyerahkan uang tunai Rp200 juta dan menanyakan berapa uang Tomy yang akan dipasok untuk PT ini. Tapi WEPP kemudian bubar di tengah jalan. Soalnya, Tomy tidak mau menyertakan duitnya. Maunya, Tomy dapat pembagian saham gratis dengan alasan dia mewakili ABRI.

Di lain hal, Erry menyedot laba dengan pengadaan peralatan untuk proyek Exor I ini. Ia melibatkan Wisnu Suhardono yang kini menjadi anggota MPR. Waktu itu Wisnu adalah agen Merichem, Singapura. Wisnu menjual barang yang dibutuhkan untuk *basic engineering* dan *mechanical engineering* Exor I kepada PT Meri Protekno milik Erry. Tanggal 6 Maret 1989, mereka menerima komisi 10% dari total penjualan, sebesar US$4 juta.

Tak puas dengan subkontraktor peralatan, Erry juga menjala untung dengan jasa angkutan kapal bagi Exor I lewat PT Jala Mustika Pradipta. Setiap hari, Exor I memproduksi 125.000 barel minyak. Bekerjasama dengan Mitsui, Erry mengangkutnya dengan tarif US$300 per ton, padahal harga pasar US$100 per ton. Jadi, ia untung *mark up* US$200 per ton. Untuk satu kilang, yang bisa diangkut 400 ton, dikalikan US$200, ia menerima guyuran uang US$80 juta. *Uih*, sama jumlahnya dengan deposito Thaher.

Data di atas sudah ada di tangan Kejaksaan Agung. Tinggal sekarang, apakah berani Kejakgung menyeret mafia ini sampai ke akar picunya, yaitu *katabelece* Soeharto? Sementara Kejakgung masih belum membuka kasus, saat ini Erry P. Oudang sedang ada di Bali, bersiap-siap cabut ke Selandia Baru.

Ketika anda membaca berita ini, bisa jadi Erry sudah jadi warga negara Selandia Baru. Itu bukan soal sulit baginya. Sebab, Dirjen Imigrasi Pranowo juga dapat cipratan uang dari kasus ini seperti terurai di atas. Bila itu terjadi, hilanglah satu kunci penting yang bisa menyeret Soeharto ke pengadilan. Apalagi kalau pemerintahan Habibie juga tak serius mengusut harta Soeharto. Mungkin betul, Soeharto adalah diktator yang beruntung. ■

Cut Zahara, aktifis perempuan Aceh:

"Air Susu Dibalas Air Tuba"

Tidak tahu membalas budi itu yang tepat bagi pemerintah Indonesia. Betapa heroiknya pahlawan-pahlawan Aceh mempertahankan tanah, air dan bangsa dari serangan penjajah. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada 24 Agustus 1945, Acehpun menyatakan bergabung dengan Indonesia. Pada saat sulit, ketika itu di Aceh belum ditemukan ladang gas, minyak dan kekayaaan alam lainnya, rakyat Aceh dengan harta yang dimiliki menyumbangkan harta bendanya untuk membeli dua buah pesawat terbang, Seulawah. Yang menjadi cikal bakal pesawat penerbangan nasional Indonesia. Dalam keadaan krisis tempo hari juga, rakyat Aceh masih memberikan 20 kg emas untuk mengatasi krisis, dan kini entah kemana sumbangan rakyat itu raib, bersama turunnya Soeharto dari kekuasaan.

Cut Zahara, 25 tahun, seorang aktifis perempuan hak asasi manusia yang berasal dari Lhokseumawe, Aceh Utara, sampai harus pergi ke Jakarta. "Untuk menimba pengalaman dan berlajar dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Jakarta," katanya.

Photo: Istimewa

■ **Demo Somaka:** Pelaku pembantaian di Aceh harus dihukum

Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini, pertama menjadi peserta *training* Hukum Dalam Perspekstif Gender yang diadakan LBH-APIK, Jakarta, pada April lalu.Kemudian magang di lembaga tersebut dan LSM lainnya, seperti ELSAM, Kalyanamitra dan Solidaritas Perempuan. "Khusus isu perempuan yang diangkat LSM di Aceh masih sedikit, padahal justru perempuan Aceh yang pejuang dalam sejarahnya, tetapi paling tertindas pada masa Orde Baru berkuasa ini," katanya.

Dibawah ini petikan wawancara *Xpos* dengan dara dari negeri Tanah Rencong ini.

Apa yang sebenarnya terjadi di Aceh?

Selain pembunuhan terhadap manusia Aceh, juga sepertinya terjadi pembunuhan terhadap peradaban rakyat Aceh.

Misalnya?

Rakyat Aceh selama sejarah negeri ini dari dulu sangat loyal terhadap Republik Indonesia. seperti yang dikatakan, bekas-bekas pejabat yang membuat komite hak asasi manusia untuk Daerah Istimewa Aceh (Komhasda) Kamis lalu, setiap pejabat pusat yang datang ke Aceh selalu diterima dengan cara adat. Dikenakan kopiah maketuk, diberikan rencong emas Aceh. Tapi yang dilakukan penguasa pusat sama saja gagang rencong digenggam, tetapi ujungnya ditusukkan ke tubuh rakyat Aceh. Itu namanya, air susu dibalas air tuba.

Apa maksudnya?

Coba Anda bayangkan, tanah hasil bumi dan sumber daya alam kami dieksploitasi disedot sebanyak-banyak untuk pemerintah pusat. Tetapi hanya dikembalikan sangat sedikit sekali, tidak seimbangan apa yang diambil dan apa yang dikembalikan kepada rakyat Aceh. Sementara itu, rakyat Aceh dibunuhi dengan alasan sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) atau gerakan Aceh Merdeka (GAM), tanah mereka dirampas dengan semena-mena dan perempuannya diperkosa. Apa yang pantas untuk menyebut prilaku seperti itu?

Apa betul ada gerakan Aceh Merdeka atau GPK itu?

Yang terjadi di Aceh bukanlah keinginan rakyat Aceh untuk membuat negara sendiri, tetapi ketidakpuasan rakyat atau perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat dan kekejaman yang tidak berperikemanusiaan dari tentara yang dikirim pemerintah pusat ke Aceh.

Bagaimana keadaan rakyat Aceh sekarang?

Sangat terpuruk. Apalagi pemberian stigma-stigma sebagai GPK, GAM itu membuat rakyat Aceh sangat terhina.

Lalu sebagai generasi muda Aceh apa tuntutan Anda sekarang?

Rehabilitasi nama rakyat Aceh, kompensasi bagi yang dirugikan, misalnya yang rumahnya dibakar, tanahnya dirampas dikembalikan seperti semula. Tentu saja orang yang dibunuh dan perempuan yang diperkosa tak bisa diganti dengan uang. Bebaskan tahanan dan narapidana politik Aceh yang ada sekitar 50 orang, di penjara-penjara di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Tanjung Gusta-Medan. Janda-janda yang suaminya dibunuh, anak-anak yatim yang kehilangan orang tuanya harus disantuni.

Tapi, kan Aceh sebagai daerah militer (DOM) sudah dicabut, dan Panglima ABRI, Jendral Wiranto sudah meminta maaf, apa itu tidak cukup?

Sama sekali tidak. Pencabutan DOM dan minta maaf bukan lah akhir dari masalah tetapi adalah langkah awal untuk menyelesaikan persoalan rakyat Aceh. Ingat ada 39.000 anak yatim di Aceh, forum LSM Aceh bukan posko pengaduan dalam dua hari saja ada 1.867 keluarga yang melaporkan kehilangan. Itu baru data sementara, bagaimana kalau posko itu terus dibuka akan berapa ribu lagi orang yang kehilangan anggota keluarganya.

Lalu solusi apa sebaiknya?

Saya pikir sudah pantas Aceh mendapat status daerah otonomi penuh. Kenapa Timor Timur ditawarkan Menteri Luar Negeri Ali Alatas status otonomi penuh, kenapa Aceh tidak? Aceh itu sudah memberikan banyak kepada Republik Indonesia, dan menjadi korban yang paling besar pula dibandingkan daerah lain.

Artinya Anda ingin Aceh jadi negara merdeka?

Bukan itu, tapi menjadi bagian dari negara kesatuan federasi Indonesia. Yaitu negara tetap kesatuan tetapi sistemnya federasi. Rakyat Aceh punya hak untuk mengatur daerahnya sendiri tidak perlu campur tangan oleh pemerintah pusat. Hanya bidang luar negeri dan pertanahan keamanan saja, yang diserahkan pada pemerintah pusat, laiunnya dikelola oleh rakyat Aceh. ■

Xpos

BANKIR NAKAL HARUS DIHUKUM

Diterbitkan oleh:
Komunitas Informasi Terbuka
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: **http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp**
PO.Box 22202 London SE5 8WU, United Kingdom

Ganti ongkos cetak Rp. 1000,- Terbit seminggu sekali

Rakyat Tuntut Pemerintahan Transisi

Habibie dinilai tak punya konsep jelas bagaimana keluar dari krisis. Sementara gerakan pro-demokrasi telah bentuk Pokja untuk menyiapkan Koalisi Sipil Demokratis yang akan mengisi Pemerintahan Transisi.

Pidato kenegaraan Habibie di depan DPR tanggal 15 Agustus 1998 dinilai banyak kalangan tidak membumi, meski ia juga memakai jargon reformasi. Habibie menyebut bahwa esensi dari gerakan reformasi nasional saat ini adalah koreksi terencana, melembaga, dan berkesinambungan terhadap seluruh penyimpangan yang telah terjadi dalam bidang ekonomi, politik dan hukum. "Sasarannya adalah agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka, lebih teratur dan demokratis. Termasuk agenda penting dari gerakan reformasi nasional ini adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang terbukti telah menjadi penyebab utama lemahnya daya tahan ekonomi kita," tutur Habibie.

Staf pengajar Fisip UI, Arbi Sanit menanggapi, "Meskipun Habibie sudah menyadari bahwa KKN adalah penyebab utama lemahnya daya tahan ekonomi kita, dia tidak akan sanggup memberantasnya karena dia sendiri adalah bagian dari sistem yang penuh KKN itu. Bagaimana mungkin kita bisa percaya pada orang yang mengaku akan bisa memberantas KKN kalau orang itu adalah anggota kelompok yang selama ini mempelopori KKN?"

Budayawan M. Sobary dalam acara *Permenungan Kemerdekaan* (16/8) di televisi menukas lugas, "Rakyat tidak perlu pidato, yang penting faktanya". Habibie menggebu-gebu bicara soal penegakan hukum. Tapi banyak kasus politik justru membokongi hukum. Seperti kasus PRD yang dianggap bertanggungjawab dalam Peristiwa 27 Juli. Jelas-jelas, pengadilan tak berhasil membuktikan tuduhan dalang kerusuhan itu *toh* para aktivis PRD dihukum dengan dalil subversi. Lalu PTUN tanggal 10 Agustus lalu telah memutuskan bahwa pelarangan PRD itu melanggar hukum. Bukannya membebaskan para tapol PRD, Habibie cuma memberi remisi atau pemotongan hukuman satu bulan dalam rangka perayaan 17 Agustus. Remisi tak ubahnya melegitimasi sanksi bahwa secara hukum, tapol-tapol itu bersalah. "Habibie lah yang sela-ma ini justru melanggar dan mengingkari putusan hukum," ujar Sri-Bintang Pamungkas dalam refleksi Dialog Nasional untuk Demokrasi yang digelar di Hotel Indonesia, 15-16 Agustus 1998.

Photo: Istimewa

■ **Pesta Rakyat di Tugu Proklamasi:** Menuntut pemerintahan transisi

Pada sessi yang berbeda, Dialog Nasional juga membahas legitimasi Habibie. Prof Soebroto dari Barisan Nasional mengistilahkan pelimpahan kekuasaan oleh Soeharto kepada Habibie tak beda dengan pergantian Ketua RT, tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan diterima parlemen. "Padahal Tap MPR yang ditetapkan dalam SU-MPR tanggal 1 -11 Maret kemarin, masih menyebut Soeharto sebagai presiden dan Habibie sebagai wakil. Jadi kalau mau suksesi, cabut dulu Tap MPR itu," demikian Soebroto.

Tapi perdebatan sah tidaknya Habibie atau konstitusional tidaknya Kabinet Reformasi Pembangunan yang kini *de facto* menguasai Indonesia, menurut Romo Mangun, sesungguhnya tidak perlu. "Yang lebih esensial adalah, bila kita biarkan Habibie ini terus memimpin pemerintahan, ia akan membawa kita ke jurang kehancuran," ujar Romo yang menetap di Yogyakarta ini. Tak ayal, muncul desakan kuat untuk membentuk pemerintahan

Berita Pekan Ini

Habibie Bikin Bingung Terus	...3
Intel Polisi Kaburkan Fakta	...4
Menuju Kebangkrutan	...6
Sjafrie Susul Prabowo	...8
Koruptor Dana Bank Dunia	...10
"Aman Jika Tentara di Barak"	...12

Sok Kuasa

Sepandai-pandai harimau menyamar, toh ketahuan juga belangnya. Ibarat itu pas betul menggambarkan pemerintahan Habibie, yang sudah berkuasa tiga bulan lebih. Meski sibuk mencitrakan diri sebagai "kabinet reformasi", tetap saja belangnya sebagai kelanjutan rejim Soeharto tak bisa ditutup-tutupi.

Salah satu indikasinya adalah sikap sok kuasa, yang terakhir diperlihatkan Kapolri Letjen Roesmanhadi. Pekan lalu, Roesmanhadi mengeluarkan ancaman kepada sejumlah LSM yang dituduhnya menyebarkan berita bohong, sehubungan kasus perkosaan para perempuan keturunan Cina saat kerusuhan Mei lalu. "Kalau mereka tak bisa memberikan bukti-bukti (terjadinya perkosaan), akan kami periksa," tuturnya.

Bagi kita, ancaman ini tak lebih cerminan kepanikan rejim Habibie. Memang, akibat pemberitaan soal pekosaan massal tadi, citra pemerintah dimata dunia internasional benar-benar terpuruk. Demonstrasi anti Indonesia marak dimana-mana: Beijing, Manila, dan Singapura. Anehnya, aparat keamanan seakan tak berdaya mengungkap kasus ini. Sampai sekarang tak seorangpun pelalu perkosaan bisa ditangkap.

Sebaliknya, para relawan yang bekerja keras berhasil mendapat kepercayaan dari keluarga korban pekorsaan. Mereka mencatat kesaksian para korban. Lalu, sebagian kisah tragedi kemanusiaan itu muncul di media-massa. Rupanya, ini membuat para pejabat pemerintahan gusar. Tapi, bukannya membantu para relawan mencari pelaku-pelaku perkosaan, yang muncul malah sikap sok kuasa tadi.

Sejatinya, bukan kali ini saja rejim Habibie menunjukkan perilaku sok kuasa. Beberapa waktu lalu, misalnya, dikeluarkan Perpu yang membatasi unjuk rasa. Selain itu, masih banyak pula perilaku rejim Soeharto yang masih diteruskan Habibie, antara lain, nepotisme dan koncoisme. Contoh paling mencolok adalah peristiwa pemberian Bintang Mahaputra, beberapa waktu lalu.

Kalau begitu, masih layakkah rejim seperti itu kita dukung terus? Jawabnya: tentu tidak!

■ **LUGAS**

transisi yang dipercaya untuk mengganti Habibie.

Salah satunya adalah yang diusulkan Memorandum Petisi 50. Memorandum yang dikeluarkan Kamis (20/8) di Jakarta itu menilai keberadaan BJ Habibie sebagai presiden perlu ditinjau kembali dalam Sidang Istimewa mendatang, karena proses pengisian lowongan jabatan presiden dari Soeharto kepada Habibie telah menimbulkan problem konstitusional. Di samping itu, "Tidak ada tanda-tanda bahwa pemerintahan Habibie akan dapat mengatasi krisis ekonomi tersebut. Hal ini terjadi karena kepemimpinan dan birokrasi pemerintah Habibie dinilai tidak bersih dari praktek KKN," ucap Ali Sadikin yang membaca memorandum, disaksikan tokoh Petisi 50 lainnya seperti Wachdiat Sukardi, Chris Siner Key Timu, SK Trimurti, Abdul Madjid serta M. Rajab Ranggasoli.

Oleh karena itu, Petisi 50 mengusulkan dibentuknya pemerintahan transisional. Pemerintahan ini, akan bekerja selama dua tahun dengan tugas pokok mengatasi krisis ekonomi, mempersiapkan pemilu yang demokratis, serta melakukan reformasi total atas seluruh kehidupan, baik ekonomi, politik maupun hukum dengan menjunjung tinggi asas-asas demokrasi.

Usulan mendesaknya pemerintahan transisi untuk menggantikan Habibie juga datang dari hasil sidang pleno Dialog Nasional. Pleno yang dimoderatori Wimar Witoelar dan Fajrul Rachman itu menghasilkan lima rumusan akhir. Pertama, peserta sidang pleno menyepakati pembentukan Kelompok Kerja Sipil Demokratis yang bertugas mempersiapkan dan mendorong lahirnya pemerintahan transisi, terdiri dari para peserta Dialog Nasional, baik secara individu maupun organisasi.

Kedua, peserta sidang pleno menyepakati gagasan-gagasan reformasi menyeluruh di bidang ekonomi, hukum, politik, dan budaya sebagaimana termuat dalam Manifesto Demokrasi dan lampirannya. Ketiga, deklarasi akan dilakukan tanggal 17 Agustus 1998 pada saat acara Pesta Rakyat, di tugu Proklamasi, Jakarta. Keempat, deklarasi di daerah akan dilakukan pada tanggal 23 dan 31 Agustus 1998. Dan yang kelima, disepakatinya *platform* isu bersama yang terdiri dari enam tuntutan:

1. Turunkan Harga
2. Turunkan Habibie dan Kabinetnya
3. Bubarkan MPR/DPR
4. Cabut Dwifungsi ABRI
5. Bentuk Pemerintahan Transisi
6. Cabut 5 paket UU Politik

Dialog Nasional yang diikuti oleh 358 peserta utusan 167 organisasi dari 25 daerah ini, nantinya bakal ditindaklanjuti dengan pertemuan Kelompok Kerja yang akan diselenggarakan pada 12 s/d 13 September 1998. Tempatnya belum pasti, namun yang jelas pertemuan itu akan memfasilitasi berbagai partai yang pro perubahan, LSM-LSM, dan ormas-ormas pro demokrasi.

Menurut Digul dari sekretariat panitia, Pokja ini diharapkan mengorganisasi terbentuknya Koalisi Sipil Demokratis yang nantinya mengisi pemerintahan sementara. Syarat personilnya, bebas dari KKN dan bersih dari birokrat pemerintahan Soeharto dan Habibie. Dari Manifesto Demokrasi digariskan, "Pemerintahan transisi yang dipercaya rakyat dan dunia internasional ini, mempunyai tugas memimpin Indonesia lepas dari krisis dan berhenti tugasnya sampai terpilihnya pemerintahan baru lewat pemilu dan sidang umum MPR yang demokratis". ■

PROGRAM JANGKA PENDEK MANIFESTO DEMOKRASI:

BIDANG EKONOMI:

1. Ambil alih harta KKN Soeharto dkk.
2. Perbaikan jalur distribusi pangan.
3. Manfaatkan lahan tidur.
4. Penciptaan lapangan kerja informal.
5. Bentuk jaringan distribusi dana bantuan.
6. Tutup Bank yang tidak sehat.
7. Tunda hutang luar negeri dan tidak menalangi hutang swasta.
8. Hapus rejim devisa bebas, kembali ke UU No.32/1964 untuk cegah pelarian modal.
9. Efisiensi nasional, perampingan ABRI, kabinet, hapus *mark up* proyek pembangunan.
10. Hentikan swastanisasi BUMN.
11. Tarik dana milik rakyat yang diparkir di luar negeri.
12. Kebijakan harga dan kurs rupiah.

BIDANG POLITIK:

1. Cabut 5 UU Politik
2. Kembalikan TNI sesuai Pasal 18 UUD'45
3. Cabut UU yang pasung hak politik rakyat
4. Referendum untuk Tim-tim
5. Komisi independen usut penggaran HAM
6. Ajukan Soeharto ke pengadilan
7. Bebaskan tapol/napol tanpa syarat & tanpa diskriminasi.

BIDANG HUKUM:

1. Kemandirian kehakiman dari kekuasaan
2. Wewenang MA untuk Judicial Review
3. Usut tuntas Kasus Orang Hilang, adili penculiknya.
4. Tuntaskan kasus HAM di berbagai wilayah dan sektor

BIDANG BUDAYA:

1. Jamin kebebasan berekspresi
2. Tulis ulang sejarah Indonesia
3. Hapus birokratisasi kesenian
4. Bebaskan rakyat dari ketakutan dan diskriminasi SARA
5. Menolak politisasi bahasa

Habibie Bikin Bingung Terus

Tiga bulan masa pemerintahan Habibie belum menunjukkan tanda-tanda negara semakin membaik. Malah, kini berada diambang kebangkrutan.

Bagaimanakah kita menilai pemerintahan Habibie? Untuk menjawab itu sebuah lembaga riset, Resource Productivity Centre (RPC) melakukan tiga kali penelitian. Pertama, satu minggu sebelum kerusuhan sekitar 13-14 Mei 1998. Kedua, penelitian lanjutan dilakukan satu minggu kemudian, setelah peristiwa pergantian pucuk pimpinan negara. Ketiga, seminggu sebelum 3 bulan kekuasaan Habibie berjalan. Tujuan penelitian itu, menurut Risa Permana Deli, yang mempresentasikannya pada acara diskusi bulanan Yayasan Padi Kapas di Hotel Indonesia, Kamis pekan lalu, untuk memotret masalah yang sama seperti yang pernah dipotret tiga bulan sebelumnya.

TABEL: PERBANDINGAN SOLUSI KRISIS ANTARA HABIBIE DAN GERAKAN PRO-DEMOKRASI

Program Pemerintah Habibie untuk Atasi Krisis	Program Gerakan Pro-Demokrasi Atasi Krisis
1. Prioritas tertinggi pada pembenahan lembaga-lembaga keuangan.	1. Mengusut dan ambil alih harta KKN Soeharto dan kroninya, untuk menyelesaikan krisis.
2. Menyelesaikan soal hutang luar negeri swasta.	2. Tidak menalangi hutang luar negeri swasta, dan menyeret swasta bermasalah ke pengadilan.
3. Menghilangkan praktek monopoli dengan membuat sistem insentif yang mendorong efisiensi dan inovasi	3. Menghilangkan praktek monopoli dengan UU Anti monopoli, tanpa diskriminasi.
4. Meningkatkan keterbukaan dan transparansi pemerintahan maupun pengelolaan usaha.	4. Komisi independen untuk melakukan kontrol transparansi, seperti Indonesian Coruption Watch.

Sumber: Tabloid Kontan (24/8) dan Resume Dialog Nasional.

Hasil sebelum pergantian Soeharto kepada Habibie, kalau masyarakat diminta menjelaskan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat itu, mereka sepakat, ini adalah jalan buntu. Satu-satunya jalan untuk membuka jalan buntu itu adalah reformasi. Pertanyaan lebih lanjut elemen apa untuk membuka jalan buntu, ada empat poin penting; Soeharto turun — pergantian kepemimpinan, koreksi total terhadap sistem bernegara dan berbangsa, rakyat didengarkan dan membersihkan sistem kenegaraan dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Ketika saat yang sama ditanyakan, dalam situasi kebuntuan seperti itu, pimpinan negara diganti, siapakan tokoh yang dianggap mampu menggantikan posisi Soeharto? Jawabannya secara mutlak masyarakat mengatakan Megawati.

Pada penelitian kedua dilakukan saat sesudah Soeharto turun dan sudah ada susunan kabinet reformasi. Tanggapan yang ada lebih 70 opersen pergantian itu positif, sisanya mengatakan negatif. Positif melihat Soeharto mundur adalah sesuatu yang wajar karena semua rakyat menuntut itu. Tanggapan negatif itu ada dua masalah, persoalan hukum, sebagian masyarakat tetap mempermasalahkan cara pergantian. Jadi pergantian itu dianggap tidak konstitusional. Kedua, hal yang berkaitan dengan Soeharto, cara Soeharto melepaskan kekuasaaanya kepada Habibie dianggap tidak bertanggungjawab. Karena Soeharto tidak memberi pertanggunganjawab kepada rakyat. Dengan perubahan tampuk dari Soeharto ke Habibie, kemungkinan terbaik yang bisa diharapkan masyarakat terhadap pemerintah Habibie. Ada dua yang dituntut perbaikan ekonomi dan ada dimensi moral yang baik dari Habibie dan para pengurus negara. Kemungkina yang buruk sistem tidak akan berubah, orang-orangnya ternyata sama ketika Soeharto memerintah.

Pada penelitian yang baru seminggu lalu, ada pernyataan pentin apakah dalam 90 hari masa pemerintah Habibie dianggap mampu menyelesaikan masalah yang belakangan ini hidup dan berkembang dalam beberapa tahun belakangan ini? Ternyata, jawabannya secara mutlak, masyarakat mengatakan tidak.

Dari jawaban tidak itu ada 3 persoalan, yang paling penting adalah persoalan ekonomi. Mereka melihat Habibie dan pemerintahannya gagal dalam mengatasi lajunya harga kebutuhan pokok masyarakat. Kedua kebijaksanaan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dianggap tak menyentuh yang paling dasar. Tentang politik, ternyata KKN sama sekali tidak dihapus, politik tidak stabil, masih didalam bayang-bayang rezim yang lama, dan Habibie dianggap tidak mempunyai konsep politik yang jelas. Untuk masalah dari ketidakmampuan Habibie mengatasi masalah masyarakat Indonesia, terutama masalah sosial. Kegagalan utamanya, ditetapkan pada persoalan kriminalitas yang meningkat.

Pertanyaan terakhir, siapa tokoh yang dianggap layak mampu berdiri di pucuk pimpinan negara ini. Jawabannya tetap konsisten, Megawati. Tapi ada perubahan, kalau dalam penelitian pertama, mereka membuat urutan dengan jelas, urutan pertama, Megawati, Amien Rais, Emil Salim, Habibie pada rangking ke-10. Pada peneilitain kali nii, mereka memberikan jawaban, Megawati, Amien Rais, ketiga tidak disebutkan, ke-4 Habibie.

"Apa yang dilihat dari pemerintahan Habibie selama 90 hari, justru masyarakat itu mengalami kebingungan. Mereka tidak tahu lagi menyelesaikan masalah yang dihadapi riil, dan disorientasi apa yang terbaik yang bisa dilakukan oleh elit nasional untuk menyelesaikan masalah ini. Habibie itu bagaikan sebuah judul film yang pernah dibintang warkop, *Pintar-Pintar Bodoh*," ujar Risa menutup paparannya.

Chatib Basri sebagai pemrasaran kedua menyoroti soal ekonomi. Di bawah pemerintahan Habibie, perekonomian Indonesia tidak bertambah baik. "Data ekonomi yang saya mempersempit penelitian tadi. Bahwa Habibie, memang tak bisa mengatasi krisis ekonomi selama 3 bulan pemerintahannya," katanya.

Kalau melihat krisis ini, harus bisa juga menuntaskan, agak sulit untuk memilah antara era Suharto dengan era Habibie, karena krisis ini sendiri berlangsung sejak Juli 1997 sampai sekarang. Jadi kalau misalnya, baik dari struktur sistem politik dan juga kebijakan ekonomi, praktis sama dengan era Soeharto. "Karena saya bikin klasifikasinya pasca 21 Mei dan sebelumnya. Karena kalau praktis sistem ekonomi, kebijaksanaan ekonomi, dan sistem politik praktis tidak berubah," katanya.

Yang ditakutkan M. Chatib Basri dari Habibie adalah Habibie selalu optimis, saat semua khawatir Habibie tidak. "Saya khawatir Habibie itu tak khawatir dengan keadaan ekonomi yang sudah parah benar. Dalam tiga bulan ini Habibie sudah gagal dalam perbaikan ekonomi," katanya.

Menunggu Pemilihan Umum pada Mei yang akan datang, menurut Marie Pangestu, bagai menunggu ketidakpastian. Menurut seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia, Chusnul Mariyah, hancurnya ekonomi sekarang ini karena tidak adanya dalam 3 kali pergantian kepemimpinan ini, pergantian yang pereodical. Ya, benar, seperti yang dibilang orang, 90 hari kekuasaan Habibie: Hari-Hari Bikin Bingung. ■

■ POLITIK

Intel Polisi Kaburkan Fakta

Seorang intel polisi datang ke Tim Relawan mengaku keluarga korban. Ia membeberkan di Media Indonesia. Tapi Kapolri meminta maaf

Di sebuah hari pada bulan Juli yang lalu, dua wanita datang ke Posko Tim Relawan di Jl Arus Dalam Cawang. Kedua wanita yang salah satunya mengaku bernama Mira itu memperkenalkan diri sebagai keluarga korban dan akan mengadu ke Tim Relawan bahwa adik temannya yang datang bersamanya mengalami perkosaan pada tanggal 13 Mei lalu. Perkosaan terjadi di daerah Jakarta Kota, ketika korban dalam perjalanan pulang dari kerja. Sejak kejadian itu, menurut Mira, korban belum pulang ke rumah dan keluarga korban tidak mengetahui keberadaannya. Seperti lazimnya, Tim relawan pun akhirnya memberikan sejumlah saran dan jalan keluar.

Kehadiran Mira tidak memunculkan kecurigaan apapun, sama seperti sejumlah pengaduan para korban yang lain yang membutuhkan pertolongan. Baru setelah *Media Indonesia* 2 Agustus 1998 memunculkan tulisan tentang data perkosaan dan memampangkan foto Lettu Yenni, baru diketahui bahwa "Mira sang keluarga korban" itu tak lain adalah seorang intel polisi.

Lettu Yeni mungkin bukan intel profesional, karena ia melaporkan "hasil temuannya" di media massa, dan tidak akurat lagi. Ia mengaku-aku sudah menemui Romo Sandyawan, padahal belum pernah terjadi pertemuan itu. Lettu itu katanya datang untuk bekerja sama, namun waktu itu datang untuk mengadu.

"Saya polisi, tidak bisa mempercayai seseorang yang cuma menangis, *shock* atau trauma. Bagaimana saya percaya kalau *ndak* melihat dan memeriksa buktinya. Untuk mengungkap kasus ini saya mendatangi banyak LSM dan ajak kerjasama, khususnya Tim Relawan. Saya sampai membawa bendera agama untuk meyakinkan Romo Sandyawan. Saya bilang, 'Romo, saya Katolik. Saya tidak mungkin mengkhianati Romo. Sampai saat ini belum ada LSM mau bekerja sama. Saya berkesimpulan, kemungkinan datanya *ndak* valid hanya berdasarkan telepon. Tapi mereka selalu berdalih korban tidak percaya lagi kepada polisi. Kalau menjaga kerahasiaan, polisi pasti lebih berpengalaman dibanding Tim Relawan. Jadi sebenarnya ada maksud apa LSM membesar-besarkan masalah ini" kata Lettu Yenni dalam *Media Indonesia Minggu*, 2 Agustus 1998.

Repro: Merdeka

■ **Kapolri Letjen Roesmanhadi:** Mengancam LSM

"Sebuah bukti cara kerja aparat keamanan yang mencoba menggelapkan fakta dan bukti-bukti secara sistematik", ujar Palupi salah seorang relawan dalam sebuah suratnya.

Belakangan, kasus perkosaan semakin rumit serumit pengungkapan kasusnya sendiri. Bahkan tak jarang isu perkosaan ini sudah menjadi ajang "perang" urat saraf berbagai pihak. Sejumlah pihak menuduh LSM-LSM mengangkat isu tersebut sebagai upaya pendiskreditan sebuah kelompok agama tertentu. Walaupun sebenarnya LSM terutama Tim Relawan berbicara berdasarkan sejumlah fakta dan kesaksian para korban.

Anehnya, disaat sebuah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengungkapkan peristiwa kelabu yang menimpa bangsa Indonesia ini. Sejumlah intimidasi dan teror terus dilancarkan baik oleh aparat pemerintah, aparat keamanan, maupun kelompok lain terhadap Tim Relawan dan korban. Di Jakarta dan Surabaya sejumlah korban mengaku merasa dikejar-kejar oleh penelpon gelap maupun orang-orang tak dikenal yang memaksa memberikan kesaksian. Sejumlah kelompok yang konon dekat dengan kekuasaan, beberapa waktu lalu mendesak agar LSM-LSM untuk diperiksa karena menyebarkan berita bohong soal perkosaan.

Kelompok itu misalnya Liga Penegak Kebenaran dan Keadilan (LPKK—organisasi ini juga mengecam barisan nasional yang menolak Habibie) dan sekelompok mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Juga LKB *Antara*, sebuah kantor berita pemerintah pimpinan Parni Hardi pun selalu membesarkan protes-protes yang dilontarkan kelompok tertentu khusus mengenai kasus perkosaan. Salah satunya adanya temuan sekelompok mahasiswa di Surabaya mengenai kepalsuan foto-foto perkosaan yang diedarkan pihak-pihak tertentu yang juga dikecam oleh Sekretaris Tim Relawan, Romo Sandyawan. Bahkan seorang Kapolri Letjen (Pol) Roesmanhadi pun ikut-ikutan mengintimidasi LSM dengan mengeluarkan sejumlah pernyataan yang tidak simpatik.

Namun, pekan lalu seorang utusan Kapolri berpangkat Mayor Jenderal mendatangi Pos Tim Relawan Kemanusiaan untuk menyatakan permintaan maaf Kapolri tentang pernyataannya. Mayjen Bintoro yang diperintah Kapolri mendatangi Tim Relawan itu, selain meminta maaf atas pernyataan Kapolri, ternyata juga untuk meminta maaf atas tindakan yang dilakukan bawahannya, Lettu Yeni. ■

[redacted]

Adu Banteng ala Habibie

Politik pecah belah yang dipakai rejim Soeharto diteruskan oleh Habibie. Tapi Megawati makin berkibar.

Akhirnya pemerintahan Habibie tidak lagi bisa menyembunyikan diri bahwa mereka merupakan kelanjutan pemerintahan Soeharto. Dua putusan penting mengenai persoalan PDI yang dikeluarkan pada pekan ini telah menguatkan posisi pemerintahan Habibie sebagai generasi penerusnya pemerintahan Orde Baru. Kedua putusan itu yang pertama, adalah dengan menerima, mengijinkan dan akan memberikan sambutan dalam acara pembukaan kongres PDI pimpinan Soerjadi di Palu 25-29 Agustus nanti. Kedua adalah penolakan gugatan PDI Megawati terhadap pemerintah oleh Mahkamah Agung dan sebaliknya mengabulkan gugatan Megawati terhadap panitia Kongres PDI di Medan yaitu Fatimah Ahmad, Buttu Hutapea, Soerjadi dan Panangian Siregar.

Setelah menunggu hampir selama dua tahun, akhirnya putusan kasasi Mahkamah Agung itu pun turun juga. Megawati diperbolehkan menggugat panitia Kongres Medan yang mendongkelnya dari kepemimpinan PDI. Hanya saja, untuk gugatan terhadap pemerintah, ditolak dengan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhak mengadili pejabat pembuat kebijakan di bidangnya masing-masing. Dipecahnya pokok perkara gugatan Megawati menjadi dua — pemerintah dan Soerjadi Cs— dinilai oleh pakar hukum sebagai sebuah tindakan hukum yang terkesan dicari-cari, kontradiktif bahkan diskriminatif. RO Tambunan sebagai salah satu kuasa hukum Megawati mengatakan bahwa putusan itu sama sekali tidak sempurna. "Putusan kasasi untuk kasus yang sama tidak bisa dipisah-pisah", kata RO Tambunan.

"Ini preseden buruk bagi perkembangan hukum di Indonesia bahwa setiap kesalahan pejabat pemerintah tidak bisa diadili karena menjalankan kebijakan", kata Hakim Garuda Nusantara.

Beberapa pakar hukum menyangsikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada nurani dan keadilan sebab bagaimanapun pemerintah Habibie sangat berkepentingan dengan kasus PDI. Minimal, dalam pemerintahan Habibie terdapat dua menteri yang disebut-sebut ikut dalam perekayasaan penyingkiran Megawati, yaitu Menko Polkam Faisal Tanjung dan Mendagri Syarwan Hamid yang oleh Habibie perlu dilindungi. Walaupun, terakhir Syarwan Hamid berang dan tidak terima tuduhan itu. Ia mengadukan tiga media ke polisi, yaitu *DeTAK*, *Sinar* dan *Merdeka*.

Hal inilah yang oleh pakar hukum disebut sebagai sebuah fakta bahwa dalam pemerintahan yang mengklaim reformis tertap saja melakukan rekayasa lembaga hukum untuk kepentingan politiknya. "Ini sebuah bukti bahwa MA belum lepas dari kekuasaan. Putusan itu tidak jelas dan menunjukkan kebingungan pemerintah", kata Kristiadi, pakar politik CSIS.

Repro: Merdeka

■ **Seorjadi Dicium Habibie:** Upaya menggoyang Megawati

Selain adanya kepentingan pribadi orang-orang di sekeliling Habibie, tentu pemerintah Habibie akan tetap menjaga dengan baik konflik yang berlarut-larut dalam tubuh PDI. Alasannya, sama seperti pemerintahan Soeharto: agar PDI tidak besar dan Megawati tidak punya akses legal sebagai pemimpin negara. Karena bagaimana pun, saat ini kekuatan Megawati semakin hari semakin membesar dan akan mampu melampui partai-partai besar yang sudah dikendalikan oleh pemerintah. Bahkan melampui partainya pemerintah sendiri: Golkar, yang sebaliknya semakin hari semakin keropos kehilangan akarnya.

Ketakutan terhadap PDI dan Megawati merupakan sesuatu yang wajar. Dari berbagai pooling yang dilakukan oleh Litbang PDI hingga ke penelitian yang dilakukan LP3ES pun menyimpulkan bahwa Megawati sangat diharapkan bisa memimpin negeri ini, dan bukan Habibie. Itu artinya, jika Habibie masih ingin berkuasa maka ia harus terus menggembosi partai berlambang kepala banteng itu, atau partai-partai lain yang berpotensi besar.

Oleh sebab itu penyikapan Habibie terhadap konggres PDI Soerjadi di Palu yang akan berlangsung tanggal 25-29 Agustus itu pun tidak lepas dari sikap politik pecah belah Habibie ini. Ia memberikan sedikit angin kepada Megawati supaya tidak terlalu keras ditentang, dipihak lain Habibie merepresinya dengan terus menghidupi musuh politik Megawati di PDI, yaitu Soerjadi dkk.

Karena, secara kalkulasi politik, ia tetap tidak akan mendapat dukungan dari rakyat hanya dengan mengakui PDI Soerjadi. Karena jelas, Soerjadi sudah ditinggalkan massanya. Namun ia perlu ada untuk tetap merecoki Megawati. PDI Soerjadi memang pantas dipilih oleh Habibie karena tidak akan kritis atau berani mempersoalkan ketidakabsahanan pemerintahannya. PDI Soerjadi diciptakan dan dibesarkan oleh pemerintah sehingga banyak hutang budi terhadap pemerintah.

Kalau berani pun, kekuatannya tidak akan mampu menggoyahkan kekuasaan Habibie. Tapi bagaiamana nasib PDI Soerjadi mendatang? Disitulah sebenarnya arti penting konggres Palu. Karena gencarnya upaya untuk menggagalkan konggres itu dari kubu Megawati dan suara dari dalam PDI Soerjadi untuk membubarkan diri dan menyatu dengan Megawati, atau semakin rontoknya dukungan cabang terhadap PDI Soerjadi merupakan pertanda bahwa sebentar lagi partai boneka itu akan ambruk juga. Kecuali jika pemerintah bersama aparatnya kembali bergerilya untuk membantu PDI Soerjadi, seperti yang dilakukan sebelumnya. ■

90 hari Pemerintahan Habibie:

Menuju Kebangkrutan

Oleh: Muhammad Chatib Basri

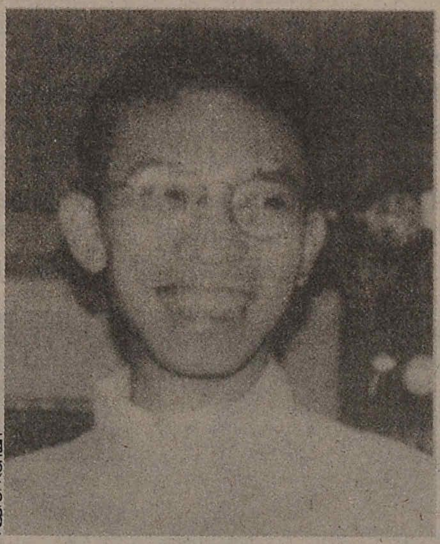

Repro: Kontan

Sebenarnya agak sulit memisahkan era Habibe dan era Soeharto, karena dari kacamata krisis dan kebijakan, era ini adalah kelanjutan dari era Soeharto. Itulah sebabnya lebih tepat bila dikatakan bahwa era ini adalah era ekonomi pasca 21 Mei. Di era ini, situasi yang menyenangkan memang masih tidak bersama kita. Tengok saja situasi ekonomi saat ini: BPS memperkirakan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia akan pada tahun 1998 akan hampir mencapai 80 juta. Suatu jumlah yang fantastis yang bahkan lebih buruk dari 20 tahun yang lalu ketika pada tahun 1976 jumlah orang miskin tercatat sekitar 54 juta.

Situasi dunia usaha pun tak jauh berbeda. Pada sisi dunia usaha, kita melihat bahwa dengan nilai tukar Rp8.000, 63% dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta memiliki rasio utang dolar terhadap total asset 50% atau lebih. Dan pada kurs Rp10.000, rasio ini akan meningkat lagi menjadi hampir 70%. Tingkat pengangguran juga meningkat sangat drastis hingga 20 juta. Angka pertumbuhan ekonomi sendiri tahun ini diperkirakan mencapai -15%, bahkan perhitungan satu lembaga dari Amerika Serikat memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang mencapai minus 30%. Tingkat upah riil mengalami penurunan di hampir semua propinsi di Indonesia. Penurunan upah riil yang paling tajam terJadi di Pulau Jawa, dimana tingkat upah riil turun lebih dari 10% dalam 6 bulan krisis. Tingkat inflasi sudah mencapai 59%. Khusus bahan makanan inflasi telah mencapai 82,7%. Dari sisi pangan, FAO memperkirakan 7.5 juta orang di 15 propinsi akan mengalami kurang pangan. Produksi padi per kapita riil mengalami penurunan 10% pada 1998 dibandingkan 1997. Dengan gambaran yang tidak bersahabat ini kita mencoba melihat perkembangan ekonomi di era Habibie.

Upaya untuk melihat perkembangan ekonomi di era Habibie mungkin bisa dilihat dari beberapa indikator berikut:

1.Nilai Tukar dan Pasar Modal

Situasi ekonomi seperti yang disebut diatas tidak mengalami perbaikan dalam era Habibie, bahkan mengalami penuruan. Ini bisa dilihat dengan semakin jatuhnya nilai tukar yang —walau pada 19 Agustus sempat mencapai Rp11.700— tetap terpuruk. Kapitalisasi pasar modal juga tidak mengalami perbaikan, bahkan beberapa waktu terakhir mengalami penurunan.

Tentu saja agak terlalu berlebihan bila kita menganggap bahwa kurs yang terpuruk ini semata-mata disebabkan karena naiknya Habibie sebagai Presiden. Ada faktor lain yang juga berperan, seperti kekuatiran terhadap masalah politik dan keamanan. Kerusuhan yang terjadi pada 13-15 Mei juga memberikan kontribusi terpuruknya nilai tukar dan kapitalisasi pasar.

Tetapi perlu dilihat bahwa kebijakan yang dibuat selama era Habibie memang tidak berhasil mengembalikan kepercayaan pasar. Satu fenomena yang menarik selama krisis ini adalah fenomena *vote by dollar*, dimana ketidak puasan atau ketidakpercayaan terhadap kebijakan ekonomi atau situasi ekonomi dimanifestasikan dalam bentuk berpindahnya modal atau ditukarnya rupiah ke mata uang asing seperti US dolar. Karena itu dari konsep *vote by dollar* terlihat bahwa Habibie tidak berhasil mengembalikan kepercayaan itu. Berita akan masuknya dana CGI memang sedikit memperkuat rupiah tetapi di masih berada di tingkat Rp11.000. Bila nilai tukar masih bertahan pada angka ini maka lebih dari 70% perusahaan secara teknis menga-lami bangkrut.

2. Uang Beredar, Defisit Anggaran dan Inflasi

Dalam periode Januari-Juli minggu ke-3 1998, uang primer tumbuh sebesar 26,6%. Pertumbuhan yang paling tinggi terjadi dalam bulan Mei, yaitu periode peralihan, dimana MO atau uang primer tumbuh sebesar 11%. Bandingkan dengan periode Jan-Juli 1997 dimana uang primer tumbuh sebesar 12,7%. Uang beredar dalam arti luas (M2) setelah Habibie memerintah tumbuh realtif tinggi, yaitu tercatat sebesar 8% pada Mei, dan 15% pada Juni. Sumber utama pertumbuhan pada Juni adalah tagihan untuk sektor swasta yang tumbuh sebesar 19,9%. Dari sisi ini kita melihat bahwa adanya peningkatan jumlah uang beredar yang tentunya akan memberikan kontribusi kepada inflasi yang tinggi.

Dari sisi anggaran pemerintah Habibie melakukan revisi anggaran, dan untuk 1998/99 anggaran mengalami defisit sebesar 8,5% dari PDB. Defisit yang besar ini tentu saja juga akan memberikan kontribusi kepada inflasi. Perhitungan dampak ekspansi moneter dari anggaran menunjukkan bahwa dengan defisit 8,5% dari PDB, maka terjadi ekspansi moneter sebesar 56,9 trilyun rupiah.Tambahan uang beredar sebesar 56.9 trilyun dari sisi fiskal ini tentu akan mendorong inflasi ketingkat yang lebih tinggi lagi.

Tingkat inflasi sendiri sudah mencapai 59%. Tingkat inflasi untuk makanan, sejak Juni dan Juli meningkat cukup tajam yaitu sebesar 7% dan 12%. Dari sisi ini terlihat adanya pemburukan selama pemerintahan Habibie. Tentu saja inflasi ini dipengaruhi oleh paling tidak 3 hal, yaitu *imported inflation*, yang terjadi karena semakin memburuknya nilai tukar, masalah meningkatnya uang beredar dan juga masalah distribusi atau problema sisi penawarannya. Dari sisi ini kita bisa melihat bagaimana inflasi akan mengancam kita dari dalam bulan-bulan ke depan. Itulah sebabnya penajaman prioritas dari subsidi harus dilakukan, sehingga kebijakan yang muncul juga harus memiliki argumentasi pertimbangan ekonomis rasional dan bukan sekedar efisien untuk dukungan politik saja.

Selain kebijakan ekonomi yang ditetapkan IMF, Habibie mencoba memperkenalkan konsep ekonominya, yang menurut Habibie berbeda dalam 3 hal dengan era Soeharto:

1. Nilai tukar yang stabil, menurut Habibie yang dibutuhkan adalah nilai tukar yang stabil tanpa perduli berapa pun tingkatnya. Menarik sekali karena jika ini dijalankan, pada nilai tukar Rp10.000 saja, maka 70% perusahaan yang terdaflar di BEJ secara teknis akan bangkrut. Impor beras dalam tahun 1998/99 (April-Maret) diperkirakan sebesar 3,5 juta ton dengan asumsi bahwa pada Agustus panen berjalan normal. Dengan kurs yang tinggi maka pembelian bahan makanan pun menjadi sangat mahal. Karena itu kurs yang stabil tanpa memperhatikan *level*-nya, jelas membawa ekonomi Indonesia kepada kebangkrutan.
2. Ekonomi kerakyatan dinyatakan bahwa konsep ekonomi seka-

rang mengacu kepada konsep ekonomi rakyat. Tidak ada penjelasan yang rinci tentang konsep ini. Sebenarnya dari sisi konsep ekonomi umum, pelaku ekonomi itu dibedakan: produsen dan konsumen.

Jika orientasi kita kepada rakyat, dengan pengertian mereka yang berpendapatan rendah, maka persoalan dalam ekonomi rakyat dapat dilihat dari dua sisi: Dari sisi produsen, dari sisi ini, yang paling penting adalah aksesibilitas untuk melakukan usaha seperti ketersediaan kredit dan bukan tingkat bunga kredit itu sendiri, beberapa studi yang dilakukan telah membuktikan ini. Dari sisi konsumen, persoalan yang dihadapi adalah harga yang mahal. Karena itu upaya yang harus dilakukan adalah memerangi inflasi dan bukan memberikan subsidi untuk berbagai macam hal yang skala prioritasnya kurang tinggi. Agaknya subsidi untuk makanan dan obat-obatan adalah suatu hal yang harus dan tidak bisa dihindari, tetapi subsidi yang lain mungkin bisa diperdebatkan. Mengingat bahwa rakyat adalah juga konsumen, maka *concern* kepada ekonomi rakyat seharusnya ditujukan kepada upaya memerangi inflasi.

3. Independensi Bank Indonesia. Habibie menyatakan bahwa Bank Indonesia akan dibuat independen. Tentu saja hal ini dibutuhkan dalam periode krisis seperti ini. Tapi bila kita melihat kebijakan yang ada saat ini, maka independensi BI masih dipertanyakan, melihat bagaimana bank yang sakit masih dipertahankan dan juga pemberian subsidi bunga kredit.

Dalam periode Habibie ini sendiri, ada beberapa kebijakan yang telah dilakukan selama ini. Paling tidak dua hal yang menjadi sorotan penting, masalah penyelesaian utang melalui INDRA dan sektor perdagangan luar negeri. Skema yang diberikan melalui INDRA masih mengalami kesulitan, bukan karena skema INDRA itu sendiri tidak baik, tetapi kondisi makro ekonominya menyulitkan INDRA untuk berjalan. Kurs terbaik yang ditetapkan adalah sebesar Rp13.200. Dengan tingkat kurs seperti ini hanya sangat sedikit sekali perusahaan yang bisa ikut. Pilihan lain adalah membayar dengan rupiah dengan tingkat bunga riil 5,5%, berarti sekitar 65,5% nominal, yang sulit sekali dicapai oleh perusahaan dalam masa krisis.

Repro: Merdeka

Dipihak lain upaya ekspor non migas dinyatakan meningkat sekitar 8% sedangkan impor menurun 37% atau -37%. Dalam jangka pendek memang akan terjadi peningkatan neraca perdagangan. Tapi mengingat bahwa bahan yang diimpor adalah bahan baku dan barang modal termasuk untuk ekspor, bisa diduga bahwa penurunan impor yang tajam juga akan berakibat menurunnya kapasitas produksi untuk ekspor, sehingga surplus dalam neraca perdagangan pun tidak akan *stainable.* Ditengah situasi seperti ini pemerintah malah memberlakukan pelarangan ekspor untuk CPO, yang pada akhirnya hanya akan mendorong penyelundupan dan mentrasfer keuntungan kepada pihak asing.

Dari sisi lain problematika yang sering memberikan kebingungan kepada pasar adalah kordinasi kebijakan yang sangat lemah atau malah tidak terkoordinir.

Prospek ke Depan

Paling tidak ada dua hal yang perlu dilihat ke depan. Yang pertama pola kebijakan dan kedua kelanjutan krisis.

1. Pola kebijakan. Dari sisi ekonomi politik, kebijakan ekonomi pemerintah akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu: a) Upaya untuk memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. b) Upaya untuk memaksimumkan kontribusi dari kelompok kepentingan guna membangun *political support.*

Karena itu kebijakan yang dibuat akan merupakan tarik menarik dan tawar menawar antara kelompok kepentingan dan pemerintah. Bila kita melihat dari peran kelompok kepentingan maka paling tidak ada tiga aktor dominan, IMF, *economic nationalist* dan *crony capitalist.* Dalam situasi dimana peran dari *economic nationalist* dan *crony capitalist* masih cukup kuat maka sulit sekali diharapkan kebijakan yang pro pasar akan berjalan dengan mudah. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa peran IMF sangat dominan, tetapi tarik menarik ini akan terjadi dengan cukup kuat. Inilah salah satu alasan yang membuat investor masih mengambil posisi menunggu, selain tentunya alasan utama yaitu kepastian politik.

2. Krisis yang berlanjut. Satu hal yang harus diingat bahwa sektor riil adalah sektor yang selalu mempunyai tenggang waktu dalam meresponse harga. Artinya krisis yang terjadi dalam bulan-bulan ini, dari sisi sektor riil sebenarnya adalah akibat dari harga yang terjadi pada beberapa bulan sebelumnya. Pada waktu itu nilai tukar masih di bawah Rp10.000 dan tingkat inflasi masih lebih rendah. Dampak dari krisis di era Habibie ini terhadap sektor riil, baru akan terasa dalam beberapa bulan kedepan. Dampak dari kurs Rp/$ yang di atas 11.000 baru akan terasa baru dalam beberapa bulan kedepan. Oleh karena itu krisis ekonomi dalam era Habibie ini sebenarnya justru baru akan mulai dan bukan telah berlalu.

3. Kepastian politik. Satu hal yang harus diperhatikan adalah kepastian politik. Penyelesaian masalah politik menjadi syarat perlu guna perbaikan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jakarta yang diperkirakan -18% tentu juga memberi dampak kepada instabilitas mengingat peran Jakarta yang begitu besar dalam proses pengambilan keputusan.

Dari argumen data-data, argumen dan prediksi diatas, maka kita bisa melihat bahwa situasi ekonomi dalam 90 hari era Habibie memang belum menunjukkan tanda perbaikan bahkan terlihat gejala penurunan. Apakah ini menunjukkan tidak adanya legitmasi pemerintahan Habibie dan tidak adanya leadership hal itu berada di luar wilayah kajian ekonomi teknis, tetapi dari sisi kebijakan kita memang melihat bahwa tidak terlihat gejala-gejala perbaikan dan kita juga bisa melihat bahwa krisis masih akan bersama kita dalam waktu kedepan. Yang menguatirkan justru penyataan dari

Presiden Habibie sendiri dalam pidatonya yang menyatakan bahwa orang berlomba-lomba untuk meramalkan yang buruk tentang situasi ekonomi. Disini situasi justru lebih mengkawatirkan karena orang yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap kebijakan —yaitu Presiden Habibie— justru terkesan 'tidak melihat begitu seriusnya' persoalan. Jika kita kembali kepada tahap pengingkaran, maka tidak bisa diingkari bahwa Republik ini sedang berjalan menuju kerutuhan ekonominya. ■

Penulis sedang mengikuti Program Doktoral di Department of Economics, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University. Tulisan ini merupakan pengantar diskusi yang diselenggarakan Yayasan Padi dan Kapas, 20 Agustus 1998.

■ POLITIK

Sjafrie Segera Susul Prabowo

DKP merekomendasikan Prabowo disidangkan ke Mahkamah Militer. Mayjen Sjafrie Sjamsuddin bakal segera menyusul.

Tamat sudah karir Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Di sidang terakhir Dewan Kehormatan Perwira (DKP), Selasa, 18 Agustus lalu, nasib jenderal yang pernah digelari *"the raising star"* telah ditentukan. "Rekomendasinya berupa sanksi administrasi dan proses di mahkamah militer," ungkap Ketua DKP, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo. Selain Prabowo, dua perwira lainnya juga akan diseret ke mahkamah militer, yaitu: Mayjen Muchdi Pr. dan Kolonel Chairawan.

Rekomendasi DKP itu telah diserahkan kepada Panglima ABRI, Jenderal Wiranto. Rencananya, Senin pekan ini (24/8), Wiranto akan mengumumkan apa tindakan yang akan diambil terhadap Prabowo dan kawan-kawan, yang dituduh melakukan penculikan terhadap para aktivis prodemokrasi.

Tak jelas apa bentuk sanksi yang akan dijatuhkan. Tapi, sejumlah analis politik mengungkapkan kemungkinan besar Wiranto menjalankan rekomendasi DKP tadi. Sebab, langkah itu akan sangat berguna untuk memulihkan citra ABRI yang sangat terpuruk belakangan ini. "Itu merupakan langkah yang bagus untuk menarik simpati rakyat," kata seorang analis politik.

Apapun motif dibaliknya, pengajuan Prabowo dan kawan-kawan ke depan mahkamah militer —bila benar terjadi— merupakan langkah berani pimpinan ABRI. Sebab, pengalaman yang sudah-sudah, para perwira tinggi yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia hanya diberikan sanksi administratif, seperti dimutasi atau dinon-aktifkan dari jabatan struktural.

Tapi, seberapa besar sebenarnya kesalahan Prabowo, sehingga harus dimahmilkan? Kepada DKP, Prabowo pernah mengaku salah menganalisa perintah bawah kendali operasi (BKO) dari atasannya. Namun, dalam penilaian Letkol (Purn) Edward Baringbing —yang mengaku pernah menjadi instruktur intelijen Prabowo di Pusat Pendidikan Intelijen ABRI— apa yang dilakukan Prabowo dan kawan-kawan sudah sesuai prosedur yang berlaku di dinas intelijen. "Itu namanya *counter intelligence*, yang dilakukan berdasarkan laporan BIA (Badan Intelijen ABRI) kepada Pangab," tegas Edward. Karena itu, menurut Edward, pemeriksaan terhadap Prabowo sebenarnya lebih bermotif politis daripada penegakan hukum militer.

Bisa jadi, pendapat Edward itu benar.

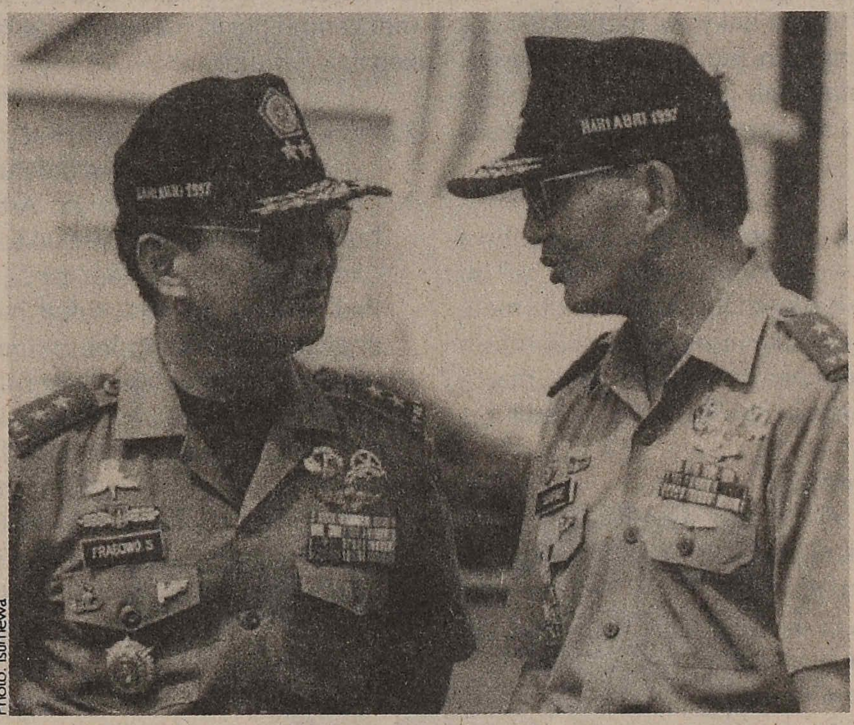

Photo: Istimewa

■ Prabowo dan Sjafrie: Akan disidang ke Mahkamah Militer

Sudah menjadi rahasia umum, sejak lama Prabowo merupakan seteru utama Wiranto dalam perebutan kekuasaan di ABRI. Nah, rekomendasi DKP inilah menjadi momentum yang tepat untuk menyingkirkan Prabowo. Tindakan memahmilkan Prabowo dan kawan-kawan sekaligus menjadi peringatan kepada para perwira yang berniat menentang kebijakan pimpinan ABRI dibawah Wiranto.

Kabarnya, "pembersihan" yang dilakukan Wiranto tak hanya sebatas itu. Perwira tinggi lain yang sedang dibidik adalah Mayjen Sjafrie Sjamsudin, mantan Pangdam Jaya yang dikenal dekat dengan Prabowo. Bidikan terhadap Sjafrie sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Ia, misalnya, disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus penculikan para aktivis tadi. Lagipula, sebagai Pangdam Jaya waktu aksi penculikan itu berlangsung, Sjafrie mestinya ikut bertanggungjawab.

Sjafrie pula yang mestinya bertanggungjawab atas kerusuhan yang melanda Jakarta 13-14 Mei lalu. Namun, Sjafrie berhasil lolos dari bidikan ter-sebut berkat perlindungan yang diberikan Presiden Habi-bie. Ia hanya dimutasikan ke Markas Besar ABRI.

Toh, Sjafrie terus diincar. Belakangan, namanya disebut sebagai pemberi perintah alias dalang penculikan dan penyiksaan Hendrik Sirait —aktivis Pijar Indonesia— yang terjadi medio 1996. Saat itu, Sjafrie masih menjabat Kepala Staf Kodam Jaya. "Ia merupakan tersangka utama dalam kasus ini," kata sumber *Xpos* di POM ABRI.

Selama dua pekan lalu, POM ABRI telah meminta keterangan intensif dari Hendrik. Aktivis ini diculik aparat keamanan, lalu dibawa ke markas intelijen Kodam Jaya, di Jl Kramat Tujuh, Jakarta Pusat. Di sana, selama hampir sebulan, ia diinterogasi dengan siksaan hingga hampir lumpuh. Selain Sjafrie, dalam daftar nama tersangka kasus penculikan Hendrik adalah komandan di Markas Kremlim (Kramat Lima) waktu itu.

Kalau itu sampai terjadi, berarti "Geng Prabowo" benar-benar habis. ■

Bacaan Alternatif untuk KAUM REFORMIS SEJATI

Bankir Nakal Harus Dihukum

Tiga bank dibekukan, empat lainnya diambilalih pemerintah. Mengapa Bob Hasan dan Bambang Tri lolos?

Perbankan Indonesia kembali terkena pukulan telak. Tiga bank—Bank Modern, BDNI, dan Bank Umum Nasional— yang selama ini dirawat Badan Pembinaan Perbankan Nasional (BPPN) akhirnya dibekukan pemerintah. Sedangkan empat bank lainnya, termasuk BCA dan Bank Danamon, diambilalih pemerintah. "Langkah ini untuk menyehatkan dunia perbankan nasional," tegas Menteri Keuangan Bambang Subianto.

Sehabis mengumumkan pembekuan dan pengambilalihan bank-bank tersebut, Bambang langsung meluncur ke Kantor Kejaksaan Agung. Disana, ia bertemu Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib untuk membicarakan soal penyidikan terhadap para pemilik dan pengelola bank-bank bermasalah tadi. Hasilnya, "Kami akan segera membentuk tim untuk memeriksa bankir-bankir itu. Kalau memang ada indikasi tindak pidana korupsi, ya akan diseret ke pengadilan," ujar Ghalib.

Sikap tegas pemerintah itu, tentu saja, membuat para bankir ketar-ketir. Soalnya, saat ini sudah puluhan bankir bank bermasalah yang diperiksa polisi dengan tuduhan korupsi. Salah seorang diantaranya Endang Utari Mokodompit, bekas Preskom Bank Pacific yang juga putri sulung Ibnu Sutowo.

Jumlah tersangka bankir memang terus berkembang. Semula, dua pekan silam Bank Indonesia hanya melaporkan sembilan bankir ke polisi. Kini jumlahnya membengkak berlipat-lipat. Mestinya, jumlah tersangka memang tak bisa sedikit, karena dalam perbankan semua keputusan penting harus diambil secara kolektif. Seorang pengamat perbankan mengatakan, dari 94 bankir dan pemilik bank 16 bank terlikuidasi yang kena cekal akhir tahun lalu, setidaknya separonya bisa diajukan ke pengadilan.

Dari 29 tersangka yang telah ditetapkan itu, baru lima orang yang ditahan, yakni: Jhonny Basuki (Direktur Utama SBU), Hendro Suwono (Direktur Marketing BHS), Serni Kojongian (Direktur Akunting BHS), Anwar Syukur (Presiden Direktur), Achmad Rafli (Wakil Komisaris Bank Anrico)

Tiga orang tersangka bankir lainnya, Lesmana Basuki (Komisaris SBU), Hendra Rahardja dan Eko Edi Putranto (Presiden Komisaris dan Komisaris BHS, raib dan diduga meninggalkan Indonesia. Polisi telah memaksukkan mereka dalam daftar buron Interpol. Sejumlah tersangka bankir yang tak ditahan antara lain: Andre Widijanto (BHS), Handi Sunardjo, Jimmy Sutjiawan, Leo Adianto (SEAB), Endang Utari Mokodompit, Adrian Herling, Ferdinand Japutra, Handoko Sutopo (Bank Pasific), Setiawan Chandra, John Erizal, Eric C.J. lazuardi (Bank Kosa Graha), Jhony Lumoa, H.R. Rembet, C. Mandagi, Robby A. Manajang, Lodewik Yohanes Henri Eman (Bank Pinaesaan).

Photo: Istimewa

■ **Bank Danamon:** Diambilalih pemerintah

Para tersangka yang tak ditahan ini masih berada di dalam negeri dan belum diperiksa oleh pihak kepolisian. Pengacara para tersangka tersebut telah memberikan jaminan tertulis, bahwa klien mereka tidak akan meninggalkan Indonesia.

Tuduhan resmi untuk para bankir ini sudah disiapkan. Kadispen Polri, Brigjen Pol. Togar Sianipar mengatakan, mereka disangka melanggar UU No. 7/1992 tentang Perbankan. Menurut Togar para tersangka menggelapkan dana masyarakat dan pemerintah sebesar miliaran rupiah, dengan modus melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan memainkan *platpondering* kredit yang diberikan kepada grup sendiri. *Platpondering* adalah membukukan kredit baru kepada nasabah yang memiliki pinjaman macet. Pelanggaran macam ini misalnya dilakukan Bank Anrico yang melakukan pelanggaran BMPK lebih dari 92%.

Bank SBU juga melakukan pelanggaran BMPK senilai lebih dari US$50 juta. Direktur Utama Bank SBU, Jhonny Basuki juga menggunakan jaminan banknya untuk menilep dana senilai Rp1,5 miliar. Kecurangan-kecurangan lainnya yang dilakukan Bank SBU misalnya dengan menipu Bank Dagang Negara yang mengucurkan kredit karena memperoleh jaminan yang tak diketahui rekan-rekan Jhony.

Para bankir itu memang pantas diadili. Namun, mengapa para bankir dan pemilik bank yang lebih pantas diadili bisa lolos dari jeratan? Bank Andromeda misalnya, di mana tercatat Bambang Trihatmodjo, Peter Gontha, Henry Pridadi, Prayoga Pangestu dan Yohannes Kotjo sebagai pemilik dan komisaris, lolos begitu saja. Padahal, Peter Gontha, salah satu komisaris Bank Andromeda sudah mengakui bahwa banknya melakukan pelanggaran BMPK untuk mendukung pendanaan megaproyek petrokimia PT Candhra Asri. Jadi, Andromeda seharusnya terjerat juga, karena tanpa diusut pun mereka telah mengakuinya.

Jangan lupa, Bob Hasan termasuk pemilik dan pengurus Bank BUN. Nah, bank ini juga tak kalah busuknya. Bob misalnya pernah diketahui melakukan serangkaian kejahatan dengan menerbitkan surat-surat berharga yang dananya kemudian masuk ke kantong pribadinya sebanyak miliaran rupiah.

Nampaknya, kecuali Endang Utari yang masih terhitung anak seorang tokoh kakap, Ibnu Sutowo dan saudara pengusaha muda Ponjto Sutowo, para tersangka bankir ini hanya dari kelompok bankir teri, yang tak akan menimbulkan dampak politik apapun jika diadili. Bayangkan, sebenarnya banyak pensiunan jendral yang *nangkring* di jajaran direksi dan komisaris bank-bank nakal itu. Mengapa mereka tak ikut dijerat? Bukankah mereka juga menikmati hasil kejahatan bank-bank itu?

Nah, ini ujian bagi polisi dan Bank Indonesia. Jangan pilih-pilih kalau mau mengadili bankir-bankir dan para pemilik bank, yang di zaman Soeharto dulu banyak menyikat uang Bank Indonesia. ■

■ EKONOMI

Kok, Rebutan Minyak Goreng

Karena Beddu Amang, Adi Sasono dan Rahardi Ramelan bertengkar, Habibie cabut hak monopoli Inkoppas menyalurkan minyak goreng. Rebutan lahan?

Kalau sudah bicara soal rejeki, kawan pun bisa jadi musuh. Pecah kongsi ini terjadi antara Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Beddu Amang dengan Menteri Koperasi/ Pengusaha Kecil dan Menengah (Menkop/ PKM), Adi Sasono. Dua sekawan yang mulai dekat di Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini bersitegang soal memonopoli distribusi berbagai macam bahan makanan, adalah tempat yang subur bagi praktek-praktek korupsi. Beddu, misalnya pernah diketahui mengutip satu rupiah untuk setiap kilogram beras impor yang langung masuk ke rekening pribadinya. Setahunnya, setelah kita tak lagi berswasembada beras, rata-rata tiap tahunnya harus mengimpor beras

■ **Operasi Minyak Goreng:** Rebutan rejeki

keuntungan monopoli distribusi minyak goreng senilai puluhan miliaran rupiah per bulannya. Induk Koperasi Pedagang Passar (Inkoppas) mulai dua pekan silam diberi hak monopoli peredaran minyak goreng curah oleh Presiden Habibie, menggantikan monopoli Bulog.

Peralihan monopoli ini tentu tak mengenakkan Beddu, yang selama bertahun-tahun menikmati keuntungan pribadi dari monopoli distribusi ini.

Nah, belakangan ini Beddu mulai tak suka dengan Adi Sasono. Padahal asal tahu saja, dua orang ini sama-sama dekat dengan Habibie. Adi dekat dengan Habibie sejak mantan aktifis LSM ini menjadi Sekretaris Jendral ICMI dan menjadi pena-sehat politik Habibie. Karena komoditas penting itu pindah tangan ke Departemen Koperasi, kini kantong Beddu terancam kempis. "Keuntungan miliaran rupiah per bulan yang dulu masuk kantong Beddu pindah ke kantong Adi Sasono," ujar sebuah sumber.

Bulog, harap maklum, ketika masih sekitar tiga juta ton. Dari kutipan ini saja Beddu bisa menilep uang sebanyak Rp3 miliar setahun. Tentu uang itu tak diembatnya sendiri. Agar selamat, ia harus membaginya dengan beberapa atasannya.

Dulu, ketika Bulog bebas menyalurkan minyak langsung ke para agen, para pejabat Bulog masih bisa mengutip uang yang tak masuk ke kas negara. Bulog bisa dengan leluasa menentukan komisi terhadap para penyalur yang mengambil minyak goreng dari gudang-gudang Bulog. Hitung saja, berapa komisi yang masuk jika kebutuhan minyak goreng seluruh Indonesia tujuh ribu ton per hari. Kalau Bulog bisa memetik komisi Rp100 saja per kilonya, maka sehari bisa mengantungi Rp700 juta.

Nah, uang ratusan juta itulah yang kini tak lagi diterima Beddu, malah Bulog sering nombok, karena harus mendrop minyak kepada koperasi. Kalau berurusan dengan koperasi, apalagi Adi Sasono ikut terlibat di sana, mana mungkin Bulog mengutip komisi.

Beddu sebenarnya sudah kesal ketika Habibie menunjuk Inkoppas jadi penyalur tunggal minyak goreng untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Habibie juga menetapkan koperasi untuk jadi penyalur tunggal komoditas ini Januari 1999, menggantikan Bulog. Ini bukan pertama kali Bulog dipreteli. Awal tahun ini, monopoli distribusi gandum Bulog juga dilepas karena tekanan IMF. Tentu keputusan itu membuat Bulog jengkel karena kehilangan salah satu lahannya yang paling subur. Nah, belakangan monopoli distribusi minyak goreng, satu-satunya lahan subur yang masih bisa digarap, direbut Adi Sasono.

Kejengkelan Beddu sebenarnya sudah nampak ketika Adi Sasono terus-menerus mengeluarkan pernyataan soal minyak goreng, yang seharusnya menjadi kewenangan Bulog. Awal Juli lalu misalnya, Adi Sasono mengatakan bahwa stok minyak goreng Bulog habis. Namun tak lama kemudian, Beddu Amang membatah pernyataan Adi. Walaupun tak secara langsung membatah koleganya itu, Beddu mengatakan minyak goreng melimpah di pelabuhan Tanjung Priok.

Para pejabat Bulog kini praktis kehilangan banyak lahan pendapatan tambahan. Itulah sebabnya, Beddu berencana akan membeli *crude palm oil* (CPO) dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Dengan membeli langsung CPO dan menjualnya lagi ke perusahaan penyulingan minyak dengan harga yang lebih mahal, Bulog masih bisa mengutip keuntungan.

Sial bagi Beddu. Rahardi Ramelan, Menteri Perindustrian dan Perda-gangan, kawan Beddu juga di ICMI mengatakan Bulog tak boleh membeli CPO karena hanya ditugasi membeli minyak goreng. Ketegangan antara Rahardi Ramelan, Beddu Amang dan Adi Sasono ini agak mengejutkan terutama karena ketiga orang ini adalah orang-orang dekat Habibie.

Kalau sudah berurusan dengan duit miliaran, perkawanan memang bisa pecah. Dalam hal ini, Departemen Koperasi akan kebanjiran uang, apalagi kalau 1 Januari 1999, koperasi benar-benar jadi distributor tunggal minyak goreng seluruh Indonesia. Taruhan, koperasi akan jadi konglomerat baru di negeri ini.

Namun, puncak pertikaian antara Beddu dan Adi berakhir akhir pekan lalu, Habibie mencabut monopoli distribusi minyak goreng oleh Inkoppas. Ini menurut Menteri Pertanian A.M. Saefuddin setelah bersama-sama dengan Beddu mengadu ke presiden. Presiden memberi petunjuk agar dihindarkan monopoli distribusi minyak goreng oleh Inkoppas dan Koppas, ujar Saefuddin. Habibie menginstruksikan agar distribusi minyak goreng ini melibatkan juga kalangan pengusaha kecil dan menengah di luar koperasi. ■

Koruptor Dana Bank Dunia

Sebuah laporan Bank Dunia mengungkap korupsi yang dilakukan pejabat pemerintahan Indonesia. Tapi, aparat Bank Dunia sendiri perlu direformasi.

Reformasi tak cuma melanda Indonesia. Imbasnya ternyata sampai pula ke lembaga-lembaga internasional yang berhubungan dengan Indonesia. Itulah yang dialami Bank Dunia belakangan ini. Dikenal tak pernah mengkritisi pemerintah Indonesia sebelumnya, Bank Dunia kini tampil beda. Baru-baru ini, seperti dikutip *The Wall Street Journal* (WSJ) edisi 19 Agustus 1998, terungkap adanya sebuah laporan internal lembaga itu yang menuduh pejabat-pejabat Indonesia mengkorupsi hingga 30% dana dari Bank Dunia.

Tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa tingkat penyelewengan yang terjadi lebih rendah dari angka itu, sebut laporan itu. Bank Dunia cukup jujur mengakui bahwa pengawasan yang mereka lakukan memang hanya berdampak kecil, sehingga membuka peluang terjadinya korupsi. Proyek-proyek kami dijalankan dalam sebuah budaya administratif yang tidak saja mentolerir kolusi dan penggelapan uang, tapi juga dijalankan oleh para pejabat yang terang-terangan berharap memperoleh tambahan penghasilan melalui proyek-proyek tersebut.

Laporan itu sendiri, sebenarnya, sudah dipersiapkan selama bulan Agustus 1997, sebagai laporan untuk para pejabat senior bank dunia. Menurut *WSJ*, analisis dalam laporan itu muncul setelah Bank Dunia mulai menyadari bahwa kondisi korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Hal itu terlihat dari rincian korupsi dalam jumlah besar di Jakarta yang terungkap dalam laporan itu —yang sayangnya belum dipublikasikan.

Entah benar atau tidak, disebutkan bahwa sejak tahap persiapan laporan tersebut, Bank Dunia telah memfokuskan perhatiannya pada soal-soal korupsi di Indonesia serta pelaksanaan reformasi. Propaganda memerangi korupsi merupakan hal utama yang kami bicarakan dalam pembicaraan dengan pemerintah Indonesia, ungkap laporan itu.

Pejabat dalam pemerintahan di dalam negeri sendiri, sejauh ini belum ada yang mengiyakan laporan itu. Sebaliknya, malah menantang Bank Dunia untuk menyebutkan nama-nama proyek yang telah mengalami kebocoran dana tersebut. Sementara itu sebuah konsorsium LSM yang berbasis di Washington, Environmental Defense Fund, dalam suratnya pada Presiden Bank Dunia James Wolfensohn, mendesak agar laporan tersebut diluncurkan untuk konsumsi publik.

Lepas dari soal itu, laporan Bank Dunia tersebut merupakan hal yang teramat baru dan mengejutkan. Laporan yang terakhir ini, sungguh bertolak belakang dengan sikap lembaga donor tersebut pada pemerintah Indonesia, pada waktu-waktu sebelumnya. Selama ini, Bank Dunia dikenal selalu menyebut-nyebut Indonesia sebagai *good boy* — mengacu pada kedisiplinannya membayar cicilan hutang serta adanya data-data statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap sebagai sesuatu yang menakjubkan. Tanpa mau tahu bahwa peningkatan angka-angka itu sebetulnya dipompa oleh penggelembungan utang luar negeri.

Setiap kali muncul tuduhan korupsi dalam proyek-proyeknya di Indonesia, Bank Dunia selalu cepat menangkis. Malah, tuduhan-tuduhan seperti itu disebut sebagai anekdot besar oleh para petinggi lembaga itu. Di bulan Juli tahun lalu misalnya, Wakil Direktur Bank Dunia untuk Asia Timur ketika itu, Michael Severino membantah keras dengan mengatakan, kami tahu persis ke mana dana kami disalurkan.

Photo: Istimewa

■ Sektor Pertanian: Bantuannya dikorupsi para pejabat

Apa sebetulnya yang sedang terjadi? Tampaknya, setelah krisis berkepanjangan yang membuka luka perekonomian Indonesia, barulah Bank Dunia menyadari kelengahannya selama ini. Akibat tak mau mendengarkan berbagai masukan dari para ekonom kritis —yang sudah sejak lama mensinyalir kebocoran dana dari proyek-proyek Bank Dunia— Indonesia perlahan-lahan tenggelam dalam jurang krisis. Praktek korupsi tetap bertumbuh subur, tak peduli kelak hal itu akan menjadi beban utang yang harus ditanggung negara.

Ketika krisis telah terjadi dan korupsi dianggap sebagai salah satu penyebab utamanya, semuanya sudah terlambat. Tindakan pencegahan sudah tak bisa dilakukan. Dennis de Tray, perwakilan Bank Dunia di Jakarta pun —seperti dikutip *WSJ* bulan lalu— hanya bisa menyesali. Satu-satunya cara untuk memperbaiki kinerja Bank Dunia adalah dengan melakukan reformasi total. Karena itulah tak cuma pembenahan kebijakan yang yang mesti dilakukan, tapi juga pembenahan struktural.

Bulan lalu misalnya, Bank Dunia telah menunjuk auditor bertaraf internasional untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya korupsi oleh para stafnya di seluruh dunia. Diketahui, seorang staf yang bekerja di Jepang telah diperiksa beberapa waktu lalu. Para pejabat teras lembaga itu, tampaknya mencurigai staf-stafnya sendiri membuat laporan ABS, karena telah kongkalikong dengan pejabat pemerintah di negara-negara yang selama ini memperoleh bantuan dana.

Meskipun demikian, kebijakan bantuan terhadap Indonesia, tetap akan diteruskan Bank Dunia. Akhir bulan lalu misalnya, pemerintah AS baru saja mengumumkan pemberian tambahan bantuan sebesar US$300 juta sebagai bagian dari paket US$7,9 milyar yang disetujui di Paris oleh Bank Dunia.

Bantuan itu diberikan, terutama sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana sosial sebagai dampak krisis ekonomi. Bukan karena Bank Dunia sudah mempercayai pemerintah Indonesia. Sebesar US$190 juta akan dialokasikan untuk bantuan makanan, US$47 juta untuk bantuan pembangunan, US$10 juta untuk menanggulangi bencana serta sisanya sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman. Jadi, pemerintah memang tak boleh besar kepala. ■

Sulaiman Haikal, Aktifis Pijar Indonesia:

"Aman Jika Tentara Kembali ke Barak"

Jum'at siang pekan lalu, Kedutaan Besar Myanmar (Burma) kembali di demo sejumlah mahasiswa dari PIJAR Indonesia. Seorang pria dengan pakaian merah hati, memimpin unjuk rasa itu dan memegang megaphone berorasi di depan puluhan massa. Itulah Sulaiman Haikal, 22 tahun, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakarya, Jakarta. Haikal yang juga salah seorang pengelola *Kabar Dari Pijar*, pekan lalu baru saja dibebaskan oleh rejim militer Myanmar, bersama dua orang lainnya Christian Evert dan R. Fadjri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Ketika aktifis hak asasi manusia Indonesia itu, ikut serta dalam tim multi nasional aksi perdamaian di Yangoon, ibu kota Myanmar.

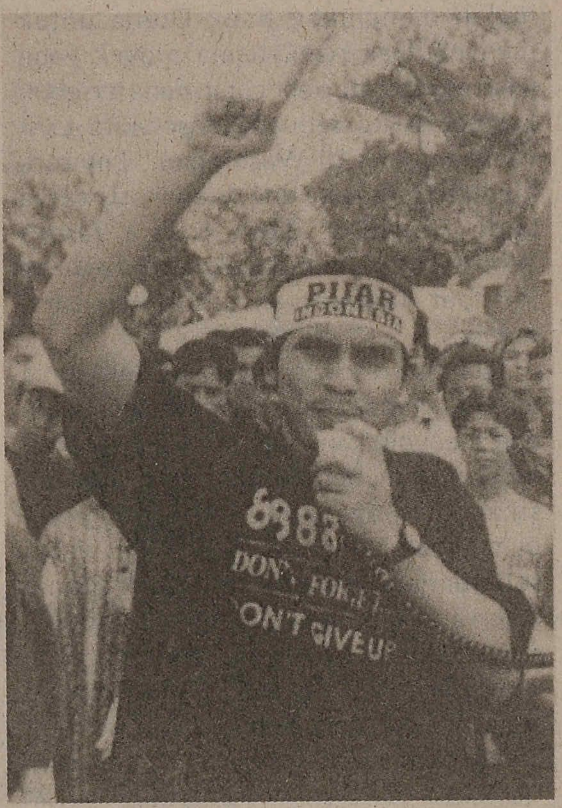

Haikal, Christian, dan Fadjri ditangkap di Airport saat menunggu untuk pergi dari negera bengis itu. Ditahan sejak 9 Agustus sampai 15 Agustus 1998, setelah divonis hukuman 5 tahun penjara di pengadilan dekat penjara terkejam di Myanmar, yang setengah jam kemudian ada keputusan Menteri Dalam Negeri Burma untuk mendeportasi warganegara Indonesia itu. Ini adalah untuk yang kedua kali bagi Haikal, pada tahun 1997 ia pernah ditahan dan dinterogasi selama 3 jam, karena berada di dekat tempat tinggal Aung San Su Kyi. Di bawah ini petikan wawancara *Xpos* dengan Haikal di depan Kedutaan Besar Myanmar, di Jalan Agus Salim Jakarta Pusat, saat demo masih berlangsung.

Kenapa Anda masih berdemo?

Karena hari ini (21 Agustus) adalah *deadline* ultimatum yang diberikan Aung San Su Kyi, supaya junta militer Burma membentuk, parlemen. Sayangnya, Aung San Su Kyi tidak memberitahukan apa yang dilakukan bila junta militer tidak membentuk parlemen. Tetapi aktifis yakin, bahwa Su Kyi akan turun ke jalan kembali, mengorganisir massa, dan kalau ini terjadi akan sangat berbahaya, karena junta militer akan mengambil tindakan tegas, karena mereka anti demokrasi dan tidak menghargai hak asasi manusia. Jadi, sekarang aktifis di seluruh dunia juga ikut demonstrasi untuk menunjukkan solidaritas pada rakyat Burma hari ini.

Lalu apa kaitannya dengan Soeharto, tadi Anda sebut dalam orasi di depan massa?

Sebenarnya, Burma akan lebih terkucil, dan pemerintahnya akan lebih sengsara jika Indonesia tidak men-*support*. Karena negara-negara Barat, Amerika serikat mengambil *policy* tidak memberi visa kepada pemerintah Burma dan melakukan embargo ekonomi. Indonesia lah di bawah Soeharto yang mati-matian men-*support* Burma agar masuk menjadi anggota ASEAN dan melakukan investasi besar-besaran disana. Tanpa mengindahkan bahwa infrastruktur ekonomi yang dibangun disana itu dibangun oleh ratusan bahkan ribuan rakyat yang dipaksa bekerja, di kamp-kamp kerja paksa dan *policy* Soeharto untuk mendorong Burma masuk ASEAN tidak lain demi kepentingan ekonomi keluarganya agar bisa investasi di Burma, dan kemungkinan besar solidaritas antar dua junta militer, yang satu junta militer mutlak, yang satu menerapkan dwi fungsi ABRI di Indonesia.

Pandangan Anda tentang junta militer di suatu negara?

Sekarang sudah tidak waktunya ada sekelompok orang atau segelintir orang yang sangat berkuasa dan menggunakan alat-alat kekerasan untuk tetap berkuasa, dan kecenderungan sekarang warga dunia, menuju demokratisasi dan pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, sampai sekarang Burma masih menerapkan junta militer dan tidak punya konstitusi, mereka hanya punya undang-undang darurat, jadi warga negara sipil pun kalau dihukum akan dikenakan dengan pasal-pasal undang-undang darurat.

Jadi dwifungsi pun berlaku seperti itu?

Saya rasa dunia akan lebih aman kalau tentara kembali ke baraknya dan menjadi penjaga keamanan negara dari serangan pihak luar bukan kepada rakyatnya sendiri.

Anda punya bukti bahwa Soeharto dan keluarga punya investasi disana?

Kami punya catatan-catatannya, Tommy dibidang otomotif, di pengilangan minyak, Tutut di pabrik semen, juga Sigit. Lalu kroni Soeharto, Prayogo Pangestu, pemilik Barito Putra, dapat konsesi hutan yang cukup luas di Burma.

Sekarang, kan, pemerintah Indonesia policy sama seperti zaman Soeharto berkuasa terhadap Burma, bagaimana menurut Anda?

Ya, ketika saya ditanya, kawan-kawan mahasiswa Burma di pengasingan di Bangkok, saya punya bisa kasih harapan pada mereka, bahwa Indonesia dalam transisi menuju demokrasi. Dan kalau Indonesia sudah demokratis, sudah tidak ada dwi fungsi ABRI, kami pastikan bahwa kami akan men-*support* rakyat Burma dan kami akan menolak junta militer Burma. Saya rasa sekarang *policy* sekarang Indonesia belum berubah melihat Burma. Contohnya, ketika ada aturan *flexible enggagemet* di Asean, Indonesia jelas menolak, karena khawatir campur tangan negara-nagara Asean lain ke dalam negeri dan ini sangat menguntungkan rezim junta militer di Burma. Karena selama ini mereka menikmati ketidakpedulian negara ASEAN lain pada pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi.

Pengalaman apa yang paling buruk ketika ditahan di Burma kemarin?

Saya paling marah, waktu dipaksa dibuka baju saya di Airport, dan dilihat banyak orang, dan kemudian setelah 3 jam diinterogasi di airport, saya dipaksa naik ke dalam truk, di truk kami kehujanan. Dan di dalam tahanan kami memang dapart air mineral, tetapi airnya *butek* (keruh), saya yakin itu diberi obat, yang saya tidak paham. Karena malamnya saya menggigil kedinginan, demam, dan Christian muntah-muntah hampir pingsan. ■

Xpos

YANG TERSISA DARI DKP

Diterbitkan oleh:
Komunitas Informasi Terbuka
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: **http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp**
PO.Box 22202 London SE5 8WU, United Kingdom

Ganti ongkos cetak Rp. 1000,- Terbit seminggu sekali

Politik "Cuci Tangan" Rejim Habibie

Bukannya mengusut pelaku perkosaan, pemerintah Habibie malah memojokkan korban perkosaan. Sebuah upaya sistematis untuk "cuci tangan" dari tanggungjawab.

Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah yang dialami para perempuan korban perkosaan saat Kerusuhan Mei lalu. Setelah ditimpa perbuatan biadab yang menyebabkan trauma berkepanjangan, kini beban mereka masih bertambah dengan tuduhan "menyebarkan berita bohong" oleh para pejabat pemerintah Habibie.

Pekan lalu, misalnya, Kapolri Letjen (Pol) Roesmanhadi mengeluarkan ancaman terhadap sejumlah LSM yang selama ini melakukan pendampingan terhadap korban perkosaan. "Bila mereka (aktivis LSM) tidak bisa memberikan bukti-bukti kongkrit, akan kami periksa dengan tuduhan menyebarkan berita bohong yang meresahkan masyarakat," tegasnya.

Ancaman itu terutama ditujukan kepada Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang dipimpin Romo Sandyawan Sumardi, Direktur Institut Sosial Jakarta. Memang Tim Relawan inilah yang paling vokal menyuarakan kasus perkosaan, yang kebanyakan menimpa para perempuan keturunan Cina, saat Kerusuhan Mei.

Menurut temuan Tim Relawan, sedikitnya terjadi 152 kasus perkosaan dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan. Bahkan, 20 diantaranya menyebabkan kematian. Itu baru di Jakarta

Repro: Internet

■ **Kerusuhan Mei:** Ada upaya menggelapkan fakta

dan sekitarnya, belum lagi yang di Solo, Medan, dan kota-kota yang dilanda kerusuhan lainnya.

Belakangan, lewat seorang utusan, Roesmanhadi meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Utusan itu, Mayjen Bintoro, mendatangi Pos Tim Relawan Kemanusiaan untuk menyatakan maaf atasannya, juga atas tindakan yang dilakukan bawahannya, Lettu Yeni.

Nama yang terakhir itu, tak lain, anggota polwan yang menyamar sebagai keluarga korban perkosaan untuk memata-matai aktivitas Tim Relawan. Belakangan, Lettu Yeni— yang saat menyamar memakai nama Mira— membeberkan "hasil temuannya" di media massa. "Saya polisi, tidak bisa mempercayai seseorang yang cuma menangis, *shock* atau trauma. Bagaimana saya percaya kalau *ndak* melihat dan memeriksa buktinya. Untuk mengungkap kasus ini saya mendatangi banyak LSM dan ajak kerjasama, khususnya Tim Relawan. Saya sampai membawa bendera agama untuk meyakinkan Romo Sandyawan. Saya bilang, 'Romo, saya Katolik. Saya tidak mungkin mengkhianati Romo. Sampai saat ini belum ada LSM mau bekerja sama. Saya berkesimpulan, kemungkinan datanya *ndak* valid hanya berdasarkan telepon. Tapi mereka selalu berdalih korban tidak percaya lagi kepada polisi. Kalau menjaga kerahasiaan, polisi pasti lebih berpengalaman dibanding Tim Relawan. Jadi sebenarnya ada maksud apa LSM membesar-besarkan masalah ini" kata Lettu Yenni dalam *Media Indonesia Minggu*, 2 Agustus 1998.

Namun, permintaan maaf Kapolri itu sekedar basa-basi. Buktinya, hanya beberapa hari kemudian Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin, Letjen Moetojib, mengulangi ancaman serupa. Menteri Penerangan Yunus Yosfiah bahkan memanipulasi ucapan 11 anggota LSM Taiwan soal perkosaan itu.

Berita Pekan Ini

Bantengnya Tetap Berkepala Dua ...3
Beddu Amang Dicopot ...4
Ada Bogem, Ada Sandera ...4
Menaker Bohongi Buruh ...5
Selangkah Lagi, Giliran Bob ...7
"Biarlah Kami Mati di Depnaker" ...8

Malu

"Kongres" PDI Palu baru saja selesai. Seperti biasa diwarnai ribut, konflik fisik antara kubu-kubu dalam PDI. Budi Harjono, tanpa malu, terpilih jadi Ketua Umum, menggantikan Soerjadi. Pemerintah Transisional Habibie, tanpa malu, mengakui PDI versi Budi Harjono itu sebagai "yang resmi". Dan, Akbar Tanjung meminta Megawati supaya mengganti nama partainya, kalau ingin ikut pemilu mendatang.

Politik tak tahu malu, dan politik munafik, kini dipakai juga oleh Habibie. Menegaskan dirinya sebagai sambungan Orde Soeharto. Sebab memang dia itu profesor ilmu politiknya. Habibie menjiplak saja, bagaimana cara mengadu domba PDI supaya tidak bisa besar.

Menyedihkan memang.

Kini, agaknya, bola di tangan Megawati. Sebab kita sudah tahu persis, rezim Habibie tak ubahnya seperti rezim Soeharto. Berharap Habibie menyelesaikan konflik PDI adalah harapan kosong.

Mungkin ada baiknya, Mega memikirkan alternatif baru. PDI Budi toh tidak akan besar dan pasti ditinggalkan orang. Dari pada sibuk mengurusi Budi yang cuma bermodal dengkul itu, lebih baik, Mega memformulasikan kembali partainya. Untuk siap-siap bertanding dalam pemilu.

Mega punya potensi untuk itu. Kharisma ayahnya masih melekat. Jaringan pendukungnya ada di mana-mana.

Lebih baik mengoptimalkan kekuatan itu untuk mencegah Golkar menang, daripada mengurusi PDI Budi yang pasti kerdil.

Kita tak perlu memusingkan orang-orang yang tak tahu malu. Apalagi yang munafik.

■ LUGAS

Tujuannya, apalagi kalau bukan menyangkal adanya perkosaan.

Menurut Yunus, 11 aktivis Taiwan — yang dipimpin pengacara Wang Ching Feng— datang ke Indonesia dengan tujuan mencari kebenaran soal perkosaan tadi. Nah, saat bertemua dengan Menhankam/ Pangab Jenderal Wiranto, konon mereka mengakui tidak menemukan bukti tentang adanya korban perkosaan. "Selama berada di Indonesia, mereka telah bertemu dengan sejumlah tokoh, konsulat Taiwan, Menteri Peranan Wanita. Ternyata tidak ditemukan adanya korban pemerkosaan. Dan mereka menyimpulkan 'Anda (pemerintah Indonesia) dikerjain'", ungkap Yunus.

"KAMI TIDAK BERTEMU DENGAN KORBAN, TAPI BERDASARKAN INFORMASI DARI BAPAK GUS DUR ADA 108 KASUS (PERKOSAAN), DAN 20 DIANTARANYA MENINGGAL," BEGITU ANTARA LAIN BUNYI SURAT PEMBACA ITU.

Aparat kepolisian sendiri, kata Yunus, sudah melakukan pengusutan tentang dugaan perkosaan tersebut. Ada 103 kasus yang diusut polisi. Diantara yang diusut adalah informasi tentang perkosaan empat wanita di Apartemen Mitra Bahari, Jakarta Utara. Lalu, informasi perkosaan di Jelambar, Jakarta Barat. Ternyata, "Tak satupun yang bisa dibuktikan adanya kasus pemerkosaan," tutur Yunus.

Penjelasan Yunus jelas terlalu menyederhanakan persoalan. Lagipula, banyak keterangannya yang terbantah. Misalnya, sehari setelah pemuatan berita keterangan tadi, muncul surat pembaca di Harian *Kompas* (28/8) yang dikirim Taipei Economic and Trade Office. Isinya, membantah keterangan Yunus yang mengutip ucapan para aktivis LSM perempuan Taiwan tadi. Ucapan aktivis perempuan Taiwan yang benar adalah, "Kami tidak bertemu dengan korban, tapi berdasarkan informasi dari Bapak Gus Dur ada 108 kasus (perkosaan), dan 20 diantaranya meninggal," begitu antara lain bunyi surat pembaca itu. Jadi, "Pernyataan tentang 'mereka tidak bertemu dengan korban dan menyimpulkan Anda (pemerintah dikerjain' adalah tidak benar".

Bantahan-bantahan yang dilakukan pejabat pemerintah menunjukkan sebuah upaya sistematis untuk "cuci tangan" agar lepas dari tanggungjawab atas terjadinya Kerusuhan Mei. Upaya itu didukung pula dengan menakut-nakuti atau memojokkan korban perkosaan. Di Jakarta dan Surabaya, misalnya, sejumlah korban mengaku merasa dikejar-kejar oleh penelpon maupun orang-orang tak dikenal yang memaksa memberikan kesaksian.

Sejumlah kelompok yang mengatasnamakan kelompok Islam yang konon dekat dengan kekuasaan, beberapa waktu lalu mendesak agar LSM-LSM untuk diperiksa karena menyebarkan berita bohong soal perkosaan. Misalnya, Liga Penegak Kebenaran dan Keadilan (LPKK—organisasi ini juga mengecam barisan nasional yang menolak Habibie) dan sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Mahasiswa Ukhuwah Perguruan Tinggi. Juga *LKBN Antara*, sebuah kantor berita pemerintah pimpinan Parni Hardi pun selalu membesarkan protes-protes yang dilontarkan kelompok tertentu khusus mengenai kasus perkosaan.

Upaya teror itu tentu saja membuat gusar pihak-pihak yang ingin mengungkap kasus perkosaan massal, termasuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF —yang dibentuk pemerintah Habibie sendiri). "Pemerintah mestinya tak mengganggu upaya pengungkapan kasus perkosaan massal," tegas Rosita Noer, Sekretaris TGPF. Menurut Rosita, kini sudah ada dua korban perkosaan yang siap bersaksi di depan aparat keamanan.

Bahkan, ada pula perwira tinggi ABRI yang gusar menyaksikan upaya sistematis menggelapkan kasus perkosaan. "Kalau mau bukti datang saja ke rumah saya," kata Mayjen Agus Wirahadikusumah, Staf Ahli Panglima ABRI. Memang, sudah sebulan belakangan, keluarga Agus —yang juga pengurus di PBSI— "ketitipan" tujuh orang wanita korban perkosaan. Kabarnya, yang menitipkan tak lain Susi Susanti, pebulu tangkis putri Indonesia. Para korban itu adalah sahabat-sahabat Susi sendiri.

Nah, mestinya polisi tak beralasan lagi menggelapkan kasus perkosaan itu. ■

[redacted]

Bantengnya Tetap Berkepala Dua

Konggres PDI Soerjadi telah berakhir dan memilih Budi Hardjono sebagai ketua. Kemelut PDI tetap akan terus berlarut. Bagaimana peluang Megawati dalam pemilu mendatang?

Darah para pendukung PDI Megawati akibat bentrok dengan aparat keamanan di Palu itu akhirnya tidak banyak artinya. 14 luka-luka akibat sabetan pentungan maupun luka tembakan peluru karet yang terjadi di arena konggres PDI di Palu itu hanya dianggap ekses kecil dari sebuah hajat besar yang harus berlangsung sukses sesuai skenario.

Konggres para banteng *budeg* (tuli) itu tetap berlangsung mulus tanpa hambatan yang berarti dan tidak menghasilkan perubahan yang mendasar pula. Hanya terjadi pergeseran kursi pimpinan dari Soerjadi ke teman karibnya, Budi Hardjono.

Budi Hardjono adalah pemain lama yang tidak kalah liciknya dibanding Soerjadi. Ia terkenal dekat dengan pemerintah dan merupakan salah satu kuda tunggangan pemerintah dalam upaya memporak-porandakan PDI hingga kondisinya seperti sekarang ini.

Dalam konggres di Palu yang diliputi suasana mencekam di semua sudut kota Palu beberapa waktu lalu itu Budi mendapatkan 164 suara. Sementara, 101 suara lainnya diperoleh calon yang lain yaitu Sudaryanto. Lalu, menghilang kemana suara untuk Megawati yang santer terdengar sebelum Konggres dan saat pembukaan konggres?

Perlu diketahui, ketika acara pemandangan umum sebanyak 14 DPD dari 27 DPD PDI yang ada menyatakan mendukung Megawati untuk menggantikan Soerjadi. Artinya, riil ada keinginan untuk menyatukan dua kepala di tubuh partai banteng itu. Namun akhirnya keinginan itu tidak sampai terwujud karena kandas di tengah jalan setelah penciptaan aturan baru yang mengeliminir masuknya Megawati sebagai calon. Diciptakanlah aturan bahwa calon ketua harus berada di arena konggres. Sehingga usulan 14 DPD itu pun akhirnya menguap.Tinggal 5 DPD yang masih tetap konsisten mendukung Mega dan terang-terangan tidak mengikuti pemilihan ketua ini adalah DPD PDI Timtim, Kalbar, Sulsel Irian Jaya dan Yogyakarta.

Budi Hardjono kepada wartawan menyatakan tekadnya akan melakukan rekonsiliasi dengan kubu Megawati dan akan mereformasi visi partai supaya demokratis. Tapi, apakah Budi berani mengubah dukungan terhadap dwi fungsi ABRI, itu tampaknya yang tidak mungkin. Sebab berkat dukungan itu pula ia bisa diperjuangkan sampai menduduki jabatan ketua partai ini.

Keinginan Budi mungkin hanya sekedar pernyataan politik seperti yang sering dilakukan oleh para politikus. Sebab pernyataan senada juga tak kalah sering dikeluarkan oleh Soerjadi walaupun selama menjabat Ketua Umum PDI versinya tidak pernah berusaha melakukan pendekatan atau mencoba rekonsiliasi dengan kubu Megawati. Bahkan, yang terjadi justru tindakan sebaliknya, keduanya berjalan sendiri-sendiri dan terus gontok-gontokan. Bagaimana masa depan PDI?

Repro: Republika

■ **Amuk Massa di Konggres PDI:** Menolak rekonsiliasi

AS Hikam, pengamat politik LIPI menyatakan bahwa Megawati berada pada pilihan yang sama-sama sulit. Ia tetap memimpin PDI dengan terus saja direcoki sehingga konsolidasi partainya terganggu, atau memilih membuat partai baru yang berarti mengaku kalah dengan gangguan pihak lain itu. "Dengan membuat partai baru pun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa solid. Karena harus merumuskan visi, misi, *platform*, rekrutmen dan sebagainya", kata Hikam diselasela seminar di LP3ES, Kamis (28/8).

Atau kalau mau, Megawati tetap nekad mendaftarkan ikut Pemilu dengan PDI nya sekarang. "Kemungkinan ini bisa dilakukan, karena aturan Pemilu yang semakin longgar. Megawati cukup mendaftarkan partainya. Pengakuan pemerintah tidak menjadi penting", kata Hikam.

Menurut Hikam, pertikaian di PDI jelas merupakan hasil rekayasa pemerintah yang dimulai ketika Soeharto masih berkuasa. Soeharto waktu itu merasa ngeri dengan tampilnya Megawati sebagai pemimpin partai dengan jumlah pendukung yang cukup besar. Lalu, diciptakanlah kelompok yang bertugas merecoki Megawati. Seperti pemerintah menampilkan Abu Hasan untuk merecoki Gus Dur di NU. Lalu, dipaksakanlah penyelenggaraan konggres PDI Medan yang berhasil menampilkan Soerjadi dkk sebagai pimpinan PDI.

Ternyata strategi Soeharto ini tetap diteruskan oleh pemerintah Habibie yang sama-sama takut terhadap lawan politiknya, (*Xpos* no 34). "Tujuannya, agar Megawati tidak bisa konsolidasi", tegas Hikam.

Tampaknya persoalan PDI tidak akan berakhir dengan rekonsiliasi. Ibarat luka, PDI Mega merasa lukanya sudah terlalu parah dan susah diobati lagi. Mungkin satu-satunya cara adalah dengan mengamputasi PDI Konggres dan tetap menjadikan PDI Perjuangan sebagai organisasi yang mandiri dengan cita-citanya.

Mungkin karena pilihan terakhir inilah maka muncul pernyataan Mega yang tetap tidak mau dicalonkan sebagian peserta konggres PDI Soerjadi di Palu awal pekan lalu. "*Lho* Anda ini siapa. Anda ini *nggak* ada. Buat saya angin *kok*", kata Kwik Kian Gie menirukan Megawati dalam menanggapi permintaan menjadi ketua PDI.

Di luar, terbersit kabar bahwa permintaan agar Mega menjadi ketua PDI diduga hanya untuk menyejukkan panasnya hati para pendukung Mega yang berusaha menggusur acara konggres. Dan dugaan itu kian diyakinkan setelah dalam sidang-sidangnya terus dilakukan usaha menutup kemungkinan pencalonan Megawati. Hasilnya jelas: Megawati tidak masuk kriteria calon ketua.

"Tidak mungkin Mega menang di konggres Palu. Biaya konggresnya saja dari Syarwan Hamid dan Probosutedjo", kata sumber *Xpos*.

Konon konggres di Palu ini didanai Syarwan sebesar Rp1,3 milyar dan pemerintah menyumbangkan dana Rp3 milyar. Sedang dana dari Probosutedjo sampai hari ini belum ada yang bisa memberikan konfirmasi. ■

Beddu Amang Dicopot

Gara-gara persaingan memperebutkan distribusi sembako, Kepala Bulog Beddu Amang dicopot. Habibie akan mereshuffle kabinetnya?

Baru berumur tiga bulan kabinet transisional Habibie sudah mulai retak. Itu, misalnya, tampak jelas dari pencopotan Beddu Amang sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Rabu, 26 Agustus lalu. "Itu sudah menjadi keputusan presiden," kata Menteri Penerangan, Yunus Yosfiah, seusai sidang kabinet terbatas Bidang Polkam. Lalu, Beddu diberi jabatan kering sebagai staf ahli Menko Ekuin. Adapun jabatan Kepala Bulog yang ditinggalkannya, sementara, dirangkap oleh Menperindag Rahardi Ramelan.

Pencopotan Beddu itu segera mengundang sas-sus politik. Emil Salim, misalnya, menilai pencopotan Beddu itu merupakan puncak pertentangan antar kubu yang bersaing dalam "Kabinet Reformasi Pembangunan". Sudah jadi rahasia umum, selama ini di kementerian ekuin terbelah menjadi dua kubu.

Yang pertama adalah para pengikut setia Habibie, seperti: Rahardi Ramelan, Adi Sasono, Soleh Solahudin (Menteri Pertanian), AM Saefudin (Menteri Pangan), dan Hamzah Haz (Menteri Investasi/Ketua BKPM). Kubu yang satunya lagi dibawah koordinasi Menko Ekuin Ginanjar Kartasasmita. Termasuk dalam kubu ini, antara lain: Bambang Subianto (Menteri Keuangan) dan Boediono (Kepala Bappenas).

Beddu Amang sendiri dulunya lebih dekat dengan kubu loyalis Habibie. Sebagai sesama alumni HMI, Beddu sudah menjalin hubungan dengan Adi Sasono dan kawan-kawan. Hubungan itu makin erat setelah bersama-sama aktif di ICMI. Beddu pula yang menyuntikkan dana untuk proyek-proyek politiknya para pendukung Habibie. Ia, misalnya, tercatat sebagai Komisaris Utama PT Abdi Bangsa yang menerbitkan Harian *Republika*. Beddu juga merupakan salah satu sumber dana Keluarga Alumni HMI (KAHMI).

Tapi, belakangan hubungan Beddu dengan kaum loyalis Habibie itu retak. Ia pun berusaha mendekati kubu Ginanjar. Pasalnya, Beddu merasa lahan rejekinya mulai diusik-usik Adi Sasono Cs. Monopoli Bulog atas distribusi sejumlah bahan pokok mulai diambil-alih Departemen Koperasi. Rebutan yang paling mencolok adalah dalam soal distribusi minyak goreng.

Mula-mula yang mengusik monopoli Bulog adalah Menperindag Rahardi Ramelan. Ia menunjuk PT Dharma Niaga, salah satu BUMN Deperindag, menggantikan Bulog sebagai distributor minyak goreng. Ternyata, karena tak berpengalaman, Dharma Niaga gagal. Belakangan, Habibie malah menunjuk Induk Koperasi Pasar (Inkoppas) sebagai distributor tunggal. Keputusan itu, tentu saja, atas campur tangan Adi Sasono — yang merupakan "tangan kanan" Habibie di bidang politik.

■ **Rahardi, Ginanjar dan Beddu:** Rebutan rejeki

Keputusan Habibie itu keruan saja membuat Beddu sewot. Maklum, keuntungan yang bisa diraup tidaklah sedikit. Jika setiap kilogram komisi distribusi minyak goreng yang bisa dipetik Rp100, maka setiap harinya distributor bisa mengantungi keuntungan Rp700 juta. Sebab, kebutuhan minyak goreng nasional mencapai 7 ribu ton per hari.

Ternyata, Beddu tak tinggal diam. Pria kelahiran Makassar itu lalu menggerpol proyek koperasi Adi Sasono. Hasilnya, baru beberapa minggu merasakan nikmatnya komisi minyak goreng, monopoli koperasi dicabut kembali oleh Habibie.

Move politik Beddu itu langsung dibalas. Akibatnya, beberapa hari kemudian, keluar pula keputusan presiden yang mencopot Beddu.

Tak hanya sampai disitu. Secara sistematis, Beddu terus dipojokkan. Caranya, antara lain, dengan mengungkap kasus-kasus KKN yang dilakukan Beddu selama berkuasa di Bulog di media massa. Belakangan, Kejaksaan Agung juga sudah bersiap mengusut perkara KKN Beddu.

Tampaknya, Beddu akan dikorbankan sebagai "kambing hitam" oleh rejim Habibie. Dengan begitu, ada dua keuntungan yang bisa dipetik: mendongkrak citra kabinet Habibie (karena mengganyang koruptor besar), sekaligus menguasai sepenuhnya distribusi sembako nan menguntungkan itu. ■

Ada Bogem, Ada Sandera

Ibrahim Hasan dipukul penduduk Aceh. Hasan Basri Durin disandera mahasiswa Padang. Rakyat tak takut dengan pejabat yang NKK

Hati-hati jadi pejabat. Terutama bila Anda pernah bergelut dengan praktek NKK (Nepotisme, Kolusi, Korupsi). Sebab, di alam reformasi ini, rakyat tak sungkan-sungkan lagi angkat tangan, melayangkan bogem mentah atau menyandera pejabat yang mereka tak suka. Pejabat yang menyakiti hati rakyat, ada baiknya mundur saja. Sebelum pengalaman Hasan Basri Durin dan Ibrahim Hasan, terulang lagi.

Pemukulan terhadap Ibrahim Hasan, bekas Gubernur Aceh, terjadi di Jakarta, pekan lalu. Usai menjadi pembicara seminar tentang masa depan Aceh, di dekat *lift*, Ibrahim dihampiri seorang pemuda. Tanpa basa-basi, pemuda itu, memukul Ibrahim Hasan, sambil teriak, "Pembunuh warga Aceh"

Apa sebab, Ibrahim dituduh begitu? Rupanya, semasa menjabat jadi Gubernur Aceh di tahun 80-an, Ibrahim diketahui mengundang ABRI ke wilayah yang disebut Serambi Mekkah itu. Ibrahim tak membantah perihal inisiatifnya mengundang ABRI itu. Tetapi, katanya, itu dilakukan untuk menjamin keamanan Aceh, yang sering diganggu gerakan bersenjata Aceh Merdeka. "Tetapi yang menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer, bukan saya. Itu wewenang pemerintah pusat," tutur Ibrahim Hasan.

Operasi militer, yang sering disebut dengan sandi Jaring Merah itu, terbukti membawa kesengsaraan buat rakyat Aceh. Ribuan warga mati ditembak. Ratusan perempuan menjadi korban perkosaan. Belum lagi, mereka yang hilang, diculik Kopassus. Informasi tentang penindasan hak asasi manusia di Aceh itu, tak banyak

yang bisa menembus blokade tentara. Akibatnya, kesengsaraan rakyat Aceh itu seperti tertutup di bawah bantal.

Untunglah, di masa reformasi ini, rakyat Aceh bisa bicara terbuka. Mereka kampanye di Jakarta, mengungkapkan kekejian Kopassus di sana. Komnas HAM pun segera turun gelanggang, dan menemukan bukit-bukit kuburan massal. "Tak perlu diceritakan lagi, bagaimana pelanggaran hak asasi di sini," ujar Baharuddin Lopa, Sekjen Komnas HAM. Karena gencarnya pembongkaran aib itu, ABRI akhirnya mengaku salah, meminta maaf dan mengakhiri operasi militer di Aceh.

Tetapi, tak seorang pun yang bertanggungjawab diajukan ke pengadilan. Itu sebabnya, warga Aceh masih memendam kesal, kepada siapa saja yang dianggap bertanggungjawab atas targedi Aceh. Termasuk Ibrahim Hasan, bekas Menteri Pangan itu.

Lain di Aceh, lain di Sumatera Barat. Hasan Basri Durin, bekas Gubernur Sumatera Barat yang kini menjadi Menteri Negara urusan Pertanahan, disandera ketika sedang berkunjung ke satu universitas di Padang. Durin sebetulnya tidak diundang ke Padang. Tetapi, karena diajak Adi Sasono, Menteri Koperasi yang tampaknya dekat dengan Habibie, Durin pun ikut. Usai berceramah dalam acara ICMI, Durin disandera dalam mobil, tanpa AC selama dua jam. Kejadiannya, 27 Agustus lalu.

"Saya yang bawa Pak Hasan Basri Durin, *nggak* tahu kalau kejadiannya begini," kata Adi Sasono.

Akhirnya, setelah disekap dalam bus, Durin, diarak ke satu ruangan untuk diinterogasi. Hakimnya, Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Barat. Gugatan anak-anak muda itu, terutama tentang tindak-tanduk Durin yang korup selama dua periode menjadi Gubernur Sumatera Barat. Ia antara lain, dituduh kolusi dengan pengembang-pengembang Jakarta, dalam membebaskan tanah untuk pemukiman mewah di Padang. Durin juga dikritik karena memberi fasilitas khusus untuk anaknya berbisnis angkutan.

"Kami ingin Durin mempertanggungjawabkan tindakan NKKnya, selama jadi gubernur," kata satu Gun Sugiyono, aktivis mahasiswa Padang. Setelah diinterogasi hampir tiga jam, Durin tampak pucat dan gemetaran. Ia memang tak sanggup menjelaskan kebijakannya yang korup. "Saya siap dihukum," katanya.

Tapi, mahasiswa-mahasiswa itu, tampaknya tak ingin serius mengadili Durin. Mereka mengusir Durin pergi. "Jangan kembali ke Padang lagi," kata seorang mahasiswa.

Nah, dua kejadian itu, mungkin bisa menjadi pelajaran buat para pejabat yang korup. Hati-hati, giliran Anda bisa tiba. ■

Menaker Bohongi Buruh

Menaker Fahmi Idris beralasan sakit sehingga tak bisa temui buruh yang unjuk rasa di kantornya. Ternyata ia sehat walafiat bersidang di DPR.

Buruh PT Tyfountex, Sukoharjo Solo, menyerbu Jakarta dengan unjuk rasa. Sejumlah 600 buruh pabrik garmen milik PMA Hongkong, Korsel dan Kanada ini sudah menggelar aksinya sejak di Solo tanggal 3 Agustus 1998. Mereka mogok kerja dengan tuntutan agar UMR (upah minimum regional) Rp4.300,- dipenuhi.

Rabu (26/8) lalu, para buruh mendatangi Kantor Depnaker dengan mengatasnamakan Komite Reformasi Kaum Buruh (KRKB) yang beraliansi dengan Gerakan Rakyat Pro Reformasi (GRPR), Komite Pendukung Megawati (KPM), Kepal PRD dan Kobar. Terjadi dialog menarik dengan Menaker Fahmi Idris yang akhirnya turun ke pelataran kantornya. Buruh menanyakan mengapa pak menteri tidak mau menemui mereka pada tanggal 15 Agustus 1998, sebab Sekjen Depnaker Soewarto dan Dirjen Binawas Syafei Syamsudin mengatakan bahwa mereka mendapat kabar dari pak menteri bahwa pak menteri sakit sehingga tidak bisa menemui para buruh. Fahmi Idris tampak gelagapan menengok stafnya. Ia bilang bahwa dirinya memang tidak sakit. Para buruh kecewa karena pada sore harinya, mereka lihat pak menteri di TV segar-bugar sedang berbincang dengan anggota DPR. Fahmi Idris mengelak dibilang kalau ia di DPR. "Saya tidak sakit dan tidak di DPR," ujar Fahmi Idris. Langsung dijawab para buruh, "Tidak Pak. Kami melihat Bapak di *ANTeve*, *SCTV*, dan juga *RCTI Oke*". Agaknya, Fahmi Idris lupa bahwa hampir semua pejabat tinggi negara tanggal 15 Agustus 1998 hadir di DPR mendengarkan pidato Habibie. Dan kebetulan, ia di-*shoot* kamera TV.

Akhirnya Fahmi Idris sendiri tampak jengah berdialog, terlebih ketika buruh mengancam akan mogok makan bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. "Silakan kalian mau mogok sampai setahun dua tahun, silakan!" seru Fahmi Idris lalu meninggalkan aksi buruh yang selanjutnya kian memanas. Pertemuan itu tidak menghasilkan apa-apa, sehingga para buruh berniat terus menggelar aksinya sampai UMR dipenuhi dan mereka tidak diPHK hanya karena memperjuangkan nasibnya.

Sehari sebelumnya (25/8), buruh PT Tyfountex bentrok dengan aparat keamanan di YLBHI jalan Diponegoro, Jakarta. Akibatnya, 22 buruh yang sebagian besar perempuan itu mengalami luka memar, enam di antaranya luka berat dan dilarikan ke RS St Carolus untuk mendapat perawatan darurat. Dari pihak polisi, dua orang copot gigi dan berdarah di mulutnya karena dilempar batu sekepalan tangan dari jarak dekat.

Bentrokan sebetulnya tidak perlu terjadi bila buruh diijinkan pergi ke ILO dengan menggunakan 11 bus yang sudah mereka sewa. Tetapi, dengan alasan mengganggu keamanan dan ketertiban umum, polisi mengusir kesebelas bus yang berdatangan mulai pukul 09.00 WIB. Pengusiran bus ini membuat buruh yang telah membayar uang sewa, menjadi nekad menerobos barikade satu peleton polisi hingga bentrokan pun tak terelakkan. Situasi kian memanas diwarnai dengan yel-yel "Buruh bersatu, ganyang militerisme! Buruh bersatu, ganyang kapitalisme!". Akhirnya barikade polisi jebol dan ratusan buruh masuk memenuhi jalan Diponegoro. Mereka berniat aksi jalan kaki ke ILO, tapi berhenti di depan Markas PDI yang disegel, setelah bertemu Konsultan ILO PF Vander Heijden dan Allan Bulton yang sedang dalam perjalanan menemui para buruh. Dari pertemuan tersebut, konsultan ILO berjanji akan melayangkan surat ke manajemen PT Tyfountex dan lembaga-lembaga terkait seperti Depnaker.

Sementara itu manajemen PT Tyfountex yang dihubungi secara terpisah menyatakan bahwa yang melakukan unjukrasa di Jakarta itu bukan lagi buruh PT Tyfountex. "Status mereka jelas bukan karyawan kami lagi karena mereka sudah kami anggap mengundurkan diri," kata Manajer Personalia PT Tyfountex, Ferry Sitohang. Pengunduran diri ini didasarkan pada peraturan perusahaan bahwa bila karyawan tidak masuk selama lima hari berturut-turut maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Para buruh menolak pemecatan sepihak tersebut karena menurut UU Ketenagakerjaan, buruh yang menuntut kenaikan upah tidak bisa di-PHK. Di samping ada jaminan dari Sekjen Depnaker, Soewarto pada tanggal 15 Agustus 1998 bahwa para buruh yang datang ke Depnaker tidak akan dipecat. "Kami akan tuntut para pejabat Depnaker yang membohongi kami," tulis *press release* yang disebarkan Komite Reformasi Kaum Buruh (KRKB). ■

■ **POLITIK**

Yang Tersisa dari DKP

14 Aktivis yang diculik dan belum kembali, dipastikan telah tewas. Kenapa Syafrie Syamsoeddin diselamatkan dari jerat keadilan?

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) telah rampungkan tugasnya. Memeriksa tiga perwira tinggi Kopassus, dan juga menjatuhkan sanksi. Letnan Jenderal Prabowo dipecat dengan hormat; Mayjen Muchdi dan Kol Chairawan masih di jajaran ABRI tapi tak memegang jabatan sama sekali. Demikian, akhir kisah Prabowo, yang karirnya pernah melesat bak meteor dan sempat diramalkan akan menduduki posisi tertinggi di ABRI. Penculikan aktivis, ternyata menjadi titik balik karir Prabowo yang berakhir tragis.

Tuntaskah kerja DKP? Tampaknya tidak. Banyak kalangan berpendapat sanksi yang dijatuhkan kepada tiga petinggi Kopassus itu, tidak mencerminkan rasa keadilan. Bahkan juga tidak memenuhi prosedur hukum. "Sanksi jabatan itu *kan* persoalan intern ABRI. Sedangkan tindak kriminalnya, menculik, harus dipertanggungjawabkan di depan pengadilan," kata Munir, Koordinator Kontras —lembaga yang aktif membela nasib korban penculikan.

Amien Rais, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), juga sependapat dengan Munir. Ia mengatakan, Prabowo harus diseret ke mahkamah militer, justru agar reputasi ABRI di mata masyarakat membaik. Amien menuntut Presiden Transisional Habibie dan Pangab Wiranto, agar berani menyeret Prabowo dan dua temannya itu ke pengadilan. "Dengan Mahmil yang terbuka untuk publik, baru bisa ketahuan siapa yang menyuruh Prabowo melakukan penculikan," kata Amien Rais.

Tapi, teknik ABRI menyelesaikan intern soal penculikan ini, agaknya memang sengaja ditempuh untuk menghindari terbongkarnya orang-orang di belakang Prabowo. Sebuah sumber di Mabes ABRI mengatakan, sebetulnya Prabowo punya surat perintah penculikan itu, yang diteken oleh Jenderal Feisal Tanjung, Pangab sebelumnya. Surat itu, konon, akan dibeberkan kalau Prabowo diseret ke Mahmilub. Akibatnya, Wiranto berkompromi dengan menjatuhkan hukuman yang ringan untuk Prabowo.

Maka misteri penculikan itu pun tak tuntas terkuak. Bukan hanya siapa yang memerintahkan penculikan kepada Prabowo, tetapi juga bagaimana nasib aktivis yang sampai kini tak tentu rimbanya. Keempat belas aktivis itu, an-tara lain Deddy Hamdun, Noval, Sonny, Rian, Suyat, Bimo Petrus dan lain-lain. Prabowo, di depan DKP mengaku hanya menculik aktivis yang sekarang sudah dibebaskan. Ia mengatakan tak tahu menahu dengan 14 aktivis yang masih hilang itu.

Photo: Istimewa

■ **Keluarga Korban Penculikan:** Dimana para korban dikuburkan?

Seorang anggota DKP, perwira berbintang tiga, yang memeriksa tiga petinggi Kopassus itu, mengatakan, "korban penculikan yang tak pulang-pulang itu, sudah meninggal." Kepastian itu, disimpulkan DKP dari hasil interogasi mereka terhadap Prabowo dkk. Meskipun Prabowo tak mengaku menculik mereka, tetapi saksi korban penculikan lain, Pius Lustrilanang, sempat bertemu Sonny dan Ryan di tahanan yang sama.

"Sejak dulu saya yakin mereka sudah meninggal," kata Pius. Sebab, Sonny dan Ryan, misalnya, dikeluarkan dari sel itu dua pekan sebelum Pius. Mereka sempat berjanji untuk saling menelepon bila telah keluar tahanan. Tetapi, sampai sekarang, dua aktivis PDI pro Mega itu, tak pernah memberi kabar.

Soalnya tinggal, dimana jasad para aktivis itu? DKP mestinya tak membiarkan Prabowo mengelak dari tanggungjawab atas korban penculikan yang tewas itu.

Tetapi, tidak tuntasnya kerja DKP bukan hanya soal korban yang tewas.

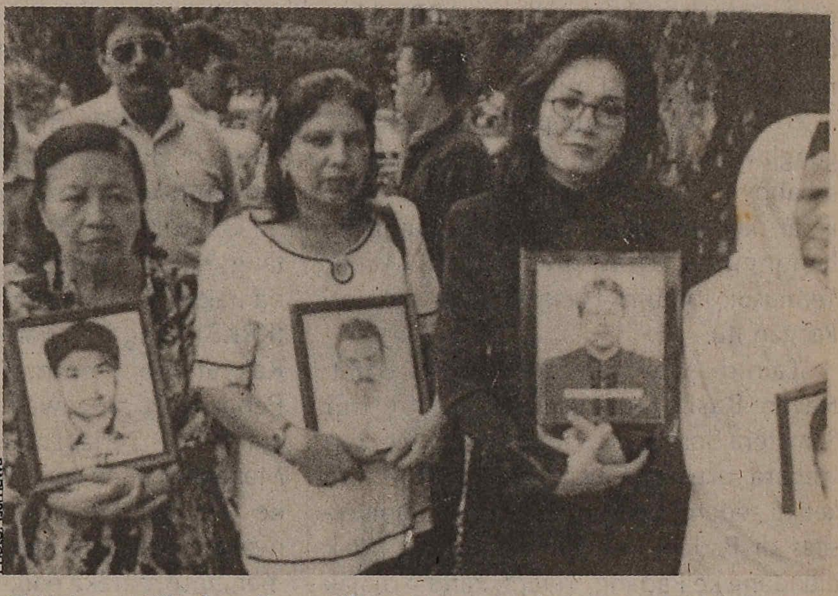

Photo: Istimewa

■ **Keluarga Korban Penculikan:** Menuntut kejelasan korban

Penanggungjawab operasi penculikan juga tak semuanya kena jaring. Misalnya, Mayjen Syafrie Syamsoeddin. Perwira yang sangat dekat dengan Prabowo ini, teman sekelas di Akabri, diduga kuat ikut membantu Prabowo dalam operasi penculikan. Kerjasama serupa juga mereka lakukan di Timor Timur. Dan, dua diantara korban penculikan, Desmond dan Haryanto Taslam, kabarnya mendengar suara Syafrie di antara para interogator. Jadi, memang aneh, kalau Syafrie tidak terkena sanksi. Bagaimana ini bisa terjadi?

Satu analisa mengatakan, pada detik-detik terakhir, setelah Soeharto tumbang, Syafrie pindah kubu. Karena itu, Wiranto melindunginya dengan menarik ke jajaran staf Mabes ABRI. Syafrie, beberapa waktu lalu malah diangkat menjadi anggota MPR. Atas perlindungan Habibie, tampaknya memang makin sulit mengutak-atik Syafrie. "Padahal dia juga harus dikenai hukuman," kata seorang Mayjen yang pernah bertugas di Timtim.

Perwira lain yang juga dianggap tahu banyak soal penculikan para aktivis adalah Mayjen Kivlan Zen, terakhir menjabat Kepala Staf Kostrad. Entah kenapa, sampai sekarang kawan dekat Prabowo ini juga tak diperiksa DKP. Lalu, bagaimana pula tindakan terhadap Mayjen Zaki Makarim, Kepala BIA, yang mestinya juga ikut bertanggungjawab atas operasi intelijen itu?

Jadi, tugas DKP memang tak tuntas. Wiranto hanya mementingkan usaha menyelamatkan wajah ABRI. Bukan menjunjung hukum dan keadilan. ■

Selangkah Lagi, Giliran Bob

Tiga bankir lagi ditahan polisi. Salah seorang diantaranya orang kepercayaan Bob Hasan. Tak lama lagi, giliran Bob diperiksa kejaksaan.

Kali ini polisi tampaknya tak main-main menggulung para "penjahat" perbankan. Pekan ini, mereka kembali menahan tiga bankir Bank Beku Operasi (BBO): K. Hartono (Direktur Bank Modern), HA (Direktur Kredit BDNI), dan Leonard Tanubrata (Presiden Direktur BUN). Yang terakhir ini, bankir kepercayaan Bob Hasan, pemilik BUN yang juga "operator bisnis" keluarga Soeharto.

Penahanan Leo, kabarnya, membuat Bob Hasan ketar-ketir. Pasalnya, lewat Leo lah polisi dan aparat kejaksaan akan mengorek berbagai kecurangan yang dilakukan saat masa-masa jayanya dulu. "Kali ini Bob pasti kena," kata seorang jaksa yang menjadi anggota tim pemeriksa kejahatan perbankan. Memang, sejak lama Bob sudah diincar aparat kejaksaan. Medio Juni lalu, ia juga sempat diperiksa dalam kasus pengaduan para pengusaha kayu terhadap Apkindo.

Nama Bob sendiri sudah tercantum dalam daftar cekal imigrasi. Artinya, ia dilarang bepergian ke luar negeri tanpa sepengetahuan pemerintah. Dalam daftar serupa juga tercantum sederet konglomerat terkemuka, yang banknya dibekukan atau bermasalah. Diantaranya Liem Sioe Liong dan Bambang Trihatmodjo. Seorang pengamat perbankan mengatakan, dari 94 bankir dan pemilik bank 16 bank terlikuidasi yang kena cekal akhir tahun lalu, setidaknya separonya bisa diajukan ke pengadilan.

Sampai saat ini yang masuk daftar tersangka polisi sedikitnya 29 bankir. Selain tiga orang tadi, lima orang juga sudah ditahan, yakni: Jhonny Basuki (Direktur Utama SBU), Hendro Suwono (Direktur Marketing BHS), Serni Kojongian (Direktur Akunting BHS), Anwar Syukur (Presiden Direktur), Achmad Rafli (Wakil Komisaris Bank Anrico).

Tiga orang tersangka bankir lainnya, Lesmana Basuki (Komisaris SBU), Hendra Rahardja dan Eko Edi Putranto (Presiden Komisaris dan Komisaris BHS, raib dan diduga meninggalkan Indonesia. Polisi telah memaksukkan mereka dalam daftar buron Interpol. Sejumlah tersangka bankir yang tak ditahan antara lain: Andre Widijanto (BHS), Handi Sunardjo, Jimmy Sutjiawan, Leo Adianto (SEAB), Endang Utari Mokodompit, Adrian Herling, Ferdinand Japutra, Handoko Sutopo (Bank Pasific), Setiawan Chandra, John Erizal, Eric C.J. lazuardi (Bank Kosa Graha), Jhony Lumoa, H.R. Rembet, C. Mandagi, Robby A. Manajang, Lodewik Yohanes Henri Eman (Bank Pinaesaan).

Para tersangka yang tak ditahan ini masih berada di dalam negeri dan belum diperiksa oleh pihak kepolisian. Pengacara para tersangka tersebut telah memberikan jaminan tertulis, bahwa klien mereka tidak akan meninggalkan Indonesia.

Tuduhan resmi untuk para bankir ini sudah disiapkan. Kadispen Polri, Brigjen Pol. Togar Sianipar mengatakan, mereka disangka melanggar UU No. 7/1992 tentang Perbankan. Menurut Togar para tersangka menggelapkan dana masyarakat dan pemerintah sebesar miliaran rupiah, dengan modus melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan memainkan *platpondering* kredit yang diberikan kepada grup sendiri. *Platpondering* adalah membukukan kredit baru kepada nasabah yang memiliki pinjaman macet. Pelanggaran macam ini misalnya dilakukan Bank Anrico yang melakukan pelanggaran BMPK lebih dari 92%.

Bank SBU juga melakukan pelanggaran BMPK senilai lebih dari US$50 juta. Direktur Utama Bank SBU, Jhonny Basuki juga menggunakan jaminan banknya untuk menilep dana senilai Rp1,5 miliar. Kecurangan lainnya yang dilakukan Bank SBU misalnya dengan menipu Bank Dagang Negara yang mengucurkan kredit karena memperoleh jaminan yang tak diketahui rekan-rekan Jhony.

Namun, kecuali Endang Utari Mokodompit, para tersangka lainnya tergolong bankir kelas teri, yang tak akan menimbulkan dampak politik apapun jika diadili. Bayangkan, sebenarnya banyak pensiunan jendral yang nangkring di jajaran direksi dan komisaris bank-bank nakal itu. Mengapa mereka tak ikut dijerat? Bukankah mereka juga menikmati hasil kejahatan bank-bank itu?

Begitu pula nama-nama besar Bambang Trihatmodjo, Peter Gontha, Henry Pridadi, Prayoga Pangestu dan Yohannes Kotjo sebagai pemilik dan komisaris, kok belum juga diperiksa? Padahal, Peter Gontha, salah satu komisaris Bank Andromeda sudah mengakui bahwa banknya melakukan pelanggaran BMPK untuk mendukung pendanaan megaproyek petrokimia PT Chandra Asri?

Untuk pertannyaan seperti itu, Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib selalu bilang akan segera diperiksa setelah ditemukan "bukti-bukti awal". Tapi, sampai kapan proses itu, tak ada kepastian. ■

IPAR SOEHARTO RUGIKAN NEGARA- Mayjen (Purn) Prof. Ibnu Hartomo —ipar Soeharto— akan diusut oleh Kejaksaan Agung dalam kasus *promissory notes* (promes). Hal ini ditegaskan oleh Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib seusai mengikuti Sidang Kabinet Terbatas Bidang Polkam di Bina Graha, Rabu lalu.

Menurut Jaksa Agung, pada tahun 1985 Ibnu Hartomo —saat menjabat menjadi deputi Wanhankamnas— telah mengeluarkan promes atas nama Pemerintah RI yang bernilai US$3 miliar. Saat ini promes tersebut sudah jatuh tempo dan jika dihitung dengan bunganya, maka nilai promes saat ini mencapai US$4,5 miliar.

Para pemegang promes itu mulai menuntut pembayarannya, dan hal tersebut akan merugikan negara. Polri akan mengusut kasus ini secara hukum. ■

UNJUK RASA KORBAN PLG-Sekitar 200 orang yang menjadi korban proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar, hingga Kamis (27/8) masih bertahan di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Mereka menyatakan tidak akan pulang sebelum mendapat pernyataan tertulis Gubernur Kalteng mengenai pembayaran seluruh ganti rugi atas lahan, kebun dan kolam ikan masyarakat yang terkena proyek.

Ganti rugi senilai Rp2 miliar dituntut oleh 700 warga di Palangkau Lama, Palangkau Baru dan Balawang, serta Rp1 miliar dituntut oleh 157 warga Dadahup di Kecamatan Kapuas Hulu.

Mereka juga secara tegas menuntut dihentikannya proyek PLG tersebut. ■

MENGUSUT KASUS WARSIDI-Korban kasus Talangsari, Way Jepara-Lampung yang lebih dikenal dengan nama GPK Warsidi, ternyata 246 orang tewas. Tidak seperti yang diungkapkan oleh pemerintahan rejim Orde Baru bahwa yang tewas hanya 31 orang.

Banyak korban yang tewas adalah anak-anak, wanita dan oarang-orang yang diduga sama sekali tidak bersalah.

Selain itu Komite Smalam juga telah mengidentifikasi adanya kuburan massal.

Investigasi yang dilakukan oleh Komite Solidaritas Mahasiswa Lampung (Smalam) bertekad akan mengusut tuntas kasus pembantaian yang dilakukan aparat keamanan pada 6-7 Februari 1989.

Beberapa lembaga yang tergabung dalam Komite Smalam itu antar lain, LBH Bandarlampung, HMI, IMM dan PUDI DPW Lampung. ■

Sri Lestari , Buruh PT Tyfountex:

"Biarlah Kami Mati di Kantor Depnaker"

Wajahnya memelas, ada perban dimulutnya Sri Lestari, 30 tahun, salah seorang buruh PT. Tyfountex, Solo, Jawa Tengah, dengan beberapa kawannya tinggal di ruang Adam Malik, LBH, Jakarta. "Mulut saya robek, abikat dipukul kayu polisi," katanya.

Sri Lestari adalah salah seorang korban bentokan 600 buruh perempuan PT. Tyfountex dengan polisi di halaman kantor LBH, Jalan Diponegoro 74, Jakarta Pusat. Maksudnya buruh-buruh itu akan pergi ke kantor perwakilan organisasi buruh Internasional (ILO) di Jalan MH Thamrin, Jakarta. "Awalnya kami akan pergi dengan bus yang sudah kami sewa, tetapi polisi mengusir bus itu, jadi kami akan pergi jalan kaki saja dengan tertib. E, malah polisi itu menggebuk kami," kata Sri, yang kebetulan berada di garda depan saat long march akan dilakukan.

Sri Lestari adalah ibu dari 3 anak, anak pertamanya sudah duduk di SMP, dan dua lainnya di SD. Ia lulus SMP di Semarang, lalu bekerja di Solo sejak tahun 1990 di PT. Tyfountex. Sebuah perusahaan penanaman modal asing milik warga Hongkong, James Mong, yang menghasilkan garmen berupa celana, jacket yang semuanya di ekspor ke Korea dan Kanada. Sri bekerja di bagian garmen, mendapat gaji Rp 4.160/hari.

Dibawah ini petikan wawancara *Xpos* dengan buruh yang menjadi korban perusahaannya dan juga korban kekerasan polisi.

Untuk hidup sehari-hari cukup nggak gaji segitu?

Ya *nggak* cukup mas, mana harga-harga sekarang naik, di Solo saja harga beras yang paling jelek itu harganya Rp3.500/ kg. Masak upah *nggak* naik-naik.

Bagaimana awalnya sampai buruh-buruh PT. Tyfountex mogok?

Dulu, pada 29 Mei 1998, kami pernah mogok, karena uang makan kami hanya Rp100/hari. Hasil mogok itu, perusahaan mau menaikkan uang makan menjadi Rp700/ hari. Tetapi tuntutan agar upah naik, tak dipenuhi perusahaan. Lalu kami mogok lagi, pada 3 Agustus, kami menuntut kenaikan upah minimum sebesar 15 persen. Selain itu kami juga menuntut karyawan yang melakukan aksi mogok tidak dipecat, boleh masuk lagi tanpa syarat dan tunjangan tetap setiap hari harus dibayar. Kami mencoba menemui pimpinan perusahaan, tetapi yang kami temui hanyalah pengacaranya Jack Sidabutar dan Hutagalung, mereka tidak bisa memenuhi tuntutan kami. Sekitar 2.700 buruh mogok kerja.

Repro: Media Indonesia

■ **Aksi Buruh Tyfountex di Depnaker:** Menuntut upah yang layak dan manusiawi

Sudah melapor kemana saja?

Kami pernah pergi ke kantor departemen tenaga kerja di Kabupaten Sukohardjo, Solo, Jawa Tengah, membuat mimbar bebas disana. Lalu juga ke DPRD Sukohardjo, tetapi tidak ada tanggapan apa-apa, Tanggal 15 Agustus dengan 10 bus Jati Mulyo yang kami sewa sendiri berangkat ke Jakarta, ke Kantor Menteri Tenaga Kerja, sampai pukul 09.00 pagi. Sampai pukul 20.00 malam kami disuruh pulang, katanya Dirjen Binawas mau ke Solo. Lalu kami dipulangkan dengan bus Steady Safe yang disewa Depnaker. Tapi jalannya dilambatin, sehingga kami sampai di Solo malam hari. Di sana diberitahu bahwa Dirjen sudah pulang. Kami kecewa, ternyata kedatangan Dirjen ke Solo, juga belum ada hasilnya. Malah kami yang berdemo di depan perusahaan diusir oleh preman, polisi dan tentara, kami dipukuli, sampai 20 orang masuk rumah sakit. Dilempari tai kerbau, seraya dimaki-maki, "Kalian pengecut, kalian sudah dipehaka."

Lalu?

Setelah empat hari menunggu dan tak ada hasilnya, malah dikerasi, kami memutuskan pergi ke Jakarta, ke Kantor Komnas HAM mengadukan saja. Kabarnya, orang Komnas HAM akan ke Solo, minggu depan. Akhirnya kami mau mengadu ke Kantor ILO, sampai terjadi kekerasan yang dilakukan polisi di depan kantor LBH ini.

(Akibat kekerasan polisi, Selasa 25 Agustus lalu 23 orang luka-luka dan segera dibawa ke rumah sakit St. Carolus, Jakarta, ada yang robek bibirnya seperti Sri Lestari, ada yang diinjak-injak sepatu polisi, banyak yang pingsan dan lima orang diantaranya stress hingga kini. Sekarang buruh-buruh itu melakukan aksi mogok di halaman kantor departemen tenaga kerja.)

Buat apa?

Kami tidak akan pulang, sebelum mendapat keberhasilan.

Apa keberhasilannya?

Ya, tuntutan kami, agar hak-hak yang kami tuntut dipenuhi, naik upah minimum sebesar 15 persen dan sejumlah tuntutan lainnnya.

Lalu bagaimana anak dan suami Anda di Solo, terlantar dong?

Kalau kami tidak memperjuangkan hak kami sendiri bagaimana kami mesti menghargai diri kami. Ini kami lakukan juga demi keluarga. Sekarang ini, sembako saja sudah susah terbeli, belum lagi untuk biaya sekolah anak. Perusahaan lain, *kok*, bisa menaikkan upah kenapa perusahaan ini tidak. Padahal perusahaan yang berorientasi ekspor, *kan*, sekarang lagi untung besar.

Kalau tuntutan Anda tidak dipenuhi?

Kami akan terus bertahan di kantor itu, mulai Jum'at ini sudah 25 orang mogok makan. Biar lah kami mati di kantor Depnaker. ■

MAHASISWA MAU KEMANA?

Xpos

Diterbitkan oleh:
Komunitas Informasi Terbuka
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: **http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp**
PO.Box 22202 London SE5 8WU, United Kingdom

Ganti ongkos cetak Rp. 1000,- Terbit seminggu sekali

Membabat Kerajaan Bisnis Cendana

Rejim Habibie mulai memotong bisnis keluarga Soeharto dan antek-anteknya. Akankah terus bergulir sampai ke bos besarnya: Soeharto.

Hari-hari ini, para "pengusaha Cendana", mestilah sedang susah tidur. Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib ternyata cukup serius menindak-lanjuti gebrakan otoritas moneter Indonesia yang melakukan pembekuan dan pengambilalihan sejumlah bank serta mengancam para bankir 'nakal' dengan sanksi tegas. Sudah bukan rahasia lagi, para pemilik bank yang dimaksud adalah orang-orang dekat mantan presiden Soeharto.

Sejauh ini, Jaksa Agung telah memanggil, antara lain, Sudwikatmono (bos Bank Surya) dan Bob Hasan (bos Bank Umum Nasional). Menariknya, pemanggilan itu bukanlah basa-basi. Kendati belum jelas akan diancam dengan pasal apa, Bob Hasan yang mantan Menperindag dan Ketua Umum Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) itu, diperiksa selama lima jam lebih, Kamis(3/9) lalu. Sampai-sampai, mitra Soeharto dalam bermain golf ini wajahnya terlihat pucat ketika meninggalkan Gedung Kejaksaan Agung.

Bob Hasan, seperti diungkapkan Jaksa Agung, diminta untuk mengembalikan seluruh uang yang diperolehnya dalam rangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kepada Bank Umum Nasional. Bukan itu saja, ia juga diminta mengembalikan dana lima ya-asan milik Soeharto —Dharmais, Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, dan Dana Sejahtera Mandiri— yang digunakan untuk mengoperasikan ratusan perusahaannya. Sebab, kata Jaksa Agung, umumnya dana yang masuk ke yayasan itu adalah sumbangan yang berasal dari uang rakyat.

Photo: Setneg

■ **Soeharto & Para Konglomerat:** Hanya punya modal dengkul

Di depan para wartawan yang mencegatnya, Bob Hasan —yang dikenal luas sebagai "operator bisnis" keluarga Cendana— menyatakan sanggup untuk mengembalikan dana BLBI yang pernah diterima Bank Umum Nasional dengan cara menyerahkan aset-asetnya. Namun, tidak diperoleh keterangan soal pengembalian dana yayasan yang digunakannya untuk berbisnis. Kesanggupan untuk mengembalikan dana yayasan inilah yang diragukan banyak orang. Sebab, kalaupun dana itu masih ada —dalam bentuk investasi— sulit mengharapkannya kembali di tengah situasi krisis seperti sekarang.

Memang, sebagian dana yayasan-yayasan yang berasal dari keringat rakyat, diputar Soeharto dan Bob lewat sejumlah perusahaan yang dikendalikannya. Salah satu yang sering mendapat kucuran dana yayasan-yayasan itu adalah Nusamba Grup. Di grup perusahaan yang memayungi sedikitnya 40 perusahaan itu, tiga yayasan yang paling banyak duitnya —Supersemar, Dharmais, dan Dakab— menguasai 80% saham. Sisanya: 10% dikuasai Sigit Soeharto, dan 10% milik Bob sendiri.

Belum lagi, ratusan perusahaan Bob lainnya yang tersebar di sektor perbankan, hutan, kayu lapis, pabrik pulp dan kertas, asuransi, dan sebagainya. Hampir semuanya pernah mendapat kucuran dana dari yayasan-yayasan milik keluarga Soeharto. Jadi, "Kali ini, Bob pasti kena," kata sumber *Xpos* di Kejaksaan Agung.

Sementara itu, Sudwikatmono, adik se-

Berita Pekan Ini

Promes Palsu Ibnu Hartomo ... 3
Beras Terus Melejit ... 5
Garuda Tak Mampu Terbang ... 7
ABRI Kembali Kuasai Aceh ... 9
Kepala BIA pun Diperiksa ... 10
"Politik Kekerasan Masih Ada" ... 12

Politik Tumbal

Hari ini, halaman depan koran-koran nasional memberitakan pemeriksaan yang dilakukan aparat Kejaksaan Agung atau Mabes Polri terhadap "orang-orang dekat" Soeharto, mantan presiden yang dijungkalkan "Revolusi Mei" lalu. Satu per satu seperti Sudwikatmono, Bob Hasan, atau Moerdiono, diinterogasi tentang perbuatan mereka yang diduga melanggar hukum.

Peristiwa itu jelas tak terbayangkan di masa-masa kejayaan Soeharto dulu. Saat itu, Bob dan kawan-kawan bagaikan "the untouchables" atau orang yang tidak terjamah tangan hukum. Persis kaum mafioso dalam film-film gangster produksi Hollywood, yang dengan bebas malang melintang meski perbuatannya jelas melanggar hukum. Jangankan memeriksa, mempersoalkan sepak terjang mereka saja tak ada yang berani.

Tapi, kini semua serba terbalik. Di kalangan pejabat pemerintah rejim Habibie seakan muncul semangat untuk "membabat" semua yang berbau Soeharto. Maka, satu per satu "the untouchables" itu digiring ke ruang pemeriksaan. Segepok bukti kesalahan disodorkan pada mereka. Sebagian mengaku salah, tapi seperti Bob misalnya, masih berusaha berkilah. Toh, itu tak akan banyak gunanya. Tinggal selangkah lagi, mereka bakal digiring ke meja hijau, lalu masuk penjara.

Di mata rakyat, upaya pemerintah tersebut tentu disambut positif. Sebab, "the untouchables" tak lain adalah para "bandit kelas atas", yang menjadi penyumbang terbesar krisis ekonomi yang sedang membelit negeri saat ini. Karena itu, mereka pantas dihukum.

Namun, kita juga harus bersikap kritis: mempertanyakan motif politik rejim Habibie menggiring "orang-orang Soeharto" itu? Apakah itu bukan sekedar "politik tumbal" untuk memuaskan rasa keadilan rakyat? Lalu, mengapa Soeharto dan putera-puterinya belum juga diperiksa?

Untuk pertanyaan terakhir ini, banyak kalangan pesimis Habibie bakal melakukannya. Sebab, Habibie dinilai masih menyimpan ketakutan terhadap "maha profesornya" tersebut. Meski berkali-kali secara terbuka Habibie membantah dirinya berada dalam bayang-bayang Soeharto, tapi sikap dan perilaku politiknya tak jauh berbeda dengan mentornya itu. Nepotisme, kroniisme, dan kolusi, masih jelas membayang dalam pemerintahannya.

■ LUGAS

pupu Soeharto, sudah lebih dulu pesimis bisa mengembalikan dana BLBI yang diperolehnya. Batas waktu tanggal 21 September yang diberikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dinilainya terlalu sempit. Jika kewajiban-kewajiban tersebut tak dapat dikembalikan, bisa dipastikan dalam waktu yang tak terlalu lama lagi, orang-orang dekat lingkaran keluarga Cendana ini bakal masuk kategori "tersangka".

Setelah Bob Hasan dan Sudwikatmono, sasaran berikut yang diberitakan sudah dalam target bidikan adalah anak kedua Soeharto, Bambang Trihatmodjo. Kabarnya, dalam waktu dekat Direktorat Reserse Ekonomi Mabes Polri akan "memanggil paksa" bos PT Bimantara ini. Bersama sejumlah nama di antaranya, Prayogo Pangestu dan Pieter F. Gontha, Bambang diduga melakukan korupsi dan penyelewengan keuangan di Bank Andromeda. Mereka akan dijemput dan dipanggil paksa, karena sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan polisi.

Ada lagi Ibnu Hartomo, adik ipar Soeharto. Baru-baru ini, namanya kembali bikin heboh lantaran kasus penerbitan sejumlah *promissory notes* (promes) palsu. Beberapa pembeli promes itu kini menggugat pemerintah RI di pengadilan Amerika Serikat. Menurut Jaksa Agung, seluruh promes itu berpotensi merugikan negara sebesar US$4,5 milyar. Dengan terungkapnya kasus ini, Ibnu segera menghadapi penyidikan Polri.

Dari apa yang terjadi belakangan ini, wajar bila ada yang berkesimpulan: sedang terjadi upaya sistematis mengikis praktek KKN orang-orang dekat Soeharto. Apalagi, langkah-langkah yang ditempuh BPPN, Kejaksaan Agung dan Polri ini, mulai diikuti oleh beberapa menteri yang departemennya terkait dengan bisnis keluarga Cendana.

Menteri Pertambangan dan Energi, Kuntoro Mangkusubroto, misalnya, baru ini telah memutuskan kerjasama Pertamina dengan sejumlah perusahaan milik putra-putri Soeharto, yang selama ini dianggap sebagai parasit dan menimbulkan biaya tinggi. Perusahaan itu, antara lain, Permindo milik Bambang Tri. Begitu pula Menteri Kehutanan dan Perkebunan Muslimin Nasution, Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Hasan Basri Durin, dan Menteri Pekerjaan Umum Rachmadi Bambang, sedang berupaya menghapus praktek KKN keluarga Cendana di lingkungannya.

Hasan Basri Durin, misalnya, sedang menata kembali penguasaan tanah secara berlebihan di kawasan Jabotabek. Proyek "raksasa" Jonggol yang dulu dipercayakan pada Bambang Trihatmodjo, ijinnya akan segera ditinjau ulang. Untuk itu, Hasan Basri Durin sedang menyiapkan konsep pencabutan ijinnya untuk diajukan kepada Presiden Habibie. Diakuinya, pemberian ijin penertiban lahan untuk proyek Jonggol ini memang terkait dengan unsur KKN.

Hal serupa juga akan dilakukan Muslimin Nasution. Menurutnya, sejumlah Keppres yang memberikan penggunaan dana reboisasi, terutama yang terkait dengan bisnis keluarga Soeharto akan segera dicabut dalam waktu dekat. Hingga kini, dana reboisasi yang dikeluarkan adalah untuk proyek-proyek antara lain, PT Kiani Kertas milik Bob Hasan sebesar Rp250 miliar, Kukesra sebesar Rp100 miliar serta bisnis yang dikelola Ari Sigit—cucu Soeharto— yang menghabiskan dana sebesar Rp30 miliar.

Mengapa keluarga Cendana kini begitu gencar diserang? Ada dugaan, ini karena desakan IMF yang mensyaratkan secepatnya diadakan pembersihan terhadap KKN sebagai syarat turunnya pinjaman. Hanya saja, belum jelas akhir ledakannya akan seperti apa. Apakah akan "meledak keras" dan berakhir pada pengadilan Soeharto, atau sekedar "berbunyi" seperti petasan keras, tapi tak mengubah apa-apa. ■

Bacaan Alternatif untuk KAUM REFORMIS SEJATI

Promes Palsu Ibnu Hartomo

Kasus pemalsuan promes yang dilakukan ipar Soeharto tiga belas tahun lalu diungkit lagi. Ibnu Hartomo akan segera diperiksa polisi.

Satu per satu anggota keluarga Soeharto bakal masuk bui. Salah satu yang akan segera diperiksa polisi adalah Ibnu Hartomo, adik kandung mendiang Nyonya Tien Soeharto. Tokoh yang pernah punya banyak jabatan di birokrasi pemerintah (antara lain sempat menjabat dirjen di Departemen Sosial dan Deputi Ketua Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional) itu terganjal kasus pemalsuan promissory notes alias surat utang yang dilakukannya tiga belas tahun lalu.

Ceritanya, tahun 1985, Ibnu mencoba-coba berbisnis promes dengan pengusaha asal Palestina, Zubaidi Hasan. Perjanjiannya, lima lembar promes Windsor Trust milik Zubaidi senilai US$2,5 miliar akan ditukar dengan sejumlah promes yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Maka, tanpa pikir panjang, Ibnu menyanggupi. Ipar Soeharto itu lalu membuat 500 promes, yang diterbitkan atas nama Wanhankamnas. Nilai total promes itu mencapai US$ 3 miliar atau setara Rp6 trilun dengan kurs saat itu. Alasan penerbitan promes itu adalah untuk mendanai pembangunan perumahan karyawan Wanhankamnas.

Kebetulan, saat itu Ibnu menjabat Deputi Ketua Bidang Pengembangan Wanhankamnas. Padahal, Wanhankamnas sama sekali tak berwenang mengeluarkan promes. Instansi pemerintah yang berwenang adalah Menteri Keuangan. Tak hanya itu, Ibnu ternyata juga memalsu tandatangan Sekjen Wanhankamnas saat itu, Letjen Achmad Wiranatakusuma.

Setelah soal administrasi selesai, Ibnu dan Zubaidi pun sepakat melakukan transaksi. Tempat pertemuan ditentukan Hotel Le Meredien Damaskus, Suriah. Waktunya, 12 November 1985, sambil bersantap malam.

Semula semua urusan beres-beres saja, sampai waktu promes Windsor Trust jatuh tempo. Ternyata, semua promes itu tak bisa dicairkan. Bank Nova Scotia, Cayman Island, yang mestinya menjamin menyatakan promes-promes itu palsu. Ibnu pun hanya bisa gigit jari. Sialnya lagi, ia tak bisa membekukan promes Wanhankamnas, karena Zubaidi keburu melegonya kemana-mana.

Nah, sejak beberapa tahun lalu, promes-promes terbitan Wanhankamnas itu mulai jatuh tempo. Satu per satu para pemegangnya mulai menagih kepada pemerintah Indonesia. Diantaranya, seperti diungkap Tabloid *Kontan*, adalah Aircraft and Component Equipment Supllier (perusaahan asal Amerika Serikat) dan Endover Bank. Akibatnya, pemerintah pun kelimpungan. Tapi, karena memang tak tahu menahu, pemerintah menolak semua klaim atas promes Wanhamnas tersebut.

■ **Ibnu Hartomo, Tommy & Probosutedjo:** Keluarga penipu

Akan halnya Ibnu Hartomo tenang-tenang saja. Tiga tahun lalu, ia memang pernah diperiksa Kejaksaan Agung. Tapi, perkaranya hilang begitu saja, bak tertelan bumi. Maklum, saat itu Soeharto sedang jaya-jayanya. Jadi, siapa yang berani mempersoalkan ipar bapak presiden yang terhormat?

Kini, setelah Soeharto tumbang, semua keluarganya ikut-ikutan terkena tulah. Termasuk Ibnu Hartomo. Perkara promes palsunya pun diungkit-ungkit lagi. Jaksa Agung Andi Muhamad Ghalib dengan tegas menyatakan akan mengusut Ibnu. "Gara-gara perbuatannya, pemerintah jadi repot," kata Ghalib. Soalnya, aparat kejaksaan terpaksa meladeni gugatan dari beberapa perusahaan Amerika berkaitan dengan kesahihan promes Wanhankamnas tadi.

Mabes Polri juga sudah menyatakan niat serupa. Pasalnya, berdasarkan hasil penyelidikan beberapa tahun lalu, diduga Ibnu memalsukan tandatangan Sekjen Wanhankamnas dan stempel instansi tersebut. Achmad Wiranatakusuma juga sudah menyatakan secara terbuka bahwa tandatangannya dipalsu. Sedangkan Chalid Mawardi, mantan Duta Besar Indonesia untuk Suriah yang ikut menandatangani promes palsu itu, juga mengaku "ditipu" Ibnu.

Sebenarnya bukan kali ini saja Ibnu Hartomo melakukan aksi tipu-tipu. Seperti juga keluarga besar Soeharto lainnya, ia sudah dikenal sebagai pengusaha "papan nama". Maksudnya, namanya hanya dicantumkan dalam sebuah perusahaan, biasanya sebagai komisaris atau direktur, hanya untuk memperlancar bisnis perusahaan tersebut. Lalu, ia mendapat komisi yang lumayan besarnya. Berkat usaha papan nama itu, Ibnu Hartomo dan adik-adiknya jadi kaya raya.

Tapi, kini keadaan menjadi berbalik. Ditengah sakit parah yang menjangkitinya, kabarnya ia terserang *stroke* berat, Ibnu dikejar-kejar perkara pemalsuan promes yang dilakukannya. Rumahnya yang asri di kawasan Condet, Jakarta Selatan, sudah terasa tak nyaman lagi bagi para penghuninya. "Gara-gara masalah itu, Pak Ibnu sekeluarga jadi kebebanan pikiran terus," kata seorang staf pribadi yang bekerja di rumah tersebut.

Toh, agaknya, Habibie dan anak-buahnya tak ambil peduli. Untuk menaikkan citra pemerintahannya di mata rakyat, tampaknya Habibie terpaksa mengorbankan keluarga Soeharto, yang pernah diakuinya sebagai "maha profesornya". Nah, setelah Bob Hasan, Sudwikatmono, dan Ibnu Hartomo, siapa lagi orang dekat Soeharto yang akan dipanggil ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung atau Mabes Polri? Kita tunggu saja. ■

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Cermin Krisis Moral

Oleh: Dr. H. Roeslan Abdulgani

Pergolakan internal-domestik negara kita masih belum mereda. Malahan makin meningkat. Yang dirasakan oleh rakyat ialah masih merajalelanya keganjilan-keganjilan di bidang perekonomian, dibidang hukum, dibidang politik, dibidang HAM, dibidang keterbukaan dan masih banyak lagi. Kesemuanya itu dirasakan kurang lancarnya gerakan reformasi yang sudah menjadi ketetapan hati kita bersama. Kurang kelancaran itu nampak jelas dari pihak Pemerintah dan aparatnya. Karena itu krisis-multi-dimensional yang sudah beberapa tahun belakangan ini merajalela, terus mencekam.

Analisa dan evaluasi mendalam datang kepada kesimpulan, bahwa sumber-pokok dari krisis multidimensional itu adalah moral. Moral menyangkut manusianya. Manusia adalah akar-pokok dari segala persoalan, baik yang menyangkut bidang politik, maupun bidang ekonomi dan sosial budaya.

Kata para ahli budayawan dan sejarawan berkenamaan internasional, bahwa *"the root of all problems, political as well as economic and social-cultural, is the human being"*. Krisis atau non-krisis dipengaruhi juga oleh situasi objektip; dan situasi objektip itupun mempengaruhi pembentukan moral manusia; tapi manusia itu sendiri yang ikut membentuk situasi.

Dalam hubungan ini memang sangat tepat sekali, apa yang dikemukakan oleh sdr. Surono kepada rombongan BJ Habibie seperti yang saya kutip di atas. Sungguh suatu evaluasi yang tepat sekali, bahwa Indonesia dewasa itu masih terus mengalami krisis multi-dimensional, dan bahwa sumber pokoknya ialah krisis moral.

Moral tidak termasuk dalam "positive science". Tapi dalam "*normative science*". Moral masuk dalam bidang ilmu. Tapi bukan ilmu positip. Melainkan ilmu normatip; yang harus tahu membedakan norma-norma yang baik dari yang buruk; yang juga dapat membeda-bedakan norma-norma yang benar dari yang salah. Harus pandai membedakan *"what is good and what is bad; and what is right and what is wrong"*. Ukurannya ialah kepentingan pribadi dalam kaitan dengan kepentingan umum.

Kalau kita tidak dapat membeda-bedakan norma-norma itu, malahan menganggap yang buruk itu baik, dan yang salah itu benar, maka kita menurunkan derajat kita sebagai manusia yang tak kenal moral. Dan yang diutamakan ialah melulu kepentingannya sendiri, sambil menginjak-injak hak orang lain. Mereka mengandalkan sikap sewenang-wenang itu atas kelihaian menipu, dan/atau atas kekuasaan yang ia cengkeram.

Contoh tindakan sewenang-wenang yang takbermoral itu banyak dalam sejarah dunia. Juga dalam perkembangan sejarah kita. Salah satu pemberitaan yang sangat menonjol diwaktu belakangan ini mengenai Indonesia adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Gerakan reformasi ingin memberantas itu. Gema tuntutan ini mendorong Bank Dunia untuk mengakui, bahwa memang sedikitnya 20 sampai 30%, dana bantuan Bank Dunia untuk kita telah dikorupsi oleh pejabat dan politisi.

Sebab setahun yang lalu, yaitu dalam laporannya bulan Juli 1997, Bank Dunia membantah dengan tegas adanya korupsi. Kini pada bulan Agustus 1998 suara itu berubah. Rupanya dulu ada sementara pegawai Bank Dunia tersangkut dalam kolusi dengan sementara pejabat kita untuk menutupi korupsi. Kini mereka dari Bank Dunia itu diganti. Dan terungkaplah perbuatan yang tidak bermoral itu.

Laporan Bank Dunia sekarang ini juga membebankan korupsi itu atas pundak Golkar. Sedangkan laju korupsi meningkat dalam dua tahun sebelum Presiden Soeharto terpilih kembali pada bulan Maret 1998. Kata laporan itu secara harfiyah: *"much of the corruption must be attributed to Golkar, the Indonesian ruling party founded by Mr Soeharto, parti culiarly in the two years leading up to Mr Soeharto's relection"*.

Dimana letak akar korupsi itu?

Menulislah Bank Dunia dalam laporannya, bahwa akarnya ialah dalam sistim birokrasi kolonial, yang membiarkan para pegawai pemerintah untuk menutup rendahnya gaji mereka dengan cara mencari tambahan melalui jalan sampingan. Malahan pegawai negeri dibiarkan menerima suap, menerima uang pelicin, dan dibiarkan menyedot dana-dana Negara. Istilah yang digunakan oleh Bank Dunia ialah: *"civil servants will supplement low wages by moonlighting, receiving kickbacks or siphoning off state funds"*.

Inilah sebab pokok kebocoran dalam Anggaran Belanja Negara. Sebagian kebocoran ini berkaitan erat dengan kontrak-kontrak Pemerintah dan perusahaan-perusahaan Negara. Ada yang dikendalikan oleh pejabat Pemerintah dan sanak sekeluarganya. Sekitar 50 sampai 80% penyimpangan telah terjadi pada dana untuk ganti rugi akuisisi tanah rakyat dan pemukiman warga yang tergusur. Dalam kedua bidang ini partisipasi Bank Dunia sangat besar sekali. Yang paling banyak melakukan penyimpangan itu adalah Departemen Dalam Negeri, Transmigrasi dan Kehutanan. Disini menurut Bank Dunia, kebocoran dan penyedotan itu melebihi 25%. *"The Bank found the wrost siphoning of funds —defined as 25% or more— in the ministeries of Home Affairs, Transmigration and Forestry"*.

Membaca laporan ini, tidak heran, apabila Ketua Parlemen Amerika Newt Gingrich, mengeluarkan kritik tajam terhadap Bank Dunia dan Indonesia mengenai korupsi itu. Kata beliau ini merupakan pemborosan ganda. *"A double waste!"*.

Pertama uang pajak dari warganegara yang jujur dibuang-buang. Kedua manusia-manusia yang takbermoral diperkuat kedudukannya. *"A waste of honest taxpayer s' moneay, and propping up the very people who are sickening the society"*.

Laporan Bank Dunia belum tentu 100% benar. Tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa indikasi kearah korupsi, kolusi dan nepotisme yang disinyalir oleh Bank Dunia itu memang kuat. Dan masyarakat kita sendiri sudah lama mensinyalir hal ini. Realita KKN, yaitu adanya korupsi, kolusi dan nepotisme makin meyakinkan dan makin memalukan serta menyedihkan. Ini menyangkut krisis moral. Karena itu tepat sekali himbauan Pimpinan Angkatan 45 kepada rombongan Habibie dan Kabinetnya agar penanganan krisis moral ini diprioritaskan. Sebab sumber pokok dari krisis multi-dimensional sekarang adalah krisis moral, yang menggoyahkan dan merusak Jiwa Kejoangan sementara elit kita yang berkuasa dan arogan.

Mudah-mudahan imbauan Angkatan 45 itu bukan suara kesunyian dipadang pasir. Kalau tidak diperhatikan selekas mungkin, maka jangan tercengan gejolak sosial, ekonomi dan politik akan meluas dan meningkat dimana-mana!

Disadur dan diringkas dari artikel Harian *Waspada*, 4 September 1998

Xpos, No. 36/I, 5 - 11 September 1998

Beras Terus Melejit

Subsidi beras, gandum, gula dan kedele dicabut. Nasi, tempe dan indomie akan jadi makanan mewah. Rakyat Indonesia terancam kelaparan.

Ibu-ibu di berbagai pelosok tanah air kelabakan. Setelah harga minyak goreng naik melaimpaui kemampuan kocek mereka, kini harus dipusingkan lagi dengan harga beras yang entah mengapa melambung terus-menerus. Nah, belum turun harga beras yang menanjak dua minggu belakangan ini, harga beras, gandum, gula pasir akan melonjak lagi. Sidang Kabinet pekan lalu memutuskan, pemerintah akan mencabut subsidi sejumlah komoditas penting itu. Nah, inilah penyebabnya. Saatnya nanti, beras akan jadi barang mewah, tempe, tahu dan indomie, makanan yang dulu sangat merakyat itu akan jadi mahal dan tak terjangkau.

Pencabutan subsidi, terutama untuk tepung terigu, sebenarnya sudah dituntut sejak lama. Pemberian subsidi dan monopoli impor bijih gandum kepada Liem Sioe Liong telah lama dikecam karena hanya menguntungkan pengusaha kawan dekat Soeharto. Karena memonopoli impor bijih gandum dan memonopoli penggilingan bijihnya, Liem bisa jadi konglomerat seperti sekarang ini. Memang, Liem tak hanya memperkaya diri sendiri, ia tentus aja juga menyetor pelindungnyaa, Soeharto.

Karena monopoli dan subsidi itu, Leim berhasil membangun industri makanan berbasis terigu, termasuk indomie, produk yang jadi mesin uang Liem.

Menurut penelitian Indef, subsidi yang diterima PT Bogasari Flour Mills, perusahaan pengilingan bijih gandum milik Liem, sebesar Rp277 per kilogram. Menurut Indef, jika 1994 impor gandum mencapai 2,7 juta ton maka subsidi yang diterima Bogasari sebesar Rp760 miliar. Karena subsidi itu, Liem dengan mudah membangun PT Indofood Sukses Makmur.

Memang, dengan dicabutnya subsidi tepung terigu jadi mahal, begitu pula beras, kedele dan gula pasir. Namun, pencabutan itu setidaknya akan menekan pengeluaran negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari Rp10 triliun setahunnya. Harapan pemerintah, dengan dicabutnya subsidi dan diserahkannya komoditas itu kepada mekanisme pasar, harga bisa ditekan. Namun, asumsi itu belum tentu benar karena mengesampingkan situasi ekonomi, politik dan sosial yang akan menghambat jalur distribusi.

Soal beras misalnya, hingga kini tak ketahuan di mana letak masalahnya hingga harga melambung terus. Menteri Negara Urusan Pangan, A.M. Saefuddin mengatakan naiknya harga beras karena petani dan pedagang menahan berasnya,

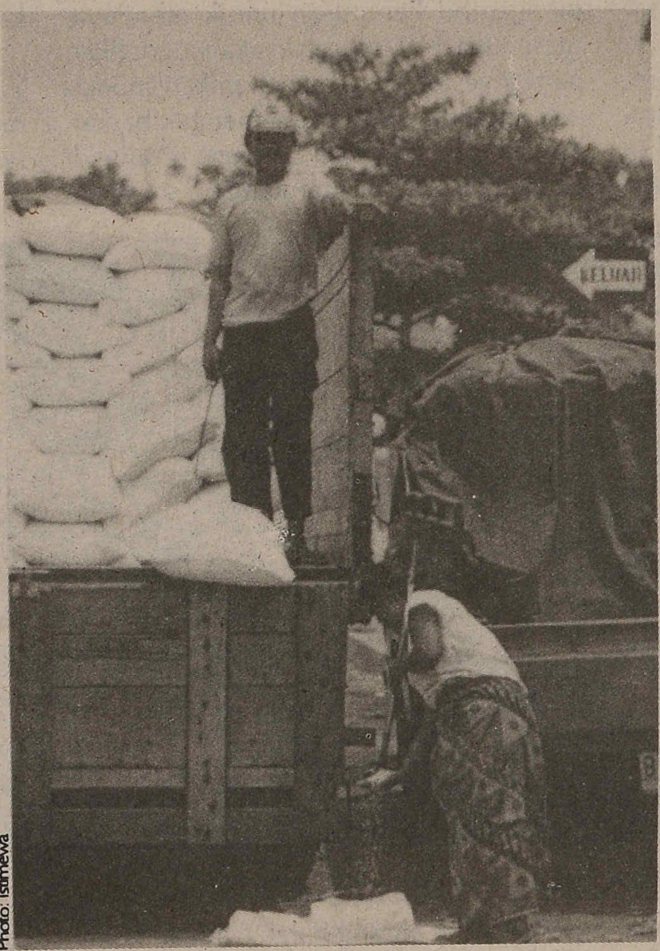
Photo: Istimewa

■ **Beras:** Melejit harganya karena ulah spekulan

sementara rumah tangga-rumah tangga menimbun beras dalam jumlah besar karena takut terjadi krisis politik dan sosial, seperti muncul kerusuhan dan sebagainya. "Stok beras dari impor cukup untuk kebutuhan kita. Rencanya kita juga akan mengimpor beras hingga 4,1 juta ton," ujar Saefudin.

Sumber-sumber di Badan Urusan Logistik (Bulog) tak sependapat dengan Saefuddin. Menurut Informasi yang diterima *Xpos*, stok beras nasional kosong. "Bulog selama ini mengelola 90% peredaran beras nasional. Kini beras itu tak ada," ujar sumber itu.

Nah, beras yang beredar di masyarakat, menurut sumber itu hanya 10% dari sekitar 53 juta ton kebutuhan beras nasional setahun. "Beras yang benar-benar beredar di pasaran kini hanya sekitar 5 juta ton atau hanya untuk beberapa bulan. Tak heran jika harga makin mahal," ujarnya.

Jika sumber di Bulog itu benar, kita menghadapi bencana yang tak terperkirakan. Menurut ramalan Oktober nanti kita memang akan menghadapi bencana kelaparan. Upaya mendatangkan beras nampaknya tak akan banyak membantu. Soalnya, realisasi impor itu seret sekali. Dari 3,5 juta ton, kini bahkan 4,1 juta ton, beras yang akan dimpor baru datang sekitar 1,2 juta ton. Itu pun beras yang mutunya buruk namun harganya mahal karena harus dibayar dalam dolar. Kalau kita butuh 4,1 juta ton, maka masih kurang 2,9 juta ton. Masalahnya sekarang, darimana uang untuk membeli beras sebanyak itu? Asal tahu saja, harga pasar beras dunia mulai merambat naik karena kebutuhan beras dunia melonjak akibat El Nino. Beras berkualitas di pasaran dunia bisa mencapai Rp40 ribu per kilogram. Bayangkan kalau harus mengimpor beras 2,9 juta ton paling tidak harus ada uang sekitar Rp90 triliun! Uang dari mana? Kalau membayarnya pakai rupiah tak jadi soal, karena bisa mencetak, tapi kalau dalam dolar, siapa sanggup bayar? Itu kalau pemerintah akan mengimpor beras komersial. Memang ada beras tak berkualitas yang bisa diimpor namun harganya juga masih mahal. Akhirnya kita memang hanya bisa pasrah, menunggu belas kasihan pemerintah negara-negara sahabat untuk mengirimkan persediaan beras mereka yang sebenarnya lebih pantas diberikan kepada hewan-hewan piaraan, dengan harga murah.

Impor beras jenis ini pun mengalami hambatan. Pemerintah Thailand misalnya dikabarkan menunda pengiriman beras sekitar 30 ribu ton karena peristiwa perkosaan terhadap ratusan perempuan Cina dalam kerusuhan Mei lalu di Jakarta. Langkah ini diikuti pemerintah Taiwan yang tak suka terhadap sikap pemerintah Indonesia menangani peristiwa amoral itu.

Dilepasnya beras ke pasar bebas nampaknya akan memperkeruh situasi mengingat stok beras memang tak ada. Masalah lain sebenarnya juga telah menunggu, yakni dengan dibebaskannya impor komoditas ini oleh siapa saja dan lepas dari campur tangan Bulog.

Di saat krisis seperti ini siapa yang bisa mengimpor gandum, beras dan gula? Tak banyak. Paling-paling Salim Grup, mereka punya uang dan infra struktur, mereka juga punya rekanan di luar negeri yang sudah berhubungan selama puluhan tahun. Jika impor komoditas ini dikuasai Salim, harga pun bisa dimainkan karena memang itulah hukumnya. Nah, bersiap-siaplah makan bubur encer. ■

■ **EKONOMI**

Terjepit Resesi Global

Ekomoni dunia terancam bangkrut, seperti masa depresi 1930-an. Posisi Indonesia pun makin terjepit. Bagaimana solusinya?

Kini, semua orang percaya resesi ekonomi dunia bukan mustahil terjadi. Sebelum munculnya krisis moneter di Asia, barangkali sulit membayangkan kemungkinan itu. Namun, ketika masyarakat bisnis internasional sadar, bahwa dalam sekejap jatuhnya mata uang Baht Thailand mampu menyalakan sumbu yang membakar habis keajaiban ekonomi para Macan Asia, apa *sih* yang tak mungkin terjadi?

Celakanya, di belahan dunia lain, gambaran perekonomian juga menimbulkan rasa was-was. Dengan semakin tergantungnya perekonomian dunia satu sama lain, krisis di satu kawasan memang bisa dengan cepat merembet ke kawasan lain. Contoh mutakhir, adalah krisis di Rusia dalam beberapa pekan terakhir. Ketika Rusia mendevaluasi rubel dan menyatakan ketidaksanggupannya membayar utang, para investor asing mengalami kerugian sangat besar — terutama karena membeli surat-surat berharga yang dikeluarkan pemerintah Rusia.

Untuk menutupi kerugian tersebut, mereka mulai menjual kepemilikan sahamnya di pasar modal negara-negara lain. Aksi jual ini, segera saja mempengaruhi jatuhnya indeks-indeks saham gabungan di Brazil, Jepang dan Amerika Serikat. Stabilitas nilai tukar mata uang di banyak negara pun ikut terguncang.

Akhir bulan lalu itu, indeks Dow Jones mencatat rekor penurunan terendah sejak pertengahan Juli lalu. Untuk hari Kamis, 28/8 saja, pasar bursa di AS telah mengalami kerugian lebih dari US$400 milyar. Bank America Corp., dilaporkan mencatat kerugian US$220 juta. Sementara Republic of New York Bank, kehilangan 75% laba bisnisnya. Pada saat yang bersamaan, di pasar modal Brazil, indeks saham menurun 17,3%. Venezuela turun 8,6% setelah tertekan 22% pada minggu sebelumnya. Sedangkan Meksiko mencatat penurunan 7,6%.

Tak pelak lagi, di banyak pemerintahan, sikap *nervous* tercermin dari kebijakan-kebijakan yang diambil. Umumnya, suku bunga bank di beberapa negara dinaikkan, untuk merayu para investor agar tidak menerbangkan modalnya keluar dari masing-masing negara itu. Bank Sentral Kanada misalnya, menaikkan suku bunganya 1%. Sementara otoritas keuangan India mengerek naik antara 5% hingga 8%.

Yang dikhawatirkan, adalah bila Cina mengambil keputusan untuk mendevaluasi yuan. Hal ini, selain akan merugikan para investor yang menanamkan modalnya di Cina, juga akan mengakibatkan hancurnya daya saing berbagai produk di negara-negara lain, terutama di kawasan Asia. Sebab, barang-barang buatan Cina akan menjadi sangat murah.

Photo: Istimewa

■ **Bursa Efek Jakarta:** Kandas di titik terendah

Diperkirakan, produk Cina akan semakin ramai menyerbu AS —sekarang pun sudah begitu. Sebab, saat ini, perekonomian negerinya Bill Clinton ini dianggap cukup stabil. Daya belinya masih cukup tinggi. Namun, *toh* juga ada kekhawatiran kemampuan ini akan segera mencapai batas. Pasalnya, rendahnya ekspor dan tingginya impor AS akan makin memperburuk defisit transaksi berjalannya. Selama ini, defisit ini mampu ditutupi dengan modal yang masuk dari negara-negara berkembang —yang mengalami krisis— ke bank-bank dan surat-surat berharga di AS. Soalnya, sampai berapa lama ini akan berlangsung?

Justru karena nilai saham-saham di AS begitu bagusnya, hal ini dianggap berbahaya. Ibarat balon yang terus-menerus ditiup menggelembung, resiko pecahnya sangat tinggi. Pergerakan saham pasar modal di manapun di dunia tak ada yang terus-menerus naik. Selalu berfluktuasi. Menurut analisis *The Economist*, seandainya modal para investor asing di Wall Street ditarik, pasar modal AS bisa ambruk. Dan ini berarti mimpi buruk. Dikatakan pula, jika perekonomian Amerika dan Eropa mengalami penurunan, perekonomian dunia akan mengalami penderitaan terburuk di masa damai, kembali mundur sejak depresi tahun 1930-an.

Sementara dalam pandangan pengamat ekonomi Fauzi M Ichsan, bila seluruh pasar modal dan kredit negara berkembang saja hancur, kerugian masyarakat perbankan dan investor internasional akan mencapai US$400 milyar hingga US$500 milyar. Cukup untuk menghapus sistem keuangan internasional dari muka bumi.

Janganlah dulu membayangkan hal itu. Yang jelas, ancaman resesi global akan memperparah krisis yang sudah terjadi di tanah air. Rasanya akan sulit mengharapkan sejumlah lembaga semacam IMF dan Bank Dunia bisa memenuhi janjinya memberikan seluruh bantuan pinjaman sebesar US$43 milyar. Banyak negara yang juga akan minta tolong ke kedua lembaga itu yang keuangannya bukan tak terbatas.

Idealnya, menurut para ekonom internasional, untuk mencegah dan mengatasi persoalan besar ini harus ada dialog dan kesepakatan bersama. Sebab, cara-cara individual untuk menyelesaikan krisis di masing-masing negara — seperti yang selama ini digunakan IMF— malah bisa menyakiti negara lain. "Sebab, semua berada dalam perahu yang sama," ungkap Fred Bergsten dari Institute for International Economics.

Namun, bila yang ideal itu sulit menjadi kenyataan, mau tak mau harus ada strategi untuk bertahan, *survive*, dengan kekuatan sendiri. Paling tidak, peningkatan produksi dan distribusi sektor pangan di dalam negeri harus diperkuat. Supaya resesi di Indonesia tidak segera merembet pada bencana kelaparan. Syukur-syukur, penguatan sektor ini bisa mengembangkan potensi agribisnis yang selama ini ditinggalkan —tentunya, ketika situasi sudah kembali normal.

Sesungguhnya, ancaman resesi global ini, juga menjadi tantangan bagi para pemikir di dalam negeri untuk menciptakan sebuah strategi perekonomian yang brilyan. Sebab, banyak pemikir besar yang lahir dalam situasi tertekan. Soekarno dan Hatta, misalnya. ■

Garuda Tak Mampu Terbang

Bobrok dan banyak utang, Garuda tak sanggup bertahan di tengah krisis. Untuk menyelamatkannya harus ada investor asing.

Lima pesawat raksasa buatan Boeing milik PT Garuda Indonesian Airways dikembalikan ke pemiliknya yakni perusahaan *leasing* Boeng di Amerikat Serikat. Lima pesawat berstatus sewa itu terpaksa dikembalikan karena Garuda tak sanggup lagi membayar uang sewa dan mengoperasikannya. Sejumlah pesawat lainnya, kebanyakan pesawat berbadan lebar Airbus-300 juga akan dikembalikan ke pemiliknya. Tragisnya, *Silk Air*, perusahaan penerbangan Singapura malah menambah armada Airbus untuk trayek Jakarta-Medan.

Garuda memang diambang kebangkrutan. Setelah terjerat utang ratusan miliar yang belum terbayar, Garuda kini harus mengutang lagi sebesar US$100 juta atau Rp1 triliun untuk memperbaiki kinerjanya. Rencananya, dengan pinjaman konsorsium bank Eropa yang dipimpin Morgan Grenfell, Garuda akan memecat tiga ribu karyawannya. Pemecatan itu memerlukan banyak dana karena Garuda harus memberi pesangon sebesarnya Rp38 juta hingga Rp98 juta seorangnya. Dana itu pula yang akan dipakai untuk menyewa kembali enam pesawat Airbus untuk mengganti enam Boeng yang terlebih dulu dikembalikan.

Sudah sejak lama, Garuda bukanlah perusahaan negara yang bersih dari korupsi dan manipulasi. Perusahaan penerbangan yang harusnya jadi perusahaan penerbangan terbesar di dunia, karena tiap tahun memperoleh ratusan ribu penumpang tetap dari rombongan jemaah haji itu kini harus mengemis-emis pinjaman dari luar negeri dan malah banyak utangnya.

Garuda, seperti halnya Pertamina yang baru saja memutus kontrak dengan anak-anak Soeharto, juga digerayangi mereka.

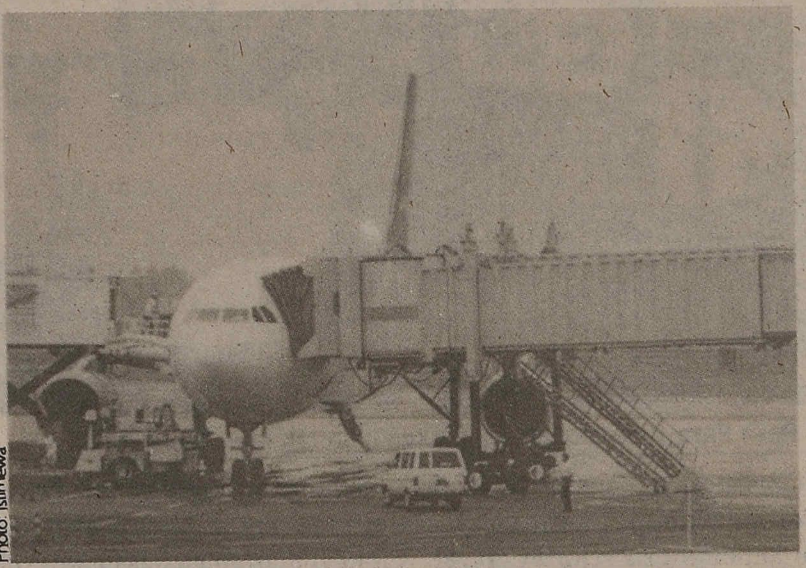

Photo: Istimewa

■ **Garuda Airways:** Terancam bangkrut total

Boom jemaah haji yang seharusnya membuat Garuda kaya raya ternyata malah membuat makmur anak-anak Soeharto. Sejak 1978, carter pesawat yang seharusnya bisa ditangani sendiri oleh Garuda untuk mengangkut ratusan ribu jemaah haji, diambil oleh PT Humpuss milik Tommy Soeharto dan PT Bimantara Citra, milik Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut. Karena ada perantara ini maka keuntungan Garuda berkurang karena harus berbagai keuntungan dengan Tommy dan Tutut. Tragisnya ongkos naik haji (ONH) jadi bengkak karena harus ikut membayar ongkos makelaran Tommy dan Tutut ini.

Penghasilan Garuda dari sektor ini selama belasan bahkan puluhan tahun digerogoti para pejabat Departemen Agama. Garuda diharuskan menyetor dana yang besar jumlahnya kepada para pejabat departemen itu, termasuk menterinya. Lagi-lagi, jemaah haji yang dirugikan karena harus menanggung ongkos tiket pesawat lebih besar. Garuda juga sering jadi sapi perah bagi para pejabat tinggi yang bepergian ke luar negeri. Mereka biasanya meminta *service* yang berlebihan, seperti minta disewakan kamar hotel mewah, transportasi gratis dan tiket pesawat yang sulit ditagih pembayarannya.

Ini belum terhitung korupsi di dalam Garuda sendiri dan *kongkalikong* dengan keluarga Soeharto dan keluarga-keluarga pejabat tinggi lainnya untuk sejumlah proyek Garuda. Belakangan sejumlah perusahaan keluarga Soeharto yang jadi parasit bagi perusahaan penerbangan terbesar di Indonesia itu memang dilepas. Namun, nampaknya pembersihan itu amat terlambat. Garuda sudah diambang kehancuran.

Sebelum krisis kebobrokan itu memang belum terasa. Namun setelah krisis moneter, di mana pengeluaran dalam dolar AS tak tertutup penghasilan dalam rupiah, Garuda mulai goyah. Sejumlah besar trayek di dalam negeri terpaksa dipangkas, pinjaman baru dibuat dan pesawat-pesawat sewaan dikembalikan karena tak sanggup mengoperasikan. Alhasil, Garuda hanya menunggu waktu untuk mendaratkan semua pesawatnya.

Namun, belakangan ada konsorsium dari Eropa yang melirik Garuda, tentu karena potensi penumpang tetapnya setiap tahun: ratusan ribu jemaah haji. Konsorsium itu nampaknya optimis, jika Garuda dijalankan dengan baik, keuntungan akan berlipat-lipat. Namun dibalik kebaikan hati konsorsium itu, Garuda bisa saja jadi milik asing karena tak sanggup membayar utang kalau kinerjanya tak diperbaiki dan korupsi tak disikat. ■

Dalam rangka memperingati
50 tahun Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia
sembilanbelas LSM Indonesia telah membentuk kepanitiaan.
Sejumlah agenda acara, seperti pementasan seni, sayembara penulisan, lomba poster, pameran foto dan pemutaran film akan digelar mulai September hingga Desember 1998

Bagi yang berminat ikut berpartisipasi dapat menghubungi
Panitia 50 tahun Semesta Hak Asasi Manusia
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Jakarta 12510.
Telp (021) 797.2662
E-mail: advokasi@rad.net.id; jkb@indo.net.id; ymb@indo.net.id

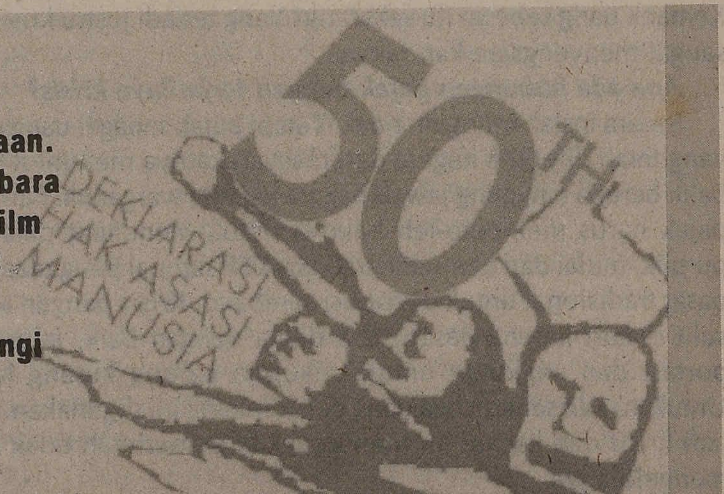

Aji Barata, Aktifis Masyarakat Profesional untuk Demokrasi:

"Habibie Gagal Kelola Pajak"

Profesional Indonesia menggelar aksi "Menolak Bayar Pajak selama Keadilan dan Transparansi di Indonesia Tidak Terwujud" dengan jalan kaki dari Mall Sarinah Jl. Thamrin sampai Bunderan HI di Jakarta, 3 September 1998. Aksi ini melibatkan empat organisasi, yakni Masyarakat Profesional untuk Demokrasi (MPD), Gerakan Sarjana Jakarta (GSJ), Solidaritas Profesional untuk Reformasi (SPUR) dan Gerakan Sabtu Siang (Gersang). Seruannya, (1) Akan menolak membayarkan Pajak kepada pemerintah, selama pemerintahan tidak dikelola demi kepentingan seluruh rakyat. Lebih baik bagian Pajak Penghasilan kami disalurkan langsung kepada rakyat korban krisis ekonomi ini; (2) Menuntut saudara Habibie dan seluruh Kabinet Reformasi yang masih merupakan kelanjutan Rejim Soeharto untuk mundur karena gagal menjalankan amanat rakyat; (3) Mengajak para profesional dan seluruh masyarakat untuk tidak membayarkan pajak kepada rejim pemerintahan ini selama keadilan dan transparansi belum terwujud.

Photo: Istimewa

■ **Unjuk Rasa Para Profesional:** Tanpa keadilan tak mau bayar pajak

Berikut wawancara dengan koordinator aksi, Aji Barata, yang juga duduk dalam Presidium MPD:

Apa latar belakang aksi ini?

Aksi ini merupakan rangkaian aktivitas profesional dalam menyikapi persoalan negara dan masyarakat saat ini. Kami memandang perlu mengangkat isu pajak, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan untuk didistribusikan kembali bagi kemakmuran dan kepentingan publik. Dalam waktu lima tahun, total pajak penghasilan yang dikumpulkan pemerintah telah berlipat dua, dari Rp12,516 trilyun di 1992/93 menjadi Rp28,458 trilyun di 1997/1998. Kemana uang sebesar itu sekarang? Yang terjadi justru krisis yang sangat menyengsara-kan rakyat.

Apa ada hubungan pajak dengan terjadinya krisis?

Secara instan mungkin tidak. Tetapi pajak sebagai uang masuk yang telah diterima negara dari masyarakatnya menuntut timbal balik berupa tanggung jawab negara kepada warganya. Pembayar pajak harus mempero-leh haknya untuk mendapat pelayanan pu-blik, mulai dari kemudahan bikin KTP sampai pengadaan area pasar tradisional untuk distribusi sembako. Krisis pangan saat ini sulit diatasi karena pasar tidak ditata dengan baik, jalur transportasi dan angkutan umum maupun barang kurang lancar. Untuk itu *kan* seharusnya uang pajak selama ini digunakan. Kalau jadi krisis dan kacau, ini menunjukkan pemerintah tidak becus mengelolanya.

Lalu profesional menuntut Habibie mundur?

Habibie memang tidak *capable* (mampu, *red*) memimpin bangsa ini. Belum terlihatnya arah yang jelas dari kebijakan pemerintahan Habibie beserta pembantunya sudah menunjukkan Habibie gagal mengelola pajak yang kami berikan. Ingat, pendapatan pajak tahun terakhir telah melampaui minyak. Bagi Habibie dan para konconya tidak ada pilihan lain, mereka harus mundur!

Apakah ini representasi politik kelas menengah?

Kami merintis jalan ke sana. Memang kelas menengah yang sesungguhnya dan independen belum menguat di negeri ini. Diharapkan dengan banyaknya aksi seperti ini akan melahirkan suatu kesadaran kelompok yang cukup memadai dari golongan yang secara ekonomis mampu untuk bersikap kritis terhadap siapa saja yang berkuasa sekaligus memiliki concern (kepedulian, red) yang tinggi kepada rakyat kecil.

Tapi belum banyak profesional yang ikut?

Ini baru pertama kali aksi berjalan kaki. Sebelumnya aksi hanya terpaku di satu tempat. Soal banyak tidaknya peserta, di situlah pentingnya organisasi.

Maksudnya?

Organisasi perlu menghimpun anggota sebanyak mungkin, memberikan pendidikan dan pengembangan wawasan dengan kajian-kajian intelektual dan kritis, kemudian anggotanya terjun dalam aktivitas sosial sesuai minatnya. Organisasi para profesional tidak cukup hanya menjadi donatur gerakan, tetapi juga harus terlibat menjadi partisipan aktif dalam aksi. Organisasi para profesional juga tidak selayaknya menjadi selebritis yang hanya mau aksi kalau diliput media.

Bukankah media juga penting mendorong maju profesional?

Ya, itu tidak salah. Yang salah adalah jika *media coverage* (liputan media, *red*) dijadikan satu-satunya ukuran gerakan. Profesional bukan Dharma Wanita. Organisasi profesional bergerak atas dasar visi dan program yang disepakati bersama, baru kemudian mengurus kampanye bagaimana supaya suaranya meluas dan mengena. Visi kami adalah menegakkan Indonesia yang adil, demokratis, dan bermartabat dengan basis kelas menengah yang terbuka untuk berjuang bersama mahasiswa, buruh, petani, dan kaum miskin kota.

Bagaimana Anda dan rekan-rekan mengorganisasi kekuatan itu?

Dengan membangun jaringan yang lebih luas dan memperbanyak agenda bersama baik berupa diskusi-diskusi maupun aksi. Persahabatan dan kedekatan emosional akan tercipta, dan yang terpenting dalam jangka panjang, akan tercipta kesadaran kelas sebagai *middle society* yang berwatak kritis terhadap segala penyelewengan dari institusi penguasa maupun institusi publik ■

ABRI Kembali Kuasai Aceh

Kerusuhan di Lhokseumawe Aceh diduga didalangi militer. Pasukan ABRI akhirnya kembali ditempatkan di wilayah Aceh.

ABRI, agaknya, tak pernah ikhlas kekuasannya terganggu. Setidaknya, itulah tampaknya yang terjadi di bumi Serambi Mekah, Aceh hari-hari ini. Pasalnya, rencana penarikan pasukan ABRI dari wilayah Aceh akhirnya urung dilaksanakan setelah tiba-tiba muncul kerusuhan besar di Lhokseumawe. Pasukan ABRI yang berjumlah sekitar 6000 personil itu dikembalikan lagi ke daerah operasi. Bahkan jumlahnya justru ditambahi 5 SSK dari Banda Aceh dan Aceh Timur.

"Apa yang terjadi di Aceh kita sesalkan bersama, karena tanggung jawab masalah keamanan yang baru saja kita serahkan kepada pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat Aceh sendiri, ternyata telah dinodai oleh beberapa oknum yang membawa massa ke arah tindakan anarkis," kata Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto.

Kerusuhan yang berdampak pembatalan penarikan tentara dari Aceh dan penambahan jumlah pasukan ini mengundang kecurigaan banyak orang. Mereka menduga bahwa kedua peristiwa itu tidak mungkin berdiri sendiri. Beberapa tokoh masyarakat menduga, peristiwa kerusuhan itu sebagai hasil dari operasi khusus supaya membenarkan tentara untuk tetap bercokol di Aceh. Aceh tetap dijadikan Daerah Operasi Militer, seperti yang selama ini dilakukan.

Setidaknya dugaan itu, ini bukan sekedar hasil analisis yang tak berdasar. "Sulit dipahami bahwa rakyat Aceh yang trauma terhadap tentara, tiba-tiba begitu beraninya melakukan aksi dan kerusuhan di depan markas tentara," ujar seorang pengacara di Aceh.

Fakta lain, aparat keamanan saat itu tidak berbuat banyak untuk mengatasi kerusuhan tersebut. Bahkan terkesan peristiwa itu dibiarkan saja berlangsung. Juga, adanya pengkondisian massa, terutama pengumpulan dan pengankutan para pelajar untuk melakukan penyerangan ke lokasi-lokasi sasaran.

"Ini bagian dari kontra intelijen untuk menciptakan suasana *chaos* agar ABRI dapat kembali lagi beroperasi di Aceh," kata Amrin Sugihen, Koordinator Forum Peduli HAM Aceh.

Amrin menduga bahwa kerusuhan tersebut terorganisir. Ia menyebut bahwa sebelum kerusuhan meletus, massa yang kebanyakan dari kalangan pelajar itu dikumpulkan di titik-titik tertentu dan kemudian dibawa dengan menggunakan mobil atau truk. Bahkan sebagian pelajar mengaku dijemput dari sekolahnya. Selain itu, ketika kerusuhan meletus di pusat kota Lhokseumawe, ternyata hal yang sama juga terjadi di beberapa kecamatan di pinggiran kota.

■ **Penarikan ABRI:** Ada rekayasa untuk melestarikan DOM

Repro: Waspada

Peristiwa Senin itu dimulai sekitar pukul 11.00 WIB di lokasi pusat penarikan pasukan Operasi Militer tahap kedua dari Daerah Istimewa Aceh, di Lapangan Sudirman Lhokseumawe. Oleh masyarakat, penarikan pasukan itu disambut gembira. Mereka yang berkumpul di sekitar lokasi upacara terus melontarkan yel-yel "Merdeka" sebagai luapan kegembiraan.

Seusai upacara, emosi masyarakat tidak bisa lagi dibendung bahkan semakin bersemangat. Karena saking gugupnya, tentara tiba-tiba melepaskan tembakan ke udara sebanyak lebih kurang 5 kali. Dan mulailah *chaos* itu.

Semula perusakan ditujukan ke salon-salon kecantikan yang diduga kuat sebagai tempat maksiat yang selama ini dilindungi oknum ABRI. Namun dalam perkembangannya sejumlah toko di Jl Sukaramai dirusak termasuk Bank Internasional Indonesia Cabang Lhokseumawe. Massa juga melakukan perusakan terhadap toko-toko yang ada terutama milik keturunan Cina di Jl Perdamaian. Bangunan-bangunan di sekitarnya dilempari batu. Mereka juga bergerak terus hingga berputar mengarah Jl Merdeka, Jl Perdagangan, Jl. Darussalam. Sebagian massa mengendarai mobil berwarna kuning, *pick up* dan ada sebagian jalan kaki, tampak terkoordinir.

Dari Jl. Darusalam massa menuju Hotel Surya Cottege dan membakar hotel itu hingga rata dengan tanah. Massa terus ke Cunda Plaza, pasar swalayan yang ada di Aceh Utara. Sebagian dari mereka menjarah barang-barang yang ada di sana. Kantor Golkar Tingkat II Aceh Utara juga tak luput dari amukan massa. Pada sore hari sekitar pukul 17.30, massa yang berjumlah ratusan mengepung Lembaga Pemasyarakatan. Mereka memaksa untuk mengeluarkan semua tahanan yang ada di dalam sel dan akan membakar tempat itu. Serentetan suara tembakan aparat keamanan membuat panik penghuni LP. Mereka berusaha mendobrak pintu-pintu sel dan berhamburan keluar. Aparat keamanan yang berusaha menghalau dengan ancaman tembakan tidak digubris, bahkan sebagian melawan. Akhirnya sekitar 109 tahanan berhasil kabur.Namun 18 di antaranya kembali lagi. "Tak ada bendera Aceh Merdeka. Semua petugas kita tak ada yang melihat pengibaran bendera Aceh Merdeka itu," kata Kustopo, Kalapas Lhokseumawe.

Dalam kerusuhan hari pertama ini, seorang pemuda bernama Amirudin Djalil tewas tertembak dan puluhan lain luka-luka. Dan esok harinya jenasah korban diarak massa ke pendopo kabupaten untuk disemayamkan di sana. Sampai akhir pekan lalu situasi Lhokseumawe masih mencekam. Toko-toko masih belum berani buka. Di bebe-rapa tempat masih terjadi kerusuhan dengan melakukan perusakan toko-toko, misalnya yang terjadi pada hari Rabu (2/9) di Idi Reyeuk, Aceh Timur.

Peristiwa Lhokseumawe patut disesalkan. Tapi juga patut dikecam pula upaya untuk terus melanggengkan operasi militer di Aceh. Apalagi dengan cara mengadu domba masyarakat sipil. Tampaknya kondisi Aceh akan terus mencekam, karena ABRI kembali lagi beroperasi. Sedangkan upaya pengungkapan fakta kebiadaban ABRI di Aceh tampak akan dikaburkan. ■

■ POLITIK

Kepala BIA pun Diperiksa

Kepala BIA mengaku, kerusuhan Mei sudah diperkirakan sebelumnya. Tapi mengapa peristiwa dibiarkan saja, hingga memakan ribuan korban?

Sedikit demi sedikit Tim Gabungan Pencari Fakta telah berhasil memperoleh informasi mengenai kerusuhan Mei lalu. Dari pemeriksaannya terhadap Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA) Mayjen TNI Zacky Anwar Makarim, diperoleh informasi bahwa sebenarnya ABRI telah mengetahui akan terjadinya kerusuhan. Namun belum ditemukan keterlibatan ABRI dalam mengorganisir kasus kerusuhan itu. Jadi, kalau suda mengetahui, kenapa kerusuhan masih bisa terjadi?

Zacky pun tidak bisa menjawab, karena menurutnya tugas selanjutnya bukan tanggung jawab BIA lagi. Dan kenapa terjadi penembakan di Universitas Tri Sakti? Kata Zacky itu diluar perkiraan keadaan yang dilakukan BIA. Lalu, adakah pasukan lain yang memotong pengamanan yang dilakukan? Hal itu juga belum terungkap.

Namun dari keempat jenderal yang diperiksa, yaitu Gubernur Sutiyoso, mantan Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsudin, Kapolda Metro Jaya Mayjen Hamaminata dan Kepala BIA Mayjen Zacky Anwar Makarim, telah diperoleh benang merah yang menunjuk bahwa terdapat indikasi kerusuhan Mei lalu itu ada yang mengorganisir.

Misalnya saja, Sutiyoso ketika diperiksa mengaku bahwa kerusuhan Mei lalu itu ada agitatornya, Zacky walaupun secara hati-hati mengaku menemukan adanya agitator lokal yang menggerakan massa. Berarti, hasil kesimpulan Tim Relawan untuk Kemanusiaan, sudah mulai terkonfirmasikan.

"Kayaknya jalinan-jalinan cerita dari kerusuhan itu menuju ke satu arah. Tapi kita belum bisa menyimpulkan itu," kata Bambang Wijoyanto, salah seorang anggota TGPF. Ia menyebutkan bahwa data-data yang diperoleh TGPF telah menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi diberbagai wilayah itu ditemukan pola yang sama. "Nah kalau sudah mengarah ke sana akan lebih mudah lagi bagi kita untuk mengetahui siapa atau instansi mana yang kira-kira mempunyai kemampuan untuk melakukan itu," paparnya.

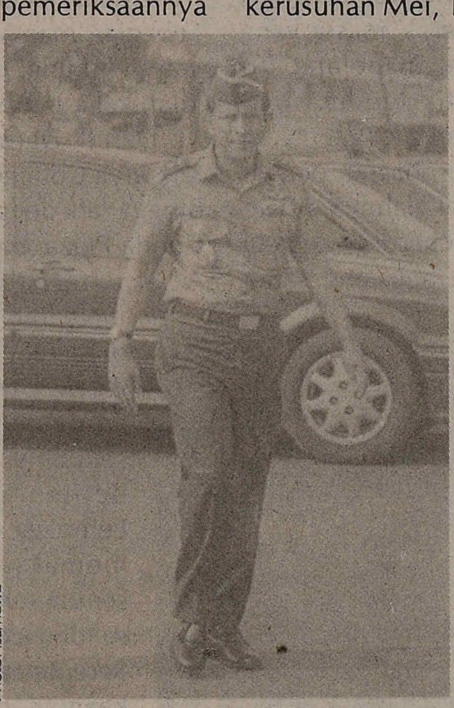
Photo: Istimewa

■ **Zacky Makarim:** Tahu lebih dulu

Soal pemerkosaan yang berkait dengan kerusuhan Mei, TGPF sudah memperoleh kesimpulan bahwa pemerkosaan memang terjadi. Tapi soal jumlahnya berapa, mereka masih terus melakukan pelacakan.

Tapi, tampaknya TGPF tidak akan mudah dalam pengungkapan kasus ini. Setidaknya dari berbagai pernyataan-pernyataan resmi para pejabat pemerintah, kecenderungan untuk menihilkan kasus perkosaan yang merupakan bagian dari kerusuhan Mei lalu itu. Bahkan para menteri pun dalam Rapat Rakor/Polkam tega-teganya memelintir berita tentang kunjungan LSM Taiwan.

Sabotase-sabotase seperti itu langsung tidak langsung sangat mengganggu kerja TGPF yang bekerja atas surat keputusan presiden itu. Bagaimana tidak, ketika mereka sedang investigasi soal perkosaan, tiba-tiba pemerintah menyatakan bahwa tidak ada perkosaan dalam kerusuhan Mei. "Investigasi TGPF sangat terhambat oleh pernyataan para pejabat pemerintah itu," kata Bambang.

Juga upaya-upaya teror yang terus dilakukan kepada anggota TGPF maupun Tim Relawan, tampaknya ada kelompok tertentu yang tidak rela dengan pengungkapan kerusuhan Mei lalu itu. Bambang Wijoyanto tas kerjanya dicuri, seusai ia memeriksa Mayjen Sjafrie Sjamsudin. Sejumlah berkas TGPF terutama berkas hasil pemeriksaan Sjafrie yang di dalam tas raib dibawa kabur maling.

Sementara itu teror-teror yang dilakukan terhadap Tim Relawan untuk Kemanusiaan terus saja berlangsung. Belakangan Posko Tim Relawan diatangi serombongan orang baik yang jalan kaki ataupun bermobil untuk minta santunan dana. Karena mereka dapat informasi bahwa Tim Relawan membagikan dana untuk korban kerusuhan. Ternyata, usut punya usut ada operasi khusus yang dilakukan kelompok tertentu dengan menyebarkan kabar bohong ke para korban kerusuhan.

Akhir-akhir ini sejumlah kalangan kesulitan mencari bukti-bukti perkosaan. Tim Relawan yang terlebih dulu berhasil menemukan bukti diteror karena tidak mau membeberkan bukti-bukti itu. Tampaknya tidak ada kesadaran bahwa pengungkapan kasus perkosaan tidak semudah pengungkapan kasus perampokan. ■

Rakyat Miskin Beras Disabot

Tahun 1999, dua dari tiga penduduk Indonesia miskin sekali. Mengapa sense of crisis *pemerintah masih juga rendah?*

Berita di halaman pertama berbagai media terbitan September lalu sungguh mencengangkan: Dua dari tiga penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Pernyataan itu bersumber dari buku *Employment Challenges of The Indonesian Economic Crisis*, yang disponsori oleh *United Nations Development Program* (UNDP) atau Program PBB untuk Pembangunan. Buku itu merangkum prediksi anggota kelompok kerja ILO yang, antara lain, beranggotakan Didiek J Rachbini, Umar Juoro, Djuhari Wirakartakusumah, Anne Booth, Graeme Hugo, dan Shafiq Dhanani.

Isi laporan itu memberi penilaian bahwa 1998 angka kemiskinan akan dialami 53% penduduk desa dan 39% penduduk kota. Enam bulan pertama 1998 ini saja, sudah sekitar 37% dari 202 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada 1999, jumlah itu bakal meningkat hampir dua kali lipat sebesar 66%. Bila dibanding tahun 1976 di mana terdapat 40,1% penduduk yang miskin, berarti Indonesia mengalami kemunduran yang sangat parah.

Melonjaknya kemiskinan ini disebabkan kombinasi dari kenaikan harga dan pengangguran massal. Kekhawatiran ILO terhadap turun drastisnya tingkat pendapatan yang diperburuk dengan lonjakan inflasi, bakal dapat membakar kembali kerusuhan dan kekerasan publik.

Bila diamati, kemiskinan itu bermula dari turunnya produksi pertanian dan ketergantungan Indonesia pada impor bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Se-

belumnya, badan PBB lain yang mengurusi soal pangan, FAO telah meramalkan 1998 ini akan ada 7,5 juta orang Indonesia menderita kelaparan dan 500 ribu di antaranya sangat akut. Bencana itu akan menimpa 15 dari 27 propinsi di negeri ini.

Sumber kerawanan pangan ini, menurut FAO, selain karena faktor *El Nino* dan *La Nina*, disebabkan karena kesalahan kebijakan pemerintah di bidang pertanian. Salah satunya adalah minimnya insentif untuk petani. Harga gabah tak sebanding dengan keperluan petani akan pupuk dan bibit padi. Rendahnya harga gabah itu direkayasa untuk subsidi penduduk kota. Ketimpangan harga produk pertanian dibanding komoditi lain, bukan hanya membuat orang enggan bertani, juga jelas menggambarkan kebijakan yang tidak memihak petani. Padahal, mayoritas penduduk Indonesia masih tinggal di pedesaan.

Kekeliruan lain dalam strategi pangan kita adalah terlalu menggantungkan pangan pada beras. Produksi beras yang mencapai 50 juta ton per tahun, tak cukup bila seluruh kebutuhan pangan diandalkan pada beras, yang kini tingkat konsumsinya mencapai 130 kg/orang/ tahun (*Xpos* No 16). Meroketnya harga beras, membuat penduduk Indonesia yang sudah terbiasa dengan beras terjungkal jadi miskin.

Sense of crisis terhadap beras dan kemiskinan yang kini melanda, *toh* belum juga dimiliki pemerintah. Habibie masih membiarkan Soeharto dan para konconya seperti Liem Sioe Liong dan Go Swe Kie, mengobrak-abrik pasar beras yang dibutuhkan rakyat. Seperti terjadi minggu lalu, 5000 ton beras operasi pasar yang dilepas Dolog Jaya habis diserap dalam beberapa jam. Padahal untuk satu hari, Jakarta cuma butuh 2.250 ton. Itu bisa terjadi karena munculnya spekulan beras. Dari sekitar 3.450 koperasi penyalur yang terdaftar di Dolog Jaya, ternyata yang riil koperasi hanya 300 buah. Spekulan-spekulan itu, menurut seorang pegawai Dolog adalah kaki tangan beberapa penyalur besar. Termasuk 11 penyalur, seperti Liem Sioe Liong dan Go Swe Kie, yang hapal betul seluk beluk beras Indonesia, bahkan sebelum Soeharto berkuasa.

Didiamkannya beberapa spekulan makin membuat mereka tidak peduli terhadap par ibu rumah tangga yang menjerit karena harga melambung dan berasnya langka. Bagaimana tidak, di tengah bantuan beras yang mengalir dari luar negeri, para spekulan itu menimbun beras bantuan tersebut dan mengekspor kembali ke Pilipina dan Malaysia dengan harga yang lebih tinggi karena selisih kurs.

Tak ayal, bila penduduk Indonesia miskin dan sengsara, pemerintah sendiri tidak bertanggung jawab terhadap pengawasan produksi dan distribusi pangan yang dibutuhkan warganya. ■

Mahasiswa, Mau Kemana?

Tiga bulan lebih pemerintahan Habibie berdiri, di atas keringat dan darah para mahasiswa. Bagaimana mahasiswa menyikapinya?

Suharto sudah tumbang tiga bulan lebih lalu, tetapi belum ada perubahan yang berarti kini. Para mahasiswa yang menjadi korban kekerasan aparat militer di Universitas Trisakti, Jakarta, oleh pemerintah BJ Habibie hanya dijadikan simbol sebagai 'Pahlawan Reformasi'. Tapi arti perjuangan para mahasiswa yang gugur itu seolah tak berarti, korupsi, kolusi, nepotisme masih merajalela, tentara tetap melakukan kekerasan terhadap rakyat, pemerintah selalu menyalahkan rakyat dan mengadu domba satu dengan yang lainnya.

Seperti zaman Soeharto dulu, ia berhasil duduk di kursi kepresidenan, berkat bantuan mahasiswa yang berdemonstrasi terhadap Bung Karno. Lalu memakan korban mahasiswa, yang kemudian dijadikan Suharto sebagai 'Pahlawan Ampera'. Tapi, apa yang terjadi? Soeharto mengkhianati mahasiswa, ia melakukan depolitisasi di kampus, mahasiswa dibungkam, bahkan diadu domba.

Sekarang juga terjadi pada pemerintahan Habibie, baru saja beberapa jam jadi presiden, ia sudah mengerahkan pasukannya untuk mengusir mahasiswa dari Gedung MPR, Senayan , Jakarta. Belum tiga bulan berkuasa peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/ 1998, sudah dibuat untuk membatasi dan membungkam hak rakyat untuk menyuarakan aspirasinya, sekarang juga antek-antek Habibie sudah melakukan politik adu domba di tingkat mahasiswa.

Lalu apa yang terjadi ditingkat gerakan mahasiswa? Mahasiswa asyik berpolitik sendiri, merasa bangga atas perjuangan yang telah dilakukannya. Kekuatan mahasiswa yang tadinya bersatu agak terpecah. Ada yang menamakan dirinya, Forum Kota (Forkot), ada pula Forum Kerja Sama Mahasiswa Jakarta (FKSMJ). Kedua kelompok ini memang berperan besar dalam aksi pendudukan Gedung MPR dan berhasil membikin *keder* Soeharto sehingga turun dari kursi kepresidenan. Kelompok lain, yang menamakan dirinya Front Nasional, kini juga terus bergerak menggalang kekuatan rakyat.

Bagaimana dengan mahasiswa mandiri yang tidak mau bergabung ke dalam tiga organisasi itu, atau organisasi apapun, padahal mereka juga punya andil pada perubahan di negeri ini? Mahasiswa harus bersatu padu kembali untuk menyatukan langkah, menyusun *platform* perjuangannya bersama elemen-elemen masyarakat lainnya. Ada persoalan rakyat yang lapar, sembilan bahan pokok yang belum bisa dipenuhi, harga-harga yang melonjak tinggi, pemerintahan yang tidak bersih karena masih ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Masih bercokolnya para koruptor dan pengkhianat rakyat dalam tubuh pemerintahan.

ABRI juga masih melakukan kekerasan terhadap rakyat, belum mengembalikan 14 orang yang dihilangkan, tidak diadilinya pelaku penculikan, penyiksaan dan pembunuhan. Belum lagi persoalan diktator Soeharto yang merampas uang rakyat, yang belum diadili bersama para konconya dan para konglomerat yang menghabiskan uang rakyat, atau yang meminjam uang dari luar negeri atas nama rakyat, tapi digunakan untuk diri sendiri dan keluarganya.

Sudah saatnya mahasiswa bergerak bersama-sama rakyat, memikirkan persoalan ekonomi dan politik. Keadaan sekarang, tentunya bersumber dari ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah BJ Habibie yang berkuasa karena ditunjuk Soeharto. Sehingga segala potensi rakyat coba dilemahkan. Misalnya, tak pernah diusut tuntas pelaku penembakan mahasiswa Trisakti, 12 Mei 1998. Yang sudah dapat diduga pelakunya adalah 4 orang dari Tim Gegana Polri. Senjata dan pelurunya juga berasal dari klub menembak Bimantara (perusahaan milik anaknya Soeharto, Bambang Trihatmojo). Jadi, jelas kasus penembakan mahasiswa dilakukan atas perintah Soeharto, dimana Jendral Wiranto yang sekarang Panglima ABRI juga terlibat.

Lalu ada persoalan perdebatan dan saling bantah korban perkosaan aparat militer pada saat kerusuhan 13-14 Mei 1998. Pembunuhan massal terhadap rakyat Aceh, dan juga rekayasa yang dilakukan tentara pekan lalu, dengan mencabut daerah operasi militer di Aceh, tetapi melakukan provokasi, sehingga mereka masuk lagi dengan lebih banyak pasukan.

Mahasiswa sebagai lapisan kelompok yang sadar politik dan keadaan harus bangkit melawan militer yang berusaha menguasai pemerintahan, dan pemerintahan Habibie yang korup dan lemah karena masih berada di bawah bayang-bayang Soeharto. Mahasiswa dan unsur-unsur rakyat harus menjadi kekuatan yang menyatu untuk melawan kezaliman, ketidak adilan, dan keadaan sekarang yang masih membingungkan. Ayo! ■

Munir, Koordinator KONTRAS:

"Politik Kekerasan Masih Berlangsung"

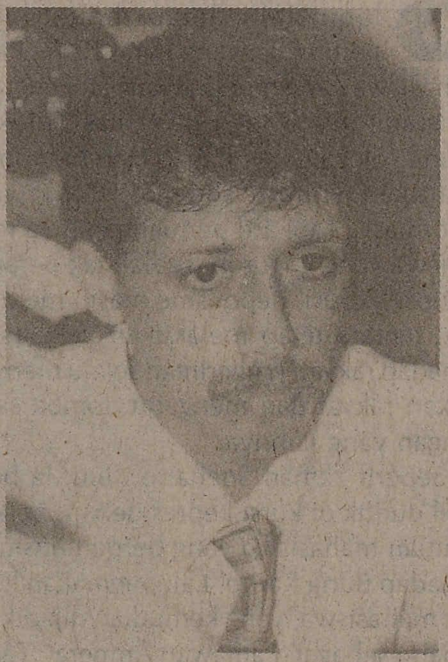

Di kaca pintu sebuah pojok di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan. Diponegoro No.74, Jakarta Pusat, tertera "Markas Besar Kontras". Tentu saja bukan markas besar tempat terjadinya kekerasan dan orang hilang, seperti yang selama ini terjadi. Tempat itu tampak Munir dikelilingi beberapa orang yang asyik menggali informasi. Kontras atau komisi untuk Orang Hilang dan Tindak kekerasan, memang salah satu organ yang didirikan beberapa lembaga swadaya masyarakat dan satu organisasi mahasiswa termasuk YLBHI tentunya.

Di Kontras itulah, Munir menjadi Koordinator Badan Pekerjanya. Kontras semula dibentuk untuk menangani persoalan penculikan beberapa aktivis yang diduga berhubungan dengan kegiatan politik yang mereka lakukan. Pada saat kampanye Pemilihan umum dan Sidang Umum MPR, terjadi 'panen' orang hilang. Akibat kampanye gencar Kontras, 9 orang dibebaskan, diantaranya yang terkenal Pius Lustrilanang, Andi Arief, Desmon J. Mahesa, Rahardjo Waluyo Djati, Feisol Reza dan lainnya. Dari pengakuan orang yang hilang dan sudah kembali itu, mereka diculik, disiksa dan 'dihilangkan' oleh organisasi yang tersusun rapi dan kuat, militer.

Belakangan setelah ada tuntutan dari masyarakat, kesaksian orang yang sudah kembali, kejatuhan Suharto dan adanya 'slack' antar petinggi militer, yang terungkap pelakunya Letnan Jendral Prabowo Subianto. Mantu Presiden Soeharto ini awalnya, diramalkan menjadi *'the rising star'*, karena begitu menonjol, pintar, dan cepat melesat bagai bintang berekor. Tapi kepada dewan kehormatan perwira (DKP) yang memeriksanya bekas Komandan Kopassus itu mengaku hanya menculik 9 orang yang sudah kembali itu. Lalu, bagaimana nasib 14 orang yang sampai kini belum kembali?

Belakangan Kontras juga banyak menerima pengaduan dari orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya bukan karena persoalan politik, tetapi persoalan lain, dan juga mereka yang hilang setelah kerusuhan 13-14 Mei 1998 lalu. Munir sempat diintimidasi oleh Kepala BIA, Zacky Makarim, dengan aktifnya menuding ABRI sebagai pelaku tindak kekerasan dan penculikan itu. "Saya pernah ditanya soal umur saya, yang masih 33 tahun, Zacky bilang masih terlalu muda...Entah apa maksudnya?" kata arek Suroboyo itu. Dibawah ini *Xpos* mewawancarai Munir, yang juga Wakil Ketua YLBHI.

Apa kegiatan Kontras sekarang?

Tetap, yaitu mengurusi kasus orang hilang. Ya, aktifitasnya mengumpulkan data, informasi dan usaha-usaha agar orang yang hilang kembali, dan juga jangan sampai terjadi lagi tindangkan menghilangkan orang dan tindakan kekerasan lainnya. Nah, sekarang dipertajam dengan menelusuri hilangnya 5 orang pasca kerusuhan 14 Mei. Ini, menunjukkan ada usaha untuk membungkam masyarakat yang tahu dalang aksi kerusuhan itu.

Sudah berhasil penelusurannya?

Sedang dilakukan, tetapi belum maksimal. Di luar kasus orang hilang, sekarang kami juga aktif untuk memperoleh data dan informasi soal kekerasan yang terjadi di Aceh. Untuk itulah di Aceh kami membentuk posko, ada empat posko; di Pidie, Banda Aceh, Sigli dan Lhokseumawe. Selain mencari data, kami juga berusaha agar korban kekerasan di Aceh namanya direhabilitir, dan juga diberikan kompensasi.

Lainnya?

5 September ini ada pembukaan kontras di Dili, dan Irian Jaya. Kami juga membantu komite Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Lampung (Smalam) mengusut kasus di Lampung pada 1989, juga aktifis mahasiswa HMI untuk mengusut kasus Tanjung Priok, 1984.

Nah, sekarang Prabowo sudah diberhentikan dari ABRI, apakah Kontras akan berhenti juga, kan sudah cukup?

Tidak berhenti. Kami akan berhenti kalau politik kekerasan dan penghilangan orang juga sudah berhenti dari negeri ini. Walaupun, Prabowo sudah berhenti tetapi sepanjang ini politik kekerasan masih terus berlangsung oleh militer. Buktinya, masih ada 14 orang hilang, 9 orang hilang sebelum kerusuhan 14 Mei 1998, 5 lainnya hilang setelah kerusuhan. dari 9 orang yang sudah pulang dapat ditarik kesimpulan, hasilnya penculiknya sama, pelakunya sama, ditahan ditempat yang sama. Begitu juga yang terjadi pada orang yang belum ketemu sampai sekarang. Sekarang ini,keputusan politik ABRI. ABRI masih menggunakan pola yang lama, defensif. Sembilan orang yang diakui Prabowo, sebenarnya bukan Prabowo yang mengakui. Begitu juga orang yang hilang lainnya yang tidak diakui Prabowo, bukan karena Prabowo tidak mengakui, tetapi ABRI yang tidak mengakui. ABRI masih tidak terbuka. Buktinya, hasil temuan mereka tak pernah diungkapkan. Angka 4 atau 9 orang yang diakui itu adalah angka kompromi. Coba pertama ABRI mengakui, 4 orang pertama, yaitu Andi Arief, Nezar Patria dkk yang diserahkan ke polisi. Belakangan, diakui 5 lagi yang hilang telah kembali. Itu strategi ABRI, bukan hanya strategi penculiknya. Karena ABRI yang melakukan. Untuk itulah saya minta, agar ABRI segera melepaskan mereka semuanya.

Tapi tampaknya usaha Anda ini akan mentok?

Ya, sama dengan kasus sebelumnya seperti Marsinah, jadi macet. Misalnya sekarang ditangani Puspom, *lha* Puspom itu bisa berbuat apa, itu, *kan*, institusi di bawah ABRI. Jadi tergantung ABRI mau menyelesaikannya secara politis atau tidak.

Lalu apa agenda Kontras selanjutnya?

Kami melakukan tekanan lewat keluarga korban yang akan pergi ke lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penculikan dan usaha pembebasannya. Juga dengan cara berhubungan dengan lembaga-lembaga internasional. Kami juga diundang oleh organisasi-organisasi anti penculikan di Asia dan Amerika Latin di Jenewa, September ini. Dan Kontras masuk dan diminta menjadi pengurusnya, karena pada masa sekarang tekanan terpusat pada Birma dan Indonesia. Lalu kami, akan pergi ke sidang sub komisi HAM. Dengan terpusat ke dunia internasional bukan berarti agenda di dalam negeri sudah habis

Kami akan melibatkan masyarakat juga. Sebab kasus ini bukan hanya keluarga yang diculik tetapi kasus yang akan terjadi terus pada masyarakat lainnya. bila tidak direspons segera. ■

Xpos

DUA LOKOMOTIF DI TGPF?

Diterbitkan oleh:
Komunitas Informasi Terbuka
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: **http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp**
PO.Box 22202 London SE5 8WU, United Kingdom
Ganti ongkos cetak Rp. 1000,- Terbit seminggu sekali

Amien-Mega Diadu Domba

Ada rekayasa untuk mengadu domba barisan Megawati dan Amien Rais. Dalangnya adalah mereka yang ingin pertahankan status quo. Ini juga peringatan buat kaum politisi sipil, supaya bersatu menolak rezim otoriter.

Krisis politik di tanah air, agaknya makin ruwet saja. Tangan-tangan pendukung kekuasaan lama, mulai bekerja mengacak-acak barisan reformasi. Tujuannya, jelas. Mereka ingin *status quo* dipertahankan. Mereka ingin memanipulasi semboyan reformasi untuk mengamankan kepentingan sendiri. Sasaran operasi intelejen ini, siapa lagi, kalau bukan Megawati Soekarnoputri dan Amien Rais, dua simbol aspirasi masyarakat, yang kian-lama kian dicintai rakyat.

Bagaimana tangan *devide et impera* bekerja? Sekelumit cerita berikut ini, mungkin bisa memberi gambaran. Siang itu, DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar rapat pleno mereka yang pertama, di kantor baru, Jalan Haji Nawi 15, Jakarta Selatan. Tiba-tiba datang seorang tamu, membawa poster bergambar Amien Rais, Ketua Umum PAN. Yang aneh dari poster itu, Amien tampak mengacungkan dua jari. Seperti sedang berkampanye untuk Golkar. "Ini pasti bikinan PDI Megawati. Tolong dibicarakan di rapat pleno," kata bapak pembawa poster itu.

Photo: Istimewa

■ **Amien Rais & Megawati:** Ada upaya mengadu domba secara sistematis

Aktivis PAN yang bertugas di sekretariat, tentu saja, tak percaya dengan ocehan bapak itu. Malah, mereka berpendirian, bapak ini mungkin sekali seorang agen provokasi yang ingin mengadu domba PDI Megawati dan PAN. Usulan provocator untuk membicarakan soal poster itu di pleno DPP PAN, tidak digubris. Dan, tanda-tanda poster itu rekayasa memang sangat jelas. "Tangan yang mengacungkan dua jari itu jelas bukan tangan Amien. Itu hasil rekayasa komputer. Tangannya tampak terlalu besar dan panjang," kata seorang aktivis PAN.

Untunglah, provokasi poster palsu itu tak berlanjut. Namun, suasana anti Mega, bisa saja berkembang di jajaran PAN, bila hubungan kedua partai tak segera dijembatani. Sebab, tampaknya memang ada rekayasa sistematis untuk membuat PDI Perjuangan dan PAN, seolah berseberangan. Usaha itu, antara lain, dideteksi dari konsep pemetaan politik, yang dibuat seorang jenderal pensiunan. Konsep, yang sedikit banyak dibocorkan ke pers itu antara lain, menempatkan PAN sebagai partai konservatif yang akan berkoalisi dengan Golkar. Sementara PDI Perjuangan, akan menjadi pusat gerakan reformasi menumbangkan *status quo*. Dalam konsep yang terlalu menyederhanakan soal itu, PDI Mega dianggap akan berkoalisi dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang dimotori Matori Abdul Djalil dengan dukungan Gus Dur, dan Barisan Nasional.

"Saya akan berpikir tujuh belas kali untuk berkoalisi dengan Golkar," kata Amien Rais. Artinya, kemungkinan berkoalisi dengan partai pendukung *status quo* itu, buat PAN, bisa dibilang mustahil. Sebab, dasar-dasar perjuangan PAN memang sangat berseberangan dengan Golkar. PAN lahir dari gerakan reformasi dan membawa aspirasi untuk Indonesia baru; sementara Golkar merupakan partai rezim lama yang jadi biang keladi krisis Indonesia. Bagaimana mungkin keduanya

Berita Pekan Ini

Soeharto Minta Dilindungi	... 3
Buruk Muka Pers Digugat	... 5
Rekonsiliasi, Bukan Hapus Dosa	... 7
"Duduk Bersama, Pecahkan!"	... 8
Katrol Rupiah, Percuma?	... 10
Sita Dulu Adili Belakangan	... 12

KRI

Ada ide yang diusung sebagian aktivis gerakan mahasiswa saat ini. Yakni, pembentukan Komite Rakyat Indonesia. Komite itu dirancang untuk mengambil alih wewenang kepemimpinan nasional, yang saat ini dipegang Habibie. Lantas, dari KRI akan dibentuk presidium, yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat.

Tentu saja, setiap orang boleh membikin komite. Termasuk KRI. Yang jadi soal adalah, dari mana KRI mempunyai legitimasi untuk membentuk presidium kepemimpinan nasional. Ketika ide itu, ditawarkan ke MARA —Majelis Amanat Rakyat, beberapa bulan lalu, Emil Salim, dengan jernih mempertanyakan: Dari mana kita punya hak untuk membentuk pemerintahan sementara?

Memang, ide heroik untuk mendirikan Komite dan Presidiumnya itu, kalau dipikir lebih dalam, mengandung nilai kesewenang-wenangan juga. Artinya, kita mengklaim diri sebagai pemegang mandat, yang bisa membentuk pemerintahan sendiri. Merebut hak rakyat untuk memilih pemerintahnya. Padahal, hak mendirikan pemerintahan itu adalah hak semua warga negara; yang normalnya disalurkan lewat pemilihan umum.

Ada kekhawatiran, yang memang masuk akal, bahwa pemilu nanti akan dimanipulai oleh Orde Soeharto dengan Golkarnya, sehingga pemilu tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Manipulasi terutama akan terjadi dengan "politik uang" yang akan dijalankan Golkar untuk membeli suara rakyat yang sedang lapar. Sri Mulyani, ekonom UI memperkirakan, satu suara bakal bisa dibeli dengan satu kilogram beras.

Namun, kekhawatiran tentang pemilu yang dimanipulasi, tidak serta merta menghilangkan arti pemilu sebagai mekanisme demokrasi untuk menentukan pilihan rakyat. Yang diperlukan adalah kerja keras dan terorganisir dari semua masyarakat, untuk mencegah manipulasi pemilu; melawan politik pembelian suara. Kita perlu membangun kembali KIPP atau lembaga lain, yang bisa menjadi wasit yang adil buat para kontestan pemilu.

Setiap orang, juga kawan-kawan mahasiswa, memang punya hak mendirikan komite. Apapun namanya. Tapi, tak sebuah komite pun yang punya mandat untuk membentuk presidium kepemimpinan nasional. Biarlah, kepemimpinan itu ditentukan rakyat lewat mekanisme yang biasa: pemilihan umum.

■ LUGAS

berkoalisi?

Gerakan untuk mengidentikkan PAN dengan Golkar, tampaknya memang hasil operasi intelejen yang canggih dari para pendukung *status quo*. Golkar yang sudah ambruk di mata masyarakat, ingin sekali menggandeng tangan para pendukung reformasi, seperti PAN, untuk memperbaiki citranya. Sebaliknya PAN, dalam *platform*-nya jelas-jelas menyebutkan, "menolak setiap usaha yang ingin mengembalikan kekuatan Orde Baru dan pendukungnya ke panggung kekuasaan." Maka, usaha mengelompokkan PAN dengan Golkar itu, secara nalar, mestinya tak punya dasar sama sekali.

Dari sudut pandang obyektif, sebetulnya PAN justru punya banyak kesamaan dengan PDI Megawati. Keduanya, merupakan partai yang menentang rezim Orde Soeharto. PAN, memang masih baru. Tetapi, dasar-dasar perjuangannya untuk membangun Indonesia Baru yang demokratis dan berkeadilan sosial, jelas merupakan koreksi total terhadap kekeliruan Orde Soeharto. Sementara PDI Megawati, telah diketahui publik, sebagai korban kesewenang-wenangan Soeharto. PDI Mega yang dianiaya sejak "Kongres" Medan 1995, berubah menjadi tumpuan simpati masyarakat.

"PAN lebih mungkin berkoalisi dengan PDI Mega, ketimbang dengan Golkar," kata seorang pakar politik Universitas Indonesia. Apalagi, sikap PAN dan PDI Mega, dalam memandang pemi-lihan umum sebagai mekanisme demo-kratis untuk memperoleh pemerintahan yang sah, tampaknya sudah seiring seja-lan. Koalisi PAN dan PDI Mega, sangat mungkin terjadi, setelah pemilu nanti. Tetapi, penjajakan diantara aktivis kedua partai, mestinya sudah dimulai segera.

"SAYA AKAN BERPIKIR TUJUH BELAS KALI UNTUK BERKOALISI DENGAN GOLKAR," KATA AMIEN RAIS. ARTINYA, KEMUNGKINAN BERKOALISI DENGAN PARTAI PENDUKUNG STATUS QUO ITU, BUAT PAN, BISA DIBILANG MUSTAHIL. SEBAB, DASAR-DASAR PERJUANGAN PAN MEMANG SANGAT BERSEBERANGAN DENGAN GOLKAR.

Bila PAN mendapat serbuan provokasi dari Golkar; PDI Mega tampaknya lebih banyak "didekati" kaum pensiunan tentara. Mereka yang bergabung dalam Barisan Nasional —antara lain Kemal Idris, Edi Sudrajat— sejak awal menyatakan dukungan mereka kepada Megawati. Dalam skenario Barisan Nasional itu, duet kepemimpinan mendatang adalah Mega-wati-Try Sutrisno. "Mega mesti berhati-hati menanggapi tawaran itu," kata seorang pengamat PDI.

Bagaimanapun, Try adalah produk Orde Soeharto yang sulit diterima masyarakat. Kasus Tanjung Priok, menjadi cacat Try yang tak mudah dilupakan. Maka, duet Mega-Try adalah pilihan yang tak cocok dengan semangat reformasi dan keinginan rakyat untuk melakukan perubahan.

Duet Amien-Mega, jauh lebih punya legitimasi. Itulah ideal yang diharapkan rakyat. Indonesia baru akan bisa diwujudkan, bila Mega dan Amien berkoalisi, menjadi pimpinan rakyat Indonesia. Apa-kah jalan ke arah koalisi itu terbuka? Jawabnya, kembali kepada dua pimpinan yang dicintai rakyat itu. ■

Bacaan Alternatif untuk KAUM REFORMIS SEJATI

Tak Ada Perlindungan untuk Soeharto

Soeharto minta perlindungan agar tak dihujat. Namun ABRI hanya bisa melindungi keamanannya.

Soeharto muncul di *Televisi Pendidikan Indonesia* (TPI) pekan lalu untuk membantah punya kekayaan di luar negeri. Ia nampak tenang, setenang Al Capone, tokoh mafia ketika menghadapi pengadilan. Di balik penampilan Harto yang tenang, ia sebenarnya panik juga. Maklum, setelah Soeharto mengundurkan diri, 21 Mei lalu, orang dengan aman bisa mencaci-makinya, sesuatu yang tak mungkin dilakukan di masa lalu. Nah, bantahannya di *TPI*, televisi milik anak perempuannya, Siti Hardiyanti Rukmana, bahwa ia tak memiliki kekayaan miliaran dolar di luar negeri, tak mampu menyurutkan tuntutan agar ia diadili.

Bahkan, sehari setelah penampilan Soeharto itu, ribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto diadili dan meminta Habibie yang dianggap masih anteknya Soeharto meletakkan jabatan.

Soeharto yang makin panik meminta Yohannes Yakob, Ketua Tim Konsultan Keluarga Cendana, meminta Panglima ABRI dan Presiden RI agar melindungi Soeharto dari berbagai hujatan. "Hujatan-hujatan itu sudah keterlaluan dan melanggar undang-undang. Pelakunya harus ditindak" ujar Yakob. Caci-maki, hujatan-hujatan yang menyakitkan hati nampaknya sangat menekan perasaan Soeharto yang selama tigapuluh tahun tak pernah dicaci-maki, atau tak membiarkan orang yang mencacinya bebas berkeliaran. Di masa lalu, banyak mahasiswa dan aktifis LSM yang masuk penjara karena dianggap menghina Soeharto.

Habibie dan ABRI nampaknya tak bisa berbuat banyak untuk menindak para penghujat, termasuk media massa yang hampir tiap hari menulis hal-hal menyangkut Soeharto dan keluarganya, dengan nada kasar. "ABRI tak bisa melindungi Soeharto dari tuntutan hukum," ujar Kasosspol ABRI, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono.

Pernyataan Bambang Yudhoyono jika bisa mewakili sikap Wiranto dan ABRI akan makin membuat Soeharto panik. Soalnya, Wiranto, ketika Soeharto mengundurkan diri berjanji akan melindungi kehormatan Soeharto dan keluarganya. Kalau tuntutan hukum dianggap serangan terhadap kehormatan Soeharto, ABRI seharusnya akan berbuat apapun agar Soeharto tak diadili. Namun, pernyataan Bambang ini bisa diartikan bahwa ABRI telah mengoreksi sikap proteksinya terhadap Soeharto.

Upaya agar Soeharto tak dibawa ke pengadilan terus diupayakan Habibie. Dulu, Habibie memecat Jaksa Agung Atmonegoro dan menggantinya dengan orang dekatnya, Andi Muhammad Ghalib yang juga seorang jendral, untuk mencegah menyeret Soeharto ke pengadilan. Atmonegoro dulu, bersama-sama beberapa jaksa agung muda yang lurus berniat mengusut tuntas harta kekayaan Soeharto.

Habibie kala itu berdalih mengganti Atmonegoro agar pengusutan terhadap harta kekayaan Soeharto bisa lebih cepat karena ditangani orang yang lebih muda.

PEMBELAAN GHALIB TERHADAP SOEHARTO MAKIN NYATA SAAT IA DITANYAI SOAL PENJELASAN SOEHARTO BAHWA IA TAK MEMILIKI KEKAYAAN DI LUAR NEGERI. APA JAWABAN GHALIB?" KALAU YANG *NGOMONG* PAK HARTO MASAK KITA TAK PERCAYA?"

■ **Demo Gugat Soeharto:** Mengapa takut mengadili Soeharto

Namun, kenyataannya tak demikian. Ghalib malah melindungi Soeharto dengan mencari-cari alasan agar Soeharto tak terjerat hukum. Ini nampak ketika ia mengumumkan hasil pengusutan yayasan-yayasan Soeharto. Apa kesimpulannya? Harta kekayaan yayasan-yayasan Soeharto diselewengkan oleh para pengurusnya. Soeharto bersih, bahkan masih dipagari dengan pernyataan: kekayaan Soeharto terpisah dengan harta yayasan. Kalau terpisah, Soeharto lolos dari jeratan hukum karena ia bisa dibela dengan satu pernyataan: Soeharto tak korup karena ia tak memperkaya diri sendiri melainkan memperkaya yayasan-yayasannya yang dipakai untuk aksi-aksi sosial. Keppres-keppres berbau korupsi yang memungkinkan yayasan itu mengeruk dana dari para pejabat memang dicabut. Namun tak disinggung sekali pun bahwa penerbitan Keppres itu termasuk kejahatan.

Pembelaan Ghalib terhadap Soeharto makin nyata saat ia ditanyai soal penjelasan Soeharto bahwa ia tak memiliki kekayaan di luar negeri. Apa jawaban Ghalib? "Kalau yang *ngomong* Pak Harto masak kita tak percaya?"

Ghalib bukan jaksa bodoh, ia tahu dan yakin, sebagaimana jutaan orang Indonesia, bahwa Soeharto korup dan memiliki kekayaan bermiliar-miliar dolar. ■

POLITIK

Dua Lokomotif di TGPF?

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sudah bekerja separuh waktu dari waktu yang diagihkan. Tapi mengapa semakin hari kelihatan perpecahannya?

Senin pekan lalu (7/9), tiba-tiba saja tiga anggota TGPF Bambang W Suharto, Roosita M Noor dan Bambang Widjojanto secara diam-diam menemui Prabowo di kediamannya. Dalam pertemuan itu, mereka meminta keterangan kepada mantan Danjen Kopassus perihal kerusuhan Mei. Tidak banyak hal yang menarik diungkapkan oleh Bambang Suharto kepada pers waktu itu. Justru yang lebih menarik adalah reaksi keras dari Ketua TGPF, Marzuki Darusman menanggapi langkah yang diambil oleh Bambang Soeharto itu.

Marzuki Darusman kepada wartawan menyesalkan langkah Bambang Suharto yang tanpa koordinasi dengan anggota Tim yang lain, jalan sendiri dalam melakukan pemeriksaan terhadap Prabowo. "Kami akan minta pertanggung jawabannya dalam rapat TGPF nanti," katanya. Namun sampai saat ini belum diketahui, apa alasan Bambang Suharto yang secara diam-diam menemui Prabowo itu.

Ketidakpuasan Marzuki terhadap langkah Bambang Suharto ini tampaknya menjadi mercusuar adanya konflik di intern TGPF. Konon ada dua kepentingan besar yang diperankan oleh masing-masing anggota TGPF yang berjumlah 14 orang itu. Yaitu satu pihak mereka yang akan mengemas hasil TGPF ini sebagai bagian dari keputusan politik. Untuk kelompok ini tidak bisa banyak diharapkan akan muncul kesimpulan yang memuaskan masyarakat. Sebab kesimpulannya akan dikompromikan dengan keinginan pemerintah. Dan pihak lainnya adalah kelompok yang akan menjadikan hasil TGPF sebagai fakta temuan yang sungguh-sungguh mengenai kerusuhan Mei. Kedua kubu ini konon diperankan oleh kelompok Bambang Suharto dan kelompoknya Marzuki.

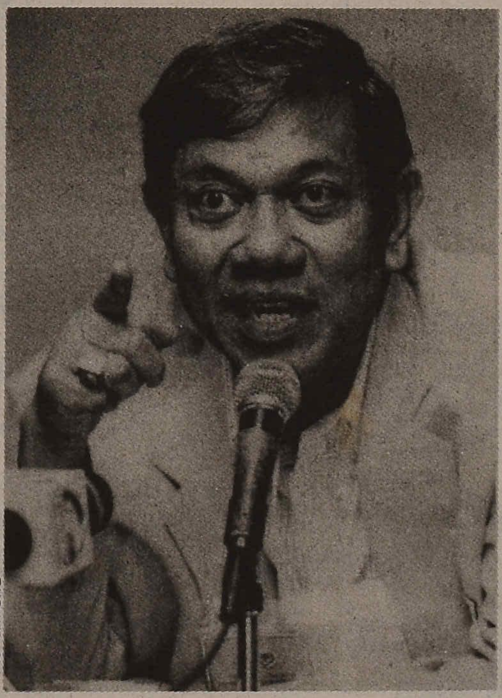

■ Bambang W. Suharto

Tapi bagaimana dengan Bambang Widjojanto yang juga ikut ke rumah Prabowo? "Tampaknya ia terjebak dalam permainan Bambang Suharto. Ia tidak tahu maksudnya Bambang Suharto," kata sumber ini.

Dari informasi yang diperoleh *Xpos* menyebutkan, konflik ini mulai tampak sebenarnya sejak pemilihan ketua TGPF. Tentara saat itu menginginkan Bambang Suharto untuk menjadi ketua. Tetapi ternyata dalam pemilihan Bambang kalah jauh dibandingkan Marzuki Darusman yang mendapat dukungan dari anggota LSM di TGPF.

■ Marzuki Darusman

Kekalahan Bambang ternyata tidak menyurutkan langkahnya untuk terus berposisi sebagai pembela kepentingan tentara. Setiap kali selesai memeriksa para jenderal, Bambang tampil seolah-olah menjadi jurubicara para saksi, tanpa menganalisis terlebih dulu temuannya. "Padahal ia *kan* bukan ketua, tidak sepantasnyalah membeberkan hasil pemeriksaan para saksi kepada umum," kata sumber.

Saat ini Tim yang dipimpin Marzuki Darusman ini terus mendapatkan hambatan dalam bekerja. Selain mendapat teror dari pihak-pihak tertentu, dalam kerjanya mereka juga sering mendapat hambatan akibat pernyataan pemerintah yang telah membuat kesimpulan sendiri mengenai kerusuhan Mei itu. Padahal, tim ini dibentuk sendiri oleh pemerintah untuk mencari fakta sebagai pijakan kesimpulan pemerintah nantinya.

Selain itu, di lapangan anggota TPGF juga menemukan sejumlah saksi terutama saksi perkosaan yang terus-terusan mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu. Sejumlah ancaman pembunuhan pernah dilontarkan para peneror ini kepada para saksi, termasuk para dokter dan pengurus rumah sakit yang menangani korban perkosaan. Untuk itu IDI diharap bisa bersaksi, karena bagaimanapun para dokter selain takut diteror, juga punya etika yang tidak mungkin dibuka kepada umum, terutama menyangkut rahasia pasien.

Tapi walaupun begitu, sampai sejauh ini sejumlah bukti sedikit demi sedikit mulai terungkap, termasuk bukti adanya perkosaan. Seorang sumber mengaku berhasil menemui dokter yang bekerja secara tim menangani 7 korban perkosaan yang rusak hebat pada sejumlah bagian tubuhnya. Begitu parahnya, hingga para korban tersebut harus dioperasi plastik. Sumber ini menyebut bahwa dalam tim yang lebih luas, dokter yang ditemuinya telah menangani 50 perempuan korban kekerasan pada 13-15 Mei 1998 lalu. Bahkan pakar forensik Dr Djaja Soerjadiningrat, secara terang-terangan lewat *Radio Pro2FM* telah memberikan kesaksian dengan menjelaskan bahwa sejumlah fenomena mutilasi (pemotongan anggota tubuh, *red*) dan kekerasan mengerikan diderita para pasiennya.

Sampai sejauh ini, belum ada pernyataan resmi tentang temuan TGPF kepada pers. Kalaupun ada itu sering hanya merupakan kesimpulan pribadi-pribadi para anggotanya. Misalnya kesimpulan Bambang Widjojanto yang mengungkapkan bahwa ada indikasi kerusuhan Mei itu terorganisir. Atau pernyataan Nursjahbani yang mengatakan bahwa ada indikasi perkosaan pada kerusuhan itu.

TGPF telah memeriksa sejumlah jenderal yang terlibat komando operasi pengamanan Jakarta saat kerusuhan berlangsung. Misalnya Bekas Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsudin, Bekas Kapolda Metro Jaya Mayjen Hamami Nata, Kepala BIA, Mayjen Zacky Anwar Makarim, dan Letjen Prabowo. Namun TGPF belum juga membeberkan hasil temuannya, misalnya tentang sejauh mana peran militer dalam kerusuhan ini? Termasuk pembuktian atas sinyalemen adanya 3 kompi pasukan dari Kopassus, Kodam dan Kostrad yang beroperasi saat kerusuhan. Dan mereka juga belum memperoleh jawaban pasti mengapa Jakarta yang dijaga 14.200 personel militer masih saja terjadi kerusuhan hebat.

Tugas TGPF tampak masih menggunung dan akan semakin berat saja jika konflik intern tidak segera diselesaikan. ■

Buruk Muka, Pers Digugat

Majalah Tajuk diadukan ke polisi dan digugat Rp. 600 milyar oleh Kodam Jaya. Intimidasi terhadap pers makin marak.

Menggugat pers, agaknya, jadi trend di kalangan pejabat di era reformasi ini. Setelah Mendagri Syarwan Hamid mengadukan Tabloid *DeTAK* dan Harian *Merdeka* ke polisi, gara-gara merasa dibelejeti perannya dalam kasus Kongres PDI Medan, yang mengakibatkan PDI terpecah dua.

Sementara perkara itu diproses, giliran dua majalah berita *—D&R* dan *Tajuk—* digugat pejabat. Majalah *D&R* diadukan Gubernur Sulawesi Selatan HZB Palaguna, yang merasa difitnah oleh berita mengenai dirinya yang dimuat pada bulan Juni lalu. Yaitu soal korupsi miliaran rupiah Palaguna yang pernah dilansir oleh aksi mahasiswa di Ujungpandang.

Selain itu, berita *D&R* juga berisi tentang usaha Palaguna untuk terpilih lagi menjadi gubernur dengan mengeluarkan uang sebesar Rp13 miliar, upaya Palaguna meminta sumbangan dari sejumlah bupati dan walikotamadya ketika mengawinkan anaknya, kebiasaan memungut komisi dari bupati dan walikotamadya untuk proyek-proyek daerah dan Palaguna diduga sering mengambil keuntungan dari pembelian mobil Pajero sebagai kendaraan dinas para bupati di Sulsel.

Jika *DeTAK, Merdeka* dan *D&R* hanya diadukan ke polisi karena dianggap melakukan tindakan pidana, masalah yang dihadapi *Tajuk* lebih berat lagi. Majalah berita dwimingguan itu bakal diserang Kodam Jaya dengan memakai dua peluru sekaligus: perdata dan pidana. Untuk gugatan perdatanya, Kodam minta *Tajuk* mengganti rugi Rp600 milyar karena telah merugikan nama baik Kodam dan pribadi bekas Pangdam Sjafrie Sjamsuddin. Rasionalitas jumlah gugatan ganti rugi itu, menurut Kodam disesuaikan dengan biaya operasi selama kerusuhan Mei lalu. Sedangkan untuk pidana, mereka melaporkannya ke polisi karena *Tajuk* dianggap memuat tulisan yang berisi fitnah terhadap korps Kodam Jaya.

Perlu diketahui, dalam *Tajuk* edisi 3 September yang dipersoalkan Kodam Jaya itu memuat kesaksian anggota Kopassus kepada seorang bapak yang kehilangan anaknya. Dalam tulisan dengan judul "Saksi-saksi setelah 100 hari" itu anggota Kopassus tersebut bercerita tentang keterlibatan tentara dalam kerusuhan Mei lalu. Gamblang memang, karena di situ ia bercerita tentang keterlibatan Prabowo dan Sjafrie, Kopassus, Kodam Jaya dan Kostrad. Serta cerita detail operasi untuk membuat rusuh itu, lengkap dengan jumlah personel, jumlah grup dan tugas-tugasnya.

Repro: Majalah Tajuk

■ Kover Majalah *Tajuk*: Mencoba mengungkap fakta

Konon, tulisan itu membuat risih korps Kodam Jaya, sehingga mereka minta kepada pimpinan Kodam menuntut *Tajuk* untuk mempertanggungjawabkan tulisannya baik secara perdata maupun pidana. Para tentara ini memandang Tajuk sebagai bagian dari alat propaganda kelompok tertentu untuk menyudutkan ABRI. Karena dalam persepsi tentara, saat ini sedang ada *grand design* untuk menggiring tentara kembali ke baraknya masing-masing atau melepaskan fungsi sospolnya. Dan itu yang membuat mereka keberatan sehingga perlu memusuhi sipil.

Jika dugaan ini benar, itu berarti *Tajuk* akan berhadapan dengan pasukan tentara yang tak mengenal kompromi. Termasuk siap untuk kalah dalam pengadilan yang masih mudah dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan. Karena yang dilawan adalah tentara yang tentu akan mati-matian membela korps-nya, walau itu salah. Untuk itu wajar jika *Tajuk*, walaupun benar, agak *keder* menghadapi gugatan ini.

Namun begitu, ada harapan bagi *Tajuk* untuk menghadapi gugatan ini dengan wajar-wajar saja, karena kemungkinan pengaduan Kodam itu merupakan bagian dari keinginan sebagian ABRI yang menghendaki kejernihan tentang kasus kerusuhan Mei lalu. Artinya, ada kehendak untuk menyingkap konspirasi politik yang melatari terjadinya peristiwa kerusuhan itu. Termasuk ingin menjernihkan ABRI dari dosa-dosanya selama pemerintahan Soeharto, walaupun harus mengorbankan bekas komandannya: Sjafrie Sjamsudin.

Redaksi *Tajuk* sendiri masih bersikap menunggu perkembangan lebih lanjut, sambil melakukan jalan kompromi. Karena bagaimana pun, yang akan mereka hadapi adalah sebuah kekuatan yang punya senjata. Artinya, disamping upaya hukum, bukan tidak mungkin aparat Kodam Jaya melakukan aksi teror terhadap para wartawan *Tajuk*.

Bagi pengamat pers, Ashadi Siregar, fenomena gugatan pejabat terhadap pers itu tidaklah proporsional. Kritik-kritik pers terhadap pejabat itu bukanlah termasuk kategori pencemaran nama baik. Sebab, kritik-kritik itu dilakukan dalam kapasitas jabatan publik, bukan soal pribadi. Artinya, apa yang dilakukan pers sudah benar. "Mestinya reaksi pejabat adalah meng-*counter* kritik itu secara argumentatif, bukan langsung ke pengadilan," kata Ashadi.

Pendapat itu ada benarnya. Jangan-jangan, gugatan terhadap pers itu hanya upaya sang pejabat untuk mengalihkan persoalan. Ibarat kata pepatah: buruk muka, pers digugat. ■

TURUNKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK

■ OPINI

Rekonsiliasi, Bukan Penghapusan Dosa

Oleh: Rahcland Nashidik

Apapun alasannya, seruan "rekonsialiasi nasional" tidak boleh disesatkan artinya sebagai pemberian impunitas, kebebasan dari sanksi hukum, kepada mereka yang diketahui bersalah melanggar hak asasi manusia. Impunitas adalah praktek politik yang melanggar hak asasi manusia, karena ia mengingkari prinsip *equality before the law*, prinsip yang mendasari hak-hak sipil. Memberikan impunitas kepada pelaku pelanggar hak asasi manusia berarti mengingkari hak korban terhadap keadilan. Dengan cara demikianlah impunitas selalu berarti diskriminasi.

Barangkali saya hanya terlalu cemas. Tapi, kalaupun benar, kecemasan itu dihidupi sejumlah alasan. Di antaranya, dasar keperluan yang menghidupi gagasan "rekonsiliasi nasional" ini sesungguhnya tidak cukup jelas. Yang saya tahu gagasan rekonsiliasi nasional ini sekali waktu pernah disampaikan Abdurrahman Wahid. Tapi, apa yang dipikirkan Gus Dur, bisa berbeda dari apa yang dipikirkan oleh Rudy Habibie, ketika pekan lalu ia mengabsahkan pembentukan "Tim Rekonsialiasi Nasional" yang melibatkan anggota-anggota Komnas HAM. Apa pun, satu hal cukup jelas, berkat gagasan "rekonsialiasi nasional" itu lebih dibangun oleh bobot politik si penggagasnya —yang satu tokoh agama paling terkemuka, yang lain *de facto* seorang presiden.

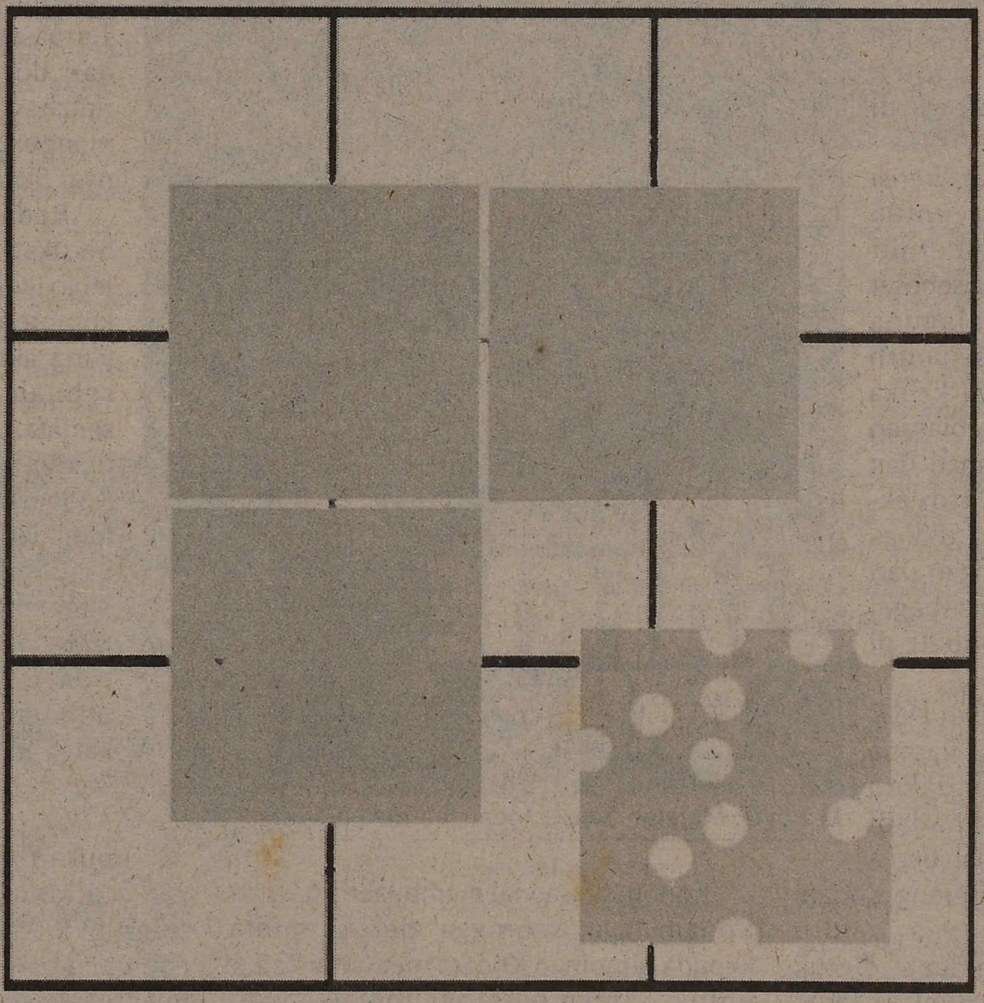

Soalnya, sungguhkah terdapat persoalan krusial ditengah-tengah masyarakat yang memberi alasan bagi suatu "rekonsiliasi nasional" yang bergegas? Dalam konteks politik paska kediktatoran Soeharto, keperluan atas "rekonsiliasi nasional" itu datang dari semacam perasaan jeri terhadap munculnya "balas dendam politik". Tapi oleh dan kepada siapakah "dendam politik" itu akan meledak, orang diminta menebak, sebab tidak pernah ada pengakuan eksplisit tentang itu.

Apa yang kita saksikan di hari-hari ini —dan atas dasar itu kita bisa menarik kesimpulan— adalah usaha-usaha mencari keadilan yang dilakukan masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban praktek-praktek kediktatoran Orde Baru. Usaha-usaha ini harus dihormati oleh setiap orang dan harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk segera melakukan pengusutan dan tindakan hukum yang pantas terhadap mereka yang diketahui bersalah. Tidak adil pagi-pagi menamai usaha-usaha itu sebagai "balas dendam politik", ditengah kenyataan lamban dan macetnya tindakan hukum, misalnya atas kasus-kasus mega-korupsi, penghilangan paksa, serangan 27 Juli 1996, serta kasus-kasus pembunuhan massal di Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Timor Timur dan seterusnya.

Kemungkinan "balas dendam politik" justru akan menjadi terbuka, jika pengusutan dan tindakan hukum tidak adil atas kasus-kasus *gross violation of human right* itu. Dikatakan sebaliknya, hanya dengan penyelesaian hukumlah —dan kehendak politik pemerintah untuk segera melakukan apa yang diminta masyarakat itu— kemungkinan "balas dendam politik" bisa cepat-cepat dicegah.

Ini bukan sekedar retorika. Orang harus berhenti mencemaskan "dendam politik", seketika kasus pelanggaran hak asasi di bawa ke muka pengadilan. Disini berlaku tesis yang kesal dari kalangan Marxian, bahwa hukum selalu melakukan depolitisasi: di hadapan majelis hakim, konteks politik dari kasus yang disidangkan akan dilucuti, dan kasus itu akan diperiksa semata-mata berdasarkan delik-delik hukum yang kaku. Dengan kata lain, orang bisa saja menuntut suatu kasus pelanggaran hak asasi berdasarkan suatu motif politik yang mendendam, tapi pengadilan akan menjadi arena terakhir yang memutuskan.

Soalnya kemudian, memang, mungkinkah imparsialitas pengadilan macam itu diharapkan, apabila prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lebih dahulu berdiri? Ditarik lebih ke belakang, apakah pemerintah Rudy Habibie mau dan sanggup melakukan, minimal tidak menghalangi, pengusutan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Soeharto? Gugatan mahasiswa dan aktivis pro demokrasi lain lagi: kalau konteks pelanggaran hak asasi itu dilucuti, lalu mana bisa sumber kekerasan politik, dwifungsi ABRI, tunduknya politik pada bedil, turut digugat? Disini masalahnya menjadi sepenuhnya politik. Dan seketika kita memikirkan hal itu, segera jadi jelas bahwa Indonesia bukan Afrika Selatan, dan Rudy Habibie memang bukan Nelson Mandela —perbandingan yang juga berlaku buat Gus Dur.

Rekonsiliasi artinya perdamaian, dan perdamaian membutuhkan pemaafan. Tapi, kepada siapakah maaf itu

dimintakan? Kepada siapakah ia diberikan? Dalam lapangan politik mutakhir Afrika Selatan, semua itu jelas. Naiknya Nelson Mandela menjadi presiden berarti bangkrutnya politik *apartheid* dan berawalnya era politik demokratis. Presiden Mandela lalu membentuk Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran. Dalam sidang-sidang komisi itu, pemaafan diberikan korban atau keluarganya kepada aparat politik apartheid yang mengaku bersalah. Sebagian dibebaskan dari hukuman. Sebagian lagi, yang bersalah terlalu berat, digiring ke muka pengadilan yang independen. Sumber moralitas politik itu adalah pemaafan Mandela sendiri, tokoh perlawanan rakyat Afrika Selatan yang dicintai, yang menjadi korban puluhan tahun dibui.

Di negeri jamrud khatulistiwa ini, soalnya tidak bisa sejelas itu. Soeharto sudah minggir, memang. Tapi, Rudy Habibie hanyalah kapten pilot yang lain untuk pesawat yang sama. Menempatkan pengalaman rekonsiliasi nasional Afrika Selatan tadi, maka konteks politik Indonesia, yang sama sekali berbeda, bakal melahirkan pertanyaan-pertanyaan lucu.

Kepada Rudy Habibie, misalnya, Soeharto harus datang mengaku bersalah dan minta maaf? Karena kekuasaan Habibie adalah fosil peninggalan diktator Soeharto, maka apakah yang ia sendiri harus lakukan dengan seruan "rekonsiliasi nasional" itu? Memaafkan dirinya sendiri? Rudy Habibie tak pernah menjadi korban kediktatoran Soeharto, malah ia justru bagian dari rejim diktator itu. Maka, darimanakah sumber moralitas politik "Tim Rekonsiliasi Nasional" itu akan ditimba? Dari tangki bahan bakar pesawat-pesawat IPTN yang tidak laku?

Impunitas, dalam konteks ini, akan jadi keniscayaan. Sebab, yang berkepentingan terhadapnya sebenarnya bukanlah pertama-tama Soeharto, melainkan para penerus diktator itu yang sekarang melanjutkan berkuasa. Kekuasaan operan yang sekarang digenggam Habibie hanya bisa bertahan dengan impunitas.

Tentu saja Gus Dur bukan bagian dari kediktatoran Soeharto. Tapi, tidak seperti halnya Presiden Mandela, jelas juga ia tidak sedang berkuasa. Maka, dari manakah sumber legalitas tim rekonsiliasi nasional yang dibentuknya bakal ia dapatkan? Tanpa legalitas itu, bagaimana misalnya ia bisa menjanjinkan pengampunan hukum bagi mereka yang bersalah?

Maka, siapa korban, siapa bukan? Siapa bukan korban, siapa korban yang bukan-bukan?

■ Wakil Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

Setrum untuk Rakyat Ngawi

Terjadi kembali penyiksaan oleh aparat militer di era reformasi. Langsung melakukan penangkapan tanpa menyidik. Katanya negara hukum?

Antara tanggal 3-6 September 1998 merupakan hari-hari teror bagi penduduk dua desa Beringin dan Sumber Bening yang terletak di pinggir hutan jati, Kabupaten Ngawi. Dengan dalih melancarkan operasi kayu jati, aparat keamanan yang merupakan gabungan dari kesatuan Brimob, Dalmas, TNI-AD 511 dan Paskhas AU menangkapi kaum laki-laki di dua desa tersebut. Penangkapan itu didahului dengan melepaskan tembakan ke udara, bak sepasukan asing yang memasuki desa musuh.

Penangkapan itu dilakukan semena-mena tanpa prosedur hukum yang jelas, seperti surat penangkapan. Semua laki-laki yang ditemui langsung ditangkap, diseret ke atas truk dan dibawa ke Polsek Karangjati, Ngawi. Mereka yang ditangkap ada sekitar 115 laki-laki, yang ketika ditangkap rata-rata sedang makan di warung, bertanam di kebun, bahkan ada yang sedang mengantar anaknya ke sekolah.

Aparat tidak hanya melakukan penangkapan, tapi juga penjarahan. Sejumlah warung di dua desa itu diobrak-abrik dan seluruh barang dagangan seperti rokok, botol-botol minuman diambil juga. Penjarahan tidak hanya terjadi di warung-warung. Beberapa rumah dimasuki, harta benda penduduk dijarah seperti sepeda motor, surat tanah dan uang milik penduduk. Bahkan ada aparat yang sengaja mengambil beberapa BH milik seorang perempuan, menentengnya dan memajangnya di atas TV, sambil tertawa-tawa melecehkan.

APARAT TIDAK HANYA MELAKUKAN PENANGKAPAN, TAPI JUGA PENJARAHAN. SEJUMLAH WARUNG DI DUA DESA ITU DIOBRAK-ABRIK DAN SELURUH BARANG DAGANGAN SEPERTI ROKOK, BOTOL MINUMAN DIAMBIL JUGA.

Mereka yang ditangkap mengalami nasib yang mengenaskan, sama seperti saudara-saudara mereka di Aceh, Irian, Timor Timur. Prosedur awal, mereka bertelanjang dada dijemur di bawah terik matahari selama satu jam di halaman Polsek. Kemudian mereka diinterograsi satu-satu. Tentu saja dalam interograsi ini, tendangan, tamparan, bogem mentah, merupakan 'makanan pokok' yang harus diterima. Ada yang ditusuk-tusuk dada dan kemaluannya dengan tongkat komando yang tajam. Beberapa mengalami penyetruman. "Saya disetrum di bagian ketiak dan lidah," ungkap Pak Bandi salah satu korban. Akibat dari penyiksaan ini seorang yang bernama Pak Surip harus masuk UGD RSUD Madiun. Dan seorang bernama Panut tewas di tahanan. Tewasnya Panut menurut Kapolwil Madiun Kol. Sugiri SH dikarenakan bunuh diri, bukan karena penyiksaan. Namun jenazah Panut langsung dikuburkan tanpa proses visum.

Akibat dari teror aparat keamanan ini selama empat hari, 9 September lalu sekitar 250-an penduduk mengadukan hal ini ke DPRD Ngawi dengan didampingi kuasa hukum mereka dari LKBH-UII. Mereka ditemui oleh Ketua DPRD, Kapolwil dan Danrem. Dalam pertemuan itu, penduduk dijanjikan bahwa tidak akan ada lagi penangkapan, mereka yang masih ditahan boleh dibesuk. Janji tersebut tidak memuaskan penduduk, menurut rencana mereka dengan didampingi kuasa hukum akan mengadukan tindakan semena-mena aparat itu ke Denpom di Surabaya, Senin, 14 September 1998.

Kapolwil Madiun Kol. Sugiri SH sendiri menolak fakta-fakta penyiksaan yang dilakukan anak buahnya. Menurutnya operasi yang disebut 'Wana Semeru' ini sudah benar dan perlu dilakukan. Karena menurut data kepolisian, sudah ada 5.200 batang kayu jati yang dicuri. Dan karena jumlahnya banyak, polisi menduga keras pencurian ini melibatkan penduduk dua desa tersebut.

Sebelum kejadian ini, ada peristiwa yang mendahului pada 13 Agustus 1998. Ada 9 penduduk yang ditangkap dengan tuduhan mencuri kayu jati. Karena merasa tidak bersalah, keesokan harinya penduduk dua desa ini berbondong-bondong berdemonstrasi ke Polsek Karangjati, Ngawi menuntut pembebasan rekannya. Bisa jadi karena peristiwa demonstrasi pada 14 Agustus itu, pihak polisi kemudian mencurigai pencurian kayu jati juga dilakukan oleh seluruh penduduk Desa Beringin dan Sumber Bening ini. Curiga boleh, tapi jangan pakai tembakan, tendangan maupun setrum, Pak! ■

Jerry Sarimole, Aktifis Forum Kota:

"Duduklah Bersama dan Pecahkan!"

Situasi politik ibukota tiba-tiba memanas dengan aksi Forum Kota. Mereka menjebol pagar MPR/DPR, dituduh memacetkan jalan dan menjatuhkan rupiah. Organisasi mereka seperti gerilya kota, serangannya mendadak dan sporadis. Apa sesungguhnya yang diinginkan Forum Kota? Berikut adalah wawancara dengan salah satu juru-bicara sementara (jubir mereka berganti-ganti tergantung kesepakatan pertemuan), Jerry Sarimole.

Forkot sepertinya misterius?

Nggak benar itu, Forkot memang bisa disangka orang eksklusif. Kami tidak ada aliansi dengan pihak lain, kecuali mahasiswa. Tidak ada penokohan. Secara organisasional tidak ada ketua dan struktur.

Bagaimana kalau mau bergerak?

Ya kalau mau ada aksi, ada rapat dulu lalu susun *setting* aksi, kita saling menghubungi dan ada posko pusat setiap simpul bisa mendapatkan informasi dari sana.

Bila ada simpul yang berkepentingan dan meng-ajak yang lain bagaimana?

Nggak ada, simpul-simpul itu mempunyai kedudukan yang sama, suara yang sama, sejajar.

Apa yang merekatkan?

Kesamaan visi untuk peduli terhadap nasib bangsa ini.

Ada platform gerakan?

Satu, turunkan harga. Kedua, Komite Rakyat Indonesia.

Apa legitimasi KRI?

Rakyat, kedaulatan di tangan rakyat. MPR seka-rang ini sudah cacat secara moral, hukum, dan politik.

Mereka dihasilkan dari pemilu yang cacat. Pemilu yang disiapkan dengan berlumur darah. Ingat kasus 27 Juli bagaimana pemerintah menjatuhkan Megawati. Korbannya rakyat, bukan elit politik yang bertarung. Maka kita butuh wahana rakyat, itulah KRI.

Caranya bagaimana?

People Power. Simpul-simpul massa yang menggerakkan untuk menjatuhkan rejim. Setiap kelompok harus duduk untuk membicarakan nasib bangsa. Nah Forkot ini mendudukkan dirinya sebagai penyeru, "Hai, ini ada masalah! Duduklah bersama dan pecahkan!" Forkot, atau kami di mahasiswa tidak punya kepentingan untuk duduk menentukan keputusan politik atau ambisi jadi penguasa politik. *Nggak*, kami ini penyeru moral saja. KRI atau apapun namanya itu tanpa mahasiswa Forkot.

Bukankah pemerintah sekarang juga berupaya mengajak berbagai kalangan untuk bersama-sama menyelesaikan krisis?

Habibie tidak punya legitimasi, baik dari rakyat bawah sampai dunia internasional ia tidak diakui secara *de facto*. Ia cuma ditunjuk Soeharto. *Lho*, kita tolak *kok* Soeharto, mana bisa *mau-maunya* menerima orang tunjukan dia? Dan yang paling penting adalah legitimasi nurani. Kalau kita bisa mendengar hati nurani, kita tidak akan lapang menerima Habibie, yang dibesarkan dalam sistem yang korup, kolutif, dan nepotis. Nah kita lihat kemudian realitas banyak gesekan-gesekan kepentingan, antar kelompok, suku, ras, agama, ideologi. Ini tidak sehat. Indonesia itu plural, terdiri dari beragam SARA, tidak bisa salah satu pihak kemudian merasa harus diberi hak lebih banyak karena pada masa sebelumnya merasa diabaikan haknya, atau ditindas haknya. Semua rakyat di semua pelosok ditindas selama Soeharto berkuasa. Ini bukan soal pribumi non pribumi, atau muslim non muslim.

KRI akan diisi oleh siapa?

Siapapun yang mendapat legitimasi rakyat.

Ukuran legitimasinya apa?

Di *draft* konsep yang kami tawarkan ada tiga kriteria. Satu, dia punya legitimasi basis massa dari kaum sipil. Kedua, kemampuan profesional untuk menjalankan pemerintahan atau para ahli akademis. Ketiga, dia punya kondite baik dan bersih dari KKN, minimal dari publikasi media massa bersih.

Photo: Kamewa

■ **Aksi Forum Kota:** Turunkan harga dan bentuk Komite Rakyat Indonesia

Untuk mewujudkan bagaimana strateginya?

Forkot hanya menyerukan, kita hanya mahasiswa, massa kita mahasiswa bukan rakyat, kita tidak mau klaim. Kita *pressure* moral bukan kelompok politik. Kita tawarkan. *People power* perlu terjadi tanpa senjata.

Kalau KRI gagal, bagaimana tanggungjawab Forkot?

Mari kita lihat skala lebih luas. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap krisis ini? Mengapa pemerintah Orba melakukan pemiskinan dan penindasan? Itu dulu harus dipertanggungjawabkan. Mengapa terjadi aksi-aksi? Karena ada putus komunikasi antara rakyat dengan pemerintah. *Nggak* bisa disalahkan rakyat, itu berarti apa yang disebut perwakilan rakyat tidak mampu menterjemahkan apa yang diinginkan rakyat. Mengapa? Karena mereka memang bukan representasi suara rakyat. Yang penting para wakil itu representatif dulu, kalau dalam perjalanan gagal, dipilih lagi yang menurut rakyat mampu. Memang tidak ada yang sempurna, tapi yang penting bisa dikontrol dan diperbaiki.

Bagaimana kalau Forkot direpresi?

Ya itu resiko kami mahasiswa, ini bumper bagi rakyat. Karena perhitungan tersebut, kami belum berani membawa rakyat dalam aksi-aksi kami sebab kami juga harus bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka. Harapan kami terhadap ABRI, mereka tidak represif, kreatif *dong*! Duduk sama-sama berdialog.

Target minimalnya apa?

Kami tidak ada target maksimal atau minimal. Dua tuntutan saja, Turunkan harga dan bentuk KRI.

Bagaimana dengan Sidang Istimewa?

Apa legitimasi rejim sekarang untuk mengadakan SI? Bila negara kita memang demokratis, Habibie dan kabinetnya harus mundur karena tak punya legitimasi. Mereka yang setuju SI menganggap karena itu yang paling aman. Apa jaminannya? Bila prosesnya saja tidak benar dan tidak bermoral, bagaimana hasilnya bisa benar.

Kalau yang gol bukan KRI?

KRI *kan* hanya penamaan, substansinya iklim demokrasi muncul di mana semua kekuatan politik bisa duduk bersama untuk menyelesaikan krisis.

Rencana selanjutnya?

Itu tergantung kesepakatan Forkot. Kami tetap bergerak terus demi suara moral.

Apa yang ditempuh cuma aksi?

Aksi itu punya dua fungsi. Pertama sebagai *civil disobedience* dan kedua sebagai pendidikan politik bagi massa. Betul bahwa dukungan dari rakyat dibutuhkan. Caranya tidak kami sebutkan, tapi paling tidak tampak dalam aksi massa. Kita tidak mau bertaruh pada kesepakatan-kesepakatan politik elit untuk menjalankan pemerintahan. Kami masih curiga, sejauh mana para tokoh-tokoh politik ini mengetahui aspirasi rakyat. Jadi mau *nggak* mau yang paling riil mereka harus sama-sama diawasi rakyat.

Kalau lewat pemilu bagaimana?

Kalau untuk situasi normal dua tiga tahun lalu OK. Tapi sekarang situasi tidak normal. Tidak ada lembaga yang punya legitimasi moral untuk menyelenggarakan pemilu.

Lalu apa yang akan terjadi di waktu dekat?

Civil disobedience. Ketika rakyat mengatakan tidak, maka kedaulatan yang dipegang negara diambil kembali lagi oleh rakyat.

Kalau anarki yang terjadi?

Sidang Istimewa atau pemilu juga tidak menjamin tidak ada anarki. Saat SI bisa saja terjadi pertarungan antara yang anti dan yang pro Habibie. Bukankah apa yang dilakukan Soeharto selama ini adalah anarki yang panjang?

Apa anarki tak bisa dihindari?

Seringkali dalam proses politik, anarki memang tidak bisa dihindari. Persoalannya sekarang bagaimana meminimalkan korban? Lebih banyak mana korbannya bila dibanding pemerintahan Soeharto selama tiga puluh dua tahun di berbagai tempat?

Apa prasyarat untuk meminimalkan korban?

Itulah pentingnya KRI atau apapun namanya, di mana semua kekuatan politik yang berbasis rakyat duduk bersama dan membuat *statement* bersama, mempersilakan Habibie turun dan memulai Republik Indonesia baru yang lebih demokratis. ■

Tunggu Pembalasan Habibie

Habibie diminta turun. Meski ia bilang bahwa mahasiswa cuma ingin salaman. Adi Sasono dan KISDI siapkan demo tandingan.

Tanpa ada angin dan hujan pertanda, tiba-tiba berbagai kota dibanjiri demonstrasi mahasiswa. Paling tidak ribuan mahasiswa menyemut di Jakarta, Surabaya, Semarang dan Bandung. Di Jakarta bahkan, gelombang demo digelar oleh dua organisasi yang saling bersaing dan punya massa mahasiswa yang besar, Forum Komunikasi Mahasiswa se-Jabotabek (Forum Kota) dan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ). Tuntutan pertamanya sama, Turunkan Harga dan Habibie.

Habibie sendiri kena batunya di Surabaya. Dalam rangka peringatan Hari Olah Nasional tanggal 9 September 1998, ia disambut demo gabungan Pemuda Sakera, APR-ASPR (Arek Pro Reformasi - Arek Surabaya Pro Reformasi), Sapuk (Solidaritas Arek Pandegiling untuk Keadilan), massa simpatisan Mega dan ribuan mahasiswa dari 26 kampus di Surabaya. Mereka menuntut Habibie mundur, penurunan harga, dan pengusutan kekayaan Soeharto. Presiden dikepung dan nyaris tak bisa keluar bila aparat tidak mendesak mundur mahasiswa dengan pentungan rotan dan setrum listrik.

KEKESALAN HABIBIE DIUNGKAPKAN PADA ADI SASONO. SECARA CERDIK, AKSI MAHASISWA DIBALAS DENGAN PROPAGANDA BAHWA DEMONSTRASI MEREKA MEMBUAT MACET JALAN DAN MENJATUHKAN RUPIAH.

Esoknya di Jakarta, ia menerima Ikatan Putra Nahdatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Putri-Putri Nahdatul Ulama (IPPNU) dan bercerita bila yang demo di Surabaya itu sebenarnya hanya ingin bersalaman dengan dia. Sontak, para pengurus IPNU dan IPPNU yang tak mau dibodohi itu bercerita kepada pers usai ketemu Habibie. Dari aktivis IPNU yang tak mau disebut namanya diperoleh deskripsi bahwa Habibie tak bisa secara sempurna menutupi emosinya meski yang keluar dari mulutnya adalah permakluman terhadap aksi-aksi mahasiswa.

Kekesalan Habibie kemudian diungkapkan kepada Adi Sasono. Secara cerdik, aksi mahasiswa dibalas dengan propaganda bahwa demonstrasi mereka membuat macet jalan dan menjatuhkan rupiah. Habibie dan Adi Sasono yang biasa berpolitik sektarian pun juga mempersiapkan aksi balasan. Isyarat itu sudah dikemukakan secara halus oleh Letjen Zen Maulani, orang dekat Habibie yang dipersiapkan jadi Kepala Badan Koordinasi Intelijen (Bakin). Maulani mengatakan kepada David Jenkins yang kemudian menuliskannya untuk *Sidney Morning Herald* (9/9), "Kenyataan ini sungguh sangat menyedihkan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi akan ada pertarungan berdarah, bukan antara mahasiswa yang anti Habibie dengan tentara, melainkan antara aktivis yang anti Habibie melawan yang pro Habibie". Adi Sasono sendiri tak bisa menutupi rencana ini. Secara terbuka dia menyiratkan, "Saya khawatir anarki terjadi. Aksi mahasiswa itu bisa mengundang aksi yang lebih besar dari masyarakat yang tidak sejalan dengan mereka".

Di lapangan, pertarungan antara yang anti dan pro Habibie memang hampir terjadi di Gedung MPR/DPR. Sehari setelah Habibie jadi presiden, dukungan massa untuk Habibie menggelora di gedung parlemen berhadapan dengan ratusan mahasiswa yang tetap berada di MPR/DPR karena merasa suksesi belum tuntas. Demonstrasi pro Habibie itu diorganisasi oleh KISDI dengan mengangkat simbol Islam. Benturan massal waktu itu dihindari oleh Forum Kota yang juga diperkuat aktivis FKGMNU mengingat konflik akan menjurus jadi soal SARA.

Belakangan, provokasi SARA itu telah dilontarkan Ketua Pelaksana Harian KISDI Achmad Sumargono di Majalah *Panji Masyarakat* (No22/September). "Kalau dilihat perguruan tingginya, Anda *kan* bisa baca sendiri," katanya. Disebutkan pula bahwa anggota Forum Kota mendekati 60 kampus, tetapi hanya beberapa saja yang sengaja dieja secara jelas seperti, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Katolik Atma Jaya, serta STF Driyarkara.

Bukan tidak mungkin, isu yang semula murni moral politis kemudian membelok jadi pertikaian SARA. Ada baiknya memang Forum Kota dan FKSMJ betul-betul menghitung persiapan balas dendam Habibie dengan menggunakan tangan KISDI yang baru kehilangan patronnya, eks-Letjen Prabowo. Di situ bertemu kepentingan KISDI dengan Habibie dengan operator Adi Sasono. ■

Katrol Rupiah, Percuma?

Rupiah terus stagnan, cenderung turun. Upaya mengintervensi pasar terbebani utang para konglomerat. Fundamen ekonomi perlu dibangun.

Baru dua minggu lalu, para pejabat berpekik kegirangan melihat stabilnya nilai rupiah. Kini, kening mereka sudah kembali berkerut. Beberapa pengusaha wajahnya tampak lesu dan pucat. Sejak Senin (7/9) dini hari, banyak yang saling bertelepon menanyakan demonstrasi ribuan mahasiswa di gedung MPR/DPR-RI. Bagi kebanyakan mereka, bukan sukacita yang datang ketika tahu kebenaran berita tersebut. Yang terbayang adalah, beban utang dalam dolar AS yang makin berat, likuiditas yang makin ketat serta harga bahan baku yang kembali mahal.

Kekhawatiran yang amat wajar. Apalagi, di saat yang bersamaan terjadi kerusuhan serta penjarahan di Kebumen dan Pontianak. Sebagaimana biasa, reaksi pasar setiap kali terjadi gejolak, selalu negatif. Baik pasar uang maupun pasar modal. Hari itu, rupiah ditutup pada Rp10.600 per dolar AS. Namun, besoknya, langsung anjok menjadi Rp12.400 per dolar AS. Kabarnya, sejumlah investor langsung menerbangkan modalnya ke luar negeri khawatir akan terjadi gejolak yang lebih besar.

Hari Rabu (9/9), terjadi sedikit peng-uatan nilai rupiah ke kisaran Rp11.700 per dolar AS. Namun, ini lantaran adanya aksi penopangan yang dilakukan bank-bank pemerintah — Gubernur BI Sjahril Sabiri mengaku, telah melakukan intervensi ke pasar uang lewat bank-bank pemerintah dalam jumlah "tak terlalu besar", sekitar US$5 juta hingga US$15 juta. Jadi, bukan karena begitu cepatnya kepercayaan investor pulih terhadap situasi di tanah air. Para investor sebetulnya masih was-was dengan perkembangan situasi politik Indonesia. Buktinya, setelah itu rupiah cenderung *stagnan*, tidak menunjukkan penguatan.

Untuk ke depan, rupiah malah diperkirakan bakal kembali *lengser*. Yang sudah mulai hangat jadi perbincangan di kalangan pelaku pasar adalah isu politik di seputar Sidang Istimewa (SI) MPR-RI. Agenda SI akan menjadi perhatian serius mereka. Penetapan percepatan pemilu pada bulan Mei tahun depan, bisa jadi berita baik bagi rupiah. Namun, kini muncul dugaan kuat akan terjadi gelombang besar demonstrasi mahasiswa pada kesempatan itu untuk menuntut pengunduran diri Presiden BJ Habibie dan pertanggungjawaban mantan Presiden Soeharto.

Barangkali, tentang agenda pertanggungjawaban Soeharto dan desakan pengunduran diri Habibie, takkan terlalu menjadi soal bagi para pelaku pasar. Namun, dampak demonstrasi itu yang terutama membuat jantung mereka berdegup keras. Mereka khawatir aksi-aksi mahasiswa akan dimanfaatkan oleh para provokator untuk menciptakan kerusuhan —persis seperti peristiwa Mei lalu. Dan dalam situasi yang demikian, sungguh tak ada yang bisa menjamin investasi mereka.

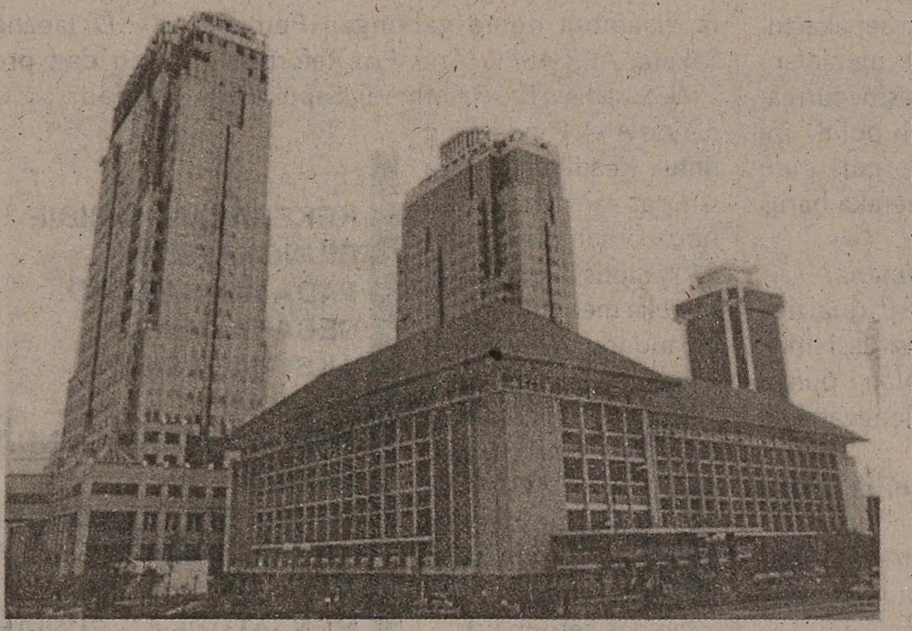

Photo: Istimewa

■ **Bank Indonesia:** Mengkatrol rupiah dengan mencetak uang

Faktor lain yang dianggap akan menekan nilai rupiah, adalah adanya kecenderungan pemerintah untuk menurunkan suku bunga. Selama ini, instrumen menaikkan suku bunga sering digunakan oleh pemerintah untuk menahan anjloknya rupiah. Kini, pemerintah sepertinya mulai kewalahan bertahan dengan cara itu. Sebab, dengan menaikkan suku bunga, berarti pemerintah harus mensubsidi beban bunga tersebut setiap bulannya. Misalnya, dengan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang kini mencapai 70% per tahun, setiap bulannya BI mesti mengeluarkan Rp2 triliun hanya untuk membayar bunga.

Pertanyaannya, sampai berapa lama BI sanggup mengeluarkan dana sedemikian besar? Pasti takkan lama. Karena itu ketika pekan lalu, suku bunga SBI intervensi melorot 2%, dari 59% menjadi 57% per tahun —padahal rupiah sedang memerlukan pertolongan— muncul dugaan bahwa instrumen mengerek suku bunga ini sudah mulai ditinggalkan.

Ini tentu lampu kuning bagi rupiah. Beberapa analis berpendapat, seandainya mahasiswa muncul kembali beraksi —dan ini sangat mungkin terjadi— tak ada lagi yang dapat dilakukan BI untuk menolong rupiah. Melakukan intervensi, selain takkan berarti apa-apa, hanya akan membuang-buang uang percuma.

Apakah pemerintah masih punya "jurus simpanan" untuk menopang rupiah, rasanya *kok* tidak. Lalu, apakah pemerintah tak perlu lagi berbuat apa-apa, alias pasrah saja? Tentu juga tidak. Belakangan, muncul ide melupakan upaya mendongkrak nilai rupiah. Hal ini dikemukakan oleh Noboru Hatakeyama, Ketua Jetro (*Japan External Trade Organization*, Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang). Menurutnya, lebih baik menurunkan suku bunga tinggi yang sudah terlanjur "mematikan" perekonomian. Namun, bila hal ini pun tak membawa perubahan, barulah dilakukan pengetatan nilai tukar.

Soal pengetatan nilai tukar itu, tidak begitu jelas, —apakah mirip seperti yang dilakukan Malaysia atau tidak— dan bisa memancing perdebatan panjang. Namun, usulannya untuk melupakan upaya mendongkrak nilai rupiah dan menurunkan suku bunga, patut menjadi pemikiran. Pasalnya, selama ini, untuk mempertahankan nilai rupiah sudah terlalu banyak yang dikorbankan. Sementara tujuan pendongkrakan rupiah untuk mencegah beban utang luar negeri menjadi lebih berat, sudah tak terlalu relevan. Sebab, kenyataannya utang luar negeri memang tak mungkin dibayar tepat waktu. Selain itu, sudah ada upaya penyelesaian melalui restrukturisasi.

Gara-gara bertahan pada suku bunga tinggi, pertumbuhan ekonomi macet, bahkan minus. Pengangguran bertambah tiap hari. Inflasi super tinggi, lantaran permintaan tinggi, namun ketersediaan barang terbatas akibat lemahnya produksi. Jika suku bunga turun, industri berorientasi ekspor bisa didorong. Hal ini menurut Hatakeyama, bakal mendorong menguatnya mata uang lokal.

Yang penting memang membangun fundamen ekonomi yang secara riil kuat. Bukannya menghambur-hamburkan uang yang berasal dari utang untuk melawan kekuatan pasar. Itu sama saja membangun rumah di atas pasir. ■

Prakarsa IMF, *Eh* Jakarta

Pembenahan sektor riil, lewat Prakarsa Jakarta, cuma untuk perlancar bayar utang. Strategi besarnya, tak menjanjikan keunggulan apa-apa.

Sudah lebih setahun krisis melanda Indonesia, kerja pemerintah lebih banyak utak-atik soal moneter. Inilah resep turun-temurun untuk menghadapi serangan penurunan nilai mata uang lokal terhadap dolar AS (Dengan mengerek suku bunga bank misalnya, diharapkan mereka yang hendak menjual rupiahnya berpikir kembali dan menyimpan uangnya di bank, sehingga rupiah tak terus-menerus anjlok). Hanya saja, di negara yang banyak utang seperti Indonesia, resep ini tak terlalu laku. Kendati suku bunga bank sudah di atas 40% —bahkan 70%— tetap saja dolar masih diburu.

Akibat kelamaan menaikkan suku bunga, satu per satu sektor riil bertumbangan. Pengangguran bertambah. Jangankan perusahaan-perusahaan yang "sakit", terutama yang banyak berutang dalam dolar, yang sehat pun terkena dampaknya. Pengusaha kecil maupun besar, sama-sama tercekik. Usaha seuntung apa *sih* yang mampu menutupi pinjaman yang bunganya di atas 70%?

Kebijakan yang terlalu mengorbankan sektor riil inilah yang belakangan mulai dipertanyakan efektifitasnya oleh para pengusaha. Kendati kestabilan nilai rupiah dianggap sangat penting, namun hendaknya sektor riil mesti tetap dirangsang. Sebab, seperti kata Aburizal Bakrie, "kalau sektor riil macet, suplai kurang, permintaan tinggi, harga-harga akan tinggi. Ujung-ujungnya angka inflasi meningkat." Padahal, saat ini pengangguran diperkirakan sudah mencapai 20 juta orang.

Sayangnya, upaya menurunkan suku bunga bank ternyata tidak serta-merta bisa menjadi jalan keluar. Banyak bank yang justru bermasalah, penuh dengan kredit macet. Sulit mengharapkannya menjadi media pendorong sektor riil melalui pemberian pinjaman dengan bunga rendah. Bank-bank itu sendiri butuh dana untuk memenuhi rasio kecukupan modal, jadi *ngapain* meminjamkannya? Karenanya, untuk menciptakan iklim perbankan yang sehat, pemerintah melakukan aksi "pembersihan" lewat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Pemerintah tampaknya cukup serius memikirkan masukan tentang pentingnya memacu kembali sektor riil. Itu sebabnya, baru-baru ini (9/9) pemerintah melakukan gebrakan dengan peluncuran program Prakarsa Jakarta (*Jakarta Initiative*). Program ini bertujuan untuk menyehatkan kembali perusahaan-perusahaan swasta melalui program restrukturisasi utang. Dengan demikian, setelah perusahaan-perusahaan tersebut menjadi sehat, sektor riil diharapkan kembali bisa bernafas.

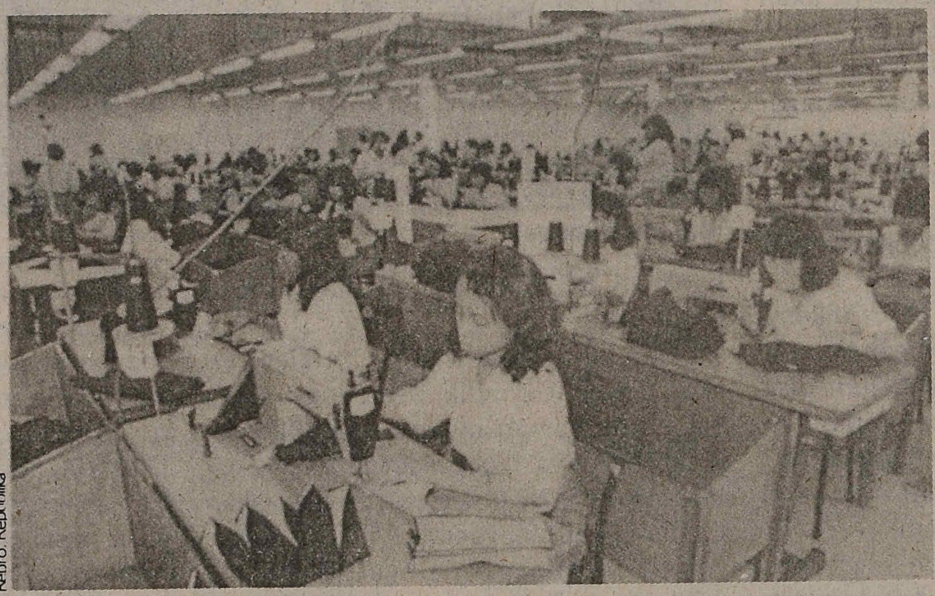

■ **Buruh di Sektor Industri:** Mencoba membenahi sektor swasta

Pada dasarnya, program ini merupakan upaya untuk mencari penyelesaian masalah utang domestik atau asing kepada perbankan domestik, di luar pengadilan. Selama ini, penyelesaian lewat pengadilan dianggap tidak menguntungkan, karena pengutang dan pemberi utang cuma akan mendapatkan sisa-sisa aset perusahaan yang sudah bangkrut. Cara yang dianggap bijaksana adalah, melakukan negosiasi ulang tentang penyelesaian utang. Misalnya, dengan memperpanjang tanggal jatuh tempo. Namun, bukan berarti si peminjam dapat berbuat semaunya setelah mendapatkan keringanan, ia mesti melaksanakan restrukturisasi di bawah supervisi satuan tugas yang akan dibentuk pemerintah.

Apakah program ini adalah awal bangkitnya kembali sektor riil di Indonesia? Masih diragukan. Sebab, pendekatan berbau "IMF" ini, dinilai belum cukup komprehensif (peluncuran Inisiatif Jakarta didampingi oleh Direktur IMF untuk Asia Pasifik Hubert Neiss). Bunga bank pun masih tetap tinggi —padahal, inilah penyebab utama *mandeg*-nya sektor riil.

Di samping itu, seperti halnya program-program IMF lainnya, Prakarsa Jakarta dibuat dengan kecenderungan menguntungkan negara-negara besar di balik IMF. Restrukturisasi di perusahaan biasanya dilakukan supaya yang bersangkutan "lancar bayar utang." Soal kelancaran produksi dan distribusi sektor riil, urusan belakangan. Dalam pandangan ekonom kritis Sritua Arief, utang tersebut kembali akan dinikmati pihak asing dan bebannya ditanggung rakyat Indonesia.

Untuk membangunkan sektor riil di Indonesia, tampaknya tak bisa terus menerima mentah-mentah resep yang baku. Mesti ada strategi yang bertumpu pada kaki sendiri. Karena tak ada resep IMF yang menyediakan pasar bagi produk-produk Indonesia —taruhlah di Amerika Serikat. Padahal, produktifitas sangat tergantung permintaan pasar, sementara umumnya permintaan di dalam negeri dan pasar regional sedang lesu.

Mengharapkan IMF berbaik hati untuk membujuk negara-negara anggotanya menjadi pasar bagi produk Indonesia, pasti sulit. Apalagi, sebelum krisis, Indonesia sering dianggap pasar potensial. Amerika Serikat sendiri, meskipun saat ini dianggap memiliki daya serap yang tinggi terhadap produk buatan Asia, dinilai takkan terus bisa bertahan. Soalnya, negeri ini sudah mulai kewalahan menutupi defisit transaksi berjalannya. Lantaran turunnya mata uang negara Asia terhadap dolar AS, barang produksi Asia menjadi sangat murah bila dijual di AS. Sebaliknya, barang-barang AS menjadi mahal di Asia. Akibatnya, impor AS membengkak mengalahkan ekspornya karena serbuan produk Asia.

Namun, bukan berarti tak ada lagi produk dalam negeri yang dapat diserap pasar. Kendati daya beli masyarakat melemah di seluruh dunia, produk pangan sebagai kebutuhan mendasar tetap akan diperlukan. Begitu pula beberapa produk pertambangan maupun sumber daya alam lainnya. Orang bisa menunda beli mobil, tapi tidak untuk makanan.

Tampaknya, di sinilah strategi pengembangan sektor riil mesti dilakukan. Kata pengusaha asal Sulawesi Selatan Jusuf Kalla, "Ketatnya persaingan di produk industri, kelak, akan memberi kemenangan kepada negara-negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah, termasuk Indonesia." Sungguh bodoh membiarkannya kembali dikuasai pihak asing, seperti di jaman kolonial dulu. ■

Sita Dulu Adili Belakangan

Sejumlah bankir harus membayar bantuan likuiditas Bank Indonesia kalau tak ingin masuk penjara. Ada juga yang harus membayar, namun diusut pula.

Bob Hasan akan menyerahkan PT Kiani Kertas dan sejumlah perusahaan lainnya di bawah Grup Nusamba untuk nomboki utang Bank Umum Nasional (BUN) kepada Bank Indonesia. Bob nampaknya sudah pasrah atas nasib yang akan menimpanya. Selain harus menghadapi ancaman penjara hingga sepuluh tahun, Bob harus rela melepas sejumlah perusahaannya. Bob, yang kini jadi tersangka dalam kejatahan perbankan diwajibkan melunasi Bantuan Lunak Bank Indonesia (BLBI), sebelum ditentukan lagi apakah kasusnya akan diteruskan ke pengadilan atau tidak. Bob diduga menggelapkan Rp50 triliun dana dari BUN ketika ia menjabat sebagai Presiden Komisaris di bank yang semula milik keluarga Ongko itu. Selain berjanji akan menyerahkan Kiani, pabrik pulp dan kertas di Kalimantan itu, Bob juga berjanji tak akan kabur ke luar negeri.

"Jumlah dan BLBI yang harus dikembalikan masih dalam perundingan dengan Kejaksaan Agung. Jadi saya belum bisa memastikan apakah aset Kiani Kertas dan beberapoa perusahaan Grup Nusamba itu cukup atau tidak," ujar Bob di kantor Kejaksaan Agung, pekan silam.

Selain Bob, Samadikun Hartono, pemilik Bank Modern dan bos Modern Grup akan menyerahkan aset-asetnya untuk menutup dana talangan BI. Samadikun, juga masuk dalam daftar tersangka. BCA lain lagi, bukan Liem Sioe Liong yang berjanji akan menyerahkan aset-asetnya untuk mengganti sekitar Rp24 triliun bantuan likuiditas yang diberikan BI ketika bank itu terkena *rush*, namun pemerintahlah yang mengancam akan menyita PT Indofood Sukses Makmur, PT Indocement dan PT Indomobil International. Itu jika Liem tak bisa melunasi BLBI itu hingga 21 September ini. Pemerintah juga mengancam akan mengambilalih Gajah Tunggal, perusahaan milik Syamsul Nursalim yang banknya, BDNI ditutup dan harus membayar BLBI.

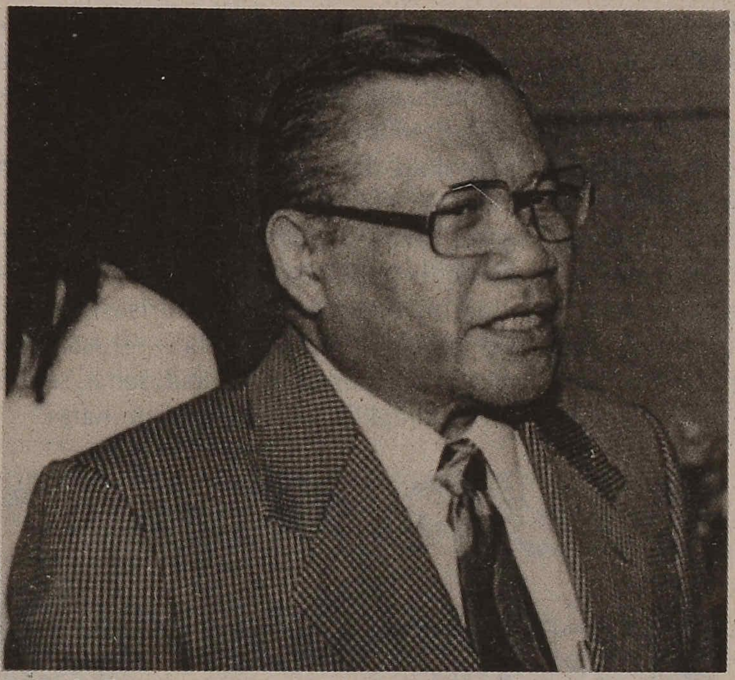

Photo: Istimewa

■ Sudwikatmono

Tiga perusahaan milik Om Liem itu akan langsung dimiliki pemerintah kalau Salim tak mampu membayar BLBI tepat pada waktunya. Dua pekan lalu, Ginanjar Kartasasmita, Menko Ekuin, mengatakan tak berminat mengambil PT Kiani Kertas namun berminat pada tiga perusahaan milik Om Liem itu.

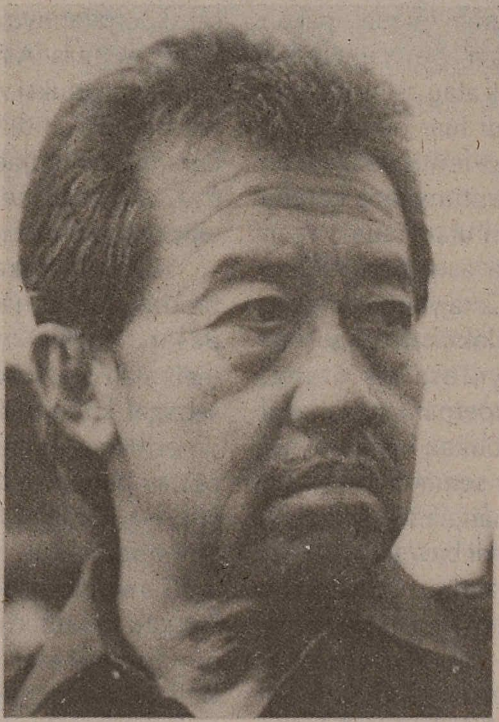

Photo: Istimewa

■ Bob Hasan

Tiga perusahaan Salim yang disebut-sebut Ginandjar itu, menurut sumber di Grup Salim, tak cukup untuk membayar BLBI yang telah dikucurkan Bank Indonesia. Apalagi, PT Indofood dan PT Indomobil masih memiliki hutang sebesar Rp18 tiliun di BCA, misalnya untuk membeli peralatan PT Bogasari.

BI bisa saja buntung kalau BLBI yang telah dikucurkan itu tak kembali lagi. Menyita aset memang hanya salah satunya. Repotnya, kalau para pemilik bank itu tak mampu mengembalikan BLBI, kemudian aset-aset disita, BCA dan Danamon misalnya akan jadi milik pemerintah. Nah, bagaimana mengelo-lanya? Mengelola tujuh bank negara saja kewalahan, pemerintah malah hendak menyusutkannya menjadi tiga saja. Kini malah akan ditambah dua lagi.

Aset-aset yang disita mungkin juga tak mencukupi. Aset Bank Danamon saja, yakni yang berupa gedung-gedung hanya bernilai Rp9 triliun tak cukup membayar BLBI yang sebesar Rp20 triliun. Sejauh ini Bank Indonesia sudah mengucurkan BLBI lebih dari Rp100 triliun, angka yang jika dibelikan beras cukup untuk menahan jarah-jarahan beras yang mulai terjadi di berbagai tempat.

Penyitaan aset kini diutamakan sebelum tindakan hukum diterapkan untuk para koruptor. Model ini nampaknya akan diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Djoko Ramiadji misanya harus menyerahkan jaminan sebesar Rp30 miliar dalam kasus penerbitan surat berharga palsu yang dianggap merugikan negara. Namun, model ini memiliki kelemahan karena bisa dijadikan tawar-menawar apakah seorang koruptor bisa lolos dari jeratan hukum atau diperingan tuntutan hukumnya.

Kalau Bob Hasan pasrah dituduh korup dan patuh memenuhi panggilan kejaksaan, tidak demikian dengan Sudwikatmono. Kerabat Soeharto yang seharusnya sudah jadi tersangka dalam kasus kejahatan perbankan di Bank Surya itu kini mengkambinghitamkan Bambang Sutrisno, rekan bisnisnya di Grup Subentra. Sudwikatmono yang baru saja sembuh dari *stroke* setelah lama dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah menuduh Bambang menjalankan bisnis Bank Surya dan Golden Truly secara serampangan.

Sudwikatmono yang di zaman Soeharto berkuasa dulu memperoleh banyak fasilitas, seperti Pertamina dan PLN, berusaha keras berkelit dari jeratan hukum.

"Pengelolaan Bank Surya dan Golden Truly dipercayakan kepada Bambang," ujar Denny Kailimang, pengacara Sudwikatmono. Keinginan lolos dari jeratan hukum juga dilakukan Liem Sioe Liong. Konglomerat kawan dekat Soeharto itu kini menetap di Los Angeles, kota di mana ia memiliki sejumlah perusahaan properti.

Mengapa BI dulu menalangi bank-bank bermasalah, hingga ratusan triliun kalau sekarang kesulitan menagihnya kembali? Katanya, soal ini bagai makan buah simalakama, tidak ditalangi perbankan hancur, ditalangi kocek negara terkuras. ■

Xpos

Diterbitkan oleh:
Komunitas Informasi Terbuka
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: **http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp**
PO.Box 22202 London SE5 8WU, United Kingdom
Ganti ongkos cetak Rp. 1000,- Terbit seminggu sekali

REKAYASA MENJEGAL MAR'IE

Menanti Terjungkalnya Habibie

Para pendukung Habibie menggalang kampanye tandingan melawan gerakan mahasiswa dan kalangan pro-demokrasi. Diramalkan, tak lama lagi, Habibie akan terjungkal dari kursi kekuasaan.

Hari-hari terakhir ini Jakarta dipenuhi spanduk-spanduk peringatan kemungkinkan munculnya kembali komunisme di Indonesia. Spanduk putih rapi itu terpampang dimana-mana dengan bertuliskan: "Negara di ambang bahaya!! Pemberontakan PKI ke 3 ...September 1998". Spanduk itu dikeluarkan oleh Dewan Dakwah Islamiah Indonesia, sebuah organisasi Islam yang selama ini dekat dengan Golkar.

Selain itu, tersebar pula sejumlah spanduk yang dibuat Lembaga Ketahanan Siap Amankan Negeri tercinta Republik Indonesia (LK-Santri). Spanduk-spanduk itu dipampang di seantero Jabotabek, yang terang-terangan memerangi Forum Kota (Forkot), kelompok mahasiswa yang selama ini paling getol menentang Habibie. Bunyi spanduk yang menghujat Forkot itu, antara lain; "Forkot, Kader-kader PKI Dalang Kerusuhan dan Penjarahan", "Akibat Forkot Demonstrasi, Dolar Naik, Harga Sembako Naik, Rakyat Tambah Menderita".Yang menarik, disamping itu, ada pula spanduk yang mendukung ABRI, berbunyi: "Apapun Yang Terjadi, Kami Tidak Lupa Jasa ABRI Menumpas PKI".

Kebanyakan orang tentu bertanya-tanya, ada apa dengan Indonesia sehingga muncul spanduk-spanduk tersebut? Yang pasti, spanduk itu muncul bukan tanpa sebab dan skenario. Sebab ada sebuah disain besar yang melatarinya.

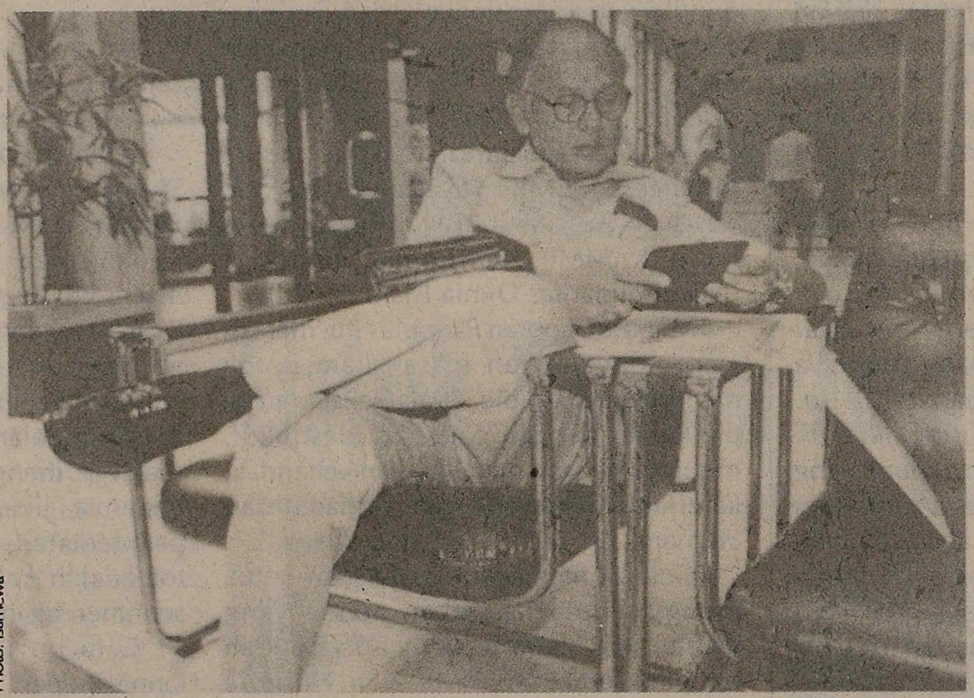
Photo: Ismewa
Habibie: Menghitung hari kekuasaannya

Agaknya, spanduk-spanduk itu berkait dengan makin maraknya aksi-aksi unjuk rasa yang minta agar Habibie turun dari jabatannya sebagai presiden. Pekan lalu, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Forkot kembali mendatangi gedung DPR. Dalam aksi itu sempat terjadi bentrokan dengan aparat keamanan, hingga menyebabkan beberapa mahasiswa masuk rumah sakit lantaran tertusuk sangkur.

Forkot sendiri adalah salah satu kelompok mahasiswa yang mempelopori gerakan reformasi yang menjungkalkan Soeharto, Mei lalu. Mereka adalah gabungan massa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta. Anggotanya berasal dari 40 lebih perguruan tinggi se Jabotabek.

Dalam aksi terakhir di DPR, yang menyebabkan bentrokan keras dengan aparat keamanan itu, selain menolak Habibie, anak-anak Forkot juga menuntut pemerintah menurunkan harga sembako secepatnya. Tuntutan lain, segera dibentuk Komite Rakyat Indonesia (KRI), yang unsur-unsurnya berasal dari kalangan pro-demokrasi.

Gerakan Forkot itu ternyata membuat gerah para pendukung Habibie. Menteri Koperasi Adi Sasono, misalnya, mengancam akan melakukan aksi massa tandingan. Maka, disusunlah strategi untuk memojokkan Forkot. Cara yang paling jitu, apalagi kalau bukan memberi stigma PKI. "Kampanye anti komunis itu untuk memberikan cap kepada para demonstran yang menentang Habibie," ujar sumber *Xpos*.

Beberapa hari sebelum munculnya

Berita Pekan Ini

Banjir Beras? Mustahil ... 3
Kapitalisme Bakal Runtuh ... 5
Habibie Bungkam Oposisi ... 6
ABRI Tak Jaga Jakarta ... 9
"Minimalkan Intervensi ABRI" ... 10
Reformasi & Referendum Timtim ... 12

ABRI

Paling enak jadi tentara di Indonesia. Fungsi bisa ganda, baik sipil maupun militer. Bisa kerja di mana saja, dan mengincar kedudukan politik apa saja. Dan, kalau berbuat salah, seperti menembak atau menculik mahasiswa, paling-paling hanya dibilang salah prosedur.

Kemewahan jadi tentara Indonesia itu ditegaskan lagi dalam RUU Susunan Kedudukan DPR/MPR. Di DPR, yang rencananya beranggotakan 550 orang, 55 diantaranya akan diangkat langsung dari ABRI. Tanpa melalui pemilihan umum.

Bila partai-partai harus berusaha keras untuk merebut satu kursi, yakni harus mengumpulkan dukungan 400.000 suara; maka ABRI dengan lenggang kangkung saja bisa memetik 55 kursi. Artinya, tanpa repot-repot membikin partai, kampanye dan tetek bengek lainnya, ABRI dianggap mewakili 22 juta suara. Padahal, menurut ABRI sendiri, jumlah tentara Indonesia tak lebih dari 500.000 orang.

Hak istimewa ABRI yang dilembagakan dengan RUU itu jelas tak sejalan dengan semangat reformasi. ABRI yang mengaku selama rezim Soeharto dibebani banyak tugas lain, kini nyatanya meminta jatah untuk tugas lain itu.

Jelas, keinginan ABRI untuk duduk secara gratis di DPR itu mesti dihentikan. Partai-partai, aktivis LSM, mahasiswa dan rakyat semua, mesti beramai-ramai meminta dibatalkannya pasal istimewa buat ABRI dalam susunan DPR itu. Seluruh anggota DPR harus dipilih oleh rakyat, melalui pemilihan umum yang demokratis. Dalam Indonesia baru, yang akan kita dirikan di akhir abad ini, hak-hak istimewa suatu golongan mestinya dihapuskan. Kita mesti memperlakukan anggota ABRI seperti warga negara lainnya, yang bisa memilih dalam pemilu, dan bisa dipilih bila mereka ingin terjun ke dunia politik.

Rezim Habibie dan konco-konconya di ABRI, boleh saja mengatur negeri ini sesukanya, tapi jangan membawa-bawa legitimasi rakyat, yang seolah-olah dicerminkan lewat pemilu. Jangan lagi, rakyat dibodohi, seperti yang 32 tahun terakhir kita alami.

Bila masih ada anggota DPR yang diangkat, apalagi sampai 10%, maka sebetulnya pemilu itu tak usah diadakan.

■ LUGAS

spanduk-spanduk itu, sejumlah pejabat pemerintah mengeluarkan suara-suara keras mengecam aksi-aksi mahasiswa. Ketua KISDI, Ahmad Soemargono dalam sebuah mingguan justru membenturkan aksi-aksi mahasiswa itu dengan sentiman Islam. Ia menuduh, dibalik aksi-aksi demo mahasiswa itu adalah perguruan tinggi-perguruan tinggi Kristen dan Katholik. Perguruan yang ditunjuk Sumargono itu adalah UKI, Atmajaya dan STF Driyarkara.

Sehari setelah demonstrasi mahasiswa di gedung MPR/DPR, muncul aksi massa tandingan yang mengatasnamakan Gerakan Reformasi Anti Anarki (Gerak), Forum Penyelamat Reformasi, Gerakan Reformasi Masyarakat Banten, Penyaluran Aspirasi Kaum Buruh Indonesia, dan Masyarakat Peduli Bangsa.

"Kami meminta mahasiswa, buruh, dan masyarakat untuk menghentikan demo," demikian pernyataan jubir demonstran itu. Kelompok yang berasal dari sejumlah ormas Islam ini mengecam aksi mahasiswa yang dinilai menyengsarakan rakyat. Mereka juga mengusung sejumlah poster dan spanduk yang menentang aksi-aksi mahasiswa. "FORKOT = Forum Komunis Total", bunyi salah satu spanduk.

Majalah *Panji Masyarakat*, mengungkapkan bahwa ormas-ormas Islam lain telah berkonsolidasi dan siap untuk menduduki kampus Atmajaya dan Tarumanegara jika mereka tidak segera menghentikan aksi-aksinya. Ormas Islam yang disebut itu adalah Gabungan Pemuda Islam (GPI), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Yayasan Humanika, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI).

Menurut laporan *Panjimas* itu, mereka siap mengerahkan masa Islam untuk mendukung Habibie. "Kalau aksi mereka dilakukan dengan cara-cara destruktif, misalnya dengan memaksakan kehendak, kami akan bereaksi," kata Adrianto dari Humanika.

Gelagat memakai massa Islam untuk mengintimidasi gerakan massa yang menentang Habibie sebenarnya sudah tampak sejak sehari setelah Habibie dilantik oleh Soeharto menjadi presiden. Waktu itu, sejumlah umat Islam dihadapkan dengan demonstrasi mahasiswa yang terus berdemonstrasi menolak Habibie di gedung MPR. Dan bagian dari massa Islam itu adalah kelompok-kelompok yang disebut di atas.

Menanggapi sejumlah tudingan dan represi yang dilakukan oleh pemerintah, anak-anak Forkot menyatakan tidak akan terpengaruh dengan hal itu. "Ya itu resiko kami mahasiswa, ini bumper bagi rakyat," kata Jerry Sarimole, aktivis Forkot, kepada *Xpos*.

Belakangan, gerakan mahasiswa memang sedang diguyur oleh makian dan hujatan dari pemerintah. Mereka —yang diakui atau tidak— ikut mempelopori penurunan Soeharto dan mengantarkan Habibie menjabat presiden ini disebut-sebut telah membuat ekonomi Indonesia semakin parah dan semakin menambah sengsara masyarakat. Tuduhan-tuduhan bahwa mahasiswa didalangi oleh sejumlah kekuatan politik tertentu dan bahkan mahasiswa diberi stigma gerakan komunis. "Mahasiswa dijadikan kambing hitam dari ketidakbecusan pemerintah Habibie mengatasi krisis ini," kata seorang pengamat politik.

Habibie tampaknya memang sedang gusar dengan semakin membesarnya kelompok lawan politiknya. Intimidasi terhadap mahasiswa adalah salah satu sasaran antara dari skenario besar untuk memotong lawan-lawannya itu. Ia sadar, hanya mengandalkan kekuatan Golkar tidaklah cukup. Sementara kekuatan oposisi seperti massa pendukung Amien Rais dan Megawati Soekarnoputri semakin besar saja.

Pekan lalu, misalnya, berhembus kabar sejumlah purnawirawan ABRI menyatakan bergabung dengan PDI Perjuangan. Diantaranya tercatat nama Mayjen (Purn) Theo Syafei dan Mayjen (Purn) Raja Kami Sembiring Meliala. Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa yang berbasiskan massa NU juga menyatakan siap bergandengan tangan dengan Megawati.

Nah, di tengah goyahnya kursi kekuasaan Habibie, ia mencoba meniru cara Soeharto dalam mempertahankan kekuasaannya: mengadu domba rakyat. Hanya bedanya, jika dulu operatornya adalah para tentara, sekarang yang menjadi motor adalah kalangan Islam yang dipacu sentimen agamanya.

Cara itu jelas tak simpatik. Malah, tanpa disadari, sebenarnya Habibie sedang menggali kuburnya sendiri. Karena, cara mengadu domba rakyat tidak akan mengangkat popularitasnya, malah makin memperburuk citranya.

Jadi, bukan tidak mungkin dalam waktu tak terlalu lama nasibnya akan sama dengan profesoinya, Soeharto: terjungkal dari kursi kekuasaan. ■

TURUNKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK

Banjir Beras? Mustahil

Setelah mengatakan persediaan beras cukup untuk empat bulan. Rahardi Ramelan akan membanjiri beras minggu-minggu ini. Janji lagi?

Rahardi Ramelan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang merangkap Kepala Bulog, pekan lalu optimistis membanjiri beras untuk menekan harga yang terus melambung. Menurutnya, Bulog punya persediaan beras sebanyak 2,2 juta ton untuk operasi pasar empat bulan mendatang. Rahardi yakin, jajaran Bulog dan Dolog di daerah-daerah mampu melaksanakan operasi pasar. Optimisme Rahardi ini nampaknya berlebihan. Selama beberapa bulan ini saja, Bulog gagal menstabilkan harga dan tak mampu membanjiri pasar dengan beras yang katanya sudah diimpor. Apalagi di zaman "jahiliah" ini mustahil beras bisa membanjir. Masalahnya adalah stok, darimana beras 2,2 juta ton itu berasal?

Memang, ada beras impor dari Thailand dan beberapa negara lain, namun jumlahnya tak sebesar itu. Kalau *toh* beras sebanyak itu memang ada, apakah beras sebanyak itu cukup untuk membanjiri pasar? Ini yang meragukan, apalagi, kata pakar pangan dari ITP, Rizaldi Boer, di bulan September ini, kebutuhan beras tahun ini yakni, 51 juta ton, sudah habis. Kalau Rizaldi benar, stok beras operasi pasar Bulog sebanyak 2,2 juta ton, maka beras sebanyak itu tak mungkin bisa membanjiri pasar, membasahi saja tak akan mampu. Angka yang disebut Rahardi itu memang beras impor. Ini diketahui dari pernyataan Menteri Pertanian, Soleh Sholahudin. Menurut Soleh dari rencana mengimpor beras 4,1 juta ton, yang baru ditenderkan baru 2,2 juta ton. "Itu pun belum datang semuanya," ujar Soleh. Nah, angka 2,2 juta sama persis dengan angka yang disebut Rahardi. Namun, nampaknya, banjir beras yang dijanjikan Rahardi adalah panen raya yang akan tiba beberapa bulan mendatang. Itu pun kalau panen raya datang beneran. Soalnya, gagal panen *gadu*, yakni panen padi di luar musim hujan, sudah terjadi di pantai utara Jawa Barat, panen para petani diganyang hama tikus. Mereka pasrah dan menunggu datangnya bencana kelaparan.

Kata Soleh, stok beras yang dimiliki pemerintah ada 11 juta ton. Itu cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal lima bulan ke depan, termasuk menghadapi Natal, Tahun Baru dan Bulan Ramadhan. Menurut Soleh, setelah stok beras nasional menyusut lima bulan mendatang, kita tak usah khawatir karena akan datang panen raya. Kalau panen gagal? Itu yang menakutkan. Soalnya, panen raya artinya panen tahun depan harus terkumpul beras sebanyak 48 hingga 52 juta ton. Padahal, menurut para ahli cuaca, akan datang bencana alam yang namanya *La Nina* yang akan mendatangkan banyak hujan dan menenggelamkan sawah hingga tak bisa menghasilkan.

Di tengah krisis beras kebutuhan malah makin meningkat. Ini yang mengherankan.

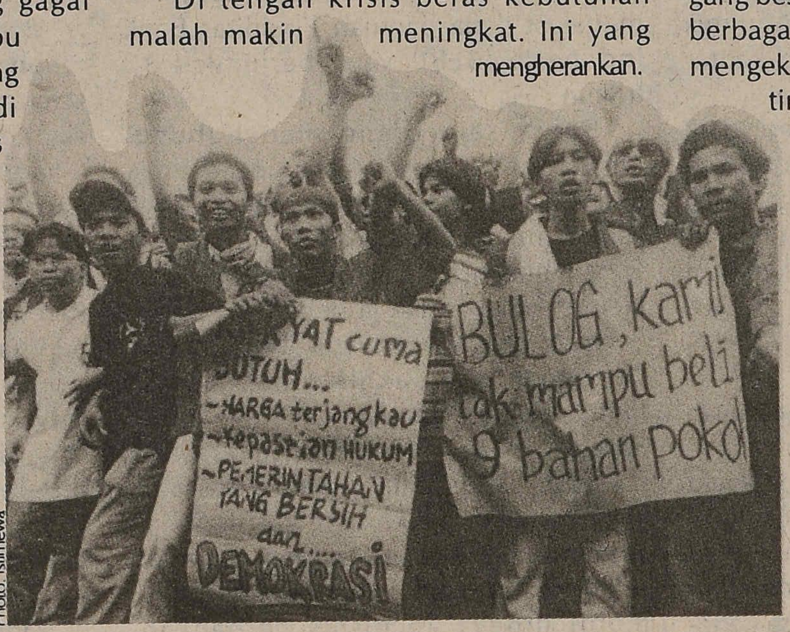

Photo: Istimewa

Namun bisa dijawab dengan mudah. Ihwal apa? Kecemasan masyarakat berada akan munculnya kerusuhan demi kerusuhan. Di bulan September seperti sekarang ini, biasanya stok nasional ada sembilan ton beras yang tersebar di sejumlah gudang Dolog untuk pegawai negeri dan ABRI, operasi pasar Bulog , stok petani yang biasanya berupa gabah dan beras yang tersimpan di rumah tangga.

Nah, kebutuhan di tiap sektor itu kini terus meningkat, terutama beras yang ditimbun di berbagai rumah tangga itu. Namun sebaliknya, stok beras di rumah-rumah masyarakat miskin makin tipis bahkan tak ada. Ini karena harga beras yang makin mahal dan tak terjangkau. Sialnya, stok beras justru makin menipis, impor tak datang-datang dan panen gadu terancam gagal karena serangan hama. Sialnya lagi, di jalur distribusi para pedagang besar menahan beras mereka dengan berbagai alasan, bahkan malah ada yang mengekspornya karena harga beras dunia tinggi sekali yakni sekitar Rp40 ribu per kilogramnya. Bulog juga punya dosa yang tak ter-ampuni karena menyelewengkan beras *delivery order* dan beras operasi pasar. Memang, kini banyak pejabat Dolog, bahkan mantan Kabulog Beddu Amang, diperiksa pihak berwajib, namun bencana sudah datang. Pemeriksaan para pejabat Bulog dan Dolog memang tak segera menyelesaikan krisis beras, apalagi jika panen raya mendatang gagal. Ini yang mengerikan. ■

Listrik Swasta Jalan Terus

Listrik swasta yang terlanjur dibangun, akan membebani PLN. Mengapa tak digusur saja?

Soal listrik swasta ini memang tak kunjung tuntas. Para pemiliknya, kroni-kroni Soeharto seperti keluarga Bakrie, sepupu Soeharto, Sudwikatmono dan anak-anak Soeharto masih bertahan di bisnis ini. Soalnya, proyek-proyek itu sudah jalan seperti, Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Paiton I milik Bambang Trihatmodjo, PLTGU Sengkang, Sulawesi Selatan, yang dikerjakan PT Energy Sengkang yang tak lain, milik keluarga Cendana dan PLTP Salat milik Bob Hasan.Bahkan sudah ada yang berproduksi, seperti Cikarang Listrindo milik Sudwikatmono,

Seluruh kontrak listrik swasta dengan PLN ada 26. Kontrak-kontrak ini yang membuat PLN kelabakan, soalnya, seperti

Listrik Swasta yang Segera Beroperasi

1. PLTU Paiton I (PT Paiton Energy Company)
2. PLTU Paiton II (PT Jawa Power Company)
3. PLTU Tanjung Jati B (PT Cepa Indonesia)
4. PLTU Amorang (PT Tenaga Listrik Amorang)
5. PLTU Sibolga A (PT Tenaga Listrik Sibolga)
6. PLTGU Sengkang (PT Ennergy Sengkang)
7. PLTP Salak (Uncoal Nusamba)
8. PLTP Dieng (PT Himpuna California Energy)
9. PLTP Wayang Windu (PT Mandala Nusantara)
10. PLTD Pare-Pare (PT Makasar Power Corp)

sudah diketahui harga listri swasta ini lebih mahal daripada harga listrik yang dijual PLN kepada masyarakat. Dalam 26 kontrak itu PLN dipaksa membeli listri mahal dan menjualnya dengan murah. Ya, rugilah PLN.

Djiteng Marsudi, mantan Dirut PLN, dulu gigih menentang kontrak-kontrak ini. Ia membatalkan kontrak pembelian listrik Cikarang Listrindo dan Energy Sengkang dan terus menyerukan agar kontrak-kontrak listrik swasta ditinjau ulang, Hasilnya, ia disingkirkan Tanri Abeng, Menteri Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara. Ini juga kesempatan buat Tanri untuk menyingkirkan musuh lamanya itu. Semasa Djiteng jadi bos PLN dan Tanri masih jadi menejer di Bakrie Brothers, usulan proyek Tanri banyak ditolak Djiteng. Misalnya, tawaran Tanri agar PLN memasang alat pengukur listrik otomatis di setiap pelanggan dan tawaran Tanri melalui perusahaan Bakrie, untuk membuka minimarket di setiap kantor Cabang PLN di seluruh Indonesia.

Soal kontrak listrik swasta, seringkali Djiteng tak bisa banyak berkutik karena harga jual listri swasta dan harga-harga kontrak lainnya sudah diputuskan Departemen Pertambangan dan Energi. Jadi PLN hanya ketiban sialnya saja. Hanya beberapa kontrak saja yang ditangani PLN dan bisa ditekan harganya.

Listrik-listrik swasta ini, yang masih kental kolusi, korupsi dan nepotismenya, nyatanya tak langsung surut diterpa angin reformasi. Mereka jalan terus. Bahkan PT Cikarang Listrindo akan menunut PLN karena memutuskan kontrak pembelian secara sepihak. PLN sendiri merasa keberatan untuk membeli karena akan merugi. Dijteng belakangan mengajukan usul agar harga beli listrik swasta dirundingkan kembali. "Kalau tidak PLN yang bangkrut," ujarnya.

Soal harga jual memang jadi pangkal masalahnya. Kontrak listrik swasta pertama yang ditandatangani PLN, ketika itu Dirutnya, Zuhal, yakni Paiton I, harganya US$8,49 sen. Dengan kurs sekarang, harga per Kwh hampir seribu rupiah. Padahal harga jual listrik PLN cuma sekitar Rp230. Kalau harga itu masih dipertahankan, PLN akan bangkrut, karena harus menyubsidi sekitar Rp760 tiap Kwh. Kerugian itu sudah di depan mata mengingat Paiton I akan beroperasi akhir tahun depan, menyusul Paiton II dan delapan listrik swasta lainnya.

Sebaiknya, dengan cara apapun, listrik-listrik swasta itu digusur saja. Atau mereka diminta menyalurkan listriknya sendiri ke konsumen dengan harga yang tinggi dan dengan mata uang dolar AS itu. Biar bisa bersaing secara sehat dengan PLN dan tak menggerogoti BUMN yang sebenarnya bisa kaya itu. ■

Kejatuhan Sang Taipan

Kerajaan bisnis Liem Sioe Liong kini diambang kehancuran. Ia tak sanggup kembalikan dana BLBI sebesar 30 trilyun. Inilah buah bisnis KKN.

Ada waktu bagi kejayaan, ada pula waktu kejatuhan. Bagi mereka yang percaya hidup bergerak seperti siklus, kedua hal yang saling bertentangan itu pasti akan datang. Cuma soal waktu. Entahlah, apakah Liem Sioe Liong, yang disebut sebagai orang terkaya di Indonesia, percaya dengan filosofi takdir yang lahir dari tanah leluhurnya itu. Yang jelas, setelah melewati beberapa dekade kejayaan di masa pemerintahan Soeharto, *Oom* Liem kini berada diambang kejatuhan. Ia tak sanggup melunasi dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang berjumlah 30 trilyun.

Boleh saja orang menghubung-hubungkan kejatuhan *Oom* Liem dengan persoalan takdir. Namun, sebenarnya semua ini ada penjelasan ilmiahnya. Sudah bukan rahasia lagi, bisnis *Oom* Liem dimulai ketika ia berkolusi dengan Soeharto menjadi penyuplai beras Kodam Diponegoro di akhir tahun 50-an. Kemitraan ini kemudian berlanjut, ketika Soeharto menggantikan Soekarno sebagai presiden. Dari sinilah, *Oom* Liem atau Sudono Salim, mendapatkan hak-hak istimewa untuk memonopoli sejumlah sektor bisnis. Mulai dari tepung terigu, mobil hingga ke bisnis perbankan. Kerajaan bisnisnya bertumbuh bagaikan gurita.

Namun, dasar bisnis yang berbau KKN, pondasinya tidak dibangun secara benar. Pelebaran kerajaan bisnisnya bukan dilakukan karena perhitungan ekonomis yang matang, melainkan lantaran perusahaan-perusahaannya mempunyai kemudahan akses terhadap kredit dari bank-bank pemerintah. Bisa diduga, pemanfaatan kredit semacam ini tidak dilakukan dengan bijaksana. Sehingga, membuat daftar kredit macet menjadi kian panjang —itupun banyak yang bisa diputihkan melalui penambahan *plafon* kredit.

Keadaan bertambah runyam, ketika pemerintah memberi kemudahan bagi pihak swasta untuk meraup dana masyarakat melalui pembentukan bank sendiri. Grup Salim yang telah memiliki BCA tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Lewat berbagai iklan di media cetak dan elektronik, BCA menawarkan iming-iming hadiah agar masyarakat mau menabung di bank tersebut. Walhasil, BCA menjadi bank terbesar di Indonesia. Melalui dana itulah, *Oom* Liem kemudian membiayai bisnis dalam grupnya sendiri.

Dapat dibayangkan, pembiayaan dengan cara ini, tentu sangat rentan terhadap manipulasi. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bisa dengan mudah dilanggar. Layak-tidaknya sebuah proyek bisnis didanai oleh BCA pun, tidak lagi dipertimbangkan secara serius. Akhirnya, tanpa disadari para penabung, dana milik mereka telah diboroskan untuk kepentingan Grup Salim.

Bank terbesar di Indonesia itu ternyata rapuh. Hal ini menjadi nyata, terutama setelah krisis moneter menimpa Indonesia. Ketika para nasabah melakukan *rush* —karena dipicu oleh isu likuidasi bank-bank swasta— BCA langsung sempoyongan. Akibatnya, bank itu masuk sebagai daftar pasien Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Anehnya, bantuan likuiditas yang diterima BCA jumlahnya sungguh sangat besar, Rp30 trilyun. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi BCA sebetulnya sudah rentan jauh sebelum terjadinya penarikan besar-besaran dana para nasabah —yang diperkirakan kerugiannnya tak sebesar suntikan BI itu.

Kini *Oom* Liem tak lagi bisa berharap dapat kemudahan seperti di jaman Soeharto —yang sudah lebih dulu tumbang. Tepat tanggal 21 bulan September ini, *Oom* Liem diharuskan mengembalikan dana BLBI yang telah diterimanya. Dan ia sudah memastikan tak dapat membayar kembali Rp30 trilyun itu. Untuk itu ia akan menyerahkan sejumlah perusahaannya pada pemerintah. Diperkirakan *Oom* Liem bakal kehilangan pabrik mie, pabrik mobil, perusahaan pertambangan dan agrobisnis. Meskipun ia masih akan memiliki 20 hingga 25% saham di BCA, kepemilikan sahamnya di sektor lain hanya tertinggal 10%.

Soal apakah *Oom* Liem benar-benar akan ambruk, belum bisa terjawab. Ada yang percaya ia bisa bangkit lagi, karena masih memiliki sejumlah perusahaan di luar negeri. Ada pula yang menganggap performa perusahaannya di luar negeri, sangat tergantung pada keadaan perusahaannya di dalam negeri. Yang berarti, ia sebetulnya sedang sekarat. Ia, semestinya tidak boleh percaya ini semua karena takdir, tapi sebagai akibat dari praktek bisnis berdasarkan KKN. ■

Kapitalisme Bakal Runtuh

Krisis ekonomi yang membelit hampir separoh belahan dunia, menunjukkan rentannya sistem kapitalisme internasional.

Ketidakstabilan moneter di Asia, yang belakangan menular ke Rusia dan Amerika Latin, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap sistem kapitalisme global. Kepercayaan berlebihan terhadap pasar bebas mulai ditinggalkan, bahkan oleh penopang utama sistem ini, seperti IMF dan Bank Dunia. Pertengahan September lalu misalnya, Direktur IMF untuk Asia-Pasifik Hubert Neiss membuat pernyataan "kontroversial" tentang kemungkinan menerapkan kebijakan kontrol devisa untuk menghindari dampak penularan krisis.

Pernyataan Neiss ini dianggap melanggar pakem yang diyakini IMF tentang pasar bebas. Sebab, IMF selalu menganjurkan keterbukaan di setiap negara terhadap keluar-masuknya modal.

Kendati belum dijabarkan secara rinci, menurut Neiss, hal itu mungkin diterapkan lewat kombinasi regulasi yang berhati-hati dan pengenaan pajak terhadap deposito valuta asing. Diharapkan, kebijakan seperti ini bisa melindungi negara-negara dari arus modal jangka pendek yang mudah bergejolak berlebihan dan berdampak terhadap stabilitas mata uang lokal.

Pernyataan Neiss yang dikutip kantor berita *AFP* dan *Reuters* itu, segera berdampak buruk di pasar modal Jakarta. Sehari setelah pernyataan Neiss diberitakan di media massa, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta anjlok drastis 8,9%, turun 28,442 poin menjadi 292,153 poin.

Para investor asing yang khawatir kebijakan tersebut bakal diadopsi Indonesia, segera melakukan aksi jual secara besar-besaran. Mereka menganggap iklim investasi jangka pendek di Indonesia tak akan lagi menarik dan mencemaskan modal yang mereka tanamkan menjadi tidak leluasa bergerak. Meskipun masih ada yang melakukan pembelian dengan nilai Rp139,54 miliar, namun aksi jual para investor asing nilainya lebih besar lagi: Rp204,14 miliar.

Melihat hal itu, Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin, buru-buru membantah anggapan Indonesia akan melakukan sistem kontrol devisa. Sementara Kepala Perwakilan IMF di Jakarta, Kadhim Al-Eyd, juga mengkoreksi berita yang dilansir media massa mengenai pernyataan Hubert Neiss yang dikatakannya sebagai "salah kutip".

Di Indonesia, penerapan sistem ini memang membawa dilema. Bila dilakukan tanpa memperhitungkan dampak lanjutannya, bisa membuat kabur investor asing —khususnya para pemain *short term* atau jangka pendek. Sementara bila tak dilakukan, pasar uang akan terus terombang-ambing dan memberatkan perekonomian dalam negeri. Suku bunga bank dipastikan akan diberlakukan tinggi, yang membuat para pengusaha menjerit menuju kematian. Utang luar negeri dalam dolar AS menjadi terlalu mahal, begitu pula bahan baku serta kebutuhan lain yang mesti diimpor. Dan dampak buruknya —seperti sekarang terjadi— tak cuma bersifat regional, tapi krisis global.

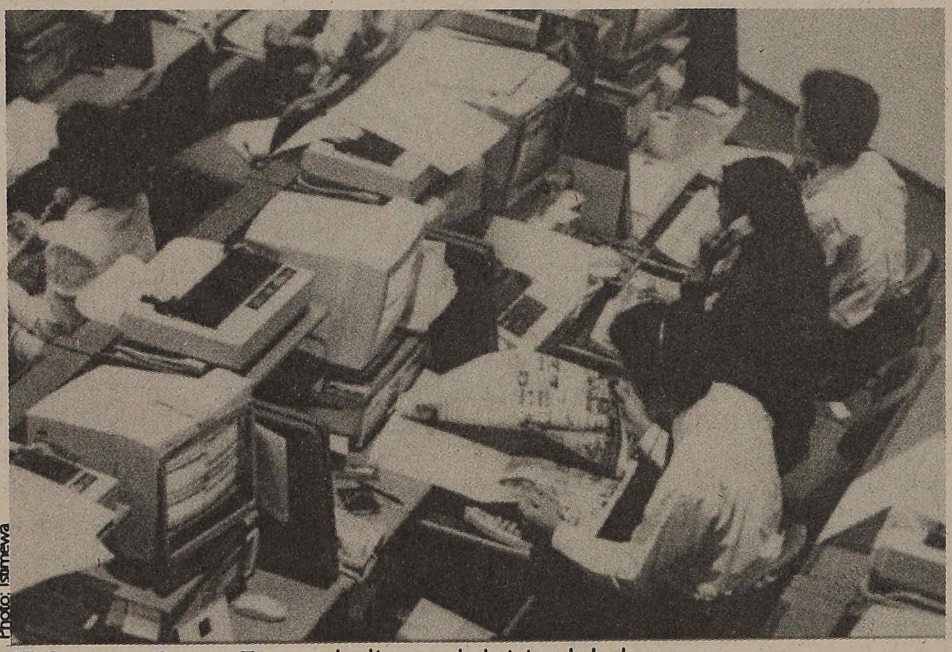
Photo: Istimewa

■ **Suasana Bursa:** Terpuruk di tengah krisis global

Belakangan, tak jauh beda dengan Hubert Neiss, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan diadakannya kontrol devisa yang sifatnya terbatas. Oleh Ketua Kadin, Iman Taufik, sistem ini disebut sebagai semi kontrol devisa. Secara kongkrit, bentuknya ada 2 macam. Pertama, sistem informasi lalu lintas devisa mesti rapi dan jelas. Kedua, semua eksportir yang menerima uang dari luar negeri mesti segera menukarkannya atau menyimpan dolarnya di bank-bank dalam negeri. Sementara untuk modal asing jangka pendek, ia mengusulkan pengenaan pajak.

Melihat usulan yang diajukan, sepertinya Kadin sampai pada kesimpulan bahwa sumber masalah adalah pergerakan *short term money*. Itu sebabnya, investasi jenis ini yang mengalami disinsentif. Sedangkan investor yang menanamkan modalnya untuk jangka panjang, tetap akan diberikan kemudahan. Jadi, mereka tak terlampau khawatir dengan turunnya IHSG, sebagai sesuatu yang sementara.

Namun, bagi mantan Menteri Keuangan Ali Wardhana, kebijakan kontrol devisa hanya bisa efektif bila tak diberlakukan permanen. Ia menunjuk contoh Cile yang dianggap berhasil menurunkan proporsi arus modal jangka pendek dan modal portofolio dibandingkan investasi jangka panjang. Dari pengamatan yang lebih cermat, kebijakan yang dilakukan Cile hanya berfungsi dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut akan menyebabkan turunnya level arus modal masuk, yang berarti menurunnya tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Agaknya, kebijakan kontrol devisa meski hanya sementara, kini mulai dilirik. Sebetulnya, ketika mengeluarkan pernyataan "kontroversial"-nya, Hubert Neiss juga mengusulkan hal yang sama. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak meluas menjadi kebijakan kontrol devisa secara umum. "Kebijakan itu seharusnya dipakai hanya untuk mencegah adanya ekses dan serangan (terhadap mata uang)."

Lepas dari soal jangka waktunya, kebijakan kontrol devisa secara nyata merupakan koreksi terhadap optimisme berlebihan pada mekanisme pasar bebas kapitalisme global.

Seorang "kapitalis" semacam George Soros sekalipun, ketika berbicara di depan *House of Representatives* di Washington DC belum lama ini, mengakui bahwa peredaran modal yang sebebas-bebasnya bisa merusak. Dalam pidatonya yang berjudul "Krisis Kapitalisme Global" ia katakan, sistem kapitalis global perlu segera dikaji ulang serta direformasi, dan tujuan kebijakan publik nantinya adalah mempertahankan stabilitas pasar uang.

Apakah semua ini sekedar koreksi agar kapitalisme menjadi lebih "manusiawi", ataukah ini tanda-tanda awal keruntuhannya? ■

Habibie Bungkam Oposisi

Pasal-pasal karet yang sering dipakai Soeharto kini dipakai juga oleh Habibie. Ketakutan Habibie terhadap lawan politiknya?

Tak percuma Habibie jadi murid Soeharto. Banyak jurus politik yang ditiru Habibie dari profesornya itu. Jurus terbaru yang sedang dipraktekkannya adalah penerapan pasal-pasal hatzaai artikelen yang bisa menjerat siapa saja, atau melakukan teror-teror kepada aktifis yang menentang kebijakannya. Tak.

Korban pertama pasal karet di rejim Habibie adalah Ratna Sarumpaet. Sutradara sekaligus aktifis pro demokrasi ini dipanggil polisi "sebagai saksi" berkaitan dengan tindak pidana penghinaan kepala negara subsidair mengadakan keramaian umum tanpa ijin.

Surat bernomor SP/7468/IX/1998/Ditserse tersebut memang tidak dijelaskan siapa yang jadi tersangka dalam kasus penghinaan kepala negara dan mengadakan keramaian umum tanpa ijin. Dalam surat itu hanya disebut sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pasal 134 KUHP subsidair pasal 510 KUHP yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1998 di Hotel Indonesia.

Kalau dirunut, pada 16 Agustus di Hotel Indonesia itu, hanya ada satu acara yang berkaitan dengan Ratna Sarumpaet, yaitu Dialog Nasional yang dihadiri sejumlah tokoh masyarakat. Materi apa yang dianggap menghina? Itu yang tidak jelas. Namun yang jelas, pada kesempatan itu sejumlah kritik dilantunkan oleh para tokoh yang hadir. Termasuk mengenai ketidakabsahan pemerintah Habibie karena hanya ditunjuk oleh Soeharto. Dan kesimpulan dari dialog itu salah satunya adalah lahirnya sebuah manifesto yang merekomendasikan agar dibentuk pemerintahan transisi yang betul-betul lepas dari campur tangan Soeharto dan Habibie.

Tampaknya, suara dari kelompoknya Ratna Sarumpaet ini sangat diperhitungkan oleh Habibie. Buktinya, Ratna ditakut-takuti dengan pemanggilan polisi dan sejumlah teror lainnya. Perlu diketahui, pada Minggu malam (13/9), ada usaha pembakaran rumah Ratna Sarumpaet. Walaupun tidak sampai membakar keseluruhan rumah, api sempat membakar 3/4 pintu belakang rumahnya di Jl Kampung Melayu Kecil itu.

Selain memakai pasal *haatzaai artikelen* dalam membentengi kekuasaannya, Habibie tiba-tiba saja mengeluarkan Perpu No 2 tahun 1998 yang sangat-sangat anti demokrasi. Tentang "Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum", pada 24 Juli 1998. Konon, keluarnya Perpu ini karena didorong maraknya demonstrasi menentang kepemimpinannya. Nah, karena merasa terdesak itulah, Habibie tanpa memperhitungkan prasyarat keluarnya peraturan pemerintah pengganti UU

Photo: Istimewa

■ **Deklarasi Dialog Nasional:** Dituduh menghina

"Perpu No. 2/1998 jelas beritikad membatasi kebebasan rakyat berekspresi, mengemukakan pendapat dan berkumpul. Padahal unjuk rasa sebagai salah satu bentuk ekspresi penyampaian pendapat adalah hak fundamental rakyat yang tidak perlu diatur-atur atau dibatasi pemerintah," begitu, antara lain, bunyi pernyataan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Perpu No.2/1998 ini, menurut pernyataan AJI, merupakan produk yang inkonstitusional.

Selain membatasi jumlah demonstran dan ijin demonstrasi, Perpu itu ternyata juga memuat sensor pers yang jauh lebih sadis dibanding sebelumnya. Dalam pasal 9 Perpu itu dipaparkan secara tegas bahwa penyampaian pendapat umum, termasuk pemaparan melalui media massa , wajib dilaporkan secara tertulis kepada Polri dalam waktu 3 X 24 jam, sebelum acara dimaksud di mulai. "Perpu ini harus ditolak DPR, karena subtansi perpu itu mengandung jebakan yang membahayakan pelaksanaan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat," tutur pakar hukum pers Prof HA. Muis.

Anehnya, Menkeh Muladi merasa tidak tahu menahu soal pasal itu. "Inisiatif usulan itu datang dari Dephankam, kami tidak mengetahui," katanya.

Jika begitu, berarti pernyataan Adnan Buyung Nasution ada benarnya. Menurut Buyung, "Perpu Unjuk Rasa" itu lahir dari desakan militer. Rupanya, selain masih dibayang-bayangi Soeharto, pemerintah Habibie tak lebih jadi tunggangan politik tentara. ■

Koalisi Nasional Terancam

Kelompok Kerja Sipil Demokratis berhasil menyusun Koalisi Nasional untuk Demokrasi. Tapi koordinatornya terus diprovokasi.

Angin Dialog Nasional di Hotel Indonesia terus bertiup ke Ciawi. Setelah berhasil menelurkan Manifesto Demokrasi dan Kelompok Kerja Sipil Demokratis tanggal 17 Agustus 1998, gerakan ini terus bergerilya untuk menyusun kekuatan dengan menggalang kalangan pro demokrasi yang anti Golkar. Salah satunya adalah dengan pertemuan Pokja di Ciawi tanggal 12-13 September 1998. Hasil konkrit, terbentuklah Koalisi Nasional untuk Demokrasi yang melibatkan unsur-unsur partai, ormas, LSM, mahasiswa, dan aktivis-aktivis yang bergerak di kesenian dan jalur akademis.

Perdebatan menarik terjadi tatkala keputusan harus diambil untuk menentukan strategi perjuangan, antara pilihan parlementer atau revolusioner. Akhirnya putusan diambil dengan jalan *voting* yang dimenangkan oleh strategi pilihan parlementer, selisih tiga suara ketimbang pilihan revolusioner. Pilihan parlementer maupun revolusioner sama-sama tidak mengakui keberadaan MPR dan DPR sekarang ini. Bedanya, pilihan parlementer menyikapinya secara taktis bahwa *de facto* MPR/DPR bisa menentukan produk-produk hukum bagi kehidupan sosial politik masyarakat saat ini dan oleh karena itu perlu dilobby, didesak, bahkan "dipaksa" untuk menghasilkan pemerintahan transisi baru menggantikan Habibie. Sedang pilihan revolusioner menyiapkan MPR/DPR tandingan untuk membentuk pemerintahan transisi yang baru sebagai *counter power* Habibie.

Dari pengorganisasian, gerakan pro demokrasi ini juga berhasil menelurkan format efektif dengan membagi empat

...at berekspresi, dan berkumpul. ... salah satu ben... ian pendapat ... kyat yang tidak ... ibatasi peme... , bunyi pernya... ependen (AJI). ... urut pernyataan ... yang inkons...

...ah demonstran ... pu itu ternyata ... ang jauh lebih ... a. Dalam pasal ... ara tegas bahwa ... mum, termasuk ... massa , wajib ... s kepada Polri ... sebelum acara ... rpu ini harus ... tansi perpu itu ... yang memba... ak masyarakat ... ndapat," tutur A. Muis.

...Muladi merasa ... sal itu. "Inisiatif ... phankam, kami ... ya.

...rnyataan Adnan ... arnya. Menurut ... sa" itu lahir dari ..., selain masih ... rto, pemerintah ... ggangan politik

...cam

...Nasional untuk

...gi pilihan parle... ketimbang pilih... n parlementer ... ama-sama tidak ... MPR dan DPR ... ilihan parlemen... taktis bahwa *de* ... entukan produk... ehidupan sosial ... i dan oleh karena ... ak, bahkan "di... an pemerintahan ... kan Habibie. Se... ner menyiapkan ... ntuk membentuk ... ang baru sebagai

...an, gerakan pro ... hasil menelurkan ... membagi empat

divisi: penggalangan massa, *lobby*, pembentukan opini dan jaringan, serta litbang dan konsepsi. Empat divisi ini berada dalam koordinasi Badan Pekerja dengan koordinator Ratna Sarumpaet. Segala sepak terjang Badan Pekerja digariskan dan dikontrol oleh Presidium yang terdiri dari unsur-unsur organisasi peserta Dialog Nasional.

Meski mencapai kemajuan yang cukup berarti, gerakan ini bukannya tanpa titik lemah. Menurut Widjanarko, salah seorang panitia yang intens mengikuti jalannya acara, ada beberapa kritik yang perlu diperhatikan koalisi ini demi kemajuannya. Pertama, koalisi ini diikuti oleh peserta yang sebagian besar basis massanya tidak jelas. Sehingga, keikutsertaan peserta dalam koalisi ini bisa sekedar petualangan politik belaka. Ini bisa dicegah dengan perhitungan detail kekuatan massa. Kedua, kecenderungan lemahnya para peserta untuk mendengarkan argumentasi yang berbeda dan mengaplikasi konsepnya dalam program yang operasional serta realistis. Kelemahan ini bisa dimaklumi setelah lama dibungkam Orde Baru, membuka telinga untuk mendengarkan saja ternyata sulit, di samping kurang pengalaman untuk merebut dan memenangkan hati masyarakat secara riil. Ketiga, simpul ikatan koalisi ini terpusat pada *person* Ratna Sarumpaet sebagai koordinator. Koalisi yang kuat, lazimnya diikat oleh kesamaan platform perjuangan. "Bila figur Ratna tidak ada, belum tentu koalisi ini jalan. Jelas sebetulnya ini tidak sehat," ujar Widjanarko yang sehari-harinya menjadi manajer perusahaan *advertising*.

Bisa diduga bila kemudian muncul ancaman terhadap koalisi yang dipusatkan dengan cara memprovokasi Ratna Sarumpaet. Ketika pulang dari Ciawi, Ratna mendapati pintu belakang rumahnya dibakar orang. "*Goblok tuh* orang mau nakut-nakutin *gue*," ujar Ratna kepada *Xpos* yang mendatangi tempat kejadian. Dari pagar kayu yang terbakar, kelihatan bila pembakarnya menggunakan bahan bakar minyak. Tetapi karena kayunya yang tua dan lembab, pintu tidak terbakar semua.

Belum cukup membakar pintu. Surat panggilan dari kepolisian dilayangkan kepada Ratna untuk datang sebagai saksi. "*Nggak* mau datang saya. Tersangkanya saja *nggak* jelas. Saksi untuk apa?" jawab Ratna mengomentari surat panggilan itu.

Aneh memang, di jaman reformasi begini tapol-napol dikeluarkan dari penjara agar Indonesia dapat kucuran hutang dari negara donor. Kini ketika jumlah tapol-napol menipis untuk digunakan sebagai aset tawar-menawar mendapatkan hutang, rezim Habibie bermaksud menarik Ratna jadi tapol baru. Begitukah? ■

Ginanjar Biang Korupsi

Ditengah krisis pangan yang membelit negeri, Menko Ekuin ini membeli tiga unit rumah di apartemen Brawijaya, senilai US $ 9 juta dollar AS.

Perhatian masyarakat dalam soal Nepotisme, Kolusi dan Korupsi (NKK), agaknya memang terfokus pada Soeharto. Bahkan, BJ Habibie sudah membentuk tim khusus untuk memeriksa kekayaan bekas presiden itu. Padahal, sebetulnya, kroni-kroni Soeharto juga tak kalah dalam urusan NKK. Mereka sampai kini, banyak yang masih tenang-tenang saja, menikmati hasil penyelewengannya.

Salah satu raja NKK itu adalah Ginanjar Kartasasmita, bekas Ketua Bapenas, yang kini menjabat Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin). Bisnis keluarga Ginanjar memang cukup banyak ditulis media massa. Tetapi, gaya hidup menteri senior yang mengandalkan hasil NKK itu, tak banyak diungkap. Ginanjar dikabarkan punya tiga unit rumah di Apartemen Brawijaya, pemu-kiman mewah di bilangan Jakarta Selatan. Satu unit rumah di apartemen itu, konon harganya US$3 juta. Maka dengan tiga unit, Ginanjar mesti merogoh kocek US$9 juta, atau Rp100 milyar lebih (dengan kurs dollar saat ini).

Photo: Istimewa

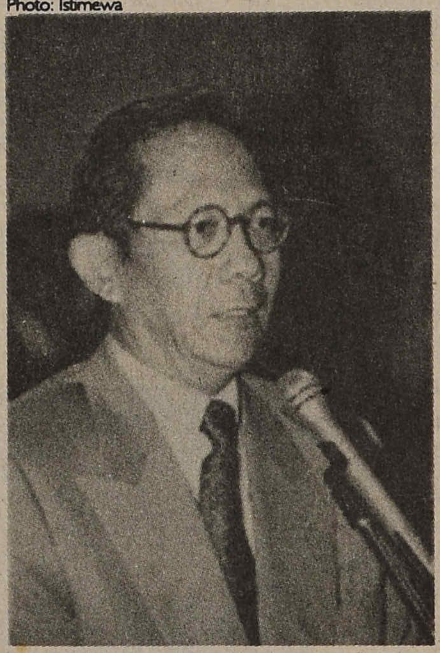

"Darimana Ginanjar dapat uang sebanyak itu kalau bukan NKK," kata seorang pengusaha muda.

Faisal Basri, ekonom Universitas Indonesia, yang juga Sekjen Partai Amanat Nasional, pernah menyinggung nepotisme Ginanjar itu dalam wawancaranya dengan Majalah *Pilar*. Apartemen di Brawijaya itu disebut sebagai salah satu bukti mewahnya gaya hidup Ginanjar. Tetapi, karena komentar itu, keluarga Ginanjar tampak kesal terhadap Faisal Basri. Agus Gumiwang Ginanjar, anak Ginanjar yang menempati salah satu rumah mewah itu, menulis surat kepada *Pilar*. Isinya, bantahan bahwa rumah-rumah itu milik Ginanjar.

Menurut Agus Gumiwang, rumah itu miliknya sendiri. Sedang dua unit lainnya, dimiliki oleh bibi dan keponakan Ginanjar. Tampaknya, dalam teknik-teknik berkelit, Ginanjar tak kalah dari bekas bosnya —Soeharto— yang mengaku tak punya uang se sen pun di luar negeri. Pengakuan Agus Gumiwang itu, malah membuktikan nepotisme Ginanjar yang paling *gamblang*. Ia membagi-bagikan rumah mewah, yang agaknya dibeli dengan uang rakyat itu, kepada saudara-saudaranya. "Apa betul rumah mewah itu milik Agus yang dibelinya sendiri," kata seorang tetangga Agus di apartemen itu.

Agus mengaku membeli rumah itu dengan mencicil. Dalam suratnya Agus malah mengatakan, "Bukan tak mungkin kami harus pergi dari apartemen itu karena tak sanggup membayar." Tetapi, penjelasan itu, memang sulit dipercaya. Apalagi, selama kasusnya tak mencuat ke permukaan, Agus dan saudara-saudaranya tampak tenang-tenang saja. Tak ada tanda-tanda akan diusir dari apartemen mewah itu.

Apartemen mewah Brawijaya itu dibangun oleh Bambang Trihatmojo, untuk melayani orang-orang kaya yang memang berjaya di masa Soeharto. Begitu ekslusifnya apartemen itu, sehingga tiap unit rumah, dilengkapi dengan lift sendiri, yang bila terbuka langsung berada di depan pintu apartemen sendiri. Khusus untuk pembantu, juga disediakan lift sendiri, supaya tidak bertabrakan muka dengan tuantuannya. Selain orang-orang kaya kerabat pejabat, apartemen itu hanya dihuni orang-orang asing.

Ginanjar, selama belasan tahun mengabdi pada pemerintahan Soeharto memang dikenal korup. Terutama ketika ia menjabat Menteri Pertambangan dan Energi. Ia biasa menerima upeti dari para pengusaha yang dilindunginya dan diberi kemudahan dalam mengeksploitasi hasil tambang. Melalui adiknya, Ginanjar juga membangun imperium bisnis, terutama menangani berbagai kontrak pertambangan. Sayangnya, nepotisme Ginanjar itu belum banyak dibongkar, karena perhatian masyarakat masih terpusat pada keluarga Soeharto.

Kapan giliran para "pangeran" itu diperiksa? ■

■ POLITIK

Rekayasa Menjegal Mar'ie

Mar'ie Muhamad dijegal dari pencalonan Ketua Bepeka. Habibie takut sepak terjangnya menggerogoti uang negara menjadi terganggu.

Habibie, apapun dalihnya, tak bisa lepas dari bayang-bayang Soeharto. Banyak praktik yang dilakukan Habibie dan anggota kabinetnya, sebangun dengan yang dilakukan Soeharto. Itu, antara lain, tampak jelas dalam proses pemilihan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka), beberapa waktu lalu.

Dengan berbagai cara, "orang-orang" Habibie di DPR berusaha menjegal Mar'ie Muhamad, kandidat kuat Ketua Bepeka. Pasalnya, mantan Menteri Keuangan, yang dijuluki "Mr. Clean" oleh pers dalam negeri, itu dianggap bakal menyulitkan sepak terjang Habibie dan anak buahnya.

Sejak awal proses pemilihan Agustus lalu, telah ramai terdengar adanya rivalitas antara para calon. Guru Besar FISIP UI, Prof Dr Muhammad Budyatna, menyebutnya sebagai "pertarungan antara Habibie dengan kelompok anti-Habibie." Dalam pandangan pakar komunikasi ini, pertarungan tersebut muncul karena keinginan mengadakan reformasi di tubuh Bepeka terganjal oleh orang-orang Habibie yang tidak menginginkan Bepeka memberikan informasi pada masyarakat tentang praktek kotor dalam pengelolaan kekayaan negara di departemen, BUMN atau instansi pemerintah lainnya.

Salah satu figur yang diidentikkan dengan tokoh reformasi di tubuh Bepeka adalah Jenderal (Purn.) Kunarto, yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Ketua Bepeka. Mantan Kapolri itu merupakan calon terkuat yang diajukan untuk menduduki kursi ketua Bepeka. Namun, belakangan Kunarto memilih mengundurkan diri karena enggan didampingi oleh Rivai Siata, yang dianggapnya sebagai "perpanjangan tangan" Habibie.

Kabarnya, Habibie dianggap sengaja memasang Rivai Siata untuk mencegah kemungkinan Kunarto menjadikan Bepeka sebagai lembaga mandiri dan tidak bertanggung jawab langsung kepada eksekutif. Kunarto dianggap ancaman karena dapat membongkar penyalahgunaan keuangan negara untuk proyek strategis yang dikelola oleh lembaga yang bertahun-tahun dikomandani Habibie, Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT). Padahal, Kunarto sendiri menganggap dirinya kurang bisa melakukan tugasnya dengan baik di masa kepemimpinan Soeharto, karena permintaan Soeharto. Sehingga, ia merasa takkan sanggup bila diminta memeriksa Soeharto.

Setelah mundurnya Kunarto, yang kemudian diikuti oleh Rivai Siata, maka masih tersisa dua nama calon sah yang diajukan DPR-RI: Mar'ie Muhammad yang didukung Kunarto dan Dr Zaki Baridwan, staf Bepeka yang mantan dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi UI. Namun, karena dalam undang-undang harus ada tiga calon yang harus diajukan DPR, hal ini kemudian menjadi polemik.

Pemerintah dan sejumlah fraksi beranggapan proses pemilihan calon mesti diulang lagi dari awal. Sedangkan Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) menganggap mestinya presiden tinggal menetapkan saja salah satu dari dua nama yang tersisa. Alasannya, DPR *toh* telah mengajukan tiga calon dalam rapat paripurna DPR. Jadi yang penting telah diajukan. Jika belakangan salah satu calon mundur, itu justru mempermudah pekerjaan pemerintah. Tinggal memilih ketua dari calon yang tidak mengundurkan diri. Keinginan pemerintah untuk memasukkan nama calon baru, dikecam dan dinilai sebagai pelanggengan budaya intervensi eksekutif.

Photo: Istimewa

■ **Mar'ie Muhamad:** Tak pernah mundur dari pencalonan

Akhirnya, pencalonan kembali dilakukan setelah melewati pemungutan suara. Tiga fraksi masing-masing F-ABRI, F-PDI dan F-KP menginginkan pencalonan diulang kembali, sementara F-PP tetap dengan pendirian awalnya. Tiga nama calon yang kemudian muncul adalah Prof Dr Satrio Budihardjo "Billy" Joedono, Drs. Bambang Triaji, dan Dr Zaki Baridwan. Tiga nama calon wakil ketua adalah Drs. Bambang Triadji, Laksamana Muda TNI I Gde Artjana, dan Drs. Bambang Wahyudi. Yang paling berpeluang menduduki kursi ketua dari sejumlah nama tersebut adalah Billy Joedono, yang dikenal dekat dengan Habibie.

Proses pencalonan ulang ini, jelas-jelas dianggap berbau rekayasa. Tidak saja karena kemunculan nama Billy Joedono, namun terutama karena hilangnya nama Mar'ie Muhammad dari pencalonan, tanpa alasan jelas. Padahal, ia adalah calon sah seperti halnya Zaki Baridwan, yang sebelumnya juga dipilih lewat rapat paripurna. Malah ditiupkan isu di Senayan, bahwa Mar'ie mengundurkan diri dari pencalonan.

Benarkah begitu? Belakangan Mar'ie menyatakan isu itu tak benar; ia sama sekali tak pernah menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan Ketua Bepeka. Untuk itu, pekan lalu, Mar'ie mengirimkan surat pada pimpinan DPR/MPR dan para ketua fraksi. Dalam surat itu, Mar'ie menegaskan bahwa sejak diusulkan sebagai salah seorang calon Ketua Bepeka, ia tak pernah menyatakan keberatannya.

Penegasan sikap Mar'ie ini, akhirnya membuka tabir ketidaktahuan masyarakat tentang proses pemilihan calon Ketua Bepeka yang janggal. Kolega Mar'ie yang juga mantan menteri, Sarwono Kusumaatmadja, mengungkapkan keheranannya terhadap sikap pimpinan fraksi yang begitu mudah percaya isu pengunduran diri Mar'ie, tanpa melakukan ricek pada yang bersangkutan.

Belakangan, untuk "meredam" isu rekayasa ini, pemerintah menawarkan akan mengangkat Mar'ie sebagai Duta Besar RI di Belgia. Tawaran itu langsung ditolak Mar'ie. "Saya memilih tetap mengabdi di dalam negeri saja. Banyak masalah yang harus segera ditangani,' tegasnya.

Rupanya, Mar'ie menyadari tawaran pengangkatan duta besar itu tak lebih taktik Habibie untuk membuangnya. ■

ABRI Tak Jaga Jakarta

Fakta-fakta pembenaran terhadap kealpaan ABRI dalam mengantisipasi kerusuhan semakin transparan. Maukah ABRI mengakuinya?

Kali ini ABRI tak bisa berkelit lagi. Menurut sumber *Xpos*, temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998, yang diperoleh dari investigasi, menunjukkan lokasi kerusuhan di Jakarta ternyata tidak dijaga militer. Kalaupun dijaga, pasukan itu tidak berbuat apa-apa.

Bahkan, ada ketegangan antar pasukan sehingga muncul perintah penarikan pasukan polisi dari lapangan untuk berjaga-jaga di markasnya masing-masing. Juga, ada kekacauan alat komunikasi pada saat-saat peristiwa berlangsung. Istilahnya, kondisi militer saat itu benar-benar mengalami kevakuman. Selain itu, dalam temuannya mereka menyatakan ada perkosaan massal dan juga ditemukan fakta: kerusuhan itu berpola dan terorganisir.

Fakta tersebut sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat, sebab sebelumnya sudah beredar sejumlah sinyalemen tentang hal itu. Namun, menurut sumber yang dekat dengan TGPF, karena informasi tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa jenderal yang bertugas "mengamankan" Jakarta waktu kerusuhan itu dan juga dari para saksi yang telah ditemui oleh TGPF, maka informasi itu menjadi lebih sahih. Para jenderal yang telah diperiksa itu antara lain mantan Pangdam Jaya dan Panglima Komando Operasi, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsudin, Kepala BIA Mayjen TNI Zacky Anwar Makarim, Mantan Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol Hamaminata, dan mantan Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto.

Bocoran kesimpulan TGPF itu sebenarnya telah terkonfirmasi oleh pernyataan Hamaminata sebelumnya, yang secara terang-terangan pernah mengakui adanya kekacauan koordinasi antar pasukan di lapangan. Menurutnya, ada "pasukan samping" yang men-*setting* situasi. "Bagaimana mau menembak, jika di dalam massa sendiri ada pasukan lain," kata Hamaminata ketika ditanya tentang mengapa tidak ada tindakan terhadap perusuh. Tapi, pasukan mana yang ada di dalam barisan perusuh belum terungkap. Yang jelas, Hamaminata mengaku polisi sedang dijadikan bemper. "Mengapa hanya kantor polisi yang dibakar," katanya.

Dalam tulisan *Tajuk* No. 14, September 1998, yang kemudian dipersoalkan oleh Kodam Jaya, diungkapkan bahwa ada skenario khusus untuk operasi kerusuhan itu yaitu dengan dioperasikannya tiga kompi pasukan yang dididik khusus. Tulisan *Tajuk* yang ditengarai sama dengan hasil investigasi TGPF itu disebutkan bahwa Kopassus, Kostrad dan Kodam Jaya adalah instansi yang membina pasukan khusus itu. Untuk operasi tanggal 20 Mei misalnya, pasukan itu akan memakai atribut sipil tapi tetap bersenjata.

Salah satu tugas mereka adalah akan mengacaukan aksi mahasiswa yang rencananya akan digelar di silang Monas tanggal 20 Mei. Mereka sebagian akan menyusup ke barisan mahasiswa dan mengacau, dan jika terjadi kekacauan kompi yang lain akan menembaki massa.

Cerita tiga kompi yang diungkapkan anggota Kopassus kepada sumber Tajuk itu —entah kebetulan atau tidak— sebenarnya terkonfirmasi dengan pernyataan orang yang pernah dekat dengan Soeharto, Yusril Izha Mahendra, tentang skenario pembubaran aksi yang dikomandoi Amien Rais yang sedianya akan diselenggarakan di Monas tanggal 20 Mei. "Hampir saja akan terjadi pembantaian lebih besar dibanding Tianannmen," kata Yusril, seperti dikutip *Surya*.

Repro: Internet (AP)

■ **Tentara & Puing-Puing:** Bertindak setelah semuanya hancur

Soal perkosaan, mereka telah menemukan fakta bahwa ada perkosaan massal ketika terjadi kerusuhan. Namun mereka tidak menyebutkan berapa jumlah korbannya dan juga tidak mengkoreksi jumlah yang pernah dilansir oleh dua lembaga yang berbeda. Bakom PKB mislanya menyebutkan bahwa angka korban perkosaan massal ada 147 orang. Sedangkan Tim Relawan menyebut 152 orang di Jakarta. Untuk ini TGPF tampaknya tidak akan mengungkap sampai jumlah. Tapi hanya akan menyebut bahwa ada fakta perkosaan massal.

Menurut sumber *Xpos*, dalam sejumlah rapat TGPF terjadi perdebatan keras dalam merumuskan kesimpulan tentang kemungkinan adanya kesalahan ABRI saat peristiwa kerusuhan itu. Para wakil ABRI dan birokrat yang ada di TGPF sangat *ngotot* mempertahankan bahwa tak mungkin ABRI melakukan kelalaian itu. Sebab sudah ada perintah dari pimpinan ABRI untuk mengamankan Jakarta. Mereka tidak mau mengakui bahwa dalam prakteknya Jakarta memang tidak dijaga oleh militer.

Mungkin, berdasarkan hal inilah, maka dengan mantap Menhankam/Pangab akhirnya mengajukan gugatan balik Rp50 trilyun kepada LSM-LSM yang menggugat mereka. LSM yang menggugat Pangti, Dephankam, Kapolri, Kapolda Jaya dam Kapolda Jateng itu adalah Solidaritas Nusa Banga, PBHI, Institut Sosial Jakarta, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat yang tergabung dalam Komite Pembela Anti Diskriminasi Ras dan Anti Kekerasan (KDRAK). Mereka mengajukan *legal standing* karena merasa para tergugat telah lalai menjalankan tugasnya dengan tidak melakukan tindakan pengamanan warganya saat terjadi kerusuhan Mei lalu.

Anehnya, dalam eksepsinya para tergugat menolak tuduhan itu dengan membeberkan fakta bahwa mereka telah mengeluarkan sejumlah perintah pengamanan. Bukan mendasarkan pada kenyataan bahwa militer memang tidak berbuat banyak dalam mengamankan Jakarta. Artinya, dengan pengumpulan 17400 lebih prajurit ABRI di Jakarta, jika tidak melakukan tindakan apa-apa, ya percuma saja.

Pernyataan maaf Menhankam beberapa saat setelah terjadi kerusuhan diakui dalam eksepsinya bukan bukti bahwa mereka melakukan kesalahan. Jadi, kesimpulannya tetap saja: militer tidak mau mengakui kesalahan. ■

Andi Malarangeng, Anggota Tim RUU Politik Depdagri:

"Minimalkan Intervensi ABRI"

Dalam waktu dekat, RUU Politik segera akan dibahas di DPR. Perdebatan hangat yang menjadi polemik, salah satunya, menyangkut kursi ABRI di DPR. Secara normatif, sebetulnya sudah tidak ada alasan logis bagi ABRI untuk duduk di parlemen. Legitimasi kehadirannya dengan alasan untuk menjaga keamanan, justru dilanggarnya sendiri. Sebagaimana terbukti, ABRI melakukan kekerasan secara tersistem di berbagai pelosok tanah air, dari Aceh sampai Irian Jaya. Bahkan juga menculik aktivis pro demokrasi yang notebene hanya warga negara biasa tak bersenjata. Tapi *toh*, tim Depdagri yang menggodog RUU Politik untuk dibahas di DPR masih menyediakan 55 kursi bagi ABRI lewat pengangkatan (tanpa pemilu). Apa sebetulnya yang menjadi dasar masih perlunya kursi ABRI itu? Berikut wawancara *Xpos* dengan salah satu anggota tim penggodog RUU Politik usulan Depdagri, Andi Malarangeng, staf pengajar Universitas Hasanudin yang kini lebih kerap di Jakarta dan mengajar di Institut Ilmu Pemerintahan:

Apa dasar legitimasi 55 kursi ABRI di DPR?

Kami dapat masukan dari berbagai sumber. Ada yang minta 75 kursi tetap, ada yang minta dihapuskan saja. Angka 55 juga banyak yang memberikan masukan, misalnya dua dari tiap propinsi plus ketua fraksi. Ada yang usul dua dari setiap komisi, jadi jumlahnya 22. Tapi kemudian, kami sebagai *political scientist* yang menaksir konsekuensi politiknya, kemudian memilih sepuluh persen dari seluruh anggota DPR.

Apa alasan rasional 10 persen?

Buat saya juga nggak masuk akal. Nggak ada di dunia ini anggota DPR dari militer yang diangkat, kecuali di Chile. Disana itu ada empat plus satu Pinoche yang anggota seumur hidup. Dari negeri ini kita belajar perlunya konsesi-konsesi dalam politik. Pinoche mau mengurangi peran militer dengan konsesi ia diangkat sebagai panglima Angkatan Bersenjata seumur hidup. Lalu setiap angkatan ada wakilnya di parlemen. Pada waktu itu, rakyat Chile menganggap itu harga yang layak dibayar kepada Angkatan Bersenjata sebagai konsesi. Nah, kita di Indonesia juga bertanya, berapa harga yang layak ditawarkan? Konsesi politik perlu dilakukan. Ingat, Gus Dur, Cak Nur, dan lain-lain tokoh juga pernah datang berembug dengan Soeharto sebelum jatuh. Pada waktu itu tercapai kesepakatan menerima usul Soeharto, yaitu dibentuknya Dewan Reformasi terdiri dari 45 orang dan kemudian Soeharto secara pelahan akan mundur. Pada waktu itu mereka semua menerima, itulah salah satu bentuk proses konsesi politik.

Photo: Istimewa

Untuk kursi ABRI itu, Tim RUU Politik yang memberi atau ABRI yang memaksa?

Saya tidak bisa jawab secara langsung, tapi kami ini berhitung bila kurang dari itu, maka semua usulan tim akan tidak diterima. Nah bagaimana? Padahal ada banyak substansi lain dalam RUU itu yang harus gol untuk mendorong demokratisasi, misalnya antisipasi *money politics*.

Ada negosiasi dengan ABRI?

Bukan negosiasi, sebutlah itu interaksi. Bahwa ada interaksi dengan pemikiran ABRI, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi yang lebih penting adalah proses politiknya nanti di DPR, maka kami sosialisasikan RUU ini ke masyarakat dengan plus minusnya. Supaya masyarakat tahu. Nah kalau masyarakat tahu plus minusnya, apa akan diam saja? Proses politik di DPR itu sesuatu yang unik. Dengan contoh tadi, boleh saja Gus Dur, Cak Nur, dan Yusril Ihsa Mahendra setuju dengan gagasan Dewan Reformasinya Soeharto. Tapi toh masyarakat di DPR desak terus. Jebol juga akhirnya Soeharto.

Faktor apa yang harus dihitung untuk menjebol militerisme di DPR?

Perhitungkan tarik menarik kekuatan politik yang ada di masyarakat. Ini tidak ada teorinya. Tekanan-tekanan politik tak bisa ditakar, ia cuma bisa diefektifkan. Untuk itu perlu pengaturan, perlu pengorganisasian agar tekanan itu mencapai hasil. Kalau semua non kompromis hasilnya justru anarkis, militer lagi yang kuasa. Untuk komproni maksimal itulah dibutuhkan proses konsesi atau konsensus. Di Thailand misalnya, Prem Tinsulanonda bersedia menyerahkan kepemimpinan ke tangan sipil dengan konsesi 20 persen untuk militer di majelis. Kita juga harus bertanya, berapa persen untuk ABRI? Berapa harga yang pantas sehingga tercapai konsensus?

Persoalannya, mengapa harus ada konsensus?

Karena proses politik yang terjadi di Indonesia saat ini bukan *tumpas kelor* (rezim lama betul-betul habis, *red*). Tidak seperti di Filipina, di mana semua rezim Marcos habis sehingga ia harus cabut ke luar negeri. Anda juga harus melihat kenyataan, bahwa RUU ini diajukan kepada parlemen yang notabene anggotanya adalah orang-orang pilihan Soeharto. Ini ironi dari transisi demokrasi di Indonesia. Kita harus terima.

Apakah adil bila mengingat partai-partai harus berjuang lewat pemilu?

Saya setuju mereka akan protes, mereka punya dasar rasional untuk itu. Pertanyaan itu lebih tepat diajukan ke DPR dan ABRI. Ke DPR karena di forum itu proses finalnya akan terjadi. Ke ABRI juga untuk ditanyakan kepada dirinya sendiri, apakah mereka masih pantas duduk di DPR?

Justru ketika ABRI dalam posisi lemah sekarang, mengapa tim tidak menetapkan target maksimal untuk menghapus kursi ABRI di parlemen?

Memang, kalau kita adakan *poll* saja saya yakin posisi ABRI ada dalam posisi titik nadir. Tapi belum berakhir. Tanjung Priok belum dibuka, di Lampung, di Irian Jaya bagaimana. *This is not the worst.* Maka penting bagi ABRI untuk melakukan reformasi yang mendasar.

Mengapa tim tidak mendesak pencabutan dwi fungsi ABRI, misalnya?

Itu perlu konsensus nasional. Tim sudah tidak punya wewenang lagi ke arah sana. DPR-lah yang bisa melakukan. Sedangkan Tim Depdagri ini tidak punya *bargaining position* untuk itu. Tidak ada alat pemaksa yang kami punya.

Tapi dengan usulan tim itu, bukankah membuka peluang bagi ABRI untuk mendominasi DPR?

Belum tentu. Kalau masyarakat *nggak* setuju dengan ABRI, ya ABRI *nggak* bisa jalan. Sekarang bagaimana masyarakat berani menolak ABRI, itu saja. Dibutuhkan keberanian. Saya lihat sekarang masyarakat berani, bupati didemo, gubernur diusulkan rakyat lewat aksi seperti di DIY. *Nggak* ada yang imun (kebal, *red*) dari perlawanan masyarakat, termasuk ABRI.

Atau tim sebetulnya lebih khawatir kalau ABRI bertindak reaksioner bila tak dapat jatah kursi? Kudeta misalnya?

Kekhawatiran itu tentu ada. Tapi kekhawatiran itu *kan* tergantung persepsi. Persepsi itu tidak objektif sehingga harus diminimalkan dalam pengambilan keputusan. Tapi politik memang tidak bisa jadi objektif. Kalau ABRI marah ya bisa marah *bener*, dan punya senjata. Itu bahaya juga bagi masa depan demokrasi kita. Nah sampai di sini kita memasuki dataran riil politik. Dalam arena riil politik, *power* itu yang diperebutkan. Jelas, ABRI juga tidak mau *power*-nya dalam politik hilang atau dihilangkan begitu saja. Dia pasti pertahankan dan bila caranya dengan kekerasan, kita sudah tidak bisa bicara lagi dengan mereka atas dasar logika atau argumentasi sehebat apapun. Kalau taktik kami, sedikit demi sedikit seperti kita makan bubur panas. Berputar-putar menyisir tapi jelas arahnya, meminimalkan intervensi ABRI dalam kehidupan sosial politik. ■

HADIRI!!

Seminar Sehari
PEMERINTAHAN TRANSISI:
Mempersiapkan Pengganti Habibie

Kamis, 1 Oktober 1998

Penyelenggara MPD
Telpon: (021) 797.4181
Email: mpd98@hotmail.com

Ke Barak Saja, Jenderal!

Banyak pihak usul agar peran sospol ABRI dicabut. Tapi bagaimana supaya tidak bikin ABRI pilih kudeta?

Tuntutan agar ABRI tidak mengutak-utik soal sosial politik kini muncul tanpa basa-basi. Tuntutan itu tak lagi dibungkus dengan parodi yang menggelikan seperti dalam film Naga Bonar. Jendral Naga Bonar memang berasal dari rakyat, tapi unsur rakyat yang bagaimana dulu? Kecerdikannya dalam berperang dan berdiplomasi ternyata tak lepas dari asal muasalnya sebagai seorang preman pencopet yang ulung. Begitulah sejarah sang Naga Bonar.

Sejarah juga kerap dipakai sebagai dasar untuk mengakui keberadaan dwi fungsi ABRI. Menurut Kasospol ABRI Letjen SB Yudhoyono, dwi fungsi tak bisa dilepaskan dari proses sejarah bahwa ABRI turut berperan besar sejak perjuangan kemerdekaan sampai proklamasi dan seterusnya menumpas pemberontakan serta menjaga stabilitas keamanan.

■ **Unjuk Rasa:** Tolak dwi fungsi ABRI

Pernyataan Bambang Yudhoyono yang setali tiga uang dengan semua pernyataan pejabat teras ABRI lainnya, dipertanyakan oleh Bambang Widjojanto, Direktur YLBHI, argumentasi historis ABRI sangat mudah digugat. Pertama secara historis, apakah ABRI berjasa dalam perjuangan? "Tidak, Era 45 itu bukan ABRI yang berdwi fungsi. Rakyatlah yang ber-dwi fungsi, selain menghidupi dirinya sebagai warga negara entah bertani atau berdagang, rakyat juga yang mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Yang jatuh sebagai korban dalam perang juga rakyat," ujar Bambang, "Dwi fungsi dengan basis pijakan historis itu hanya klaim saja supaya peran sosial politik ABRI diterima oleh masyarakat. Tahun 1966 juga, yang berjuang itu mahasiswa. Tuntut turunkan harga dan retool kabinet seperti sekarang, tapi kemudian ABRI membonceng bahkan menunggangi."

Alasan sosiologis bahwa ABRI dibutuhkan untuk menjaga stabilitas juga dipertanyakan oleh Bambang Widjojanto. "Menjaga stabilitas itu mestinya membuat warga negara jadi aman, bukannya malah merasa takut. Yang terjadi kan masyarakat takut pada ABRI? Takut dipukul, disiksa, diculik, dan bahkan dibunuh. Apa yang terjadi di Aceh sampai Irian Jaya? Bagaimana dengan korban-korban penculikan? Itu semua ABRI yang melakukan. Bukan oknum, orang ada perintahnya *kok.*" Seru Bambang.

Seruan untuk memperjelas posisi perlawanan juga dikemukakan oleh Andi Arief, salah satu korban penculikan. Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) ini dalam orasi Kemah Keprihatinan Orang Tua Korban Penculikan di YLBHI beberapa hari lalu mengemukakan, "Kalau kita coba sederhanakan masalahnya, siapa sekarang yang menjadi lawan dari gerakan pro demokrasi adalah ABRI dan bukan Habibie. Habibie itu dengan sendirinya akan berhenti jadi presiden kalau ia tidak disetujui Sidang Istimewa MPR atau kalah lewat pemilu. Tapi ABRI jelas punya sistem yang anti demokrasi. ABRI adalah alat represi kekuatan demokrasi rakyat. Tanpa memperhitungkan ABRI sebagai kekuatan anti demokrasi, maka perjuangan kita akan sia-sia karena seluruh tuntutan tidak didialogkan lewat wacana demokratis, sebaliknya malah diredam dengan senjata mereka sebagai bargaining position yang utama."

Maka saat isu ABRI tetap bercokol di parlemen muncul, banyak aksi yang digelar. Salah satunya adalah aksi yang digerakkan oleh aliansi puluhan organ pro demokrasi. Dengan dimotori Komite untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), ratusan demonstran bergerak mulai dari YLBHI di Jl. Diponegoro sampai Kantor Dephankam di Jakarta. Tetapi aksi ini berhenti di tengah jalan Bunderan HI karena kepungan tentara dan polisi. Sempat terjadi dorong-dorongan yang berakibat luka memar di kalangan aktivis. Intinya, mereka menolak peran sospol ABRI karena ABRI justru telah melanggar hak-hak sosial politik warga negara dan juga mengingkari Hak Asasi Manusia di bumi pertiwi ini. Ada jalan keluar? Salah satu poster yang diarak telah memberikan jawaban, "Ke Barak Saja, Jendral!" ■

■ OPINI

Reformasi dan Referendum Timtim

Oleh: Tri Agus S. Siswowihardjo

Reformasi, demikian kata dahsyat yang kini sudah sangat inflatif, menjadikan Indonesia sedikit berubah. Dengan kasat mata kita melihat lahirnya puluhan partai baru, munculnya penerbitan baru dengan kebebasan pers yang lebih luas, berdirinya berberapa lembaga independen untuk mengungkap berbagai kasus yang selama ini dianggap tabu.

Lalu, adakah yang berubah dari pemimpin baru itu mengenai masalah Timor Timur (Timtim)? Pernyataan pertama Presiden Habibie menyangkut Timtim adalah, pemerintahnya tidak akan mundur selangkah pun. Kabinetnya akan tetap meneruskan sikap orde baru yang menganggap masalah Timtim telah selesai. Namun ternyata Habibie sedikit lebih lunak dari Soeharto, profesor politiknya.

Setidaknya ada dua kejutan yang dilakukan pemerintahan Habibie. Pertama tentang usulan pemberian suatu otonomi khusus untuk Timtim. Dan kedua, penarikan sejumlah pasukan tempur dari Timtim.

Tentang usulan otonomi yang melahirkan pro-kontra di kalangan masyarakat Timtim tampaknya tetap dalam kerangka posisi Indonesia yang tidak akan beranjak dari posisi selama ini. Usulan otonomi yang disampaikan kepada Sekretaris Jendral PBB bermuatan tiga pasal bersyarat sebagai suatu paket penyelesaian menyeluruh. Ketiga pasal itu adalah satu, pemberian otonomi khusus; kedua, penarikan pasukan dari Timtim; ketiga, pembebasan Xanana Gusmao. Syaratnya Portugal dan PBB harus mengakui integrasi Timtim.

Photo: Istimewa

Melihat usulan di atas, kita langsung dapat berkesimpulan bahwa Habibie adalah Soeharto dengan wajah yang lebih manis dan tentu saja jenaka. Keduanya tidak mau beranjak dari posisi bahwa hak menentukan nasibnya sendiri rakyat Timtim telah dilakukan lewat Deklarasi Balibo (petisi yang diteken sejumlah partai politik di Timtim, 30 November 1975, yang isinya menyatakan berintegrasi dengan Indonesia).

Usulan otonomi tentu saja menjadikan polarisasi masyarakat di Timtim antara yang setuju otonomi dan yang setuju referendum. Umumnya mayoritas rakyat Timtim setuju otonomi, seperti yang disampaikan para tokohnya, termasuk Xanana Gusmao. Berbeda dengan usulan Habibie yang menganggap otonomi sebagai penyelesaian akhir masalah Timtim, rakyat Timtim menginginkan otonomi sebagai awal menuju penyelesaian damai dan menyeluruh melalui referendum nantinya.

Tentang penarikan pasukan dari Timtim belum lama ini (28 Juli 1998), rupanya Habibie berhasil menipu wartawan dalam dan luar negeri. Karena beberapa hari kemudian (2 dan 6 Agustus 1998) pasukan dari Brimob, Kostrad dan Kopassus yang jumlahnya jauh lebih besar telah mendarat di Lautem dan Manatuto. Selain itu, militer Indonesia di sana juga makin memperbesar jumlah para-militer yang dipersenjatai yang sangat terlatih untuk membuat kerusuhan rekayasa.

Pertanyaannya kini sampai kapan Habibie dan ABRI akan bertahan pada posisinya dengan menolak referendum?

Dampak dari reformasi adalah makin bertambahnya kelompok atau perorangan yang mendukung diadakannya penentuan nasib sendiri bangsa Timtim. Tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Soebadio Sastrosatomo, Sri Bintang Pamungkas, Mochtar Pakpahan dan Amien Rais beserta Partai Amanat Nasional-nya, dengan tegas mendukung referendum. Para tokoh di lingkungan purnawirawan ABRI juga ada yang mendukung, seperti Letjen (Purn) Theo Sjafei, dan Brigjen (Purn) J. Haribowo.

Sementara itu Koalisi Sipil Demokrat yang diketuai Ratna Sarumpaet, di mana berhimpun sekitar 167 organisasi baik LSM, ormas, mahasiswa dan profesi, dalam manifestonya 17 Agustus 1998, juga mendukung referendum. Pada awal September lalu bahkan sebuah pertemuan persiapan Asia Pacific Conference on East Timor (APCET) berlangsung di Jakarta.

Di tengah posisi ABRI yang kian tidak populer karena terungkapnya berbagai kasus seperti penculikan, pembunuhan di Daerah Operasi Militr (DOM), perkosaan dan kerusuhan Mei lalu, maka mau tak mau ABRI harus "legowo" dengan menerima penyelesaian masalah Timtim lewat referendum.

Jika "Revolusi Bunga" di Portugal, 24 tahun lalu, memberi harapan pada dekolonisasi di Timtim, kemudian ditebas oleh Indonesia, apakah Reformasi di Indonesia memberi harapan yang sama bagi bangsa terjajah itu? "Revolusi Bunga" diperani oleh kelompok muda berpikir ke depan, seperti juga kaum reformis kita. Kaum revolusioner dan reformis di mana pun selalu menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang menarik dalam perjuangan reformasi di Indonesia, tampak para aktivis Timtim bahu-membahu bergandeng tangan. Itu terbukti pada beberapa demo besar di Jakarta maupun di Yogyakarta, tak jarang selain ada bendera merah putih juga ada bendera Republik Demokrasi Timor Leste.

Apa yang dilakukan aktivis Indonesia dan Timtim dalam gerakan reformasi telah lama diprediksi oleh Xanana Gusmao, "Perjuangan demokrasi di Indonesia dan perlawanan Timtim, mempunyai tujuan berbeda tetapi musuh yang sama." Xanana Gusmao yakin, bahwa hanya di negara Indonesia yang demokratislah masalah Timtim akan lebih cepat selesai.

Karena itu, tibalah saatnya, bersama-sama menuntuskan reformasi itu. Caranya? Memasukkan masalah Timtim ke bagian tak terpisahkan dari perjuangan gerakan ini. Misalnya, mempertanyakan keabsahan Undang Undang tentang Integrasi tahun 1976 dan Ketetapan MPR tahun 1978 tentang Integrasi Timtim, keduanya berdasar kepada Deklarasi Balibo yang sudah terlegitimasi lagi.

Menuntut ditariknya tentara ABRI dari Timtim karena secara ekonomis tak menguntungkan. Mendorong penyelesaian damai melalui perundingan yang melibatkan tokoh yang amat berpengaruh di mata rakyat Timtim yaitu Xanana Gusmao. Dan, tentu saja mendukung diadakannya referendum di Timtim sebagai penyelesaian paling demokratis dan adil serta dapat diterima dunia internasional. Reformasi total akan mendekati sempurna jika masalah Timtim sudah mendapatkan hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

■ **Staff di Media Relation**
Solidaritas Indonesia untuk Timor Timur (Solidamor)

Xpos

MAHASISWA DITUDUH MAKAR

Diterbitkan oleh:
Komunitas Informasi Terbuka
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: **http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp**
PO.Box 22202 London SE5 8WU, United Kingdom

Ganti ongkos cetak Rp. 1000,- Terbit seminggu sekali

Keluarkan ABRI Dari DPR

Takut tak dibantu dalam pemilu, Golkar setuju pengangkatan ABRI di parlemen. Tetapi, mayoritas tokoh politik ingin ABRI dikeluarkan dari DPR.

Rancangan UU Politik itu sudah sampai di tangan DPR. Salah satu pokok yang menimbulkan perdebatan adalah jatah gratis ABRI di lembaga perwakilan itu. Menurut konsep yang disusun Tim Tujuh, Departemen Dalam Negeri, ABRI mendapat jatah 55 kursi, atau 10% dari jumlah kursi DPR. Tim yang dipimpin Ryaas Rasyid, Dirjen PUOD Depdagri itu, berpendapat, ABRI sebagai kekuatan politik di masyarakat, mesti diwakili di DPR. Dan, karena ABRI ikut mencoblos, mereka diangkat saja.

Tentang kenapa jumlahnya 10%, Depdagri tak memberikan alasan. Padahal, kalau diikuti logika RUU versi Depdagri itu, satu kursi DPR kira-kira mewakili 600.000 penduduk. Dengan matematika sederhana, dapat dihitung, jatah kursi ABRI itu, mewakili 33 juta penduduk. Jumlah itu tentu saja tak proporsional, sebab anggota ABRI dan keluarganya, tak lebih dari 3 juta. "Jadi darimana angka 10 persen itu," tanya seorang pakar politik UI.

Lebih dari sekedar angka-angka, pengangkatan ABRI di DPR itu memang janggal. Namanya saja lembaga perwakilan, maka mestinya semua anggota DPR itu dipilih melalui pemilihan umum. "Masyarakat harus menolak pengangkatan ABRI di parlemen. Sekarang atau tidak sama sekali," tutur Ismail Sunny, pakar hukum yang terlibat dalam penyusunan UU Politik versi Departemen Kehakiman. Dalam usulan Depkeh itu, memang tidak ada anggota DPR yang diangkat dari ABRI. Sikap yang sama ditunjukkan oleh penyusun RUU Politik dari LIPI, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan PB HMI.

Photo: istimewa

■ **Tentara:** Hengkang dari DPR sekarang atau tidak sama sekali

Uniknya, Anas Ubaningrum, Ketua Umum PB HMI yang ikut dalam Tim Tujuh Depdagri, juga tak setuju ABRI diberi jatah di DPR. Sikap itu, tampak dari langkah-langkah politik HMI yang gencar menolak pengangkatan ABRI di parlemen. Jadi dari mana datangnya pasal 11 ayat 3 (b), tentang komposisi anggota DPR yang berbunyi " 55 orang diangkat dari utusan ABRI" itu?

Andi Malarangeng, dosen Universitas Hasanudin yang juga anggota Tim Tujuh, sedikit menguak rahasia itu, dalam wawancaranya dengan majalah *Ummat*.

Menurut Andi, ketika RUU itu digodok di Depdagri, Timnya mengadakan konsultasi dengan ABRI. Konon, Jenderal Wiranto sendiri yang minta agar hak istimewa ABRI di DPR dipertahankan. Bahkan di DPRD-DPRD, yang bila dihitung dengan porsi 10%, anggota parlemen dari ABRI mencapai 1800 orang. "Itu kenyataan politik. Kita tidak merumuskan RUU itu dalam situasi kevakuman politik," ujar Andi.

Logika di benak Tim Tujuh itu, kira-kira : ABRI harus diberi tempat dalam politik, supaya tidak mengacau keadaan. Tetapi, alasan ini memang terasa mengada-ada, bila diingat bahwa selama

Berita Pekan Ini

Militer Dalang Kerusuhan? ... 3
Walau Dilarang, PDI Terus Maju ... 5
Giliran Petani Bergerak ... 6
Lebih Sulit Dari Marcos ... 9
Bisnis Militer Sumber KKN ... 10
Para "Tikus" Mandi Minyak Goreng ... 11

ABRI (II)

Ada dilema dalam mengembalikan ABRI pada peran yang sebenarnya. Setelah puluhan tahun hidup dalam format politik darurat, tampaknya semua orang pun mengidap ketergantungan pada ABRI. "Kita tak bisa begitu saja menyingkirkan ABRI dari peran politik. Sebab mereka akan mengaco," begitu kata sementara pendapat. Tetapi, segera menjadi jelas, pendapat yang mengawetkan rasa takut itu, memang jauh dari kebenaran. Sebab selama ini, dengan memberi porsi politik berlebih kepada ABRI, yang terjadi juga kekacauan.

Mochtar Pabottingi, pakar politik dari LIPI itu, punya rumusan simpatik, tentang bagaimana mengembalikan ABRI pada fungsinya. Ia, jelas-jelas menolak jatah gratis ABRI di DPR; dan perlahan-lahan fungsi politik lain juga mesti dikurangi. Tetapi, menurut Mochtar, langkah itu tak berarti "marjinalisasi" ABRI. Baginya, mengembalikan ABRI pada fungsi hankam adalah tindakan mulia. Sebab, menjaga keamanan negara begini luas, adalah tugas mulia yang tak bisa disambi-sambi.

Tampaknya, yang dibutuhkan memang semacam kesadaran internal di tubuh petinggi ABRI. Bahwa masalah-masalah bangsa tak bisa diselesaikan mereka sendiri. Apalagi dengan pendekatan lama yang hanya mengandalkan "kekuatan" otot.

Sayang, bahwa dari instropeksi ABRI yang berlangsung dalam Seminar "Peran ABRI di Abad 21", di Bandung 22-24 lalu, tak tergambar kesungguhan untuk memperbaiki diri. Masih saja gaya-gaya pengkambinghitaman yang muncul. Bahaya disintegrasi, munculnya kembali komunisme dan isu-isu usang, kini dimunculkan untuk meredam tuntutan reformasi. Dengan cara yang lebih halus, Pangab mengingatkan publik akan bahaya "reformasi yang kebablasan."

Kepada para petinggi ABRI yang sungguh-sungguh kesatria, imbauan zaman ini hendaknya tak bosan-bosan kita sampaikan. Tinggalkanlah fungsi non hankam yang berlebihan, seperti jatah gratis di parlemen dan dominasi pada posisi-posisi sipil, agar kehidupan berbangsa kembali normal. Sekarang, bukan lagi zamannya politik darurat dipertahankan.

■ LUGAS

Soeharto berkuasa, ABRI diberi peranan begitu besar, toh malah menimbulkan korban.

"Tidak termajinalisasi pun membuat masalah. Jadi, tak ada jaminan, bahwa dengan ABRI duduk di DPR maka mereka tidak ngaco," ujar Ekky Syachruddin, anggota FKP di DPR.

Golkar, tampaknya terbelah dalam menanggapi isu kursi ABRI di DPR itu. Mayoritas tokoh Golkar setuju dengan jatah ABRI itu. "Sebab mereka takut, kalau tidak mendukung ABRI, nanti ABRInya tak mau membantu dalam pemilu," kata seorang Ketua Golkar.

Sementara satu faksi pembaharu di Golkar, berpendapat sebaliknya. Mereka ini, beranggapan hubungan Golkar dan ABRI, malah menjadi beban buat partai beringin di masa depan.

"Yang dituding masyarakat sebagai biang krisis ini ABRI, tapi Golkar kena getahnya karena terlalu dekat," kata tokoh Golkar itu. Ia optimistis, tanpa bantuan ABRI, Golkar malah bisa meraih 30% suara dalam pemilu Mei mendatang.

Jadi, peta di parlemen tampaknya sudah jelas. Fraksi Utusan Daerah, Fraksi PDI Budi Harjono, Fraksi KP dan Fraksi ABRI, mendukung jatah 55 kursi untuk tentara itu. Hanya Fraksi PPP yang sampai sekarang bersuara lantang menolak jatah untuk ABRI itu.

"Kami akan berjuang, menolak jatah ABRI itu, sampai titik darah penghabisan," kata Faisal Basir, Ketua FPP di MPR.

RUU itu masih akan dibahas beberapa bulan. Menurut Harmoko, pengesahannya baru akan dilakukan Januari 1999. Tenggang waktu tiga bulan ini, hendaknya digunakan betul oleh semua komponen di masyarakat yang tak menginginkan ABRI diberi hak istimewa di parlemen. Partai-partai baru, mestinya juga turun tangan, bersama rakyat, untuk menolak hak istimewa ABRI itu.

Selama masih ada anggota DPR yang diangkat dari ABRI, lalu apa arti reformasi? Pemilu pun kehilangan maknanya. ■

Pledoi Jenderal Wiranto

Masyarakat semakin kritis menyikapi peran sosial politik ABRI. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia, yang terjadi karena kekuasaan berlebih - tanpa kontrol - di tangan tentara, kini digugat. Mulai dari kasus-kasus Aceh, Timtim, Irian, penculikan aktivis, kerusuhan Mei, orang bisa menemukan jejak sepatu ABRI. Di tengah situasi terdesak - dan tuntutan agar ABRI - melepas peran sospolnya, Jenderal Wiranto berkelit. Berikut beberapa pokok pikiran Wiranto, yang bisa disebut sebagai pledoi menjawab berbagai tuntutan masyarakat:

* Semakin maraknya pengunjuk rasa dalam banyak hal telah membias dari arah dan tujuan reformasi. Ada pihak-pihak yang telah menyentuh keberadaan ideologi Pancasila dan UUD 45. Ini mengganggu stabilitas bangsa dan menjurus pada disintegrasi bangsa

* Semakin marak berbagai hujatan dan tuntutan pelanggaran HAM di tiga daerah operasi Timtim, Aceh dan Irian Jaya, dan terus dikembangkan pada kasus-kasus Tanjung Priok, Lampung, Petrus, penculikan aktivis dan kasus Trisakti. Tema ini terkesan sengaja dilontarkan dan dibesar-besarkan untuk memojokkan ABRI.

* Ada pola sistematik untuk menggusur ABRI dari peran sospol. Sasarannya adalah penghapusan dwi fungsi ABRI. Hendaknya jangan dilupakan, berbagai peristiwa yang melibatkan ABRI di masa lampau, terjadi dalam format politik Orde Baru. ABRI tidak memutuskan sendiri masalah-masalah itu, tetapi pemerintah.

* ABRI di masa depan akan tetap menjadi kekuatan hankam yang profesional; dan kekuasan sospol yang memiliki nilai tambah bagi pembangunan nasional

Membaca butir-butir pikiran Wiranto itu, agaknya memang sulit membayangkan akan adanya perubahan yang substansiil di tubuh ABRI. Apalagi kalau ukurannya untuk mendukung demokratisasi. ■

Bacaan Alternatif
untuk
KAUM
REFORMIS
SEJATI

■ POLITIK

Militer Terlibat Kerusuhan?

Hasil penyelidikan sementara TGPF menduga militer berada di balik kerusuhan Mei. Bakal ada banyak tokoh lagi yang terseret.

Pekan lalu, Muladi Menteri Kehakiman RI, setelah bertemu dengan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mengakui, pemerkosaan terhadap perempuan etnik Cina memang terjadi. Koran-koran dan televisi pun menyiarkannya.

Hampir semua harian dengan nada yang sama menulis: pemerintah mengakui adanya pemerkosaan. Namun, tak lama, Muladi dan Pangab Jendral Wiranto, membantah berita itu. "Berita itu tak benar temuan TGPF" ujar sebuah sumber yang tak mau disebut namanya.

Saat ini, TGPF memang hampir menyelesaikan tugasnya menyelidiki kerusuhan dan kasus laporan pemerkosaan seputar peristiwa 14-15 Mei lalu, baik di Jakarta, Medan, Solo dan Surabaya. Dan temuan TGPF sangat amat menarik. "Ditemukan hubungan antara kasus penculikan, penembakan Tri Sakti dan kerusuhan," ujar sumber itu.

Temuan TGPF itu menyebutkan,

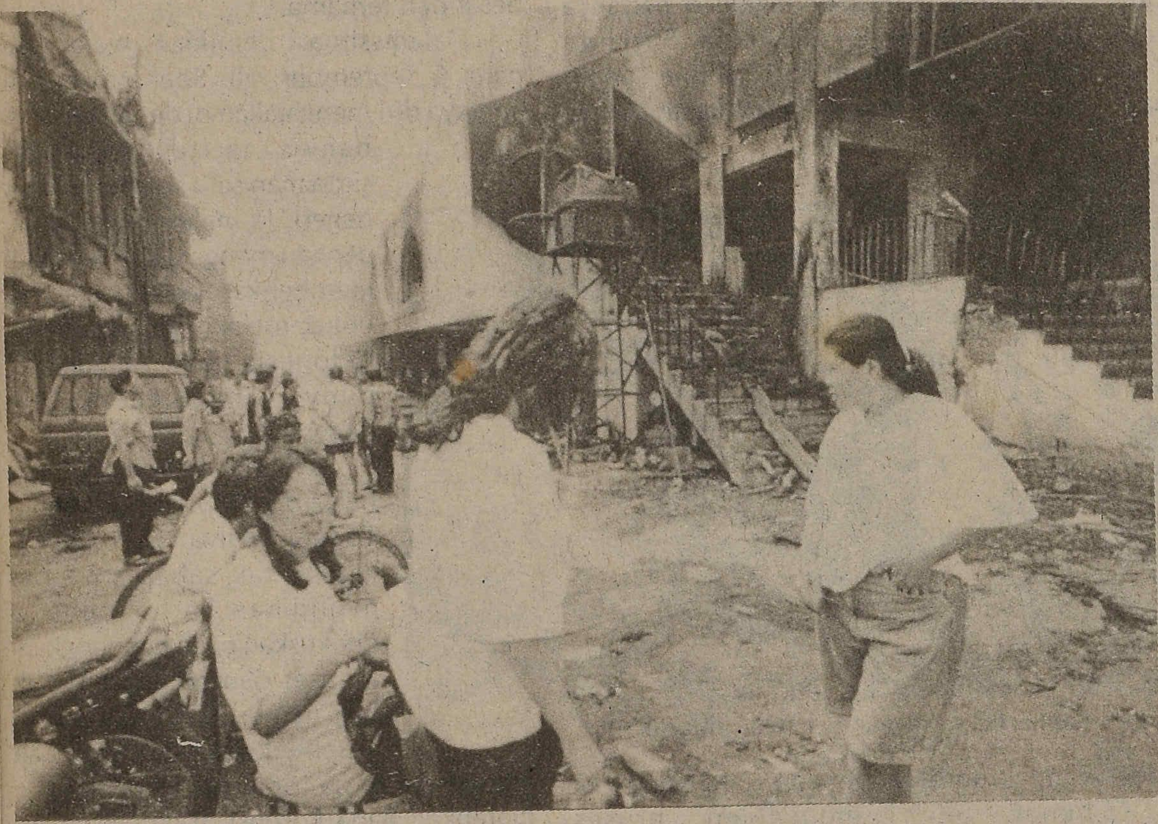

Photo: Istimewa

■ **Puing-puing kerusuhan:** Tentara dalangnya?

dan harus diralat," ujar Muladi dengan muka masam.

Aneh. Padahal, ketika dirubung banyak wartawan, Muladi memang mengeluarkan pernyataan itu. Bahkan ia menyebutkan ciri-ciri pemerkosanya. Tak ada yang salah dengar. Malah semua harian dan televisi memberitakan hal yang sama. Apakah para wartawan dengan alat-alat perekamnya salah? Tentu tidak. Muladi memang mengeluarkan pengakuan itu.

Entah, siapa yang menekannya, mungkin Presiden Habibie atau siapapun yang tengah menguasai pemerintahan ini, hingga Muladi harus menyalahkan wartawan yang sebenarnya tak salah.

Namun, apa sih isi pembicaraan antara TGPF dengan Muladi dan Wiranto? "Banyak hal didiskusikan, terutama kerusuhan dan penjarahan di Jakarta dan Solo diorganisir oleh kelompok terlatih. Bukti-bukti yang dikumpulkan dan diverifikasi dari foto-foto, video dan saksi mata memperkuat kesimpulan itu.

Misalnya, sekelompok orang berbadan tegap yang diduga provokator berkeliaran di seputar tempat-tempat kerusuhan. Mereka ini, tutur sumber itu, melemparkan bom molotov dan batu-batu ukuran besar persis seperti cara tentara melempar granat, yakni diayun dari belakang ke depan. "Mereka sangat terlatih. Tidak sembarang orang bisa melakukannya," ujarnya.

Kelompok-kelompok terlatih yang diduga berasal dari satuan Kopassus ini, tak satu pun tertangkap. Sebagian di antaranya memang berhasil ditangkap polisi, namun dilepas lagi atas permintaan instansi militer tertentu.

"Yang ditangkap Polda Metro Jaya, dua ribu orang itu, murni perusuh dan penjarah. Tentara di lapangan malah melindungi kelompok terlatih itu," tambahnya.

Siapa sebenarnya yang bermain di lapangan ketika itu? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Sumber itu mengatakan, semua kelompok bermain waktu itu. Tak hanya Mayjen Sjafrie Sjamsudin, Pangdam Jaya kala itu dan Letjen Prabowo, Pangkostrad, namun juga kelompok-kelompok yang ikut menumpang gerbong yang melaju dengan kencang itu.

Polisi, kala itu, seperti diakui Mayjen Hamami Nata, mantan Kapolda Metro Jaya, tak bisa berbuat banyak, karena hanya "bertempur" sendirian di lapangan menghadapi jutaan perusuh dan mungkin ribuan provokator terorganisir dan massa yang marah karena terbunuhnya empat mahasiswa Trisakti. Satuan Marinir yang diperbantukan di tempat-tempat strategis malah mendukung massa yang menghajar polisi dan membakar polsek-polsek dan pos-pos polisi.

"Kejadiannya berlangsung sangat cepat hingga para komandan militer tak tahu apa yang harus dilakukan. Termasuk Sjafrie dan Prabowo ketika itu," tambah sumber itu.

TGPF sendiri menemukan sejumlah kasus perkosaan. Menurut salah satu anggotanya, Nursyahbani Katjasungkana, TGPF menemukan sepuluh kasus pemerkosaan. Namun sumber lainnya menyebutkan TGPF menemukan sebelas. Jadi tak sebanyak hasil temuan Tim Relawan yakni sebanyak 168 kasus.

Namun, bagi Marzuki Darusman, Ketua TGPF, berapapun kasusnya menjadi tak penting, jika pemerkosaan itu memang direncanakan oleh negara untuk maksud tertentu. TGPF sendiri belum bisa menduga-duga apakah pemerkosaan itu tergolong state violance atau pemerkosaan biasa yang muncul karena kerusuhan massa.

Namun, bagi TGPF, yang terpenting, ditemukan keterkaitan antara penculikan aktivis, penembakan Trisakti dan kerusuhan Mei. ■

HADIRI!!

Seminar Sehari
PEMERINTAHAN TRANSISI:
Mempersiapkan Pengganti Habibie

Kamis, 1 Oktober 1998

Penyelenggara MPD
Telpon: (021) 797.4181
Email: mpd98@hotmail.com

POLITIK

Lebih Sulit Dari Marcos

Pemeriksaan harta Soeharto di luar negeri, diperkirakan akan sulit. Memakan waktu dan berbelit-belit. Tapi, ia masih mungkin diadili.

Tak ada klimaks cerita. Harapan yang menginginkan pemeriksaan terhadap kekayaan mantan presiden Soeharto, belum tercapai. Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib dan Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan/Pendayagunaan Aparatur Negara Hartarto yang menemui Soeharto di Jalan Cendana pekan lalu seperti kurang percaya diri untuk melakukan pemeriksaan. Mereka bahkan menyebut kunjungan itu sebagai "klarifikasi". Malah Soeharto yang lebih "pe-de" mendatangi Kejaksaan Agung dan menyerahkan konsep surat kuasa pengambilan harta kekayaannya di luar negeri.

Banyak pihak tak yakin keseriusan pemerintah memeriksa orang yang dianggap presiden Habibie sebagai "profesor politik"-nya. Kedekatan Habibie dengan Soeharto dianggap sebagai alasan utama keengganan pemerintah untuk melacak harta kekayaan pribadi yang diperkirakan bernilai 40 milyar dolar AS itu - nyaris menyamai komitmen bantuan IMF pada Indonesia yang berjumlah 43 milyar dolar AS. Di samping, adanya janji Panglima ABRI Wiranto untuk melindungi Soeharto tak lama setelah Habibie mengambil-alih kursi kepresidenan.

Repro: Merdeka

■ **Marcos dan Soeharto:** Kekayaannya sukar dilacak

Lepas dari soal keseriusan pemerintah, upaya untuk membawa pulang harta yang diharapkan dapat mengobati perekonomian nasional ini, memang bukan pekerjaan ringan - malah ada yang menilainya sebagai sia-sia belaka. "Soeharto mungkin saja sudah bangkrut," hal ini diungkapkan oleh seorang pialang saham asal Inggris di Jakarta seperti dikutip *Asiaweek*. Asumsinya, jika harta kekayaan Soeharto diinvestasikan pada perusahaan milik keluarganya yang dilaporkan memiliki utang yang sangat besar pada bank-bank domestik dan asing. Ketidakmampuan membayar utang ini disamakan dengan bangkrut.

Ini mungkin terlalu berlebihan. Masih banyak analis yang percaya, kendati krisis ekonomi hebat telah menimpa Indonesia, setidaknya Soeharto masih menyimpan sejumlah besar kekayaan. Kepada *International Herald Tribune* (*IHT*), Roderick Brazier, konsultan bisnis dari Castle Group yang baru-baru ini mempublikasikan studi tentang kekayaan keluarga Soeharto memperkirakan, kekayaan Soeharto sekarang bernilai 4 hingga 5 milyar dolar AS, ditambah dengan yayasan-yayasannya sebesar 2 milyar dolar AS. Sementara David Hale, dari Zurich Insurance Chicago mengatakan, Soeharto telah memindahkan 8 milyar dolar AS dari Indonesia ke Austria sebelum kejatuhannya.

Soalnya kini, kalaupun Soeharto benar-benar memiliki simpanan "segudang", ada kemungkinan hartanya tak bisa ditarik ke Indonesia. Soeharto memang sangat cerdik - Habibie sendiri mengakuinya. Bisa jadi harta kekayaannya yang diperoleh dengan cara yang tak benar telah mengalami proses "pemutihan". Kemudahan mobilitas modal dalam era globalisasi, membawa kemungkinan ke arah itu.

Sungguh sulit untuk membuktikan bahwa dana tersebut merupakan "barang haram" yang didapatkan melalui perbuatan kriminal. Bank-bank di Swiss dan negara-negara lain, pasti mensyaratkan berbagai macam bukti untuk mengembalikan dana itu ke Indonesia. Itu sebabnya, tim penyelidik harta kekayaan mantan diktator Filipina, Ferdinand Marcos, juga mengalami hambatan dalam usaha menarik pulang harta hasil KKN itu ke negerinya. Dari milyaran dolar AS yang dilaporkan telah ditransfer Marcos ke luar negeri, hanya 570 juta dolar AS yang berhasil dikembalikan. Itupun setelah 12 tahun lamanya, dan masih menyisakan proses hukum di pengadilan.

Menyelidiki Soeharto tampaknya lebih sulit daripada Marcos. Ia diyakini telah menempuh cara-cara tertentu, memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum di Indonesia semasa ia berkuasa. Sehingga, akan sulit mencari bukti kuat yang dapat langsung menunjukkan kesalahannya.

Jika hanya mengandalkan dokumen-dokumen bukti transfer, percuma saja. Sebab, kepemilikan uang tersebut bisa diakali dengan menggunakan nama orang lain. Menurut sumber *IHT*, cerita-cerita keberhasilan membongkar kekayaan hasil kriminal di bank-bank asing, kebanyakan bisa dilakukan karena ada petunjuk dari "orang dalam".

Di masa krisis ekonomi yang kini mulai merambah ke seantero dunia, agak sulit mengharapkan petunjuk semacam itu. Hal ini karena bank-bank tersebut membutuhkan likuiditas yang memadai, supaya bisa tetap bersaing serta menjadi besar dan ternama.

Dalam situasi demikian, wajar jika pada 6 September lalu Soeharto begitu percaya diri mengatakan di depan televisi, bahwa ia tak memiliki simpanan satu sen pun di luar negeri. Ia malah menantang, dengan mengata-kan bersedia memberikan tanda tangannya untuk melakukan transfer ke Indonesia, bila terbukti ia punya simpanan di luar negeri.

Melihat kesulitan yang bakal dihadapi, pakar hukum Todung Mulya Lubis berang-gapan, tak seharusnya penyelidikan harta Soeharto difokuskan pada pengungkapan aset dan rekeningnya di luar negeri. Menurutnya, hal tersebut kontra-produktif dan menyesat-kan. Ia sarankan penyelidikan diarahkan pada korupsi di dalam negeri yang lebih mudah untuk mengungkapnya. Misalnya, pemberian berbagai Keppres yang merugikan negara dan hanya mengun-tungkan keluarga sendiri.

Usulan ini barangkali, akan memudahkan proses pengadilan terhadap Soeharto. Namun, jika yang dikehendaki adalah kembalinya uang dalam jumlah besar untuk mengatasi persoalan ekonomi, langkah semacam ini takkan banyak membawa hasil. Sebab, sebagian besar dana tersebut diyakini telah hengkang ke luar negeri. Untuk mendapatkan kekayaannya itu, sebaiknya tak meninggalkan upaya pelacakan di luar negeri.

Kalau masih tetap temui jalan buntu? Tuntutan lewat pengadilan tetap merupakan pilihan yang relevan. Bukan untuk menarik kembali kekayaannya. Tapi, untuk meminta pertanggungjawabannya selama 32 tahun berkuasa, dalam aspek politik dan HAM. ■

■ POLITIK

Megawati Maju Terus

Ada atau tak ada ijin dari pemerintah, PDI akan menggelar Kongres di Bali. Sementara dukungan dari berbagai kalangan terus mengalir.

Markas PDI Perjuangan pimpinan Megawati di Lenteng Agung Jakarta, kini tak ubahnya seperti *supermarket* yang baru buka. Begitu ramai dengan orang lalu-lalang. Ada juga yang duduk-duduk berkelompok dengan perbincangan politik, kadang berseling makian panas, argumen tajam, dan gelak tawa. Fokus pembicaraan lazimnya berkisar soal persiapan Kongres PDI yang akan diselenggarakan di Bali 8 -10 Oktober mendatang.

Sebagaimana diberitakan banyak media, kongres partai kaum banteng yang ini menghadapi kendala perijinan dari ABRI. Tetapi panitia kongres sendiri tidak begitu menggubris kendala tersebut. Terbukti dengan kesibukan teknis yang terus dilakukan guna menggelar kongres, mulai dari penataan administrasi peserta sampai pengumpulan dana untuk sewa angkutan atau transportasi dari seluruh pelosok nusantara menuju Bali. Ketua panitia kongres, Soetardjo Suryoguritno mengatakan bahwa persiapan materi maupun persiapan fisik telah 85 persen selesai. Diperkirakannya, kongres akan diikuti oleh 1.100 peserta dari seluruh cabang-cabang PDI dengan lampiran rekomendasi resmi hasil keputusan musyawarah di tiap cabang. "Jadi, yang datang ke kongres nanti bukan utusan-utusan rekayasa yang dibiayai oleh instansi lain," ujar Soetardjo.

Ditanya mengenai ijin dari kepolisian yang belum didapatkan, Soetardjo menyerukan, "Kami minta agar pihak kepolisian tidak mempersulit atau menghambat ijin kongres, sebab jika dipersulit artinya pihak pemberi ijin telah terkontaminasi oleh Rejim Orde Baru." Sikap DPP PDI sendiri sudah tegas bahwa mereka akan tetap jalan terus. Hal itu dikemukakan sendiri oleh Megawati dan Alex Litaay di hadapan wartawan dalam dan luar negeri di markasnya (22/9).

"Saya sendiri heran *kok* dihambat terus *sih*," tutur Mega, "jika kongres dipersulit, bagaimana yang namanya hak kedaulatan rakyat, atau menyalurkan aspirasi rakyat itu dapat berjalan dengan baik?". Menyepakati Mega, Sekjen PDI Alex Litaay berkomentar, "bodoh kalau pemerintah tidak mengijinkan kami berkongres. Karena sikap seperti itu tidak akan menguntungkan pemerintah. Bahkan, antipati masyarakat terhadap pemerintah bisa bertambah".

Sebetulnya bagaimana sikap pemerintah terhadap Kongres PDI Perjuangan yang kini tinggal menghitung hari pelaksanaannya? Kapolri Letjen Roesmanhadi menegaskan, "Asal nama partai berlambang kepala banteng itu disebut dengan PDI Perjuangan atau tambahan lain yang membedakan dengan PDI yang telah berkongres di Palu, kami menjanjikan untuk segera memberi ijin". Tambahnya, "kalau Mega mengajukan nama PDI Perjuangan boleh-boleh saja. Yang penting namanya berubah. Mau PDI apa saja *ya* terserah".

Photo: Istimewa

■ **Protes PDI:** Menghadapi ancaman legalitas

Menurut Roesmanhadi, pemerintah tetap menganut asas legalitas. Artinya, nama Partai Demokrasi Indonesia yang diakui pemerintah tetap PDI Soerjadi yang setelah Kongres di Palu kini dipimpin oleh Budi Hardjono. Tetapi legalitas juga akan diberikan kepada Megawati, asal *ya* itu tadi, namanya diubah atau ditambahi sehingga jadi berbeda dengan PDI pimpinan Budi Hardjono. "Kita harapkan agar mereka secepatnya mengajukannya," tutur Roesman.

Strategi asas legalitas inilah yang rupanya digunakan pemerintah untuk menghadapi kekuatan PDI Perjuangan di bawah Megawati. Setelah Mega dijungkalkan lewat Kongres Medan yang memunculkan Soerjadi sebagai tandingan, pemerintah yang notabene orang-orang Golkar dan ABRI terus berupaya meminggirkan peran Mega. Gelombang reformasi di bulan Mei yang menjatuhkan Soeharto pun tak menyurutkan upaya penekanan Golkar dan ABRI terhadap Mega. Dengan strategi legalitas tersebut, Golkar dan ABRI menyudutkan Megawati pada dilema buah simalakama. Bila Mega menolak mengajukan nama PDI yang baru di bawah kepemimpinannya maka peluangnya untuk ikut secara resmi dalam pemilu ditutup dengan alasan tidak punya ijin. Sedangkan bila Mega mau mengajukan nama PDI yang baru, itu berarti dia mengakui keberadaan PDI gadungan pimpinan Soerjadi hingga Budi Hardjono dan menerima bahwa apa yang terjadi di Medan dan Palu adalah sah secara hukum.

Strategi legalitas yang dilematis tersebut bukannya tidak tercium oleh PDI pimpinan Megawati. Sumber *Xpos* mengungkapkan bahwa di kalangan internal PDI Perjuangan pun ada perbedaan pendapat dalam menyikapi strategi pemerintah itu. Beberapa politisi tua PDI berpendapat agar Mega bisa diplomatis menyiasati situasi. Apapun namanya, menurut mereka, partai pimpinan Megawati akan memenangkan Pemilu tahun depan. Mereka melihat bahwa figur Megawati tak lagi hanya mewakili PDI tetapi juga menjadi figur perlawanan terhadap Rejim Orde Baru dan dipercaya menjadi pemimpin Indonesia di masa

mendatang.

Sementara itu di lain pihak, kalangan muda PDI menginginkan perjuangan total. Argumentasinya, PDI Mega itu sudah legal sejak awal jadi mengapa harus mengajukan nama baru lagi. Dengan mengajukan nama baru berarti juga mengakui bahwa PDI pimpinan Megawati selama ini adalah PDI yang salah dan kalah.

Terhadap perbedaan pendapat internal ini, DPP PDI belum memutuskan mau memilih yang mana. Justru tersirat, Megawati tidak mau terjebak dalam strategi Golkar dan ABRI. Sampai saat ini, DPP belum melakukan pembicaraan apapun dengan pemerintah. Malah, Megawati sendiri menolak undangan Habibie beberapa waktu lalu. Dari pengecekan *Xpos* ke Mabes Polri, DPP PDI bahkan belum mengajukan permohonan ijin untuk menyelenggarakan Kongres di Bali. Artinya, dengan atau tanpa persetujuan dari pemerintah, Megawati bakal maju terus menyelenggarakan kongres.

Alih-alih mengupayakan ijin, Megawati melenggang dengan strategi menggalang solidaritas dari dalam dan dari luar PDI, juga dari dalam dan luar negeri. Di tubuh PDI, Megawati meminta kader-kader banteng untuk membasis di wilayahnya. Naga-naganya ini persiapan bila pemilu nanti yang dipakai adalah sistem distrik. Mereka diminta mendirikan posko-posko gotong royong yang bakal menjadi pusaran massa, informasi, dan kegiatan. Sebentar lagi akan terbit tabloid partai yang akan menjadi corong komunikasi timbal-balik antara pimpinan dan massa. Dukungan dana juga mulai mengalir masuk ke kas DPP setelah pemasangan iklan penggalangan dana di berbagai media.

Beberapa mantan jendral yang dulu memimpin fraksi ABRI di DPR seperti Theo Syafei, RK Sembiring Meliala, dan Soenarso Djajusman masuk barisan Mega. Bersama mereka, masuk juga bekas ketua DPP Golkar Jacob Tobing, bekas ketua umum DPP AMPI Widjanarko Puspoyo, bekas sekjen PUDI Yulius Usman, dan para bekas birokrat serta pengusaha lain.

Sementara dari India, Megawati menerima penghargaan Priyadarshni Award yang diberikan langsung oleh orang terkuat kedua di India, Menteri Dalam Negeri LK Advani. Kepada Kompas dan Merdeka, Ketua Priyadarshni Academy, Nanik Rupani mengatakan Mega bukan saja potensial untuk menerima penghargaan itu, tapi memang berpotensi memimpin Indonesia.

"Kalau Megawati diberikan kesempatan, kami yakin dia akan menjadi seorang presiden yang baik," ujarnya sambil tersenyum.■

Giliran Petani Bergerak

Secara serentak para petani melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut hak atas tanah yang dirampas ketika Soeharto berkuasa.

Tak cukup rupanya aksi-aksi lokal pematokan lahan, dilakukan para petani. Secara bersama-sama, mereka mendatangi gedung DPR/MPR di Senayan Jakarta, pada hari Agraria 24 September lalu. Lima ratusan petani yang bergabung dengan mahasiswa itu, mengusung nama Komite Aksi Rakyat Tani Indonesia (KARTI) sebagai organisasi aliansi mereka.

Para petani itu, antara lain berasal dari Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh (PERMATA), Himpunan Petani Mandiri Jawa Tengah (HPM-JT), Organisasi Petani Bali, Komunitas Petani Silo Jember dan Serikat Bina Desa. Mereka didampingi oleh Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI).

Ini merupakan aksi gabungan berskala nasional pertama yang dilakukan petani, sejak Soeharto turun dari panggung kekuasaan. Selama ini, aksi protes mereka lebih bersifat lokal dan parsial. Yaitu, di masing-masing wilayah tempat tinggal mereka, dengan mematok lahan-lahan pertanian yang dulu diambil secara paksa dari mereka.

Pernyataan sikap KARTI pun terlihat berusaha memberi benang merah persamaan akar persoalan sengketa tanah. Mereka menganggap, persoalan yang dihadapi petani Indonesia tidak sematamata persoalan lokal. Terdapat empat hal yang menjadi dasar terjadinya sengketa tanah. Pertama, watak otoriterian Soeharto. Kedua, proses ekspansi dan perluasan skala akumulasi modal domestik maupun internasional, demi kepentingan bisnis Soeharto.

Ketiga, diubahnya strategi serta orientasi pengembangan sumber-sumber agraria dan strategi agraria yang kerakyatan menjadi strategi agraria yang kapitalistik, yang hendak mengintegrasikan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari perkembangan kapitalisme internasional. Keempat, kekacauan sistem hukum keagrariaan selama rezim Soeharto.

Empat hal inilah yang berdampak langsung terhadap perampasan hak-hak rakyat atas tanah. Lahan pertanian lebih banyak diberikan pada kegiatan investasi ekonomi dalam skala besar, yang juga memerlukan pengadaan tanah dalam skala besar. Hak-hak petani atas tanah pertanian maupun hak para petani penggarap, karenanya lebih sering terabaikan.

Para petani mengirimkan 20 perwakilan mereka untuk berdialog diterima oleh Komisi II DPR yang dipimpin oleh Hadi Tjaswadi. Sementara rekan-rekan mereka di depan gedung DPR melakukan atraksi menarik: Sambil berjoget menyayat-nyayat parang di tubuhnya dan tidur di atas tumpukan duri tanpa terluka.

Tuntutan utama yang mereka sampaikan pada para anggota dewan adalah pencabutan Undang-undang Pokok Agraria dan menggantinya dengan ketentuan yang lebih bersifat mendukung kepentingan rakyat. Di samping itu, mereka menuntut agar pemerintahan Habibie segera mengembalikan hak-hak rakyat atas tanah dan sumber-sumber agraria yang selama ini telah dirampas untuk kepentingan bisnis Soeharto dan keluarganya serta segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan.

Dalam kesempatan itu, seorang wakil delegasi mengatakan, para petani akan kembali melakukan aksi jika dalam 3 bulan mendatang kasus-kasus sengketa tanah yang pernah mereka angkat tidak juga diselesaikan. "Rakyat akan melakukan aksi pengambilalihan kembali tanah-tanah yang menjadi haknya," ujarnya.

Beberapa hal berhasil disepakati dalam pertemuan itu. Pertama, para petani dijanjikan untuk dapat bertemu dengan beberapa menteri terkait, seperti Mendagri, Menteri Agraria dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Desember 1998. Kedua, para petani dan mahasiswa diminta untuk mengumpulkan data secara lengkap tentang kasus yang akan secara bersama dibahas nanti.

Pada saat yang bersamaan, di Bogor juga terjadi aksi unjuk rasa 500 petani yang tergabung dalam Solidaritas Tani Indonesia (STI). Mereka adalah petani-petani yang berasal dari Cimacan, Rancamaya, Tapos dan Cijayanti. Para petani menuntut agar tanah garapan yang dirampas dari mereka beberapa tahun lalu, segera dikembalikan.

Di Cimacan, Cijayanti dan Rancamaya, sebagaimana pernah diberitakan berbagai media massa beberapa tahun lalu, tanah petani dirampas untuk pembangunan perumahan mewah. Sementara tanah di Tapos telah menjadi lahan peternakan, yang kini dimiliki oleh Soeharto. Setelah sekian lama dibungkam dan dipinggirkan, memang sudah saatnya petani bergerak menuntut haknya. ■

Mahasiswa Dituduh Makar

Setelah dihujat dan ditandingi, kini dituduh makar. Pemerintah Habibie sudah kehilangan akal dalam merespon gerakan yang menuntutnya mundur?

Tuduhan dan hujatan dari pejabat pemerintah ternyata tidak mengendurkan semangat perlawanan gerakan mahasiswa. Gertakan-gertakan dan tuduhan-tuduhan itu hanya dianggap angin lalu. Buktinya, Rabu (23/6), ribuan mahasiswa 40 perguruan tinggi se Jabotabek yang tergabung dalam Forum Kota (FORKOT) kembali mendatangi gedung DPR. Namun, akhirnya harus puas berada di ruas jalan tol depan gedung itu karena mendapat hadangan keras dari tentara. Bus-bus yang mengangkut massa Forkot tidak diperbolehkan keluar pintu tol dan mendekati gedung DPR itu. Otomatis, lebih dua jam jalan tol itu macet total.

Aksi Forkot hari Rabu itu, tuntutannya masih tetap sama seperti aksi-aksi sebelumnya, yaitu turunkan harga sembako, turunkan Habibie dan bentuk Komite Rakyat Indonesia. Hanya saja, aksi Forkot itu tampaknya ingin menunjukkan bahwa gertakan dan tuduhan komunis tidak mampu membendung aksi mereka.

Pemblokiran massa Forkot di ruas tol ini mengundang sejumlah pertanyaan. Sebab dua hari sebelumnya, ratusan pemuda diperbolehkan melenggang mendekati gerbang DPR. Bahkan ada kesan, mereka dibiarkan liar dengan merusak pagar pembatas jalan dan menodongi mobil-mobil yang lewat jalan depan DPR.

"Tampaknya ada skenario untuk merusak citra gerakan mahasiswa," ujar salah seorang anggota Forkot.

Demonstrasi pada hari Senin itu memang bukan mahasiswa dan bukan pula kelompok Forkot. Tapi sekelompok orang yang didatangkan dari berbagai wilayah di Jakarta Utara. Misalnya dari Tanjung Priok, Rawa Badak, Duren Sawit dan beberapa daerah di sekitarnya.

Isu yang beredar,menyebutkan, mereka demo dengan diberi uang saku antara Rp 10.000-15.000 dan dicarterkan bus. Salah seorang sopir Metromini U42, mengaku dicarter Rp 150.000 untuk mengantar dan menjem-put demonstran ke DPR itu.

"Ada orang yang mengaku mahasiswa dari Borobudur, mereka mengajak kami demo sembako di DPR. Kami diminta mendaftar dan sudah disediakan bus. Karena memang kami ingin protes atas tingginya harga sembako, *ya* kami ikut," tutur Sutardi, warga Duren Sawit yang mengaku berasal dari Cilacap itu.

Namun sesampainya di gerbang DPR, Sutardi kaget ketika beberapa pentolan demo yang ia ikuti itu membentangkan spanduk dukungan kepada Habibie. Karena tahu dikibuli, ia melepas ikat kepalanya yang berlabel "Front Penyelamat Bangsa-DRN" dan menyingkir dari kerumumanan massa.

Pendemo yang kebanyakan dari Jakarta Utara itu memang tidak jelas tuntutannya. Yel-yel yang dikeluarkan kadang berbeda-beda. Ada yang mendukung Habibie, dan ada yang minta agar Habibie turun. Ikat kepala yang asal sumbernya sama tapi tulisannya bermacam-macam. Para pentolannya, menyandang *hand phone*, sebagai alat komunikasinya.

Photo: Istimewa

■ **Forum Kota:** Dituduh komunis

Anehnya lagi, demonstran itu diberangkatkan dari lokasi kantong-kantong PDI Perjuangan. "Akan dikesankan demonstran itu massa PDI Perjuangan," kata aktifis PDI Perjuangan.

Konon, demo itu memang diadakan untuk menandingi demo mahasiswa yang isunya saat itu juga akan datang ke DPR. Tapi demo mahasiswa batal, lantaran isu bahwa mereka akan dibenturkan dengan kelompok massa yang lain, sudah diketahui sebelumnya.

Belakangan, adanya isu bahwa ada sekelompok orang yang bergerilya mendatangi kelompok-kelompok mahasiswa dengan menawarkan dana demonstrasi, santer didengar aktifis mahasiswa Jakarta. Konon, satu kelompok mahasiswa akan diberi uang Rp 2 milyar jika mau demonstrasi dengan sasaran puncaknya pada tanggal 5 Oktober 1998.

"Tapi dilihat dari logika proposal yang diajukan, seperti buatan tentara. Mahasiswa yang masih punya nurani pasti menolak itu. Ini jebakan bung," kata salah seorang mahasiswa.

Aktifis Forkot maupun FKSMJ yang dihubungi *Xpos* mengatakan tidak menanggapi tawaran-tawaran seperti itu. "Kami punya moral, tak mungkin menerima tawaran seperti itu, " kata sumber *Xpos*.

Beberapa mahasiswa menduga, kelompok yang bergerilya ini ingin sekedar mengacaukan gerakan mahasiswa. Agar di antara kelompok aktifis mahasiswa supaya saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

Namun, ada dugaan pula bahwa kelompok tersebut ingin memancing mahasiswa untuk mengadakan aksi-aksi supaya situasi kacau . Setelah kacau, ABRI ingin mengambil peran lebih besar lagi dalam mengelola negara. "Dilihat dari sasaran aksinya 5 Oktober itu kan sudah jelas maksudnya," kata sumber tadi.

Sementara itu tudingan komunis untuk kaum gerakan mahasiswa tetap terus dilancarkan. Kelompok-kelompok seperti KISDI, Humanika, DDI, GPI, PPMI dan sebagainya, masih terus saja bergerilya kampanye anti Forkot.

Tapi belakangan gerakan mereka ditentang kalangan Islam sendiri. Sekelompok intelektual muda Islam yang tergabung dalam Komite Penyelemat Islam dan Reformasi (KPI) memprotes aksi kelompok tersebut. Protes KPI dilakukan dengan mengeluarkan selebaran untuk memurnikan Islam dari gerakan-gerakan politik sekelompok orang itu.

"Islam yang suci telah dipolitisir dan diperalat untuk merusak gerakan reformasi total. Selamatkan Islam yang kini disalahguna-kan untuk kelanggengan orde Soeharto-Habibie," bunyi selabaran itu.

Tapi tampaknya pemerintahan Habibie semakin kalap. Ketua DPA AA Baramuli telah menyarankan jurus baru untuk Habibie dalam membungkam kelompok penentangnya. Yaitu, aksi para demonstran dikategorikan sebagai kegiatan makar. Dan Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto telah berkampanye agar mewaspadai G30S Forkot.

Tuduhan tak berdasar kepada rakyatnya memang sudah menjadi ciri Orde Baru. Dan sekarang ditiru Habibie yang semakin takut dengan gerakan lawan politiknya. ■

Era Jurnalis Independen

Oleh: Lukas Luwarso

Jurnalis Indonesia kini bisa menikmati kebebasan pers setelah tumbangnya rezim otoriter Soeharto, Mei lalu. Era kebebasan seperti saat ini sebenarnya bukan pengalaman baru bagi Indonesia. Setidaknya Pers Indonesia telah menga-lami era serupa, pada tahun 1945 (sampai 1949), ketika merdeka dari Belanda; tahun 1966 (sampai 1974), setelah tumbangnya Sekarno.

Yang baru dari era sekarang adalah diakuinya hak wartawan untuk mendi-rikan organisasi baru di luar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Setelah 52 tahun PWI malang melintang sebagai satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia yang diakui pemerintah (dikukuhkan secara resmi melalui SK Menpen No. 47 tahun 1975). Apa implikasi dari pencabutan ketentuan adanya wadah tunggal organisasi wartawan?

Sedikitnya ada delapan organisasi wartawan baru telah berdiri di luar AJI dan PWI. Yang tercatat di Departemen Penerangan adalah: Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII), Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Himpunan Wartawan Muslim Indonesia (HWMI), Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HPWI), Serikat Pekerja Kewartawanan Indonesia (SPKI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia (HPPI). Jumlah itu masih ditambah organisasi wartawan yang lebih spesifik seperti: Ikatan Wartawan Ekonomi (IWE), atau Forum Diskusi Wartawan Politik, dan menyusul Forum Wartawan Radio (FOWAR), juga Aliansi fotografer.

Bagaimana kita melihat fenomena kelahiran belasan organisasi baru itu? Simptomnya hampir mirip dengan munculnya partai-partai baru (yang jumlahnya kini 85). Ibarat gelegak air yang selama ini terus dibendung dan kemudian jebol, maka para wartawan yang selama ini ter-kungkung dalam satu wadah organisasi—dan wadah itu ternyata gagal menyalurkan aspirasi—kini menemukan momentum untuk berekspresi, melepaskan diri.

Berbagai organisasi wartawan yang lahir, sebagaimana partai-partai, mungkin saja kemunculannya sebagian bersifat reaksioner. Namun kehadiran mereka patut disambut gembira. Sekian lama wartawan Indonesia terkungkung dalam wadah tunggal. Dan wadah tunggal itu terperangkap dalam korporatisme negara. Ia yang terhegemoni oleh negara kemudian balik menghegemoni anggotanya. Kemudian, wadah itu bahkan secara sukarela lebih memilih sebagai operator negara untuk merepresi dan merestriksi, bahkan mengintimidasi, wartawan.

Sesungguhnya, 20 tahun terakhir wartawan Indonesia tidak punya wadah yang bisa mewakilinya dalam memperjuangkan hak-haknya, melindungi dan meningkatkan profesinya. Sebaliknya, wartawan justru dikontrol dan dilumpuhkan secara sistematis oleh organisasi itu. Akibatnya, di bawah rezim Orde Baru, 24 tahun terakhir, pers Indonesia (baca: wartawan) kehilangan nyali. Memang, pemerintah Orde Baru telah menciptakan mekanisme kontrol efektif terhadap pers.

Namun kontrol yang paling efektif, sebenarnya, justru dilakukan oleh orang pers sendiri, melalui Dewan Pers serta organisasi tunggal wartawan (PWI). Mereka yang enggan bersikap independen itu dengan sadar dan bangga memfungsikan diri sebagai operator pemerintah dalam menekan dan mengintimidasi pers. Wartawan, pengurus PWI, lah yang berinisiatif membunuh upaya wartawan eks-Detik, menerbitkan mingguan Simphoni. Mereka pula lah yang mencabut rekomendasi pemimpin redaksi D&R karena mempekerjakan wartawan yang terlibat AJI, mereka pulalah yang meminta perusahaan pers tidak mempekerjakan wartawan AJI. "Pokoknya orang AJI tidak boleh jadi wartawan, mereka boleh kerja di perusahaan pers sebagai tukang sapu," demikian ancam seorang pengurus PWI ketika mengintimidasi seorang pemimpin redaksi yang ketahuan mempekerjakan orang AJI.

Di era pasca-Soeharto ini wartawan bebas mendirikan organisasi, sistem perizinan dicabut dan kebebasan pers relatif terealisasi. Memang sejumlah aturan masih bercokol dan sewaktu-waktu bisa digunakan untuk mencampakkan kembali kebebasan yang ada. Komitmen dan prinsip orang pers sendiri perlu ditingkatkan untuk tidak berkompromi dengan segala bentuk campur tangan politik dalam dunia pers. Kini adalah saatnya jurnalis menunjukkan kualitas profesinya dan independensinya untuk mempraktekkan kebebasan pers.

Jika jaminan terhadap kebebasan pers sudah ada, maka tantangan organisasi jurnalis berikut adalah meningkatkan profesionalitas wartawan serta merapatkan rasa solidaritas di kalangan teman sejawat. Jika kesewenangan negara sudah terhapus, maka lawan organisasi wartawan berikutnya adalah perusahaan tempat wartawan bekerja (baca: pemodal). Bukan rahasia lagi, pers yang menggembar-gemborkan demokrasi ternyata menindas wartawannya. Itu terjadi akibat lemahnya posisi wartawan di depan pemodal.

Kelemahan itu bisa dikurangi dengan membangun sebuah serikat kerja wartawan (trade union) yang solid. Namun, serikat kerja wartawan adalah "barang baru". Karena di Indonesia wartawan lebih dilihat sebagai profesi ketimbang pekerja. Dengan adanya serikat kerja wartawan yang solid dan profesional, wartawan diharapkan bisa menolong dirinya dari berbagai tekanan politis dan ekonomis—sebelum mampu menolong pihak lain.

Sebaiknya antar-organisasi bisa saling bahu-membahu meningkatkan kualitas dan profesionalitas-serta meperjuangkan hak dan kesejahteraan wartawan-anggotanya masing-masing. Memang, membangun solidaritas pekerja akan bisa lebih optimal jika wartawan tidak tercerai berai dalam banyak organisasi. Jika penyatuan organisasi itu (dalam bentuk konfederasi, misalnya) murni dari para wartawan, dan bukan sesuatu yang dipaksakan negara, tentu akan lebih baik.

Namun untuk saat ini, di era transisi, di mana tatanan belum begitu pasti, lebih baik jika berbagai organisasi wartawan berupaya mengembangkan diri masing-masing, untuk mewujudkan idealisasinya. Dan tentu bisa saling menjaga dan mengontrol. Menyatukan wartawan dalam satu organisasi, sekarang ini tidak menguntungkan, terutama jika kecenderungan negara masih ingin mengontrol segala sesuatu, seperti era orde baru. Selamat datang organisasi-organisasi baru wartawan.

■ Penulis adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen

Xpos, No. 39/I, 26 Sept - 2 Okt 1998

Tuduhan Picik Tak Selesaikan Persoalan

Oleh: Dr. H Roeslan Abdulgani

"Combatting corruption is essential to Indonesia's economic recovery. But the country's anti-corruption efforts can only be effecttive if they begin with a credible demonstrated commitment at the highest level. The problems of the present system of corruption developed over many years and it would be naive to believe they can be solved overnight". (Memberantas korupsi adalah sangat penting bagi pulihnya kesehatan ekonomi Indonesia. Tapi ikhtiar anti-korupsi itu hanya dapat efektip, apabila dimulai dengan tindakan nyata dan terpercaya dikalangan paling atas. Persoalan sistim korupsi sekarang ini telah berkembang selama bertahun-tahun. Adalah sangat naif untuk mengharapkan korupsi itu dapat diberantas dalam waktu pendek).

Keterangan Nyonya Katherine Marshall dari Bank Dunia Pusat, di Jakarta Saptu 19 September 1998.

Sekarang muncul keprihatinan yang makin mendalam, baik di luar maupun di dalam negeri, bahwa pelaksanaan reformasi makin terbengkalai. Contoh, KKN yang sudah diakui sebagai salah satu sumber krisis ekonomi kita yang merupakan produk dari krisis moral dan etika di kalangan elit yang berkuasa. Tetapi, dalam kenyataannya pemberantasan benalu itu setengah-setengah dan kurang serius. Hanya kulit-kulitnya saja yang diberi kosmetika.

Pihak Bank Dunia punya keprihatinan sama tentang masalah korupsi ini. Seperti kutipan di atas, maka mereka berpendapat bahwa memberantas korupsi sangat penting sekali bagi pulihnya kesehatan ekonomi Indonesia. Mereka juga berpendapat bahwa ikhtiar anti-korupsi itu hanya dapat efektip, apabila dimulai dengan tindakan nyata dan meyakinkan dikalangan paling atas. Diakui oleh Bank Dunia bahwa usaha pemberantasan korupsi di Indonesia ini tidak mudah, dan tidak dapat diharapkan berhasil dalam waktu cepat, sebab sistem korupsi sekarang ini telah berkembang bertahun-tahun lamanya. Sungguh tidak enak mendengar pendapat Bank Dunia di atas. Namun inilah realita.

Selain itu, berbagai pihak meng-khawatirkan Indonesia akan memasuki periode ketegangan baru. Rezim Habibie sekarang dalam periode paska Soeharto bukan merupakan solusi, tapi pengabdian belaka dari problema lama yang memba-wa Indonesia bertekuk-lutut kepada sistim otoriter, yang menyebabkan tumbuhnya dan meluasnya KKN.

Kita, kini tercatat sebagai negara yang paling parah keadaan ekonominya. Birokrasinya paling tidak bersih. Tangan kuat untuk mengadakan pembersihan tidak ada. Dikuatirkan, aparat kepolisian dan kejaksaan yang sedang mengadakan penyelidikan terhadap pelanggaran pidana dan perdata di bidang perbankan akan ambruk karena kebanyakan beban. Demikian pula dikuwatirkan, bahwa aparatur Kehakiman masih didominasi oleh oknum-oknum zaman Orde Baru, yang belum dapat meningkatkan harkat dirinya sebagai hakim yang bermoral dan beretika tinggi.

Selain itu, pengamat dalam dan luar negeri, terus mengikuti kelanjutan proses Jenderal Prabowo. Juga mengadakan berbagai spekulasi tentang keretakan-keretakan yang nampak remang-remang dalam Kabinet Habibie. Siapa rival Habibie? Bagaimana peran dibelakang layar dari mantan Presiden Soeharto? Bagaimana prospek Golkar, sehubungan dengan banyaknya unsur yang tidak lagi bersedia mendukungnya? Bagaimana prospek pemilu yang dijanjikan itu? Akankah masih penuh dengan intrik dan manipulasi tidak adil dan tidak jujur?

Bagaimana dengan makin membeng-kaknya jumlah parpol baru? Bukankah ini akan menjurus kearah anarki dalam demokrasi kita? Bagaimana dengan gejala des-integrasi di Irian Jaya, di Timtim dan di berbagai daerah perbatasan Tanah Air kita yang tidak menyukai otoriter-over-sentralisme dari elit politik Jakarta? Bagaimana menghadapi gagasan untuk merubah struktur Negara Kesatuan kearah struktur Federasi? Bagaimana situasi interen militer kita? Masih kompakkah? Atau mulai ada tanda-tanda keretakan, sehubungan dengan meningkatnya demonstrasi mahasiswa, buruh dan petani? Bagaimana dengan para Hoakiao kita yang bermodal besar? Apakah eksodus besar-besaran keluar negeri akan terus? Ataukah ada tendensi mereka bersedia kembali? Sungguh banyak persoalan yang kita hadapi bersama.

Di samping itu, kita masih terus bergulat dengan masalah distribusi sembako, dengan makin kurangnya persediaan beras, makin meningkatnya kriminalitas, dan makin maraknya kerusuhan sosial di hampir seluruh wilayah Tanah Air kita. Juga, masih diprihatinkan oleh bayangan-bayangan akan meledaknya kembali demonstrasi-demonstrasi. Makin marak pula tuntutan rakyat untuk mengadakan penyelidikan tentang numpuknya kekayaan pribadi dari mantan Presiden Soeharto, keluarganya serta para kroninya.

Mau tidak mau, semua itu harus kita hadapi dengan jiwa jernih, pikiran tenang dan analisa tajam. Dan dengan penuh kearifan melihat itu semua sebagai cermin aspirasi masyarakat akibat penyelewengan masa orde baru. Jangan sekali-kali kita sampai terperosok ke dalam persepsi sempit dan dangkal, yang akan melahirkan pendapat dungu. Yaitu yang menuduh aspirasi rakyat itu sebagai hasil *"money-politics"*, bayaran kaum perusuh.

Padahal yang menuduh ini biasanya dari kelompok elit berkuasa, yang lihai menjalankan praktek kotor dalam bentuk "money-politics" itu. Dan juga jangan sekali-kali menuduh aspirasi rakyat yang murni itu sebagai bangkitnya bangkai yang sudah lama dimakamkan bersama dalam gerakan kita menghadapi G-30-S/PKI. Tuduhan-tuduhan dangkal, picik dan dungu ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Malahan akan menimbulkan berbagai kerumitan dan ketegangan baru.

Sejarah orde baru menunjukkan dengan jelas, bahwa sumber utama krisis *finek* kita adalah karena model pembangunan ekonomi yang terlalu mengandalkan kepada bantuan dunia barat, yang menumbuhkan ketergantungan kita terhadap IMF, Bank Dunia dan sebagainya. Juga karena watak model pemba-ngunan kita sifatnya terlalu elitis: mengutamakan kemajuan ekonomi hanya kepada konglomerat. Hasilnya, tata ekonomi keropos dan tidak adil. Akibatnya 200 juta rakyat kita harus menanggung beban kekeroposan 200 konglomerat.

Perkembangan sejarah selama orde baru harus menjadi pelajaran untuk mencari jalan perbaikan ke masadepan. Semua penyelewengan harus diakhiri.

Dan inilah dasar dan tujuan gerakan reformasi sekarang. Caranya ialah dengan tindakan-tindakan korektif-nyata, yang sistematis programmatis, dengan aparat yang telah dibersihkan jiwanya dari dosa-dosa lama. Tidak dengan tuduhan murah, bahwa gerakan reformasi yang prinsipil fundamental sebagai hasil *"money politics"*. Dunia mondial global pun dewasa ini sudah menginjak fase baru.

Disadur dan diringkas dari artikel Harian *Waspada*, 25 September 1998

■ Ekonomi

Bisnis Militer Sumber KKN

Sejak jaman kemerdekaan, militer sudah berbisnis. Kebiasaan itu berlangsung hingga sekarang. Praktek bisnis yang tak lepas dari KKN itu membuat negara rugi.

Sudah terbukti, sumber kekacauan terbesar dalam ekonomi adalah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ini terjadi di banyak negara. Dan bukan kebetulan, untuk kasus Indonesia, sumber KKN adalah keterlibatan militer dalam dunia bisnis. Ini sudah terjadi sejak lama dan menjadi makin parah setelah Orde Baru berkuasa.

Kesimpulan ini bukan semata-mata hasil asumsi kosong. Sudah banyak pakar politik ternama yang menulis tentang hal ini. Misalnya Richard Robison ataupun Harold Crouch. Baru-baru ini, tim peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menerbitkan sebuah laporan penelitian yang cukup komprehensif mengenai topik ini. Laporan penelitian yang berjudul "Militer dan Bisnis: Peran ABRI dalam Pembangunan Ekonomi" ini dikerjakan oleh para ilmuwan kondang, antara lain Hermawan Sulistyo, Indria Samego, Ikrar Nusa Bhakti, Nur Iman Subono dan Riza Sihbudi.

Para peneliti ini menilai, keterlibatan militer dalam bisnis, tidak saja melahirkan praktek KKN. Tapi juga berdampak pada munculnya kapitalisme semu, kapitalisme negara, kelas komprador dan kelas menengah "yang dikontrol oleh militer dengan budaya neo-patrimonialnya."

Awal mula keterlibatan militer dalam bisnis, tidak terjadi secara tiba-tiba. Di tahun 50-an awal, para laskar rakyat yang merupakan cikal-bakal ABRI, mencari dana perjuangannya secara mandiri. Salah satunya, memperdagangkan candu untuk ditukarkan dengan senjata. Namun, di saat itu, tujuan berbisnisnya lebih kepada upaya untuk bertahan dari situasi yang menjepit.

Di masa setelah kemerdekaan pun, karena anggaran pemerintah tidak cukup, berbagai kesatuan dalam ABRI meneruskan kegiatan bisnis mereka. Ini pula yang dilakukan Soeharto ketika menjadi Pangdam Diponegoro. Saat itu, ia mulai mengembangkan hubungannya dengan Liem Sioe Liong dan Bob Hasan - yang kemudian berlanjut hingga ia berkuasa.

Ketika Angkatan Darat di bawah Soeharto memulai Orde Baru, praktek bisnis militer pun makin menguat. Tujuannya, bukan lagi sekedar "bertahan", tapi dengan memanfaatkan kekuasaannya memburu keuntungan. Secara sistematis, militer menancapkan kukunya dalam tiga bentuk institusi bisnis, yaitu koperasi, yayasan dan perusahaan-perusahaan negara (BUMN).

Kolusi militer dengan pengusaha golongan Cina pun makin kuat. Terutama, karena sebelumnya Soeharto memiliki pengalaman berbisnis dengan pola demikian. Militer menguntungkan golongan Cina melalui pemberian kontrak, lisensi, kredit, tender dan sebagainya - di samping perlindungan keamanan. Sementara militer mendapat dana tambahan untuk anggaran militer serta untuk kepentingan individual.

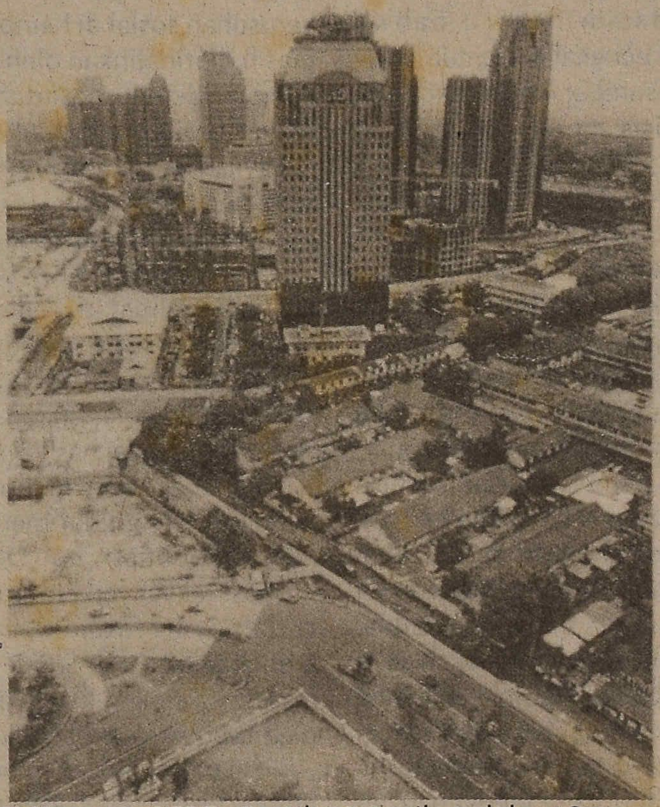

Photo. Istimewa

■ **Kawasan SCBD:** Bernilai 3,2 milyar dolar AS

Kendati ada komitmen pemerintahan Orde Baru untuk melaksanakan liberalisasi ekonomi dengan lembaga-lembaga donor internasional, prosesnya terhambat karena kuatnya kepentingan bisnis militer. Misalnya, dalam proses swastanisasi BUMN. Militer yang dominan dalam penguasaan BUMN setelah proses nasionalisasi berbagai perusahaan Belanda, enggan melepas kendalinya. Sebab, selama ini militer mendapat keuntungan dari situ, baik secara kelembagaan maupun individual. Dari sini pula sumber dana utama kekuatan-kekuatan politik yang berkuasa. Hal ini yang memapankan inefisiensi, khususnya korupsi, di tubuh BUMN.

Beberapa BUMN itu antara lain: Pertamina, PN Timah dan PN Aneka Tambang untuk sektor sumber daya; PT Telkom dan PLN untuk sektor infrastruktur; Bank Indonesia, BNI, BRI, BBD dan BDN untuk sektor perbankan; PT Pusri, Semen Gresik, Semen Padang, Kratakatau Steel untuk sektor manufaktur; dan lain-lain seperti Bulog, PT Perkebunan, PJKA, Garuda, Konstruksi dan Perdagangan.

Peran bisnis militer yang juga menonjol adalah lewat yayasan dan koperasi. Di antaranya, yang terbesar, Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP), Induk Koperasi AD (Inkopad) dan Primer Koperasi AD (Primkopad). Idealnya, bisnis YKEP adalah untuk kesejahteraan prajurit AD. Namun, dalam kenyataannya, YKEP malah lebih dikenal sepak terjangnya pada bisnis murni. Setidaknya, terdapat 26 anak perusahaan YKEP di bawah payung PT Tri Usaha Bhakti (Truba). Di antaranya adalah PT Sempati Air, PT Bank Artha Graha, PT Pondok Indah Padang Golf dan PT Danayasa Arthatama.

Salah satu usaha YKEP yang berukuran besar adalah pembangunan Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (*Sudirman Central Business District*, SCBD) bernilai 3,2 milyar dolar AS - yang sempat menghebohkan karena kasus penggusuran warga tanpa ganti rugi. Proyek ini melibatkan Jenderal TNI Edi Sudradjat dan Mayor Jenderal TNI TB Silalahi bekerjasama dengan pengusaha Cina, Tomy Winata. Usaha lainnya, PT International Timber Corporation Indonesia (ITCI) bekerja sama dengan Bob Hasan dan Bambang Trihatmodjo.

Sementara Inkopad, terlibat dalam berbagai bisnis pariwisata. Seperti Kartika Plaza Hotel dan Orchid Palace Hotel. Pasukan elit Kopassus pun berkiprah lewat Yayasan Kesejahteraan Korps Baret Merah (Kobame). Bidang yang dimasuki antara lain, bisnis angkutan penyeberangan, serta merambah ke bidang perkayuan di Kalimantan dan pengelolaan *supermarket*.

Besarnya kerajaan bisnis militer, berarti besar pula kepentingan militer untuk mempertahankan status quo - dengan represi sekalipun. Kendati pola bisnis mereka yang berbau KKN justru membebani negara. BUMN banyak yang merugi, usaha swasta banyak terlilit utang. Semuanya sudah terungkap. Kiranya, ini mesti jadi pelajaran penting supaya tak terulang di masa mendatang: Militer tidak boleh berbisnis - sebagaimana PP No.6 Tahun 1974. Untuk bisa begitu, militer tidak boleh berpolitik. ■

Tikus-tikus Mandi Minyak

Monopoli distribusi minyak goreng kini di tangan KDI. Para pengurusnya berkantor di Bulog. Anak Adi Sasono jadi makelar DO.

Diam-diam, ternyata monopoli minyak goreng sudah dialihkan dari Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) ke Koperasi Distribusi Indonesia (KDI). Lho, binatang apalagi ini? Koperasi ini memang tak dikenal. Mungkin juga tak banyak kegiatannya. Nama KDI muncul bersamaan dengan nama Inkoppas, koperasi yang juga sama sekali tak dikenal masyarakat luas.

Nah, KDI, koperasi yang muncul namanya ketika rame-rame distribusi minyak goreng diberikan kepada koperasi ini diketuai Dewi Motik Pramono, seorang pengusaha yang besar di era Orde Soeharto. Adi Sasono, Menteri Koperasi, memberi tugas KDI untuk menstabilkan harga minyak goreng. Tentu, tugas ini bukan hanya sekedar tugas, karena ada embel-embelnya yang namanya keuntungan. Jadi tugas KDI, tak beda dengan Inkoppas yang dulu gagal menyetabilkan harga minyak goreng, juga mengambilalih sebagian tugas Badan Urusan Logistik.

Namun, agar berbeda dengan Inkoppas, kali ini KDI diberi wewenang yang lebih besar. Seluruh produk minyak goreng PT Perkebunan Nusantara akan dipasok ke KDI. Di KDI ini, selain ada Dewi Motik dan pula Nurdin Halid, anggota DPR-RI yang tengah disidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, karena dituduh korup di Pusat Koperasi KUD Hasanuddin, Ujungpangdang yang dipimpinnya.

Melalui Bulog, KDI juga diberi modal kerja sebesar Rp 600 miliar yang diambilkan dari dana pajak ekspor crude oil palm. Sudah diberi modal, diberi monopoli distribusi, KDI belakangan juga minta ruang kantor di markas Bulog, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. "Mereka sudah berkantor di sini," ujar sebuah sumber.

Terang saja, orang-orang Bulog jengkel dengan tingkah KDI, yang lebih over acting dibanding Inkoppas. Bulog yang dulu diuntungkan dari monopoli distribusi komoditas ini, nampaknya akan lebih terancam nasibnya. KDI memang akan memetik keuntungan yang luar biasa besar dengan monopoli ini. Sumber di Bulog mengatakan KDI akan mengambil keuntungan Rp 50 hingga Rp 100 tiap kilogramnya. Kebutuhan minyak goreng nasional mencapai tujuh ribu ton sehari dan untuk DKI Jakarta saja tiap hari disalurkan lima ratus ton. Coba kita hitung. Untuk peredaran di Jakarta, KDI akan memperoleh untung Rp 25 juta hingga Rp 50 juta sehari. Akan halnya untuk peredaran nasional, KDI akan memetik untung Rp 350 juta hingga Rp 700 juta sehari. Berapa keuntungan KDI sebulannya? Silakan hitung sendiri.

Nah, semudah apa KDI memperoleh proyek yang sedemikian menggiurkan? Ini yang menimbulkan banyak pertanyaan. Tentu saja, ini karena peran Adi Sasono yang memberi rekomendasi kepada Presiden agar koperasi yang dipimpin Dewi Motik dan Nurdin Halid ini diberi hak istimewa. Pemberian monopoli ini bukannya tak lepas dari kritik. Imam Churmen, misalnya, seorang pengamat masalah pertanian tak setuju, KDI diberi monopoli ini. "Sebaiknya distribusi minyak goreng dilepaskan ke mekanisme pasar saja," ujarnya.

Bagi Imam, pemberian monopoli kepada KDI ini tak efektif. Ia menyoalkan misalnya, bagaimana nasib para pelanggan minyak goreng Inkoppas dan para distributor minyak goreng yang memiliki pengalaman. KDI sendiri bukanlah koperasi yang berpengalaman menyalurkan minyak goreng. Tangki dan depo minyak goreng saja mereka tak punya. Lantas? "KDI akan menggunakan tangki-tangki dan depo-depo Inkoppas dan Bulog," ujar sebuah sumber Bulog.

Jadi, cara-cara yang ditempuh KDI tak ubahnya dengan bisnis-bisnis percaloan anak-anak Soeharto dan para pejabat tinggi lainnya di zaman Orde Lama, yang menggunakan pola premanisme seperti ini. Yang rugi ya negara. Harus menyuntik dana Rp 600 miliar dengan bunga yang sangat rendah, jauh dari bunga bank kini menjulang setinggi langit.

Tak jelas benar bagaimana KDI memperoleh proyek ini. Tak ada tender, tak ada pengumuman resmi pemerintah, seperti ketika Adi Sasono dulu mengumumkan bahwa Inkoppas ditunjuk jadi penyalur tunggal. Tiba-tiba saja, secara diam-diam KDI mengambilalih peran Inkoppas. Seperti penunjukan Inkoppas, tak ada tender dalam penunjukkan KDI ini.

Memang ada desas-desus, Adi Sasono bermain-main dengan Dewi Motik, mengeduk keuntungan dari proyek ini. Kalau KDI bisa untuk ratusan juta sehari atau puluhan miliar sebulan, apakah Adi Sasono tak kecipratan?

Kalau tidak, Adi mungkin jelmaan malaikat. Kalau bukan, pastilah beberapa miliar rupiah akan parkir di rekening pribadi Adi Sasono dan, jangan lupa Rahardi Ramelan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, akan kebagian karena amat mendukung KDI.

Anak Adi Sasono kabarnya juga minta DO dari KDI, tapi tidak untuk menyalurkan minyak. Ia jual lagi DO itu ke pedagang dengan memungut untung Rp 200 per kilo gram.

Licik-licikan di proyek-proyek pemerintah, nampaknya akan terus terjadi pada pemerintahan Habibie. Kalau Adi Sasono mengaku hanya ingin mengurusi sembako, memang ada untungnya. Ketimbang *ngurusi* demo-demo tandingan yang makan hati.■

■ **Antri Minyak:** Ajang bisnis di tengah kesusahan rakyat

Ahmad Sahal, Departemen Litbang PAN

Sebagai Muslim, Saya Malu Baca Spanduk Itu

Aksi Forum Kota beberapa hari lalu kini dibalas dengan mengangkat sentimen Islam dan anti-komunis. Di belakang aksi-aksi gelar spanduk itu, ABRI telah menyusun strategi untuk mengadu domba kekuatan sipil. Bila terjadi konflik sipil yang berujung pada kekerasan (dan itu bisa direkayasa dengan mudah oleh pasukan Operasi Khusus/Opsus), maka ABRI akan menampilkan diri sebagai penyelamat dengan alasan untuk mengatasi instabilitas. Tapi strategi itu, meski berpeluang memecah belah agaknya sulit terlaksana. Umat Islam tidak bisa dibodohi dengan cara-cara lama Opsusnya Ali Moertopo. Berikut wawancara *Xpos* dengan intelektual muda Islam, **Ahmad Sahal**, yang kini bergabung dalam Departemen Litbang Partai Amanat Nasional (PAN):

Bagaimana pendapat Anda mengenai spanduk yang terpampang di Jabotabek belakangan ini?

Spanduk-spanduk yang bertebaran di Jakarta yang memperingatkan bahaya kebangkitan kembali komunisme ini kan pola dan bahasa rezim Soeharto untuk mendistrosikan kenyataan. Dan itu sangat menghina logika kita. Kita semua tahu krisis bangsa dan negara ini kan gara-gara Soeharto. Mosok tiba-tiba kebangkitan komunisme yang dijadikan tersangka. Padahal yang rajin "nakut-nakutin" dengan hantu bahaya komunis itu kan Soeharto.

Photo: Istimewa

Islam dipolitisir?

Itulah repotnya. Spanduk-spanduk tersebut hendak mengeksploitasi "memori kolektif" umat Islam Indonesia yang memang pernah terancam oleh PKI. Waktu zaman demokrasi terpimpin, saat PKI sangat kuat kan menakutkan NU dan Masyumi. Dan PKI diyakini sebagai bahaya laten yang selalu menunggu kesempatan untuk bangkit lagi.

Eksploitasi semacam itu menurut saya tahayul politik. Taruhlah pemasang spanduk percaya dengan isi spanduk, berarti mereka hidup dalam paranoia dan fobia yang kelewatan. Dulu PKI dan komunisme kuat kan ada penjelasan sejarahnya. Sekarang komunisme kan sudah bangkrut dan pada tingkat dunia kalah oleh demokrasi. Jadi kalau ada yang ketakutan berlebihan, itu secara psikis sakit karena ia takut dengan khayalan politiknya sendiri. Orang yang percaya ada konspirasi kan berarti masih percaya tahayul. Sedangkan kalau pemasang spanduknya tidak percaya isi spanduknya dan memakai spanduk itu semata untuk manuver politik, berarti secara tidak langsung menyokong kelanggengan rezim Soeharto. Kenapa? karena spanduk-spanduk itu menutup-nutupi atau melupakan bahwa rezim Seoharto lah dalang segala bencana. Bahkan kalau mau diukur siapa yang paling merugikan Islam, ya Soeharto. Di awal Orde Baru, Soeharto memarjinalkan Islam. Di akhir Orde Baru, Soeharto memanfaatkan Islam sebagai kartu politiknya, sampai-sampai sebagian kalangan Islam terkecoh menganggap Soeharto tobat, sudah bulan madu dengan Islam. Sekarang terbukti semua bahwa Soeharto tidak lebih dari, meminjam istilah Amien Rais, Soeharto adalah Fir'aun yang merugikan Indonesia dan Islam. Sayangnya, masih ada kalangan Islam yang terkecoh dan tidak tahu siapa yang paling merugikan islam. Spanduk-spanduk itu,yang berpola bahasa Orde Baru, menunjukkan mereka masih terkecoh. Seperti membaca realitas baru dengan peta usang yang menyesatkan.

Apa substansi persoalannya?

Persoalannya *kan* pemasang spanduk hendak membela Habibie dan ABRI, tapi dengan cara-cara yang tidak sehat, yakni mempolitisir Islam. Kasihan Islamnya sih. Yang dibidik kan aksi-aksi Forkot yang meneriakkan reformasi total dan mengusulkan semacam komite rakyat. Saya sendiri tidak setuju dengan usul Forkot, karena komite rakyat itu problematis. Dan akan memunculkan lagi problem legitimasi. Meskipun saya menghormati idealisme reformasi total yang mendambakan rupture (perpatahan, red) antara masa kini dengan masa Orde Baru yang zalim. Karena itulah mereka menolak Habibie karena Habibie kan memang kelanjutan Soeharto belaka. Tapi Forkot juga harus waspada bahwa pada titik inilah perjuangan mereka bisa kemasukan para penumpang gelap (Soehartois) yang sebenarnya anti reformasi tapi mendompleng dan mengotori perjuangan reformasi total dari Forkot. Forkot harus hati-hati penumpang gelap bisa "membajak" agenda Forkot.

Jadi, salah besar kalau Forkot diidentifikasi sebagai komunis. Salah besar.

Sebagai orang Islam, komentar anda?

Spanduk-spanduk itu menurut saya *sih* banyak mudaratnya. Itu kan bisa membawa kita pada adu kekuatan dalam politik yang tidak lagi menomorsatukan rasionalitas. Adu kekuatan semacam ini bisa membawa disintegrasi dan anarki. Dan anarki, seperti kata Bung Hatta, akan memunculkan tiran baru, memunculkan Soeharto baru, yang mengklaim sebagai penyelamat. Kalau sampai anarki berlarut-larut, ya militer yang akhirnya akan mengambil keuntungan. Dan selamat tinggal reformasi.

Selain itu, tuduhan di spanduk itu kan fitnah yang keji dan dilarang agama. Islam mengajarkan kalau kita tidak suka dengan pihak lain, bukan berarti boleh memfitnahnya. Saya sendiri tidak setuju ide komite rakyat dari Forkot karena memang problematis dari segi legitimasinya. Saya lebih setuju pemilu betulan yang dipercepat. Tapi saya keberatan kalau Forkot dicap komunis. Itu sama sekali tidak adil. Padahal Al-Qur'an menyatakan: "Janganlah kebencianmu pada suatu kaum membuat kamu bersikap tidak adil kepada mereka." Jadi spanduk-spanduk itu meski mengatasnamakan Islam sebenarnya sama sekali tidak sesuai dengan etika Al-Qur'an.

Saya berharap tokoh-tokoh Islam moderat, semacam Cak Nur, Amien Rais, Gus Dur, dan Kang Jalal melawan spanduk-spanduk itu. Terus terang sebagai orang Islam saya malu membaca spanduk itu.

Menurut anda, seberapa besar kekuatan mereka yang menggelar spanduk itu?

Mereka, Islam garis keras. Mereka sebenarnya bukan *mainstream* dalam Islam Indonesia. Katakan saja mereka ini minoritas vokal. *Mainstream* Islam Indonesia saya yakin punya sikap *tasamuh* (toleran) dan tidak gampang mencap dan menghakimi.

ang PAN

uk Itu

tu, yang berpola
rkecoh. Seperti
menyesatkan.

dak membela
lak sehat, yakni
ibidik kan aksi-
n mengusulkan
ju dengan usul
tis. Dan akan
eskipun saya
dambakan rup-
masa Orde Baru
Habibie karena
ka. Tapi Forkot
uangan mereka
ehartois) yang
dan mengotori
harus hati-hati
kot.
r kalau Forkot
agai komunis.

slam, komentar

uk itu menurut
daratnya. Itu kan
ita pada adu
litik yang tidak
an rasionalitas.
macam ini bisa
rasi dan anarki.
kata Bung Hatta,
an tiran baru,
arto baru, yang
anarki berlarut-
euntungan. Dan

h yang keji dan
dak suka dengan
aya sendiri tidak
ang problematis
lu betulan yang
cap komunis. Itu
akan: "Janganlah
u bersikap tidak
duk itu meski
kali tidak sesuai

t, semacam Cak
elawan spanduk-
saya malu mem-

ereka yang meng-

nya bukan *main-*
reka ini minoritas
kin punya sikap
dan menghakimi.

SEKILAS TENTANG

Xpos

Buletin mingguan ini terbit pertama kali 3 Januari 1998. Karena kebutuhan akan informasi yang bebas. *Xpos* dikelola oleh sejumlah wartawan profesional, yang tergabung dalam Komunitas Informasi Terbuka, berkantor pusat di London.

Seiring dengan informasi, buletin yang tadinya dikonsumsi terbatas oleh aktivis pergerakan demokrasi ini, sekarang bisa dibaca masyarakat luas. Buletin ini resmi adanya. Sehingga para distributor, pengecer dan pelanggan tidak perlu khawatir membeli atau memiliki buletin ini.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi :

KOMUNITAS INFORMASI TERBUKA
PO Box 22202, London SE5 8 WU, United Kingdom
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp